



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH

RKPD

RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH



**KABUPATEN
BANGKA TENGAH
TAHUN 2023**



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun, yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 serta mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 14 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 01 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
17. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan KUA APBD dan PPAS.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 untuk:
 - a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja; dan
- c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Ruang Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaianya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023.

- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian kebijakan, dalam dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian kebijakan, dalam dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2023 dan program strategis provinsi Tahun 2023;
 - c. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2023; dan
 - d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2023.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2023 menyusun RAD PUG mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja RPJMD, yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Renstra PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

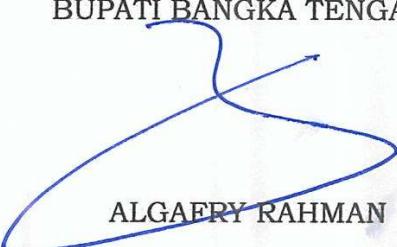
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1189

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan kehendaknya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dilakukan karena partisipasi masyarakat.

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun dan sebagai dokumen resmi rencana daerah. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 mempunyai fungsi penting bagi perencanaan di Kabupaten Bangka Tengah

Kami memahami bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan masukan untuk penyempurnaan laporan sehingga dapat menghasilkan keluaran (output) sebagaimana diharapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-4
1.3 Hubungan antar Dokumen	1-8
1.4 Maksud Dan Tujuan	1-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	1-12
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	2-1
2.2 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ...	2-201
2.3 Permasalahan Pembangunan Darah	2-263
2.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang telah diverifikasi	2-307
2.5 Inovasi Daerah.....	2-323
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	3-1
3.2 Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19	3-12
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-14
BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	4-1
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan.....	4-7
4.3 Prioritas Pembangunan.....	4-220

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5-1
5.1 Program Prioritas Dan Pagu Indikatif	5-1
5.2 Usulan Hasil Musrenbang	5-16
5.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kabupaten Bangka Tengah.....	5-17
5.4 Rekomendasi Dan Tindaklanjut Dprd Atas Lkpj Bupati Tahun Anggaran	2021
	5-30
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	6-1
BAB 7 PENUTUP	7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan	II-3
Tabel 2.2	Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan .	II-7
Tabel 2.3	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG	II-10
Tabel 2.4	Sebaran Lahan Terbangun	II-13
Tabel 2.5	Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya	II-15
Tabel 2.6	Sebaran Kawasan Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B).....	II-20
Tabel 2.7	Sebaran Rencana Sub Kawasan Perkebunan	II-20
Tabel 2.8	Rencana Pengembangan Perikanan Budidaya....	II-22
Tabel II.9	Rencana Kawasan Peruntukan Lindung	II-23
Tabel II.10	Sebaran Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung.....	II-24
Tabel II.11	Sebaran Sub Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota.	II-27
Tabel II.12	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	II-28
Tabel II.13	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	II-29
Tabel II.14	Sex Ratio	II-29
Tabel II.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ...	II-29
Tabel II.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan.....	II-30
Tabel II.17	Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan	II-22
Tabel II.18	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	II-32
Tabel II.19	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-33
Tabel II.20	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....	II-34
Tabel II.21	Nilai Inflasi Rata-Rata	II-37

Tabel II.22	Indikator Penyusunan IPM	II-39
Tabel II.24	Jumlah Balita Gizi Buruk	II-43
Tabel II.25	Cakupan Desa Siaga Aktif	II-44
Tabel II.26	Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama.....	II-45
Tabel II.23	TPT dan TPAK	II-46
Tabel II.24	Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	II-47
Tabel II.29	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	II-47
Tabel II.29	Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	II-48
Tabel II.31	Persentase Penduduk Miskin	II-49
Tabel II.32	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah).....	II-52
Tabel II.33	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah).....	II-53
Tabel II.34	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha.....	II-55
Tabel II.35	Jenis Kesenian	II-56
Tabel II.36	Cagar Budaya*	II-57
Tabel II.37	Jumlah Medali dari Kejuaran Tingkat Provinsi dan Nasional.....	II-58
Tabel II.38	Sarana dan Prasarana Olahraga.....	II-58
Tabel II.39	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2018	II-62
Tabel II.40	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2021	II-65
Tabel II.25	Jumlah Siswa PAUD Menurut Kecamatan.....	II-66
Tabel II.26	Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan.....	II-67
Tabel II.27	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-68
Tabel II.28	Perkembangan APK.....	II-69

Tabel II.29	Perkembangan APM	II-70
Tabel II.30	Perkembangan APS	II-71
Tabel II.31	Perkembangan APS	II-72
Tabel II.32	Perkembangan AL	II-73
Tabel II.33	Perkembangan AM	II-74
Tabel II.34	Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Baik	II-75
Tabel II.35	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	II-76
Tabel II.36	Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar	II-77
Tabel II.37	Rasio Guru Siswa per Kelas	II-78
Tabel II.38	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-78
Tabel II.39	Guru yang Bersertifikasi.....	II-79
Tabel II.56	Realisasi SPM Bidang Kesehatan	II-80
Tabel II.57	Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita dan Neonatal	II-81
Tabel II.58	Rasio Posyandu per 1000 Balita	II-83
Tabel II.59	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1000 Penduduk.....	II-83
Tabel II.60	Cakupan Puskesmas.....	II-84
Tabel II.61	Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk.....	II-84
Tabel II.40	Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk.....	II-85
Tabel II.63	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani ..	II-86
Tabel II.41	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.	II-86
Tabel II.65	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	II-87
Tabel II.66	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	II-87
Tabel II.67	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular.....	II-88

Tabel II.42	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	II-89
Tabel II.69	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lainnya	II-89
Tabel II.43	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-91
Tabel II.44	Realisasi Capaian Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	II-92
Tabel II.72	Realisasi Capaian Rumah Tangga yang mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak	II-94
Tabel II.73	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum	II-95
Tabel II.74	Target, Realisasi dan Capaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021	II-97
Tabel II.45	Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang.....	II-98
Tabel II.76	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Tahun 2021.....	II-98
Tabel II.77	Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman.....	II-100
Tabel II.78	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-101
Tabel II.79	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman...II-102	
Tabel II.46	Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas	II-103
Tabel II.47	Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	II-104
Tabel II.82	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	II-105
Tabel II.48	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial	II-107
Tabel II.84	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-108
Tabel II.85	Pencari Kerja yang Ditempatkan	II-110
Tabel II.49	Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	II-110

Tabel II.87	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II -111
Tabel II.88	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II -113
Tabel II.89	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.....	II -113
Tabel II.90	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	II -114
Tabel II.91	Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	II -115
Tabel II.92	Ketersediaan Pangan.....	II -115
Tabel II.93	Ketersediaan Energi dan Protein.....	II -116
Tabel II.94	Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk	II -116
Tabel II.95	Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk	II -117
Tabel II.50	Luas Lahan Bersertifikat.....	II -119
Tabel II.97	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II -120
Tabel II.98	Pengelolaan Sampah Secara Controlled Landfill	II -121
Tabel II.99	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	II -122
Tabel II.100	Kepemilikan KTP	II -123
Tabel II.51	Kepemilikan Akta Kelahiran	II -123
Tabel II.102	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II -123
Tabel II.103	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II -125
Tabel II.104	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II -126
Tabel II.105	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II -127
Tabel II.106	Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Barang menggunakan Angkutan Udara.....	II -128

Tabel II.107	Jumlah BTS (Base Transceiver Station).....	II -129
Tabel II.108	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	II -130
Tabel II.109	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal	II -131
Tabel II.110	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga.....	II -132
Tabel II.52	Indikator Urusan Statistik	II -132
Tabel II.53	Indikator Urusan Persandian.....	II -134
Tabel II.54	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan	II -135
Tabel II.55	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan.....	II -136
Tabel II.115	Capaian Indikator Bidang Kearsipan.....	II -137
Tabel II.116	Capaian Indikator Bidang Pariwisata	II -138
Tabel II.56	Potensi Obyek Wisata	II -139
Tabel II.57	Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian	II -140
Tabel II.58	Luas Kawasan Hutan (ha)	II -147
Tabel II.59	Jumlah Pasar	II -148
Tabel II.121	Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan	II -149
Tabel II.60	Capaian Indikator Bidang Perindustrian.....	II -150
Tabel II.123	Capaian Kinerja Urusan Perikanan.....	II -151
Tabel II.124	Rasio PAD terhadap APBD	II -153
Tabel II.125	Nilai SAKIP	II -155
Tabel II.126	Indikator Kinerja DPRD	II -156
Tabel II.61	Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	II -157
Tabel II.62	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah.....	II -158
Tabel II.129	Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian.....	II -159

Tabel II.130	Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan	II -160
Tabel II.63	Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan.....	II -161
Tabel II.64	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan..	II -163
Tabel II.65	Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Inspektorat	II -166
Tabel II.134	Perkembangan Indikator Urusan Kewilayahana ...	II -167
Tabel II.66	Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II -168
Tabel II.136	PDRB Perkapita ADHB	II -169
Tabel II.137	PDRB Perkapita ADHK	II -170
Tabel II.138	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	II - 171
Tabel II.139	Nilai Tukar Petani	II -173
Tabel II.140	Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	II -176
Tabel II.141	Jumlah Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	II -177
Tabel II.142	Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk.....	II -178
Tabel II.67	Wilayah Produktif.....	II -183
Tabel II.144	Wilayah Genangan dan Perkiraan Luas Genangan Pada Area Terbangun.....	II -185
Tabel II.68	Lokasi Kelurahan/Desa Rawan Air.....	II -187
Tabel II.69	Luas Kawasan Perkotaan	II -187
Tabel II.147	Akses Air Minum berdasarkan Karakteristik.....	II -190
Tabel II.70	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Bersih.....	II -191
Tabel II.71	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Sumber Utama Penerangan menurut Karakteristik	II -192

Tabel II.72	Pengadaan Listrik oleh PLN berdasarkan Jumlah Desa/kelurahan dan Pelanggan Rumah Tangga	II -193
Tabel II.151	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2021.....	II -194
Tabel II.152	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2021	II -194
Tabel II.73	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Kuintil Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2021.....	II -195
Tabel II.154	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon.....	II -195
Tabel II.155	Angka Kriminalitas	II -196
Tabel II.74	Jumlah Demonstrasi.....	II -197
Tabel II.75	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	II -198
Tabel II.158	Jumlah Desa Maju dan Desa Berkembang	II -128
Tabel II.159	Rasio lulusan S1/S2/S3	II -199
Tabel II.76	Rasio Ketergantungan.....	II -200
Tabel II.161	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2021	II -203
Tabel II.162	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.....	II -206

Tabel II.163	Capaian Indikator SDG's Kabupaten Bangka Tengah	II -230
Tabel II.164	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah	II -259
Tabel II. 166	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023	II -307
Tabel II.167	Inovasi yang Mengikuti Lomba Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021	II -325
Tabel II.168.	Indeks Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	II-330
Tabel III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)	III -6
Tabel III.2	PDRB Perkapita Tahun 2018-2021 dan Proyeksi 202II-2023.....	III -7
Tabel. III.3	Nilai inflasi 2018-2021 dan Proyeksi Inflasi 202II-2023.....	III -9
Tabel. III.4	Target Indikator Makro Pembangunan Ekonomi dan IPM	III -10
Tabel. III.5	Dukungan Program Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	III -13
Tabel. III.6	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 s.d tahun 2021	III -14
Tabel. III.7	Realisasi Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 s.d tahun 2023	III -15
Tabel III.8	Struktur Pendapatan Daerah.....	III -16
Tabel III.9	Struktur Belanja Daerah	III -19
Tabel. III.10	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2020	III -22

Tabel. III.11	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2023	III -23
Tabel III.12	Struktur Pembiayaan Daerah.....	III -24
Tabel. III.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d Tahun 2023	III-26
Tabel IV.1.	Keselarasan antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	IV -5
Tabel IV.2.	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	IV -6
Tabel IV.3.	Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023	IV -7
Tabel IV.4.	Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022	IV -10
Tabel IV.5.	Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023	IV -11
Tabel IV.6.	Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, Prioritas Daerah Tahun 2023	IV -11
Tabel IV.7	Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah	IV -14
Tabel IV.8	Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi RKPD 2023 terkait dengan RPJMD 2021-2026.....	IV -16
Tabel IV.9	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).....	IV -19
Tabel IV.10	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV -24
Tabel IV.11.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023	IV -69

Tabel IV.12.	Tipologi dan Produk Unggulan Desa di Kecamatan Namang	IV -223
Tabel IV.13.	Potensi Desa di Kecamatan Namang	IV-223
Tabel V.1.	Pagu Indikatif Belanja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VI -3
Tabel V.2.	Pagu Indikatif Belanja per Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023..	VI -4
Tabel V.3.	Pagu Indikatif Belanja Tahun 2023.....	VI -14
Tabel V.3	Jumlah Usulan Hasil Musrenbang Desa yang diinput ke dalam SIPD.....	VI -17
Tabel V.5.	Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023	VI -18
Tabel VI.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Visi “Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul” (Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021)	VI -2
Tabel VI.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	VI-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Administrasi	II-2
Gambar II.2	Peta Geologi	II-6
Gambar II.3	Peta Sebaran Kolong.....	II-9
Gambar II.4	Grafik Curah Hujan (mm)	II-11
Gambar II.5	Grafik Temperatur Udara (°C).....	II-11
Gambar II.6	Grafik Kelembaban Udara Rata-Rata (%).....	II-12
Gambar II.7	Peta Penggunaan Lahan.....	II-14
Gambar II.8	Peta Rencana Pola Ruang	II-16
Gambar II.9	Peta Sub Kawasan Rencana Pola Ruang	II-17
Gambar II.10	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk	II-31
Gambar II.11	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	II-36
Gambar II.12	Grafik Nilai Indeks Gini	II-38
Gambar II.13	Grafik IPM Kabupaten Bangka Tengah	II-39
Gambar II.16	Grafik Harapan Lama Sekolah	II-40
Gambar II.14	Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	II-41
Gambar II.18	Grafik Angka Harapan Hidup (AHH)	II-42
Gambar II.19	Grafik Penduduk Miskin.....	II-50
Gambar II.20	Grafik Skor PPH.....	II-50
Gambar II.21	Grafik PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	II-54

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dilakukan karena partisipasi masyarakat.

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun dan sebagai dokumen resmi rencana daerah. RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 mempunyai fungsi penting bagi perencanaan di Kabupaten Bangka Tengah, karena mempunyai berbagai nilai strategis, antara lain:

1. Media untuk mengimplementasikan pelaksanaan RPJMD tiap tahun selama lima tahun
2. Menjadi pedoman pembangunan selama 1(satu) tahun.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Sebagai alat atau instrument pengendalian kinerja bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda
5. Sebagai instrument mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati selama 1(satu) tahun
6. Sebagai ruang bagi anggota DPRD dalam mengusulkan pokok-pokok pikiran DPRD
7. Sebagai pedoman penilaian keberhasilan pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Menjadi pedoman penyusunan dokumen anggaran daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan daerah, disusun berdasarkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Pada tahun 2023, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan seiring dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan meningkatnya angka kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik seiring menurunnya kasus Covid-19 dan berangsur meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan bergeraknya sector UMKM untuk pemulihan ekonomi. Sektor UMKM masih menjadi fokus untuk pemulihan ekonomi karena memberikan dampak yang positif untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Hasil pertemuan tahunan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membahas terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi pada akhir tahun 2021 yang lalu, mengungkapkan terdapat 6(enam) hal yang harus dilakukan dalam mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu:

1. sinergisitas untuk mendorong terjadinya *multiplier effect* dari 1 (satu) sektor ikut membantu sektor lain untuk tumbuh;
2. mendorong inovasi untuk menciptakan lapangan kerja;
3. mendorong percepatan vaksinasi, menciptakan *herd immunity*, dan meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol Covid-19;
4. peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan laju kemiskinan,
5. mendorong pembangunan infrastruktur,;
6. mendorong pengembangan sektor prioritas yang mampu memberikan nilai tambah.

Implikasi dari kebijakan Pemilu serentak perlu direspon dalam dokumen RKPD Tahun 2023, karena apabila melihat dari tahapan yang direncanakan sudah dimulai tahun 2023. Kebutuhan penyelenggaraan Pemilu serentak yang menjadi kewenangan daerah perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2023.

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1(satu) tahun, dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031. Penyusunan RKPD juga berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui proses dan tahapan. Tahapan yang telah dilakukan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Perencanaan ini dalam prosesnya menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top down*.

- Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Pendekatan ini

dilakukan dengan berbagai data dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh perangkat daerah serta kajian ilmiah yang dilakukan para akademisi untuk perencanaan pembangunan.

- Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.
- Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang mengakomodir aspirasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui konsultasi publik, menitipkan aspirasi pada anggota dewan melalui reses, dengar pendapat atau kegiatan sejenis yang dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran dewan, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum diskusi perencanaan lainnya. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, dengan maksud untuk menjaring aspirasi dan menumbuh kembangkan rasa memiliki.
- Pendekatan *bottom up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme forum perangkat daerah maupun musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, provinsi, dan nasional.
- Pendekatan *top down* yaitu pendekatan yang menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKP nasional dan RKPD provinsi.

Selain pendekatan-pendekatan diatas penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan melalui pendekatan:

- 1) tematik-holistik, bahwa perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Dari isu strategis dirumuskan prioritas yang disusun menjadi tematik pembangunan, Tematik program pembangunan ini selanjutnya dijabarkan kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan;
- 2) integratif, bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan dilihat dari peran perangkat daerah dan para *stakeholder* / pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan sumber pendanaan;

3) spasial, bahwa perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Program pembangunan seacar holistik dijabarkan dalam satu kesatuan wilayah yang sesuai dengan isu strategis dalam tematik pembangunan dan memperhatikan keterkaitan antar wilayah lainnya.

Untuk mengimplementasikan pendekatan perencanaan tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan sebagaimana berikut:

- Forum Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), melalui forum ini dilakukan diskusi tematik pembangunan Kabupaten Bangka Tengah yang diikuti perangkat daerah dan *stakeholder* untuk menyamakan persepsi dan berkolaborasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh beberapa Perangkat Daerah di tahun 2023 agar tujuan pembangunan tercapai lebih baik, serta untuk menetukan tema pembangunan berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang disepakati dalam forum.
- Kolaborasi pendanaan pembangunan, melalui forum CSR yang melibatkan pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan di Bangka Tengah.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tata Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2023;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297).

35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD, dan (5) Renja-PD.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJPN 2005–2025 dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan

PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) tahun 2023. Kedua dokumen ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

1. Hubungan RKPD dengan RKP Tahun 2023

Keterkaitan RKPD Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2023.

2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025”**. Visi tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yaitu **“Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan melalui Pemanfaatan Sumberdaya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”** dengan 7(tujuh) prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Demokrasi
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Lingkungan

4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia
6. Pembangunan Wilayah
7. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Fokus pembangunannya pada tahun 2023 adalah: penguatan dan peningkatan perekonomian daerah serta pengembangan digitalisasi ekonomi, penguatan kapasitas dan kualitas SDM dan birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

3. Hubungan RKPD dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, maka pembangunan daerah Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 diarahkan pada upaya pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkret untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya, seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD ini dan penetapan tema RKP 2023 serta RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintegrasikan tema RKPD 2023 menjadi: **“Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Pelayanan Dasar menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan”**

4. Hubungan RKPD dengan RTRW Kabupaten Bangka Tengah

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

5. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan KUA – PPAS Tahun 2023

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2023, hasil penelaahan reses DPRD, Musrenbang, dan Forum Perangkat Daerah serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam proses penyusunan rancangan APBD Tahun 2022 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Bangka Tengah dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas serta program kegiatan tahun 2023;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan

6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika penyajian RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas RKPD dan proses penyusunan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen yang menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta kaitannya dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD serta sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dan kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berisikan uraian tentang program-program yang memerlukan prioritas berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam dokumen

RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bangka Tengah merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bangka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

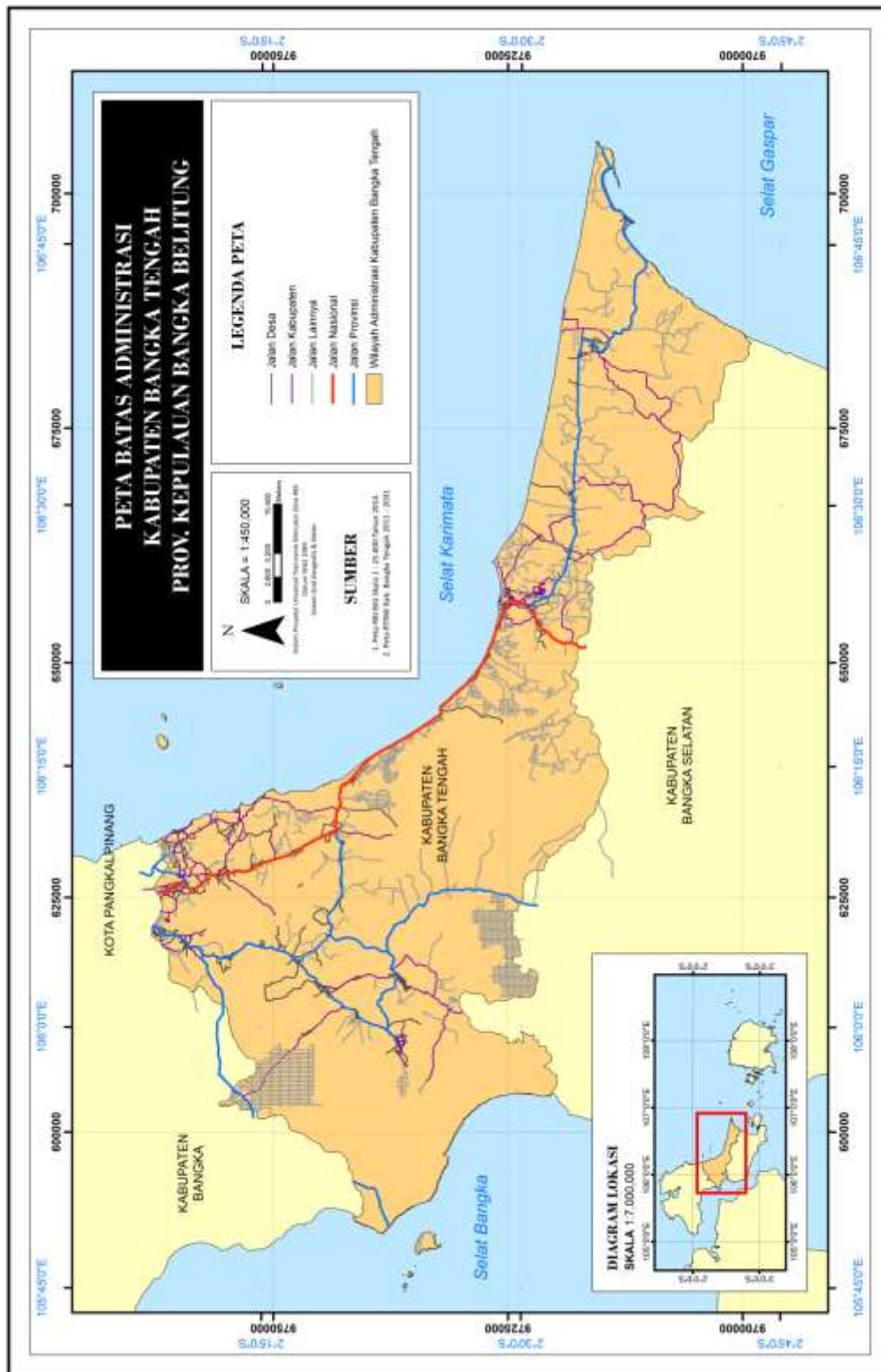
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Sub bab ini memuat tentang luas dan batas wilayah administrasi; letak dan kondisi geografis; topografi; geologi; hidrologi; klimatologi; dan penggunaan lahan.

2.1.1.1.1. Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten yang wilayah administrasinya memiliki luas daratan $\pm 226.902,94$ ha dan luas laut $\pm 197.464,62$ ha serta dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai $\pm 195,68$ km. Penetapan ini mengacu pada PABU (Pilar Acuan Batas Utama) yang terdapat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan, PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengacu pada PBU dan PABU yang terdapat pada Permendagri Nomor 114 tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran lebih jelas mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini dan data mengenai luas wilayah administrasi menurut kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2-1.

Gambar II.1 Peta Administrasi



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022 (Data diolah)

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
1.	Koba	390.54	5	6	11
2.	Pangkalanbaru	109.45	1	11	12
3.	Lubuk Besar	546.10	-	9	9
4.	Namang	204.04	-	8	8
5.	Sungaiselan	789.83	1	12	13
6.	Simpangkatis	229.07	-	10	10
Total Luas		2.269,03	7	56	63

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.2.1 Posisi Astronomis

Posisi Kabupaten Bangka Tengah secara astronomis terletak pada $2^{\circ}11'$ – $2^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}48'$ – $106^{\circ}51'$ Bujur Timur.

2.1.1.1.2.2 Posisi Geografis

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya yang berada di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

2.1.1.1.2.3 Kondisi / Kawasan

Kabupaten Bangka Tengah memiliki garis pantai yang panjang di sisi timur dan barat. Selain itu, Bangka Tengah juga memiliki beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketawai, Pulau Semujur, Pulau Bebuar, Pulau Panjang, Pulau Begadung, Pulau Pelepas, dan Pulau Nangka. Bangka Tengah tidak memiliki wilayah pegunungan, akan tetapi terdapat perbukitan seperti Bukit Mangkol dengan titik tertinggi 400 meter dpl dan Bukit Pading dengan titik tertinggi 650 meter dpl di Bukit Bebuluh.

2.1.1.3. Topografi

2.1.1.3.1. Kemiringan Lahan

Keadaan bentang alam (morfologi) merupakan salah satu pengontrol keterdapatannya air tanah disamping jenis litologi dan struktur geologinya. Morfologi wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

- Satuan morfologi dataran alluvial sungai dan pantai yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 30 meter diatas permukaan laut (dpl). Kemiringan lereng kurang dari 5% sebagian besar terletak di daerah pantai Pulau Bangka. Batuan yang menyusun terdiri dari endapan alluvium dengan komposisi butir mulai dari bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut. Sungai-sungai yang mengalir pada morfologi ini, terutama di daerah pantai sangat berperan dalam mengisi air tanah dangkal (Influent Stream). Pemanfaatan lahan untuk daerah morfologi ini berupa tegalan, persawahan, pertambangan, pemukiman, serta sebagian merupakan rawa-rawa terutama di daerah pantai.
- Satuan morfologi dataran sampai perbukitan kecil yang meliputi Pulau Bangka bagian tengah dengan ketinggian 0-190 meter dpl dengan kemiringan lereng 3% - 30%. Keadaan ini dibentuk oleh beberapa jenis batuan, yaitu batuan metamorf, batuan beku, dan batuan sedimen berumur tersier – karbon yang telah mengalami patahan dan perlipatan. Lahan pada satuan morfologi ini digunakan sebagai daerah perkebunan, pertanian lahan kering terutama tegalan/ladang, pertambangan, hutan dan sebagian merupakan daerah resapan/ imbuhan air tanah bagi kawasan yang ada di bawahnya.

2.1.1.3.2. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kemiringan lereng yang bervariasi. Kemiringan lereng > 16 -25%, 14 – 40%, dan >45 % sebagian besar terdapat di bagian Utara Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan di sebagian kecil di bagian selatan. Kemiringan lereng sampai dengan 15% sebagian besar terdapat di bagian tengah, barat dan selatan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ditinjau letak ketinggian dari permukaan air laut, topografi Kabupaten Bangka Tengah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

- Ketinggian antara 0 – 100 m.
- Ketinggian antara 100 – 650 m.

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah tersusun oleh 5 satuan litologi atau batuan, yaitu :

- Endapan alluvium

Merupakan endapan sungai, rawa, dan pantai, terdiri dari lumpur, lempung, pasir, kerikil, dan kerakal. Merupakan batuan lepas yang menempati wilayah dataran pantai dengan penyebaran terluas di daerah Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Pangkalan Baru.

- Formasi Ranggam

Terdiri dari perselingan dari batupasir, batulempung, dan konglomerat. Merupakan batuan setengah padu sampai padu dengan penyebaran menempati wilayah Kecamatan Koba.

- Granit Klabat

Merupakan batuan beku yang terdiri dari jenis granit biotit, granodiorit, dan granit genesan. Merupakan batuan padu yang masif jika belum lapuk, berubah menjadi batuan lepas berbutir lempung sampai pasir apabila telah mengalami pelapukan. Singkapan terbesar satuan ini di wilayah Kecamatan Koba dan sebagian di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Simpang Katis.

- Formasi Tanjung Genting

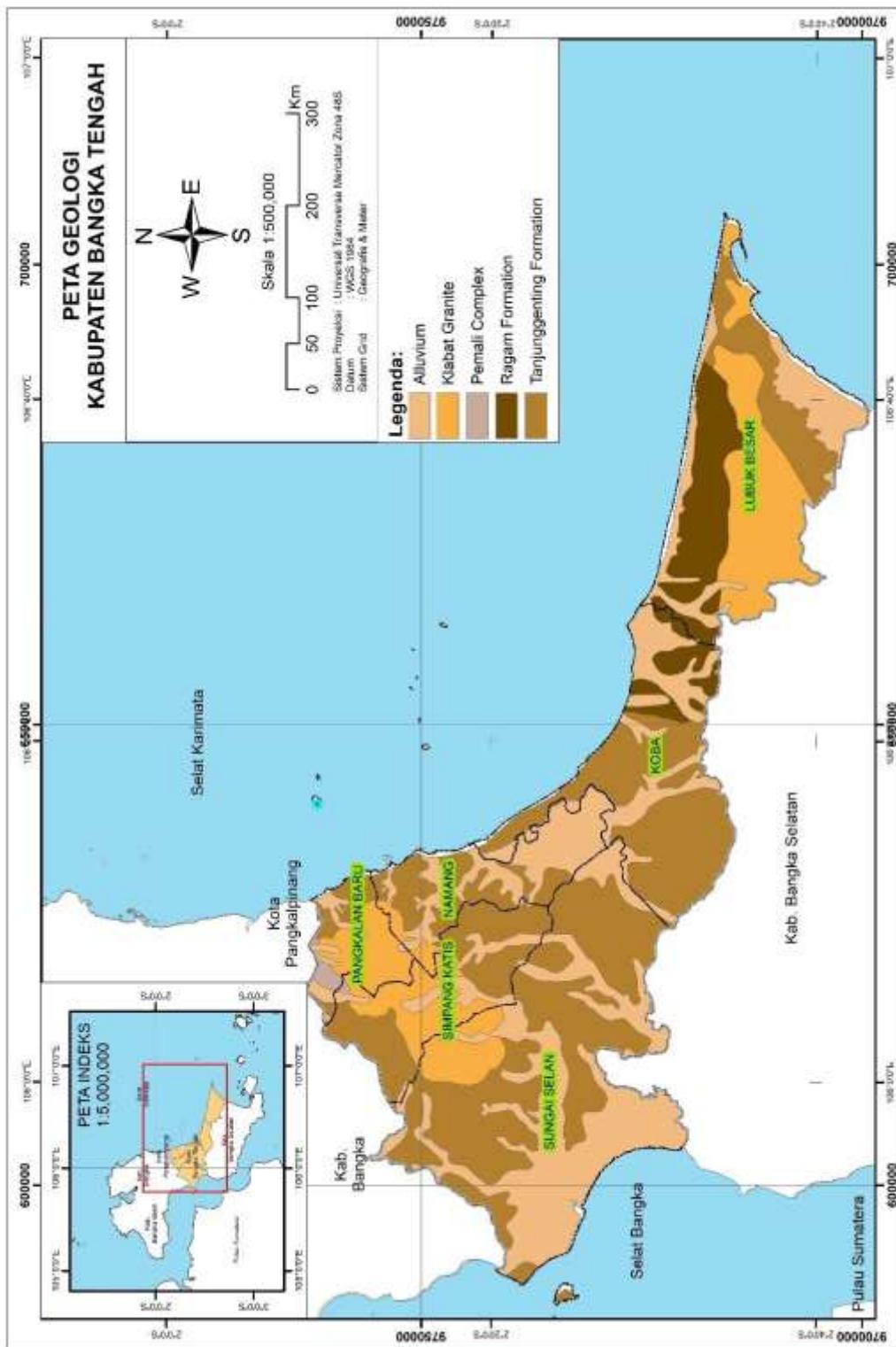
Perselingan batu pasir dan lempung, merupakan batuan sedimen setengah padu sampai padu. Menempati secara terpisah di seluruh wilayah kabupaten, dengan singkapan terbesar di wilayah barat kabupaten.

- Kompleks Malihan Pemali

Merupakan batuan malihan padu yang tersusun oleh filit, sekis, dan kuarsit. Terdapat hanya di wilayah Kecamatan Simpang Katis.

Informasi spasial mengenai susunan litologi atau batuan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar II.2 berikut ini.

Gambar II.2 Peta Geologi



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

2.1.1.5. Hidrologi

Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka Tengah berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah: Sungai Mesu, Sungai Selan, Sungai Kurau dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Secara umum, di Kabupaten Bangka Tengah jarang ditemukan danau alam, danau yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah terbentuknya berasal dari bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut *kolong*.

2.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Terdapat 20 DAS di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah, antara lain: DAS Airbara, DAS Bakong, DAS Bangkakota, DAS Baturusa, DAS Gemuruh, DAS Gumba, DAS Guntung, DAS Kurau, DAS Lengko, DAS Menduk, DAS Mesu, DAS Nadi, DAS Pading, DAS Perlang, DAS Pulur, DAS Rangau, DAS Risi, DAS Selan, DAS Sepet, DAS Terentang (BPDAS HL Baturusa Cerucuk 2020).

2.1.1.5.2. Sungai, Danau dan Rawa

Sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dikelompokkan berdasarkan wilayah yang dialirinya, disajikan dalam Tabel 2-2 berikut.

Tabel II.2 Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan

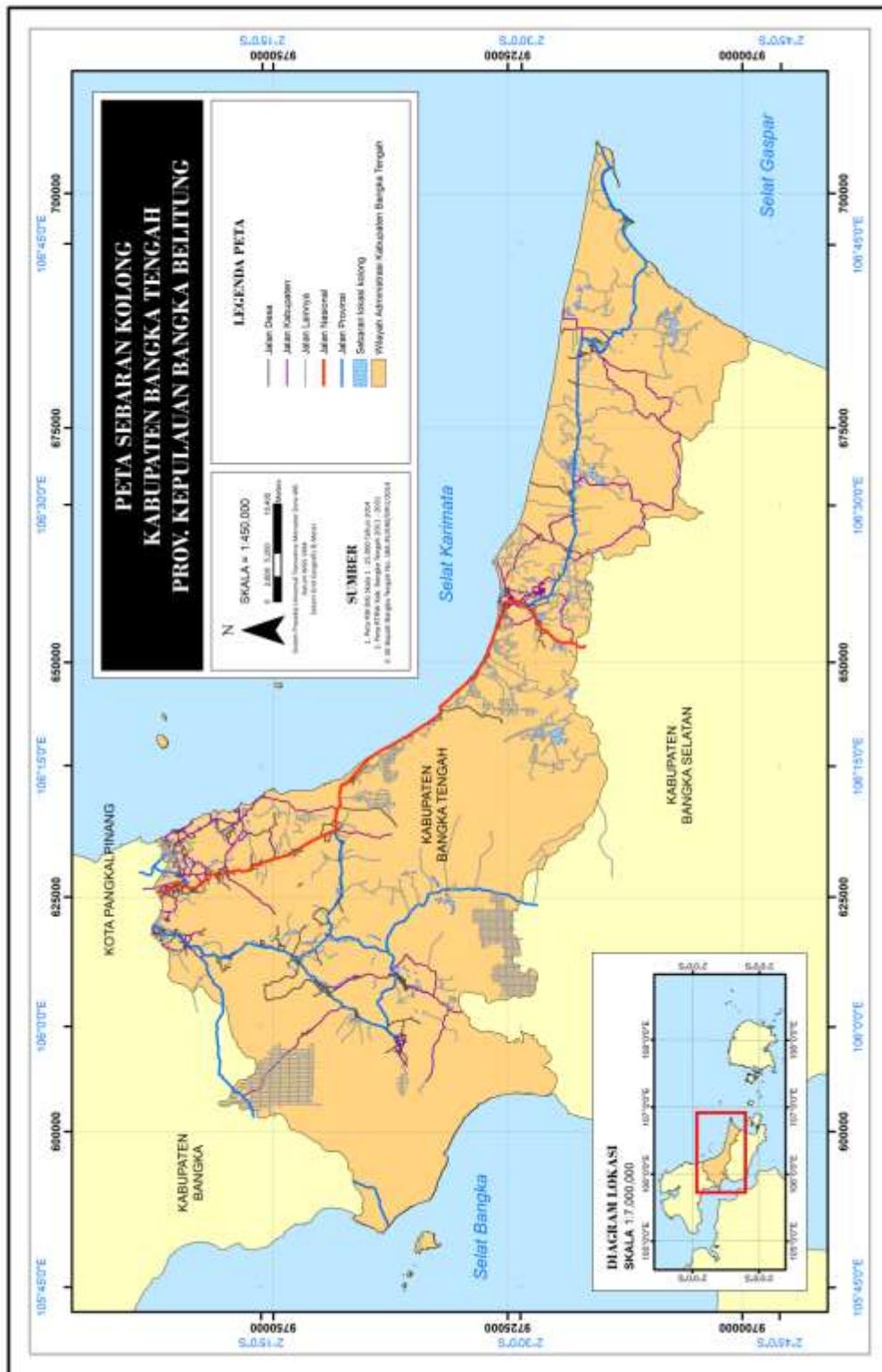
No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Koba	Sungai Berok	2,882
		Sungai Kurau	44,577
		Sungai Guntung	6,261
		Sungai Bemban	12,297

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)
		Sungai Sisil	8,404
		Sungai Sinar Bulan	2,105
		Sungai Cauyan	1,298
		Sungai Risi	12,357
		Sungai Kabung	5,549
		Sungai Nibung	43,836
		Sungai Bedengung	4,525
2.	Lubuk Besar	Sungai Kulur	9,538
		Sungai Trubus	3,642
		Sungai Perlang	3,437
		Sungai Kayu Ara	8,407
		Sungai Lingkuk	7,51
		Sungai Bakas	4,721
		Sungai Ketiak	11,918
3.	Pangkalan Baru	Sungai Mesu	10,173
		Sungai Pendindang	12,679
4.	Namang	Sungai Munjang	7,648
		Sungai Benuang	7,31
		Sungai Pelawan	12,509
5.	Sungaiselan	Sungai Selan	33,663
		Sungai Seruk	18,895
		Sungai Jirak	15,058
		Sungai Buak	24,598
		Sungai Celau	11,554
		Sungai Kambuk	9,391
		Sungai Sembulan	10,645
		Sungai Pelabur	8,33
		Sungai Kepoh	7,683
		Sungai Bangka Kota	26,563
		Sungai Gelang	1,253
6.	Simpang Katis	Sungai Puput	15,813

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Danau yang ada di Kabupaten Bangka Tengah selain danau Linau yang ada di atas Bukit Pading Desa Perlang pada umumnya adalah bekas penambangan bijih timah yang luas sehingga tergolong danau buatan yang dijadikan penampung air tawar dan sering disebut sebagai kulong/kolong. Berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah No. 188.45/690/DPU/2014 tentang Penetapan Kolong dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah, berikut ditampilkan peta sebarannya.

Gambar 2.3 Peta Sebaran Kolong



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2014

2.1.1.6. Klimatologi

Klimatologi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 – 2019 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel II.3 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan BMKG

No.	Unsur Iklim	Rata – Rata	Besaran/Nilai	
			Minimum	Maksimum
1.	Suhu	26,7°C	18,2°C	36,4°C
2.	Kelembaban	87 %	40%	100%
3.	Kecepatan Angin	1,89 m/det	0 m/det	5,66 m/det
4.	Tekanan Udara	1010,4 mb	1006,2 mb	1014,1 mb
Jumlah Curah Hujan			2.355,3 mm	
Jumlah Hari Hujan			158 hari	
Penyinaran Matahari			43,9%	

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, secara lebih rinci memuat keadaan unsur cuaca di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 (September 2020) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tipe

Menurut sistem klasifikasi Köppen–Geiger, ahli iklim Jerman bahwa iklim terbagi menjadi 5 kelompok yaitu tipe A (tropis), tipe B (kering), tipe C (subtropis), tipe D (mikrotermal), dan tipe E (kutub). Secara umum, kawasan Indonesia termasuk iklim tropis (tipe A) karena iklim tropis biasa ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi, yaitu di antara garis 23,5 derajat Lintang Utara sampai 23,5 derajat Lintang Selatan.

2. Curah hujan

Permulaan musim hujan ditandai oleh curah hujan selama satu dasarian (10 hari) jumlahnya lebih dari 50 mm, dikuti beberapa dasarian berikutnya yang juga lebih dari 50 mm.

Gambar II.4 Grafik Curah Hujan (mm)



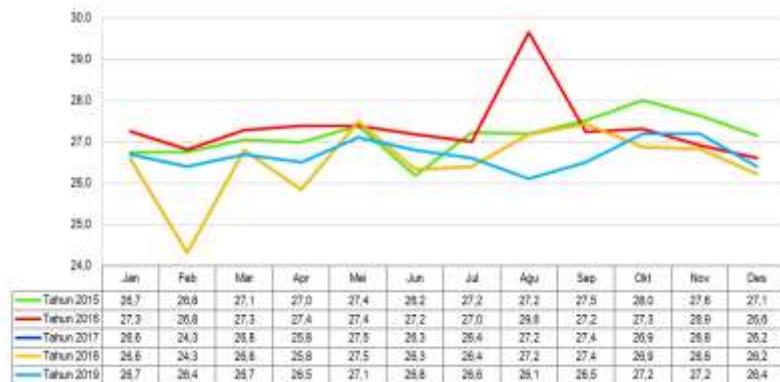
Sumber: Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

Dari grafik tersebut terlihat keseragaman tingginya curah hujan sepanjang tahun 2015 – 2019 berada di antara bulan Februari – Mei dan bulan November – Desember. Sementara itu direntang bulan Juni - Oktober bisa terlihat curah hujan berada di bawah batas penanda musim hujan (< 150 mm).

3. Suhu

Temperatur rata-rata di wilayah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil pengamatan dari UPT Stasiun Klimatologi Kelas IV Koba, suhu/temperature rata-rata sekitar 26°C - 28°C selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar II.5 berikut.

Gambar II.5 Grafik Temperatur Udara (°C)



Sumber : Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

4. Kelembaban

Kelembaban merupakan jumlah uap air di udara sedangkan jumlah uap air yang tersimpan di udara dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Tinggi rendahnya kelembaban udara di suatu tempat sangat bergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan air di suatu tempat, kuantitas dan kualitas penyinaran, suhu, tekanan udara, pergerakan angin, dan vegetasi.

Gambar II.6 Grafik Kelembaban Udara Rata-Rata (%)



Sumber : Stasiun klimatologi kelas IV Koba, 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa kelembaban udara di Kabupaten Bangka Tengah sepanjang tahun 2015 sampai 2019, cukup tinggi yaitu berkisar antara 70% sampai 90% dan bisa dikatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh tingginya suhu dan besarnya persentase penyinaran matahari.

2.1.1.7. Penggunaan lahan

Keadaan alam Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil merupakan perbukitan. Tanah di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pH (derajat keasaman) rata-rata di bawah 5 dan di dalamnya terdapat kandungan bijih timah serta bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, dan batu gunung (BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020).

Keadaan alam Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil merupakan perbukitan. Tanah di Kabupaten Bangka Tengah mempunyai pH rata-rata di bawah 5 dan di dalamnya terdapat kandungan bijih timah serta bahan galian lainnya seperti pasir kuarsa, kaolin, dan batu gunung. (BPS,

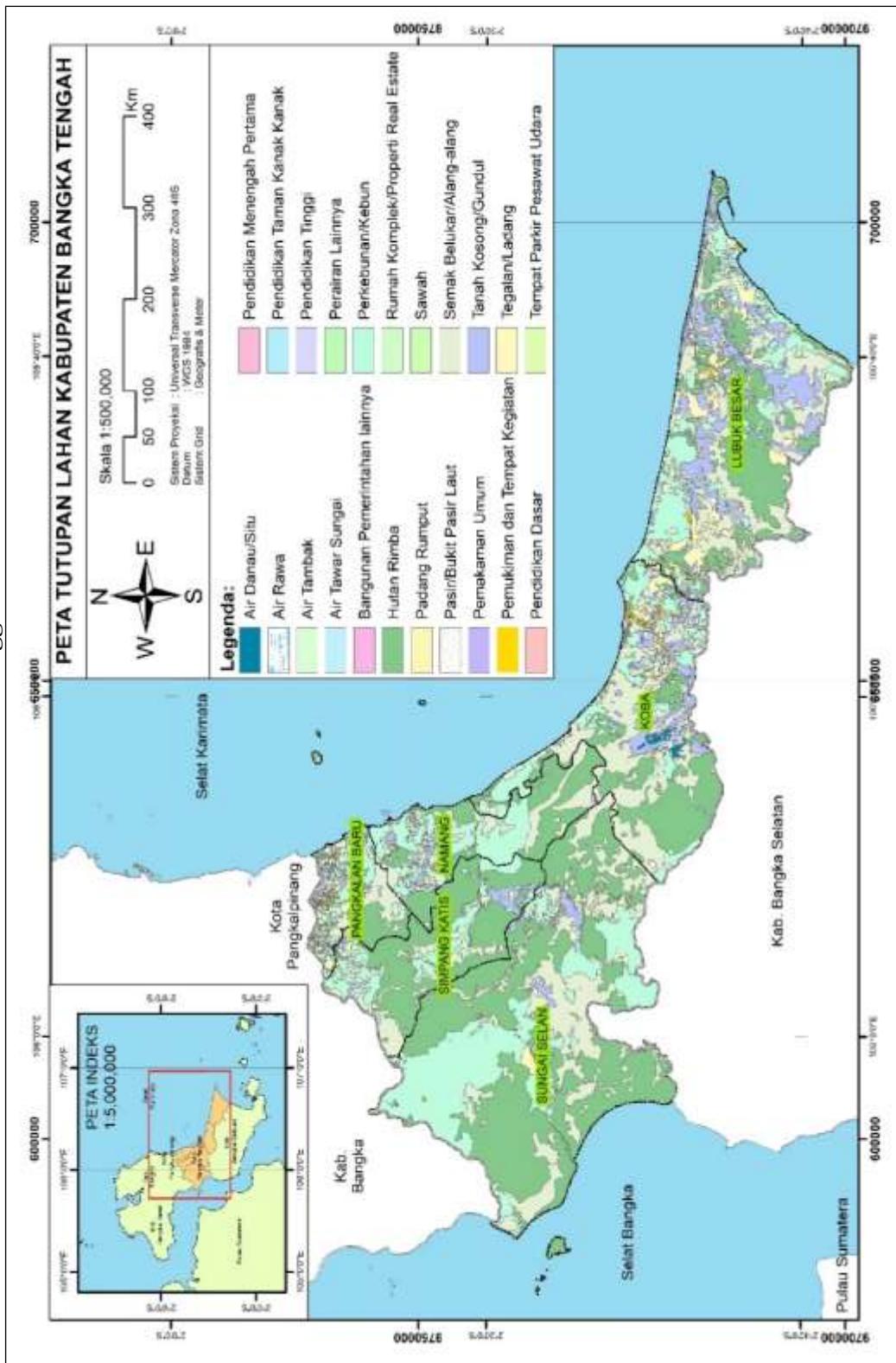
Statistik Daerah Kab. Bangka Tengah 2020). Data dan peta penggunaan lahan berupa lahan terbangun di Kabupaten Bangka Tengah ditampilkan pada Tabel II.4 dan Gambar II.7 di bawah ini.

Tabel 2.4 Sebaran Lahan Terbangun

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas Per Kecamatan (Ha)					
		Koba	Pangkalanbaru	Sungaiselan	Namang	Simpangkatis	Lubuk Besar
1.	Perumahan dan tempat kegiatan	417,36	347,89	202,79	110,83	152,54	444,25
2.	Persawahan/perkebunan/tegalan/ ladang	8.385,12	4.449,91	21.670,76	6.633,54	5.242,01	14.781,25
3.	Hutan	10.782,68	2.189,46	37.913,81	7.475,49	12.106,36	13.013,54
4.	Sungai	52,9	0,57	105,17	42,45	0	9,56
5.	Rawa	278,91	0	70,84	0	0	332,24
6.	Danau/ Kolong	440,22	0	0	0	0	3,72
7.	Tanah kosong/ padang rumput/ semak belukar/ lain-lain	18.648,99	3.932,15	18.739,03	6.141,9	5.397,22	25.712,04
Total Luas (km ²)		390,0618	109,1998	787,024	204,0421	228,9813	542,966

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2014

Gambar II.7 Peta Penggunaan Lahan



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2014

2.1.1.2. Potensi Kawasan Sumber Daya

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Bangka Tengah tertuang dalam rencana pola ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031. Potensi pengembangan dalam rencana pola ruang tersebut secara garis besar terdiri dari 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung seperti terlihat pada Gambar II.7.

2.1.1.1. Kawasan Peruntukan Budidaya

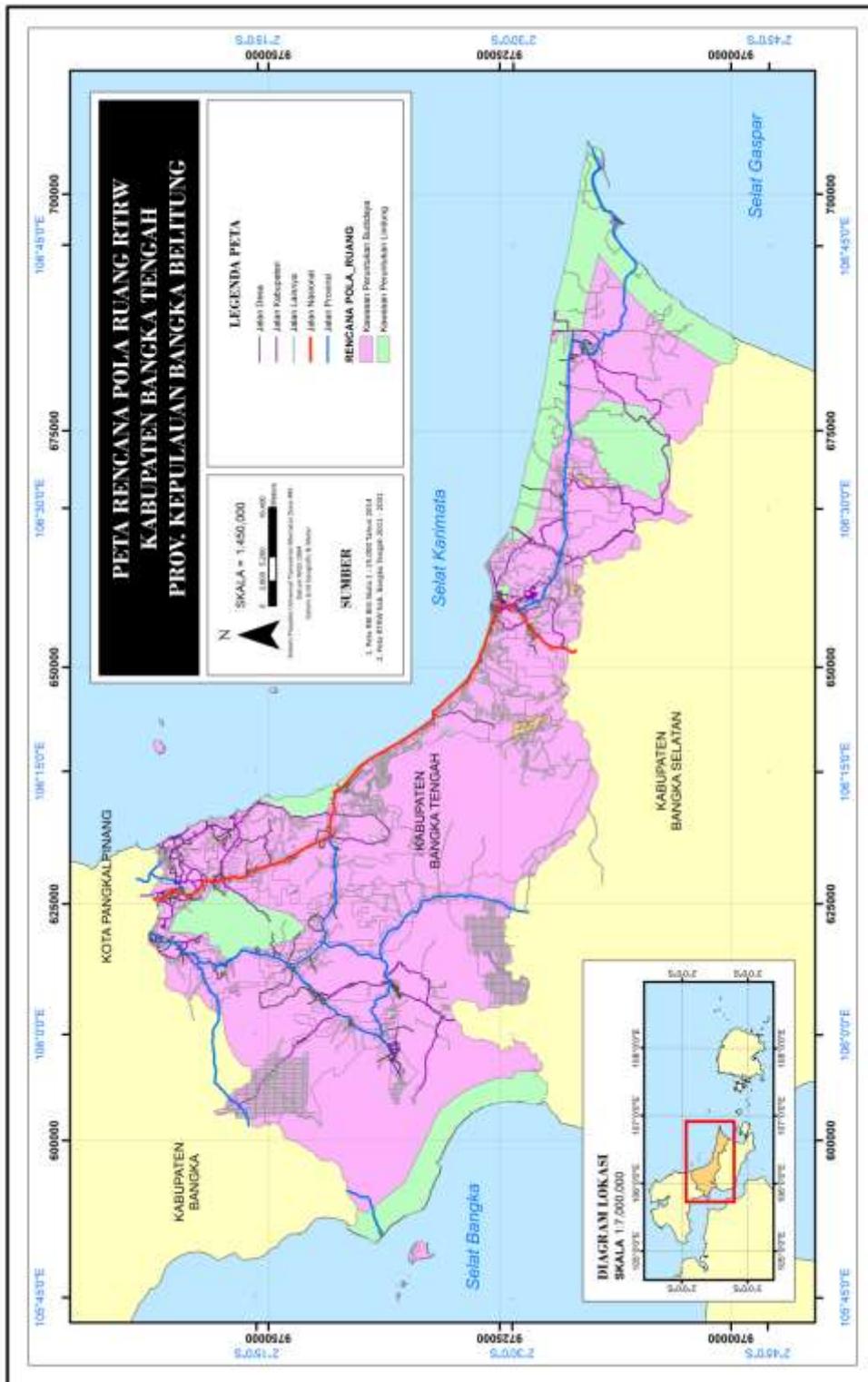
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011-2031, rencana kawasan budidaya di Kabupaten Bangka Tengah dikelompokkan menjadi 9 jenis.

Tabel 2.5 Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya

No.	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan produksi	89.812,27
2.	Kawasan peruntukan industri	287,57
3.	Kawasan pariwisata	1.621,37
4.	Kawasan permukiman (16.310,35 Ha)	
	1. Permukiman perkotaan	6.503,60
	2. Permukiman perdesaan	9.811,58
5.	Kawasan pertambangan mineral	23.379,81
6.	Kawasan pertanian dan perkebunan	
	1. Kawasan pertanian tanaman pangan	599,88
	2. Kawasan perkebunan	53.194,50
7.	Kawasan pertahanan dan keamanan	46,74
8.	Kawasan perkantoran	267,91
9.	Kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA)	33,61
Total		185.558,84

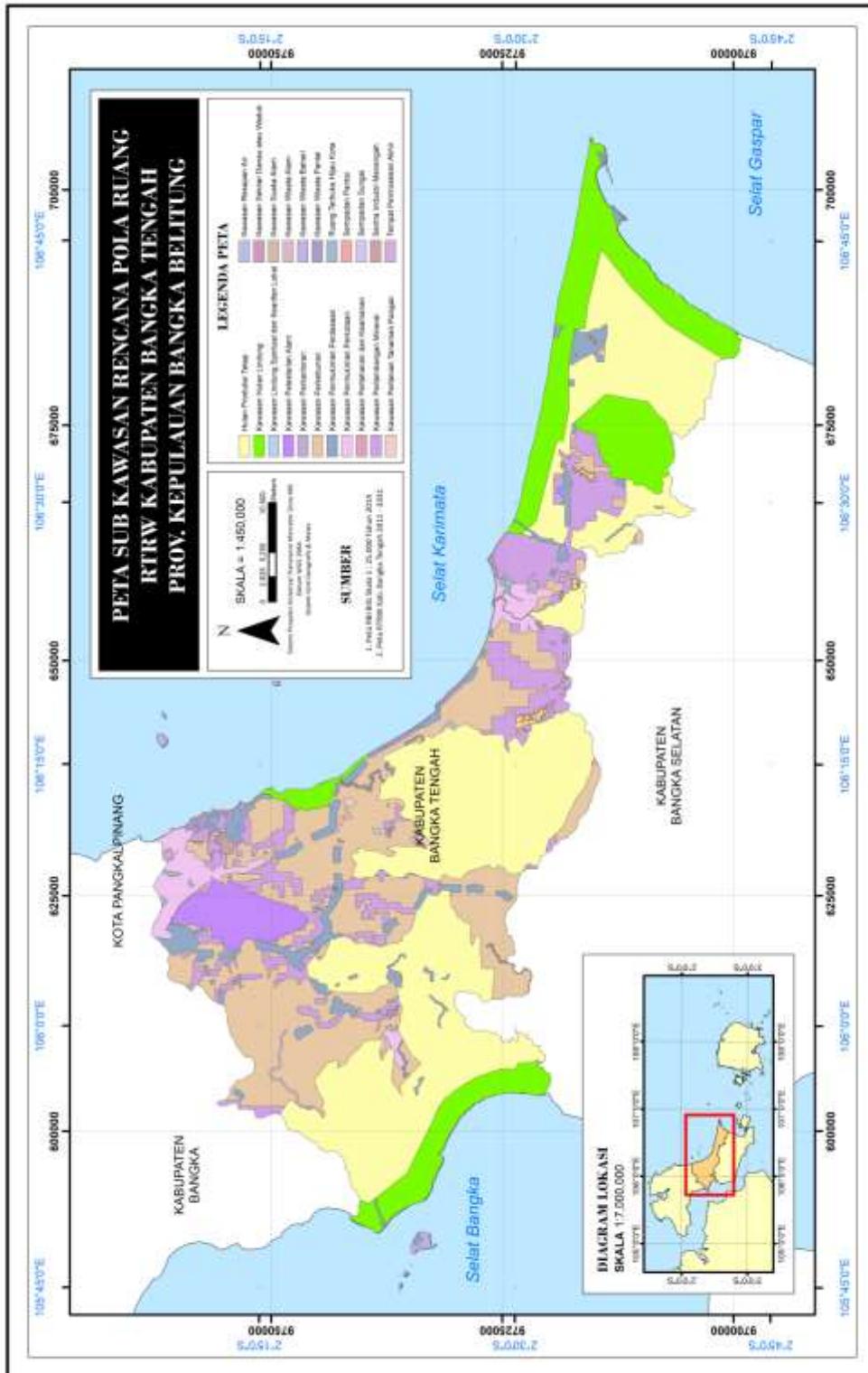
Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Gambar II.8 Peta Rencana Pola Ruang



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

Gambar II.9 Peta Sub Kawasan Rencana Pola Ruang



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

2.1.1.1.2. Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, luas hutan produksi 89.812,27 ha yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, dan Kecamatan Lubuk Besar.

Pada kawasan hutan produksi masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang berhubungan dengan kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya selama tidak menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam serta berdasarkan sesuai dengan izin yang diperoleh. Selain itu, kawasan ini juga dapat dipinjam-pakaikan untuk kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, penggunaan kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pemanfaataan hutan lindung untuk jasa lingkungan.

2.1.1.1.3. Kawasan Peruntukan Industri

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bangka Tengah direncanakan untuk industri sedang berada di Kecamatan Namang dan Pangkalanbaru seluas kurang lebih 287,57 ha yang disertai dengan kawasan pergudangan di Pangkalanbaru sebagai penunjang kegiatan tersebut. Untuk industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 ha dan di Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha.

2.1.1.1.4. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Bangka Tengah memiliki wisata yang menarik. Hampir seluruh bagian Pulau Bangka Belitung mempunyai banyak pantai yang landai dan indah dengan pasir putihnya yang halus. Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri

dari wisata alam pantai dan sungai, alam/perbukitan dan hutan dan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata di kabupaten Bangka Tengah berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 terdiri atas:

1. Kecamatan Koba dengan luas 591,46 Ha
2. Kecamatan Lubuk Besar dengan luas 188,39 Ha
3. Kecamatan Pangkalanbaru dengan luas 505,88 Ha
4. Kecamatan Namang dengan luas 40,65 Ha
5. Kecamatan Sungaiselan dengan luas 294,99 Ha

2.1.1.5. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Rencana pengembangan permukiman dan perumahan bertujuan untuk:..

1. Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan, dan keramaian ke Kabupaten Bangka Tengah bagian Utara, Selatan dan Barat.
2. Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan proyeksinya di masa mendatang.
3. Mengembangkan kawasan pemukiman yang baru di Kabupaten Bangka Tengah bagian Utara dan Barat.
4. Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan permukiman perkotaan yang direncanakan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan perkotaan di Kecamatan Pangkalanbaru yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah perkotaan Pangkal Pinang.

Kawasan perkotaan di Kecamatan Koba yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan (ibukota Kabupaten Bangka Tengah) dan jasa perdagangan.

Kawasan perkotaan di setiap ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Kawasan permukiman perdesaan

Permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka Tengah umumnya permukiman ini dihuni oleh para pemukim yang bermata pencaharian sebagai petani dan sudah lama menetap di desa tersebut. Permukiman perdesaan ini umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni.

2.1.1.6. Kawasan Pertambangan Mineral

Kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 23.379,81 ha dan usulan penetapan wilayah pertambangan untuk mineral logam dan bukan logam serta batuan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.1.7. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukkan pertanian direncanakan seluas 53.794,38 ha yang akan diarahkan pada areal kawasan pertanian tanaman pangan seluas 599,88 ha, kawasan hortikultura seluas 208,08 ha, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan 91,25 ha, dan kawasan perkebunan seluas 53.194,50 ha. Jenis komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan dan tersebar di seluruh kecamatan antara lain, yaitu karet, kelapa sawit, dan lada.

**Tabel 2.6 Sebaran Kawasan Luasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Berkelanjutan (LP2B)**

No.	Uraian	Luas (ha)
1.	Lahan Pertanian Pangan	300,55
	○ Desa Namang Kec. Namang	53,00
	○ Desa Belilik Kec. Namang	55,00
	○ Desa Kerakas Kec. sungaiselan	140,30
	○ Desa Sungaiselan Atas Kec. Sungaiselan	43,84
	○ Desa Teru Kec. Simpangkatis	8,41
2.	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	91,25
3.	Lahan Pertanian Hortikultura Berkelanjutan	208,08
	Total	599,88

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel 2.7 Sebaran Rencana Sub Kawasan Perkebunan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Koba	8.889,08
2.	Lubuk Besar	1.055,85
3.	Namang	8.379,15
4.	Pangkalanbaru	1.022,28
5.	Simpangkatis	11.937,72
6.	Sungsiselan	21.910,42
Total		53.194,50

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.1.8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Pertahanan dan Keamanan:

1. Kawasan pertahanan TNI AD seluas 33,28 ha (tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) di Kecamatan Namang.
2. Markas Komando Brigadir Mobil POLDA Bangka Belitung seluas 13,46 ha (tiga belas koma empat puluh enam hektar) di Kecamatan Pangkalanbaru.

2.1.1.9. Kawasan Perkantoran

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Perkantoran di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah provinsi seluas 121,34 ha yang dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini di Komplek perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Pangkalanbaru;
2. Kawasan peruntukan perkantoran kabupaten seluas 146,57 ha yang dikembangkan terpusat dan terpadu di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Tengah di Kelurahan Koba Kecamatan Koba.

2.1.1.10. Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kawasan TPA di Kabupaten Bangka Tengah seluas 33,61 ha di Kecamatan Koba menggunakan metode *controlled landfill*.

2.1.1.11. Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui tetapi terbatas. Sumberdaya tersebut dapat mengalami penipisan bahkan kemasuhan jika dibiarkan dalam keadaan nirkelola. Pengkajian stok diperlukan dalam telaah sumberdaya perikanan untuk memberikan informasi data optimum sumberdaya perikanan yang dapat dimanfaatkan pengelolaan perikanan, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang dilakukan bertujuan mencapai kelangsungan produkivitas sumberdaya hayati perairan secara optimal dan terus menerus/berkelanjutan (*sustainable*).

Konsep untuk budidaya ikan air tawar di kolam tanah dan perairan rawa adalah konsep perikanan mandiri. Dalam satu kawasan budidaya, selain pokdakan melakukan budidaya fokus biota pokdakannya, mereka juga memasok sebagian besar kebutuhan kegiatan produksinya secara mandiri. Seperti kebutuhan benih, pakan alami, pakan buatan, indukan dan proses pemijahan.

Tabel II.8 Rencana Pengembangan Perikanan Budidaya

No.	Uraian	Luas (Ha)
1. Budiadaya Perikanan Laut		10.000,00
2. Budidaya Perikanan Payau		10.000,00
3. Budidaya Perikanan Air Tawar terdiri atas :		
3. Kolong		200,00
4. Kolam		500,00
Total		20.700,00

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rencana pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan terdiri atas :

- Pembangunan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kawasan Perkotaan Sungaiselan, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalbaru dan Desa Kurau Kecamatan Koba;
- Pengembangan sarana penunjang kawasan peruntukan perikanan dilakukan dengan menyediakan pangkalan pendaratan perikanan (PPI), terdiri dari:
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Belubang, Kecamatan Pangkalbaru;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Kurau, Kecamatan Koba;

- Pangkalan Pendaratan Ikan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan; dan
- Pangkalan Pendaratan Ikan Berok, Kecamatan Koba.
- Rencana pengembangan kawasan minapolitan perikanan budaya, terdiri dari:
 - Kecamatan Pangkalanbaru (Desa Air Mesu, Tanjung Gunung dan Batu Belubang);
 - Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat dan Kurau Timur); dan
 - Kecamatan Namang (Desa Jelutung, Baskara Bhakti, dan Namang).

2.1.1.12. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, mencegah longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi, dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau dan sekitarnya.

Masing-masing kelompok kawasan tersebut dikembangkan berdasarkan permasalahan kondisi eksisting dan potensi-potensi yang ada, baik potensi eksisting kawasan maupun kawasan baru yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan non budaya. Pertimbangan penambangan kawasan baru sebagai kawasan non budaya didasarkan atas kondisi topografi, kelerengan, kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.9 menunjukkan rencana kawasan lindung di Kabupaten Bangka Tengah sesuai Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.9 Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Lindung • Kawasan Resapan air 	32.348,99 10,96
2.	Kawasan Perlindungan Setempat <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Pantai • Sempadan Sungai • Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong • Kawasan lindung kearifan local 	532,90 833,38 108,29 47,05
3.	Kawasan Konservasi <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Suaka Alam 	50,83

No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
	• Kawasan Pelestarian Alam	6.009,51
4.	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	337,33
Total		40.232,19

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

2.1.1.13. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan hutan lindung

Penetapan kawasan hutan di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan berdasarkan SK Menhut RI Nomor SK.798/Menhut-2/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kawasan Hutan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.10 Sebaran Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Lubuk Besar	23.352,48
2.	Namang	1.276,13
3.	Koba	278,66
4.	Sungaiselan	7.441,73
Total		32.348,99

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.10 di atas, dapat diketahui bahwa kawasan hutan lindung yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah seluas 32.348,99 ha yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain kecamatan Lubuk Besar, Namang, Koba dan Sungaiselan.

Kawasan resapan air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan *city ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya, maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan resapan air di

Kabupaten Bangka Tengah seluas 10,96 ha yang berada di Desa Penyak Kecamatan Koba. Pengaturan terkait kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

Hutan lindung yang telah ada berdasarkan peraturan/ perundangan yang berlaku tetap dipertahankan. Penggunaan lahan yang telah ada (permukiman, sawah, tegalan, tanaman tahunan/perkebunan, dan lain-lain) di dalam kawasan ini secara bertahap dialihkan ke arah usaha konservatif dan/atau dibatasi secara ketat, sehingga fungsi lindung yang diemban dapat dilaksanakan.

Penggunaan lahan yang akan mengurangi fungsi konservasi secara bertahap dialihkan fungsinya sebagai lindung sesuai kemampuan dana yang ada.

Penggunaan lahan baru tidak diperkenankan bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan (menara TVRI, jaringan listrik, telepon, air minum dan lain-lain), hal tersebut tetap memperhatikan asas konservasi.

2.1.1.14. Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan pantai

Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. Tujuan perlindungan sempadan pantai adalah untuk melindungi laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air laut dan kekayaan hayati di dalam dan disekitarnya, serta mencegah terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi sempadan pantai dari aktifitas manusia, maka sempadan pantai harus ditanami dengan pohon bakau/mangrove sehingga fungsi perlindungan dapat tercapai. Sebagaimana kriteria penetapan sempadan sungai, maka kriteria penetapan sempadan pantai juga didasarkan kepada Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka harus disediakan *buffer area* selebar 100 meter di sepanjang garis pantai, terutama pada garis pantai yang menerima arus gelombang laut lebih besar. Namun sebelum keluarnya peraturan tersebut, telah ada Jalan Kolektor di Kabupaten Bangka Tengah, dengan tetap melakukan pengamanan. Pengaturan lain dilakukan dengan menanam mangrove, pemisahan sempadan pantai dengan aktifitas manusia juga dapat dilakukan dengan membangun jalan sebagai pemisah antara pantai dan

permukiman. Luas kawasan lindung sempadan pantai di Kabupaten Bangka Tengah adalah 532,90 Ha.

Sempadan sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan sempadan sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau.

Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Kriteria penetapan sempadan sungai dilakukan berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Sempadan Sungai. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki batas pasang surut yang sangat besar dan juga wilayah DAS yang cukup datar, maka didalam RTRW ini ditetapkan garis sempadan untuk sungai-sungai besar sebesar $+>100$ meter dan untuk sungai-sungai kecil sebesar 50 meter. Dengan dasar pertimbangan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 disusunlah suatu konsep sempadan sungai yang terdiri dari 2 (dua) zona, Zona Inti Sempadan dan Zona Pendukung Sempadan. Zona Inti Sempadan adalah 100 m dari tepi sungai dan zona pendukungnya adalah 400 m dari garis Zona Inti Sempadan. Dikarenakan tujuan sempadan sungai ini adalah untuk mencegah kerusakan sungai maka kegiatan manusia harus dijauhkan dari sempadan sungai tersebut.

Pencegahan terhadap munculnya aktifitas manusia di sempadan sungai dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya antara lain dengan memisahkan permukiman dari bantaran sungai dengan pagar, ruang terbuka hijau, dan jalan sebagai pemisah. Kawasan sempadan sungai terdapat pada sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki sungai besar, yaitu Sungai Kurau dan Sungai Selan. Dari perhitungan analisis GIS, luasan *buffer* sempadan sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah di luar kawasan hutan adalah sebesar 833,38 ha

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Penentuan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 50 m dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk;
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam kawasan di luar Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 100 m dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk; dan
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong tersebar di seluruh kecamatan seluas 108,29 ha.

Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan lindung kearifan lokal berupa Taman Keanekaragaman Hayati dengan luas 47,05 ha berada di Desa Namang, Kecamatan Namang.

2.1.1.15. Kawasan Konservasi

Hutan Konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

- Kawasan Suaka Alam yaitu Cagar Alam dan Cagar Alam Laut yang terdapat pada sebagian Pulau Gelasa seluas 50,83 ha.
- Kawasan Pelestarian Alam yaitu Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang terdapat pada Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Pangkalnbaru seluas 6.009,51 ha

2.1.1.16. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan

di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Persebaran RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan Tabel II.11 berikut:

Tabel II.11 Sebaran Sub Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Koba	190,59
2.	Pangkalnabu	146,74
	Total	337,33

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2019b

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Aktivitas yang dapat memicu bencana di Kabupaten Bangka Tengah adalah Tambang inkonvensional (TI). Aktivitas TI yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah mempengaruhi kondisi sungai sehingga sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan. Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka sungai-sungai yang berada dekat dengan TI akan meluap karena sungai tidak dapat menampung debit air hujan. Luapan sungai tersebut dapat berdampak pada hunian masyarakat yang berada sekitar sungai. Kondisi bencana banjir luapan sungai terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu kebakaran, banjir, puting beliung, gelombang pasang, abrasi pantai dan kekeringan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan serta puting beliung merupakan kejadian yang sudah kerap kali terjadi setiap tahun. Kebakaran lahan di Kabupaten Bangka Tengah biasanya sering terjadi diakibatkan pembukaan lahan dan pembersihan perkebunan. Berdasarkan data kejadian kebakaran lahan dan hutan ini, biasanya terjadi pada saat memasuki musim kemarau.

2.1.1.3. Kondisi Demografi

2.1.1.3.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kependudukan merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan terutama

mengenai permasalahan jumlah, pesebaran dan komposisi/strukturnya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ Tanggal 13 Februari 2013 Hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa "data kependudukan yang dapat disajikan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri". Data kependudukan kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.12 di bawah ini.

Tabel II.12 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koba	38.945	39.501	40.037	42.929	43.558
2.	Lubuk Besar	27.327	27.971	28.617	31.153	31.609
3.	Pangkalbaru	47.671	49.164	50.641	46.027	46.701
4.	Namang	15.286	15.467	15.636	16.837	17.804
5.	Sungaiselan	33.942	34.467	34.982	36.073	36.602
6.	Simpangkatis	25.432	25.859	26.283	25.927	26.307
Total		188.603	192.429	196.196	198.946	201.861

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.12 di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah terus bertumbuh setiap tahunnya. Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk naik rata-rata 3,3 % setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk di 6 kecamatan. Sementara itu, jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan sebagaimana Tabel II.13.

Tabel II.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk											
	2017		2018		2019		2020		2021		L	P
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Koba	20.419	18.526	20.714	18.787	21.001	19.036	22.239	20.690	22.535	21.023		
Lubuk Besar	14.503	12.824	14.848	13.123	15.196	13.421	16.326	14.827	16.453	15.066		

Kecamatan	Jumlah Penduduk									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pangkalanbaru	24.748	22.923	25.526	23.638	26.299	24.342	23.574	22.453	23.890	22.811
Namang	8.095	7.191	8.192	7.275	8.280	7.356	8.816	8.021	8.933	8.151
Sungaiselan	18.013	15.929	18.294	16.173	18.575	16.407	18.863	17.210	19.114	17.488
Simpangkatis	13.125	12.307	13.346	12.513	13.568	12.715	13.394	12.533	13.572	12.735
Total	98.903	78.432	100.920	81.366	102.919	83.864	103.212	95.734	104.587	97.274

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.14 Sex Ratio

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koba	110,22	110,26	110,32	107,49	107,19
2.	Lubuk Besar	113,09	113,14	113,23	110,11	109,80
3.	Pangkalanbaru	107,96	107,99	108,04	104,99	104,73
4.	Namang	112,57	112,60	112,56	109,91	109,59
5.	Sungaiselan	113,08	113,11	113,21	109,60	109,30
6.	Simpangkatis	106,65	106,66	106,71	106,87	106,57
Total		110,26	110,28	110,34	107,81	107,52

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.14 di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan, dikarenakan nilai *sex ratio* setiap tahunnya selalu diatas angka 100.

Sementara itu, untuk jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur juga menunjukkan kenaikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.15.

Tabel II.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	0 – 4	19.864	20.267	20.663	16.879	17.198
2.	5 – 9	18.336	18.707	19.074	17.437	17.360
3.	10 – 14	17.653	18.011	18.364	18.301	18.143
4.	15 – 19	17.902	18.265	18.623	18.314	18.433
5.	20 – 24	19.142	19.531	19.913	17.254	17.401
6.	25 – 29	17.591	17.948	18.300	17.053	17.089
7.	30 – 34	16.115	16.441	16.764	18.467	18.549
8.	35 – 39	14.284	14.574	14.859	16.742	17.015
9.	40 – 44	12.775	13.034	13.290	14.587	14.867
10.	45 – 49	10.188	10.394	10.598	12.318	12.686
11.	50 – 54	8.673	8.849	9.023	9.865	10.260

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
12.	55 – 59	6.107	6.230	6.353	8.039	8.348
13.	60 – 64	3.918	3.997	4.076	6.047	6.324
14.	65 - 69	2.447	2.498	2.547	3.884	4.117
15.	70 – 74	1.601	1.634	1.665	1.995	2.173
16.	>74	2.007	2.049	2.084	1.764	1.898
Total		188.603	192.429	196.196	198.946	201.861

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.15 di atas, penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 didominasi kelompok umur usia sekolah dan usia produktif, yaitu usia 4 tahun sampai dengan 49 tahun, kelompok umur dengan jumlah terbesar adalah kisaran umur 30 sampai dengan 34 tahun dengan jumlah 18.549 jiwa dan disusul oleh kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun dengan jumlah 18.433 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa usia produktif mendominasi di Kabupaten Bangka Tengah.

2.1.1.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan kecamatan sebagaimana Tabel II.16.

Tabel II.16 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Koba	1,56	1,51	1,45	1,45	1,96
Pangkalan Baru	3,32	3,21	3,10	3,08	1,96
Sungai Selan	1,69	1,63	1,58	1,57	1,96
Simpang Katis	1,83	1,77	1,71	1,70	1,96
Namang	1,31	1,26	1,22	1,21	1,96
Lubuk Besar	2,55	2,46	2,38	2,36	1,96
Total	2,10	2,03	1,96	1,40	1,96

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022 (Data diajoleh, 2022)

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Perspektif pembangunan berwawasan kependudukan menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai

objek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan. Kabupaten Bangka Tengah berhasil menekan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Bangka Tengah, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebesar 1,96%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian penduduk yang dari tahun 2020 sebesar 2,06%.

Gambar II.10 menunjukkan grafik laju pertumbuhan penduduk Tahun 2016-2021.

Gambar II.10 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.1.3.3. Dinamika Penduduk

Kelahiran penduduk di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan angka yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir sebagaimana yang ditunjukkan Tabel II.17.

Tabel II.17 Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Koba	682	672	648	655	638
Pangkalan Baru	495	510	544	546	924
Sungai Selan	816	951	992	974	571
Simpang Katis	309	299	314	294	465

Kecamatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Namang	600	628	629	634	281
Lubuk Besar	449	440	454	403	517
Total	3.351	3.500	3.581	3.506	3.396

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa kelahiran tertinggi tercatat terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 3.581 kelahiran dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 3.351. Untuk kelahiran penduduk Tahun 2021 sebanyak 3.396 menurun dibandingkan Tahun 2020 sebesar 3.506.

2.1.1.3.4. Distribusi/Persebaran Penduduk

Distribusi penduduk mempengaruhi perencanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam termasuk pembangunan kualitas manusia. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah menurut kecamatan menunjukkan angka yang berbeda tiap kecamatan sebagaimana ditunjukkan Tabel II.18.

Tabel II.18 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun (Jiwa/km ²)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koba	99,72	101,14	102,52	109,92	111,53
2.	Lubuk Besar	50,04	51,22	52,40	57,05	57,88
3.	Pangkalanbaru	435,55	449,19	462,69	420,53	426,69
4.	Namang	74,92	75,80	76,63	82,52	83,37
5.	Sungaiselan	42,97	43,64	44,29	45,67	46,34
6.	Simpangkatis	111,02	112,89	114,74	113,18	114,84
	Total	83,12	84,81	86,47	87,68	88,96

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan data Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pangkalanbaru. Hal ini tidak terlepas karena posisi geografis Kecamatan Pangkalanbaru yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu kota Pangkalpinang. Posisi ini memberikan imbas yang menjadikan Kecamatan Pangkalanbaru memiliki karakteristik wilayah yang bercirikan kota dengan tumbuhnya

pusat-pusat permukiman dan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sungaiselan. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah kecamatan Sungaiselan sebagai kecamatan terluas di kabupaten Bangka Tengah.

2.1.1.3.5. Komposisi dan Populasi Penduduk

Tingkat Pendidikan penduduk di suatu daerah ikut menunjukkan pembangunan kualitas manusia dan mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Tabel II.19 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Belum sekolah	34.483	39.540	37.195	35.843	39.503
2.	Tidak tamat SD	25.673	23.272	27.519	29.862	29.636
3.	SD	65.392	65.702	66.854	72.312	71.467
4.	SLTP	20.300	20.693	21.208	21.860	22.043
5.	SLTA	25.475	26.524	27.167	27.532	27.999
6.	D 2	581	538	528	521	500
7.	D 2I	1.601	1.683	1.729	1.754	1.793
8.	S1	3.706	4.192	4.427	4.581	4.903
9.	S2	117	134	149	161	171
10.	S3	7	8	7	6	7
Total		177.335	182.286	186.783	194.432	198.022

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 masyarakat yang berpendidikan tamat SD ke bawah sangat tinggi yaitu berjumlah 140.606 jiwa dari jumlah penduduk 198.022 jiwa sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan membaik akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang,

semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran serta dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan indikator penting yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan inflasi. PDRB sebagai suatu indikator punya peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan meski tidak serta merta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel II.20 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Bangka Tengah dari Tahun 2016-2021.

Tabel II.20 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha

	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,87	0,66	6,12	6,09	9,67	0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,10	-2,42	-3,86	5,59	-7,88	5,52
C	Industri Pengolahan	2,60	6,59	-2,71	-44,91	0,98	4,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,76	5,67	6,80	20,05	7,81	12,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,81	8,23	-3,79	4,17	2,63	4,43
F	Konstruksi	7,06	3,85	4,57	9,28	-0,29	4,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,34	7,48	5,28	4,74	-4,10	5,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,42	6,78	8,03	1,28	-24,58	7,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	4,98	6,07	9,25	-2,05	9,92
J	Informasi dan Komunikasi	6,20	7,52	11,98	14,52	17,88	8,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	2,08	1,40	9,16	3,45	5,49
L	Real Estat	2,11	3,64	3,95	4,98	4,73	6,16
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	3,31	5,19	3,98	-9,06	5,24
O	Administrasi Pemerintahan,	6,01	3,84	8,78	10,95	-3,66	5,29

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P Jasa Pendidikan	7,70	5,16	7,26	9,39	-0,15	2,21
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,42	6,88	4,34	9,81	3,46	13,17
R,S,T,U Jasa lainnya	5,17	5,93	6,91	8,97	-2,45	2,94
Laju Pertumbuhan PDRB	3,05	3,46	3,42	1,21	-2,86	4,76

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat sementara

Berdasarkan Tabel II.20, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah masih menunjukkan angka positif, meskipun sempat terjadi perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi menurun dari 3,46 % di tahun 2017 menjadi 3,42 % di tahun 2018 dan terus turun di tahun 2019 menjadi 1,21 %. Penurunan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan di tahun 2019 terjadi disebab oleh tingginya kontraksi pertumbuhan di sektor industri pengolahan dikarenakan berhenti beroperasinya salah satu industri pengolahan logam yang disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang memicu berhenti beroperasinya salah satu perusahaan pengolahan logam yang terjadi hampir merata se-pulau Bangka Belitung. Namun di tahun 2020, disebabkan pandemi Covid19, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dipaksa mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi sehingga terjadi penurunan angka PDRB ADHK menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di angka minus 2,87% Bercermin dari data tersebut, perlu adanya terobosan-terobosan dalam mendongkrak angka laju pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang supaya kondisi ekonomi dapat pulih kembali. Kemudian di tahun 2021 pertumbuhan PDRB ADHK mengalami peningkatan cukup tinggi dengan tumbuh positif sebesar 4,76%, hal ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada sektor yaitu Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,17%, Pengadaan listrik dan gas 12,50% dan Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,92%.

Gambar II.11 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pendapatan. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam periode waktu yang sama.

Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang diturunkan dari penghitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga produsen. Untuk kepentingan analisis, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat diperlukan dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Nilai Inflasi rata-rata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2020 disajikan pada Tabel II.21 di bawah ini.

Tabel II.21 Nilai Inflasi Rata-Rata

Uraian	Nilai Inflasi (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflasi Kota Pangkalpinang	7,78	3,45	2,31	0,52	3,60	3,45
Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	3,18	2,62	1,08	3,75	3,18
Inflasi Nasional	3,02	3,13	2,27	1,68	1,87	3,13

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah, 2022)

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Tabel II.21 menunjukkan nilai inflasi di tingkat nasional, provinsi, dan Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2021. Laju inflasi Kabupaten Bangka Tengah, kota Koba sebagai ibukota kabupaten mengikuti angka inflasi Pangkalpinang di karenakan jarak kota Pangkalpinang dekat dengan kota Koba, sehingga perkembangan inflasinya hampir sama. Perkembangan nilai inflasi selama enam tahun menunjukkan pola fluktuatif, inflasi dari tahun 2016 s.d 2021, dari Tabel II.21 di atas angka inflasi menunjukkan masih golongan yang sehat berarti positif karena menghasilkan peningkatan upah dan profitabilitas perusahaan dan membuat modal mengalir dalam ekonomi yang terus tumbuh. Selama segala sesuatunya bergerak relatif positif, inflasi tidak akan merugikan. Cara lain untuk melihat sejumlah kecil inflasi adalah bahwa ia mendorong konsumsi. Misalnya diasumsikan jika membeli barang tertentu, dan tahu harganya akan naik 2-3% dalam setahun, dan terdorong untuk membelinya sekarang. Dengan demikian, inflasi dapat mendorong konsumsi yang pada gilirannya dapat lebih merangsang ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan kemakmuran penduduk. Angka Indeks Gini yang diperoleh dengan menggunakan data pengeluaran cenderung “*under estimate*” karena pengeluaran konsumsi bagi penduduk kaya biasanya lebih rendah dari pada pendapatannya (ada tabungan). Sebaliknya bagi penduduk miskin pengeluarannya bisa sama atau lebih besar

dari pendapatannya, karena ada pinjaman, mengambil tabungan, menjual aset atau menerima kiriman dari pihak lain.

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ ketimpangan (G) adalah:

$G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah,

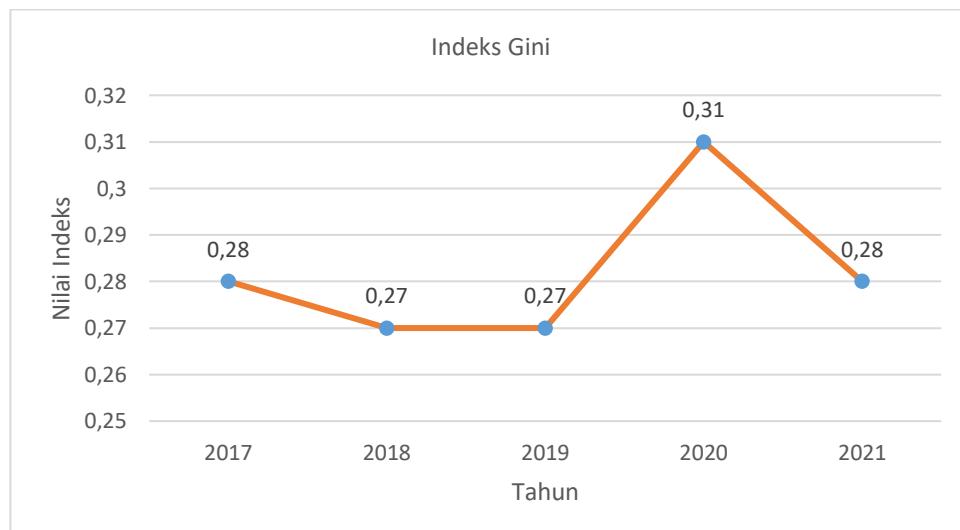
$0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang

$G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi

Gambar Grafik 2.13 di bawah ini merupakan grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 sd. 2021.

Dari tahun ke tahun nilai indeks gini menampakkan tren meningkat meskipun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 indeks gini bernilai 0,28 dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 nilai indeks gini bernilai 0,31. Peningkatan nilai indeks gini ini kemudian mengalami penurunan kembali yaitu pada tahun 2021 nilai indeks gini kembali pada nilai 0,28. Untuk selanjutnya, nilai indeks gini mengalami perubahan yang fluktuatif namun tetap menunjukkan trenline meningkat. Sehingga, pada tahun 2022 nilai indeks gini menjadi 0,23 dan diharapkan tahun 2023 menjadi 0,20.

Gambar II.12 Grafik Nilai Indeks Gini



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 dan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2020 (Data diolah, 2021)

Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak dikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan maka tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin.

2.1.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjadi salah satu komponen data strategis karena dijadikan sebagai ukuran hasil kinerja pemerintah. Metode baru yang digunakan pada komponen IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu komponen kesehatan yang berupa Angka Harapan Hidup (AHH), komponen pendidikan yang meliputi dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Komponen yang terakhir yaitu komponen ekonomi yang diukur dari pengeluaran per kapita. Gambar II.15 berikut menunjukkan capaian IPM Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017 - 2021.

Gambar II.13 Grafik IPM Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Gambar II.15 di atas menunjukkan bahwa kondisi IPM di Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 terus mengalami kenaikan. Capaian IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sebesar 70,89. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,44 point dibandingkan dengan IPM Tahun 2020 sebesar 70,45. Hal ini dapat dipastikan secara umum kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan. Masing-masing indikator komponen IPM tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel II.23 di bawah ini.

Tabel II.22 Indikator Penyusunan IPM

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
AHH (tahun)	70,49	70,78	71,16	71,36	71,52
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,74	11,75	11,76	11,81	12,10
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,79	6,80	7,13	7,19	7,20
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)	12.330	12.836	13.070	12.909	12.945

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Secara umum, 3 indikator penyusunan indikator IPM Kabupaten Bangka Tengah, yaitu komponen AHH, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama sekolah pada tahun 2017 – 2021 memiliki *trend* yang meningkat, dan Pengeluaran Per Kapita Rill juga meningkat.

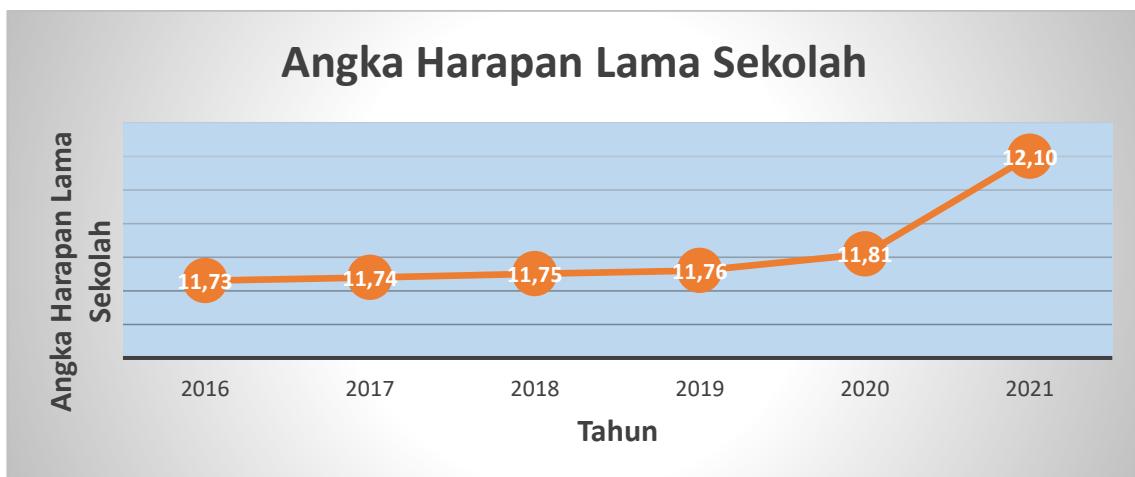
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Kualitas Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM salah satunya adalah harapan lama sekolah. Dengan melihat besaran harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu ukuran kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada penduduk berusia 7 tahun keatas. Tingkat atau ukuran angka harapan lama sekolah yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah akan mampu memberikan gambaran kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Bisa dikatakan bahwa apabila angka harapan lama sekolah di suatu wilayah rendah berarti di wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas pembangunan pendidikan yang kurang dibandingkan dengan wilayah yang memiliki angka harapan lama sekolah lebih tinggi. Gambar II.16 menunjukkan grafik harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar II.16 Grafik Harapan Lama Sekolah



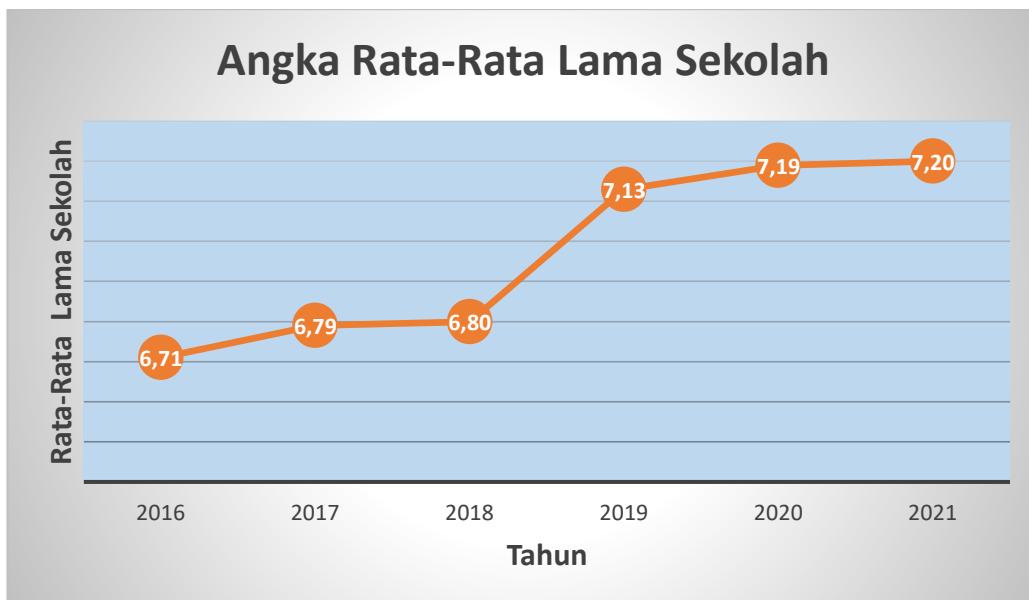
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Gambar II.16 grafik di atas, perkembangan angka Harapan Lama Sekolah di Bangka Tengah selama periode tahun 2016–2021 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 11,73 tahun menjadi 12,10 tahun pada tahun 2021, artinya, pada tahun 2021 penduduk usia sekolah (usia 7 tahun) di Kabupaten Bangka Tengah memiliki peluang sekolah sampai dengan kelas 2 SMA/SMK. Besaran nilai Harapan Lama Sekolah yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah masih jauh dari nilai maksimalnya yaitu 18 tahun. Kondisi ini tentunya dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha untuk memajukan pembangunan pendidikan karena angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses.

2.1.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Grafik perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar II.17 di bawah ini.

Gambar II.14 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Gambar II.17 grafik di atas, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah selama 2016 s.d 2021 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 6,71 tahun di tahun 2016 menjadi 7,20 tahun di tahun 2021, meskipun masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 8,48 tahun. Artinya, pada tahun 2021 penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hanya sampai dengan kelas 1 SMP. Peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersebut dapat dimaknai bahwa penduduk Bangka Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.2.2 Kualitas Kesehatan

2.1.2.2.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama disektor kesehatan. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus d2kuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang baik. Grafik Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Gambar II.18 di bawah ini.

Gambar II.18 Grafik Angka Harapan Hidup (AHH)



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Gambar II.18 menunjukkan perkembangan AHH di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 2016 s.d 2021 menunjukkan *trend* peningkatan. AHH di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 tercatat sebesar 70,38 tahun dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 71,52 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 memiliki peluang hidup hingga usia lebih dari 71 tahun. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi.

2.1.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score <-3 SD (sangat kurus) dan atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut

umur maupun menurut panjang bedanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel II.24 menunjukkan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2017-2021.

Tabel II.24 Jumlah Balita Gizi Buruk

No	Balita Gizi Buruk	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Balita	13.370	14.385	13.760	13.802	13.786
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	8	12	5	4	9
3.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,06	0,08	0,05	0,02	0,07
4.	Prevalensi balita stunting	n/a	6,94	5,47	5,11	3,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2017 s.d 2021 berfluktuatif. Pada Tabel II.24 diatas, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2021 persentase balita gizi buruk Kabupaten Bangka Tengah adalah 0,07%. Dari segi pelayanan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100% atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan. Kasus balita gizi buruk pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,05% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni terdapat 9 orang balita dengan gizi buruk. Adanya peningkatan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan adanya penyakit penyerta yang ditemukan pada balita tersebut. Tindak lanjut dalam penanganan balita gizi buruk telah dilakukan pada tahun 2021 berupa pemberian makanan tambahan dan penanggulangan gizi bermasalah. Penanganan kasus balita gizi buruk juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi kasus stunting di Kabupaten Bangka Tengah.

Perbaikan gizi masyarakat khususnya penanganan stunting pada balita dari tahun ke tahun sudah mengalami perbaikan hal ini dapat dilihat dari pada Tabel II.24 di atas. Prevalensi stunting dari tahun 2018 sebesar 6,94 persen, turun menjadi 3,31persen pada tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan adanya intervensi oleh pemangku kepentingan dan seluruh stake holder. Salah satu bentuk intervensi gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanggulangan balita stunting antara lain pemberian tablet vitamin A dan obat kecacingan kepada balita secara rutin pada bulan Februari dan Agustus, pemberian tablet vitamin A pada ibu nifas, pemberian tablet penambah darah pada ibu hamil dan remaja, deteksi tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan ibu hamil, kurang energi kronis dan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang, promosi ASI ekslusif, kesprocatin dan lain sebagainya.

2.1.2.2.2. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS, HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom up*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI 2/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Desa Siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Tabel II.25 cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat di bawah ini.

Tabel II.25 Cakupan Desa Siaga Aktif

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa siaga	63	63	63	63	63
2	Jumlah desa siaga aktif	35	20	18	2	3
3	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	55,56	31,74	28,57	3,17	4,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.25 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah desa siaga yang aktif di Kabupaten Bangka Tengah meningkat menjadi 3 desa bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya ada 2 desa siaga. Desa siaga tersebut adalah Desa Terentang, Padang Baru dan Lubuk Besar. Ketiga desa tersebut menjadi desa lokasi khusus yang dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Gerakan Masyarakat Desa Mandiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah mealui Dinas

Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah akan terus berupaya mengaktifkan kembali Desa Siaga dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

2.1.2.2.3. Tingkat Pengangguran

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang nantinya akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Keadaan ketenagakerjaan tidak terlepas dari kondisi penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk khususnya komposisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk yang masuk dalam usia kerja menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk penduduk usia kerja akan berkaitan dengan kenaikan jumlah Angkatan kerja.

Tabel II.26 Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	93.626	98.297	97.778	100.904	95.386
Bekerja	90.465	94.437	93.483	95.267	90.663
Pengangguran	3.161	3.860	4.295	5.637	4.723
Bukan Angkatan Kerja	41.545	40.178	42.610	41.520	48.611
Sekolah	8.935	10.942	10.757	9.951	9.321
Mengurus Rumah Tangga	28.929	24.878	28.318	27.688	34.416
Lainnya	3.681	4.358	3.535	3.881	4.874
Total	135.171	138.475	140.388	142.424	143.997

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel II.26 di atas, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2021 sebanyak 143.997 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 95.386 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya) sebanyak 48.611 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 90.663 jiwa yang telah bekerja, sedangkan sisanya 4.723 sedang mencari pekerjaan.

Tabel II.23 TPT dan TPAK

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	69,26	70,99	69,65	70,85	66,24
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,38	3,93	4,39	5,59	4,95

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tingkat pengangguran merupakan persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga menganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganannya untuk menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri akan berdampak positif juga untuk orang lain. Pada perekonomian maju, sebagian besar orang menjadi pengangguran memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, sebagian besar pengangguran yang diamati dalam periode tertentu dapat disebabkan oleh sekelompok yang tidak bekerja untuk waktu yang lama. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 4,95 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, ada sekitar 4-5 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Indikator ini merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat memicu tingginya angka pengangguran. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sebesar 66,24 persen, artinya sebesar 66,24 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi.

Tabel II.24 Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penduduk yang bekerja	90.465	94.437	93.483	95.267	90.663
2.	Angkatan kerja	93.626	98.297	97.778	100.904	95.386
3.	Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,62	96,07	95,60	94,41	95,05
4.	Rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	66,93	68,19	66,59	66,89	66,24

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Keterangan: n/a tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia

Tabel II.28 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2017-2021. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Sedangkan rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Berdasarkan hasil Tabel II.28 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 penduduk yang bekerja mencapai sebesar 90.663 jiwa, sedangkan rasio kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 66,93 persen sampai dengan 66,24 persen. Saat ini, jumlah kesempatan kerja yang tersedia atau kemampuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja masih mengalami pertumbuhan yang lambat.

Tabel II.29 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB (Rp. Juta)	5.620.615	5.812.697	5.884.096	5.715.024	5.986.898,22
2	Jumlah penduduk yang bekerja (Jiwa)	90.465	94.437	93.483	95.267	90.663
3	PDRB per kapita tenaga kerja (Rp. Juta)	62,13	61,55	62,94	59,99	66,03
4	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	-5,75*	-0,93	2,26	-4,70	4,76

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022 (Data diolah, 2022)

Keterangan: n/a tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB ADHK, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah

orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Pada Tabel II.29 di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja mengalami pasang surut. Pada tahun 2020, terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar -4,70% hal ini secara umum disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,76%.

2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel II.30 IPG dan IDG

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
IPG	90,83	91,04	91,05	91,49	91,34
IDG	55,76	56,39	57,31	57,31*	56,81

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan DPPKBPPP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2020 IPG Bangka Tengah 91,49% sedangkan Pada Tahun 2021 menurun menjadi 91,34% hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 yang berdampak pada perubahan tatanan kehidupan social serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara wilayah Indonesia, tak terkecuali di kabupaten bangka tengah.

Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada Tahun 2020 IDG Bangka Tengah 57,5% mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 56,81% hal ini disebabkan juga oleh pandemic covid 19 berlangsung sejak tahun 2020 yang berdampak pada perubahan

tatanan kehidupan social serta menurunnya partisipasi perempuan yang aktif dalam bidang politik dan ekonomi.

2.1.2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan besar di berbagai daerah yang menjadi tantangan untuk diselesaikan, kemiskinan menjadi isu strategis dalam pembangunan karena tidak hanya berkaitan dengan masalah pendapatan namun menyangkut banyak aspek lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan dan perumahan. Kondisi kemiskinan di Bangka Tengah pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel II.31 sebagai berikut:

Tabel II.31 Persentase Penduduk Miskin

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	11.39	11.12	9,80	9,64	10,1
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,07	5,81	5,03	4,85	5,13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,57	0,42	0,52	0,72	0,63
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,10	0,06	0,10	0,14	0,11
Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Perkapita)	653.308	680.907	693.842	721.331	735.479

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.31 di atas jumlah penduduk miskin naik sebesar 0,39 dari 9,64 pada tahun 2020 menjadi 10,03 pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,28% dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 4,85% menjadi 5,13% pada tahun 2021, hal ini sebagai salah satu dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 adalah 0,72 sedangkan pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,63. Hal ini menunjukkan dalam waktu 1 tahun mengalami penurunan sebesar 0,09.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan Bangka Tengah sebesar 0,14 mengalami penurunan 0,11 mengalami penurunan sebesar 0,03%.

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 sebesar Rp 735.439,- naik sebesar Rp. 14.148,- dari tahun 2020 sebesar Rp. 721.331,-.(Gambar II.19).

Gambar II.19 Grafik Penduduk Miskin

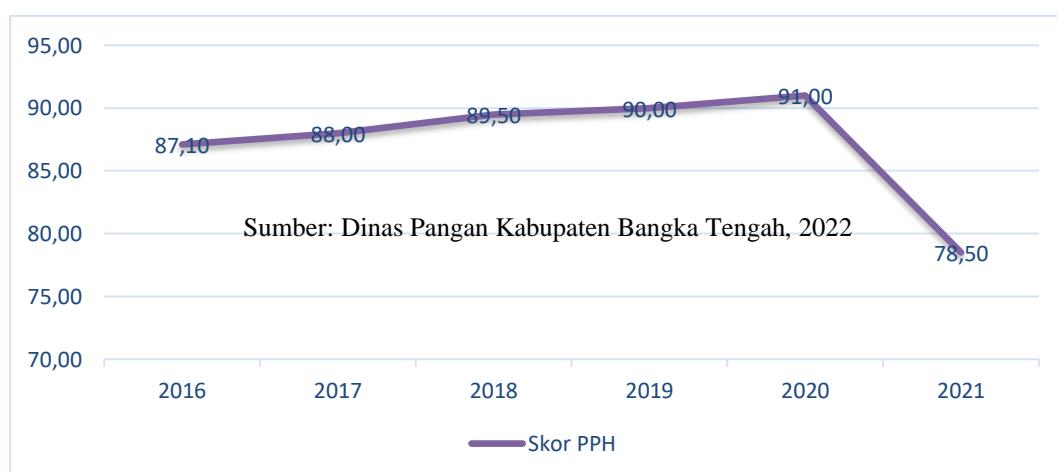


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.2.2.6. Ketahanan Pangan

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Gambar II.20 Grafik Skor PPH



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing

kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (berasal dari 100% dibagi 3). Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74%. Bobot untuk kelompok pangan ini adalah 0.5 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 74%).
- b) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan total kontribusi energi 17%, diperoleh bobot 2.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 17%).
- c) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energi 6%, diperoleh bobot 5.0 (berasal dari nilai 33.3% dibagi 6%).
- d) Kelompok pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3% akan diperoleh bobot 0.0 yang berasal dari nilai 0% dibagi 3. Bobot 0.0 untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Berdasarkan Gambar II.20 menunjukkan, Skor PPH Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 Skor PPH sebesar 78,50%, kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata skor PPH menurut agroekologi masih di bawah skor PPH ideal (100). Skor PPH yang masih jauh dari skor ideal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan cenderung belum beragam dan kualitas pangan yang dikonsumsi pun masih rendah. Karena tinggi dan rendahnya skor PPH

tergantung pada pencapaian sumbangan setiap kelompok pangan pangan (9 kelompok bahan pangan deptan 2001).

2.1.2.2.7. PDRB

2.1.2.2.7.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah diGambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Tabel II.32 menunjukkan PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 sd. 2021.

Tabel II.32 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1,206,301.55	1,172,831.87	1,247,183.11	1,467,627.41	1,592,394.66
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,377,649.09	1,255,913.41	1,240,414.41	1,136,061.04	1,379,536.49
C.	Industri Pengolahan	713,905.84	737,912.46	482,618.44	537,770.47	616,302.68
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,763.48	5,193.44	6,379.87	6,977.77	7,830.97
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	613.22	632.85	665.50	696.26	735.92
F.	Konstruksi	835,981.26	908,244.63	1,036,408.63	1,036,933.98	1,098,918.92
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,286,945.51	1,391,899.92	1,500,883.92	1,447,624.15	1,582,182.25
H.	Transportasi dan Pergudangan	857,137.17	930,041.63	1,026,241.22	692,213.30	788,648.40
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,685.66	279,769.09	324,595.72	337,588.10	372,587.80
J.	Informasi dan Komunikasi	141,399.44	151,132.47	174,122.79	204,279.55	222,750.30
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	50,368.52	54,999.17	60,989.81	62,963.82	69,438.07
L.	Real Estat	238,797.11	250,985.52	267,895.57	294,522.51	314,776.97
M,N.	Jasa Perusahaan	20,117.92	22,468.90	24,632.81	23,575.95	24,936.87
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	586,470.48	626,404.50	699,250.36	701,258.90	741,991.91
P.	Jasa Pendidikan	250,471.87	268,430.79	300,613.51	300,275.48	313,785.12
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,755.99	119,301.53	131,763.41	140,362.99	161,609.49
R, S,T, U.	Jasa lainnya	33,846.08	37,155.21	42,236.44	42,514.38	44,422.15
PDRB TOTAL		7,972,210.19	8,213,317.39	8,566,895.53	8,433,246.06	9,332,848.97

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat sementara

Besaran nilai PDRB ADHB lapangan usaha menunjukkan postur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun berjalan, atau dikenal juga dengan istilah PDRB nominal. Berdasarkan data di atas, nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan yaitu dari 7,972 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,566 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB ADHB menjadi 8,433 triliun rupiah. Terjadinya penurunan nilai PDRB ini secara umum merupakan imbas terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020. Dan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 9,332 triliun rupiah.

2.1.2.2.7.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tabel II.33 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019*	2020*	2021**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	791,936.11	840,383.22	891,584.79	977,776.07	978,837.99
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,052,794.30	1,012,199.54	1,068,810.01	984,594.60	1,038,984.82
C.	Industri Pengolahan	608,068.30	591,603.10	325,927.01	329,110.89	344,216.68
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,698.60	2,881.99	3,459.77	3,730.11	4,196.45
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	396.50	381.48	397.38	407.85	425.92
F.	Konstruksi	563,240.16	588,982.24	643,652.49	641,796.62	669,186.49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	928,355.70	977,418.82	1,023,701.76	981,736.56	1,034,640.27
H.	Transportasi dan Pergudangan	546,400.20	590,255.81	597,833.80	450,879.29	483,181.92
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	156,937.50	166,465.27	181,864.27	178,131.95	195,799.66
J.	Informasi dan Komunikasi	122,210.76	136,848.41	156,717.52	184,741.57	200,565.03
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	33,719.33	34,190.11	37,322.64	38,608.96	40,728.84
L.	Real Estat	156,202.80	162,372.81	170,458.98	178,529.63	189,527.29
M,N.	Jasa Perusahaan	14,087.50	14,818.20	15,407.96	14,012.52	14,746.90
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	392,662.10	427,146.30	473,918.82	456,591.27	480,748.79
P.	Jasa Pendidikan	149,907.40	160,785.00	175,883.11	175,626.24	179,509.38
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	78,344.60	81,746.16	89,763.86	92,868.64	105,098.29

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019*	2020*	2021**
Sosial						
R, S,T, U.	Jasa lainnya	22,653.10	24,219.00	26,391.44	25,746.03	26,503.49
PDRB TOTAL		5,620,615	5,620,614.96	5,812,697.46	5,883,095.61	5,714,888.79

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat sementara

Jika PDRB ADHB dikenal sebagai PDRB nominal, maka PDRB ADHK menunjukkan nilai PDRB dari suatu wilayah. PDRB ADHK dihitung untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berdasarkan tahun dasar, yaitu tahun 2010. Berdasarkan Tabel 2-39 di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021, PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami pertumbuhan. Namun, seperti halnya yang terjadi pada nilai PDRB ADHB, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai PDRB ADHK kabupaten Bangka Tengah terkontraksi menjadi sebesar -2,87% yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 adalah penurunan beberapa sektor PDRB.

Gambar II.21 Grafik PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.2.2.7.3. Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya:

pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; pertambangan dan penggalian; transportasi dan pergudangan dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 17,51 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 17,13 persen. disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 13,43 persen. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,18 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,19 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dari Tahun 2016 hingga 2020 untuk semua lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.34 dibawah ini:

Tabel II.34 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	15,69	15,13	14,28	14,56	17,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	18,33	17,28	15,29	14,48	13,43
C.	Industri Pengolahan	8,74	8,96	8,98	5,63	6,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	10,36	10,49	11,06	12,11	12,28
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,34	16,14	16,95	17,52	17,13
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,62	10,75	11,32	11,98	8,19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
J.	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,77	1,84	2,03	2,42
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,63	0,67	0,71	0,75
L.	Real Estate	2,98	3,00	3,06	3,13	

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**	2020
						3,52
M,N.	Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,27	0,29	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	7,36	7,63	8,16	8,32
P.	Jasa Pendidikan	3,10	3,14	3,27	3,51	3,56
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,43	1,45	1,55	1,66
R, S,T, U.	Jasa lainnya	0,41	0,42	0,45	0,49	0,50
PDRB TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat sementara

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Seni dan budaya yang telah beradaptasi dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu daerah. Seni dan budaya lahir dari karya dan cipta rasa masyarakat mempunyai peran dalam pembangunan suatu daerah karena akan mempengaruhi karakter masyarakat selain itu juga akan melahirkan kearifan lokal. Seni dan budaya juga akan melahirkan berbagai karya seni di masyarakat, pada Tabel II.35 menunjukkan jenis kesenian beserta jumlah grup/sanggar yang ada di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2017-2021.

Tabel II.35 Jenis Kesenian

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Grup/ Sanggar				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Campak Dalung	1	1	1	1	1
2.	Dambus	11	11	11	11	12
3.	Rebana	10	10	10	10	11
4.	Rudat	2	2	2	2	3

No.	Jenis Kesenian	Jumlah Grup/ Sanggar				
		2017	2018	2019	2020	2021
5.	Tari Kreasi Daerah	6	6	6	6	7
6.	Hadroh	2	2	3	4	6
7.	Barongsai	1	1	1	2	3
8.	Kuda Lumping	1	2	2	3	4
	Jumlah	34	35	36	39	47

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.35 menunjukkan bahwa sanggar Campak Dalung hanya ada 1 sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Kesenian Campak Dalung merupakan seni asli Bangka Tengah yang dibawa dan dikembangkan oleh turunan Suku Sekak yang ada di Baskara Bhakti, saat ini pimpinan Campak Dalung adalah Pak Batman. Sementara itu, Grup Dambus berjumlah 12 grup , tersebar di Kecamatan Koba 2 grup, Kecamatan Pangkalanbaru 3 grup, Kecamatan Simpangkatis 2 grup, Kecamatan Namang 2 grup, Kecamatan Sungaiselan 1 grup, Kecamatan Lubuk Besar 2 grup. Grup Rebana berjumlah 11 grup, tersebar di Kecamatan Koba 4 grup, Kecamatan Pangkalanbaru 3 grup, Kecamatan Simpangkatis 3 grup dan Kecamatan Namang 1 grup. Grup Rudat berjumlah 3 grup, tersebar di Kecamatan Koba 1 grup, Kecamatan Pangkalanbaru 1 grup, Kecamatan Namang 1 grup. Sanggar Tari Kreasi Daerah berjumlah 7 sanggar, tersebar di Kecamatan Koba 1 sanggar, Kecamatan Pangkalanbaru 1 sanggar, Kecamatan Sungaiselan 3 sanggar, Kecamatan Simpangkatis 1 sanggar, Kecamatan Lubuk Besar 1 sanggar. Grup Hadroh berjumlah 6 grup, tersebar di Kecamatan Koba 2 sanggar, Kecamatan Pangkalanbaru 2 sanggar, Kecamatan Simpangkatis 2 sanggar. Grup Barongsai berjumlah 3 grup, tersebar di Kecamatan Koba 1 grup, Kecamatan Pangkalanbaru 1 grup, Kecamatan Namang 1 grup. Grup Kuda Lumping berjumlah 4 grup, tersebar di Kecamatan Koba 3 grup , Kecamatan Pangkalanbaru 1 grup.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sampai dengan Tahun 2020, cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 8 BCB (benda cagar budaya) tersebar di beberapa desa di kecamatan. Tabel II.36 menunjukkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.36 Cagar Budaya*

No	Nama Situs	Lokasi	Keterangan
1.	Sumur Tujuh	Koba	Terawat
2.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Perpustakaan Daerah
3.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Kantor Pos Koba
4.	Kantor Keresidenan VOC Belanda	Koba	Difungsikan sebagai Mess Pemda
5.	Rumah Adat Tradisional Bangka	Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar	Difungsikan sebagai tempat tinggal warga (Mahmud Kasam)
6.	Mercusuar Tanjung Berikat	Lubuk Besar	Terawat
7.	Makam Belanda DW Becking	Sungaiselan	Tidak Terawat
8.	Mercusuar Pulau Pelepas	Sungaiselan	Terawat

Keterangan: * dalam proses registrasi

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

2.1.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menjaga kesehatan. Namun demikian, kegiatan berolahraga juga menjadi ajang kompetisi untuk mendapatkan prestasi bagi suatu daerah yang terwakili oleh keikutsertaan para atlet dalam berbagai pertandingan. Prestasi yang diperoleh para atlet dalam berbagai pertandingan dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan olahraga di suatu daerah. Tahun 2017 hingga tahun 2021 para atlit Bangka Tengah telah menunjukkan presatasinya dalam berbagai kompetisi olahraga dengan menyumbangkan medali di tingkat Provinsi dan Nasional dalam beberapa kejuaraan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.37.

Tabel II.37 Jumlah Medali dari Kejuaran Tingkat Provinsi dan Nasional

No.	Jenis Medali	Jumlah Grup/ Sanggar				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Emas	12	64	4	4	36
2.	Perak	20	82	8	2	9
3.	Perunggu	25	73	13	8	8
	Total	57	219	25	14	53

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Perolehan medali di tingkat nasional berjumlah 2 yaitu PON XX di Papua dengan perolehan medali perunggu 2 buah dari cabang olahraga Atletik a.n Suwandi Wijaya dan Gorri.

Sebanyak 51 medali merupakan diperoleh pada kejuaraan di tingkat Provinsi seperti Kejuaraan Provinsi Taekwondo (12 emas, 3 perak dan 2 perunggu), Kejuaraan Renang tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (21 emas, 5 perak dan 1 perunggu), Youth Basketball Association (3 perunggu), Honda Basketball League (2 emas) dan Kejuaraan Sepeda Sport tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1emas dan 1 perak).

Jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagaimana pada Tabel II.38.

Tabel II.38 Sarana dan Prasarana Olahraga

Nama Sarana Olahraga	Kecamatan	Tahun						Satuan
		20	20	20	20	20	20	
		16	17	18	19	20	21	
Jumlah Lapangan Bola Voli	Koba	36	36	36	36	36	29	Unit
	Pangkalan Baru	11	11	11	11	11	15	Unit
	Sungai Selan	22	22	22	23	23	25	Unit
	Simpang Katis	28	28	28	28	28	21	Unit
	Namang	16	16	16	16	16	16	Unit
	Lubuk Besar	20	20	20	20	20	16	Unit
5. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri								Unit
6. Jumlah Velodrome								Unit
7. Jumlah Arena Bowling								Unit
8. Jumlah Rumah Billiard	Koba	1	1	1	1	1	1	Unit
	Pangkalan Baru						1	1
9. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	Koba							Unit
	Pangkalan Baru							Unit
	Sungai Selan							Unit
	Simpang Katis							Unit
	Namang							Unit
	Lubuk Besar							Unit
10. Jumlah Lapangan Bola Basket	Koba	5	5	5	5	5	8	Unit
	Pangkalan Baru	5	5	5	5	5	5	Unit
	Sungai Selan	0	1	1	1	1	3	Unit
	Simpang Katis	0	0	1	1	1	0	Unit
	Namang	4	4	4	4	4	4	Unit
	Lubuk Besar	3	3	3	3	3	2	Unit
11. Jumlah Lapangan Tenis	Koba	1	1	1	1	3	3	Unit
	Pangkalan Baru							Unit
	Sungai Selan							Unit
	Simpang Katis							Unit

Nama Sarana Olahraga	Kecamatan	Tahun						Satuan
		20	20	20	20	20	20	
		16	17	18	19	20	21	
	Namang							Unit
	Lubuk Besar							Unit
12. Jumlah Lapangan Futsal	Koba	11	11	11	11	11	10	Unit
	Pangkalan Baru	4	4	4	4	4	7	Unit
	Sungai Selan	5	5	5	5	5	5	Unit
	Simpang Katis	13	13	13	13	13	8	Unit
	Namang	2	2	2	2	2	3	Unit
	Lubuk Besar	3	3	3	3	3	1	Unit
13. Jumlah Stadion Sepak Bola	1. Tipe A							Unit
	2. Tipe B	1	1	1	1	1	1	Unit
	3. Tipe C	87	87	87	87	87	87	Unit
14. Jumlah Stadion Atletik	1. Tipe A			1	1	1	1	Unit
	2. Tipe B							Unit
	3. Tipe C							Unit
15. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	1. Desa	79	81	82	82	82	67	Unit
	2. Kota	5	6	7	8	8	12	Unit
16. Jumlah Gedung Olahraga	1. Tipe A							Unit
	2. Tipe B				1	1	1	Unit
	3. Tipe C	1	1	2	2	2	2	Unit
17. Jumlah Kolam Renang				1	1	1	1	Unit
Total		36	36	37	37	38	35	

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.38 diatas adanya penurunan jumlah sarana dan prasarana olahraga, pada tahun 2021 sebanyak 355 unit sarana dan prasarana olahraga sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 380 unit hal ini dikarenakan ada 25 unit sarana olahraga yang tidak difungsikan lagi sebagai prasarana olahraga karena hanya berupa lahan kosong, terlalu dekat dengan perumahan penduduk, tidak adanya rehabilitasi.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan pembangunan Pendidikan. Pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua merupakan tujuan keempat dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai komponen terkait pendidikan harus mendapatkan perhatian yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengelolaan pendidikan dasar
- 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini
- 3) Pengelolaan pendidikan nonformal
- 4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
- 5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
- 6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
- 7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan
- 8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator **harapan lama sekolah** dan **rata-rata lama sekolah** sebagai indikator kinerja utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, saasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

2.1.3.1.1.1.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berdampak positif pada peningkatan keberhasilan pembangunan. Jenis Pelayanan

Dasar yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

Realisasi standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016-2018 sebagaimana Tabel II.39.

Tabel II.39 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2016-2018

No.	Indikator	Tahun (%)			
		2016	2017	2018	
	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	100	100	100	100
	Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten/Kota	47,73	53	52	
1.	Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen daerah terpencil				
2.	Untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTS tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	18	54	63	48
3.	Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Lab IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	16,12	33		
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	100	100	100	100
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	70	85	99	
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (orang) guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	70	85	80	
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik	5	18	17	
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	70	70	91	
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik,masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, IPA dan Bahasa Inggris.	100	100	100	
10.	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100	
11.	Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100	100	100	

No.	Indikator	Tahun (%)		
		2016	2017	2018
12.	Di setiap Kabupaten/Kota semua Pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidikan.	100	100	100
13.	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			
14.	Kunjungan Pengawas ke satuan Pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	80	85	81
Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan				
1.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	56,38	85	90
2.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.	67,56	85	87
3.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan Bahasa yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA.	75	85	87
4.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	75	85	87
5.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.			
6.	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sbb : kelas I-2 : 18 jam perminggu kelas 21 : 24 jam perminggu kelas IV-VI : 27 jam perminggu kelas V2-IX: 27 jam perminggu	100	100	100
7.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
8.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100	100	100

No.	Indikator	Tahun (%)			
		2016	2017	2018	
9.	Setiap Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.	100	100	100	
10.	Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100	100	100	
11.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi peserta didik	100	100	100	
12.	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan Kota atau kantor kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semester terkait tulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab	100	100	100	
13.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	47,73	53	52	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021c

Tabel II.40 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	97,74	99,98	98,33
2.	Pendidikan Dasar (%)	96,32	92,62	97,61
3.	Pendidikan Kesetaraan (%)	13,43	77,75	77,75

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.39 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016-2018 SPM pendidikan masih mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang SPM pendidikan dasar dikabupaten / kota. Sedangkan capaian SPM tahun 2019 s.d. 2021 mengacu pada Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang standard teknis pelayanan minimal Pendidikan (Tabel II.40). Tahun 2021 untuk SPM Jenis Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini dari target penduduk pada usia 5-6 tahun berjumlah 7.439 orang telah terealisasi sebanyak 7.315 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran orangtua untuk memasukkan anak mereka ke pendidikan usia dini sudah sangat baik dan anak-anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini cukup tinggi di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar dari target penduduk yang berusia 7-15 tahun berjumlah 36.629 orang dan terealisasi sebanyak 35.753 orang, (97,61 %), sehingga disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka sudah baik terutama pada jenjang SD dan SMP. SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan dari target penduduk berjumlah 45.789, hanya ada 35.601 orang yang terealisasi atau hanya sebanyak 35.601 orang yang ikut sekolah formal dan nonformal Paket baik A, B dan C sedangkan sisanya tidak ikut sekolah paket, putus sekolah atau sekolah diluar Kabupaten Bangka Tengah..Dinas Pendidikan akan terus berupaya agar penduduk yang tidak sekolah tersebut dapat mengikuti sekolah formal maupun nonformal melalui Paket A, Paket B atau Paket C. Saat ini, di Kabupaten Bangka Tengah di setiap kecamatan telah ada Lembaga PKBM baik untuk sekolah Paket A, Paket B dan Paket C. Pada Lembaga PKBM tersebut juga tersedia bantuan operasional langsung dari pusat (DAK Non Fisik) yaitu BOP Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

2.1.3.1.1.1.2. Capaian Indikator Kinerja Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang dimaksud dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Di bawah ini adalah Tabel jumlah siswa PAUD dan TK di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.25 Jumlah Siswa PAUD Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Koba	1.075	1.058	1.779	1.561	1.563
2.	Pangkalan Baru	645	610	1329	1.267	1.150
3.	Sungai Selan	287	333	997	908	910
4.	Simpang Katis	313	330	807	836	774
5.	Namang	721	298	731	614	659
6.	Lubuk Besar	611	726	960	900	918
Total		3.530	3.164	3.652	6.603	6.686

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pada Tabel II.41 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah siswa PAUD di setiap kecamatan dengan jumlah siswa PAUD tertinggi ialah Kecamatan Koba, sedangkan kecamatan dengan jumlah siswa PAUD terendah pada Tahun 2021 yaitu Kecamatan Namang. Hal ini disebabkan dari jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 162 lembaga di Kecamatan Koba jumlahnya lebih banyak yaitu 44 lembaga sehingga jumlah siswa akan lebih banyak, dibanding jumlah PAUD di kecamatan lainnya. Jumlah PAUD di Kecamatan Namang lebih sedikit

yaitu 19 lembaga sehingga jumlah siswanya juga sedikit, dibanding jumlah PAUD di kecamatan lainnya.

Jumlah siswa TK menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.42.

Tabel II.26 Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Koba	751	749	861	660	644
2	Pangkalan Baru	696	744	786	750	748
3	Sungai Selan	568	640	732	669	667
4	Simpang Katis	389	463	502	571	503
5	Namang	291	406	435	346	341
6	Lubuk Besar	280	309	283	275	276
Total		2.422	2.975	3.311	3.599	3.271

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Berdasarkan data pada Tabel II.42 pada Tahun 2021 kecamatan dengan jumlah siswa TK tertinggi ialah Kecamatan Pangkalanbaru, sedangkan kecamatan dengan jumlah siswa TK terendah ialah Kecamatan Lubuk Besar sebesar 276 orang dengan 5 jumlah lembaga. Jumlah TK negeri dan swasta di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 68 lembaga. Sedangkan Jumlah TK negeri maupun swasta di Kecamatan Pangkalanaru sebanyak 14 lembaga sehingga jumlah siswanya akan lebih banyak yang berjumlah 748 orang. Kecamatan Lubuk Besar dengan jumlah lembaganya yang lebih sedikit yaitu 5 lembaga, baik TK negeri dan TK swasta sehingga jumlah siswanya juga sedikit yang berjumlah 276 orang.

2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Tabel II.43 menunjukkan Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.27 Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SD/MI	65.392	65.702	66.854	72.312	72.412
2	Jumlah Penduduk	177.335	182.286	186.783	194.432	198.022
3	APT SD/MI (%)	36,87	36,04	35,79	37,19	36,57
SMP/MTs						
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	20.300	20.693	21.208	21.860	22.085
2	Jumlah Penduduk	177.335	182.286	186.783	194.432	198.022
3	APT SMP/MTs (%)	11,45	11,35	11,35	11,24	11,15
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	25.475	26.524	27.167	27.532	27.850
2	Jumlah Penduduk	177.335	182.286	186.783	194.432	198.022
3	APT SMA/MA/SMK (%)	14,37	14,55	14,54	14,16	14,06
Perguruan Tinggi						
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi	6.012	6.555	6.840	7.023	7.228
2	Jumlah Penduduk	177.335	182.286	186.783	194.432	198.022
3	APT Perguruan Tinggi (%)	3,39	3,60	3,66	3,61	3,65

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022 dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.43 dapat di lihat bahwa perkembangan APT menunjukkan tren adanya peningkatan di setiap tahunnya, artinya semakin tahun kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin besar.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di

masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Tabel II.44 menunjukkan perkembangan Persentase APK Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.28 Perkembangan APK

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PAUD						
1.	Jumlah murid pada jenjang TK/RA/penitipan anak	6.666	6.578	8.067	9.341	8.644
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	6.278	10.998	11.855	11.232	11.012
3.	APK PAUD (%)	67,02	68,01	68,05	83,16	78,50
SD/MI						
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	23.092	23.831	24.111	24.541	25.600
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.161	20.495	23.524	24.558	24.847
3.	APK SD/MI (%)	109,13	116,28	102,50	99,93	103,03
SMP/MTs						
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan SMP/MTs	9.322	9.810	9.756	10.720	11.868
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.215	9.690	9.609	11.417	11.782
3.	APK SMP/MTs (%)	91,26	101,24	101,53	93,90	100,73
SMA/MA/SMK						
1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.833	7.277	8.227	8.396	7.507
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.944	10.070	10.575	9.498	10.062
3.	APK SMA/MA/SMK (%)	68,71	72,26	77,80	88,39	74,61

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2021 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Tabel II.44 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan PAUD terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,66 persen, jumlah siswa seluruh baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs sebanyak 24.847 orang dan jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 11.782 orang. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 25.600 orang dan usia 13-15 tahun berdasarkan data penduduk Dinas Capil sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 11.868 orang. Untuk nilai APK yang turun dari tahun sebelumnya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat enggan menyekolahkan anaknya ke PAUD;
- 2) Terjadinya faktor pertumbuhan jumlah penduduk usia 4 sampai 6 tahun yang sangat signifikan kenaikannya dibandingkan dengan jumlah siswa PAUD seluruhnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Tahun 2021 Nilai APK SD/MI dan SMP/MTs telah melebihi dari 100%. Hal ini disebabkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Faktor zonasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, masyarakat yang tinggal di daerah tertentu harus menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
- 2) Sedikitnya jumlah mutasi siswa SD/MI dan SMP/MTs ke luar Kabupaten Bangka Tengah.
- 3) Kesadaran pentingnya pendidikan sudah semakin meningkat.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel II.45 menunjukkan perkembangan APM di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.29 Perkembangan APM

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	19.659	19.101	20.073	20.769	21.364
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.161	20.495	23.524	24.558	24.847
3	APM SD/MI (%)	92,90	93,20	85,33	84,57	85,98
SMP/MTs						
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	6.642	6.353	6.691	6.800	8.348
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.215	9.690	9.609	11.417	11.782
3	APM SMP/MTs (%)	64,99	65,56	69,63	59,56	70,85
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4702	5308	6.108	6.103	5.624
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9944	10070	10.575	9.498	10.062
3	APM SMA/MA/SMK (%)	47,28	52,71	57,76	64,26	55,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Indikator APM (Angka Partisipasi Murni) juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Peningkatan APM yang baik ini dikarenakan :Bertambahnya jumlah anak usia 6 tahun yang sudah masuk sekolah di SD/MI serta usia 12 tahun sudah masuk di SMP/MTs.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tabel perkembangan APS di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.46 di bawah ini.

Tabel II.30 Perkembangan APS

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1.	Jumlah siswa usia 7-12 tahun	19.652	19.098	20.051	20.658	21.419
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.161	20.495	23.524	24.558	24.847
3.	APS SD/MI (%)	929	932	852	842	862
SMP/MTs						
1.	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	6.622	6.340	6.691	6.525	8.348
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.215	9.690	9.609	11.417	11.782
3.	APS SMP/MTs (%)	648	654	696	572	708
SMA/MA/SMK						
1.	Jmlah siswa usia >15 + Jmlh siswa 16-18	5173*	5500*	5823*	6.103	5.624
2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9944	10070	10.575	9.498	10.062
3.	APS SMA/MA/SMK (%)				643	559

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Perkembangan APS di tahun 2021 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah trennya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 trennya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

6. Angka Putus Sekolah (APts)

Angka Putus Sekolah (APts) merupakan persentase anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah. Perkembangan APts di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 sd. 2021 dapat dilihat pada Tabel II.47 di bawah ini.

Tabel II.31 Perkembangan APS

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1.	Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah	76	86	69	53	110
2.	Jumlah seluruh siswa SD/MI	22.930	23.741	23.950	24.221	24.095
3.	APts SD/MI (%)	0,33	0,36	0,29	0,22	0,46
SMP/ MTs						
1.	Jumlah siswa SMP/ MTs yang putus sekolah	55	56	97	43	85
2.	Jumlah seluruh siswa SMP/ MTs	9.122	9.568	9.756	9.894	10.065
3.	APts SMP/ MTs (%)	0,60	0,59	0,99	0,43	0,84
SMA/SMK/MA						
1.	Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang putus sekolah	97*	95*	149*	145	11
2.	Jumlah seluruh siswa SMA/SMK/MA	5.537*	5.889*	6.219*	7.880	7.507
3.	APts SMA/SMK/MA (%)	1,75	1,61	2,39	1,84	0,20

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Angka Putus Sekolah (APts) tahun 2021 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan 0,24 persen dari tahun sebelumnya yaitu 0,46 persen pada tahun 2021, dari 0,22 persen pada tahun 2020. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan 0,41 persen pada tahun 2021 yaitu 0,84 persen dari 0,43 persen pada tahun 2020. Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah sebanyak 110 orang, dan jumlah putus sekolah SMP/MTs sebanyak 85 orang. Angka putus sekolah ini dihitung dari jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan mutasi atau ikut orang tua bertugas di luar Kabupaten Bangka Tengah serta siswa yang berhenti sekolah dikarenakan masalah ekonomi dan masalah sosial.

Permasalahan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sesuai standar minimal pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

7. Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Perkembangan AL di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam Tabel II.48 di bawah ini.

Tabel II.32 Perkembangan AL

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	3.548	3.444	3.604	3.821	3.649
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	3.558	3.454	3.616	3.837	3.672
3.	AL SD/MI (%)	99,72	99,71	99,67	99,58	99,37
SMP/ MTs						
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs	2.504	2.745	2.861	7.037	3.094
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/ MTs pada tahun sebelumnya	2.519	2.754	2.873	3.048	3.132
3.	AL SMP/ MTs (%)	99,40	99,67	99,58	99,64	98,79
SMU/SMK/MA						
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMU/SMK/MA	1.643	1.892	2.083	2.117	
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA pada tahun sebelumnya	1.494	1.648	1.896	2.091	
3.	AL SMU/SMK/MA (%)	109,97	114,80	109,86	101,24	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pada Tabel. 2.48 menunjukkan bahwa Persentase Angka Kelulusan (AL) pada jenjang SD/MI tahun 2021 terealisasi 99,37 %, Angka Kelulusan (AL) jenjang SMP/MTs tercapai 98,79 %. Perolehan angka persentase ini berdasarkan fakta yang ada bahwa jumlah siswa kelas 6 SD sebanyak 3.672 orang dan yang lulus hanya 3.649 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat 23 orang siswa yang tidak lulus. Jumlah siswa kelas IX (SMP) sebanyak 3.132 orang dan yang lulus hanya 3.094 orang. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat 38 orang siswa yang tidak lulus.

8. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.49 berikut ini.

Tabel II.33 Perkembangan AM

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI ke SMP/MTs						
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	3.354	3.315	3.451	3.690	3.535
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	3.548	3.444	3.604	3.821	3.649
3.	AM SD/MI ke SMP/MTs	94,53	96,25	95,75	96,57	95,57
SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA						
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	2154*	2162*	2350*	2570*	
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya	2.504	2.745	2.861	3.037	3.094
3.	AM SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA	86,02	78,76	82,13	84,62	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel II.49 menunjukkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2021 mencapai 95,57% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,18 persen. Data tersebut diambil dari jumlah siswa baru tingkat 1 SMP sebanyak 3.535 siswa terhadap siswa lulusan SD sebanyak 3.649. Fakta ini menunjukkan peningkatan siswa SD/MI yang telah melanjutkan SMP di Kabupaten Bangka Tengah.

9. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah komponen penting dalam pelaksanaan Pendidikan.–Ketersediaan sarana dan prasarana akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah ialah kondisi bangunan yang baik. Data kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam Tabel II.50 di bawah ini.

Tabel II.34 Perkembangan Kondisi Bangunan Sekolah Baik

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	690	710	743	768	978
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SD/MI	807	819	845	870	1.054
3.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	85,50	86,69	87,93	88,28	92,79
SMP/MTs						
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	275	291	305	316	791
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs	289	302	314	352	865
3.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,16	96,36	97,13	89,77	91,45
SMA/ MA /SMK						
1.	Jumlah sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	114*	122*	124*	107*	
2.	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK	191*	206*	212*	219*	
3.	Sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	59,68	59,22	58,49	48,85	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pada tahun 2021 jumlah bangunan sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik berjumlah 978 bangunan. Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SD/MI 1.054 sekolah, dan sekolah pendidikan SD/MI bangunan dalam kondisi baik yaitu 92,79 persen. Sementara itu, untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2021 jumlah sekolah pendidikan SMP/Mts dalam kondisi bangunan baik 791 bangunan. Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs sebanyak 865 sekolah, dan sekolah pendidikan SMP/MTs dalam kondisi bangunan baik yaitu 91,45 persen.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi sekolah. Dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat yang nantinya juga akan mendukung pencapaian wajar pendidikan dasar 12 tahun. Ketersediaan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.51 di bawah ini.

Tabel II.35 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1	Jumlah Gedung Sekolah	101	101	101	101	102
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.176	21.498	23.613	24.558	24.847
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	48	47	43	41	41
SMP/MTs						
1	Jumlah Gedung Sekolah	29	30	30	30	31
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10.213	10.125	10.282	11.417	11.782
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	28	30	29	26	26
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Gedung Sekolah	11*	12*	13*	13*	13
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.650	8.099	6.506		10.062
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMU/MA/SMK					13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel II.51 di atas menunjukkan bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tahun 2021 tersedia 41 sekolah. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021 tersedia 26 sekolah untuk setiap 10.000 anak usia sekolah. Oleh karena itu perlu direncanakan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang agar rasio ketersediaan sekolah dapat ditingkatkan.

11. Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar

Rasio guru siswa perpendidikan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 10.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru dan siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, atau 16 – 18 tahun). Rasio guru siswa perpendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel II.52 berikut ini.

Tabel II.36 Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1	Jumlah Guru	1.117	1.197	1.302	1.249	1.321
2	Jumlah Murid	22.930	23.741	23.950	24.001	24.095
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	487	504	544	520	548
SMP/MTs						
1	Jumlah Guru	431	530	445	588	654
2	Jumlah Murid	9.122	9.568	9.756	9.894	10.065
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	472	554	456	594	650
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Guru	292*	327*	347*	427	426
2	Jumlah Murid	5.537*	5.889*	6.219*	7.880	7.095
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMU/MA/SMK	527	555	557	542	600

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel II.52 menunjukkan bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2021 untuk jenjang SD/MI terdapat 1.321 jumlah guru, 24.095 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SD/MI yaitu 548 orang. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021 untuk jenjang SMP/MTs terdapat 645 jumlah guru, 10.065 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SMP/MTs yaitu 650 orang. Untuk jenjang SMU/MA/SMK terdapat 426 jumlah guru, 7.095 jumlah murid dan rasio guru/murid sekolah SMU/MA/SMK sebesar 600 orang.

12. Rasio Guru Siswa per Kelas

Rasio guru siswa perpendidikan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 1.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru dan siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, atau 16 – 18 tahun). Rasio guru siswa perpendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel II.53 berikut ini

Tabel II.37 Rasio Guru Siswa per Kelas

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI						
1	Jumlah Guru	1.117	1.197	1.302	1.249	1.321
2	Jumlah Murid	22.930	23.741	23.950	24.001	24.095

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	48	50	54	52	55
SMP/MTs						
1	Jumlah Guru	431	530	445	588	654
2	Jumlah Murid	9.122	9.568	9.756	9.894	10.065
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	47	55	46	59	65
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Guru	292*	327*	347*	179*	
2	Jumlah Murid	5537*	5889*	6219*	6794*	
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMU/MA/SMK	52,7	55,5	55,7	54,2	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel II.53 diatas menunjukan bahwa rasio guru/murid sekolah SD/MI pada tahun 2020 yaitu 52 orang, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 55 orang, Sedangkan untuk rasio guru/murid sekolah SMP/MTs pada tahun 2020 yaitu 59 orang, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 65 orang.

13. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan jumlah guru berijazah kualifikasi berbanding terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.54 berikut ini :

Tabel II.38 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi	1.352	1.523	1.506	1.651	2.129
2	Jumlah guru seluruh	2.089	1.548	1.727	1.879	2.586
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,34	88,19	82,21	87,87	82,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Tabel II.54 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru sebesar 82,33%, 17,67% guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Namun demikian, saat ini beberapa guru sedang melanjutkan pendidikannya ke tingkat S1/D-IV.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi tahun 2021 mengalami penurunan,dari 87,87 persen pada tahun 2020 menjadi 82,33 % dari jumlah guru yang telah S1 2.129 terhadap jumlah guru seluruh sebesar 2.586, ada sekitar 457 guru yang belum S1/D4. Hal ini disebabkan sebagian guru lulusan Strata 1(satu) telah pensiun dan kurangnya minat guru yang berusia diatas 55 tahun untuk melanjutkan menyelesaikan program pendidikan Strata 1(Satu).

14. Guru yang Bersertifikasi

Guru yang bersertifikasi merupakan jumlah guru bersertifikasi terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.55 berikut ini:

Tabel II.39 Guru yang Bersertifikasi

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Percentase guru yang bersertifikat SD/MI	62,76	62,32	61,21	55,46
2	Percentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	36,43	33,21	35,66	33,67
3	Percentase guru yang bersertifikat SMA/MA/SMK	69,35	65,04	66,04	65,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, 2022 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Pada Tabel II.55 diatas, persentase guru yang bersertifikat jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 sebesar 55,46 persen terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu 49,51 persen dan persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs juga terjadi penurunan juga yaitu 33,67 persen tahun 2020 menjadi 29,97 persen pada tahun 2021.

Untuk penghitungan persentase guru yang memenuhi sertifikasi yaitu dihitung dengan perbandingan jumlah guru SD, SMP seluruh yang telah sertifikasi terhadap jumlah guru seluruh SD, SMP x 100%. Penurunan persentase guru yang bersertifikat dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat guru yang belum lulus *passing grade Pretest PPG* dalam jabatan;
- 2) Masih belum tersedianya kuota PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah yang diselenggarakan terpisah oleh Kementerian Agama;
- 3) Masih belum tuntasnya raport guru pembelajar melalui SIM-PKB untuk menunjang pemenuhan *passing grade pretest PPG* dalam jabatan; dan
- 4) Jumlah guru bersertifikat pendidik yang pensiun (purna tugas) tidak sebanding dengan guru yang mendapatkan sertifikat pendidik.

2.1.3.1.1.2. Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi 12 jenis layanan dasar.

2.1.3.1.1.2.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Tabel II.56 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (org)	n/a	3.496	3.672	3.588	3211
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (org)	n/a	3.313	3.559	3.339	3209
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir (org)	n/a	3.148	3.567	3.402	3290
4	Pelayanan Kesehatan Balita (org)	n/a	9.947	10.107	9.950	8492
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (org)	n/a	6.788	32.153	23.555	13.811
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (org)	n/a	72.982	97.738	63.307	99.813
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (org)	n/a	9.621	11.615	8.582	8.837
8	Pelayanan Pada Penderita Hipertensi (org)	n/a	11.204	27.879	14.088	21.144
9	Pelayanan Pada Penderita Diabetes Melitus (org)	n/a	4.157	3.502	3.625	3.496
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (org)	n/a	233	296	322	339
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (org)	n/a	160	1.360	1.032	1.068
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinveksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) (org)	n/a	3.324	3.823	3.281	3.158

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.56 menunjukkan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian standar pelayanan minimal, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, diantaranya dengan tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana berupa unit pelayanan kesehatan yang baik dan terakreditasi beserta perlengkapan penunjangnya yang memadai. Beberapa indikator tidak tercapai dikarenakan implementasi inovasi yang telah dijalankan kurang maksimal, kurangnya kesadaran masyarakat secara aktif memeriksakan kesehatannya, pandemi covid-19 yang menyebabkan ibu hamil/pasien tidak mengunjungi pelayanan kesehatan dikarenakan penerapan protokol kesehatan yang mengharuskan mereka untuk di rumah serta pelayanan yang dihentikan untuk sementara seperti pelayanan posyandu, posbindu, kelas ibu hamil dan pelayanan yang sifatnya tatap muka.

2.1.3.1.1.2.2. Capaian Indikator Kinerja Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBt)

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), capaian Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bangka Tengah mengalami trend yang fluktuatif. Dibanding tahun 2020, kematian ibu di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 6 orang ibu yang meninggal atau sebesar 179,2/ 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 4 orang ibu atau sebesar 114, 84/100.000 kelahiran hidup (1 kematian ibu hamil dan 3 kematian ibu nifas). Kematian ibu disebabkan antara lain oleh *stroke hemoragic*, pendarahan dengan penyakit penyerta leukimia dan pre eklampsia berat. Sedangkan kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2017 – 2021), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bangka Tengah juga memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 14 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan ini disebabkan antara lain: asfiksia, bayi dengan berat lahir rendah(BBLR), kelainan kongenital dan penyakit penyerta.

Perkembangan AKI, AKB per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.57 di bawah ini.

Tabel II.57 Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita dan Neonatal

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kelahiran Bayi	3351	3500	3581	3505	3396
2.	Jumlah Bayi Lahir Hidup	3327	3479	3564	3482	3348
3.	Jumlah Kematian Bayi	17	21	8	23	48
4.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	4,99	6,04	2,24	6,6	14,1
5.	Angka Kelangsungan hidup bayi	-3,99	-5,04	-1,24	-5,6	-4,37
6.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,01	7,76	3,37	8,0	5,7
7.	Angka Kematian Neonatal	2,05	3,45	0,84	4,0	4,5

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
per 1000 kelahiran hidup						
8.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,00	172,56	168,35	114,84	179,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.57 menunjukkan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita dan Neonatal di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017-2021. Dari Tabel II.57 terlihat jumlah kematian bayi meningkat pada tahun 2020-2021. Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita adalah:

- 1) Masih kurangnya jumlah Bidan di fasilitas pelayanan dasar yang belum dilatih manajemen asfiksia, manajemen Bayi dengan Berat Lahir Rendah/BBLR, dan Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal/PPGDON.
- 2) Terlambatnya penanganan bayi baru lahir sehingga terlambat mendapat pertolongan di tempat rujukan (rumah sakit) terutama sejak pandemi Covid-19, disebabkan kekhawatiran orang tua membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan terlambat .

Di Kabupaten Bangka Tengah, kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak difokuskan pada intervensi layanan kesehatan yang berbasis komunitas antara lain dibutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih, sistem rujukan yang adekuat serta infrastruktur yang jelas dengan tetap mengedepankan pendidikan dan promosi kesehatan.

2. Fasilitas Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan angka kesakitan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan semakin meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO di tujuh puskesmas dan akreditasi di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.58 menunjukkan rasio Posyandu per 1000 balita dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Tabel II.58 ini terlihat pada tahun 2021 jumlah posyandu berjumlah 140 buah dan jumlah balita yang mendapat pelayanan berjumlah 13.786 balita. Dengan demikian rasio posyandu per 1000 balita adalah

Tabel II.58 Rasio Posyandu per 1000 Balita

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	138	138	136	140
2	Jumlah balita yang mendapat pelayanan	15.450	14.752	13.760	13.802
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	8,93	9,35	9,88	10,14
					10,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebanyak 140 buah dan jumlah balita sebanyak 13.786 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 10:1000. Hal ini berarti bahwa dari 10 posyandu di Kabupaten Bangka Tengah melayani 1000 balita.

Tabel II.59 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	8	9	9	9
2.	Jumlah Poliklinik	0	0	0	0
3.	Jumlah Pustu	20	20	20	13
4.	Jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu	28	29	29	22
5.	Jumlah penduduk	188.603	192.429	196.196	198.946
6.	Rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu per 1000 penduduk	0,15	0,15	0,15	0,09
					0,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.59, jumlah puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2021 berjumlah 9 (sembilan) unit. sementara itu, pada tahun 2021 poliklinik sudah tidak ada lagi.

Tahun 2021 terdapat penambahan jumlah Pustu sebanyak 5 Pustu. Pada Tahun 2020 jumlah Pustu 8 unit, meningkat menjadi 13 unit pada tahun 2021. yang tersebar di wilayah berikut: Puskesmas Lampur sebanyak 5 (lima) Pustu, wilayah Puskesmas Sungaiselan sebanyak 3 (tiga) Pustu, wilayah Puskesmas Benteng sebanyak 1 (satu) Pustu, wilayah Puskesmas Namang sebanyak 3 (tiga) Pustu dan wilayah Puskesmas

Simpangkatis sebanyak 1 (satu) Pustu. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Tabel II.60.

Tabel II.60 Cakupan Puskesmas

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah puskesmas	8	9	9	9	9
2	Jumlah seluruh kecamatan	6	6	6	6	6
3	Cakupan Puskesmas (%)	133	150	150	150	150

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pembangunan dan pengembangan rumah sakit beserta sarana dan prasarannya juga merupakan upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Bangka Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan masyarakat. Tabel II.61 menunjukkan rasio rumah sakit per 1000 penduduk.

Tabel II.61 Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ POLRI	-	-	-	-	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	2	2
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	3	4
6.	Jumlah Penduduk	188.603	192.429	196.196	198.946	201.861
7.	Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk	0,011	0,010	0,010	0,015	0,019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.61 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah rumah sakit sehingga jumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 berjumlah 4 (empat) unit yaitu RSUD Bangka Tengah, RS Pratama, RS Bayangkara dan RS Siloam.

3. Tenaga Kesehatan

SDM atau tenaga Kesehatan memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Dalam peran tersebut diharapkan agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tenaga kesehatan sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya strategis. Sebagai sumber daya strategis, tenaga kesehatan harus mampu secara optimal menggunakan kemampuan yang dimiliki agar dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pelayanan Kesehatan dengan optimal.

Tabel II.40 Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dokter Umum	27	54	35	68	75
2.	Dokter Spesialis	7	7	7	36	58
3.	Dokter Gigi	8	11	10	15	16
4.	Bidan	249	566	333	174	202
5.	Perawat	112	314	129	182	258
6.	Apoteker	8	21	9	9	39
7.	Teknis Kefarmasian	31	36	32	32	74
8.	Epidemologi Kesehatan	6	9	9	9	9
9.	Sanitasi Lingkungan	14	13	13	21	24
10.	Nutrisionis	18	12	12	22	30
Jumlah tenaga kesehatan		480	1043	589	568	785
Jumlah Penduduk		188.603	192.429	196.196	198.946	201.861
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk		2,55	5,42	3,00	2,86	3,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.62, dapat terlihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan sanitasi lingkungan di fasilitas pelayanan dasar dan rujukan. Penambahan dokter spesialis tahun 2021 sebanyak dua puluh dua dokter spesialis. Penambahan ini dikarenakan para dokter yang berstatus PNS yang menjalani tugas belajar telah menyelesaikan tugas belajar sesuai spesialisasi yang mereka ambil melalui dana APBD Kabupaten Bangka Tengah serta sudah ditempatkan kembali di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.63 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	648	619	727	559	518
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	750	750	753	758	758
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	86,42	82,5	96,6	73,8	68,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.63 menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 68,3 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 73,8 persen dikarenakan komplikasi kebidanan pada ibu hamil cepat tertangani dan hubungan kemitraan yang baik dengan rumah sakit rujukan yang terdapat di luar Bangka Tengah.

Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mempunyai kontribusi terhadap pencapaian pertolongan persalinan kepada ibu hamil. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemda Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan layanan Kesehatan pada masyarakat khususnya kepada ibu melahirkan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.64.

Tabel II.41 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	3.323	3.485	3.559	3.484	3.357
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3.578	3.751	3.594	3.603	3.603
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,9	97,2	99	96,7	93,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.64, dapat dilihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2021 sebesar

93,2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 96,7 persen, maka terjadi penurunan 3,5%. Hal ini terjadi dikarenakan ada ibu hamil yang melahirkan ke fasilitas atau kabupaten lain di luar Kabupaten Bangka Tengah dan tidak terlaporkan.

Indikator lain yang menjadi rujukan untuk melihat pelayanan kesehatan masyarakat adalah *Universal Child Immunization* (UCI).

Tabel II.65 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	62	63	61	34	26
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	63	63	63	63	63
3	Cakupan desa/kelurahan UCI (%)	98,41	100	96,83	53,96	41,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Tabel II.65, dapat dilihat bahwa persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2021 menurun menjadi 26 desa dari 63 desa atau sebesar 41,27%, dikarenakan pandemi Covid 19 sehingga fasilitas kesehatan termasuk posyandu menghentikan sementara kegiatan yang sifatnya kerumunan/kelompok.

Pelayanan kesehatan balita juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Pemda Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kualitas kesehatan balita. Cakupan pelayanan Kesehatan balita pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan Tabel II.66.

Tabel II.66 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan	8	12	5	4	9
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	8	12	5	4	9
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4.	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi	94,28	89,96	91,51	80,3	64,9

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
campak (%)						
5.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1	3	0	0	6,8
6.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	56,87	31	34,9	14,55	15,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.66 menunjukkan bahwa jumlah balita yang mendapat perawatan pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020, dan untuk persentase anak usia 1 (satu) tahun yang diimunisasi campak menurun jika dibandingkan dibanding tahun 2020, hal ini berbanding lurus dengan capaian UCI yang menurun di tahun 2021.

Sementara itu, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.67.

Tabel II.67 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita Penderita Penyakit TBC BTA (+)	107	238	100	249	140
2.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1/100000	1/100000	1/100000	1/100000	1/100000
3.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3	2	0	13	19
4.	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	85	104	142	207	104
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
6.	Cakupan Penderita diare yang ditangani (%)	0	15,91	2,68	0,16	21,6
7.	Angka kejadian Malaria	0	29	5	0	1
8.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
9.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0,0058	0,0062	0,0046	0,006	<0,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.67, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular periode 2020-2021 di Kabupaten Bangka Tengah secara persentase nilainya mengalami penurunan. Penurunan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sadar akan pentingnya memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan

peran tenaga kesehatan yang aktif melakukan upaya *promotof, preventif, curative* dan *rehabilitative*.

Tabel II.42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin	13819	27991	49074	34031	57046
2.	Jumlah seluruh penduduk miskin	35972	37548	39327	39338	64527
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujuk Pasien Masyarakat Miskin (%)	38,4	74,5	124,8	86,5	88,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.68 menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2021, dari Tabel II.68 ini terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 88,4%. Dibanding tahun 2020, kunjungan tersebut meningkat dikarenakan dampak dari Covid 19, masyarakat miskin mengalami peningkatan, dan banyak masyarakat yang berobat adalah masyarakat miskin.

Pada Tabel II.69 menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tabel II.69 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lainnya

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan kunjungan bayi (%)	95%	93,34%	106,4%	98,86%	94%
2.	Cakupan puskesmas	150%	150%	150%	150%	150%
3.	Cakupan pembantu puskesmas	91,49%	90,69%	97,58%	94,5%	
4.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	96,51%	98,3%	94,55%	91,7%	84,4%
5.	Cakupan pelayanan nifas (%)	99,8%	117,7%	100,80%	90,67%	82,5%
6.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	85,7%	71,7%	96,4%	60,06%	73,7%
7.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	n/a	71,7%	96,45%	62,1%	84,4%
8.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	99,2%	99,8%	68,67%	100%

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
9.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100%	100%	100%	100%	38,39%
10.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	93,34%	100%	100%	100%
12.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	95%	93,34%	106,4%	98,86%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.69 menunjukkan capaian pelayanan kesehatan lainnya dari tahun 2017 sd. 2021. Beberapa indikator mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 antara lain: cakupan kunjungan bayi, cakupan kunjungan ibu hamil, cakupan pelayanan nifas. cakupan di atas mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Namun demikian, keberhasilan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sudah terpenuhi 100 persen, ini menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi hak dasar kesehatan masyarakat miskin sudah dilakukan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sudah dilakukan 100 persen. Selain itu, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin pada tahun 2021 juga sudah terpenuhi 100 persen. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan maka kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Tengah juga meningkat.

2.1.3.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.1.3.1. Sub Urusan Pekerjaan Umum

2.1.3.1.1.3.1.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka Tengah yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Capaian yang telah terealisasi untuk pelayanan dasar tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.70.

Tabel II.43 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (%)	74,20	76,55	82,08	82,22	85,27
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	86,18	90,80	92,33	93,52	95,45

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Program pengembangan pengelolaan air minum di Kabupaten Bangka Tengah didukung melalui pendanaan APBD dan APBN. Tabel II.70 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, capaian realisasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari sebesar 85,27 persen, meningkat sekitar 3,05 persen dari capaian realisasi tahun sebelumnya walaupun masih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Berbagai sumber pendanaan mendukung pencapaian akses air minum diantaranya APBD, APBN serta DAK. Kegiatan yang dilaksanakan pun tidak hanya yang berbentuk kegiatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah akan tetapi juga

dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan berbasis masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberlangsungan prasarana dan sarana air bersih yang sudah terbangun sehingga dapat memberikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari – hari.

Tabel II.44 Realisasi Capaian Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak

No	Rumus Indikator Kinerja	Target 2021		Realisasi 2021	
		Jml Rumah Tangga berakses air minum	%	Jml Rumah Tangga berakses air minum	%
1	Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	46.599 55.200	84,42	46.932 55.039	85,27
Jumlah rumah tangga Kab. Bangka Tengah					102,04
Percentase Capaian					102,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah, 2022

Tabel II.71 menjelaskan bahwa target indikator kinerja capaian rumah tangga yang mendapat akses air minum layak sebesar 84,42% atau 46.599 rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan akses air minum berbanding 55.200 (angka prediksi) jumlah rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Kemudian capaian realisasi indikator kinerja sasaran adalah sebesar 85,27 % yakni sebanyak 46.932 rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan akses air minum berbanding dengan 55.039 jumlah rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah semester 2 tahun 2021, sehingga capaian indikator sebesar 101,01 % dari target yang ditetapkan. Ini artinya pada tahun 2021 terjadi peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum. Jika dibandingkan dengan 93,59 % target capaian akhir RPJMD 2021 - 2026 maka pencapaian sasaran tahun berjalan (2021) sebesar 91,11%.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2021 telah melampaui target dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2016 - 2021. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersedian anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta etos kerja pegawai sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi. Diharapkan dalam menuju

target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD di tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian kinerja air minum juga dapat diraih dengan dukungan *stakeholder* dan masyarakat antara lain :

1. Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021
2. Program Kegiatan Dana APBN yang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Program/ Kegiatan PAMSIMAS 2I di Kabupaten Bangka Tengah
4. Dana APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
5. Pembangunan sumber air bersih yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel II.70, realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum, untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, meningkat pada tahun 2021 sebesar 95,45 persen. Peningkatan sebesar 10,18 persen dari tahun 2020 secara tidak langsung menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dengan memanfaatkan prasarana pengolahan limbah domestik. Program dan kegiatan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sumber pendanaan diperoleh dari APBD, APBN maupun DAK. Kontribusi masyarakat dalam pemenuhan pengolahan air limbah dilakukan dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah misalnya kegiatan pembangunan IPAL yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS) di lokasi setempat dengan sumber pendanaan yang berasal dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagian besar pembangunan instalasi air limbah dihibahkan kepada penerima manfaat sehingga masyarakat penerima manfaat turut andil dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan air limbah.

Adapun capaian kinerja berdasarkan rumus pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel II.72 berikut ini:

Tabel II.72 Realisasi Capaian Rumah Tangga yang mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak

No	Rumus Indikator Kinerja	Tahun 2020		Target 2021		Realisasi 2021	
		%	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	
1	rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	93,52	<u>52.186</u> 55.200	94,54	<u>52.535</u> 55.039	95,54	
Jumlah rumah tangga Kab. Bangka Tengah		Percentase Capaian				100.9	6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah

Tabel II.72 menjelaskan bahwa target indikator kinerja sebesar 94.54 % atau 52.186 rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan akses sanitasi (air limbah domestik) layak berbanding 55.200 angka prediksi rumah tangga (target) yang menempati hunian dengan layanan akses sanitasi (air limbah domestik) layak Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Kemudian terdapat capaian realisasi indikator kinerja sasaran sebesar 95.54 % yakni 52.535 rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan akses sanitasi (air limbah domestik) layak berbanding 55.039 rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Dengan demikian, capaian kinerja indikator yang dihasilkan adalah sebesar 100.96 % dari target yang ditetapkan. Ini artinya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak sebanyak 52.535 rumah.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2021 telah melampaui target dalam RPJMD 2016 - 2021. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan, ketersedian anggaran yang tercukupi dan sarana maupun prasarana kerja yang memadai serta ethos kerja pegawai yang tinggi sebagai faktor pendorong kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dapat diatasi, diharapkan dalam menuju target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026 kinerja ini dapat tetap dipertahankan sehingga target pada akhir RPJMD pada tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian Kinerja Air Limbah dapat tercapai dengan dukungan *stakeholder* dan masyarakat antara lain :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021
2. Dana APBN yang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dana APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
4. Pembangunan sarana sanitasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Secara umum peningkatan pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sejalan dengan “Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*)”. Prasarana pengelolaan air minum dan pengelolaan air limbah selama ini dibangun melalui pendanaan APBD dan APBN dengan sistem kontraktual maupun swakelola masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara berbagai fasilitas air bersih dan pengolahan air limbah juga sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung keberlanjutan program.

2.1.3.1.1.3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum

Capaian indikator kinerja pekerjaan umum pada tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel II.73..

Tabel II.73 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	56,71	61,38	65,12	65,53	71,90
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/jiwa)	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031	0,0021
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	65,72	70,54	73,70	74,42	71,90
5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	10,69	10,95	11,27	11,31	n/a
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang	0	0	0	0	0

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
kaki lima atau bangunan rumah liar (%)						
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	86,18	90,80	92,33	93,52	93,52*
8.	Persentase berkurangnya luasan kawasan rawan banjir (%)	28,34	18,94	9,09	7,14	7,14*
9.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	23,33	23,33	21,67	21,67	21,67*
10.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	69,73	72,91	75,81	76,35	76,35*
11.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	70,78	77,86	84,93	88,47	88,47*
12	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	0	0	0	0	0
13.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	65,99	67,01	70,05	71,07	71,07*
14.	Rasio Jaringan Irigasi (km/Ha)	67,80	68,88	71,22	72,19	72,19*
15.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	74,20	76,55	82,08	82,22	82,22*
16.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74,20	76,55	82,08	82,22	82,22*

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Namun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2021 yang mengalami perubahan, sehingga pada kelanjutan capaian indikator kinerja bidang pekerjaan umum seperti yang tercantum pada Tabel II.73 untuk tahun 2021 dilakukan penyesuaian dengan mengikuti indikator kinerja utama yang terbaru.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan beserta target dan capaian realisasinya, hal ini bisa dilihat pada Tabel II.74 berikut ini.

Tabel II.74 Target, Realisasi dan Capaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021			Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	69,37	71,9	103,65	75,27	95,52
2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	84,42	85,27	101,01	93,59	91,11
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	94,54	95,45	100,96	99,08	96,34
4	Persentase Luas Sawah yang Beririgasi	%	34,45	34,71	100,75	40,83	85,01
5	Persentase Tersediannya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari- Hari	%	95,18	95,35	100,18	96,87	98,43
6	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase	%	62,48	63,12	101,02	70,08	90,07
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	80,35	80,91	100,70	80,35	100,70
8	Persentase Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah yang Dimediasi Oleh Pemerintah Kabupaten	%	100	100	100,00	100	100

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Sebagian besar indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang baru masih menggambarkan indikator kinerja utama yang sebelumnya, namun lebih bersifat umum dan telah didasarkan pada SOTK terbaru sehingga telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan itu sendiri karena terdapat beberapa IKU yang telah berpindah kewenangan di perangkat daerah yang lainnya.

Pada capaian indikator kinerja DPUTRP seperti yang terlihat pada Tabel II.74, terdapat beberapa indikator kinerja baru yaitu persentase luas sawah yang beririgasi, persentase penduduk yang terlayani sistem drainase serta persentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten. Beberapa indikator tersebut dianggap mampu merepresentasikan hasil kinerja DPUTRP dari beberapa sektor dan persentase capaian dengan metode perhitungan yang tepat dapat menggambarkan kondisi real di lapangan dimana masyarakat memperoleh *positive impact* secara langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.3.1.1.3.2. Sub Urusan Penataan Ruang

Tabel II.45 Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	0,189	0,156	0,126	0,118	n/a
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	4,48	18,41	18,41	18,41	n/a
3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	3,54	4,25	5,51	6,66	n/a
4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	-	-	-	-	-
5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	0,83	0,83	0,86	0,86	n/a
6.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	80,17	80,46	80,27	80,35	80,91

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel II.79 dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2021 diketahui bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang adalah sebesar 80,95 % dari target 80,30 % pada RPJMD 2021-2026 sehingga capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang telah terpenuhi dengan capaian kinerja 100,69 %. Realisasi tersebut dapat diperoleh dengan rumusan rata - rata persentase capaian indikasi program dan persentase kesesuaian pola ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah.

Pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada tahun 2021, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang tercapai realisasi sebesar 80,91 persen dari target awal sebesar 80,35 persen. Perhitungan ini didasarkan pada dua indikator yaitu kesesuaian pelaksanaan program dan kesesuaian pola ruang, seperti tergambar pada Tabel berikut:

Tabel II.76 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Tahun 2021

No	Muatan	Percentase (%)
1	Kesesuaian Pelaksanaan Program	75.62%
2	Kesesuaian Pola Ruang	86.20%
	IKU	80.91%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Bangka Tengah, 2022

Capaian ini menggambarkan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang diwujudkan dalam bentuk menggunakan ruang sesuai dengan peruntukannya. Semakin tingginya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata

ruang dapat meminimalisir resiko akibat dari pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Keseimbangan lingkungan dalam bentuk daya tampung dan daya dukung lingkungan menjadi faktor penting yang diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dapat meminimalisir terjadinya resiko bencana serta ketidakseimbangan lingkungan sehingga berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Pelanggaran terhadap tata ruang hendaknya dapat menjadi perhatian serius dari berbagai pihak dengan menerapkan sanksi dan tindakan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran tata ruang.

Selain itu, persentase ketataan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka Tengah menggambarkan tingkat simpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah cukup rendah, namun tetap harus ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk penertiban dan penyebarluasan informasi mengenai rencana tata ruang di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu tolok ukur diantaranya yaitu persentase rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang juga terus mengalami peningkatan. Semakin banyaknya bangunan yang ber-IMB secara tidak langsung juga menggambarkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati tata ruang.

2.1.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.1.4.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang urusan Perumahan Rakyat pada Kabupaten yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.77.

Tabel II.77 Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.77 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki data realisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dikarenakan belum memiliki dokumen maupun regulasi tentang Profil Rawan Bencana Kabupaten Bangka Tengah. Dokumen tersebut menjadi data dasar utama pelaksanaan kegiatan pendataan, penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Saat ini yang dapat dilakukan hanya inventarisasi rumah yang terkena dampak bencana dan bersifat *accidental* dan tidak dapat diprediksi kejadiannya. Data realisasi kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak tersedia dikarenakan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Pemerintah

Kabupaten Bangka Tengah belum melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat.

2.1.3.1.1.4.2. Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2017-2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.78.

**Tabel II.78 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio rumah layak huni (%)	26,12	26,14	26,16	26,18	27,27
2.	Rasio permukiman layak huni (%)	99,97	99,71	99,76	99,85	99,80
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	97,16	97,22	97,28	97,38	98,01
4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase permukiman yang tertata (%)	n/a	n/a	53,9	53,9	56,1
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	4,19	4,13	3,39	2,13	2,82
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,42	0,41	0,28	0,06	0,06
8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	n/a	12,62	1,71	1,71
9.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	n/a	n/a	17,68	17,68	56,08

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Akses rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari target SDGs, semua warga negara di tahun 2030 mendapatkan akses rumah yang layak, aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman dan penataan kawasan kumuh. Beberapa indikator yang menjadi kriteria hunian yang layak yaitu ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum dan akses sanitasi yang layak. Rasio rumah maupun permukiman layak huni di Kabupaten Bangka Tengah terlihat dari Tabel II.78 cenderung relatif stabil dari tahun ke tahun, persentase rasio rumah layak huni pada kisaran angka 27,27 persen, capaian ini termasuk masih rendahRendahnya capaian ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yang menjadi indikator rumah layak huni yaitu sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan atap asbes yang tergolong sebagai bahan yang dapat melepaskan zat yang dapat membahayakan kesehatan.

Persentase capaian rasio permukiman layak huni termasuk tinggi dari tahun ke tahun pada kisaran angka 99,80 persen, ini menggambarkan hampir seluruh pemukiman

di Kabupaten Bangka Tengah masuk kedalam kategori permukiman yang layak huni. Demikian juga hal nya dengan persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Tengah, persentasenya relatif kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bangka Tengah, dan persentase tersebut terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya menangani permukiman kumuh. Penanganan kumuh tidak hanya dari aspek peningkatan kualitas rumah, akan tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas prasarana sarana utilitas yang mendukung lingkungan permukiman yang layak huni. Namun perlu diperhatikan juga untuk aspek pencegahan dan pengendalian terhadap terjadinya potensi munculnya permukiman kumuh baru terutama di wilayah perkotaan.

**Tabel II.79 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (%) *(Persentase rumah layak huni)	97,16	97,22	97,28	97,38	98,01
2.	Percentase luasan permukiman kumuh (%) *(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani)	0,31	0,30	0,25	0,18	0,19
3	Percentase warga Negara korban bencana / warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	0
4	Percentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	-	-	-	-	n/a

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada tahun 2021, indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mengalami perubahan, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Terdapat perubahan dua nama indikator dengan substansi yang sama dengan indicator yang sebelumnya yaitu persentase rumah layak huni dan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani. Serta terdapat 2 (dua) indikator baru yaitu persentase warga negara korban bencana / warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh

fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni serta persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Perubahan indikator ini telah menggambarkan kesesuaian antara capaian target indikator kinerja dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang menangani perumahan dan kawasan permukiman.

2.1.3.1.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.1.5.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan terkait urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sesuai Permendagri No. 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri No. 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 121/2018 Tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Capaian realisasi SPM bidang trantibumlinmas ditunjukkan oleh Tabel II.80 berikut.

Tabel II.46 Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (%)				101,6	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)			100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan			100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
kesiapsiagaan terhadap bencana (%)						
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)			100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (%)			80	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.80, realisasi SPM bidang trantibumas Kabuapaten Bangka Tengah pada tahun 2021 telah optimal, capaian 100 persen.

2.1.3.1.1.5.2. Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017-2021, capaian kinerja ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.81.

Tabel II.47 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per jumlah RT	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	99,12	98,15	99,13	100	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	27,89	27,88	23,70	90,01	90,01
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	79,07	53,52	43,52	80	85,19
5.	Persentase Penegakan PERDA (%)	90,16	84,21	90,9	96,12	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Note: Jumlah penduduk berdasarkan data Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah

Dari Tabel II.81 di atas dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas per 10000 penduduk sampai tahun 2021 cenderung konstan, dengan angka pembandingnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Persentase penurunan gangguan trantibum dan persentase penegakan PERDA, juga berfluktuasi, tetapi pada tahun 2021 penyelesaian pelanggaran K3 dan penegakan Perda mencapai realisasi 100%.

2.1.3.1.1.6. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial guna tercapainya keberfungsiannya sosial. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual, pendampingan dalam pelayanan rehabilitasi, pemberian bantuan berupa sandang dan makanan, penyediaan alat bantu, layanan dukungan psikososial, pengarahan dan pelatihan. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

2.1.3.1.1.6.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017-2021 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.82.

Tabel II.82 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)			100	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)		-	50	100	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (%)		-	50	100	
4.	Rehabilitasi sosial dasar	Jumlah warga negara/	100	-		100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
	tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (%)				
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)		100	94	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021d

Tabel II.82 menunjukkan pencapaian SPM bidang urusan Sosial pada Tahun 2021 terealisasi 100 % terdiri dari 5 (lima) Pelayanan Dasar. Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 10 orang dari target 10 orang atau tercapai 100 % yang seluruhnya memperoleh pelayanan dasar rehabilitasi sosial di luar panti.

- 1) Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 2 orang memperoleh pelayanan dasar rehabilitasi sosial di luar panti.
- 2) Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 3 orang dari yang ditargetkan 3 orang atau tercapai 100 % memperoleh pelayanan dasar rehabilitasi sosial di luar panti.
- 3) Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti sebanyak 9 orang dari target 9 orang atau tercapai 100 % memperoleh pelayanan dasar rehabilitasi sosial di luar panti.
- 4) Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 94 dari target 94 orang atau tercapai 100 % orang memperoleh pelayanan dasar rehabilitasi sosial di luar panti.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam merealisasikan capaian target SPM yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia fungsional pekerja sosial terutama yang menangani rehabilitasi, belum maksimalnya pemanfaatan sarana prasarana dalam penanganan PPKS (RPS) . Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam mendukung pencapaian SPM ini adalah koordinasi yang kuat dalam penanganan masalah sosial dengan Dinas Sosial terkait, Dinas Sosial Provinsi serta Kementerian Sosial, dukungan dari PSKS melalui TKSK dan PSM yang ada di tiap kecamatan dan desa di Kabupaten Bangka Tengah, dukungan dari anggota TAGANA dan pendamping PKH yang ada Kabupaten Bangka Tengah. Pelayanan bagi penerapan SPM pada urusan sosial telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan semua penanganan terhadap kejadian di lapangan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

2.1.3.1.1.6.2. Capaian Indikator Urusan Sosial

Sinergitas pembangunan dari berbagai pihak dan instansi terkait untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah selain dengan penerapan kebijakan yang berpihak dalam penanganan PMKS. Khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membawa hasil yang maksimal. Namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Tabel II.83 menunjukkan capaian indikator kinerja utama urusan sosial yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel II.48 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PMKS yang terfasilitasi/diberikan bantuan	8.073	8.174	8.995	9.581	9.813
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	10.731	10.365	9.836	9.862	10.899
3.	PMKS yang terfasilitasi/memperoleh bantuan (%)	75,23	78,86	91,45	97,15	90,04

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama pada urusan sosial pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 dengan realisasinya. Rata rata disetiap indikator mencapai dari target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa indikator kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator kinerja utama Persentase PMKS yang terfasilitasi/ memperoleh bantuan pada tahun 2021 mencapai 90,04 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2020 sebesar 7,11 %. Jumlah PMKS di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 sebanyak 10.899 jiwa, sedangkan PMKS yang diberikan fasilitasi/ memperoleh bantuan sebanyak 9.813 jiwa atau sebesar 90,04 persen. Terjadinya penurunan PMKS yang terfasilitasi/memperoleh bantuan dikarenakan oleh :

1. Adanya dampak dari covid-19 sehingga terjadi penambahan Data Tepat Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan,

2. Adanya perubahan penerima komponen lansia PKH pada tahun 2021. Pada tahun 2020 data penerima lansia di atas 70 tahun sedangkan pada tahun 2021 penerima komponen lansia PKH di atas umur 60 tahun, sehingga terjadi penambahan jumlah penerima lansia PKH;

Tabel II.84 Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	75,23	78,86	95,84	97,15	90,04
2.	Persentase PMKS yang tertangani	75,23	78,86	95,84	97,15	90,04
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	75,23	78,86	95,84	97,15	90,04
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya					
5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	-	-	-	-
6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial					
7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	27	32,8	34,52	42,40	36,24

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Tabel II.84 menunjukkan capaian kinerja urusan sosial pada tahun 2017-2021, persentase PMKS yang tertangani dan Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2021 mencapai 90,04 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar 7,11 persen. hal ini disebabkan oleh adanya graduasi penerima bantuan PKH atau KPM PKH yang sejahtera, serta pemutakhiran data DTGS yang tepat sasaran.

Capaian indikator persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2021 tercapai 100%. Pada proses evakuasi terhadap korban bencana diberikan bantuan kebutuhan dasar dengan melibatkan para PSKS seperti TAGANA dan Pelopor Perdamaian.

Capaian indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2021 sebesar 36,23 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2020 (42,41 persen) maka terjadi penurunan. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun 2021 adalah sebanyak 2.349 jiwa sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun sebanyak 6.482 jiwa. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19. *Refocussing* anggaran dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kabupaten Bangka Tengah sehingga minimnya anggaran untuk bantuan disabilitas, selain itu, terjadinya kenaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta turunnya jumlah bantuan disabilitas seperti modal untuk pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta dana CSR. Namun demikian penanganan yang dilakukan oleh DINSOS – PMD Kabupaten Bangka Tengah meningkat, seperti pendampingan, pemberian rujukan dan reunifikasi keluarga.

2.1.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain rendahnya pencari kerja yang di tempatkan, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja.

Tabel II.85 Pencari Kerja yang Ditempatkan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	227	225	105	83	386
2.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	490	394	318	239	662
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	46,32	57,10	33,33	34,73	58,31

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.85, persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Persentase tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 58,31 persen, namun jumlah pencari kerja yang mendaftar tertinggi terjadi pada tahun 2021 juga yaitu sebanyak 662 orang, dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan paling sedikit sebesar 33,33 persen. Rata-rata pencari kerja yang ditempatkan pada periode 2017 sd. 2021 sebesar 45,95%.

Tabel II.49 Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	33.818	34.631	26.326	31.081	20.686
2	Pertambangan dan Penggalian	14.739	15.065	14.026	8.926	
3	Industri Pengolahan	5.740	5.123	6.730	7.410	7.921
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air panas, dan Udara dingin	295	311	127	207	
5	Kontruksi dan Bangunan	4.202	3.837	4.594	5.996	
6	Perdagangan, Eceran, Rumah makan, Hotel, dan jasa akomodasi.	16.586	19.456	24.847	21.206	23.754
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.545	2.325	2.395	2.981	
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1.818	2.042	1.253	2.156	
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	10.722	11.647	13.185	15.304	11.735
10	Lainnya					26.567
	Total	90.465	94.437	93.483	95.267	90.663

Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan di tahun 2017-2021 masih dominan menyerap tenaga kerja. Sektor ini didominasi oleh usaha perkebunan. Komoditi utama yang diusahakan sesuai nilai produksi antara lain kelapa sawit, karet, dan lada. Selain perkebunan subsektor yang menjadi primadona adalah perikanan dan pertanian hortikultura. Di kabupaten Bangka Tengah lebih banyak berusaha di perikanan tangkap sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pesisir, dan berbatasan langsung dengan laut maka masyarakatnya pun berusaha di subsektor perikanan tangkap. Selain perikanan tangkap,

Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki usaha perikanan budidaya dan tanaman pangan, Kabupaten Bangka Tengah hanya memiliki sedikit lahan, lahan yang menjadi sentra padi sawah berada di Kecamatan Namang dan padi ladang terdapat di Kecamatan Sungai Selan.

Sektor perdagangan, eceran, rumah makan, hotel, dan jasa akomodasi menduduki peringkat kedua dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mengalami kenaikan cukup signifikan, jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 14.881 orang sampai dengan 21.206 orang. Salah satu faktornya adalah semakin bertambahnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu roda penggerak perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bangka Tengah ini termasuk kegiatan distribusi barang baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan di subsektor jasa akomodasi, Kabupaten Bangka Tengah memiliki hotel berbintang di Kecamatan Pangkalan Baru yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya dari masyarakat Kabupaten Bangka Tengah

Sedangkan urutan penyerapan tenaga kerja dibawah sektor perdagangan, eceran, rumah makan, hotel, dan jasa akomodasi di Kabupaten Bangka Tengah yaitu sektor Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; Pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; Listrik, gas, dan air; Kontruksi bangunan; Angkutan, pergudangan dan komunikasi; dan Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, Tanah dan jasa perusahaan.

Tabel II.87 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	3	7	8	13	4
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	3	7	8	13	4
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel II.87 di atas, jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan 9 point kejadian, pada tahun 2021 pengaduan dari pekerja

perusahaan atau buruh tidak banyak karena hak mereka sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan juga dukungan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai kegiatan rutin dalam sosialisasi dan koordinasi setiap pengusaha yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dalam program pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan kejadian, karena masyarakat sudah mulai mengetahui dan memahami adanya lembaga atau tempat pengaduan untuk penyelesaian masalah bagi buruh dan pengusaha. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 02 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kejadian, terjadi 13 kajadian. Ada empat perusahaan yang tutup di bulan September tahun 2020, dan dampak dari pandemic Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian perusahaan sehingga banyaknya terjadi PHK, dan pemberian hak-hak pekerja tidak sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

2.1.3.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara itu, untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2022-2024 dan dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ada 5 isu prioritas yang menjadi prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
- 2) Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak
- 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 4) Penurunan pekerja anak
- 5) Pencegahan perkawinan anak.

Tabel II.88 menunjukkan perkembangan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017-2021 Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.88 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	30.192	36.996	33.816	32.817	30.752
2.	Jumlah angkatan kerja perempuan	63.684	65.189	66.217	63.623	59.264
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	47,41	56,75	51,07	51,58	44,74

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.88 di atas, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,85%. Hal ini disebabkan karena terjadinya disrupti pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19.

Sementara itu, persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2021 ditunjukkan oleh Tabel II.89.

Tabel II.89 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja perempuan di pemerintah	3133	2114	2302	2825	2976
2.	Jumlah pekerja perempuan	63.684	65.189	66.217	63.623	59.264
3.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4,91	3,24	3,47	4,44	5,02

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel II.89 di atas dari tahun 2017 sd. 2021, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah secara umum berfluktuatif cenderung menurun, namun persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah cenderung meningkat, meskipun jumlah pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan sebagai pekerjaan utama cenderung meningkat. Diantara

tahun 2017 s.d 2021 persentase terkecil berada di akhir tahun 2018 yaitu hanya sebesar 3,24 persen, sedangkan persentase tertinggi tahun 2021 sebesar 5,02 persen. Meningkatnya persentase jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor pemerintah yang semakin meningkat.

Perlindungan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari penyelesaian kasus kekerasan yang dialamai oleh perempuan dan anak. Tabel II.90 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus yang diselesaikan.

Tabel II.90 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah Kasus Anak	Total Jumlah Kasus	Kasus Yang Diselesaikan
2016	5 kasus	12 kasus	17 kasus	17 kasus
2017	5 kasus	12 kasus	17 kasus	17 kasus
2018	2 kasus	22 kasus	24 kasus	24 kasus
2019	6 kasus	24 kasus	30 kasus	30 kasus
2020	8 kasus	35 kasus	43 kasus	43 kasus
2021	15 kasus	34 kasus	49 kasus	49 kasus

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.90 di atas menyajikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 15 kasus dan kasus kekerasan terhadap anak 34 kasus dan secara total mengalami kenaikan sebanyak 49 kasus. Peningkatan kasus ini terjadi dikarenakan masyarakat mulai melaporkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setelah dilakukan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum dilakukan sosialisasi masyarakat enggan untuk melaporkan kasus yang terjadi. Seluruh kasus yang dilaporkan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Perencanaan dan pembangunan berbasis hak anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan hak dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kabupaten Bangka Tengah sejak 2017-2021 telah mendapatkan penghargaan terkait kota layak anak sebagaimana Tabel II.91.

Tabel II.91 Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Penghargaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten/ Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.3.1.2.3. Urusan Pangan

2.1.3.1.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel II.92 Ketersediaan Pangan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	19.689.000	20.915.000	21.848.000	22.006.000	20.722..000
2	Jumlah penduduk	177.335	108.689	111.358	110.613	102.655
3	Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk	111,027	114,737	115,021	113,181	104,159

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Sesuai Tabel II.92 di atas, rata-rata jumlah ketersedian pangan utama pertahun (kg) setiap tahun mengalami perubahan yang fluktuatif. Jumlah ini menurun dari tahun 2020 sebanyak 1.284.000 kg. Angka ketersediaan pangan utama per1000 penduduk (kg) menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Bangka Tengah masih memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Sejauh ini ketersediaan pangan utama masih cukup meskipun sebagian besar didatangkan dari luar Bangka Tengah seperti beras 96,99 %, terigu 100 % dan jagung 74,78 % masih didatangkan dari daerah lain. Untuk mengatasi dan mengurangi konsumsi pangan utama maka dilakukanlah diversifikasi pangan lokal sesuai amanat Peraturan Bupati Bangka Tengah No 22 Tahun 2017 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan, Kabupaten Bangka Tengah mengadakan cadangan pangan pemerintah daerah.

2.1.3.1.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein

Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah menyatakan ketersediaan energi dan protein per kapita selama periode 2016 sd. 2021 belum mencukupi angka kecukupan ketersediaan energi. Ketersediaan energi per kapita pada tahun 2021 sebesar 2.364,15 kkal/kap/hari. Pertumbuhan energi 2016 sd. 2021 rata-rata hanya mencapai 2.345,70. Ketersediaan protein juga mengalami peningkatan diatas standar ketersediaan protein yaitu sebesar 63 (gr/kap/hari), realisasi (2020) sebesar 75,96 merupakan angka yang sangat signifikan pada ketersediaan protein. Ketersediaan protein di Kabupaten Bangka Tengah di dukung juga oleh ketersediaan pangan hewani yaitu berupa ikan dan telur. Kondisi kelebihan ketersediaan ini akan mengakibatkan meningkatnya nilai konsumsi protein dan berpengaruh kepada tingginya angka 10 penyakit tertinggi di Kabupaten Bangka Tengah seperti *osteoporosis* dan sebagainya. Tabel II.93 menunjukkan ketersediaan energi dan protein dari tahun 2017-2021 pada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.93 Ketersediaan Energi dan Protein

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Energi (kkal/kap/hari)	2.325	2.350	2.350,01	2.375,03	2.364,15
2	Protein (gr/kap/hari)	76,09	76,5	76,5	77	75,96

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

2.1.3.1.2.3.3. Konsumsi Energi dan Protein

Tabel II.94 Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	1900	1919	1936,2	1952,5	1957,5	1962,5
2	Konsumsi Protein (gr/kap/hari)	72,2	72,7	73,5	69,2	68,65	68,1

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Jumlah konsumsi energi kebutuhan penduduk kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2021 baru mencapai sebesar 1.962,5 (kkal/kap/hari), sebagaimana

ditunjukkan oleh Tabel II.94, sedangkan kebutuhan konsumsi energi sesuai dengan standart angka kecukupan konsumsi energi adalah sebesar 2.150 (kkal/kap/hari). Dalam memenuhi kebutuhan kecukupan konsumsi energi penduduk Kabupaten Bangka Tengah masih mengalami kekurangan konsumsi energi sebesar 187,5 (kkal/kap/hari). Sementara itu, konsumsi protein kebutuhan penduduk Kabupaten Bangka Tengah sampai tahun 2021 telah mengalami kelebihan protein. Konsumsi protein tahun 2021 sudah mencapai 68,1 (gr/kap/hari). Sedangkan standart konsumsi protein hanya sebesar 57 (gr/kap/hari), kelebihan konsumsi protein dapat menimbulkan masalah kronis pada fungsi organ seperti kardiovaskular, gangguan pembuluh darah, cedera hati dan ginjal hingga kerusakan lebih lanjut pada organ-organ ini bisa berakibat fatal.

Tabel II.95 Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. Padi-padian						
1	Beras (Kg/Kap/Th)	97,0	97,6	98	98,8	121,5
2	Jagung (Kg/Kap/Th)	1,5	1,5	2,9	2,9	0,3
3	Terigu (Kg/Kap/Th)	12,5	12,6	11,7	14,5	10,6
B. Umbi-umbian						
1	Singkong (Kg/Kap/Th)	6,0	6,1	5,3	6,0	6,6
2	Ubi Jalar (Kg/Kap/Th)	2,8	2,9	4,8	5,1	2,0
3	Kentang (Kg/Kap/Th)	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6
4	Sagu (Kg/Kap/Th)	0,7	0,7	0,3	0,4	0,7
5	Umbi Lainnya (Kg/Kap/Th)	3,2	3,2	4,3	4,9	2,4
C Pangannya Hewani						
1	Daging Ruminansia (Kg/Kap/Th)	2,7	2,7	2	0,9	1,0
2	Daging Unggas (Kg/Kap/Th)	10,1	10,2	10,5	12,6	10,1
3	Telur (Kg/Kap/Th)	10,2	10,3	8,2	7,7	11,7
4	Susu (liter/Kap/Th)	15,4	15,8	17,9	8,8	8,3
5	Ikan (Kg/Kap/Th)	69,4	70,3	67,2	61,6	79,5
D Minyak dan lemak						
1	Minyak Kelapa (Liter/Kap/Th)	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2
2	Minyak Sawit (Liter/Kap/Th)	8,7	8,7	9,3	6,8	5,8
E Buah/ Biji Berminyak						
1	Kelapa (Kg/Kap/Th)	6,6	7,3	5,2	4,7	9,8
2	Kemiri (Kg/Kap/Th)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
F Kacang-kacangan						
1	Kedelai (Kg/Kap/Th)	3,5	3,5	3,1	2,9	4,4
2	Kacang Tanah (Kg/Kap/Th)	0,3	0,2	0,5	2,2	0,4
3	Kacang Hijau (Kg/Kap/Th)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
4	Kacang Lainnya (Kg/Kap/Th)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
G Gula						
1	Gula Pasir (gr/Kap/Th)	5,2	14,3	5,2	5,8	-
2	Gula Merah (gr/Kap/Th)	0,6	0,2	0,1	0,1	-
H Sayuran dan Buah						
1	Sayur (Kg/Kap/Th)	69,9	73,2	73,4	64,9	77,2
2	Buah (Kg/Kap/Th)	35,7	37,7	38,3	46,7	14,7
I Lain – lain						
1	Bumbu-Bumbuan (gr/Kap/Th)	1	1	1	0,9	-

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Dari hasil analisis Pola Pangan Harapan, tingkat konsumsi di Kabupaten Bangka Tengah untuk sumber energi karbohidrat menunjukkan sumber energi karbohidrat masih didominasi oleh beras. Berdasarkan Tabel II.95 di atas, konsumsi beras di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sd. 2021 yaitu 97 kg/kap/th di Tahun 2017 menjadi 121,5 kg/kap/th di Tahun 2021.

Jumlah konsumsi jagung dari tahun 2017 ke 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,1 kg/kap/th pada tahun 2017 menjadi 0,3 kg/kap/th pada tahun 2021, begitu juga dengan jumlah konsumsi terigu dari tahun 2017 ke 2021 mengalami penurunan, yaitu 12,6 kg/kap/th pada tahun 2017 menjadi 10,6 kg/kap/th pada tahun 2021.

Konsumsi penduduk terhadap umbi-umbian tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 pada konsumsi singkong. Sementara itu, pada konsumsi ubi jalar, kentang dan umbi lainnya mengalami penurunan. Konsumsi sagu pada tahun 2017 dan 2021 tidak mengalami perubahan, tetapi sebesar 0,7 kg/kap/th, tetapi angka ini naik 0,3 kg/kap/th dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk konsumsi pangan hewani paling tinggi adalah konsumsi ikan yaitu sebesar 79,5 kg/kap/th pada tahun 2021. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dari konsumsi ikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

Untuk besaran konsumsi minyak dan lemak minyak sawit mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 8,7 liter/kap/th menjadi 5,8 liter/kap/th pada tahun 2021. Konsumsi kelapa mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu sebesar 6,6 kg/kap/th di tahun 2016 menjadi 9,8 kg/kap/th pada tahun 2021. Sementara itu, untuk jumlah konsumsi kemiri menunjukkan angka terendah dari tahun 2016 ke 2021 yaitu tetap sebesar 0,1 kg/kap/th.

Konsumsi kacang-kacangan di Kabupaten Bangka Tengah terutama kedelai dari tahun 2016 s.d 2021 selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Konsumsi kedelai pada tahun

2016 sebesar 3,4 kg/kap/th dan mengalami kenaikan menjadi 4,4 kg/kap/th pada tahun 2021.

Pola konsumsi pangan yang bersumber dari sayur dan buah didominasi dari sayur-sayuran yang memberikan kontribusi energi sebesar 64,4%, sedangkan buah memberikan kontribusi energi sebesar 35,6%. Konsumsi penduduk terhadap sayuran dan buah di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 s.d 2021 cenderung fluktuatif. Jumlah konsumsi sayuran di tahun 2021 naik menjadi sebesar 77,2 kg/kap/th, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 68,9 kg/kap/th. Konsumsi buah, tahun 2016 sebesar 34,3 kg/kap/th dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 14,7 kg/kap/th.

2.1.3.1.2.4. Urusan Pertanahan

Tabel II.50 Luas Lahan Bersertifikat

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas wilayah daratan (km ²)	2.269.029	2.269.029	2.269.029	2.269.029*	2.269.029*
2.	Luas tanah bersertifikat HGB (m ²)	836.583	1.146.158	1.334.149	4.576.956*	4.796.100
3.	Luas tanah bersertifikat HGU (m ²)	2.468.491	8.318.500	2.170.030	53.278.521*	61.386.100
4.	Luas tanah bersertifikat HM (m ²)	11.109.249	10.096.000	45.919.568	97.903.429*	126.585.500
5.	Luas tanah bersertifikat HPL (m ²)	-	7.837	467.334	4.879.662*	6.921.200
	Total luas tanah bersertifikat (m ²)	14.414.323	19.568.495	49.891.081	160.438.268*	199.688.900
1.	Percentase HGB dibanding luas daratan (%)	0,0369	0,0505	0,0587	0,2017*	0,2113
2.	Percentase HGU dibanding luas daratan (%)	0,1088	0,3666	0,0956	2,3480*	2,7053
3.	Percentase HM dibanding luas daratan (%)	0,4896	0,4449	2,0237	4,3147*	5,5788
4.	Percentase HPL dibanding luas daratan (%)	0,0000	0,0003	0,0205	0,2150*	0,3050
v	Percentase total luas lahan bersertifikat (%)	0,6353	0,8624	2,1987	7,0794*	8,8004
	Percentase luas tanah bersertifikat (dalam kertas kerja)	2,65%	5,30%	6,30%	6,30%*	

Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.96 di atas, luas wilayah daratan sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yaitu 2.269.029.400 m². Total luas tanah bersertifikat pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 160.438.268 m² menjadi 199.688.900 m² atau sebesar 8,8004 persen dari luas wilayah daratan.

2.1.3.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indek yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University* (VCU) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Dalam penghitungannya, IKLH menggunakan indikator kualitas air sungai (IKA), kualitas udara (IKU), kualitas air laut (IKAL), dan kualitas lahan (IKL). Data indeks pencemaran udara diperoleh dari hasil pemantauan metode passive sampler yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 4 titik selama 2 periode. Data indeks tutupan lahan diperoleh dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X2I. Tabel II.97 menunjukkan status indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2021.

Tabel II.97 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,14	69,22	69,57	77,17	76,13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Data pada Tabel II.97 diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2016 sebesar 68,64 naik pada tahun 2017 sebesar 71,14 tetapi turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 69,22, hal ini disebabkan oleh perubahan pada metode pengujian di laboratorium. Pada tahun 2019 angka naik menjadi 69,57 dan tahun 2020 naik kembali sebesar 77,17. Namun di tahun 2021 IKLH mengalami penurunan di angka 76,13. Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup. Melalui peraturan tersebut, metode perhitungan IKLH telah memiliki landasan hukum yang jelas.

Pengelolaan sampah yang di TPA telah dilakukan secara *controlled landfill* yaitu sampah yang diangkut menggunakan dump truk diratakan terlebih dahulu menggunakan alat bulldozer kemudian ditimbun dengan menggunakan tanah secara bergantian sehingga terjadi lapisan antara sampah dan lapisan tanah dan seterusnya sampai sampah yang ditimbun rata dengan daratan sehingga tidak ada sampah yang terbuka. Pengelolaan sampah dengan cara *controlled landfill* yaitu tanah yang telah dipetakan untuk penimbunan sampah dibuat lubang dengan muatan satu lubang adalah sebanyak 600 m³ sampah, kemudian sampah ditimbun ke dalam lubang yang telah tersedia secara bergantian antara sampah dengan tanah sehingga terjadi lapisan antara sampah dan lapisan tanah dan seterusnya sampai sampah yang ditimbun rata dengan dataran sehingga tidak ada sampah yang terbuka. Berikut rincian sampah yang dikelola secara controlled landfill dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu :

Tabel II.98 Pengelolaan Sampah Secara *Controlled Landfill*

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengelolaan sampah secara <i>controlled landfill</i> yang masuk ke TPA Nibung (m ³)	11.385,50	12.887,50	11.970,00	13.339,60	13.067,60
2.	Sampah yang masuk ke TPA Nibung	12.800,00	12.887,50	12.539,00	13.584,50	13.335,00
3.	Persentase Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	88,95	100	95,46	98,00	98,00
4.	Target Indikator Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i>	68,00	70,00	75,00	85,00	85,00
5.	Realisasi Sampah yang Dikelola secara <i>Controlled Landfill</i> (%)	130,81	133,33	127,28	115,00	115,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk untuk tahun 2021 rasio ini mencapai 11,99 m³/ 1.000 jiwa. Berikut rincian mengenai rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (Tabel II.99):

Tabel II.99 Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

No	Tahun	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2016	1.646,90 m ³	171.724 Jiwa	9,60 m ³ / 1000 Jiwa
2	2017	1.726,84 m ³	177.335 Jiwa	9,74 m ³ / 1000 Jiwa
3	2018	1.880,41 m ³	182.286 Jiwa	10,32 m ³ /1.000 Jiwa
4	2019	1.891,10 m ³	186.783 Jiwa	10,12 m ³ / 1.000 Jiwa
5	2020	1.891,10 m ³	194.342 Jiwa	9,73 m ³ / 1.000 Jiwa
6	2021	2.386,00 m ³	198.946 Jiwa	11,99 m ³ /1.000 Jiwa

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2021 (data diolah)

Jumlah penduduk pada data di atas menggunakan data semester 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) per satuan penduduk setiap tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan jumlah TPS (terutama tempat sampah/ tong sampah di desa).

Selanjutnya untuk indikator sasaran pada persentase RTH Publik perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 belum ada penambahan untuk luasan RTH Publik pada perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Indikator sasaran persentase RTH Publik yang dihitung adalah luas RTH dibanding dengan luas perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru. Kabupaten Bangka Tengah saat ini memiliki luasan RTH seluas 415,64 ha atau 7,63% dari luasan wilayah perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru, dengan luasan kawasan Kota Koba seluas 2.298,56 ha dan Kota Pangkalan Baru seluas 3.150,65 Ha.

2.1.3.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah sepenuhnya menggunakan sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam penerbitan dan pengelolaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Pada Tabel II.100, dapat dilihat jumlah wajib KTP pada Tahun 2021 sebanyak 135.007 wajib KTP. Adapun Penduduk Bangka Tengah yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 134.903 orang.

Tabel II.100 Kepemilikan KTP

No.	Tahun	Wajib KTP	Kepemilikan KTP-el
1.	2016	118.643	112.169
2.	2017	122.032	116.394
3.	2018	124.748	122.226
4.	2019	128.392	127.440
5.	2020	132.005	131.788
6	2021	135.007	134.903

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Cakupan kepemilikan KTP-el pada Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan namun secara nasional pencapaian target KTP-el belum tercapai, hal ini dikenakan masih berstatus *Print Ready Record (PRR)*.

Tabel II.51 Kepemilikan Akta Kelahiran

No.	Tahun	Penduduk	Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
			Sudah	Memiliki	Belum	Memiliki
1.	2016	174.378	70.036	40,16%	104.342	59,84
2.	2017	177.335	76.984	43,41%	100.351	56,59%
3.	2018	182.286	99.533	54,60%	82.753	45,40%
4.	2019	186.783	104.476	55,93%	82.307	44,07%
5.	2020	194.432	116.272	59,80%	78.160	40,20%
6	2021	198.022	121.675	61,45%	76.347	38,55%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tabel II.101 menunjukkan bahwa pada Tahun 2021, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tercatat sebanyak 121.675 orang atau sebesar 61,45% orang sedangkan yang belum memiliki sebanyak 76.347 orang atau sebesar 38,55 %, jika dibandingkan pada tahun 2020, adanya peningkatan kepemilikan akte kelahiran.

Tabel II.102 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,95	0,98	0,99	0,99	0,99
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,43	0,63	0,59	0,62	0,65
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,38	97,98	99,26	99,84	99,92
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,41	54,6	55,93	59,80	61,45

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel II.102 dapat kita lihat Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung semakin meningkat, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan petunjuk dan kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, melaksanakan pelayanan pencatatan sipil sesuai era yang baru dengan bekal database kependudukan nasional yang sudah dibangun bersama dan tidak diragukan lagi akurasi datanya sehingga persyaratan dan tata cara yang berbelit dalam pelayanan pencatatan sipil dapat disederhanakan.

Ada beberapa upaya dan strategis yang sudah dilakukan perlu terus dilanjutkan yaitu;

- a. Melakukan konversi data kepemilikan akta kelahiran,
- b. Melakukan pelayanan rutin dan safari pelayanan ke desa–desa dan pelayanan di pusat keramaian.
- c. Membangun jaringan yang terkoneksi SIAK di setiap kecamatan,
- d. Pengangkatan petugas registrasi di desa,
- e. Kerjasama pelayanan pencatatan sipil dengan melibatkan instansi terkait misal BPJS, untuk memasukan anggota keluarganya menjadi anggota BPJS maka harus memiliki akta kelahiran, kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mewajibkan anak yang ingin masuk sekolah baik tingkat PAUD maupun SD untuk melampirkan akta kelahiran,
- f. Melakukan pelayanan terpadu pencatatan perkawinan non muslim.
- g. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran secara online sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2.1.3.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kewenangan kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada Tabel II.103 di bawah ini.

Tabel II.103Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Desa dan Kelurahan	63	63	63	63	63
3.	Jumlah Lembaga Karang Taruna	63	63	63	63	63
4.	Indeks Desa Membangun					
	Jumlah desa maju	n/a	15	20	23	25
	Jumlah desa berkembang	n/a	41	36	33	31

Sumber: Dinsos PMD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan indikator pemberdayaan organisasi masyarakat desa pada Tahun 2017-2021 tidak mengalami perubahan. Namun untuk status desa mengalami perubahan, untuk desa maju bertambah 2 desa yang berubah statusnya.

2.1.3.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

Pemerintah menggalakkan lagi program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dengan harapan tidak hanya menurunkan angka kelahiran, tetapi juga mewujudkan bonus demografi berkualitas. Motto “Dua Anak Lebih Sehat” bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga baik dalam konteks pernikahan maupun kehamilan. Bonus demografi yang terjadi di tahun 2020-2030 adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan, 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Bonus demografi bisa jadi anugerah tapi juga bisa musibah. Syaratnya harus berkualitas, jika tidak akan menimbulkan bencana gunung es. Bencana gunung es adalah ketika kekerasan dalam rumah tangga meningkat akibat belum sejahtera, pengangguran bertambah dan pendidikan tidak terpenuhi. Sedangkan generasi yang berkualitas dapat diukur dari kompetensi dan karakter. Terwujudnya karakter itu harus dilakukan oleh ayah dan ibu serta dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Pencegahan *stunting* dapat dimulai dari masa remaja saat seorang remaja mempersiapkan dan merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga. Indikator *stunting* sendiri adalah keluarga dengan baduta (Bayi dibawah usia dua tahun) yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Tabel II.104 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,1	2,03	1,96	1,95
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,52	2,41	2,41*
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2
4.	Rasio Akseptor KB	1:2	1:2	1:2	1:2
5.	Cakupan peserta KB aktif (%)	83,25	83,88	81,56	74,96
6.	Jumlah Faskes KB	10	10	10	10
7.	Jumlah Petugas KB	22	22	22	22

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.104 menunjukkan perkembangan indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada Tabel II.104 terlihat rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2017 sd. 2021 sebanyak 2 anak per keluarga, rasio akseptor KB tetap tiap tahunnya, yaitu 1:2. Indikator persentase cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2020 dan 2021 nilainya cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 sebesar 74,96 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 75,46 persen.

2.1.3.1.2.9. Urusan Perhubungan

Tabel II.105 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan (Km)	346,72	346,72	346,75	588,76
2.	Jumlah Kendaraan	81.810	190.367	278.802	461.378
3.	Rasio	0,00424	0,00182	0,00124	0,00128
					0,00922

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.105 menunjukkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada Tahun 2016 sd. 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 0.00978 di Tahun 2016 turun menjadi 0,00124 di Tahun 2019, mengalami kenaikan menjadi 0.00128 di tahun 2020, dan 0,00922 di tahun 2021.

Tabel II.106 Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Barang menggunakan Angkutan Udara

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang Datang dan berangkat	1.988.128	2.090.803	1.645.440	655.881
2.	Jumlah barang (kg) Menggunakan angkutan udara	9.146.022	10.877.501	8.511.085	3.283.202
					9.446.834

Sumber: Diperkimhub Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Kabupaten Bangka Tengah memiliki 1 (satu) unit Bandara yaitu Bandar Udara Depati Amir. Berdasarkan Tabel II.106, dapat dilihat bahwa jumlah penumpang yang

datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir pada tahun 2016 s.d. 2021 jumlahnya selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya hingga tahun 2018, namun pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir sebanyak 1.645.440 orang dan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 655.881 dan 628.182 orang. Hal ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang memunculkan kebijakan pembatasan bepergian bagi masyarakat. Untuk jumlah barang yang menggunakan angkutan udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2018, sebelum akhirnya turun pada tahun 2019 menjadi 8.511.085 kg dan semakin signifikan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3.283.202 kg. Pada tahun 2021, jumlah barang yang menggunakan angkutan udara meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 9.446.834 kg akibat pemulihhan ekonomi masyarakat.

2.1.3.1.2.10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan dan pemberdayaan pada kelompok informasi ini, salah satunya yaitu dengan menyediakan BTS (*Base Transceiver Station*). BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data.

Tabel II.107 Jumlah BTS (*Base Transceiver Station*)

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pangkalan Baru	28	31	34	37	37
2.	Sungaiselan	8	8	8	17	20

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Simpangkatis	17	17	21	17	17
4.	Namang	12	12	13	14	14
5.	Lubuk Besar	14	14	14	14	14
6.	Koba	18	18	17	20	20
	Total	97	100	107	119	122

Sumber: Diskominfosta Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Tabel II.107 menunjukkan jumlah BTS di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Jumlah BTS Tahun 2017 yaitu sebanyak 97 unit menjadi sebanyak 122 unit di Tahun 2021. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Pangkalbaru merupakan kecamatan dengan jumlah BTS paling banyak dibandingkan dengan 5 (lima) kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Selain itu dalam era keterbukaan dan transparansi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan dalam SK Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/144.24/IV/2019. Tujuan dibentuknya PPID adalah untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna untuk mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, didukung oleh dokumentasi yang lengkap, transparan, akurat dan faktual. Kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

2.1.3.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pertumbuhan koperasi aktif terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif tercatat sebesar 61,22% dengan pertambahan koperasi baru sebanyak 5 (lima) unit. Ditengah-tengah upaya keras masyarakat untuk mempertahankan ekonominya selama pandemi, koperasi menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga penopang perekonomian masyarakat yang dapat diandalkan. Sepanjang tahun 2020, volume usaha koperasi tercatat tumbuh signifikan sebesar Rp. 29.927 juta dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 63,16% dengan pertambahan koperasi baru sebanyak 6 (enam) unit. volume usaha koperasi tercatat tumbuh signifikan sebesar Rp. 31.942 juta (Tabel II.108).

Tabel II.108 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Koperasi					
1.	Jumlah Koperasi aktif	79	82	85	90
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	138	141	143	147
3.	Persentase koperasi aktif	57,25	58,16	59,44	61,22
4.	Volume usaha koperasi (Rp Juta)	16.061	16.768	18.633	29.927
Usaha Mikro Kecil					
1.	Jumlah usaha mikro	20.464	20.648	21.670	21.970
2.	Jumlah seluruh UKM	21.501	21.692	22.730	23.051
3.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	95,18	95,19	95,34	95,31
4.	Volume Usaha UMKM (Rp Milyar)	1.715,91	1.804,27	1.889,51	1.846,50
					1.930,62

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Sejalan dengan pergerakan koperasi, sektor UMKM juga mengalami peningkatan yang cukup besar setelah terdampak pandemi. Volume usaha UMKM tercatat meningkat menjadi Rp. 1.930,62 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dapat dipertahankan dengan berbagai paket kebijakan Pemerintah yang dikucurkan bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Terimbang juga dengan penambahan jumlah UMKM dengan kebijakan subsidi bunga bank bagi UMKM.

2.1.3.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memerlukan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel II.109 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	94	102	214	271
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	315,5 milyar	393,6 milyar	904,3 milyar	1.344,12 milyar
3.	Persentase kenaikan nilai realisasi PMDN	10,29	24,75	129,75	48,63
4.	Survey kepuasan pelayanan perizinan	85,6	85,8	83,91	88,66

Sumber: DPMPTK, 2022

Berdasarkan Tabel II.109 diatas, realisasi capaian indikator kinerja penanaman modal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari 315,5 milyar menjadi 1.344,12 milyar, dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 94 menjadi 271 investor dan semuanya telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan di dukung dari kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah dan adanya aplikasi OSS yang disediakan oleh BKPM RI untuk melakukan promosi.

Pada tahun 2021, masa pandemic Covid-19 melanda dunia Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) menurun menjadi 247 investor dengan nilai investasi menurun menjadi 745,87 Miliar.

2.1.3.1.2.13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Jumlah organisasi pemuda yang ada di Bangka Tengah pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 105 organisasi. Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 adalah sebanyak 355 dengan rincian per indikator sebagaimana Tabel II.110 berikut:

Tabel II.110 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	87	87	87	87	105
2	Persentase wirausaha muda	0,58%	0,32%	0,45%	16,4%	0,26%
3	Persentase pemuda berprestasi	0,69%	0,16%	0,20%	0,19	0,14%
4	Jumlah prestasi olahraga	77	216	83	14	53
5	Jumlah Sarana Olahraga	367	373	376	380	355
6	Jumlah Klub Olahraga	322	363	369	311	139

Sumber: Dinbudparpora, 2022

2.1.3.1.2.14. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya. Tabel II.111 menunjukkan indicator urusan statistik yang telah dilakukan dari tahun 2017-2021.

Tabel II.52 Indikator Urusan Statistik

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku "Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase integrasi data pembangunan Daerah lintas sektor yang berkualitas	39,45	62,52	81,50	81,67	85,53

Sumber: Diskominfosta Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Buku Bangka Tengah Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Bruto merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. Mulai Tahun 2014 ada 2 (dua) buku PDRB yang dikeluarkan oleh BPS yaitu PDRB berdasarkan lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran. Dinas yang

menangani statistik sendiri melakukan fasilitasi dan harmonisasi data yang akan ditampilkan dalam publikasi buku tersebut.

Data yang diperoleh dari seluruh PD yang diinput ke dalam SIPD ditargetkan sampai Tahun 2020 sebesar 37,04%, data yang diterima telah melampaui target yaitu sebesar 81,67%. Data yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun mengindikasikan kualitas pengisian survei dan keseriusan dalam mengisi survei data yang diajukan.

2.1.3.1.2.15. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Bangka Tengah, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi, pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik, dan serta penyediaan layanan Keamanan Informasi. sesuai dengan kewenangannya, Bupati berperan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di Pemerintah Daerah.

Urusan persandian sebelum tahun 2017 dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah. Setelah ada perubahan SOTK dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, pada tahun 2017 kewenangan urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Untuk melaksanakan urusan persandian ada beberapa program dan kegiatan yang dijalankan, sebagaimana Tabel II.112, yaitu:

Tabel II.53 Indikator Urusan Persandian

Tah un	Program / Kegiatan	Bentuk Kegiatan
2016	n/a	n/a
2017	Pengalihan urusan persandian dari Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	n/a
2018	Program: Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa Kegiatan:	<p>18. Pembinaan dan Pengawasan jaring komunikasi daerah Sosialisasi Keamanan Informasi dan Persandian (Narasumber dari BSSN).</p> <p>19. Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian 20. Pembentukan Tempat Kegiatan Sandi / Kamar Sandi</p> <p>21. Pengadaan printer, brankas arsip rahasia, filling cabinet, mesin penghancur kertas, lemari arsip</p>
2019	Program: Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kegiatan:	<p>22. Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Keamanan Informasi dan Persandian Sosialisasi jaring komunikasi sandi daerah (Pemanfaatan e-mail Sanapati).</p> <p>23. Pelatihan SDM dalam bidang Keamanan dan Persandian 24. Diklat Sandiman Tingkat I</p> <p>25. Diklat Keamanan dan Siber</p>
2020	Program: Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kegiatan :	<p>Pengiriman dan penerimaan berita atau surat berklasifikasi dari Pemerintah Pusat maupun antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>26. Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi</p>

Sumber: Diskominfosta Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2.1.3.1.2.16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa manusia. Kebudayaan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun. Realisasi capaian indikator urusan kebudayaan tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan oleh Tabel II.113.

Tabel II.54 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8
2.	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	27	27	27	27	55
3.	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	18	22	22	21	21
4.	Jumlah prestasi seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional	10	10	9	-	1

Sumber: Dinbudparpora, 2022

Berdasarkan Tabel II.113 di atas, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah Kabupaten Bangka Tengah berjumlah tetap sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, yaitu dari 8 cagar budaya, namun cagar budaya tersebut belum ditetapkan atau diregister ke pusat. Sanggar kesenian yang aktif dari tahun 2017-2021 meningkat dari 27 sanggar menjadi 55 sanggar. Tahun 2021, seni budaya lokal yang dilestarikan ada 21 jenis kesenian. Jumlah prestasi seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional yang pernah ditorehkan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 belum maksimal sehingga masih harus terus diberikan motivasi lagi dan support dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, baik berupa materi maupun non materi.

2.1.3.1.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Realisasi capaian indikator bidang perpustakaan pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan oleh Tabel II.114.

Tabel II.55 Capaian Indikator Bidang Perpustakaan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang/tahun)	240.459	224.001	294.166	108.832	52.018
2	Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
3	Jumlah Perpustakaan Desa	24	33	33	39	42
4	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	17.060	17.060	24.944	24.944	24.800
5	Rasio perpustakaan persatu penduduk	0,141	0,187	0,182	0,206	0,089

Sumber: Dinas Kearsiran dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.114 di atas, jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah cenderung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu dari 240.459 pengunjung/tahun di tahun 2017 menjadi 224.001 pengunjung/tahun.

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu dari 294.166 pengunjung/tahun di tahun 2019 menjadi 108.832 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 52.018 pengunjung/tahun. Hal tersebut disebabkan oleh bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga sekolah secara tatap muka di ubah menjadi secara *daring/online*. Belum maksimalnya penerapan pojok baca di setiap ruang kelas serta kunjungan pada kegiatan bulan kunjungan perpustakaan ke Perpustakaan Daerah yang mengalami penurunan.

Pada Tabel II.114 di atas juga menunjukkan data jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2017 sd. 2021 terdapat penambahan jumlah perpustakaan desa , dari 24 unit pada tahun 2017 menjadi 42 unit pada tahun 2021.

Sedangkan Rasio Perpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,089 dari 0,206 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang menjadi faktor pembagi dalam perhitungan rasio perpustakaan per satuan penduduk.

2.1.3.1.2.18. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan adanya upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Tabel II.115 menunjukkan realisasi capaian indikator bidang kearsipan tahun 2017-2021.

Tabel II.115 Capaian Indikator Bidang Kearsipan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	88,50	95,33	100	100	18,75
2	Jumlah Arsiparis (orang)	40	35	34	34*	30

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan apakah perangkat daerah tersebut telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku melalui beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya;
2. Telah menetapkan jabatan fungsional sebagai tenaga pengelola kearsipan pada unit organisasinya;
3. Telah memiliki sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar.

Hambatan utama pelaksanaan program kegiatan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran dalam pengelolaan kearsipan. Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kearsipan, penataan arsip, bimbingan teknis kearsipan, sosialisasi kearsipan serta pengawasan kearsipan dapat meningkatkan sumber daya manusia tentang pengelolaan arsip.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.3.1.1. Urusan Pariwisata

Pada saat ini sektor pariwisata menjadi prioritas andalan dalam menunjang perekonomian khususnya di pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Prospek kepariwisataan semakin cerah dan menjadi posisi strategis yang diemban dalam memberikan dorongan dan keharusan untuk menata langkah strategis pada upaya meningkatkan kinerja kepariwisataan, untuk meningkatkan daya saing agar dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara maka perlu adanya strategi pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara/domestik yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Kabupaten Bangka Tengah. Tabel II.116

menunjukkan realisasi capaian indikator bidang pariwisata tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.116 Capaian Indikator Bidang Pariwisata

URAIAN	TAHUN									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman	84.039	1.739	94.513	1.944	95.790	1.661	129.778	155	107	130.274
Jumlah Total Kunjungan Wisatawan		85.778		96.457		97.451		129.933		130.381
Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan	97,97	2,03	97,98	2,02	98,29	1,70	99,88	0,12	0,082	99,99
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)		3,18		3,41		3,79		4,00		3,99
Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)		10,43		15,24		14,26		6,78		8,67
Jumlah Obyek wisata yang dibangun/ dikembangkan /dikelola		6		2		10		19		20

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan tabel II.116 jumlah total kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam pengambilan data berdasarkan data tamu hotel dan kunjungan DTW (Daya Tarik Wisata), dimana trendnya mengalami kenaikan. Jumlah total kunjungan wisatawan Tahun 2017 tercatat sebesar 85.778 orang dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 130.381 orang yang terdiri dari meningkatnya wisatawan nusantara (domestik) sebanyak 130.274 orang atau 99,88%, yang di pengaruhi adanya objek wisata yang mulai berkembang dan dikenal masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah seperti Danau Pading, Air Terjun C2 dan Tahura Bukit Mangkol. Sedangkan wisatawan mancanegara menurun hanya sebanyak 107 orang atau 0,12%, yang di pengaruhi adanya pandemi covid-19 dan pembatasan kegiatan.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian, pengaruh kepariwisataan terhadap PDRB pada tahun 2021 rata-rata kontribusinya turun sedikit dari tahun 2020 sebesar 3,99 persen di tahun 2021, karena masih berdampaknya pasca pandemi Covid-19. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebesar 8,67 persen.

Untuk jumlah obyek wisata yang dibangun/dikembangkan/dikelola pada tahun 2021 terdapat 20 DTW yang dibangun/dikembangkan/dikelola dan pibiayaannya selain menggunakan anggaran dari daerah Kabupaten Bangka Tengah juga didukung anggaran dari pusat berupa dana hibah pariwisata (DAK Fisik dan Non Fisik).

Tabel II.56 Potensi Obyek Wisata

No.	Objek Wisata	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wisata alam	25	28	29	31	32
2.	Wisata bahari	7	8	9	9	10
3.	Wisata Cagar Alam	-	-	-	-	-
4.	Wisata Pertanian	2	3	3	3	3
5.	Wisata Sejarah	7	8	10	10	10
6.	Wisata Budaya	10	10	11	11	15
7.	Wisata Religi	5	5	5	5	6
8.	Wisata Kuliner	2	2	3	3	4
Total		58	64	70	72	80

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.117 menunjukkan potensi obyek wisata di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami Peningkatan. Pada tahun 2021 potensi obyek wisata terdiri dari 32 wisata alam, 10 wisata bahari, 3 wisata pertanian, 10 wisata sejarah, 15 wisata budaya, 6 wisata religi, serta 4 wisata kuliner. Kabupaten Bangka Tengah memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi terutama wisata pantainya, hampir di setiap kecamatan memiliki daya tarik wisata pantai yang indah. Untuk Kecamatan Simpang Katis memang tidak memiliki wisata pantai, namun memiliki daya tarik wisata berupa wisata alam Tahura Bukit Mangkol. Selain pantai, ada juga objek wisata berupa pulau-pulau kecil di sekitar Kabupaten Bangka Tengah seperti Pulau Ketawai, Pulau Semujur, Pulau Pelepas, Pulau Gelasa dan Pulau Nangka.

2.1.3.1.2. Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan yang lestari. Tabel II.118 di bawah ini menunjukkan perkembangan indikator urusan pilihan pertanian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 sd. 2021.

Tabel II.57 Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian

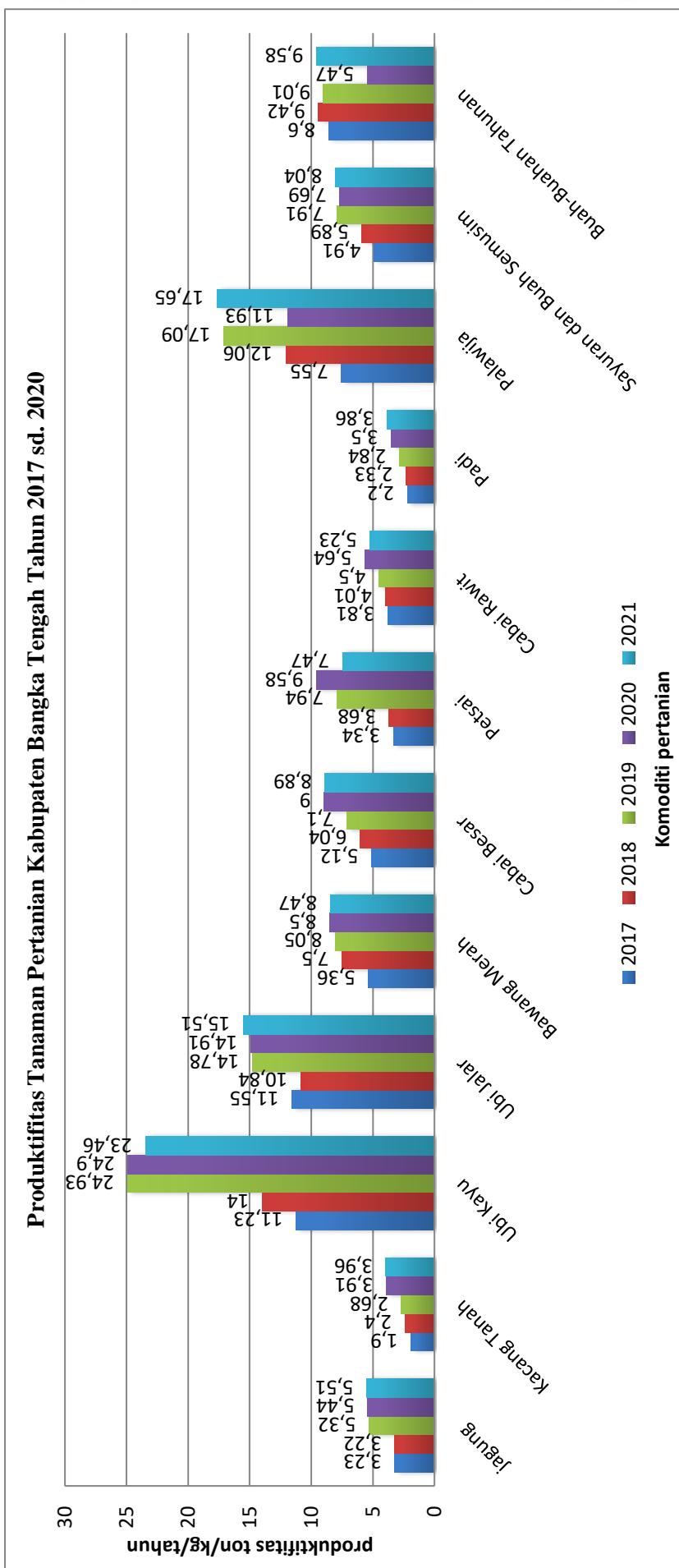
No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	
1. PERTANIAN							
Produktivitas Sektor Pertanian (Ton/Ha/Th)							
Jagung	3,23	3,22	5,32	5,44	5,51		
Kacang Tanah	1,90	2,40	2,68	3,91	3,96		
Ubi Kayu	11,23	14,0	24,93	24,9	23,46		
Ubi Jalar	11,55	10,84	14,78	14,91	15,51		
Bawang Merah	5,36	7,50	8,05	8,50	8,47		
Cabai Besar	5,12	6,04	7,10	9,00	8,89		
Petsai	3,34	3,68	7,94	9,58	7,47		
Cabai Rawit	3,81	4,01	4,50	5,64	5,23		
Padi	2,20	2,33	2,84	3,50	3,86		
Palawija	7,55	12,06	17,09	11,93	17,65		
Sayuran dan Buah Semusim	4,91	5,89	7,91	7,69	8,04		
Buah-buahan Tahunan	8,60	9,42	9,01	5,47	9,58		
Jumlah Produksi Sektor Pertanian (ton)							
Jagung	415,30	278,30	1.042,35	612,8	936,98		
Kacang Tanah	31,90	16,31	10,85	12,90	45,54		
Ubi Kayu	2.030,00	3.191,0	8.078,8	9.848,15	9384,00		
Ubi Jalar	203,30	79,10	96,10	125,24	263,67		
Bawang Merah	26,59	71,63	110,22	233,41	151,10		
Cabai Besar	298,62	315,59	1.624,54	1.181,25	896,56		
Petsai	92,70	59,92	148,55	193,90	163,49		
Cabai Rawit	115,20	87,21	98,96	244,61	210,68		
Padi	885,40	1.029,80	1.198,84	1.795,70	13.90,25		
Palawija	2.765,40	4.122,06	9.075,41	10.656,19	10.670,49		
Sayuran dan Buah Semusim	1.364,69	1.351,08	1.792,25	3.208,17	2.860,21		
Buah-buahan Tahunan	2.666,20	4.559,94	5.425,83	7.406,78	6.258,90		
Luas Areal Tanaman Pertanian (Ha)							
Jagung	128,50	86,35	195,95	112,7	184,66		
Kacang Tanah	16,70	6,80	4,05	6,45	13,55		
Ubi Kayu	180,80	227,80	316,00	603,96	420,25		
Ubi Jalar	17,60	7,30	6,50	13,70	21,40		
Bawang Merah	4,96	9,55	12,33	32,15	20,54		
Cabai Besar	58,34	52,25	180,47	177,04	117,74		
Petsai	27,77	16,30	18,70	22,25	23,15		
Cabai Rawit	30,25	21,76	18,75	38,55	46,05		
Padi	403,00	442,00	421,80	513,05	519,4		
Palawija	366,27	341,75	531,00	892,87	647,51		
Sayuran dan Buah Semusim	277,92	229,44	226,64	417,14	411,83		
Buah-buahan Tahunan	310,17	484,30	601,93	1.353,01	1.308,31		
2. PERKEBUNAN							
Produktivitas Sektor Perkebunan (Ton/Ha/Th)							
Kelapa Sawit	3,42	3,51	3,61	3,62	3,699		
Karet	1,35	1,46	1,48	1,48	1,483		
Kelapa	0,52	0,72	0,84	0,87	0,759		
Kopi	0,62	0,66	0,67	0,79	0,865		
Lada	1,42	1,47	1,48	1,48	1,484		
Kakao	0,71	0,42	0,55	0,53	0,537		
Jumlah Produksi Sektor Perkebunan (kg)							
Kelapa Sawit	20.858,18	23.102,25	24.472,54	24.696,21	25.253,95		
Karet	7.494,59	8.288,49	8.463,15	8.976,02	8.103,14		
Kelapa	239,10	332,39	372,07	370,74	323,46		
Kopi	2,46	7,06	9,60	18,12	31,67		
Lada	2.947,18	3.447,83	3.466,75	3.356,25	2.890,46		
Kakao	38,54	23,15	30,44	28,75	26,62		
Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha)							
Kelapa Sawit	8.735,93	8.949,58	9.140,08	9.085,57	9.029,67		

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Karet	8.177,89	7.650,82	7.393,32	7.303,66	6.309,70
	Kelapa	710,08	537,71	533,32	523,89	509,10
	Kopi	29,35	30,67	32,47	59,97	73,57
	Lada	3.802,52	4.036,17	4.169,56	4.163,84	3.658,58
	Kakao	86,90	79,65	76,78	74,82	67,46
3.	PETERNAKAN	Jumlah Produksi Peternakan				
	Telur Itik (Kg)	20.896	22.033	49.770	71.241	16.816,56
	Telur Ayam (Kg)	490.232	496.703	507.928	518.093	121.698,92
	Daging Sapi (Ton)	323,809	428,155	513,427	442,741	64.119,30
	Daging Itik (Ton)	12.005	12.071	11.947	15.704	1.653,00
	Daging Kambing (Ton)	7.628	9.689	11.398	13.042	313,72
	Daging Ayam Buras (ton)	18.197	18.447	14.780	25.422	2.646,00
4	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	89,16	99,88	112,96	112,96*	*112,96

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.118 diatas dapat diketahui bahwa untuk sektor pertanian yang mengalami peningkatan produktivitas secara garis besar dapat kita lihat pada grafik Gambar II.22 di bawah ini adalah :



Gambar II.22 Grafik Produktifitas Tanaman Pertanian

Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan Gambar II.22 menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi di sektor pertanian pada Tahun 2021 yaitu pada komoditas tanaman ubi kayu sebesar 23,46 ton/ha/th, tanaman palawija dengan tingkat produktivitas sebesar 17,65 ton/ha/th dan komoditas ubi jalar sebesar 15,51 ton/ha/th. Komoditas dengan produktivitas terendah untuk sektor pertanian yaitu pada komoditas padi sebesar 3,86 ton/ha/th.

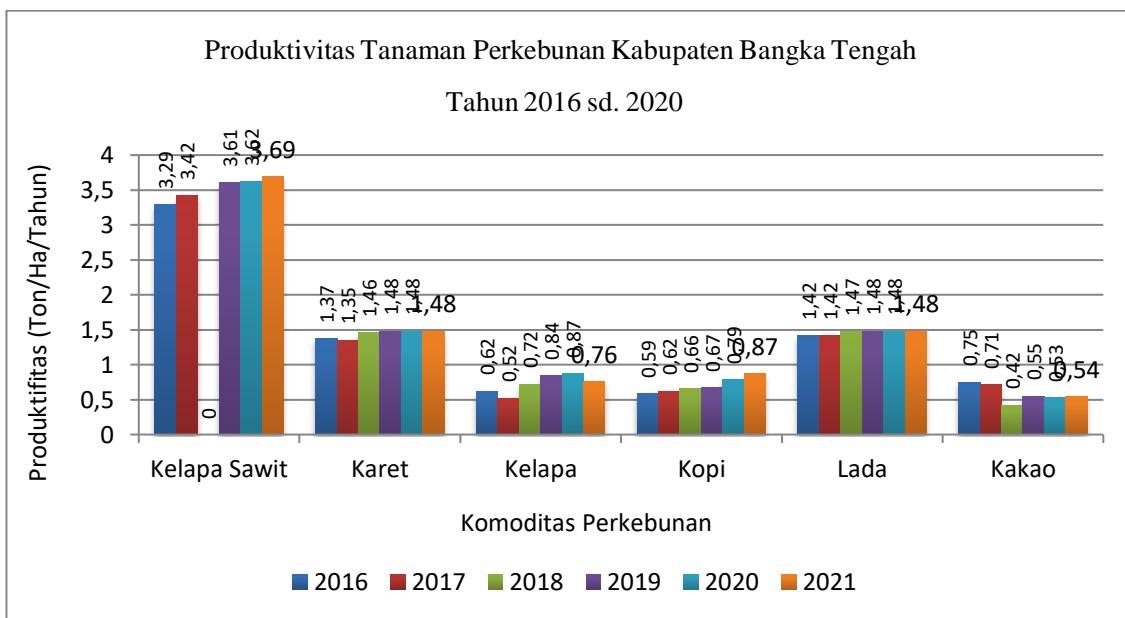
Kontribusi jumlah produksi tertinggi dari sektor pertanian berasal dari subsektor komoditas tanaman palawija sebesar 10.670,49 ton, komoditas ubi kayu sebesar 9.384 ton, dan sub sektor tanaman buah – buahan tahunan sebesar buah 6.258,90 ton. Kontribusi pada sektor pertanian yang terendah yaitu pada komoditas kacang tanah sebesar 45,54 ton.

Berdasarkan luas areal untuk tanaman pada sektor pertanian di tahun 2021 luas areal tertinggi pada komoditas buah-buahan tahunan sebesar 1.308,31 ha, komoditas palawija sebesar 647,51 ha dan komoditas ubi kayu sebesar 420,25 ha. Luas areal terendah pada komoditas kacang tanah sebesar 13,55 ha.

Berdasarkan demografi data per kecamatan tahun 2021, luas tanam terluas untuk komoditas ubi kayu berada di Kecamatan Lubuk Besar dengan luas tanam 180,33 ha. Kemudian komoditas jagung dengan luas tanam tertinggi berada di Kecamatan Pangkalan baru seluas 50,12 ha.

Berdasarkan subsektor hortikultura untuk komoditas tertinggi pada komoditas cabai merah memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luas tanam komoditas cabai merah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 seluas 100,85 ha, produksi sebesar 896,56 ton dengan produktivitas sebesar 8,89 ton/ha/th. Komoditas cabai rawit luas tanam seluas 40,25 ha, produksi sebesar 210,68 ton dengan produktivitas sebesar 5,2 ton/ha/th. Kemudian komoditas bawang merah dengan luas 17,84 ha, produksi sebesar 151,10 ton dengan produktivitas sebesar 8,47 ton/ha/th. Komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu komoditas bawang merah dan cabai merah.

Gambar II.23 Grafik Produktivitas Tanaman Perkebunan

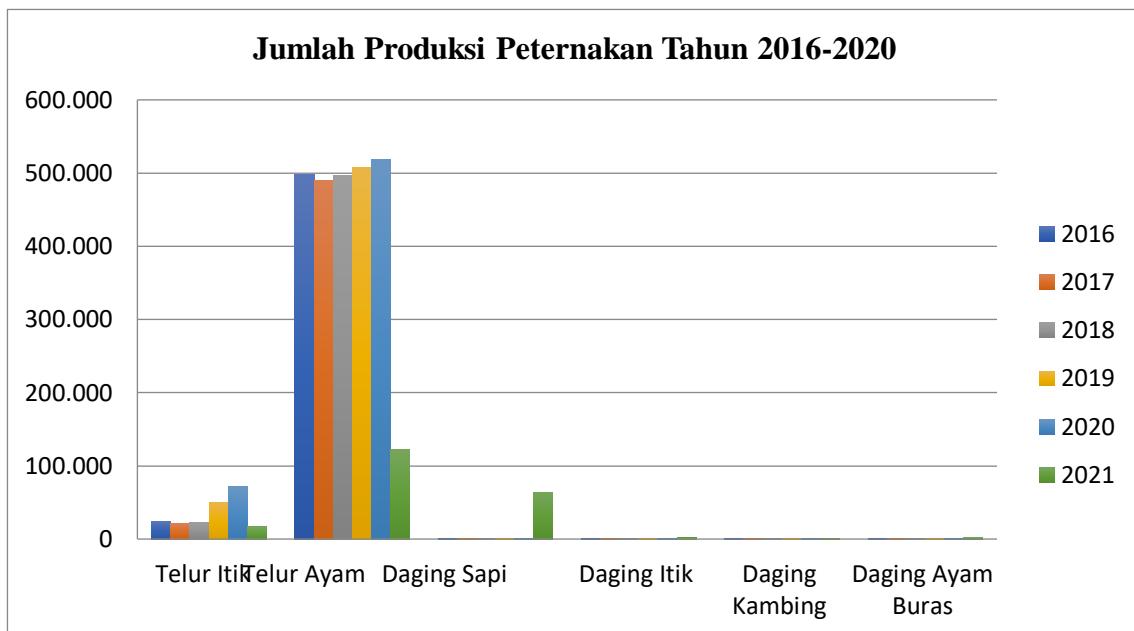


Sumber: Dinas Pertanian, 2022

Untuk komoditas sektor perkebunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 memiliki produktivitas tertinggi pada perkebunan kelapa sawit sebesar 3,69 ton/ha/th, perkebunan lada sebesar 1,484 ton/ha/th dan perkebunan karet yaitu 1,483 ton/ha/th. Produktivitas sektor perkebunan yang paling rendah terdapat pada perkebunan kakao sebesar 0.54 ton/ha/th. Jumlah produksi dari sektor perkebunan yang terbanyak berasal dari perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar 25.253,95 ton, perkebunan karet sebesar 8.103,14 ton dan perkebunan lada sebesar 2.890,46 ton. Jumlah produksi dari sektor perkebunan yang paling rendah terdapat pada perkebunan kakao 2,62 ton.

Berdasarkan data luasan, luas areal tanaman sektor perkebunan yang paling tinggi pada perkebunan kelapa sawit sebesar 9.029,67 ha, perkebunan karet sebesar 6.309,70 ha dan perkebunan lada sebesar 3.6588,58 ha. Luasan yang paling rendah dimiliki oleh perkebunan kakao sebesar 67,46 ha.

Gambar II.24 Grafik Jumlah Produksi Peternakan



Sumber: Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan Gambar II.24 menunjukkan, jumlah produksi sektor peternakan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 untuk produksi telur ayam mengalami peningkatan sebanyak 121.898,92 ton, selanjutnya pada produksi daging sapi sebanyak 64.119,30 ton dan produksi daging ayam buras sebanyak 71,241 ton. Produksi paling rendah di Tahun 2021 pada daging kambing sebanyak 313,72 ton.

2.1.3.1.3. Urusan Kehutanan

Luasan kawasan TAHURA Bukit Mangkol yang di konservasi Pada tahun 2016, Hutan Konservasi Gunung Mangkol ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/ Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.009,51 ha pada tanggal 27 Juli 2016. Berdasarkan data hasil analisa, terdapat 2.526,82 ha blok rehabilitasi di Tahura Bukit Mangkol. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya *illegal minning*, *illegal farming*, ataupun *illegal logging*. Selain perlunya pengamanan terhadap hal tersebut, juga perlu dilakukan konservasi Tahura Bukti Mangkol. Secara umum konservasi dapat

diartikan sebagai upaya pelestarian atau upaya perlindungan. Lebih jelasnya berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990 konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pada tahun 2019 telah dilakukan konservasi di Tahura Bukit Mangkol seluas 223,69 ha dan lokasi tersebut di Desa Air Mesu. Lokasi ini merupakan aliran sungai yang menjadi salah satu sumber air akan tetapi sudah terganggu oleh kegiatan pertambangan jadi perlu perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan tersebut untuk mengembalikan fungsi utamanya.

Sektor kehutanan masih potensial untuk dikembangkan silvikultur antara tanaman hutan dan tanaman perkebunan sekaligus sebagai usaha pelestarian hutan dan usaha alternatif ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu, terutama gaharu yang merupakan komoditi unggulan dari sektor kehutanan. Data pohon gaharu di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1.298.296 batang yang terdiri dari tanaman gaharu budidaya sebanyak 1.295.803 batang dan tanaman gaharu alam sebanyak 2.493 batang. Tanaman gaharu yang telah teregistrasi dan telah dipetakan sebanyak 377.758 batang, sedangkan jumlah gaharu yang dipasang plat register berjumlah 40.000 batang. Jumlah batang gaharu yang telah dilakukan inokulasi sebanyak 617 batang (sampai dengan 31 Desember 2018) dan melalui Inovasi Baru Nyuntik Gaharu (IBNU) pada tahun 2019 dapat menginokulasi sebanyak 506 batang, jadi sampai akhir Desember 2019 total batang gaharu yang terinokulasi sebanyak 1.123 batang.

Pada akhir tahun 2020 batang gaharu yang telah dinokulasi sudah dapat dipanen dan tahun 2021 sudah dapat diekspor ke negara-negara timur tengah khususnya Arab Saudi. Selain itu, Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan Kluster Gaharu Nasional berdasarkan SK Dirjen RLPS Nomor: SK.22/V-BPS/2010 telah berhasil mendapatkan 27 calon klon unggul gaharu pada tahun 2019 (Hasil kerjasama Penelitian antara Bappelitbangda dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2017). Klon-klon ini pada tahun 2021 dilakukan perbanyakan dan Uji Multilokasi Klon di 6 kecamatan guna mendapatkan Klon yang benar-benar unggul untuk seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Keunggulan dari klon-klon unggul gaharu ini adalah respon batang gaharu yang lebih cepat dalam membentuk gugal gaharu ketika d2nokulasi, dengan demikian produktivitas dan kontinuitas gugal gaharu Bangka Tengah dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2019 telah mendapatkan paten dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor Paten: IDP000060107. Produk tersebut diproduksi secara komersial oleh Gapoktan Alam Jaya Lestari, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakang dibuatnya teh gaharu bermula dari testimoni masyarakat Desa Lubuk Pabrik yang menyatakan bahwa teh gaharu memberikan efek positif bagi tubuh dan mengingat banyaknya bahan baku yang tersedia, maka pada tahun 2012 Pemkab Bangka Tengah mulai melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dengan hasil bahwa teh gaharu dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Kabupaten Bangka Tengah akan terus berinovasi dalam menciptakan produk turunan dari gaharu seperti dupa, sabun dan tasbih. Pada tahun 2020 akan dilakukan kerjasama kembali antara Pemkab Bangka Tengah dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya untuk membuat produk turunan gaharu yaitu Briket Gaharu. Dengan demikian semakin bervariasinya produk turunan dari gaharu, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sektor UMKM dan juga dapat mendukung sektor wisata di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.58 Luas Kawasan Hutan (ha)

No.	Kawasan Hutan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hutan Lindung	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40
3.	Hutan Produksi	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62
4	Luas Kawasan Hutan	129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (Data diolah), 2022

Berdasarkan data pada Tabel II.119 di atas, luas kawasan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 sd. 2021 tidak mengalami perubahan luas. Total luas kawasan hutan yaitu 129.206,80 ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 32.349,78 ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 6.009,40 ha, dan Hutan Produksi 90.847,62 ha. Pemanfaatan kawasan hutan lindung seluas 32.349,78 ha serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 6.009,40 ha ialah sebagai berikut:

- a. Kawasan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan berada di Pulau Gelasa Kecamatan Lubuk Besar.

- b. Kawasan Hutan Konservasi berada di Gunung Mangkol yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Simpang Katis, dan Kecamatan Namang.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai berada di Kecamatan Lubuk Besar.

Beberapa areal kawasan hutan produksi saat ini merupakan areal pemukiman penduduk, perkampungan, dan kebun penduduk. Hal ini seperti yang terlihat di Kecamatan Lubuk Besar, penduduk menyatakan bahwa mereka sudah bermukim lama di kawasan hutan produksi Lubuk Besar sebelum kehutanan menetapkan daerah tersebut menjadi kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah penanaman kayu gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan, jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina, dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.

2.1.3.1.4. Urusan Perdagangan

Tabel II.59 Jumlah Pasar

No.	Pasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pasar Tradisional						
1.	Dikelola Pemerintah	12	15	19	19	19
2.	Dikelola Swasta	1	1	1	1	1
3.	Dikelola Masyarakat	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Tradisional	13	16	20	20	20
Pasar Modern						
1.	Swalayan/Supermarket/Toserba	2	1	1	1	1
2.	Minimarket	5	5	6	6	6
3.	Pasar Perkulakan Grosir	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Modern	7	6	7	7	7

Sumber: DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.120 di atas, jumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangka Tengah mulai bertambah pada tahun 2019 sebanyak 20 pasar, 19 pasar yang dikelola pemerintah dan yang dikelola swasta sebanyak 1 pasar. Pasar modern pada Tahun 2019 sebanyak 7 pasar, terdiri dari swalayan/ supermarket/ toserba sebanyak 1 buah,

minimarket sebanyak 6 buah. Dan pada tahun 2021 jumlah pasar modern tidak mengalami penambahan, akan tetapi pergantian jenis pasar (tutup Giant, buka indo maret/alfa mart).

Tabel II.121 Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan

No.	Pasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB ADHK (%)	16,14	16,59	17,52	17,13	16,95
2.	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (yoy)	2,85%	1,31%	1,19%	-17,23%	4,67%
3.	Nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (juta)	118.285	119.838	121.266	100.366	105.056
4.	Persentase UTTP yang ditera	n/a	8,4%	13,4%	12,12%	17,95%

Sumber: DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel II.121 diatas persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar traditional di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan kontribusi dari tahun – tahun sebelumnya, yaitu dari 2,85 persen pada tahun 2017 menjadi -17,13 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,67 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 16,95% dari kondisi membaik pada tahun 2020 yaitu sebesar 17,13%..

Kontribusi sektor yang dihitung antara lain kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sesuai dengan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik.

Transaksi perdagangan di pasar tradisional tercatat anjlok hingga -17,23% dibandingkan tahun 2019. Nilai transaksi perdagangan di pasar tradisional sepanjang tahun 2020 tercatat sebesar Rp 100.366 juta, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 121.266 juta. Penurunan transaksi perdagangan di pasar tradisional di Kabupaten Bangka Tengah tergolong masih cukup baik, jika dibandingkan di beberapa kota besar lainnya yang terkontraksi hingga 50 – 70%. Dan kondisi ini menjadi

membuat pada tahun 2021 yaitu meningkat menjadi Rp. 105.056 juta, yang dibarengi dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Persentase UTTP yang diterapkan pada tahun 2020 sebesar 12,12% persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 13,4% dari total potensi alat UTTP yang wajib diterapkan. Penurunan capaian tera/terulang ini lebih disebabkan adanya refocusing anggaran, disamping pembatasan-pembatasan yang diterapkan yang menyebabkan penyelenggaraan sidang tera menjadi tidak optimal. Pada tahun 2021 usaha tera ulang dilakukan dengan lebih gencar lagi berupa peningkatan kunjungan ke lokasi dan mengoptimalkan sidang tera ulang secara komprehensif walaupun kondisi fasilitas dan SDM yang terbatas tera ulang dapat mencapai 17,95%

2.1.3.1.5. Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal.

Tabel II.60 Capaian Indikator Bidang Perindustrian

No.	Pasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	PDRB ADHK dalam sektor industri pengolahan (Rp Juta)	608.068	591.603	325.927	329.110	344.216
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	8,96	8,93	5,63	6,36	6,60
3.	Percentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah(%)	8,49	7,37	8,15	6,56	
4.	Percentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT (%)	20,79	20,04	22,19	20,22	
5.	Percentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal (%)	4,89	5,03	6,69	6,24	

Sumber: DISPERINDAGKOP-UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel II.122 di atas, nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2019 sebesar 325.927 juta menjadi 331.755 juta pada tahun 2020. Nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 608.068 juta. Kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan memberikan kontribusi sebesar 8,96 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2020

sebesar 6,36 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,63 persen. Industri kecil dan industri skala rumah tangga tercatat tumbuh 6,56%, lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 8,15%.

2.1.3.1.6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Realisasi capaian kinerja urusan perikanan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 -2021 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.123.

Tabel II.123 Capaian Kinerja Urusan Perikanan

No.	Pasar	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	39,48	49,85	55,18	54,95	61,40
Perikanan Tangkap						
2.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	3.824	1.784	1.807	1.807	1898
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	23.969,66	25.068,94	27.327,56	27.956,094	27.596,99
4.	Cakupan bina kelompok nelayan	34	33	25	46	
Perikanan Budidaya						
5.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	283	291	313	347	360
6.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.456,56	1.467,31	1.526,43	1.537,70	1.927,15
7.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan					

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Hasil survey dan analisis nilai konsumsi ikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 dengan target sebesar 42,50 kg/kapita/tahun dan telah tercapai 54,95 kg/kapita/tahun atau 129,29% atau 4,49 kg/kapita/bulan atau sebesar 1,05 kg/kapita/minggu atau sebesar 149,68 gram/kapita/hari. Berdasarkan Tabel II.123 terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai target. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi standard FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 31,40 kg/kapita/tahun dan nilai konsumsi ikan nasional 54 kg/kap/tahun.

Indikator jumlah produksi perikanan tangkap didukung oleh 1 (satu) program yaitu : Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pada Tahun 2021 realisasi jumlah produksi perikanan tangkap lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap Tahun 2021 ditargetkan sebesar 27.957 ton dan terealisasi sebesar 27.596,99 ton atau 98,71%.

Menurut analisis tim kajian, terjaganya kondisi pasokan ikan di masyarakat, sebagian besar di sumbangkan dari produksi perikanan tangkap. Alasan ini terlihat dari kurun waktu tiga tahun, yakni tahun 2017, 2018 hingga 2019, nilai produksi perikanan laut (tangkap) terus meningkat dari 23.969,66 ton menjadi 25.068,98 dan meningkat lagi menjadi 27.316,46 ton. Terjaganya jumlah pasokan ikan dalam jumlah cukup ini sangat penting di masa Pandemi. Analisis lebih mendalam mendapatkan bahwa, Program peningkatan teknologi alat tangkap, berupa pemasangan sistem informasi keberadaan ikandi setiap perahu nelayantangkap, yang di sebut “Si-DOLPIN” oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Tengah, ternyata mampu mendongkrak produksi penangkapan para nelayan Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga, jumlah pasokan ikan yang terjaga di masyarakat Bangka tengah, diindikasikan menjadi salah satu penyebab bertahannya nilai konsumsi ikan tahun 2020, walau dimasa Pandemi.

Indikator Nilai Konsumsi ikan didukung oleh 1 (satu) program yaitu : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Hasil survey dan analisis nilai konsumsi ikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 dengan target sebesar 43 kg/kapita/tahun dan telah tercapai 61,40 kg/kapita/tahun atau 142,79% atau 5,2 kg/kapita/bulan atau sebesar 1,28 kg/kapita/minggu atau sebesar 168,22 gram/kapita/hari. Berdasarkan Tabel terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai target. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi standard FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 31,40 kg/kapita/tahun dan Nilai konsumsi ikan Nasional 54 kg/Kap/Tahun Urusan Perikanan.

Indikator pendapatan Nelayan (Rupiah/ orang/ Bulan) didukung oleh 1 (satu) program yaitu : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Pada Tahun 2021 realisasi pendapatan nelayan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan nelayan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 4.411.765,-Orang/ Bulan dan terealisasi sebesar Rp 5.091.156,- /Orang/Bulan atau 115%. Pada Tahun 2021 realisasi jumlah produksi perikanan tangkap melebihi dari target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap Tahun 2021 ditargetkan sebesar 22.279,43 ton dan terealisasi sebesar 27.596,99 ton atau 123,87%.

Indikator pendapatan Budidaya (Rupiah/ orang/ Bulan) didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan pembudidaya melebihi target yang telah ditetapkan. Pendapatan pembudidaya ikan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 3.740.000,- orang/bulan dan

terealisasi sebesar Rp 6.042.146,- orang/bulan. Pada Tahun 2021 realisasi jumlah produksi perikanan tangkap melebihi dari target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan Budidaya Tahun 2021 ditargetkan sebesar 1.415 ton dan terealisasi sebesar 1.927,15 ton atau 136,19%.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

2.1.3.2.1. Sekretariat Daerah

1. Rasio PAD terhadap APBD

Indikator Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pengoptimalan peningkatan penerimaan daerah terus dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Tabel II.124 menunjukkan perbandingan PAD dan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.124 Rasio PAD terhadap APBD

Tahun	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Persentase PAD terhadap APBD (%)
2016	73.459.526.744,49	863.100.255.480,7	8,51
2017	97.375.136.679,82	780.339.475.392,81	12,48
2018	75.995.335.730,86	898.481.453.608,61	8,46
2019	88.848.500.111,92	963.016.422.307,04	9,23
2020	85.202.659.988,36	962.562.737.088,42	8,85
2021	83.318.024.223,00	940.665.400.000,00	8,86

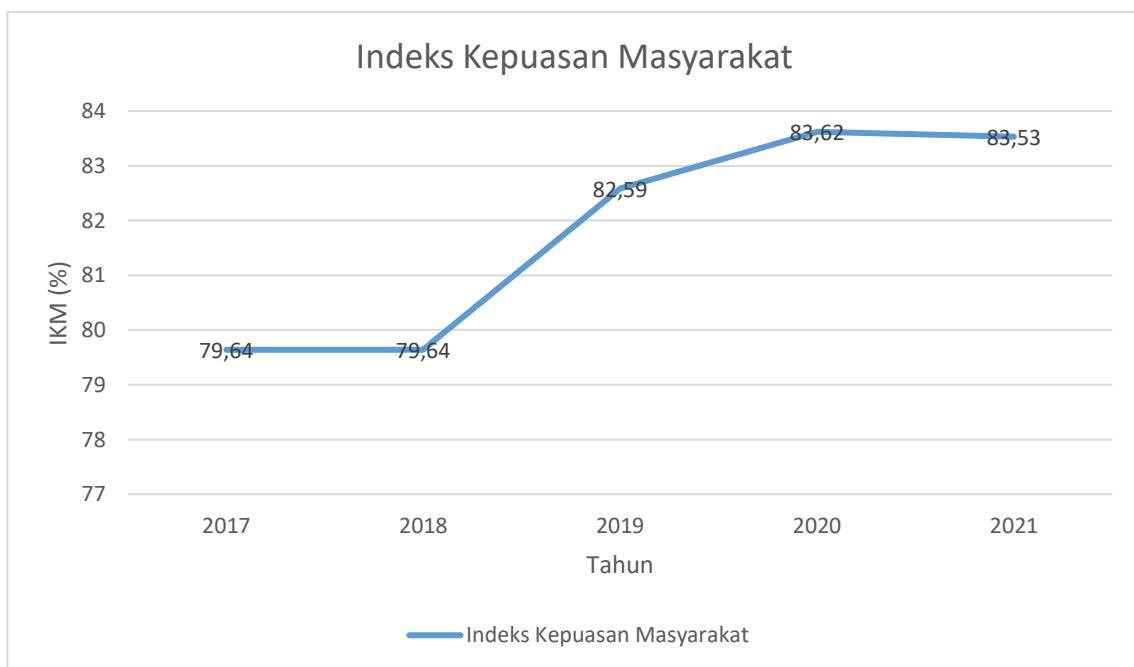
Sumber: BPKAD Kabupaten Bangka, 2022

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 24 unit pelayanan publik, yaitu RSUD, Puskesmas, KPPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan sebagai sampling serta jumlah responden masing-masing jenis pelayanan sebanyak 150 orang dengan sistem acak. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini yaitu data primer yang diperoleh

secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Berikut nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 sd. 2021.

Gambar II.25 Grafik Nilai IKM



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Berdasarkan Gambar II.25 grafik di atas, pada tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat sebesar 83,53% dan hasil nilai IKM ini berkategori “Baik”. Tren nilai survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 mengalami penurunan. Faktor yang menyebakan pencapaian kinerja tersebut adalah kondisi pandemik covid-19 yang masih berlangsung sehingga mempengaruhi beberapa program/kegiatan teramasuk di dalamnya pelayanan oleh sumber daya manusia yang tersedia yang harus bekerja dengan sistem daring maupun *shift* kerja bergiliran dan bahkan ada Perangkat Daerah yang mengalami *lockdown* akibat dari terjangkitnya pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan. Namun dukungan Kementerian PAN dan RB dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan tetap diberikan kepada Kabupaten Bangka Tengah dengan terpilihnya Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu dari 56 Kabupaten/Kota yang menjadi *pilot project* pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB. Selain itu, dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survei independen kepatuhan standar pelayanan publik yang menyatakan Kabupaten Bangka Tengah masuk kategori Zona Hijau..

3. Predikat SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pelaksanaan evaluasi SAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel II.125 Nilai SAKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	23,44	24,21	24,57	25,51	24,63
2.	Pengukuran Kinerja	15,99	17,60	17,81	18,52	18,54
3.	Pelaporan Kinerja	11,01	11,41	11,97	10,71	10,50
4.	Evaluasi Internal	6,34	6,45	6,74	6,84	6,53
5.	Capaian Kinerja	10,41	10,43	9,11	10,20	10,92
	Nilai Hasil Evaluasi	67,19	70,10	70,20	71,78	71,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB

Sumber: Sekretariat Daerah, 2022

Berdasarkan Tabel II.125 diatas, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2017 sampai 2021 cenderung mengalami peningkatan dan untuk tahun 2021 capaian nilai SAKIP dengan predikat BB tetapi jika dibandingkan tahun 2020, ada beberapa komponen yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal. Sedangkan ada satu komponen yang meningkat pengukuran kinerja.

2.1.3.2.2. Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan

perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD. Realisasi capaian indikator kinerja DPRD sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.126.

Tabel II.126 Indikator Kinerja DPRD

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	100	100	100	100	100
3.	Persentase anggaran yang disahkan	100	90	90	90	90
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	90	100	90	90	90
5.	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	60	60	60	60	60

Sumber: Sekretariat DPRD, 2022

Dari Tabel II.126 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada DPRD sudah sangat baik dilihat dari pencapaian persentase peraturan daerah hak inisiatif pemerintah daerah 100 persen disahkan oleh DPRD begitu juga persentase perda hak inisiatif DPRD capaiannya 100 persen. Persentase anggaran yang disahkan sebesar 90 persen dan persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan 90 persen serta persentase aspirasi masyarakat yang tertampung sebesar 60 persen sesuai dengan tahun 2020.

3.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

3.1.3.2.5. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pada

orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239).

Perencanaan pembangunan harus konsisten antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD. Realisasi capaian indikator kinerja bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel II.127.

Tabel II.61 Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (Persen)	98,84	94,35	93,82	86,89	100
2.	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (Persen)	95,88	98,80	98,20	98,11	100
3.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	64,47	64,47	72,06	72,06*	80,95

Sumber: Bappelitbangda, 2022

Penjabaran konsistensi program dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan melihat jumlah program pada dokumen Renstra yang dilaksanakan dan selaras dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program Renja-PD yang diusulkan dalam RKPD dan perbandingan jumlah program yang diusulkan dalam RKPD dengan program yang dilaksanakan dalam APBD. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 realisasi konsistensi program Renstra yang dilaksanakan dan selaras dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program Renja-PD yang diusulkan dalam RKPD. Pada tahun 2021, setelah aplikasi SIPD dimplementasikan dalam penginputan Renja-PD dan pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran dilaksanakan, konsistensi keselarasan perencanaan meningkat dan tercapai 100 persen.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama kurun waktu tahun 2017-2021 semakin meningkat dari 64,47 persen pada tahun 2017 menjadi 80,95 persen

pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan peruntukannya telah sesuai dengan RTRW.

3.1.3.2.6. Keuangan

Indikator Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pengoptimalan peningkatan penerimaan daerah terus dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2021, Kabupaten Bangka Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat ini telah dipertahankan sejak 6 tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publlik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik. Tabel II.128 di bawah ini menunjukkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016-tahun 2021.

Tabel II.62 Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Tahun	Opini BPK RI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

Sumber: BPK RI, 2021

Dari Tabel II.128 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 6 tahun berturut-turut yaitu mulai tahun 2016-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten

Bangka Tengah dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara.

3.1.3.2.7. Kepegawaian

Realisasi capaian kinerja indikator kepegawaian dari tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel II.129.

Tabel II.129 Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.	28	28	30	30	22
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah.	834	839	1.095	1.076	1.211
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	1.880	1.782	1.724	1.684	1.615
4.	Persentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi	89,18	89,24	89,67	88,6	-
5.	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	0,15	0,08	0,25	0,04	0,02
6.	Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu	36,44	47,91	66,20	83,29	86,22

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Pada Tahun 2021 jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 30 sama dengan Tahun 2020 yaitu sebanyak 30. Untuk jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak terjadinya 135 jabatan dimana pada tahun 2020 jumlah jabatan administasi sebanyak 1.076 jabatan dan bertambah menjadi 1.211 di Tahun 2021 hal ini disebabkan adanya penerimaan CPNS.

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 69 dimana pada tahun 2020 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah sebanyak 1.684 menurun pada tahun 2021 menjadi 1.615 hal ini disebabkan adanya peralihan jabatan dari jabatan fungsional ke jabatan structural.

Presentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi pada tahun 2021 mengalami penurunan dimana pada Tahun 2020 berjumlah 88,6%

menurun pada Tahun 2021 menjadi 62,32% hal ini disebabkan karena adanya regulasi terkait penyederhanaan birokrasi dimana beberapa jabatan eselon IV masuk ke dalam kualifikasi untuk disetarakan maksimal tanggal 31 Desember 2021.

Presentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan sebesar 0,02% pada Tahun 2021 dimana pada tahun 2020 presentase pelanggaran disiplin pegawai sebesar 0,04% dan menurun menjadi 0,02% ditahun 2021 hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran pegawai akan pentingnya mematuhi peraturan disiplin pegawai.

Presentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu juga menunjukan peningkatan dari Tahun 2020 yaitu pada tahun 2020 sebesar 83,29% menjadi 86,22% pada Tahun 2021 hal ini dikarenakan adanya pelayanan kepegawaian berupa dokumen karpeg, karis, karsu, taspen, satyalencana serta cuti pegawai sebanyak 400 dokumen yang terlayani.

3.1.3.2.8. Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dengan meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Upaya tersebut diantaranya dengan menugaskan para PNS untuk tugas belajar dan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. Realisasi capaian kinerja indikator Pendidikan dan pelatihan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.130.

Tabel II.130 Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata lama pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (JP)	70	72	74	61	50
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%).	27,28	39,80	48,79	51,05	61,25
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%).	36,57	39,70	38,38	36,31	39,76

Sumber : BKPSDMS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 rata-rata lama pegawai mengikuti Pendidikan mengalami penurunan menjadi sebesar 50 JP, dikarenakan rata -rata penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lebih banyak berupa Bimtek atau Diklat dengan durasi kegiatan selama 3 s.d 6 hari.

Pada Tahun 2021 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 51,05 menjadi 61,25% tahun 2021 dikarenakan adanya penambahan ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2021.

Pada Tahun 2021 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebesar 36,31% menjadi 39,76 % kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan pengiriman ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajerial (PIM) sebanyak 6 orang.

3.1.3.2.9. Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Bangka Tengah mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bangka Tengah. Urusan penelitian dan pengembangan di kabupaten Bangka Tengah baru dilaksanakan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pembentukan litbang dan Permendagri nomor 5 tahun 2017 tentang struktur organisasi litbang.

Realisasi indikator kinerja bidang penelitian dan pengembangan tahun 2017-2021 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.131.

Tabel II.63 Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase implementasi rencana kelitbang	100,0	100,0	100,0	100,0	83,33
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	75,0	75,0	75,0	100,0	80
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	54,8	64,5	90,3	93,5	

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dalam penerapan SIDa					
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa	0,0	0,0	75,4	76,0	

Sumber: Bappelitbangda, 2022

Implementasi perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bangka Tengah dimulai tahun 2017 dengan 4 target yaitu Penelitian Inokulan Gaharu, Penelitian Teh Gahru, Pengembangan Madu Kelulut dan Penelitian Jamur Pelawan terealisasi 100 persen sampai dengan tahun 2019, sedangkan ditahun 2020 terjadi efisinsi program dan kegiatan sehingga terget diturunkan jadi 2 kegiatan yaitu Penelitian Klon Unggul Gaharu dan Penelitian sekaligus Pengembangan Inokulan Gaharu, dan terealisasi 100 persen.

Pemanfaatan hasil kelitbangaa dimulai tahun 2017 dengan terealisasi 75 persen adapun kegagalan terjadi pada penelitian jamur pelawan sehingga tidak termanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahun 2020 target pemanfaatan hasil kelitbangaa yang dilaksanakan adalah pemanfaatan Inokulan Gaharu yang telah dimanfaatkan oleh para petani Gaharu di Kabupaten Bangka Tengah, dengan realisasi tahun 2020 adalah 100 persen, sedangkan kelon unggul Gaharu belum bisa dimanfaatkan karena masih bebentuk benih, namun kegiatan penelitian klon unggul gaharu telah menemukan dua puluh tujuh (27) kelon unggul gaharu.

Jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah 32 (tiga puluh dua) perangkat daerah. Pada tahun 2017 masing – masing perangkat daerah telah dituntut untuk membuat Inovasi minimal satu perangkat daerah satu inovasi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan jumlah perangkat daerah yang membuat inovasi di Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat. Pada akhir tahun 2020 jumlah perangkat daerah yang telah memiliki inovasi sebanyak 29 perangkat daerah dengan total 152 inovasi daerah.

Kebijakan penerapan sistem inovasi daerah terealisasi 76 persen artinya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 76 persen inovasi di kabupaten Bangka telah diterapkan di masing – masing perangkat daerah yang melaksanakan inovasi, walaupun pada pelaksanaanya dibeberapa inovasi masih terdapat berbagai kendala yang menghambat sehingga menjadi tantangan dalam perencanaan selanjutnya.

3.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pengawasan

3.1.3.3.5. Inspektorat

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	3	3	3	3
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti	98,6	77,31	91,79	75,77	64,63
3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	0	0	0	0	0
4.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBBM	0	0	0	0	0
5.	Persentase nilai SAKIP PD dengan kategori "A"	21,9	64,5	43,01	0	12,5
6.	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	2	2	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

Tabel II.132 menunjukkan capaian indikator kinerja urusan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah masih berada pada level 2. Pencapaian tersebut berkat kerjasama antara seluruh Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan objek penilaian oleh BPKP. Pada tahun 2018 s.d 2021 BPKP tidak melakukan evaluasi terhadap Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah, sehingga sampai dengan tahun 2021 tingkat level maturitas SPIP masih berada pada level 3.
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 98,6. Namun tahun 2018 mengalami penurunan persentase hingga di angka 77,31 persen. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali hingga 91,79 persen. Tahun 2020 capaian persentase tindaklanjut sebesar 75,77 persen. Penurunan ini dikarenakan kurangnya komitmen dari PD terkait dalam menindaklanjuti temuan. Tahun 2021 capaian persentase tindaklanjut sebesar 64,63 persen, dengan perhitungan 572 rekomendasi

BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah rekomendasi BPK dan APIP sebesar 885 rekomendasi dikali 100 persen. Penurunan ini dikarenakan kurangnya komitmen dari PD terkait dalam menindaklanjuti temuan.

3. Capaian unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sejak tahun 2017 s.d 2021 masih belum dapat diwujudkan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK. Untuk mendapatkan predikat WBK terdapat beberapa tahapan dalam penilaian guna mendapatkan predikat tersebut yaitu pengusulan, pembinaan, evaluasi dan pengajuan kepada Kementerian PAN dan RB untuk dinilai apakah layak mendapatkan predikat unit kerja WBK. Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah mengajukan 6 (enam) unit kerja yang akan di evaluasi yaitu :

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- UPTD Rumah Sakit Umum Daerah
- Kecamatan Sungaiselan
- Kecamatan Simpangkatis, dan
- Kecamatan Namang

Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK, hal ini dikarenakan implementasi WBK tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya, serta masih terdapat masyarakat yang menggunakan jada pihak lain/calo.

4. Capaian unit kerja yang mendapatkan predikat WBBM sejak tahun 2017 s.d 2021 masih belum dapat diwujudkan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBBM. Untuk mendapatkan predikat WBBM terdapat beberapa tahapan dalam penilaian guna mendapatkan predikat tersebut yaitu pengusulan, pembinaan, evaluasi dan pengajuan kepada Kementerian PAN dan RB untuk dinilai apakah layak mendapatkan predikat unit kerja WBBM. Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah mengajukan 6 (enam) unit kerja yang akan di evaluasi yaitu :

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

- Kecamatan Sungaiselan
- Kecamatan Simpangkatis, dan
- Kecamatan Namang

Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBBM, hal ini dikarenakan implementasi WBBM tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya, serta masih terdapat masyarakat yang menggunakan jada pihak lain/calo.

5. Pada Persentase nilai SAKIP PD dengan kategori “A” dari tahun 2017 sampai 2018, Inspektorat melakukan penilaian terhadap PD dengan hasil jumlah PD yang memperoleh nilai A terus meningkat, dari 2016 sebesar 24,2 persen menjadi sebesar 64,5 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 evaluator lebih objektif dalam memberikan penilaian, sehingga rata-rata nilai SAKIP PD mengalami penurunan. Sehingga hasil penilaian pada tahun 2019, persentase PD yang mendapat nilai SAKIP “A” sebesar 43,01% (10 PD mendapatkan nilai A dan 21 PD mendapatkan nilai BB). Begitu pula pada tahun 2020 rata-rata nilai SAKIP PD mengalami penurunan. Sehingga hasil penilaian pada tahun 2020, persentase PD yang mendapat nilai SAKIP “A” sebesar 0% (32 PD mendapatkan nilai BB). Pencapaian yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh evaluator baru mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian PAN dan RB terkait tata cara evaluasi SAKIP PD yang baik dan benar di awal tahun 2020. Pada kesempatan tersebut pihak Kementerian PAN dan RB menjelaskan bahwa penilaian SAKIP PD tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah adalah over statement atau dengan kata lain nilai yang di berikan tidak objektif, hal ini dikarenakan sebagian besar PD masih terdapat kekurangan dalam SAKIP. Strategi kedepannya adalah dengan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan Kementerian PAN dan RB serta memaksimalkan aplikasi seperti *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-SAKIP*. Setelah melakukan perbaikan pada tahun 2021 Persentase nilai SAKIP PD dengan kategori “A” mengalami peningkatan dengan realiasi 12,5% atau 4 PD yang mendapatkan kategori “A”.
6. Pada tahun 2017 s.d 2018 Inspektorat Daerah mendapat Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 2. Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah mendapat peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3, hasil penilaian dari Quality Assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sampai dengan tahun 2021 belum dilakukan penilaian kembali. Faktor pendukung dalam pencapaian IACM level 3 tersebut salah satunya

adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan audit kinerja. Namun untuk tahun Kedepannya Inspektorat Daerah akan lebih mengimplementasikan IACM level 3 tersebut, salah satunya lebih intens dalam memberikan jasa advise.

Tabel II.65 Perkembangan Indikator Urusan Penunjang Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Temuan APIP						
1.	Jumlah total temuan APIP	392	153	193	98	88
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	392	153	193	98	88
3.	Persentase tindaklanjut temuan APIP (%)	100	100	100	100	100
Temuan BPK						
1.	Jumlah total temuan BPK	21	18	21	23	5
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	21	18	21	23	5
3.	Persentase tindaklanjut temuan BPK (%)	100	100	100	100	100
Jumlah kasus pelanggaran pegawai		1	1	5	1	0

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Berdasarkan Tabel II.133 di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP/Inspektorat dan temuan BPK di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 100%, yang artinya semua temuan baik temuan dari APIP maupun BPK semuanya ditindaklanjuti. Jumlah temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel di atas. Temuan BPK tersebut terdiri dari temuan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan mengenai kepatuhan.

3.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Kewilayah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan yaitu kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tabel II.134 menunjukkan perkembangan indikator urusan kewilayah.

Tabel II.134 Perkembangan Indikator Urusan Kewilayahan

No.	Indikator Kinerja Program (output)	Tahun 2021
Kecamatan Koba		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat (%)	
Kecamatan Pangkalnabu		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	85
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat (%)	85,09
Kecamatan Sungaiselan		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	85,09
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat (%)	79,86
Kecamatan Simpangkatis		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	81
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	62,7
Kecamatan Namang		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	85,09
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	79,91
Kecamatan Lubuk Besar		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public (Nilai)	
2	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	

Sumber: Data Kecamatan, 2022

3.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

3.1.3.5.5. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam

menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara profesional.

Dalam rangka upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat

Tabel II.66 Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase forum kemitraan yang aktif (%)	75	100	100	100	100
2.	Persentase ormas yang aktif (%)	70	80	60	65	100
3.	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	60	65	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Tabel II.135 diatas menunjukkan indikator kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik, dari Tabel II.135 tersebut dapat kita ketahui persentase forum kemitraan yang aktif sebesar 100 persen, persentase ormas yang aktif mengalami peningkatan dari tahun 2020, dari 65 persen menjadi 100 persen dan persentase konflik vertical dan horizontal yang tertangani sebesar 100 persen.

3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

3.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.2. PDRB Per Kapita

Tabel II.136 PDRB Perkapita ADHB

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Rp Juta)	7 972 210	8 213 317	8 567 596	8 448 920	9 332 848
Jumlah Penduduk (jiwa)	188.603	192.428	196.196	198.946	201.861
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	42,270	42,682	43,669	42,241	46.234

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dapat terbandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi produksi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Tengah atas dasar berlaku sejak 2016 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PDRB per kapitas Kabupaten Bangka Tengah sebesar 43.669 juta rupiah, dan mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 42,241 juta rupiah, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 46.234 juta rupiah. Tabel II.137 menunjukkan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017-2021.

Tabel II.137 PDRB Perkapita ADHK

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Rp juta)	5.620.435	5.812.197	5.884.996	5 715 024	5 987 649
Jumlah Penduduk (jiwa)	188.603	192.428	196.196	198.946	201.861
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	29,801	30,207	29,991	28.726	29.662

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2021b

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi. PDRB ADHK pada tahun 2020 Kabupaten Bangka Tengah memiliki nilai PDRB sebesar 5.715.024 rupiah atau menurun 2,87 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah merupakan salah satu akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan drastis seperti angkutan udara, akomodasi dan jasa-jasa. Gambar II.26 menunjukkan grafik PDRB perkapita menurut pengeluaran di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2021.

Gambar II.26 Grafik PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

2.1.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah menurut pengeluaran. Sebagian besar produk barang dan jasa yang tercipta digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2017-2021, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun r21 (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel II.138 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Rumah Tangga (RT)					
a. ADHB (miliar rupiah)	5 505	5 988	6 550	6 531	6 811
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	3 645	3 833	4 013	3 978	4 100
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	69,05	72,90	76,46	77,45	72,98
Rata-Rata Konsumsi Perkapita/Tahun (Juta rupiah)					
a. ADHB					
b. ADHK	19,33	19,92	20,99	20,07	20,31
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	5,25	5,16	4,71	-0,89	3,07
b. Konsumsi perkapita	3,03	3,51	2,56		
Jumlah Penduduk (000 orang)	189	192	191	198	202

Pada Tabel diatas, menunjukkan bahwa porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 61,37 persen dan meningkat menjadi 76,34 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, nilai komponen konsumsi rumah tangga adalah sebesar 6.550 miliar rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 4.330 miliar rupiah.

Membaiknya perkembangan ekonomi yang terjadi telah mendorong pendapatan dari rumah tangga ikut membaik, hal ini berdampak terhadap perbaikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 selama kurun waktu lima tahun terakhir. Secara nominal, satu orang di Kabupaten Bangka Tengah selama periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pengeluaran setiap tahunnya. Pada tahun 2015 satu orang menghabiskan dana sekitar 23,92 juta rupiah

untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 33,42 juta rupiah pada tahun 2019. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan selama periode tahun 2017-2021, rata-rata konsumsi rumah tangga per orang tumbuh pada kisaran antara 4-7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,79 persen. Pertumbuhan menurun dari tahun 2017 hingga 2019 yang pertumbuhannya menjadi 4,71 persen di tahun 2019.

2.1.4.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator pendekatan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. Adapun indikator yang digunakan dalam Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun berlaku dengan harga tersebut pada tahun dasar dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun berlaku dengan harga yang dibayar petani pada tahun dasar yang dinyatakan dalam persentase. Indeks ini dapat digunakan untuk menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga, ada indikasi bahwa semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Secara umum ada tiga macam kategori NTP yaitu:

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/ *break even*. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.139 menunjukkan NTP di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2021.

Tabel II.139 Nilai Tukar Petani

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
a.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,00	91,16	87,73	107,89	111,87
b.	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	108,15	106,36	103,72	109,82	117,26
c.	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	110,37	114,89	118,22	101,78	104,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2015 s.d 2019 dan Universitas Bangka Belitung, 2021

Catatan : Di tahun 2019 u/ data perhitungan dari BPS masih di triwulan 2I

Berdasarkan Tabel II.139, selama kurun waktu tahun 2016 sd. 2021, NTP Kabupaten Bangka Tengah mengalami angka yang fluktuatif. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan oleh nilai tukar yang dibayarkan oleh petani dengan nilai yang diterima. Penyebab kenaikan dan penurunan NTP diantaranya karena dominan oleh kenaikan harga produksi seperti biaya berproduksi usahatani tergolong mahal. Secara keseluruhan NTP merupakan gabungan 3 (tiga) subsektor (holtikultura, perkebunan, dan peternakan).

NTP di Kabupaten Bangka Tengah dari Januari hingga Desember 2020 cenderung berfluktuasi dan cenderung menunjukkan pola yang meningkat menuju akhir tahun 2020. NTP tertinggi pada tahun tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada bulan Desember, dengan NTP sebesar 125,09. Angka tersebut lebih dari 100 yang menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2020 petani di Kabupaten Bangka Tengah mengalami surplus, di mana nilai yang diterima petani dari hasil produksi pertanian lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani, biaya produksi, dan penambahan barang modal usahatani. Apabila dibandingkan dengan bulan lainnya di tahun 2020, petani memperoleh keuntungan terbesar di bulan Desember 2020. Data penyusunan NTP dilakukan pada bulan September sampai Oktober, sehingga data pada bulan Nopember dan Desember diestimasi berdasarkan perkembangan harga dan nilai produksi di tahun dasar. Sebaliknya, NTP terendah pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada bulan Maret 2020, dengan NTP sebesar 96,75. Angka tersebut lebih kecil dari 100 yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2020 petani di Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit, di mana nilai yang diterima petani dari hasil produksi pertanian lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani, biaya produksi, dan penambahan barang modal usahatani. Apabila dibandingkan dengan bulan lainnya di tahun 2020, petani mengalami kerugian di bulan Maret 2020.

Petani di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 dalam kondisi sejahtera, dengan NTP tahun 2021 sebesar 111,87. NTP subsektor tanaman perkebunan sebesar

132,78 maka petani kelapa sawit, lada, dan karet sejahtera. NTP subsektor peternakan sebesar 112,40 maka peternak sapi, babi, dan ayam sejahtera. NTP subsektor tanaman hortikultura sebesar 105,70 maka petani cabai rawit, bawang merah, timun, kangkung, dan jeruk sejahtera. Akan tetapi, pada tahun 2021 petani cabai besar, terong dan sawi belum sejahtera.

Indeks harga yang diterima petani menggambarkan perkembangan harga hasil produksi pertanian di tingkat petani. Jika dilihat dari rata-rata, indeks harga yang diterima petani pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 6,78 persen dari 109,82 menjadi 117,26. Selama periode Januari hingga Desember 2021, indeks harga yang diterima petani berada pada kisaran antara 108,25-123,55 dengan rata-rata sebesar 117,26. Sementara itu selama periode Januari hingga Desember 2020, indeks harga yang diterima petani berada pada kisaran antara 97,81-127,67 dengan rata-rata sebesar 109,82. indeks harga yang diterima petani tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada subsektor tanaman perkebunan sebesar 141,00. Sebaliknya indeks harga yang diterima petani terendah pada tahun 2021 terjadi pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 108,25. Pada subsektor tanaman perkebunan, indeks harga yang diterima petani tertinggi selama periode Januari hingga Oktober 2021 terjadi pada bulan Oktober sebesar 154,03 dan It terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 130,86, sedangkan It pada bulan November dan Desember merupakan angka prediksi. Indeks harga yang diterima petani tertinggi tahun 2021 pada subsektor peternakan terjadi pada bulan Juli sebesar 126,11 sedangkan indeks harga yang diterima petani terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 102,70. Hal ini dapat terjadi karena pada bulan Juli 2021 terdapat hari besar keagamaan, saat permintaan terhadap komoditas peternakan meningkat akibatnya harga komoditas peternakan menjadi naik. Sementara itu pada subsektor tanaman hortikultura, indeks harga yang diterima petani tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan Agustus sebesar 116,71 sedangkan indeks harga yang diterima petani terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 103,57.

Indeks harga yang dibayar petani menggambarkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani baik untuk konsumsi rumah tangga petani maupun untuk proses produksi pertanian. Jika dilihat dari rata-rata, indeks harga yang dibayar petani pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen dari 101,78 menjadi 104,86. Selama periode Januari hingga Desember 2021, indeks harga yang dibayar petani berada pada kisaran antara 103,29-108,98 dengan rata-rata sebesar 104,86. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani selama periode Januari hingga Desember 2020 berada pada kisaran antara 101,10-

103,66 dengan rata-rata sebesar 101,78. Pergerakan indeks harga yang dibayar petani selama tahun 2021 berfluktuasi, dimana indeks harga yang dibayar petani tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 108,98, sedangkan indeks harga yang dibayar petani terendah terjadi pada bulan April sebesar 103,29. Jika dilihat dari subsektor, pada tahun 2021 subsektor tanaman perkebunan memiliki indeks harga bayar petani tertinggi yaitu sebesar 106,36. Sebaliknya subsektor tanaman hortikultura pada tahun 2021 memiliki indeks harga bayar petani terendah yaitu sebesar 102,42. Pada subsektor tanaman perkebunan, indeks harga bayar petani tertinggi selama periode Januari hingga Oktober 2021 terjadi pada bulan Juli sebesar 114,93 dan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 103,21. Sementara itu, indeks harga bayar petani pada subsektor peternakan tahun 2021 tertinggi terjadi di awal tahun yaitu pada bulan Januari sebesar 115,61 dan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 102,28. Berbeda halnya dengan subsektor tanaman hortikultura, indeks harga bayar petani tertinggi tahun 2021 terjadi pada Bulan Juli sebesar 104,90 dan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 100,00.

2.1.4.1.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN dihitung berdasarkan rata-rata total penerimaan keluarga nelayan dibandingkan dengan total pengeluaran keluarga nelayan dalam satu bulan. Pada saat musim ikan, paceklik dan agregat dalam kurun waktu satu tahun. NTN Kabupaten Bangka Tengah secara agregat pada tahun 2021 sebesar 116,04 atau naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 108. Hal ini diduga perekonomian masyarakat yang semakin membaik seiring menurunnya pandemi covid, NTN Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 diatas NTN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan Oktober 2021 sebesar 110,44. Nilai penerimaan nelayan rata-rata sebesar Rp 5.091.156,- per bulan, dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 4.387.349,- per bulan. Penurunan pengeluaran rumah tangga nelayan diduga karena adanya upaya efisiensi dari para nelayan terhadap pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap keterbatasan kondisi dan kesulitan-kesulitan ekonomi akibat pandemi covid19. Selain itu, faktor lainnya yang menyebabkan turunnya pengeluaran nelayan yaitu adanya bantuan pemerintah terkait dampak covid, baik berupa pangan, bantuan tunai, bantuan biaya sekolah, maupun subsidi biaya kesehatan. Penerimaan dan pengeluaran rumah tangga nelayan tahun ini lebih rendah dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp 6.244.617,- per bulan, dan pengeluaran sebesar Rp5.773.280,- per bulan.

NTN diatas 100 menggambarkan bahwa pendapatan keluarga nelayan sudah dapat mencukupi biaya melaut dan biaya hidup sehari-hari keluarga mereka. Penurunan penerimaan nelayan diduga karena maraknya aktivitas penambangan timah di wilayah pesisir yang dimulai sejak awal tahun 2021 sebagai dampak naiknya harga timah dikisaran Rp 160.000,- - Rp 220.000,- per kilogram, dibandingkan tahun sebelumnya harga timah pada kisaran Rp 80.000,- per kilogram. Dampak aktivitas penambangan timah inkonvensional yang disebabkan oleh naiknya harga timah menyebabkan daya beli masyarakat terhadap produk pangan sangat tinggi. Salah satunya adalah hasil tangkapan ikan nelayan. Hal ini mempengaruhi tingginya permintaan dan daya beli masyarakat terhadap hasil penangkapan ikan oleh para nelayan. Dampak dari kondisi ini menyebabkan ikan hasil tangkapan nelayan banyak terjual. Disatu sisi, kondisi ini mempengaruhi kualitas perairan pesisir, sehingga menurunkan produktivitas alat tangkap. Disisi lain, sebagian nelayan beralih profesi menjadi penambang timah, seperti di Kecamatan Pangkalanbaru. Meski terjadi penurunan penerimaan, nelayan pada sektor perikanan tangkap masih mengalami surplus. Nilai NTN mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan mampu menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi/kebutuhan atau pengeluaran rumah tangganya. NTN meningkat pada saat musim ikan di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 116,73. Penerimaan nelayan pada saat musim ikan sebesar Rp. 5.121.513,- per bulan. Sedangkan NTN turun menjadi 82,47 pada saat paceklik, yakni pada bulan Desember, Januari, dan Februari, dengan penerimaan nelayan sebesar Rp. 3.618.377,- per bulan.

Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 sd. 2021 pada Tabel II.140 di bawah ini.

Tabel II.140 Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Tahun				
2017	2018	2019	2020	2021
104	105,31	116	108	116,04

Sumber: Diperkan, (Data diolah), 2022

2.1.4.2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) secara umum di Kabupaten Bangka Tengah secara total (agregat) pada tahun 2021 sebesar 105,57 (dibulatkan menjadi 106) atau turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 106,80 (dibulatkan menjadi 107). Penurunan ini diduga karena peningkatan aktivitas penambangan timah yang menyebabkan pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah sebagian beralih

profesi dari pembudidaya menjadi penambang timah. Sehingga pekerjaan utama sebagai pembudidaya beralih menjadi pekerjaan sampingan dengan kegiatan utama mereka dari hasil tambang. Namun, nilai NTPi ini masih berada di angka 100, artinya pendapatan keluarga pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah sudah dapat mencukupi biaya produksi dan biaya hidup sehari-hari keluarga mereka. Nilai penerimaan pembudidaya ikan rata-rata tahun 2021 sebesar Rp 6,042,146,- per bulan, dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 5,622,146,- per bulan.

Angka NTPi per kelompok ikan menunjukkan bahwa nilai tertinggi dihasilkan pada kelompok ikan hias yaitu sebesar 115 sedangkan ikan konsumsi berada pada angka 104. Angka NTPi per segmentasi kegiatan menunjukkan bahwa pemberian ikan memiliki nilai lebih tinggi yaitu 117 dibandingkan pembesaran dengan angka 102. Sedangkan angka NTPi komoditas ikan Lele lebih rendah dibandingkan ikan Nila yaitu berturut-turut 102 dan 103. Adapun NTPi tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sd. 2021 pada Tabel II.141 di bawah ini.

Tabel II.141 Jumlah Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Tahun				
2017	2018	2019	2020	2021
102,5	102,5	106	106,08	105,57

Sumber: Diperkan, (Data diolah), 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

Prasarana jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Semakin baik dan memadai infrastruktur jalan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, diharapkan semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat. Berdasarkan kewenangan, jalan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

a. Jalan Nasional

Jalan nasional yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah ada 65,23 km berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

b. Jalan Provinsi

Penetapan jalan provinsi di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi, ada sepanjang 174,26 km.

c. Jalan Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan pembaruan Ruas Jalan Kabupaten melalui SK BUPATI Nomor: 188.45/206.2/DPUTRP/2021 Tanggal 12 April 2021. Total panjang jalan Status Kabupaten sepanjang 441,39 Km dengan jumlah ruas sebanyak 198 ruas jalan.

Namun di luar jalan tersebut di atas, terdapat jalan lainnya yang terdapat di wilayah administrasi kabupaten Bangka Tengah sepanjang seperti jalan desa dengan panjang lebih kurang 271,8 km. Dengan demikian, data rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.142 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Penduduk

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jalan Nasional	65,23	65,23	65,23	65,23*	65,23*
2.	Jalan Provinsi	174,26	174,26	174,26	174,26*	174,26*
3.	Jalan Kabupaten	346,72	346,72	346,72	346,72*	441,39*
4.	Jalan Lainnya	271,8	271,8	271,8	271,8*	n/a
Total Panjang jalan (km)		858,01	858,01	858,01	858,01*	952,68*
5.	Jumlah Penduduk	177.335	182.286	196.196	200.016	201.861
Rasio panjang jalan / jumlah penduduk (km/1000 orang)		4.84	4.71	4.37	4.37*	4.72*

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2016; Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018; Kementerian PUPR, 2015 (Data Diolah, 2022)

Dari data yang ditampilkan pada Tabel II.142 di atas, terlihat bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh data panjang jalan yang digunakan berasal dari data Surat Keputusan (SK), baik Menteri PUPR, Gubernur dan Bupati. Panjang jalan berdasarkan SK tidak ada perubahan panjang secara tahunan, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dimasukkan juga data panjang ruas jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Karena masih terdapat jalan lainnya yang belum diperhitungkan dimana untuk ruas jalan baru biasanya dihitung sebagai data jalan lainnya. Di samping itu, perlu dilakukan inventarisasi ruas jalan setiap tahunnya untuk mendata ruas-ruas jalan baru baik yang

dibangun menggunakan anggaran APBD Kabupaten maupun anggaran dana desa. Dari Tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, rasio panjang jalan per 1.000 penduduk ada 4,72 km/1000 orang yang berarti tiap 4,72 km jalan di Bangka Tengah melayani 1.000 orang penduduk.

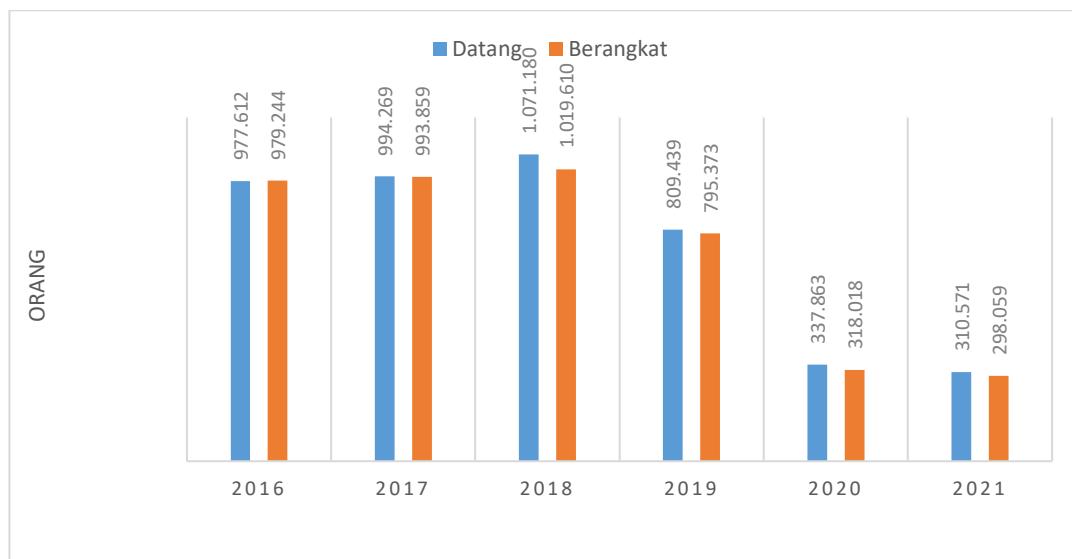
2.1.4.2.2. Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan

Pada tahun 2021, jumlah kendaraan di Kabupaten Bangka Tengah adalah 63.790 unit kendaraan sedangkan panjang jalan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah adalah 952,68 km. Rasio jumlah kendaraan per panjang jalan adalah 66,96 unit kendaraan/km yang berarti tiap 1 km jalan di Bangka Tengah melayani 66,96 unit kendaraan.

2.1.4.2.3. Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun

Dermaga/bandara/terminal yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang melayani penumpang dan barang adalah Bandar Udara (Bandara) Depati Amir yang berada di Kecamatan Pangkalanbaru dan Pelabuhan Sungaiselan yang ada di Kecamatan Sungaiselan. Rincian penumpang dan barang yang melalui bandara dan pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut:

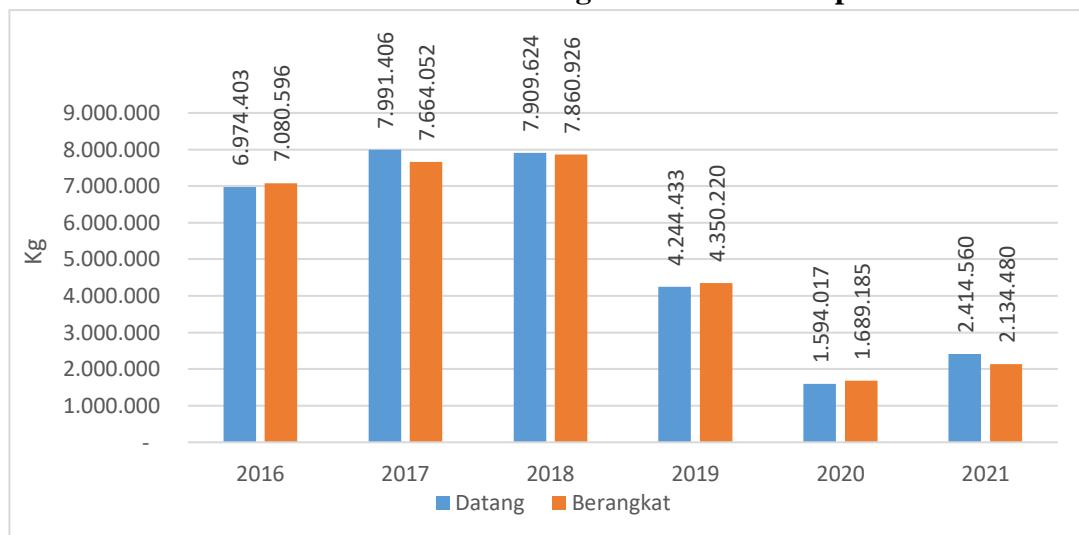
Gambar II.27 Grafik Jumlah Penumpang di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rata-rata jumlah penumpang yang datang melalui Bandara Depati Amir dari tahun 2016 hingga tahun 2021 adalah 750.156 orang per tahun dengan jumlah penumpang tertinggi 1.071.188 orang pada tahun 2018 dan jumlah penumpang terendah 310.571 orang pada tahun 2021. Sedangkan untuk rata-rata jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Depati Amir 734.028 orang dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 1.019.615 orang dan jumlah penumpang terendah 298.059 orang pada tahun 2021. Gambar II.28 menunjukkan grafik jumlah bagasi di Bandara Depati Amir.

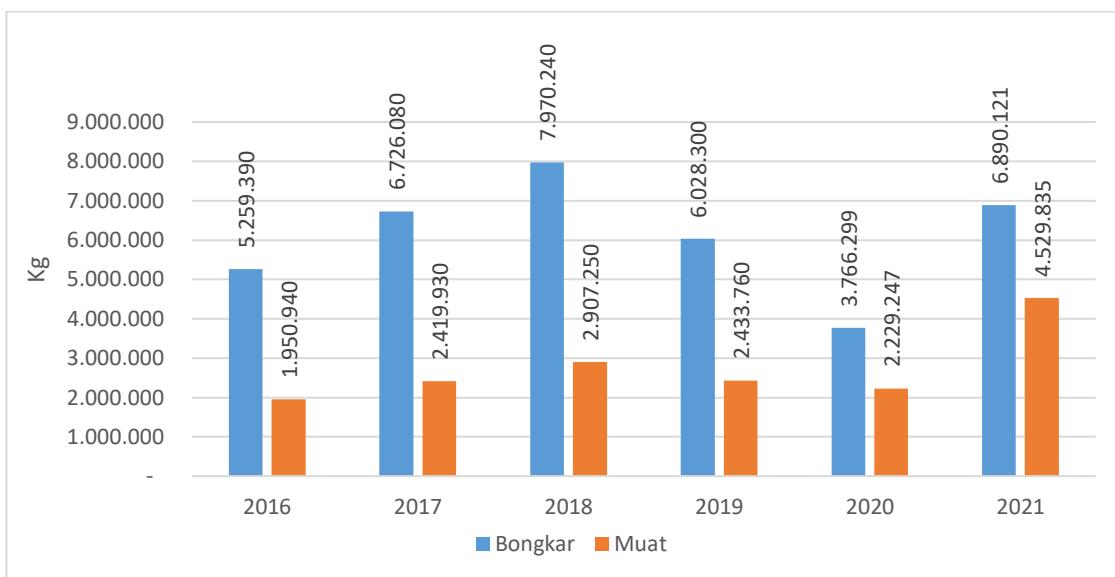
Gambar II.28 Grafik Jumlah Bagasi di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Jumlah rata-rata bagasi yang datang ke Bandara Depati Amir dalam rentang waktu 6 tahun adalah 5.188.073 kg per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan total 7.991.406 kg. Akan tetapi, terjadi penurunan pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 yang totalnya 1.594.017 kg yang merupakan angka terendah jumlah bagasi yang datang ke Bandara Depati Amir sejak tahun 2016. Untuk bagasi yang berangkat dari Bandara Depati Amir, rata-rata 5.129.909 kg per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 7.860.926 kg dan angka terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 1.689.185 kg. Sementara itu, untuk jumlah kargo di Bandara Depati Amir ditunjukkan oleh Gambar II.29.

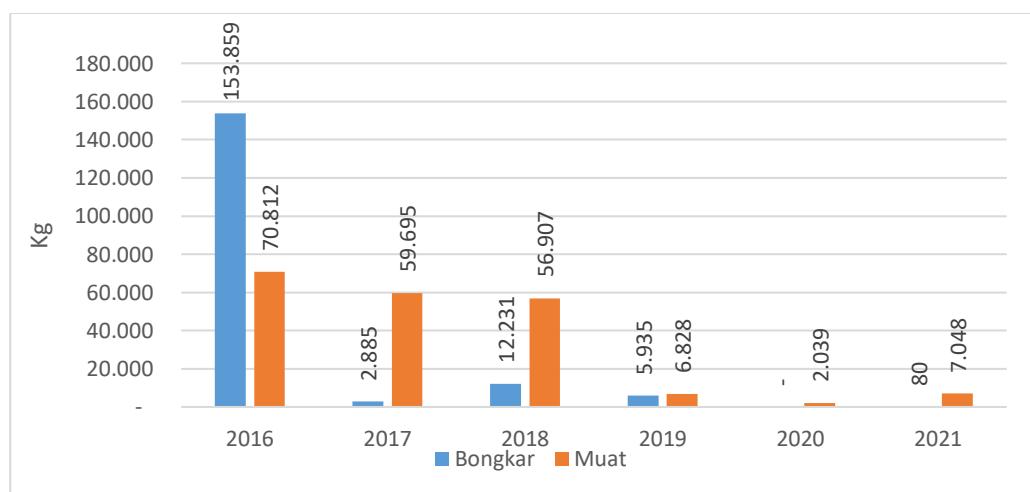
Gambar II.29 Grafik Jumlah Kargo di Bandara Depati Amir



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Jumlah rata-rata kargo yang dibongkar di Bandara Depati Amir dari rentang waktu 2016 sampai 2021 adalah 6.106.738 kg per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 7.970.249 kg dan angka terendah pada tahun 2020, yaitu 3.766.299 kg. Secara keseluruhan terlihat dari grafik bahwa jumlah kargo yang dimuat di Bandara Depati Amir jauh lebih rendah daripada jumlah kargo yang dibongkar. Rata-rata jumlah kargo yang dimuat adalah 2.745.160 kg dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 4.529.835 kg.

Gambar II.30 Grafik Jumlah Paket Pos di Bandara Depati Amir

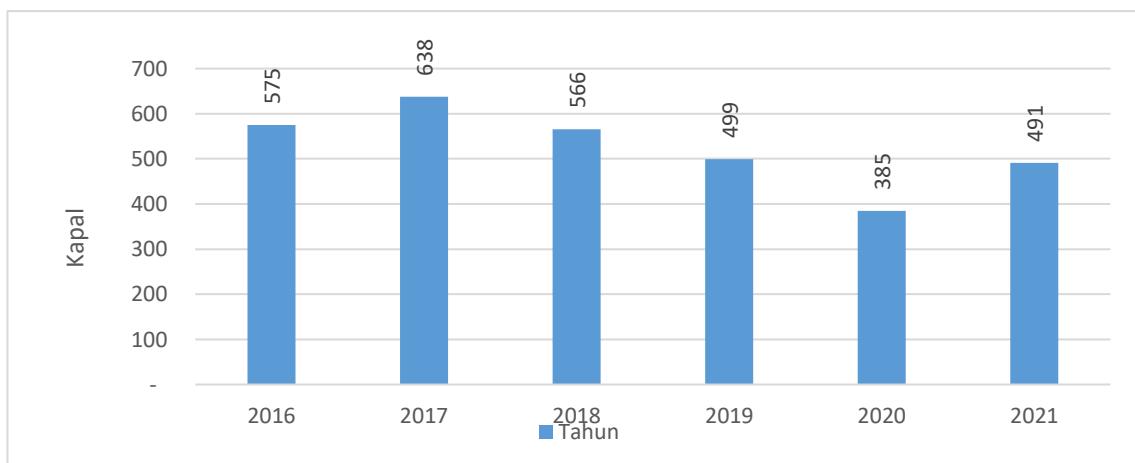


Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rata-rata jumlah paket pos yang dibongkar di Bandara Depati Amir tahun 2016-2021 adalah 29.165 kg. Gambar II.30 memperlihatkan grafik di atas terlihat jumlah paket pos yang dibongkar paling banyak pada tahun 2016 yaitu mencapai 153.859 kg.

Sedangkan jumlah rata – rata paket pos yang dimuat adalah 33.888 kg. Pada tahun 2021 terlihat peningkatan pada jumlah paket yang dimuat jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Gambar II.31 Grafik Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Sungaiselan



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Gambar II.31 menunjukkan jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Sungaiselan. Jenis kunjungan kapal di Pelabuhan Sungaiselan adalah jenis pelayaran nusantara dengan jumlah rata-rata 526 kapal per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 638 kunjungan kapal dan kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 menjadi 385 kunjungan kapal dan mulai meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 491 kapal.

2.1.4.2.4. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2021), tingkat Kesesuaian Pola Ruang sebesar 78,75%. Secara keseluruhan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah termasuk ke dalam kategori Ketercapaian Tinggi dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 86,20%.

2.1.4.2.5. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif di Bangka Tengah terdiri dari penggunaan lahan untuk pertanian yang terbagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.143 berikut.

Tabel II.67 Wilayah Produktif

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan Pertanian	168.131,99
1 Lahan sawah	306,00
a Irigasi	70,00
b Tadah Hujan	236,00
2 Lahan Bukan Sawah	167488,88
a Tegal	12.148,00
b Ladang	114,90
c Perkebunan	27.303,81
d Lain-lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	127.922,80

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Dari Tabel II.143 di atas dapat dilihat bahwa wilayah produktif di Kabupaten Bangka Tengah paling luas berupa penggunaan lahan lain-lain yang dapat berupa tambak, kolam, empang, hutan negara, dll. Sedangkan penggunaan lahan lain yang cukup luas di Kabupaten Bangka Tengah adalah perkebunan dan tegal.

2.1.4.2.6. Luas Wilayah Industri

Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 rencana Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

- Sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten;
- Sentra industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 ha dan Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha

2.1.4.2.7. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas total wilayah kebanjiran (luas genangan) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 40,59 ha yang tergambar dalam Tabel II.144 berikut ini.

Tabel II.144 Wilayah Genangan dan Perkiraaan Luas Genangan Pada Area Terbangun

No.	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan			Infrastruktur*		
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (Jam/hari)	Frekuensi (kali/Tahun)	Jenis Penyebab***	Ket.**
1.	Desa Kultur Iir, Kec. Lubuk Besar	2,061	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
2.	Desa Kultur Iir,Kec.Lubuk Besar	0,893	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase
3.	Sinar Laut, Kelurahan Padang Mulia, Kec. Koba	1,279	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
4.	Desa Penyak, Kec. Koba	0,479	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
5.	Jl. Pangkol-Bellik (Jembatan Sungai Pelawan, Kec. Namang)	5,406	0,30	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
6.	Desa Jelutung, Kec. Namang (Jl. Batas Kota-Koba, Jembatan Sungai Jelutung)	4,000	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
7.	Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru (Lokasi2)	0,235	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Sudah dibangun jembatan Tahun 2016
8.	Desa Benteng, Kec. Pangkalan Baru (Lokasi1)	0,493	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase
9.	Desa Lampur, Kec. Sungaiselan (Jl. Putup Lampur)	5,090	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase
10.	Jl. Namang -Batas Kota	0,879	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
11.	Kelurahan Berok, Kec. Koba (Lokasi 1)	2,200	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
12.	Kelurahan Berok, Kec. Koba (Lokasi 2)	2,860	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
13.	Desa Putup, Kec. Simpang Katis (Lokasi 1)	1,223	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase
14.	Desa Putup, Kec. Simpang Katis (Lokasi 2)	2,359	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase
15.	Jl. Lampur – Sungaiselan, Kec. Sungaiselan	3,660	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
16.	Kelurahan Sungaiselan, Kec. Sungaiselan	7,100	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi	Jalan dan drainase
17.	Dusun Simpang Gedong, Kec. Sungaiselan	0,380	0,40	4 Jam/hr	1 kali/Thn	Curah hujan yang tinggi dan sedimentasi aktivitas Tambang Inkonvensional (TI)	Jalan dan drainase

Sumber: DPUTRP Bangka Tengah, 2017

Gambar II.32 Peta Lokasi Daerah Rawan Banjir



Sumber: DPUTRP Bangka Tengah, 2017

2.1.4.2.8. Luas Wilayah Kekeringan

Telah menjadi hak semua masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan penyelenggaraan peningkatan kualitas air bersih menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi kelurahan atau desa rawan air merupakan desa dalam lingkup Kabupaten Bangka Tengah yang dinilai tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan air di masyarakat karena tidak adanya sumber air baku. Ada beberapa lokasi di Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan sebagai kelurahan dan desa rawan air berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/490/DPUTRP/2019. Lokasi kelurahan/desa rawan air di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Air Bersih di Kabupaten Bangka Tengah sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional untuk pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah yang menyeluruh (*comprehensive*), berkelanjutan (*sustainable*) dan terarah.

Terdapat 24 (dua puluh empat) lokasi desa rawan air yang tersebar pada enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/490/DPUTRP/2019 dengan total luas 96.597,86 ha yang tergambar pada Tabel II.145 berikut ini:

Tabel II.68 Lokasi Kelurahan/Desa Rawan Air

No.	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Kecamatan	Status
1.	Desa Penyak	1.907,46	Koba	Resiko Tinggi
2.	Desa Kurau Barat	7.215,64	Koba	Resiko Tinggi
3.	Desa Kurau Timur	8.413,95	Koba	Resiko Tinggi
4.	Desa Air Mesu	3.080,61	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
5.	Desa Pedindang	754,48	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
6.	Desa Tanjung Gunung	1.027,49	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
7.	Desa Batu Belubang	597,87	Pangkalanbaru	Resiko Tinggi
8.	Desa Air Mesu Timur	795,48	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
9.	Desa Kebintik	222,45	Pangkalanbaru	Resiko Sedang
10.	Desa Terak	2.094,80	Simpangkatis	Resiko Sedang
11.	Kelurahan Sungaiselan	15.343,94	Sungaiselan	Resiko Sedang
12.	Desa Sungaiselan Atas	2.966,27	Sungaiselan	Resiko Tinggi
13.	Desa Tanjung Pura	9.113,14	Sungaiselan	Resiko Tinggi
14.	Desa Lampur	8.077,36	Sungaiselan	Resiko Sedang
15.	Desa Sarang Mandi	3.565,33	Sungaiselan	Resiko Tinggi
16.	Desa Romadhon	7.200,41	Sungaiselan	Resiko Sedang
17.	Desa Melabun	2.220,13	Sungaiselan	Resiko Sedang
18.	Desa Keretak Atas	2.237,88	Sungaiselan	Resiko Sedang
19.	Desa Jelutung	2.576,05	Namang	Resiko Sedang
20.	Desa Bukit Kijang	837,33	Namang	Resiko Tinggi
21.	Desa Baskara Bakti	783,96	Namang	Resiko Tinggi
22.	Desa Cambai Selatan	2.700,85	Namang	Resiko Sedang
23.	Desa Lubuk Pabrik	4.905,14	Lubuk Besar	Resiko Sedang
24.	Desa Batu Beriga	7.959,84	Lubuk Besar	Resiko Sedang

Sumber: DPUTRP, 2019

2.1.4.2.9. Luas Wilayah Perkotaan

Luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel II.146 berikut.

Tabel II.69 Luas Kawasan Perkotaan

No	Kawasan Perkotaan	Luas (ha)	Sumber
1	Koba	2.298,56	Perda No 1 Tahun 2018
2	Pangkalanbaru	3.150,65	Perda No 1 Tahun 2018
3	Sungaiselan	472,20	Perda No 2 tahun 2019

Sumber: DPUTRP, 2019

Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2031 menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3, terdiri dari kawasan perkotaan Kecamatan Koba dengan luas 2.298,56 (Perda nomor 1 tahun 2018), kawasan perkotaan Kecamatan Pangkalanbaru dengan luas 3.150,65 (Perda nomor 1 tahun 2018) dan kawasan perkotaan Kecamatan Sungaiselan dengan luas 472,20 (Perda No 2 tahun 2019). Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru Dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038. Perda No 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No. 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 Rencana Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Bangka Tengah.

2.1.4.2.10. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Kantor bank yang ada di Kabupaten Bangka Tengah tersebar di tiap kecamatan. Jumlah bank umum pemerintah yang paling banyak berada di Kecamatan Koba. Dalam kurun waktu tahun 2017 sd. 2021 jumlah bank umum pemerintah lebih banyak dari bank umum swasta. Jumlah bank umum pemerintah dari tahun 2017 sd. 2021 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 11 bank terdiri dari Bank Rakyat Indonesia KCP Koba, Bank Rakyat Indonesia Unit Soekarno Hatta, Bank Rakyat Indonesia Unit Koba, Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Teras Namang, Bank Negara Indonesia KCP Koba, Bank Mandiri KCP Koba, Bank Sumsel Babel Cabang Koba, Bank Sumsel Babel Kas PTSP Koba, Bank Sumsel Babel Kas Namang, Bank Sumsel Babel Kas Lubuk Besar dan Bank Sumsel Babel Kas Sungaiselan.

Jumlah bank umum swasta dari tahun 2017 sd. 2021 sebanyak 9 bank terdiri dari bank Bank Central Asia Kantor Kas Koba, Bank Central Asia Unit Pangkalpinang, Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Lestari Koba, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Koba, Bank Syariah Kas Mesu, Bank Artha Graha Cabang Pangkalpinang, Bank Sinarmas Pangkalpinang, Bank Muamalat KCP Pangkalpinang-Koba dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kas Simpangkatis.

2.1.4.2.11. Jenis, Kelas Dan Jumlah Restoran

Berdasarkan data kecamatan dalam angka yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten bangka Tengah, pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah terdapat

restoran sebanyak 77 restoran. Lokasi restoran tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Di kecamatan Pangkalanbaru terdapat 12 buah restoran, di kecamatan Koba terdapat terdapat 25 buah restoran, di kecamatan Namang terdapat terdapat 8 buah restoran dan di kecamatan Simpangkatis terdapat terdapat 7 buah restoran, di Kecamatan Sungaiselan terdapat 9 buah restoran dan kecamatan Lubuk Besar 16 buah restoran. Jika dilihat dari data jumlah rumah makan/restoran/warung makan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah restoran di Kabupaten Bangka Tengah adalah daya beli masyarakat yang tinggi, kunjungan wisatawan yang meningkat di suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2.1.4.2.12. Jenis, Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 menunjukkan jumlah yang meningkat walaupun tidak besar. Pada tahun 2021, berdasarkan data BPS sebanyak 1 hotel bintang empat yaitu Novotel Bangka Hotel dan Convention Centre, 3 hotel bintang tiga yaitu Soll Marina Hotel and Conference Center – Bangka, Hotel Santika Bangka dan Hotel Grand Vella, 8 penginapan terdiri dari Hotel Osela, Mess Pemda (wisma), Penginapan Hi3, Pondok Wisata Pulau Semujur, Pondok Wisata Pulau Nangka, Penginapan Tirto Nirmolo, Pondok Wisata Hutan Pelawan, Purnama Homestay (Guest House/Wisma).

2.1.4.2.13. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum). Air minum aman dan berkelanjutan adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan), yaitu lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah, jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air, memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau) serta memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pencapaian target menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pada tahun 2030, diharapkan dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Selain itu secara signifikan juga perlu dilakukan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

Indikator dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memantau persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum aman. Kebutuhan pokok air minum sehari – hari sesuai definisi pada PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Sedangkan kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Indikator ini digunakan dalam penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan hasil pengolahan data dijadikan sebagai alat monitoring serta pemantauan kinerja capaian target. Indikator dan pengolahan data ini seharusnya juga digunakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD, sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD.

Beberapa Tabel berikut ini menggambarkan capaian akses air minum berdasarkan karakteristiknya.

Tabel II.147 Akses Air Minum berdasarkan Karakteristik

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Akses Air Minum Layak (%)	75.76	77.76	81.43	82,22	85,27
2.	Akses Air Minum Aman (%)	N/A	26.78	26.71	26.71*	26,71*
3.	Sumber Air Minum Terlindungi (%)	79.21	79.53	86.35	86.35*	86,35*
4.	Lokasi Sumber Air Minum di Rumah/ Kawasan dalam Pagar Rumah (%)	51.84	31.15	29.72	29.72*	
5.	Kekurangan Air Minum (tidak mengalami kekurangan air dalam 24 jam terakhir) (%)	N/A	99.65	98.12	98.12*	

Sumber: Susenas, 2022

Tabel II.70 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Bersih

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase rumah tangga (RT) yang berakses air bersih (%)	74,2	75,76	82,08	82,22	84,42

Sumber: Susenas, 2022

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkata. Ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 64,78 %, kemudian pada tahun 2021 pencapaiannya sudah sampai pada angka 84,42 %.

2.1.4.2.14. Rasio Ketersediaan Listrik

Berdasarkan data Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa daya terpasang di Bangka Tengah yang didistribusikan oleh PT PLN (Persero) cabang Koba adalah sebesar 18.118 kW dengan total produksi listrik sebesar 75.921.987,41 kWh dan listrik yang terjual sebesar 69.390.055 kWh. Namun demikian, data daya terpasang ini tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan besaran rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Bangka Tengah disebabkan suplai listrik ke Kabupaten Bangka Tengah tidak hanya berasal dari PT PLN (Persero) cabang Koba saja, namun juga berasal dari pembangkit lain di luar Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia menargetkan konsumsi listrik sebesar 2.500 kWh perkapita per tahun. Sehingga, jika kita mengacu pada nilai target tersebut, maka kebutuhan listrik di Bangka Tengah dapat dikatakan mencapai 53,30 MW di tahun 2019 dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 sebanyak 186.783 jiwa. Meskipun begitu, kondisi faktual saat ini konsumsi listrik di Kabupaten Bangka Tengah tidak sebesar angka tersebut. dimana Konsumsi listrik di Provinsi Bangka Belitung sendiri berdasarkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) berada di kisaran angka 652,04 kWh perkapita.

2.1.4.2.15. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah terhadap listrik sangat tinggi. Listrik sudah menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk berbagai hal. Kebutuhan terhadap listrik meningkat terutama sejak kehadiran gadget dan peralatan rumah tangga lain sebagai salah satu penemuan penting dalam teknologi masa kini. Dalam hal ini penyediaan listrik dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrasi (RE) per bulan Juni 2019 sebesar 98,81. Rasio elektrasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dan seluruh rumah tangga, artinya 98,81 persen rumah tangga di Indonesia menggantungkan energi listriknya pada PLN, sehingga apabila PLN bermasalah dalam menyalurkan energi listriknya maka dampaknya akan sangat besar.

Saat ini penggunaan listrik di segmen rumah tangga bukan hanya untuk penerangan, namun juga untuk menghidupkan perangkat elektronik lainnya. Mulai dari televisi, AC, *handphone*, *rice cooker*, kompor listrik, internet, pompa air dan masih banyak peralatan lainnya yang menggunakan listrik sebagai sumber penggeraknya.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan, dengan asumsi bahwa semakin besar nilai ini maka cenderung semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga/masyarakat. Tabel II.149 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber utama penerangan menurut karakteristik jenis kelamin kelompok rumah tangga, kelompok pengeluaran, dan pendidikan tertinggi kelompok rumah tangga.

Tabel II.71 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik sebagai Sumber Utama Penerangan menurut Karakteristik

No.	Karakteristik	Sumber Utama Penerangan		Jumlah
		Listrik PLN	Listrik Non PLN	
1.	Jenis Kelamin KRT			
	Laki – laki	99,61	0,39	100,00
	Perempuan	100,00	0,00	100,00
2.	Kelompok Pengeluaran			
	40 persen terbawah	99,47	0,53	100,00
	40 persen tengah	99,59	0,41	100,00
	20 persen teratas	100,00	0,00	100,00
3.	Pendidikan Tertinggi KRT			
	SD ke bawah	99,45	0,55	100,00
	SMP ke atas	100,00	0,00	100,00
4.	Bangka Tengah	99,65	0,35	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2018

Pengadaan listrik oleh PLN berdasarkan jumlah desa/kelurahan dan pelanggan rumah tangga dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel II.150.

Tabel II.72 Pengadaan Listrik oleh PLN berdasarkan Jumlah Desa/kelurahan dan Pelanggan Rumah Tangga

No.	Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan yang dialiri listrik	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga
1.	2017	63	21.526
2.	2018	63	25.979
3.	2019	63	27.399
4.	2020	63	28.623
5.	2021	63	29.993

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Tabel II.150 menunjukkan peningkatan pengadaan listrik oleh PLN pada pelanggan rumah tangga dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 peningkatan pelanggan rumah tangga telah mencapai 29.993. Jumlah pelanggan rumah tangga dari tahun 2017 – 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Dari tahun 2017 jumlah desa/kelurahan yang dialiri listrik sudah seluruh desa sebanyak 63 desa/kelurahan.

2.1.4.2.16. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Pendataan penduduk terhadap penggunaan telepon seluler (*handphone*) perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur indikator akses dan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi rumah tangga dan individu yakni proporsi penduduk yang menggunakan telepon seluler sekaligus dapat menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile*) *fixed wireless access* dan seluler.

Persentase penduduk yang menggunakan Handphone digambarkan dalam beberapa Tabel persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir berikut ini:

**Tabel II.151 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas
menurut Jenis Kelamin dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan
Terakhir Tahun 2021**

No.	Jenis Kelamin	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Mengakses Internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
1	Laki – laki	86.17 %	60.90 %
2	Perempuan	78.25 %	52.84 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021 di atas, menjelaskan bahwa persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah jenis kelamin laki-laki lebih banyak menggunakan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk Facebook Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dan lainnya) dibandingkan jenis kelamin perempuan.

**Tabel II.152 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas
menurut Pendidikan Tertinggi dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga
Bulan Terakhir Tahun 2021**

No.	Pendidikan Tertinggi	Menggunakan Telepon Seluler (HP)	Mengakses Internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
1	\leq SD	82.88%	54.53%
2	\geq SMP	91.09%	73.30%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021 di atas, menjelaskan bahwa persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah untuk pendidikan tingkat SMP ke atas penggunaan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk *facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp*, dan lainnya) lebih besar dibandingkan pendidikan tingkat SD ke bawah.

Tabel II.73 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Kuintil Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir Tahun 2021

No.	Kuintil Pengeluaran	Menggunakan Telepon	Mengakses Internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
		Seluler (HP)	
1.	40 Persen Terbawah	79.73%	54.49%
2.	40 Persen Tengah	88.96%	62.73%
3.	20 Persen Teratas	89.89%	66.33%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021 di atas, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut kuintil pengeluaran dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah menjelaskan bahwa kuintil pengeluaran 40 persen terbawah ke kuintil pengeluaran 20 persen teratas mengalami peningkatan yang menggunakan telepon seluler dan yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dan lainnya).

Tabel II.154 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	74,2	75,76	82,08	82,08	85,81

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah 2021

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin berkembang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah memperlihatkan bahwa perkembangan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP/Telepon semakin meningkat selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2020. Tabel II.154 menunjukkan bahwa penggunaan HP/Telepon pada tahun 2017 sebesar 74.2 persen meningkat menjadi 85,81 persen pada tahun 2021.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan maupun kekerasan dan kejahatan susila masih sering terjadi. Banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi membuat resah masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat dapat menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Tabel II.155 di bawah ini menunjukkan data angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017-2021.

Tabel II.155 Angka Kriminalitas

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tindak Kriminal	108	107	106	140	129
Jumlah Tindak Kriminal yang diselesaikan	67	83	78	99	83
Presentase penyelesaian Tindak Kriminal	62,04	77,57	73,58	70,71	64,34

Sumber : POLRES Bangka Tengah, 2022

Jumlah tindak kriminal pada tahun 2021 sebanyak 129 kasus menurun dibandingkan Tahun 2020, jumlah tindak kriminal yang dapat diselesaikan sebanyak 83 kasus atau sebesar 64,34 persen. Dalam rangka penurunan sejumlah kasus tindak pidana dan peningkatan persentase penyelesaian tindak kriminal tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama penanganan kasus narkoba yang mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai korban. Guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya baik berupa upaya preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas.

2.1.4.3.2. Jumlah Demonstrasi**Tabel II.74 Jumlah Demonstrasi**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Demonstrasi	0	3	0	3	2
Jumlah Demonstrasi yang diselesaikan	0	3	0	3	2
Presentase penyelesaian Tindak Kriminal	100	100	100	100	100

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka, 2022

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 5(lima) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi demonstrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan data dan informasi BPS Kabupaten Bangka Tengah, bahwa data jumlah kejadian demonstrasi pada tahun 2021 terdapat 2 kejadian yaitu di Kecamatan Sungaiselan. Tabel II.156 menunjukkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa selama kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung menurun. Pada tahun 2016 terdapat 8 kejadian, tahun 2017 dan 2019 tidak ada, tahun 2018 terdapat 3 kejadian, dan tahun 2020 terdapat 3 kejadian dan seluruhnya dapat diselesaikan.

2.1.4.3.3. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui *Online Single Submission (OSS)* diantaranya dilakukan melalui sosialisasi OSS kepada pelaku usaha dan pelayanan perizinan ke kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

2.1.4.3.4. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Tabel II.75 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi	11 Macam Pajak dan 1 Retribusi

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan Tabel II.157 jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dari tahun 2017 – 2021 Kabupaten Bangka Tengah memiliki sebanyak 11 macam pajak dan 1 retribusi yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta 1 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum.

2.1.4.3.5. Persentase Desa Berstatus Mandiri/Maju/Berkembang

Pesentase desa berstatus mandiri, maju dan berkembang menjadi indikator untuk....(lanjutkan kalimat ini). Tabel II.158 menunjukkan jumlah desa maju dan desa berkembang yang ada di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017-2021.

Tabel II.158 Jumlah Desa Maju dan Desa Berkembang

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa maju	n/a	20	20	23	25
Jumlah desa berkembang	n/a	36	36	33	31
Persentase desa maju	n/a	26,8	35,7	41,1	44,6

Sumber: Dinsospmd, 2021

Berdasarkan Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2020 telah memiliki

desa dengan status 23 desa maju dan 33 desa berkembang dan di tahun 2021 jumlah desa maju meningkat menjadi 23 desa dan desa berkembang 31 desa.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil kreatif disiplin profesional dan mampu memanfaatkan mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1/S2/S3. Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam Tabel II.159 sebagai berikut:

Tabel II.159 Rasio lulusan S1/S2/S3

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lulusan S1	3706	4192	4427	4.581	4.903
2.	Jumlah lulusan S2	117	134	149	161	171
3.	Jumlah lulusan S3	7	8	7	6	7
	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3830	4334	4583	4748	5081
4.	Jumlah penduduk	177.335	182.286	186.783	194.432	198.022
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3	216	238	245	244	257

Sumber: Data diolah, 2022 data penduduk dukcapil

Dilihat dari data Tabel II.159 di atas, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan. Pada tahun 2021, setiap 10000 jiwa penduduk Kabupaten Bangka Tengah hanya ada 257 orang yang lulusan S1/S2/S3.

Rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari angka lulusan S1/S2/S3 karena masih banyaknya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi.

2.1.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja meskipun tidak terlalu akurat rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi jika dilihat dari kategori angka ketergantungan sebagai berikut :

Angka Beban Tanggungan Tinggi: ≥ 70

Angka Beban Tanggungan Sedang: $51 - 69$

Angka Beban Tanggungan Rendah: ≤ 50

Hasil analisis rasio ketergantungan disajikan dalam Tabel II.160 sebagai berikut:

Tabel II.76 Rasio Ketergantungan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	51.424	53.140	53.140	52.617	52.701
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.915	7.595	7.595	7.643	8.188

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	58.339	60.735	60.735	60.260	60.889
	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	123.947	126.048	126.048	138.686	140.972
4.	Rasio ketergantungan (%)	47,07	48,18	48,18	43,45	43,19

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2022

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang.

Pada tahun 2021 sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Tengah adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 140.972 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 60.889 jiwa, sehingga angka rasio ketergantungan adalah 43,19%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Bangka Tengah menanggung 43 orang yang non produktif. Selama periode 2017-2021 angka beban ketergantungan fluktuatif cenderung mengalami penurunan.

2.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung maupun yang telah dilaksanakan. Jenis evaluasi *ex-post* atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (*output/outcome/impact*) mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

2.2.1. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 – 2021, untuk mewujudkan visi “ Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Amanah, Bersih, Berwibawa dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan”, Kabupaten Bangka Tengah mempunyai 5 (lima) misi pembangunan. Misi-misi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas dan 14 (empat belas) sasaran seperti tercantum dalam Tabel II.161 di bawah ini.

**Tabel II.161 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2021
Visi**

Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Amanah, Bersih, Berwibawa dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ	Peningkatan kualitas pendidikan	Kualitas Angka rata-rata Sekolah	Lama	6,71 tahun	6,79 tahun	6,80 tahun	7,13 tahun	7,19 tahun
		Meningkatnya kesehatan masyarakat	derajat Angka Harapan Hidup						7,20 tahun
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita (ADHB)	(dalam rupiah)	40.434.243	42.269.800	42.682.300	43.668.600	42.241.200
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90,61	90,83	91,04	91,05	91,49
		Peningkatan taraf hidup dan pemerataan	Laju pertumbuhan ekonomi		3,05	3,46	3,41	1,25	-2,87
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Merata Berkelanjutan	Indeks Gini		0,279	0,274	0,289	0,264	0,324
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Merata Berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah serta	Indeks Ketimpangan Williamson		0,392	0,396	0,412	0,409	0,412*

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	penguasaan dan pengembangan IPTEK			Nilai Tukar Petani	97,25	98,00	91,16	87,73	107,89	111,87
				Nilai Tukar Nelayan	101,37	104	105,31	116	108	116,04
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,14	102,5	102,5	106	106,8	105,57
				Pola Pangan Harapan	87,1	88	89,5	90	91	78,50
				PDRB Sub Sektor Pariwisata (dalam juta) (ADHB)	231,17	253,68	281,17	325,75	337,588	372,588
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil berkualitas dan merata	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana yang	Meningkatnya dan jalan yang	Kualitas jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam	61,98	65,72	70,53	73,70	74,42	71,90
				Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai	73,87%	74,20%	75,76%	82,08%	82,22%	85,27%
				Percentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	79,85%	86,18%	90,80%	92,33%	93,52%	95,45 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Meningkatnya keberlanjutan ketersediaan air baku	Persentase tersedianya air dan baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	29,35	86,14	90,17	93,70	94,78	95,35
			Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan penanfaatan ruang dengan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian perencanaan, pemanfaatan penanfaatan ruang dengan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	n/a	80,17%	80,45%	80,27%	80,35%	80,95%
4.	Mewujudkan Lingkungan Aman, Asri, Lestari berkelanjutan	Terwujudnya yang pengelolaan lingkungan dan lingkungan hidup serta yang berkelaanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang Hidup berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan	68,64	71,14	69,22	69,57	77,17	76,13
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (governance) profesional, berkarakteristik tinggi	Terciptanya brokrasi (good governance) yang yang terintegrasi, berkinerja Daerah terhadap Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,35	65,78	64,81	64,87	66,38	68,86
		serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	9,21	12,57	8,53	9,50	9,40	9,30

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Desa Maju	n/a	n/a	15	20	23	23	23	25
		Jumlah Desa Berkembang	n/a	n/a	41	36	33	33	33	31
	Terwujudnya inovasi dan pelayanan publik	Sistem informasi Manajemen Pemda yang dikembangkan	12 Sistem	12 Sistem	14 Sistem	15 Sistem	25 Sistem	25 Sistem	35 Sistem	35 Sistem
		Rata-rata survei kepuasan masyarakat	78,26	78,5	79,64	82,59	83,62	83,53		

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2022

**Tabel II.162 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelegaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bangka Tengah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3,05%	3,46%	3,41%	1,25%	-2,87%	4,76%
1.1	Pertumbuhan ekonomi	1,00	0,85	1,60	1,99	1,05	0,62
1.2	Laju inflasi						
1.3	PDRB per kapita (ADHB)	40.434.243	42.269.800	42.682.300	44.809.900	42.545.500	46.234.062
1.4	PDRB per kapita (ADHK)	29.411.239	29.801.302	30.207.000	30.772.100	28.831.500	29.658.500
1.5	Indeks Gini	0,279	0,274	0,289	0,264	0,324	0,28
1.8	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	68,99	69,52	70,33	70,45	70,89
	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.1	Jumlah penduduk miskin (ribu org)	10,36	11,39	11,12	9,8	9,64	10,03
1.2	Persentase penduduk miskin (%)	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13
1.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,59	0,57	0,42	0,52	0,72	0,63
1.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,10	0,10	0,06	0,10	0,14	0,11
1.5	Garis Kemiskinan (Rp/Bln/Perkapita)	586.445	653.308	680.907	693.842	721.331	735.479
1.6	Angka harapan lama sekolah	11,73 tahun	11,74 tahun	11,75 tahun	11,76 tahun	11,81 tahun	12,10 tahun
1.7	Angka rata-rata lama sekolah	6,71 tahun	6,79 tahun	6,80 tahun	7,13 tahun	7,19 tahun	7,20 tahun
1.8	Angka usia harapan hidup	70,38 tahun	70,49 tahun	70,78 tahun	71,16 tahun	71,36 tahun	71,52 tahun
1.9	Persentase balita gizi buruk	0,11	0,06	0,08	0,05	0,02	0,06

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.10	Prevalensi stunting	n/a	6,94	5,47	5,11	3,31
	Prevalensi Stunting (berdasarkan data SSGI)					20
1.11	Cakupan Desa Siaga Aktif	55,56	55,56	31,74	28,57	3,17
1.12	Angka partisipasi angkatan kerja	n/a	93,626	98,297	97,778	100,904
1.13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	n/a	69,26	70,99	69,65	70,85
1.14	Tingkat pengangguran terbuka	n/a	3,38	3,93	4,39	4,95
1.15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,61	90,83	91,04	91,05	91,49
1.16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,2	55,76	56,39	57,31	57,31*
1.17	Rasio penduduk yang bekerja	n/a	96,62	96,07	95,60	94,41
1.18	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	n/a	-5,75*	-0,93	2,26	-4,70
1.19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	n/a	66,93	68,19	66,59	66,89
1.20	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,26	78,5	79,64	82,59	83,62
1.21	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,21	12,57	8,53	9,50	9,40
1.22	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
1.23	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,1	88	89,5	90	91
1.24	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	7.469,01	7.972,21	8.213,32	8.566,90	8.433,25
1.25	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (milyar rupiah)	5.432,84	5.620,62	5.812,70	5.883,10	5.714,89
1.26	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	15,69	15,13	14,28	14,56	17,40
1.27	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	18,33	17,28	15,29	14,48	13,47
1.28	Kontribusi sektor industri pengolahan	8,74	8,96	8,98	5,63	6,38
1.29	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
1.30	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	15,34	16,14	16,95	17,52	17,17
						16,95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	ASPEK PELAYANAN UMUM	Realisasi Capaian Setiap Tahun			
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Fokus Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	90,02	106,18	92,22	92,31	83,16
1.2	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.530	3.164	3.652	6.603	5.974
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	37,22	36,87	36,04	35,79	37,19
1.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	11,29	11,45	11,35	11,35	11,24
1.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/MA/SMK	14,62	14,37	14,55	14,54	14,16
1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115,07	109,13	116,28	102,50	99,93
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	101,06	91,26	101,24	101,53	93,90
1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	72,32	68,71	72,26	77,8	88,39*
1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,85	92,90	93,20	85,33	84,57
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	61,30	64,99	65,56	69,63	59,56
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	46,66	47,28	52,71	57,76	64,26
1.12	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1054,00	929,00	932,00	852,00	842,00
1.13	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	545,00	648,00	654,00	696,00	572,00
1.14	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK	589,00			643,00	559
1.15	Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI	0,37	0,33	0,36	0,29	0,22
1.16	Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTs	1,18	0,60	0,59	0,99	0,43
1.17	Angka Putus Sekolah (APIS) SMA/MA/SMK	1,87	1,75	1,61	2,39	1,84
1.18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,27	99,72	99,71	99,67	99,58
1.19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,38	99,40	99,67	99,58	99,64
1.20	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	97,08	109,97	114,80	109,86	101,24
1.21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,58	94,53	96,25	95,75	96,57
1.22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	96,74	86,02	78,76	82,13	84,62
1.23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	84,51	85,50	86,69	87,93	88,28
1.24	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	93,33	95,16	96,36	97,13	89,77
1.25	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	87,5	59,68	59,22	58,49	48,85
1.26	Rasio Ketersediaaan sekolah dan pendukuk usia sekolah SD/MI	48	48	47	43	41
1.27	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SD/MI	30	28	30	29	26
1.28	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMP/MTs	564	487	504	544	520
1.29	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMP/MTs	622	472	554	456	594

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.30	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMA/MA/SMK	820	527	555	557	542
1.31	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SD/MI	56	48	50	54	52
1.32	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMP/MTS	62	47	55	46	59
1.33	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMA/MA/SMK	82	52,7	55,5	55,7	54,2
1.34	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	85,93	87,34	88,19	82,21	87,87
1.35	Persentase guru yang bersertifikat SD/MI	57,07	62,76	62,32	61,21	55,46
1.36	Persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	22,39	36,43	33,21	35,66	33,67
1.37	Persentase guru yang bersertifikat SMA/MA/SMK	25,17	69,35	65,04	66,04	65,45
2	Kesehatan					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,18	4,99	6,04	2,24	6,6
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	-5,18	-3,99	-5,04	-1,24	-5,6
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,455	6,011	7,761	3,367	8,041
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,77	2,05	3,45	0,84	4
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	56,16	0	172,56	168,35	114,84
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	8,8	8,93	9,35	9,88	10,14
2.7	Rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu per 1000 penduduk	0,15	0,15	0,15	0,15	0,09
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011	0,011	0,01	0,01	0,015
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,38	2,55	5,42	3	2,86
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	86,42	82,5	96,6	73,8
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,02	92,9	97,2	99	96,7
2.12	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	96,83	98,41	100	96,83	53,96
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	87,2	56,87	31	34,9	14,55

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,0009	0,0011	0,0011	0,0013	0,0013
2.16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4	3	2	0	13
2.17	Cakupan penemuan dan pemananganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2.18	Jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	101	85	104	142	207
2.19	Cakupan penderita diare yang ditangani	8,6	0	15,91	2,68	0,16
2.20	Angka kejadian Malaria	15	0	29	5	0
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0081	0,0058	0,0062	0,0046	0,0060
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	74,2	38,4	74,5	124,8	86,5
2.24	Cakupan kunjungan bayi	96,45%	95%	93,34%	106,40%	98,86%
2.25	Cakupan puskesmas	13,33%	150%	150%	150%	150%
2.26	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,09%	96,51%	98,30%	94,55%	91,70%
2.27	Cakupan pelayanan nifas	88,36%	99,80%	117,70%	100,80%	90,67%
2.28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	82%	85,70%	71,7%	96,40%	60,06%
2.29	Cakupan pelayanan anak balita	n/a	n/a	71,7%	96,45%	62,1%
2.30	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	99,20%	99,80%	68,67%
2.31	Cakupan peningkatan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.33	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.34	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	93,34%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	52,64	56,71	61,38	65,12	65,53
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km/jiwa)	0,0034	0,0031	0,0031	0,0031	0,0031
3.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (%)	61,98	65,72	70,54	73,7	74,42
3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	10,14	10,69	10,95	11,27	11,31
3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	0	0	0	0	n/a
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	79,85	86,18	90,8	92,33	93,52
3.8	Persentase berkurangnya luasan rawan banjir (%)	42,05	28,34	18,94	9,09	7,14
3.9	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	23,33	23,33	23,33	21,67	21,67
3.10	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan airan air tidak tersumbat (%)	66,36	69,73	72,91	75,81	76,35
3.11	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	67,24	70,78	77,86	84,93	88,47
3.12	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	0	0	0	0	0
3.13	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	60,91	65,99	67,01	70,05	71,07
3.14	Rasio Jaringan Irigasi (km/Ha)	62,61	67,8	68,88	71,22	72,19
3.15	Persentase penduduk berakses air minum (%)	64,78	74,2	76,55	82,08	82,22
3.16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	64,78	74,2	76,55	82,08	82,22
3.17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,253	0,189	0,156	0,126	0,118
3.18	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	4,48	4,48	18,41	18,41	18,41
3.19	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	2,15	3,54	4,25	5,51	6,66
3.20	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
3.21	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	0,82	0,83	0,83	0,86	0,86
3.22	Ketatahan terhadap RTRW	78,75	80,17	80,46	80,27	80,35
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					80,91
4.1	Rasio rumah layak huni (%)	n/a	26,12	26,14	26,16	26,18
4.2	Rasio permukiman layak huni (%)	n/a	99,97	99,71	99,76	99,85
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	n/a	97,16	97,22	97,28	97,39
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.5	Persentase permukiman yang tertata (%)	n/a	n/a	n/a	53,9	53,9
4.6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	n/a	4,19	4,13	3,39	2,13
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	n/a	0,42	0,41	0,28	0,06
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	n/a	n/a	n/a	12,62	1,71
4.9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di didukung dengan PSU (%)	n/a	n/a	n/a	17,68	17,68
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	96,39	99,12	98,15	99,13	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n/a	27,89	27,88	23,7	90,01
5.4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	79,07	53,52	43,52	80
5.5	Persentase Pengakuan PERDA	75,76	90,16	84,21	90,9	96,12
6	Sosial					
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	81,36	75,23	78,86	95,84	97,15
						90,04

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
6.3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
6.4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mene rima jaminan sosial (%)	34,2	27	32,8	34,52	42,4
7	Fokus Pelayanan Non Dasar					
7.1	Ketenagakerjaan					
7.1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	11,58	46,32	57,10	33,33	34,73
7.2	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	79.971	90.465	94.437	93.483	95.267
7.3	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,42	4,91	3,24	3,47	4,44
8.2	Proporsi kursi yang diudukti perempuan di DPR	12%	12%	12%	12%	12%
8.3	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	5	5	2	6	8
8.4	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	12	12	22	24	35
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	n/a	47,41	56,75	51,07	51,58
8.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
9	Ketahanan Pangan					
9.1	Ketersediaan panggan utama	101,337	111,027	114,737	115,021	113,181
9.2	Ketersediaan protein perkapita	2.300	2.310	2.325	2.350,01	2.375,03
						2.364,15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
9.3	Ketersediaan energi perkapita	75,62	75,66	76,11	76,50	77,00
10	Pertanahan					75,96
10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	n/a	2,65%	5,30%	6,30%	6,30%*
11	Lingkungan Hidup					
11.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	ada	ada
11.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	75	80	78,33	107,26	83,478
11.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,34	91,02	84,65	89,34	90,98
11.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	48,35	48,35	50,81	40,79	40,79
11.5	Timbulan sampah yang ditangani	11.385,3 m3	12.887,5 m3	11.970 m3	13.584,5 m3	13.297,60 m3
11.6	Persentase Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill (%)	88,95	100	95,46	98,2	99,5
11.7	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) m3 / 1.000 Jiwa	9,60	9,74	10,32	10,12	9,73
12	Administrasi Keependudukan dan Pencatatan Sipil					11,99
12.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,95	0,95	0,98	0,99	0,99
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,96	0,99	0,99	0,98	0,99
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,33	0,43	0,63	0,59	0,62
12.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
12.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	94,54	95,38	97,98	99,26	99,84
12.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	40,16	43,41	54,6	55,93	59,80
12.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran					61,45
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
13.1	Jumlah desa maju	n/a	n/a	15	20	23
13.2	Jumlah desa berkembang	n/a	n/a	41	36	33
13.3	Persentase Lembing Karang Taruna aktif	100%	100%	0	100%	100%
13.4	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
14.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,08	2,1	2,03	1,96	1,95
14.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	2,3	2,52	2,41	2,41
14.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
14.4	Ratio Akseptor KB	01:02	01:02	01:02	01:02	01:02
14.5	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,68	83,25	83,88	81,56	74,96
15	Perhubungan					75,46
15.1	Jumlah uji kir angkutan umum	64	110	95	88	88*
15.2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	5	5	5*
15.3	Persentase layanan angkutan darat	3,06	3,38	3,38	3,38*	3,38*
15.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	66,05	62,52	57,43	58,68	58,68*
15.5	Pemasangan Rambu-rambu	40	0	50	50	50*
15.6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00978	0,00424	0,00182	0,00124	0,00124*
16	Komunikasi dan Informatika					0,00124*
16.1	Jumlah BTS (Base Transceiver Station)	91	97	100	107	119
16.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	73,87	74,2	75,76	82,08	85,81
16.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	17,29	23,38	35,13	41,12	41,12
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					60,22
17.1	Persentase koperasi aktif	49,06	57,25	58,16	59,44	61,22
17.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,41	95,18	95,19	95,34	95,31
18	Penanaman Modal					96,00
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	82	94	102	214	271
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	286,5 milyar	315,5 milyar	393,6 milyar	904,3 milyar	1.344,1 milyar
						745,87 milyar

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
18.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	77,5	10,29	24,75	129,74	48,63
19	Kepemudaan dan Olahraga					69,59
19.1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	90	87	87	87	87
19.2	Persentase wirausaha muda	0,55%	0,58%	0,32%	0,45%	16,40%
19.3	Persentase pemuda berprestasi	0,19%	0,69%	0,16%	0,20%	0,14%
19.4	Jumlah prestasi olahraga	88	77	216	83	14
19.5	Jumlah Sarana Olahraga	363	367	373	376	380
19.6	Jumlah Klub Olahraga	321	322	363	369	311
20	Statistik					139
20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.4	Persentase integrasi data pembangunan Daerah lintas sektor yang berkualitas	n/a	39,45	62,52	81,5	81,67
21	Persandian					39,49
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	3,03%	3,13%	3,13%	3,13%	3,12%
22	Kebudayaan					
22.1	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	25	27	27	27	27
22.2	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	17	18	22	21	21
22.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8
23	Perpustakaan					
23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	237.701	240.459	224.001	294.166	108.132
23.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.200	17.060	17.060	24.944	52.018
23.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,143	0,141	0,187	0,182	0,206
24	Kearisan					0,089
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	87,88%	88,50%	95,33%	100%	100%
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
	Pariwisata					
1.1	Kunjungan wisata	120,435	85,778	96,457	97,451	129,933
1.2	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	14,74	10,43	15,24	14,26	6,78
1.3	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)	3,10	3,18	3,41	3,79	4,00
	Pertanian					
2.1	Produktivitas Sektor Pertanian (Ton/Ha/Th)					
2.1.1	Jagung	5,19	3,23	3,22	5,32	5,44
2.1.2	Kacang Tanah	2,5	1,9	2,4	2,68	3,91
2.1.3	Ubi Kayu	14,8	11,23	14	24,93	24,9
2.1.4	Ubi Jalar	6,51	11,55	10,84	14,78	14,91
2.1.5	Bawang Merah	4,04	5,36	7,5	8,05	8,5
2.1.6	Cabai Besar	4,97	5,12	6,04	7,1	9
2.1.7	Petrai	5,43	3,34	3,68	7,94	9,58
2.1.8	Cabai Rawit	3,41	3,81	4,01	4,5	5,64
2.1.9	Padi	2,15	2,2	2,33	2,84	3,5
2.1.10	Palawija	10,5	7,55	12,06	17,09	11,93
2.1.11	Sayuran dan Buah Semusim	4,62	4,91	5,89	7,91	7,69
2.1.12	Buah-Buahan Tahunan	6,32	8,6	9,42	9,01	5,47
	Produktivitas Sektor Perkebunan (Ton/Ha/Th)					
2.2						
2.2.1	Kelapa Sawit	3,29	3,42	3,51	3,61	3,62
2.2.2	Karet	1,37	1,35	1,46	1,48	1,48
2.2.3	Kelapa	0,62	0,52	0,72	0,84	0,87
2.2.3	Kopi	0,59	0,62	0,66	0,67	0,79
2.2.5	Lada	1,42	1,42	1,47	1,48	1,48
2.2.6	Kakao	0,75	0,71	0,42	0,55	0,53
2.3	Cakupan bina kelompok petani	57,36%	89,16%	99,88%	112,96%	112,96%***
	Kehutanan					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
3.1	Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Perdagangan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
4.1	Nilai transaksi perdagangan pasar tradisional	Rp115.575,32 Juta	Rp118.285,24 Juta	Rp119.838,36 Juta	Rp121.265,52 Juta	Rp100.365,91 Juta
4.2	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (yo-y)	0,70%	2,85%	1,31%	1,19%	-17,23%
	Perindustrian					4,67%
5.1	Cakupan bina Industri Kecil Menengah (IKM)	3.475	3.770	4.048	4.378	4.665
5.2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah(%)	9,9	8,49	7,37	8,15	6,85
6	Kelautan dan Perikanan					
6.1	Produksi perikanan tangkap	23.606,50	23.969,66	25.068,94	27.327,56	27.956,09
6.2	Produksi perikanan budidaya	1.428,00	1.456,56	1.467,31	1.526,43	1.537,70
6.3	Konsumsi ikan	39,02	39,48	49,85	55,18	54,95
6.4	Cakupan bina kelompok nelayan	30	34	33	25	46
6.5	Nilai tukar nelayan	101,37	104	105,31	116	108
6.6	Nilai tukar pembudidaya ikan	100,14	102,5	102,5	106	106,8
	Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan					105,57
1	Sekretariat Daerah	B	B	BB	BB	BB
1.2	Nilai SAKIP					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	60,35	65,78	64,81	64,87	66,38
2	Perencanaan					68,86
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPIMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	98,84%	94,35%	93,82%	86,89%
2.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	97,69%	95,88%	98,80%	98,20%	98,11%
2.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	57,65	64,47	64,47	72,06	72,06*
3	Keuangan					80,95
3.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
3.2	Persentase SILPA	7,56	0,74	0,90	2,90	5,79
3.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	25,70%	26,46%	30,09%	26,50%	25,95%
3.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	17,46%	17,65%	11,20%	18,98%	28,37%
3.5	Perbandingan antara belanja pegawai dengan total belanja APBD (Tahun 2016 s.d 2020 perbandingan BTL dan BL)	55,48%	49,70%	51,05%	50,30%	44,89%
3.6	Penetapan APBD	29 Des 2015	21 Des 2016	28 Des 2017	20 Des 2018	23 Des 2019
4	Kepengawahan					29 Des 2020
4.1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27	28	28	30	30
4.2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	796	834	839	1095	1076
4.3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	2263	1880	1782	1724	1684
5	Pendidikan dan Pelatihan					1211
5.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	81 JP	70 JP	72 JP	74 JP	61 JP
5.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12,96%	27,28%	39,80%	48,79%	51,05%
						61,25%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
5.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	33,77%	36,57%	39,70%	38,38%	36,31%
6	Penelitian dan Pengembangan					39,76%
6.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	n/a	100	100	100	100
6.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	n/a	75	75	75	80
6.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	25,8	54,8	64,5	90,3	93,5
6.4	Persentase lebijkakan inovasi yang diterapkan di daerah.	n/a	0	0	75,4	93,5
7	Inspektorat Daerah					
7.1	Persentase tindak lanjut temuan jumlah pelanggaran pegawai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.2		15	1	1	5	1
7.3	Jumlah temuan BPK					
7.4		35	21	18	21	23
7.5						5
8	Sekretariat DPRD					
8.1	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
8.2	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	100	100	100	100	100
8.3	Persentase anggaran yang disahkan	100	100	90	90	90
8.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	100	90	100	90	90
8.5	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	60	60	60	60	65
8.6	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
9	Kesatuan Bangsa dan Politik					
9.1	Persentase forum kemirraan yang aktif (%)	75	75	100	100	60
9.2	Persentase ormas yang aktif (%)	75	70	80	60	65
9.3	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	55	60	65	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.248	12.330	12.836	13.070	12.909
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (ADHB) juta rupiah	4.942.668	5.504.931	5.987.816	6.550.904	6.811.000
3	Nilai tukar petani	97,25	98	91,16	87,73	107,89
						111,87

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
4	Nilai tukar nelayan	101,37	104	105,31	116	108
5	Nilai tukar pembudidaya ikan	100,14	102,5	102,5	106	105,57
6	Persentase desa maju terhadap total desa	n/a	26,79	35,7	41,1	44,64
7	Angka kriminalitas yang tertangani	57,14	62,04	77,57	73,58	70,71
8	Rasio Lulusan S1/S2/S3	205	216	238	245	244
9	Rasio ketergantungan	45,22	47,07	48,18	48,18	43,45
						43,19

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2022

2.2.2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tabel II.163 Capaian Indikator SDG's Kabupaten Bangka Tengah

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,02	4,85	5,13
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua,	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	98	98*	81,16

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b) 1.3.1.(c) 1.3.1.(d)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	99,79 0,13 2,649	99,79* 0,19* 2,649	92,4 23,8 3190
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a) 1.4.1.(b) 1.4.1.(c) 1.4.1.(d)	Persentase perempuan pemah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhinya di fasilitas kesehatan. persentase Pelayanan persalinan oleh Nakes di Faskes Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	99* 96,8 29806	99* 53,97 29806*	73,9 15,87 -
					83,01
					82,22

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	92,33	93,52	94,17
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murnii (APM) SD/MI/sederajat.	85,33	84,57	84,57
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murnii (APM) SMP/MTs/sederajat.	69,63	59,56	59,56
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (bayi berakta kelahiran)	95,35	99,00	97,84
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,28*	97,28*	-
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi pengurangan risiko bencana daerah.Jumlah desa/kelurahan tanggap bencana yang dibina	0	0	0
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100	100	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	179	179	55
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMA/B=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	n/a	n/a	n/a
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana	n/a	n/a	n/a
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a	n/a	n/a
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	n/a
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Jumlah lembaga yang menangani penanggulangan kemiskinan	7	n/a	
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	41,87	42,38	-
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>).	237	237	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita. persentase Balita gizi kurang yang ditemukan dan mendapat pelayanan	10.41	10.41	3,11
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangang sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangang. Jumlah Desa rawan Pangang	2	2	-
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	237	237	-
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	5,47	5,11	3,31
	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.Jumlah Balita stunting yang ditemukan dan mendapat pelayanan			
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Jumlah Balita dengan BB/TB Rendah	3,24	4,11	1,69

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	n/a	4,62	3,91
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	53,49	45,22	59,25
		Kualitas konsumsi pangan yang d2ndikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai	90	91	-
		Kualitas konsumsi pangan yang d2ndikasikan oleh tingkat konsumsi ikan.	55,18	54,95	-
Target 2.3 Pada tahun 2030, mengandalkan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sana terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).			
			1,54	1,54*	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematiian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematiian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	168,35	114,84	0,18
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhinya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. persentase persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	99,03	91,51	73,91

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. persentase persalinan di fasilitas kesehatan	85,42	91,51	73,91
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematiian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematiian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematiian Balita 25 per 1000	3.2.1*	Angka Kematiian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	3,367	8,041	0
	3.2.2*	Angka Kematiian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0,84	5,73	4,67
	3.2.2.(a)	Angka Kematiian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2,24	6,6	5,75
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap	96,83	53,96	15,87
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa. persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	0,0046	0,005	0,001
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	133,10	56,7	

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
3.3.3*	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	5	0	0,005
3.3.3.(a)		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.Jumlah kecamatan yang mencapai eleminasi malaria	6	6	6
3.3.4.(a)		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B. jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	9	9	9
3.3.5*		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta). Angka pencapaian pengobatan penyakit filariasis	13	0	0
3.3.5.(a)		Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta. Jumlah kecamatan dengan eliminasi kusta	0	63	63
3.3.5.(b)		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Jumlah desa/kelurahan dengan eliminasi filariasis	0	63	63
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi		Realisasi 2021
			2019	2020	
menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	22,90	33,47	29,96
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	n/a	8,92	4,82
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0	0	0
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	9	9	9
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0,67	0	0
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	n/a	n/a	n/a
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)	14,21	0	0
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	29,806	24,181	

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	14,21	18,34	
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR).	31,55	31,55	
	3.7.2.(a)	Total fertility rate (TFR).	2,41	2,41*	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan. Jumlah Pasien yang di rujuk	10880	10880*	
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	143539	81,20	81,16
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah.	23,704	81,20	81,16
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	816/182287	4,48	5,56
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (2) matematika.	100	100	100
	4.1.1.(a)	Percentase SDMII berakreditasi minimal	96,04	87,76	87,76

Target	Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
		B.				
4.1.1.(b)		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.				
4.1.1.(d)		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.		60	76	76
4.1.1.(e)		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.		102,50	99,93	99,93
4.1.1.(g)		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		101,53	93,90	93,90
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		7,13	7,19	7,19*
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan teknologi informasi dan keterampilan teknik dan kejuruan, termasuk keterampilan pekerjaan, untuk pekerjaan, bekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).			100	100*

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SD/MI/sederajat; SMP/MTs/sederajat; SMAS/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kassar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	(1) (2) (3) 85,33	85,33*	85,33*
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) 4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,33	99,44	99,44*
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	75	75	75
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat	54,30	48,64	48,64

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	pendidik.			
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksloitasi seksual, serta berbagai jenis eksloitasi lainnya.	5.2.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	30	30*	-
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan	0,018	0,018*	-
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,0382	0,0489	-
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,003	0,003*	-
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	100	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan baksia, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0.92	0.92*	-
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	n/a	n/a	n/a
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	31.55	31.55*	-
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	34.69	34.69	2.22
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	177	37,34	40,30
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	28412	28412	-
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	8.64	8.64*	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	29806	29806*	-
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	66.59	66.59*	-
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	82.08	82.22	83,01
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	93,70	94,78	95,18
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	82.08	82.22	83,01
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	84.52	84.52*	85,61

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	92,33	93,52	94,17
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	63	63	-
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</i>	39	43	45
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	20	20*	-
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat	20	20*	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah ditingkatkan lumbur tinja yang pengelolaan kualitas perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumbur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1	n/a	n/a
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumbur tinja.Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumbur tinja dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1	n/a	n/a
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	n/a	n/a	n/a
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	n/a	83,48	89,58
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 6.4 Pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat .	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang d2nternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	n/a	n/a
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	n/a	n/a	n/a
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n/a	n/a	n/a
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	n/a	n/a	n/a
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita	8.1.1.*	Laju pertumbuhan PDB per kapita ADHB.	2,31	-4,73	-0,66
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB)	43.668.600	42.241.200	42.950.575
		PDRB per kapita (ADHK)	29.990.900	28.572.800	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB r21 per orang bekerja per tahun.	2,28%	2,28%*	-0,27
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	47,44%	47,44%*	49,44
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	44,10%	44,10%*	44,60
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	26,52	26,56	52,56
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	13,33	13,33*	-
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi bernuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	17,718,49	18,671	18,671
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4,39	5,59	4,95
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	42,42%	11,44	10,94
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	n/a	n/a	24,65

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	3,79	4,00	4,00
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	1.661	155	155
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	95.790	129.778	129.778*
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	12,670,562,538	12,670,562,538	5.778.775.675
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	846	846	846*
Target 8.10 Menperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	48.29	48.29*	0,019%*
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	119.42	119.42*	-
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	n/a	n/a	n/a
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
	9.1.1.(c)				
	9.1.2.(b)	Panjang jalur kereta api.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
	9.1.2.(c)	Jumlah dermaga penyeberangan.	7	7	7
		Jumlah pelabuhan strategis.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	5,63%	5,63%*	-
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-34,25%	-34,25%*	-
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	0,09%	7,78	7,78
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	n/a	n/a	n/a
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a	n/a
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.			-
			0,0121958	0,0121958*	-

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	n/a	79	82
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	66.59	66.59*	-
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	41.12	76	80
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,264	0,324	0,330
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,02	4,85	n/a
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	n/a	n/a	-
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	0	0	0
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri (Jumlah Desa Maju).	20	23	25
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	n/a	n/a	n/a
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 % dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	9.75	9.75*	-
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	84	84*	-
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah Rumah Layak Huni	97,28	95,85	96,02
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	11.3.1.(b) 11.3.2.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bukan kewenangan Bukan kewenangan	Bukan kewenangan Bukan kewenangan	Bukan kewenangan Bukan kewenangan
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	0	0	n/a
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	n/a	n/a	n/a
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0	0
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a	n/a	n/a
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	persentase sampah perkotaan yang tertangani. persentase sampah di TPA yang dikelola secara <i>Controlled landfill</i>	98,2	80	93

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi		Realisasi 2021
			2019	2020	
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang (Luas RTH)	9.37	7,63	7,63

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	34.76672	34.76672	34.8187
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	38.056.6	374.946	398.965
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 1400	1	1	3
Target 12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang terregister.	0	0	0
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan terregister.	n/a	n/a	n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	0
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	n/a	n/a	n/a
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap lahan keseluruhan.	56.5	56.5	-
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi lahan kritis yang direhabilitasi terhadap lahan keseluruhan. persentase lahan Eks Tambang yang di manfaatkan	0.48	0.48	-
Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0	0

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi		Realisasi 2021
			2019	2020	
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.			1
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			1
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	2	2*	2*
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	9	9*	9*
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100	100	100
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksplorasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.			n/a
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,0382	0,0489	0,0489

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	n/a	n/a	
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuplai dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3.51	3.51*	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akun Tabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	92.82	92.82*	
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BB	BB	BB
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	98.87	98.87*	95,82
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Nilai Indeks	64.87	64.87*	64,87

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
		Reformasi Birokrasi			
16.6.2.(a)		Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	n/a	n/a	n/a
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12	12	12
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan 2).	7	31,82	27,27
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	98	99	99,57
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk pendiduk 40% berpendapatan bawah.	55,93	55,93*	-
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98	99	96,79

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	n/a	n/a	n/a
Target 17.1 Memperkuat mobiliasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	12	1,01	-
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0,55	0,55	-
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5,14	5,26	-
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	1,12	1,12	-
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	n/a	79	82

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.					
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.* 17.8.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan internet. Persentase kabupaten terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	41.12 Bukan kewenangan	76 Bukan kewenangan	80 Bukan kewenangan
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a) 17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0 Jumlah alokasi pemerintah untuk penyipapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0 0	0 0
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang puluh kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) 17.18.1.(b) 17.18.1.(c)	Percentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Percentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100 Percentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	100 - n/a

Target	Kode Indikator	Indikator SDG's	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	n/a	n/a	n/a
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>vital statistics register</i>)	6809	6809	5742
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	n/a	79	82
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2022

Berdasarkan laporan meta data indikator dan target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional terhadap indikator dan target tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 jumlah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 220 indikator dengan rincian sebagai berikut :

Indikator TPB yang ada data sebanyak 109 indikator atau sebesar 49,54%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator TPB yang sudah tercapai berdasarkan ketersediaan data sebanyak 84 indikator atau sebesar 77,06%, dari 109 indikator data yang tersedia.
2. Indikator TPB yang belum tercapai berdasarkan ketersediaan data sebanyak 25 indikator atau sebesar 22,93%, dari 109 indikator data yang tersedia.

Indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 111 indikator atau sebesar 54,45%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator TPB yang ada diwilayah kajian, namun tidak tersedia data sebanyak 66 indikator atau sebesar 30%, dari 220 indikator TPB.
2. Indikator TPB yang bukan kewenangan kabupaten di wilayah kajian sebanyak 45 indikator atau sebesar 20,45%, dari 220 indikator TPB.

Berdasarkan metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia Bappenas tahun 2017 indikator yang bukan menjadi kewenangan kabupaten, indikator tersebut merupakan kewenangan provinsi dan kewenangan nasional.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas kesehatan terkait indikator proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, indikator tersebut cara perhitungannya ada 4, hal ini dikarenakan cara perhitungannya menyesuaikan dengan sumber data yang ada.

Jika dilihat dari metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia Bappenas tahun 2017, sumber data yang merupakan kewenangan provinsi dan kewenangan nasional datanya banyak bersumber dari BPS.

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021

Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target

capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi kinerja diuraikan dalam Tabel II.164 berikut.

Tabel II.164 Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN		KET
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	96,54	ST	88,41	T	
1	Pendidikan	97,99	ST	96,94	ST	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	92,00	ST	83,00	T	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	ST	91,25	ST	DPU TRP
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	91,30	ST	83,29	T	Diperkimhub
5	Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan	98,40	ST	88,23	T	BPBD dan Satpol PP
6	Sosial	99,59	ST	87,75	T	Dinsos PMD
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	95,97	ST	87,64	T	
7	Ketenagakerjaan	79,71	T	96,95	ST	DPMPTK
8	pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	100,00	ST	80,09	T	DPPKBPPA
9	Pangan	99,56	ST	90,42	T	Dispang
10	Pertanian	100,00	ST	84,98	T	DPUTRP
11	lingkungan hidup	98,38	ST	89,20	T	DLH
12	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	97,40	ST	90,52	T	Dindukcapil
13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	100,00	ST	90,19	T	Dinsos PMD
14	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	99,40	ST	89,25	T	DPPKBPPA
15	perhubungan	99,17	ST	85,23	T	Diperkimhub
16	komunikasi dan informatika	98,01	ST	92,13	ST	Diskominfosta

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN		KET
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT	
17	koperasi, usaha kecil, dan menengah	100,00	ST	87,44	T	Disperindagkop UKM
18	penanaman modal	94,23	ST	84,63	T	DPMPTK
19	kepemudaan dan olah raga	73,33	S	93,82	ST	Dinbudparpora
20	statistik	92,12	ST	85,80	T	Diskominfosta
21	persandian	100,00	ST	81,82	T	Diskominfosta
22	kebudayaan	100,00	ST	71,47	S	Dinbudparpora
23	perpustakaan	96,15	ST	89,15	T	DKP
24	kearsipan	100,00	ST	94,44	ST	DKP
21	Urusan Pemerintahan Pilihan	98,21	ST	90,86	T	
25	kelautan dan perikanan	97,58	ST	90,00	T	Diperlukan
26	pariwisata	100,00	ST	89,69	T	Dinbudparpora
27	pertanian	100,00	ST	91,25	ST	Dipertan
28	kehutanan	100,00	ST	97,14	ST	DLH
29	perdagangan	91,67	ST	83,79	T	Disperindagkop UKM
30	perindustrian	100,00	ST	93,29	ST	Disperindagkop UKM
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	95,33	ST	85,88	T	
31	sekretariat daerah	99,86	ST	95,89	ST	Sekretariat Daerah
32	sekretariat DPRD	97,00	ST	90,53	T	Sekretariat DPRD
33	penelitian dan pengembangan	99,43	ST	83,74	T	Bappelitbangda
34	keuangan	83,00	T	77,60	T	Bappelitbangda
35	kepegawaian	93,60	ST	85,60	T	BPKAD dan BPPRD
36	pendidikan dan pelatihan	92,38	ST	84,26	T	BKPNSDM
37		100,00	ST	87,49	T	BKPNSDM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA			REALISASI ANGGARAN	KET
		PERSENTASE (%)	PREDIKAT	PERSENTASE (%)	PREDIKAT	
38	pengawasan	94,31	ST	84,10	T	ITDA
39	kewilayahan (kecamatan)	98,36	ST	83,71	T	KOBA, P.BARU, S.SELAN, S.KATIS, NAMANG & LUBUK BESAR
40	kesatuan bangsa dan politik	99,63	ST	87,75	T	BAKESBANGPOL
	TOTAL	96,51	ST	88,20	T	

Dari Tabel II.164 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi capaian indikator kinerja output triwulan 4 tahun 2021 seluruh PD sebesar 96,51 %, beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja tidak mencapai 100 persen dikarenakan realisasi kinerja output yang tidak sesuai dengan target, penyebabnya antara lain; *refocussing* anggaran, target yang tinggi tidak sesuai anggaran, output yang tidak dilaksanakan karena tidak sesuai aturan, kewenangan dan tujuan kegiatan, serta adanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah pada tahun 2021 adalah *refocussing* anggaran. Pada tahun 2021 Covid -19 masih melanda Indonesia sehingga *refocussing* anggaran masih perlu dilakukan. *Refocussing* anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan pandemi Covid -19. Ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, karena anggaran digunakan untuk mengeksekusi program prioritas seperti bidang kesehatan dan program yang berhubungan dengan pemulihan perekonomian yang bertujuan untuk membantu penanganan kesehatan dan pemulihannya ekonomi masyarakat. Dengan adanya beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran di suatu perangkat daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sudah baik, jika dilihat dari rekapitulasi laporan evaluasi renja triwulan IV tahun 2021 rata-rata capaian kinerja dan realiasasi anggaran setiap PD diatas 90 % sehingga seluruh kegiatan sudah dilaksanakan.
4. Pada triwulan IV tahun 2021, capaian realisasi anggaran tergolong kategori “Tinggi” yaitu sebesar 88.20 persen dan realisasi kinerja tergolong kategori “Sangat Tinggi” yaitu sebesar 96.51. Fakta ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran subkegiatan sudah baik terlihat dari capaian anggaran dari sub kegiatan terealisasi secara maksimal.

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap laporan dalev renja perangkat daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan asistensi laporan evaluasi renja triwulan IV kepada seluruh PD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, maka disepakati untuk tahun periode renstra yaitu periode tahun 2016-2021, dengan pemetaan pada tahun 2016-2020

karena terdapat perbedaan dengan tahun 2021. Program kegiatan menyesuaikan dengan tahun 2021. Tahun sebelumnya dibuat pemetaan sesuai dengan kertas kerja pemetaan yang dibuat pada tahun 2020. Tahun 2021 merupakan akhir tahun periode renstra.

2. Proses rekapitulasi dan penghitungan indikator program (*outcome*) dari bidang-bidang di PD baru dilaksanakan sehingga baru ada data paling cepat di pertengahan bulan Januari.
3. Beberapa data yang sudah disampaikan masih menunggu data pendukung. Data hasil capaian yang disampaikan sebaiknya disertai dengan data pendukung atau kertas kerja, namun masih ada beberapa PD yang datanya masih belum lengkap.
4. Data yang melibatkan pihak diluar PD mengalami beberapa kendala salah satunya keterlambatan data yang dikeluarkan, hal ini dikarenakan data penduduk dari Dindukcapil semester 2 tahun 2021 baru terbit sekitar bulan Januari-Februari 2022 dari pemerintah pusat, sedangkan data BPS baru akan terbit pada pertengahan bulan Februari tahun 2022 (Bangka Tengah Dalam Angka), dan ada beberapa data baru terbit bulan Mei 2022 (contohnya: IPG).
5. Pada laporan evaluasi renja triwulan IV tahun 2021, terdapat PD yang capaian kinerja dan realisasi anggaran selisihnya terlalu jauh, hal ini dikarenakan ada kegiatan yang anggarannya sudah dicairkan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan.
6. Adanya perubahan anggaran induk yang dilakukan pada triwulan 2 dikarenakan adanya *refocussing*, sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada laporan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah triwulan IV Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan di beberapa PD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dapat menyebabkan realisasi kinerja yang rendah.
8. Beberapa kendala yang terjadi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat swakelola masyarakat antara lain dikarenakan terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga singkatnya waktu pelaksanaan, administrasi yang rumit, kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana pengelola. Rincian hasil evaluasi kinerja program kegiatan RKPD tahun 2021 dicantumkan dalam lampiran.

2.3. Permasalahan Pembangunan Darah

2.3.1. Permasalahan Darah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat perencanaan dibuat. Sedangkan kinerja merupakan capaian output/ outcome/ impak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dan indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) atau dampak (impact). Prioritas dan sasaran tersebut di atas mempunyai target kinerja yang harus dicapai pada tahun tersebut dengan indikator yang telah ditentukan. Hasil-hasil pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, beserta beberapa permasalahan yang dihadapi disajikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam prioritas ini terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu:

1) Peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat mempunyai beberapa indikator. Indikator pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga terjadi penurunan angka PDRB ADHK menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di angka -2,87%. Fakta yang terjadi ini sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang di rilis BPS Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Maret 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 naik menjadi sebesar 4,76%, ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka target yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 sebesar 1,32%. Ekonomi Bangka Tengah pada tahun

2021 tumbuh sebesar 4,76 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,87 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,17 %. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 4,13 %. Hal ini menunjukan meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya produktivitas lapangan usaha utama di Kabupaten Bangka Tengah.

Indikator kedua adalah indeks gini, secara umum capaian indeks gini mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang berarti menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 mencapai sebesar 0,247 poin, sedangkan indeks gini Kabupaten Bangka Tengah masih sebesar 0,28. Nilai indeks gini berada di antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangan. Sebaliknya, semakin rendah indeks, maka semakin rendah pula ketimpangan yang terjadi. Indeks ketimpangan williamson pada tahun 2020-2021 sebesar 0,412, hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antar kecamatan di kabupaten Bangka Tengah masih dalam kategori sedang.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam prioritas ini terdapat 4(empat) sasaran, yaitu

1) Meningkatnya kualitas pendidikan

Sasaran pertama meningkatnya kualitas pendidikan diukur melalui dua indikator kinerja yaitu angka harapan sekolah dan rata-rata sekolah. Capaian sasaran strategis pada indikator kesatu adalah sebesar 100,64% dengan kategori sangat tinggi dan menyumbangkan capaian rata-rata 96,75% terhadap target akhir RPJMD.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada Tahun 2021, realisasi angka harapan sekolah sebesar 12,10 tahun dari target 11,85 tahun dengan capaian kinerja sebesar 102,11% dengan kategori sangat tinggi. Angka rata-rata lama

sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2021 sebesar 7,20 tahun kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 7,26 tahun sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 hanya sebesar 99,17% dengan kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026, capaian indikator ini sebesar 93,51% dan apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka mengalami penurunan capaian sebesar 4,28%.

Bila melihat realisasi angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,20 tahun pada tahun 2021 maka untuk Kabupaten Bangka Tengah rata-rata menyelesaikan pendidikan hanya tingkat SMP yaitu kelas 1 SMP. Terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu lima tahun. Namun hanya terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin pada tahun 2020 ke 2021. Pada Tahun 2021, angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang kurang signifikan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan adanya peningkatan angka putus sekolah disebabkan banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, penduduk di atas usia 25 tahun juga banyak yang tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Selain itu, masih adanya siswa yang berhenti sekolah dikarenakan ingin membantu orang tua. Fakta ini terjadi karena permasalahan ekonomi ditengah kondisi pandemi yang masih melanda masih adanya siswa yang terjerat masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan hamil diluar nikah sehingga menyebabkan putus sekolah.

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini memperlihatkan semakin tinggi rata-rata usia suatu penduduk, maka diperkirakan semakin lama pula penduduk tersebut dapat hidup. Dari data Tabel II.166 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2021 dapat diketahui bahwa realisasi angka harapan hidup pada tahun 2021 sebesar 71,52% dari target 71,51% dengan capaian kinerja sebesar 100,01% dengan kategori sangat tinggi

dan telah memberikan capaian rata-rata 98,92% terhadap target akhir RPJMD. Realisasi angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 adalah sebesar 71,52 tahun menunjukkan bahwa bayi-bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bangka Tengah akan dapat hidup sampai usia 71 tahun. Perkembangan pencapaian angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan yang positif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa taraf kesehatan masyarakat semakin membaik.

3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Dari Tabel II.166 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2021 dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2021 melalui indikator PDRB perkapita adalah sebesar 107,64 atau dengan kategori sangat tinggi dan telah menyumbangkan capaian ratarata 104,90% dari target akhir RPJMD. Kondisi PDRB perkapita berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah dengan target Rp 42.950.576,00 terrealisasi sebesar Rp 46.234.022,00. Realisasi ini didapat dengan melakukan perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk di Tahun 2021 sehingga formulasi perhitungan sebagai berikut ($Rp9.332.846 : 201.861$) Rp 46.234.022,00. Untuk perhitungan ini data jumlah penduduk menggunakan data dari BPS Kabupaten Bangka Tengah.

4) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran keempat adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2021 melalui indikator indeks pembangunan gender adalah 99,62% atau Sangat Baik, namun capaian mengalami penurunan sebesar 0,35% dari realisasi tahun sebelumnya serta memberikan capaian rata-rata 98,54% dari target akhir RPJMD atau sudah melebihi dari target RPJMD. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir namun menurun pada Tahun 2021 sebesar 9,34 dari tahun sebelumnya 91,49.

Dari Tabel II.166 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 sd. 2021 Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2021 melalui indikator indeks perlindungan anak adalah 106,51% atau Sangat Tinggi, telah memberikan capaian rata-rata 102,31% persen dari target akhir RPJMD atau sudah melebihi dari target RPJMD. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian indikator indeks perlindungan anak yaitu pencapaian Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kategori tersebut antara lain Bupati Bangka Tengah melakukan koordinasi terus menerus kepada seluruh Perangkat Daerah yang terbentuk dalam satuan gugus tugas dan stakeholder supaya bersama-sama dapat mendukung Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak dengan komitmen seluruh elemen melalui program dan kegiatan yang responsif anak, kerjasama dengan pihak ketiga, media dan masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahannya

Dalam prioritas ini terdapat 5(lima) sasaran dengan penjelasan masing-masing indikatornya, yaitu:

1) Meningkatnya kualitas jalan

Pemenuhan untuk mencapai Pencapaian IKU Persentase kabupaten baik dengan kecepatan rata rata 60 km/jam adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan untuk menaikkan kemantapan dan pemeliharaan secara rutin atau berkala untuk menjaga kemantapan agar tidak turun kemantapan jalan.

Indikator realisasi capaian persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam pada tahun 2021 sebesar 74,42 persen melampaui target IKU pada tahun 2021 sebesar 73,70 persen.. Anggaran pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan bersumber dari APBD, DAK dan DABA. Pemenuhan untuk mencapai Persentase Pencapaian IKU kabupaten baik dengan kecepatan rata rata 60 km/jam adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan untuk menaikkan kemantapan dan pemeliharaan secara rutin atau berkala untuk menjaga kemantapan agar tidak turun kemantapan jalan. Pada tahun 2020 akhir Panjang jalan dengan kondisi baik (kondisi baik dan sedang) adalah sepanjang 258,03 km atau 74,42% dari total panjang jalan 346,72 Km kemudian jika

disandingkan dengan capaian sasaran tahun 2021 diatas menunjukkan adanya peningkatan jalan yaitu sepanjang 11,16 Km atau 2,53% atau 317,36 Km dari total panjang jalan kabupaten 441,39 Km, hal ini jika dibandingkan secara persentase mengalami penurunan karena perubahan total panjang jalan kabupaten (karena terbitnya SK Jalan Kabupaten yang baru pada tahun 2021) tetapi mengalami peningkatan jika dilihat dari data kilometer panjang jalan dalam kondisi mantap.

2) Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai

Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 95,45 persen juga melampaui target pada tahun 2021 sebesar 94,54 persen, capaian ini juga belum memenuhi target pada akhir periode RPJMD. Peningkatan pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*).

Melalui Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2021 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak mencapai 85,27% dari target 84,42%, bila dibandingkan dengan 93,59% target akhir dalam RPJMD 2026 maka presentase rumah tangga berakses air minum layak pencapaiannya adalah sebesar 91,11 %. target indikator kinerja sebesar 84,42% atau 46.599 rumah tangga yang mendapat akses air minum berbanding 55.200 prediksi rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Kemudian capaian realisasi indikator kinerja sasaran adalah sebesar 85,27 % yakni sebanyak 46.932 rumah tangga yang mendapat akses air minum berbanding dengan 55.039 rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah semester dua tahun 2021, sehingga capaian indikator sebesar 101,01 % dari target yang ditetapkan. Ini artinya pada Tahun 2021 terjadi peningkatan rumah tangga yang memiliki akses air minum. Jika dibandingkan dengan 93,59 %

Pada akhir tahun 2021 diketahui rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak sebesar 95,45% dari target 94,54% sehingga terjadi realisasi yang melampaui target sebesar 0,91 % atau dengan persentase pencapaian sebesar 100,96%. target indikator kinerja sebesar 94.54 % atau 52.186 rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah

domestik) layak berbanding 55.200 prediksi target rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak Bangka Tengah tahun 2021. Kemudian terdapat capaian realisasi indikator kinerja sasaran sebesar 95,54 % yakni 52.535 rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak berbanding 55.039 rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Sehingga capaian kinerja indikator yang dihasilkan adalah sebesar 100,96 % dari target yang ditetapkan. Ini artinya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan rumah tangga yang menempati hunia dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak sebanyak 52.535 rumah. Peningkatan pelayanan air bersih dan pengolahan air limbah sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pemenuhan kebutuhan dasar sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*).

3) Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku

Pada tahun 2021, indikator persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 95,35 % dari target 95,18 % pada IKU PD sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,27 % dari yang ditargetkan atau dengan persentase pencapaian sebesar 100,18 %. Pecapaian target ini dipengaruhi oleh kegiatan Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP) yang dilaksanakan dibeberapa lokasi, diantaranya di Kolong Kerasak Pangkalanbaru. Selain itu, terdapat lubang galian bekas tambang timah yang sudah lama ditinggalkan (*kolong*) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2021 terdapat sumber air baku yang terganggu oleh adanya aktivitas penambangan tanpa izin (TI) sehingga ini mengganggu kinerja pelayanan air baku untuk masyarakat penerima manfaat.

4) Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten

Persentase ketataan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 80,91 persen, hal ini menggambarkan tingkat simpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Tengah cukup rendah, namun tetap harus ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk penertiban dan penyebarluasan informasi mengenai rencana tata

ruang di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2021, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 80,95 % dari target 80,30 % pada RPJMD 2021-2026 sehingga capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang telah terpenuhi dengan capaian kinerja 100,69 %. Realisasi tersebut dapat diperoleh dengan rumusan rata rata persentase capaian indikasi program dan persentase kesesuaian pola ruang RTRW Kabupaten Bangka Tengah

5) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui empat indikator kinerja yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas lahan. Capaian sasaran strategis pada indikator ini adalah sebesar 125,03% dengan kategori sangat tinggi dan menyumbangkan capaian rata-rata dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 119,56%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami angka yang makin meningkat dari beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebesar 76,13. Angka indeks mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan IKA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan standar kelas 2 menjadi Kelas I pada Indeks Pencemar Air dari 70 menjadi 100. IKLH dirinci sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 55,1, realisasi pada tahun 2021 sebesar 59,58. Hal ini menunjukkan indikator kinerja **tercapai**, pencapaian peningkatan realisasi tersebut menunjukkan kualitas air di Kabupaten Bangka Tengah masih terjaga untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 ditargetkan 84,1. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 89,76 sehingga indikator kinerja **tercapai**, pencapaian peningkatan realisasi tersebut menunjukkan pencemaran udara dapat dikendalikan sehingga kualitas udara dapat terjaga.
3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 58,5. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 70,98. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tercapai, kondisi air laut dilihat dari karakter fisik, kimiawi dan biologisnya masih terjaga.
4. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bangka Tengah dengan target 47,8

dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 78,36, sehingga indikator kinerja **tercapai**. IKL yang merupakan salah satu komponen dari IKLH digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Metode perhitungan yang digunakan mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Dalam prioritas ini terdapat 4(empat) sasaran dengan penjelasan masing-masing indikatornya, yaitu:

1) Terciptanya birokrasi pemerintah (*good governance*) yang profesional, terintegrasi, berkarakteristik, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kemenpan, capaian angka Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat sampai tahun 2021, meningkat dari angka indeks sebesar 66,38 pada tahun 2020 menjadi 68,86 tahun 2021. Peningkatan rata-rata indeks reformasi birokrasi menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah semakin baik.

2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa. Pemerintah kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Capaian indikator pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2021, terlihat dengan capaian desa maju sebanyak 25 desa.

3) Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Digitalisasi tata kelola pemerintahan merupakan langkah nyata implementasi reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Peran penting SPBE yaitu untuk menjadikan proses kerja di pemerintahan menjadi efektif, efisien, transparan sehingga akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di domain teknologi SPBE meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah dan aplikasi layanan SPBE serta keamanan informasi pemerintah. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks SPBE merupakan nilai yang tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Indeks SPBE dihasilkan dari evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANBRB. Berdasarkan Surat Keputusan MenPAN-RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, tanggal 24 Desember 2021, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari kategori cukup dengan indeks 1,80 menjadi kategori baik dengan indeks 2,76. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah berada pada peringkat 51, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu berada pada peringkat 77, dengan skor indeks 54,39 kategori Inovatif

4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan persepsi penerima layanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi layanan publik. Untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat dilakukan survei kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dilakukan di 25 unit pelayanan publik di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari 6 kecamatan, 7

kelurahan, 9 puskesmas, Dindukcapil, DPMPTK dan RSUD. capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2021 melalui indikator rata-rata survei kepuasan masyarakat adalah sebesar 83,53 dengan interpretasi kinerja “baik” dari target yang telah ditetapkan yaitu 83,62 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,89% . Capaian kinerja ini menurun apabila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Pada 25 unit pelayanan publik masih banyak unit pelayanan publik yang belum mencantumkan maklumat pelayanan serta masih terdapat perilaku-perilaku pelaksana pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Kendala dalam pencapaian IKM adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelayanan di 25 unit pelayanan menjadi kurang maksimal.

Tabel II.165 Sinkronisasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan Isu Strategis

No	Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis
1	Upaya transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tantangan baru pascapandemi. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 naik menjadi sebesar 4,76%	Percepatan pemulihan ekonomi
2	Indikator realisasi capaian persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam pada tahun 2021 sebesar 74,42 persen	Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur dasar pendukung ekonomi
3	Nilai Indeks Inovasi Dearah Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah berada pada peringkat 51, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu berada pada peringkat 77, dengan skor indeks 54,39 kategori Inovatif	Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
4	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,95%, dikarenakan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai	Pengurangan angka pengangguran

No	Hasil Evaluasi RKPD 2021	Isu Strategis
	dengan kebutuhan lapangan kerja, Kualitas tenaga kerja relatif masih rendah	
5	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan adanya peningkatan angka putus sekolah	Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan
6	Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,28% dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 4,85% menjadi 5,13% pada tahun 2021, hal ini sebagai salah satu dampak pandemi covid-19	Penanggulangan kemiskinan
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan dari kategori cukup dengan indeks 1,80 menjadi kategori baik dengan indeks 2,76.	Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan
8	indikator rata-rata survei kepuasan masyarakat adalah sebesar 83,53 dengan interpretasi kinerja “baik” dari target yang telah ditetapkan yaitu 83,62 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,89%. Capaian kinerja ini menurun apabila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya.	Optimalisasi peningkatan pelayanan publik

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Darah

2.3.2.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan meliputi: belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal dan manajemen pendidikan disebabkan mutu pendidikan yang belum merata. Mutu pendidikan belum merata, dikarenakan pengelolaan pendidikan yang belum baik, sehingga menyebabkan:

- a. Pemenuhan sarana prasarana masih belum terpenuhi, terlihat dari data capaian pemenuhan SPM Tahun 2021 adalah untuk SPM PAUD sebesar 98,33%, SPM Pendidikan Dasar sebesar 97,61% dan SPM Kesetaraan sebesar 77,75%. Pencapaian SPM telah ditargetkan dari kementerian masing-masing SPM baik PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan harus mencapai 100%.
- b. Guru yang berkualifikasi S1/D4 jenjang SD/MI sebesar 93,11% dan jenjang SMP/MTs sebesar 93,12%. Sementara itu, guru yang bersertifikasi jenjang SD/MI baru mencapai 49,51% dan jenjang SMP/MTs baru mencapai 29,97%. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk mendapat sertifikasi sudah sangat berat, persyaratan tersebut antara lain :
 - Memiliki kualifikasi jenjang akademik S1 atau D4.
 - Memiliki jabatan sebagai PNS.
 - Sudah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
 - Sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan Kemdikbud.
 - Berusia maksimal 58 tahun.Masih banyak guru yang belum bersertifikasi, hal ini disebabkan :
 - Masih banyaknya guru yang belum lulus *passing grade Pretest* PPG dalam Jabatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
 - Masih belum tersedianya kuota PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah yang diselenggarakan terpisah oleh Kementerian Agama;
 - Masih belum tuntasnya raport guru pembelajar melalui SIM-PKB untuk menunjang pemenuhan *passing grade pretest* PPG dalam abatan;
 - Jumlah guru bersertifikat pendidik yang pensiun (purna tugas) tidak sebanding dengan guru yang mendapatkan sertifikat pendidik.
- c. Diklat peningkatan kompetensi guru belum merata.

2.3.2.1.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Kesehatan

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan meliputi:

- a. Perilaku hidup sehat masyarakat, yang ditandai dengan pertama; kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, misalnya tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya media promosi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kedua; kurangnya pelayanan kesehatan keluarga yang ditandai dengan masih tingginya

angka kematian (AKI, AKB) yaitu Angka Kematian Bayi 14,1 per 100 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 179,2, angka kematian balita sebesar 5,7, persentase kasus gizi buruk sebesar 0,06 persen dan prevalensi *stunting* sebesar 3,31 persen.

- b. Akses mutu dan jaminan pelayanan kesehatan, yang disebabkan oleh masih rendahnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit yang berkualitas sehingga masih ditemukan masyarakat menggunakan faskes diluar Kabupaten Bangka Tengah, masih menggunakan pengobatan tradisional

2.3.2.1.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air, karena
 - 1) Sistem irigasi yang belum optimal.
 - 2) Masih terdapatnya kawasan rawan banjir seluas 40,59 Ha
 - 3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur drainase perkotaan dan lingkungan baru 63,12 % yang terlayani
 - 4) Belum optimalnya ketersediaan air baku, karena yang terlayani baru 96,78%
- b. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 95,35 %, sedangkan akses air minum layak baru sebesar 85,27 %. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar air minum dan air limbah, karena: pertama, belum optimalnya pelayanan dasar air minum yang disebabkan oleh badan pengelolaan SPAM (BP SPAM) tidak berjalan secara maksimal dan belum optimalnya pemanfaatan *idle capacity*. Kedua, belum optimalnya pelayanan dasar air limbah karena badan pengelolaan tidak berjalan maksimal dan *septic tank* belum maksimal. Bangka Tengah melakukan pembangunan IPLT tetapi tidak adanya kepengurusan khusus dan belum adanya alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan menyebabkan bangunan tidak terawat, belum tercapainya kepengurusan khusus dan belum adanya alokasi anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan menyebabkan bangunan tidak terawat, Bangka Tengah mempunyai 1(satu) unit Intansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) tahun 2019 tetapi kendala SDM dan peraturan penarikan retribusi daerah sebagai payung hukum.
- c. Konektifitas transportasi jalan dan beberapa permasalahannya:
 - Aksesibilitas pengguna jalan memerlukan waktu tempuh perjalanan yang lebih cepat untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik dasar yang

disebabkan akses jalan yang dibangun merupakan jalan baru sehingga memerlukan pembiayaan yang tinggi dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan biaya transportasi rendah.

- Peningkatan infrastruktur sistem jaringan jalan yang berada pada kawasan hutan, karena proses ijin pinjam pakai kawasan hutan membutuhkan waktu dengan berbagai persyaratan administrasi dan teknis, berdasarkan SK Menhut Nomor 798/Menhut-2/2012, sistem jaringan jalan kabupaten yang berada pada kawasan hutan sepanjang 108,37 km.
 - Pembangunan ruas jalan sebagai perwujudan dari rencana tata ruang wilayah, disebabkan belum adanya kebijakan umum dalam menentukan skala prioritas pembangunan jalan dan tingginya biaya pembebasan lahan.
 - Pembiayaan infrastruktur jalan sangat terbatas sedangkan kebutuhan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan sangat tinggi, yang disebabkan biaya bahan baku yang masih tergantung dari luar daerah dengan kenaikan hampir setiap tahun dan alokasi anggaran dari pusat untuk penyelenggaraan jalan setiap tahun menurun tidak sebanding dengan kebutuhan daerah.
- d. Kemantapan infrastruktur jalan, dengan beberapa permasalahannya:
- Belum maksimalnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan, karena kebutuhan pembangunan infrastruktur memerlukan prioritas pembiayaan.
 - Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi sesuai dengan kapasitas jalan daerah masih 71,9 %, karena pembangunan infrastruktur jalan memerlukan pendanaan yang masih tergantung pada pemerintah dan belum adanya keterlibatan dari swasta untuk penanganan jalan terutama jalan umum.
- e. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan dan hasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik, karena belum tersedianya aplikasi penyedia informasi tata ruang.
- f. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum dilakukan secara konsisten dengan ketataan terhadap RTRW 80,91 persen, dikarenakan belum efektifnya RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten, belum optimalnya tertib administrasi tata ruang dan pertanahan, lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.
- Terjadi perbedaan antara rencana program pembangunan dan investasi dengan rencana tata ruang karena program pembangunan belum mempertimbangkan rencana tata ruang karena rencana pembangunan belum berbasis ruang dan karena perkembangan investasi baru belum terakomodir dengan rencana tata

ruang karena identifikasi isu investasi dan rencana strategis belum dilakukan secara komprehensif.

2.3.2.1.4. Permasalahan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan antara lain:

- a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni:
 - 1) Pada tahun 2021 cakupan ketersediaan rumah layak huni berhasil tercapai menjadi sebesar 97,39% atau sebanyak 43.927 rumah.
 - 2) Meningkatnya angka *backlog* perumahan setiap tahunnya karena penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya terlayani di daerah perkotaan.
- b. Pada tahun 2021 persentase luasan permukiman kumuh bertambah sebesar 0,01%. Hal ini dikarenakan adanya indikasi permukiman kumuh baru setelah dilaksanakannya pendataan perumahan.
- c. Pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Belum optimalnya pendataan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal dikarenakan belum tersedianya basis data dalam mendata masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal serta sinergitas dengan PD lain yang mengampu dalam urusan bencana serta bantuan sosial.
- e. Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum perumahan dan kawasan permukiman, belum memadainya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan belum adanya dokumen basis data pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar dalam pemenuhan PSU dan pemfokusan penyediaan anggaran secara bertahap untuk memenuhi PSU di seluruh perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bangka Tengah.
- f. Ketersediaan infrastruktur perhubungan (laut dan darat)
 - 1) Belum terpenuhinya dermaga penyeberangan orang/barang pada beberapa tempat di Kabupaten Bangka Tengah
 - 2) Belum tersedianya terminal di Kabupaten Bangka Tengah
 - 3) Belum tersedianya angkutan kota di Kabupaten Bangka Tengah
 - 4) Belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten Bangka Tengah

Belum optimalnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah.

2.3.2.1.5. Permasalahan Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan:

- Kabupaten Bangka Tengah masih dalam proses penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana, berupa Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Penanggulangan Bencana pada tahun 2022.
- Masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang handal ketika terjadi peristiwa bencana dan belum tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi, hal ini disebabkan:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat.
- Masih rendahnya penegakan hukum karena masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang pemadam kebakaran yang handal dan efektif, karena:

- Kurangnya armada dan petugas pemadam kebakaran serta sarana dan prasarana pendukung.
- Jarak pos damkar yang jauh dari titik kebakaran (*response time*).
- Alat Pelindung Diri (APD) tidak memadai.
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran.

Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dikarenakan:

- Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- Kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.

- Pengajuan perubahan kawasan hutan menjadi APL membutuhkan proses yang lama.
- Peraturan tentang pemanfaatan kawasan hutan dengan sistem sosial masih kurang disosialisasikan ke masyarakat.
- Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik.
- Kenakalan remaja dan pengamen.

2.3.2.1.6. Permasalahan Pembangunan Urusan Sosial

Pada tahun 2021 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai sebesar 90,04 %. dari Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. PMKS yang diberikan bantuan terdiri dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), usaha ekonomi produktif (UEP), korban tindak kekerasan (KTK), orang dengan kecacatan (ODK), Pendampingan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penerima bantuan bahan bangunan rumah (BBR), Program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) dan Rastra Daerah (Rastrada), kelompok usaha bersama (KUBE), anak Terlantar, penerima bantuan tongkat dan kursi roda, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, pemulung, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), PMKS penerima bantuan non pangan tunai (BPNT).

Permasalahan di bidang sosial antara lain:

- Optimalisasi peran pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Belum optimalnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikarenakan pembinaan dan pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai standar pelayanan.
- Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Belum optimalnya program rehabilitasi dikarenakan kurang optimalnya penanganan rehabilitasi PMKS.
- Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS, masih rendahnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya dikarenakan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

2.3.2.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang tenaga kerja antara lain:

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja tingkat kabupaten, dan perusahaan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah tidak menyusun rencana tenaga kerja.
- b. Rendahnya pengangguran yang dilatih, (2,45%) dan pengangguran ini belum memiliki sertifikasi.
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,95%, dikarenakan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, Kualitas tenaga kerja relatif masih rendah.
- d. Masih rendahnya pencari kerja yang bersertifikat kompetensi, karena tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tingkat kelulusannya baru 71,55%. Permasalahannya adalah implementasi atau pengembangan ilmu pelatihan berbasis kompetensi yang belum maksimal diterapkan oleh peserta pelatihan baik untuk berwirausaha mandiri maupun dalam dunia kerja. Permasalahan kedua adalah lowongan kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi para pencari kerja sehingga lowongan kerja tidak terserap oleh para pencari kerja.
- e. Masih terdapat perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, jumlah peraturan perusahaan yang didaftarkan belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang wajib PP sehingga rentan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2020 tercatat 13 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi

2.3.2.2.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,34 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 56,81. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan yang disebabkan:
 - Masih adanya paradigma di masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin;

- Masih adanya pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan dan berpikiran sempit;
 - Masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam rumah saja;
- b. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2021 sebanyak 49 kasus, yakni kekerasan terhadap anak sebanyak 34 kasus dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 15 kasus, hal ini disebabkan antara lain:
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan;
 - Belum terpenuhinya secara maksimal hak anak dan peran perempuan dalam keluarga;
 - Masih terbatasnya SDM yang kompeten;
 - Kurangnya sosialisasi, advokasi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.3.2.2.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Pangan

Permasalahan di bidang pangan antara lain:

- a. Konsumsi energi baru mencapai 2020,3 kkal/kap/hari, artinya dengan kondisi seperti ini Kabupaten Bangka Tengah untuk konsumsi energi belum mencapai amanat dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (WNPG X) untuk ketahanan pangan indonesia (kelompok pangan padi-padian, pangan hewani) tahun 2021 yaitu 2.150 kkal/kap/hari, masih kurang 129,7 kkal/kap/hari. Sumber Energi yang belum memberikan kontribusi maksimal sesuai anjuran WNPG X adalah kelompok minyak dan lemak, umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan sayur dan buah serta kelompok lain.
- b. Pada tahun 2021 Skor PPH sebesar 78,50%, kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata skor PPH menurut agroekologi masih di bawah skor PPH ideal (100). Skor PPH yang masih jauh dari skor ideal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan cenderung belum beragam dan kualitas pangan yang dikonsumsi pun masih rendah. Karena tinggi dan rendahnya skor PPH tergantung pada pencapaian sumbangannya setiap kelompok pangan (9 kelompok bahan pangan depan 2001).
- c. Belum optimalnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat, dengan berbagai permasalahannya:

- Masih ditemukannya pangan segar yang tidak aman di konsumsi yang beredar di masyarakat baik residu pestisida, pemutih, formalin, boraks pada pangan segar atau olahan dikarenakan penggunaan pestisida yang tidak sesuai anjuran.
 - Masih rendahnya produk prima tiga atau mutu pangan segar yang beredar di masyarakat dikarenakan masih kurangnya kesadaran petani untuk melaksanakan budidaya pangan yang aman, sehingga mutu hasil produksi yang dihasilkan juga rendah, belum memadainya fasilitas pendukung untuk pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, masih kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat tentang pangan yang aman yang beredar di pasar, dan penanganan pascapanen produk pangan segar masih belum memenuhi kaidah regulasi yang dianjurkan.
- d. Belum terpenuhinya jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, dengan berbagai permasalahannya:
- Stok cadangan pangan daerah masih rendah karena daerah yang bukan sentra produksi.
 - Belum adanya cadangan pangan desa dikarenakan masih tingginya ketergantungan beberapa komoditi bahan pangan dari luar wilayah, masih rendahnya komitmen pemerintah desa untuk menyediakan cadangan pangan desa dan belum tersedianya lumbung pangan daerah.
- e. Stabilitas harga pangan masih rendah, dengan berbagai permasalahannya:
- Masih panjangnya rantai distribusi pangan dikarenakan terjadinya fluktuasi harga komoditi pangan yang tidak menentu.
 - Pola distribusi pangan belum terintegrasi dengan baik dikarenakan lemahnya posisi tawar petani.
- f. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dalam manajemen, aktivitas, keuangan dan orientasi ekonomi, belum berkembangnya kapasitas kelembagaan petani dikarenakan:
- Rendahnya motivasi petani untuk memajukan kelompok tani bersama-sama;
 - Rendahnya kualitas dalam pengelolaan usaha tani secara baik;
 - Lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan dan jaringan pemasaran;
 - Kurangnya pengetahuan dan wawasan petani.
- g. Berdasarkan data yang disusun oleh Dinas Pangan tingkat prevalensi kerawanan pangan penduduk diukur dari jumlah wilayah rentan rawan pangan berdasarkan berdasarkan peta FSVA dan SKPG. Tahun 2020, terdapat 2 desa dengan kategori rentan rawan pangan. Kurangnya penanganan rawan pangan, masih terdapat

wilayah rentan rawan pangan dikarenakan wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang bukan merupakan sentra produksi beras dan akses pangan di beberapa wilayah masih sulit. Penyebab lainnya adalah:

- Belum semua penyuluh pertanian memiliki kemampuan teknis budidaya komoditi strategis;
- Penyuluh seringkali berada diantara dua konflik kepentingan yaitu kepentingan petani dan kepentingan pemerintah;
- Perbedaan nilai yang dianut penyuluh dan petani seringkali menyebabkan pengetahuan yang diberikan penyuluh belum diterima oleh petani;
- Sulit merubah pola fikir dan sikap petani yang belum benar namun sudah mengakar kuat dan menjadi budaya fikir dalam mengelola lahan pertaniannya.

2.3.2.2.4. Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanahan

Total luas tanah bersertifikat pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 3.590.369 m². Permasalahan di bidang pertanahan adalah masih rendahnya luasan tanah yang memiliki sertifikat yaitu sebesar 6,30 persen, sehingga rentan terhadap terjadinya sengketa kepemilikan tanah, minimnya informasi mengenai tahap pembuatan sertifikat yang disebabkan persepsi masyarakat bahwa mengurus sertifikat sulit dan persepsi masyarakat mengenai pembuatan sertifikat membutuhkan biaya yang mahal.

2.3.2.2.5. Permasalahan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2021 sebesar 76,13. Permasalahan di bidang lingkungan hidup antara lain:

- a. Penurunan kualitas lingkungan hidup, dengan berbagai permasalahannya:
 - Minimnya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan dan/atau usaha dikarenakan kurangnya pencegahan pencemaran air , laut, udara dan tanah akibat kegiatan dan/atau usaha dan kurangnya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - Kurangnya ketataan pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan dalam upaya melakukan pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin PPLH dan banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- Masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam mengurus perizinan terkait lingkungan.
 - i. Kurangnya kepedulian masyarakat, komunitas dan institusi terhadap upaya PPLH, tingkat pengetahuan terhadap upaya PPLH pada masyarakat, komunitas dan institusi yang masih rendah dikarenakan kurangnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mengenai upaya PPLH dan apresiasi terhadap upaya PPLH masih sedikit.
 - b. Masih kurang optimalnya pengelolaan persampahan terutama penanganan dan pengurangan sampah yang disebabkan:
 - Kurangnya lahan untuk difungsikan sebagai tempat pengelolaan persampahan;
 - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di pedesaan;
 - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (kurangnya edukasi kepada masyarakat).
 - c. Luas RTH (1.869,91 ha)/Luas Wilayah ber HPL dan HGB (493,51 ha) X 100% = 3,79 persen. Pengelolaan RTH yang belum optimal dikarenakan belum idealnya persentase luas RTH di perkotaan dan masih kurangnya sarana dan prasarana RTH yang telah ada; belum adanya pemetaan luas RTH secara menyeluruh. Akar masalah dari masalah tersebut antara lain:
 - Kurangnya lahan untuk difungsikan sebagai tempat RTH;
 - Kurangnya sarana dan prasarana RTH yang dibangun baik melalui dana APBD /APBN;
 - Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman.
-

2.3.2.2.6. Permasalahan Pembangunan Urusan Administrasi dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil antara lain:

- a. Peningkatan kepemilikan dokumen dan kualitas data kependudukan serta pemanfaatannya masih belum maksimal. Jumlah akta kelahiran di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 yang diterbitkan adalah 121.675 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 semester 2 adalah 198.022 jiwa. Persentase jumlah akta kelahiran yang diterbitkan adalah 61,45 %. beberapa permasalahan diantaranya:

- Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk, yang disebabkan pemahaman masyarakat masih minim akan pentingnya dokumen kependudukan, masih ada warga yang belum memiliki identitas penduduk, kepemilikan kartu identitas anak masih belum menyeluruh, masih rendahnya data tentang penduduk non permanen, dan masih banyak warga yang membutuhkan fasilitasi pindah datang.
 - Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil yang disebabkan pemahaman masyarakat masih minim akan pentingnya dokumen pencatatan sipil, kepemilikan akta kelahiran masih rendah, kepemilikan akta perkawinan non muslim masih rendah, dan jumlah pelaporan penerbitan akta kematian masih rendah.
 - Kualitas dan pemanfaatan data penduduk belum maksimal yang disebabkan keakuratan data belum optimal, rendahnya aksesibilitas mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data oleh instansi-instansi masih kurang maksimal.
- b. Target kualitas pelayanan nasional belum maksimal, dengan berbagai macam permasalahannya:
- Ketersediaan sapras penunjang pelayanan masih belum maksimal dikarenakan jumlah fasilitas penunjang pelayanan masih kurang.
 - Ketersediaan sapras penunjang pelayanan bagi penyandang disabilitas masih minim dikarenakan jumlah fasilitas khusus penyandang disabilitas masih kurang.
 - Kecakapan sumber daya manusia dalam memproses prosedur pelayanan masih harus ditingkatkan dikarenakan pelatihan bagi petugas pelayanan masih kurang.
 - Pengembangan teknologi informasi penunjang pelayanan online belum optimal dikarenakan media pelayanan secara online kurang memadai.

2.3.2.2.7. Permasalahan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten yang telah menetapkan status kemajuan desa dan menyediakan data serta informasi dasar bagi pembangunan desa. Kondisi penetapan kemajuan desa di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Desa Maju berjumlah 25 desa;
- b. Desa Berkembang berjumlah 31 desa.

Permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain yaitu belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa karena rendahnya minat masyarakat dalam membangun desa serta peran lembaga ekonomi desa dalam penguatan ekonomi desa belum signifikan. Hal ini dilihat dari ketercapaian Indeks Desa Membangun baru tercapai 25 Desa Maju dan 31 Desa Berkembang, sedangkan sampai dengan tahun 2021 Desa Mandiri belum ada.
- 2) Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa karena ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran desa, pengelolaan aset desa dan keuangan desa. Selain itu, sebagian besar dokumen belum sesuai dengan ketentuan dan sistem informasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2.3.2.2.8. Permasalahan Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Tengah sebesar 1,96 pada tahun 2021. Permasalahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain terkait laju pertumbuhan penduduk (LPP):

- Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program KB
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB
- Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia pengelola KB terhadap program KB

2.3.2.2.9. Permasalahan Pembangunan Urusan Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan (laut dan darat) dengan berbagai permasalahannya:

- Belum terpenuhinya dermaga penyeberangan orang/barang pada beberapa tempat di Kabupaten Bangka Tengah karena belum adanya dokumen perencanaan dan lahan sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang laut.

- Belum tersedianya terminal di Kabupaten Bangka Tengah karena belum adanya dokumen perencanaan dan lahan sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang darat.
- Belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten Bangka Tengah karena dokumen basis data tatanan transportasi lokal perhubungan bidang darat yang belum dimutakhirkan sebagai dasar dalam pemenuhan sarpras perlengkapan jalan dan penyediaan dana/anggaran secara bertahap untuk memenuhi pemerataan sarpras perlengkapan jalan di seluruh area Kab. Bangka Tengah.
- Belum optimalnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah karena penyediaan dana/anggaran secara bertahap untuk memenuhi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai item dasar alat uji dalam memenuhi UU No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturuan MENHUB RI Nomor PM 133 Thn 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2.3.2.2.10. Permasalahan Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Teknologi informasi dengan berbagai permasalahannya, diantaranya:
 - Belum tersusun dengan sempurna *master plan* untuk menuju *smart city* dikarenakan revisi *master plan*;
 - Belum terintegrasinya aplikasi dalam system pemerintahan yang menyeluruh dimana saat ini aplikasi masih disusun parsial dikarenakan masih ada yang terpisah-pisah;
 - Belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi yang tersedia dalam menunjang kemudahan pelayanan pemerintahan ;
 - Arsitektur SPBE pemerintah kabupaten belum tersusun dikarenakan masih tahapan rencana;
 - Belum optimalnya implementasi aplikasi satu data kabupaten dengan forum data yang terintegrasi dengan satu data Indonesia
- b. Informasi dan Komunikasi, dengan berbagai macam permasalahannya:
 - Kurangnya penegasan wewenang dan tanggung jawab Diskominfosta dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan menara dikarenakan pembagian kewenangan;

- Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyebarluasan informasi karena perlunya pembangunan gedung radio dan media center;
- Perlunya penambahan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.

2.3.2.2.11. Permasalahan Pembangunan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah adalah peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dan pengembangan UKM yang pro lingkungan (*green economy*) dengan berbagai permasalahannya:

- a. Masih rendahnya pertumbuhan UKM yang aktif berproduksi, yang disebabkan:
 - Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru;
 - Masih kurangnya peringkatan KUB/klaster skala usaha mikro;
 - Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro.
- b. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat (61,22 persen), yang disebabkan:
 - Masih rendahnya manajemen koperasi;
 - Belum semua koperasi di Kabupaten Bangka Tengah yang berkinerja baik.

2.3.2.2.12. Permasalahan Pembangunan Urusan Penanaman Modal

Permasalahan di bidang penanaman modal antara lain:

- a. Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan:
 - Belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN dikarenakan belum optimalnya promosi investasi dan potensi dan peluang investasi yang belum siap untuk ditawarkan.
 - Belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN dalam menyampaikan LKPM karena belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan regulasi/kebijakan terbaru dari pusat terkait penanaman modal, belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi dan belum optimalnya pembinaan.
- b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan belum optimal (88,66 persen) yang disebabkan ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai

dengan waktu yang ditetapkan dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan. Beberapa hal yang menjadi akar masalah antara lain jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis, belum optimalnya monitoring proses penerbitan perizinan , sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas.

2.3.2.2.13. Permasalahan Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang kepemudaan dan olah raga antara lain:

- a. Belum ada wisma atlet, ketika ada event olahraga ditingkat kabupaten, tidak ada tempat untuk menampung atlet dari kecamatan karena belum ada masterplan.
- b. Kekurangan pelatih/wasit/juri yang bersertifikat (24 cabang olahraga, dengan masing-masing cabor 3 orang), belum bisa menilai secara professional karena kegiatan pelatihan kompetensi pelatih/wasit/juri harus dilaksanakan di luar daerah.
- c. Fasilitasi pendukung kegiatan kepramukaan masih kurang, kurang maksimal pelayanan terhadap kegiatan kepramukaan karena sampai dengan tahun 2021 kegiatan yang berhubungan dengan pramuka tidak melibatkan PD Dinbudparpora sedangkan pramuka berada di bawah naungan kepemudaan.
- d. Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga, kurangnya edukasi kepada pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat karena kurangnya pemuda pelopor, dan kurangnya aspresiasi bakat pemuda dan kurang optimalnya kelompok olahraga masyarakat.

2.3.2.2.14. Permasalahan Pembangunan Urusan Statistik

Permasalahan di bidang statistik antara lain:

Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral yang belum optimal dengan berbagai permasalahannya:

- Belum terkompilasi dengan baik data dasar yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.
- Dokumentasi dan data yang keluar tidak melalui satu pintu yang bisa menyebabkan penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.

- Belum tersusunnya mekanisme pengumpulan data melalui Diskominfosta sebagai walidata karena data masih terpisah-pisah di beberapa perangkat daerah.
- Penganalisaan data belum maksimal karena masih kurangnya statistisi.
- Belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah karena validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor yang belum optimal

2.3.2.2.15. Permasalahan Pembangunan Urusan Persandian

Permasalahan di bidang persandian antara lain:

- Belum optimalnya pengelolahan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.
- Belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.
- Layanan keamanan informasi dan persandian masih belum optimal dikarenakan belum dilakukan penilaian indeks KAMI, kegiatan persandian belum optimal selama 5 tahun ini.

2.3.2.2.16. Permasalahan Pembangunan Urusan Kebudayaan

Permasalahan di bidang kebudayaan antara lain:

- Belum tersedianya gedung kesenian/galeri seni, kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pertunjukan dan pameran seni budaya yang *representatif* karena belum tersedianya lahan yang memadai dan DED.
- Belum tersedianya tenaga ahli di bidang penanganan cagar budaya, kesulitan dalam hal meregistrasi/ menginventarisasi benda cagar budaya karena belum tersertifikasinya tenaga ahli cagar budaya Bangka Tengah.

2.3.2.2.17. Permasalahan Pembangunan Urusan Perpustakaan

Permasalahan bidang perpustakaan adalah kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat, yang disebabkan oleh antara lain:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan dikarenakan belum semua desa/kelurahan memiliki perpustakaan.

- Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat dikarenakan akses informasi yang semakin cepat di era digitalisasi dan gedung perpustakaan daerah yang belum memadai.

2.3.2.2.18. Permasalahan Pembangunan Urusan Kearsipan

Permasalahan di bidang kearsipan yang utama adalah sarana dan prasarana ~~dan~~ serta SDM kearsipan:

- Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai dikarenakan belum semua PD memiliki *record centre*, depo arsip belum memenuhi standar dan terbatasnya anggaran.
- Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia kearsipan yang memiliki jabatan ahli dan terampil dikarenakan belum meratanya jenjang jabatan fungsional arsiparis dalam peningkatan jabatan.

2.3.2.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan

2.3.2.3.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berbagai permasalahannya:
 - Masih rendahnya produktifitas karena konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air dikarenakan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (baik RZWP-3-K atau RTRW), sehingga banyak lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya.
 - Masih rendahnya produksi karena belum optimalnya penerapan biosecurity, penanganan penyakit ikan, penggunaan vaksin dan pengendalian lingkungan.
 - Masih tingginya biaya produksi karena belum tersedianya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memadai.
 - Pemasaran hasil budidaya ikan, yang disebabkan:
 - Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, di antaranya jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak);

- Belum terbangunnya sistem logistik perbenihan yang menyebabkan distribusi induk dan benih belum sesuai dengan kebutuhan setiap kecamatan;
- Belum optimalnya penerapan teknologi pemberian yang dapat memproduksi benih dengan kualitas dan kuantitas tinggi serta ramah lingkungan;
- Belum banyak tersedia benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang diproduksi dari unit pemberian;
- Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan dari luar daerah yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudidaya;
- Sebagian besar pembudidaya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudidaya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- Akses permodalan dan perlindungan usaha perikanan masih terbatas;
- Kurangnya sosialisasi informasi terkait prosedur, komoditas, dan lokasi investasi perikanan budidaya;
- Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di sentra kawasan budidaya;
- Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang;
- Kompetensi SDM perikanan belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi;
- Masih perlunya peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur di bidang budidaya perikanan dan tangkap;
- Kelembagaan perikanan belum terkelola dengan baik dan belum berorientasi pasar;
- Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar;
- Belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB belum merata;
- Unit pemberian yang bersertifikat CPIB masih terbatas;
- Masih terbatasnya unit produksi pakan yang bersertifikat CPPIB terutama unit produksi pakan mandiri;
- Belum adanya inovasi usaha perikanan budidaya dengan Teknologi 4.0 (Contoh: *auto feeder*, investasi digital, sistem pemantauan/ monitoring, dan sistem pengendalian)

- Belum adanya pemanfaatan teknologi digital untuk mengefisiensikan mata rantai pasok;
 - Masih terbatasnya data riset/ kajian yang aplikatif di bidang perikanan;
 - Nelayan Bangka Tengah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan sarana penangkapan ikan sehingga usaha dan kemandirian tidak berkembang;
 - Masih terbatasnya informasi nelayan perairan umum daratan;
 - Belum ada kajian mengenai potensi perairan umum daratan;
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat perikanan dalam administrasi perizinan.
- b. Pada tahun 2021 tingkat konsumsi ikan sebesar 61,40 kg/kapita/tahun, walaupun terjadi kenaikan setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih rendahnya diversifikasi produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang disebabkan:
- Skala usaha masih , terkendala modal usaha yang masih terbatas;
 - Belum tesedianya laboratorium mutu hasil perikanan yang memadai;
 - Masih lemahnya keinginan UMKM untuk merubah kebiasaan dalam mengolah hasil perikanan;
 - Terbatasnya sarana dan prasana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Masih terbatasnya pengetahuan pengolah dan pemasaran hasil perikanan mengenai teknologi hasil perikanan.

2.3.2.3.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Pertanian

Permasalahan di bidang Pertanian antara lain:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan berbagai permasalahannya:
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian karena masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, belum meratanya alsintan (alat dan mesin pertanian) yang ada dikelompok dan manajemen pengelolaan alsintan di kelompok;
 - Perubahan iklim yang tidak menentu karena masih tingginya serangan opt dan pengaruh dampak pengaruh iklim;

- Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian sehingga rendahnya penerapan teknologi pertanian, pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tingkat petani, masih rendahnya sertifikasi benih lokal dan masih rendahnya teknologi pasca panen.
- b. Masih rendahnya produksi dan daya saing tanaman perkebunan dengan berbagai permasalahannya:
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian, masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, belum meratanya alsintan (alat dan mesin pertanian) yang ada dikelompok, manajemen pengelolaan alsintan di kelompok dan banyaknya tanaman perkebunan yang harus di ganti (direhabilitasi);
 - Perubahan iklim yang tidak menentu karena masih tingginya serangan opt dan pengaruh dampak pengaruh iklim;
 - Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian yang disebabkan:
 - Pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tingkat petani;
 - Masih rendahnya sertifikasi benih lokal;
 - Masih rendahnya teknologi pasca panen;
 - Gap belum diterapkan di tingkat petani;
 - Standar mutu benih yang masih rendah;
 - Daya saing produk pertanian masih rendah.
- c. Masih rendahnya produktivitas usaha pembibitan dan penggemukkan dengan berbagai permasalahannya:
- Masih rendahnya pelayanan kesehatan hewan karena kesadaran peternak akan pelayanan kesehatan hewan, masih kurangnya pusat pelayanan kesehatan hewan.
 - Kurangnya sarana dan prasarana peternakan karena masih kurangnya lahan hpt, dan masih kurangnya sarana pembibitan peternakan.
 - Rendahnya penerapan teknologi peternakan karena masih rendahnya hasil dari IB, belum adanya sertifikasi terhadap kualitas pupuk kompos yang dihasilkan oleh petani dan masih rendahnya penggunaan kur peternakan di tingkat peternak dalam pengembangan sapi.

2.3.2.3.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Pariwisata

Permasalahan di bidang Pariwisata antara lain:

- a. Aksesibilitas belum memadai, belum adanya kejelasan status kawasan dikarenakan DTW berada di kawasan hutan lindung dan konservasi;
- b. Belum semua daerah tempat wisata memiliki amenitas yang memadai, belum meratanya pembangunan/pengadaan amenitas dasar di daerah tempat wisata karena status lahan dan belum tersedianya dokumen perencanaan (*masterplan* dan ded kawasan);
- c. Daya tarik wisata masih rendah, belum dikelolanya daya tarik wisata secara optimal karena kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan dan tata kelola destinasi belum optimal;
- d. Upaya pembangunan di bidang ekonomi kreatif yang masih rendah, struktur kelembagaan di bidang ekonomi kreatif belum ada karena rumusan/ rencana induk pengembangan ekonomi kreatif belum ada.

2.3.2.3.4. Permasalahan Pembangunan Urusan Kehutanan

Permasalahan di bidang kehutanan yaitu penurunan tingkat keanekaragaman tumbuhan, hewan dan ekosistem serta kerusakan Tahura dengan berbagai permasalahannya:

- Maraknya aktifitas ilegal di Tahura Bukit Mangkol berupa penebangan liar, penambangan liar dan perburuan liar di Tahura Bukit Mangkol dikarenakan kurangnya SDM pengamanan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting tahura, serta kurangnya kolaborasi.
- Belum optimalnya pemeliharaan lahan kritis di Tahura Bukit Mangkol
- Adanya aktifitas masyarakat pada blok yang seharusnya dilarang karena belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis blok.
- Adanya klaim lahan oleh masyarakat karena belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan Tahura.
- Terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola karena belum adanya tata batas blok.
- Terhambatnya pembangunan wisata alam oleh masyarakat/pencinta Tahura karena skema kemitraan konservasi masih rumit dan sulit.

2.3.2.3.5. Permasalahan Pembangunan Urusan Perdagangan

Permasalahan di bidang perdagangan yaitu menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, yang disebabkan:

- Belum memadai sarana dan prasarana;
- Keterbatasan sumber daya manusia;
- Ketergantungan akan ketersediaan bahan pokok dan barang penting dari luar;
- Lonjakan harga pada hari besar keagamaan dan hari - hari tertentu.

2.3.2.3.6. Permasalahan Pembangunan Urusan Perindustrian

Permasalahan di bidang perindustrian antara lain:

- a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2021 tercatat sebesar 6,60 persen. Harga CPO yang relatif baik sepanjang tahun 2021 menjadi faktor utama pendorong peningkatan kinerja industri pengolahan CPO.
- b. Persentase pertumbuhan industri didominasi industri olahan pangan, utamanya olahan hasil laut, sektor ini membawa optimisme bagi pembangunan industri pengolahan di Kabupaten Bangka Tengah kedepan. Pertumbuhan permintaan seiring peningkatan kualitas dan daya saing produk, ikut berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sentra-sentra industri olahan. Namun masih rendahnya daya saing kualitas produk IKM yang masih menjadi permasalahan dalam bidang perindustrian. Rendahnya pemenuhan jaminan standar mutu produk yang disebabkan:
 - Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing produk;
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna yang belum maksimal;
 - Masih kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat tentang pangan yang aman yang beredar di pasar;
 - Kendala dengan jaminan (anggunan) dalam pembiayaan kredit;
 - Masih rendahnya kualitas SDM IKM dalam pemahaman cara produksi yg sesuai dgn GMP.

2.3.2.4. Permasalahan Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

2.3.2.4.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan; belum semua perangkat daerah pelayanan yang menyusun SPP, SPM, SKM
- Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah
- Pelayanan tata usaha dan kepegawaian yang belum efektif dan efisien
- Kurangnya inovasi pelayanan publik
- Terbatasnya SDM untuk pelayanan keprotokolan terhadap KDH/WKDH
- Belum maksimalnya kualitas komponen pelaporan SAKIP dan LPPD karena belum optimalnya pelaksanaan indikator kinerja dan capaian kinerja pada dokumen perencanaan.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas perangkat daerah dikarenakan belum optimalnya evaluasi kelembagaan dan belum optimalnya analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan evaluasi kelembagaan.
- Belum optimalnya pengelolaan kesejahteraan rakyat yang disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBK, kemasan acara PHBK yang kurang menarik dan kurang disiplinnya penerima hibah dalam pembuatan SPJ.
- Banyaknya kebutuhan terhadap Perda yang belum dapat tercukupi dan penyelesaian produk hukum selain Perda yang belum tepat waktu.
- Belum maksimalnya konsistensi capaian penanganan perkara/ permasalahan hukum karena munculnya permasalahan hukum baru baik litigasi maupun non litigasi.
- Belum maksimalnya konsistensi pemberian pertimbangan/konsultasi hukum karena kebutuhan waktu untuk mentelaah pertimbangan hukum.
- Belum optimalnya peningkatan potensi perekonomian daerah yang disebabkan; belum tersedianya data analisa perekonomian, belum teridentifikasinya dan inventarisasi potensi perekonomian daerah,
- Belum Adanya Tata Kelola Yang BUMD yang baik
- Belum optimalnya pengelolaan administrasi pembangunan
- Belum optimalnya pengelolaan kegiatan di perangkat daerah

2.3.2.4.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Belum optimalnya DPRD dalam melaksanakan tupoksi, kurangnya pemahaman terhadap tupoksi DPRD disebabkan melaksanakan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi.
- Belum optimal pelayanan sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD karena sumber daya manusia aparatur kurang memadai.

2.3.2.5. Permasalahan Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.2.5.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai permasalahannya:

- Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan:
 - Indikator kinerja daerah belum dirumuskan dan ditata jenjang kinerjanya dengan baik
 - Belum optimalnya pendekatan *money follow program* dalam perencanaan anggaran agar lebih berfokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah.
- Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan yang disebabkan:
 - Masih rendahnya persentase aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran;
 - Belum optimalnya pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah(SIPD) terkait penyusunan dokrenda;
 - Belum optimalnya kelengkapan data dan infomasi pembangunan daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang disebabkan:
 - Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja;
 - Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil (*outcome*);

- Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya;
- Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan menjadi tidak selaras.
- Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral yang disebabkan:
 - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencana;
 - Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu;
 - Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sectoral;
 - Masih kurangnya substansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - Belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah;
 - Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappeda dengan perangkat daerah.

2.3.2.5.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Keuangan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) karena belum optimalnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang disebabkan oleh akar masalah diantaranya:
 - Investasi yang masuk tidak berdampak langsung dalam penerimaan pajak daerah;
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah;
 - Dana operasional untuk menunjang pencapaian pendapatan daerah belum berimbang dengan target;
 - Potensi pajak tidak bertambah secara signifikan;
 - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
 - Sarana prasarana yang belum memadai;
 - Belum ada pejabat fungsional penilai pajak dan penyitaan.

- b. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan berbagai permasalahannya:
- APBD yang ditetapkan belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD yang disebabkan:
 - Belum optimalnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran;
 - Kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik;
 - Keterlambatan tahapan penyusunan APBD;
 - Laporan aset dan persediaan belum tepat waktu per 31 Desember tahun berjalan yang disebabkan:
 - Terlambatnya penyampaian finalisasi data aset dari beberapa perangkat daerah;
 - Terlambatnya penyampaian mutasi masuk data dari beberapa perangkat daerah diluar belanja APBD (seperti hibah masuk dari beberapa kementerian);
 - Terlambatnya penyampaian stok opname dari unit teknis terkecil dari beberapa PD;
 - Kurangnya tingkat kemampuan pengurus barang di karenakan tumpangtindihnya jabatan pengurus barang dan latar belakang yang berbeda beda;
 - Belum optimalnya aplikasi web base aset dan persediaan.
 - Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD yang disebabkan:
 - Masih banyaknya tanah pemerintah yang belum dilaksanakan pengamanan fisik berupa pagar, patok dan papan nama;
 - Masih rendahnya persentase sertifikat tanah pemerintah;
 - Kurangnya kesadaran dari perangkat daerah untuk pengamanan administrasi untuk aset BMD yang bersifat bergerak;
 - Belum diperbaruiinya kartu inventaris ruangan di beberapa perangkat daerah;
 - Sulitnya menerbitkan IMB untuk gedung pemerintah pada tahun-tahun yang lama.
 - Belum optimalnya pemanfaatan BMD yang disebabkan:
 - Kurangnya peminat pihak ketiga/ swasta untuk memanfaatkan aset BMD dengan cara sewa;

- Belum adanya relasi untuk pemanfaatan aset BMD dengan cara BSG maupun BGS;
- Kurangnya koordinasi dengan penilai pemerintah untuk penilaian aset BMD dikarenakan padatnya jadwal dari KPKNL.
- Belum optimalnya proses pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang disebabkan:
 - Kurangnya tingkat kemampuan pengurus barang di beberapa perangkat daerah sehingga harus di pandu secara detil dari bidang asset;
 - Sulitnya mengumpulkan fisik aset BMD yang tersebar luas sampai ke unit teknis terkecil untuk dilakukan pemusnahan.
- Pengelolaan kas daerah yang disebabkan belum terintegrasinya SPD dengan anggaran kas di sistem SAKD.
- Pengelolaan Perbendaharaan yang disebabkan:
 - Kurang maksimalnya pelaksanaan transaksi non tunai (TNT) yang dilakukan oleh Bendahara pengeluaran;
 - Kurang dan atau lebih bayar gaji PNS yang disebabkan oleh SK Mutasi yang terlambat dari BKN/BKD;
 - Rekon pajak yang kurang optimal antara Bendahara pengeluaran dan KPP Pratama serta KPPN.
- Keterlambatan penyampaian laporan keuangan SKPD ke BUD yang disebabkan:
 - Kurangnya kompetensi pejabat pengelola keuangan di SKPD dalam hal pengelolaan keuangan;
 - Lemahnya pengendalian internal pengelolaan keuangan di SKPD;
 - Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan.

2.3.2.5.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Kepegawaian

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Belum optimalnya penempatan aparatur sipil negara (ASN) yang disebabkan keterbatasan SDM untuk ditempatkan berdasarkan jabatan dan kualifikasi Pendidikan.

- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, baik struktural, fungsional maupun teknis, masih rendahnya kemampuan Pemda dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang disebabkan:
 - Belum optimalnya kompetensi ASN dalam menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional;
 - Data pengembangan kompetensi yang dilaksanakan perangkat daerah belum maksimal dilaporkan ke BKPSDMD;
 - Masih kurangnya tingkat validitas data kepegawaian dan dokumen kepegawaian.
- Belum optimlanya pengelolaan data dan dokumen kepegawaian yang disebabkan:
 - Belum optimalnya proses pembaharuan data secara mandiri melalui aplikasi;
 - Belum optimalnya proses pelayanan data kepegawaian.

2.3.2.5.4. Permasalahan Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Masih kurangnya aparatur sipil negara yang mendapatkan pendidikan pelatihan, baik diklat struktural maupun diklat fungsional. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal baru mencapai 51,05 persen.

2.3.2.5.5. Permasalahan Pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan bidang penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, karena belum optimalnya fungsi dan peranan bidang kelitbangau, akar masalahnya adalah belum tersusunnya studi/kajian/penelitian sesuai kebutuhan perencanaan.

2.3.2.6. Permasalahan Pembangunan Urusan Inspektorat

Permasalahan yang terjadi adalah jumlah auditor perlu ditambah, kegiatan pengawasan belum optimal. Audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan jasa *advice* yang disebabkan prosedur penerimaan auditor adalah dibawah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, bukan Inspektur.

2.3.2.7. Permasalahan Layanan Urusan Kewilayahan

2.3.2.7.1. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Koba

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
 - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa;
 - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

2.3.2.7.2. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Pangkalnbaru

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.

- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
- Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa;
 - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

2.3.2.7.3. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Sungaiselan

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
- Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
- Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa;
 - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.

- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

2.3.2.7.4. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Simpangkatis

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
 - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
 - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

2.3.2.7.5. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Namang

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:
 - Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
 - Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

2.3.2.7.6. Permasalahan Pembangunan Urusan Kecamatan Lubuk Besar

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- a. Ketentraman dan ketertiban masyarakat, banyaknya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang disebabkan:
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
 - Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan berbagai permasalahannya:

- Belum optimalnya pengelolaan APBDes yang disebabkan belum ada standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes dan rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
- Kesepakatan batas desa antara dua desa dalam satu kecamatan yang belum terselesaikan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang disebabkan kurangnya sosialisasi SOP paten bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan untuk pengembangan PATEN.
- d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya usulan masyarakat kecamatan yang terakomodir pada APBD yang disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kecamatan dengan PD terkait.

Apakah semua kecamatan ini masalahnya sama persis???bukankah karakteristik masyarakatnya berbeda terkait faktor geografisnya? Mohon untuk dikonfirmasi ulang Bidang pengampu.

2.3.2.8. Permasalahan Layanan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Kurangnya pemahaman dan pengamalan paham kebangsaan, kurangnya kualitas pemahaman dan pelaksanaan paham kebangsaan dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama yang disebabkan kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan.
- Kurang interaksi sosial dan kelompok masyarakat lainnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila.
- Kurangnya kualitas pembinaan forum kemasyarakatan
- Kurangnya kesadaran dalam memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menyebabkan disebabkan masih terdapat perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, baik secara vertikal maupun horizontal.

2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang telah diverifikasi

Penelaahan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Usulan pokir harus diinput ke dalam aplikasi SIPD dengan menggunakan akun masing-masing anggota dewan. Usulan pokir yang diinput dalam aplikasi SIPD merupakan hasil reses yang telah diparipurnakan. Untuk Tahun 2023, usulan pokir yang diinput ke dalam aplikasi SIPD didasarkan pada hasil reses, hasil kunjungan kerja dalam daerah dan rapat dengar pendapat. Adapun untuk hasil reses dicantumkan dalam surat keputusan, sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/2/DPRD/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Masa Sidang I Tahun 2021; dan
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/19/DPRD/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Masa Sidang 2.

Jumlah pokok pikiran yang diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri) sebanyak 296 usulan kegiatan yang masuk dalam proses verifikasi. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel II. 166 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
1	Pertanian	Bantuan jalan produksi	mempermudah pengguna jalan	Jalan Melintang rt 05, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
2	Pertanian	Bantuan ayam merawang	Bantuan Bibit Ayam Kampung dan Pakan, Kelompok Ternak Desa Kebintik Sampur Bawah, 5 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Kelompok Ternak Desa Kebintik Sampur Bawah, 5 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Pangkalanbaru	Dinas Pertanian

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
3	Pertanian	Bantuan Sapi	Pengajuan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Maju Bersama Desa Padang Baru Sudah Mengajukan Proposal Berupa Sapi Ternak Pada Tahun 2021, Volume 7 ekor SAPI	Kelompok Maju Bersama Desa Padang Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pertanian
4	Pertanian	Bantuan Biji / Kecambah Sawit	Tambahan pembangunan siring dalam Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pertanian
5	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	bantuan jalan usaha tani (puru)	Pal Besi, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
6	Pertanian	Bantuan Biji / Kecambah Sawit	\Program pengadayaan kembali bibit sawit subsidi di Kecamatan Simpangkatis.	Program pengadayaan kembali bibit sawit subsidi di Kecamatan Simpangkatis., Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
7	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Rehabilitasi jalan usaha tani dan nelayan di desa trubus	desa trubus, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pertanian
8	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Pembangunan jalan produksi	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
9	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	banyaknya lobang disepanjang jalan yang mengakibat terjadi adanya genangan air pada saat musim hujan dan membuat masyarakat tidak nyaman saat melakukan aktifitas	Perkebunan Rakyat Desa Kurau Timur Dinas PU, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
10	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	lanjutan pembangunan jalan produksi	desa cambai selatan, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pertanian
11	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Akses petani belum pernah diperbaiki	Rt. 02 dan Rt. 03, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
12	Pertanian	Bantuan Sapi	Bantuan Sapras Kelompok Ternak Sapi (Mesin Pengaduk Pakan, Pencacah Kompos dan Timbangan	Kelompok Tani Air Risi Rt. 02, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
			Ternak)			
13	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	jalan ini masih tergenang air apabila hujan turun	Desa Pinangsebatang, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
14	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	membantu masyarakat dalam penerangan di malam hari	desa puput, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
15	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	mempermudah masyarakat dalam penerangan di malam hari	desa pinang sebatang rt 05, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan penerangan jalan di Rt.06 Kelurahan Dul	Rt. 06, Kelurahan Dul, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
17	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengadaan lampu jalan menuju ke Pantai Tapak Antu	Pantai Tapak Antu, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
18	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengadaan lampu jalan di hampir sebagian Wilayah Desa Beluluk	Desa Beluluk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
19	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan di Gang Mawar (samping Perpustakan dan Arsip Daerah)	Gang Mawar (samping Perpustakan dan Arsip Daerah), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
						an
20	Perhubungan	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Pembuatan rambu-rambu lalu lintas di Rt. 05 atau setiap persimpangan di Jalan Koba,	Rt. 05, di Jalan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Sering terjadi laka lantas	Depan SPBU Desa Pasir Garam RT. 01, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
22	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Pemasangan Lampu jalan pada Rt 04 s/d 06 Desa Padang Baru	padang baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
23	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penerangan lampu jalan dusun Air Itam desa Keretak karena masih banyak nya hutan jalan gelap saat malam ahri	Dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
24	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni 2unit di Desa Perleng	Desa Perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
25	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni 2 unit di Desa Lubuk Pabrik Dusun G	Desa Perleng dan Lubuk Pabrik Dusun G, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
26	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan di Jalan Desa Padang baru Proposal Tahun 2019, Volume 27 Titik.	Jalan Desa Padang baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
27	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	penerangan jalan di RT.04 Desa Baskara Bakti	Desa Baskara Bakti, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
28	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan, 3 unit di jalan Kelurahan Padang mulia	Kelurahan Padang mulia, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
29	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan di Sungai Selan Atas belum merata	Sungai Selan Atas, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
30	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan jalan di RT 01 Desa Jeruk yang belum merata	RT 01 Desa Jeruk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
31	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan jalan di RT 09 Desa Jeruk yang belum merata	RT 09 Desa Jeruk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
32	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	masjid baitul rahim desa perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
33	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	disetiap gang rt 14, rt 15 dan rt 16, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
34	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	persimpangan jalan masuk ke simpang jongkong, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
35	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Belum ada lampu jalan, lingkungan memerlukan penerangan jalan	Jalan Pesantren Rt. 09, Gang Nanas Rt. 09, Gang Manggis Rt. 10, Gang Sawo Rt. 11 dan Rt. 06, Kab. Bangka Tengah	Seluruh Kecamatan	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
36	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	PEMBANGUNAN PAGAR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	Tempat Pemakaman Desa Nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Perhubungan
37	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pengajuan Ruang kelas Baru SDN 04 Desa Padang Baru, Pengajuan ke Dinas Terkait Proposal Sejak Tahun 2019	SDN 04 Desa Padang Baru,, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pendidikan
38	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	pembangunan pagar SDN 7 Lubuk Besar dikarenakan sering terjadi barang di kelas, sekolah sering dijadikan tongkrongan remaja sore maupun malam hari	SDN 7 lubuk besar, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pendidikan
39	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pembuatan rumah sekolah dasar	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pendidikan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
40	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	Pembangunan Pagar sekolah dasar 10 Pangkalan Baru	SD 10 Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pendidikan
41	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	Bantuan Pembangunan Pagar SD di desa kulur ilir	SD desa Kulur ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pendidikan
42	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Ruang kelas SD 4 Koba, tidak pernah di pugar sejak pembangunan awal ditahun 1983	Jl. KH. Wahid Hasyim RT 8, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pendidikan
43	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Rehabilitasi Kelas sebanyak 3 lokal dikarekan kawat dari ruang kelas sudah rusak dan bangunan kelas rusak	SDN 04 Kecamatan Namang, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pendidikan
44	Kesehatan	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Masalah kuota BPJS yang kurang untuk masyarakat Kecamatan Simpangkatis	Kecamatan Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Kesehatan
45	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Peralatan Penunjang Usaha UMKM	Pengajuan bantuan rak baja ringan untuk bibit pot, ukuran 2meter 3 tingkat Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
46	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Usulan solusi pemasaran produksi olahan rumahan	Usulan solusi pemasaran produksi olahan rumahan, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	sering terjadinya banjir dan air masuk kerumah warga	Desa Terak RT 10, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Jalannya Masih Tanah Puruh dan apabila hujan Jalannya Licin	Desa Celuak RT 006-RT 008 Dusun air Kuning, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
						Pertanahan
49	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan menuju Pantai Tapak Antu	Pantai Tapak Antu, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembuatan siring jalan di hampir sebagian Wilayah Desa Beluluk	Desa Beluluk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Perbaikan drainase yang sudah jebol di Rt.08 Berok	Rt.08 Berok, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran siring RT.05/Rw.02, dekat Masjid Al-Muhajirin (dekat rumah H.Adri) Padang Mulia	RT.05/Rw.02, dekat Masjid Al-Muhajirin (dekat rumah H.Adri) Padang Mulia, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
53	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan drainase jalan di RT.13, Kavling Arung Dalam	RT.13, Kavling Arung Dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Peningkatan jalan di Jalan Barito, Kavling Arung Dalam	Jalan Barito, Kavling Arung Dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Mengajukan Pembangunan Siring Kampung Balar	Lingkungan Kampung Balar, Kab. Bangka Tengah	Seluruh Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
56	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer (lanjutan)	Tambahan pembangunan siring dalam Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran sekunder di Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran sekunder Desa Perlang	Desa Perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Pemeliharaan jalan lingkar desa (aspal)	Desa nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	belum ada drainase	RT. 09 Perumahan PNS Kantor Kecamatan Pangkalan baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Mengajukan Pembangunan siring Gang Beta dan Gang Setia By Pass RT.20 Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Gang Beta dan Gang Setia By Pass RT.20 Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pengajuan Siring di Kelurahan Sinar laut	Kelurahan Sinar laut, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan menuju Pondok Pesantren Ibnu Sabil RT 08 Dusun 2 Desa Cambai akses menuju pesantren	Jalan menuju Pondok Pesantren Ibnu Sabil RT 08 Dusun 2 Desa Cambai, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan Talud dan siring primer tempat pemandian umum dusun Air Itam desa Keretak,	tempat pemandian umum dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembuatan drainase (sering)	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer	Pembangunan saluran drainase primer	RT 12, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	agar aliran air dari rt 04 sampai rt 05 yang selama ini teratas saat rawan banjir	Desa Mesu Timur rt 04 dan 05, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer	memperlancar saluran air	desa pedindang, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	desa mangkol rt 06 dan rt 07, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	jalan lingkar desa perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	rt 07 desa nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air aliran kiri dan kanan	jalan baru (depan rumah pak rt 15), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	gang jendral rt 20 by pass (dibagi 2 di kiri dan kanan), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	rt 05 kelurahan arung dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	meperlancar transportasi	jalan madrasah rt 05 rw 01 lubuk pabrik, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	gang setia budi rt 20, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran pembuangan air	gang SDIT rt 01, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	jalan lingkar desa perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
79	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Rehab berat saluran sekunder desa sungaiselan atas rt 04 -07	RT 04 - RT 07, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	lanjutan pengaspalan jalan gang swadaya	gang swadaya, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	jalan yang sebagian telah rusak yang disebabkan oleh air yang menyebabkan genangan air	Dusun Air Kuning DEsa Celuak, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan drainase di RT 16	RT 16, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan Drainase Sekunder Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Jika hujan air meluap ke jalan sehingga membuat aspal menjadi terkikis dan drainase sudah tertutup pasir	Desa Kayu Besi RT. 10, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	dikarnakan bila turun hujan masih di genangi Air	Jalan Ke pesantren Ibnu sabil Desa Cambai, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder		Kelurahan Simpang Perlang	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
87	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola	Pembangunan pagar Lapangan Bola Berok RT.08	Lapangan Bola Berok RT.08, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
88	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sarana Olahraga dan Tempat Berkumpul Khusus untuk Anak-Anak Tingkat SD dan SMP	Pembangunan jogging track lapangan bola	Rt 01, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
89	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapangan Volly	Pengajuan Pembangunan lapangan voli di Desa Baskara Bakti Kec. Namnag berserta tempat duduk dan toilet dengan air bersih	RT. 04 Desa Baskara Bakti, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
90	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pengajuan conblock untuk TPA Nurul Falah Desa Kulur Ilir	TPA Nurul Falah Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Sekretariat Daerah
91	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Renovasi Masjid Ar-Rohim Desa Lampur, Bembeng	Masjid Ar- Rohim Desa Lampur, Bembeng, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
92	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Bantuan Dana Renovasi dan Rehab Mushola Suffiyahwan di Desa Air Mesu Rt 08, Kab. Bangka Tengah	Mushola Suffiyahwan di Desa Air Mesu Rt 08, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Sekretariat Daerah
93	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Renovasi atap vihara Yi Te Desa Lampur.	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
94	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pembangunan Rumah Tahfizh di Desa Perlang proposal sudah disampaikan ke bappeda	Desa Perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Sekretariat Daerah
95	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pembangunan pagar TPA Ar- Rahman ± 45 M X 25 M dan Penambahan ruang guru TPA dusun Air Itam desa Keretak	Dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
96	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	karena sudah rusak jadi harus di perbaiki	mushola al muhajirin desa simpang katis, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
97	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	sound system agar masyarakat terbantu	masjid sholawat zamanul ummah rt 02 dusun pangkal raya, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
98	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	bantuan alat musik hadroh majlis taklim hidayah ummah	desa puput rt 01, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah
99	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Bantuan conblok ukuran 80x40 meter di Masjid Silaturahim Kelurahan Koba	Masjid Silaturahim Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
100	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Pembangunan Vihara Eka Dharma Metta Karunia di Jalan Suka Damai Hayati Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Vihara Eka Dharma Metta Karunia di Jalan Suka Damai Hayati Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Sekretariat Daerah
101	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan	Untuk Membantu Masyarakat Dan Menambah Kegiatan Para Masyarakat jika Ada Acara Yang diselenggarakan di Masjid Atau Desa	Sekretariat Daerah Desa Kurau Timur, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
102	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	memperlancar proses belajar dan mengajar	majelis taklim di rt 15, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
103	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	dikarnakan Pembangunannya Kurang Layak dan kurang efektif	Desa Beruas, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah
104	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	Belum Pernah mendapatkan Bantuan	Majelis Taklim Wanita Baitul Mukmin Simpang Jongkong, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
105	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Mengajukan bantuan tambak ikan di Desa Air Beguruh, Kelurahan Dul	Desa Air Beguruh, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
106	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan	Pengadaan bantuan alat pendingin untuk nelayan agar bisa menyimpan hasil tangkapan	Desa Batu Belubang, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
107	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Pembuatan kolam ikan di Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
108	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan batuan alat tangkap ikan di Kulur Ilir (Pak Bujud, Kelompok Karang Kuala)	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
109	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau	Pengajuan bantuan mesin tempel perahu (Kelompok Karang Kuala) Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
110	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Sentra Nelayan	Pengajuan bantuan mesin perahu nelayan (Sapar/ Nurul)Desa Kulur Ilir	Desa kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
111	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan Bantuan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Terang Bulan Desa Padang Baru	Kelompok Nelayan Terang Bulan Desa Padang Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
112	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan Alat Tangkap Nelayan Cermai Kelurahan Dul, 10 Orang Anggota	Nelayan Cermai Kelurahan Dul,, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
113	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan Alat jaring Nelayan Kelompok Cempaka Laut, 11 Orang Nelayan	Nelayan Kelompok Cempaka Laut, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
114	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Kelompok Bintang Laut, 10 Orang Anggota	Nelayan Kelompok Bintang Laut, 10 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
115	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan alat tangkap ikan air tawar dan mesin untuk Kelompok Nelayan Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perikanan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	PD Tujuan
116	Kelautan dan Perikanan	Studi Replikasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tambak ikan yang kurang berjalan atau berproduksi di Kecamatan Simpangkatis.	Kecamatan Simpangkatis., Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perikanan
117	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Permohonan bantuan untuk nelayan laut dan sungai	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
118	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Alat Yang Digunakan Untuk Menangkap udang Dan Untuk Membantu Masyarakat Desa Untuk Menambah Hasil Pangan	Desa Kurau Dinas Kelautan Perikanan, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
119	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	radio amatir penunjang prasarana nelayan tangkap	Kurau Timur, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
120	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	meningkatkan kesejahteraan nelayan	Dusun Berikat Desa Beriga, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
121	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	meningkatkan kesejahteraan nelayan	desa perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan

2.5. Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujuhkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indeks inovasi daerah diharapkan dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah, ada 152 (seratus lima puluh dua) inovasi yang di

Perbupkan. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kinerja serta kemudahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat, juga merupakan salah satu indikator penilaian Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021- 2026, salah satunya adalah indeks inovasi daerah.

2.5.1. Keikutsertaan Inovasi dalam IGA Tahun 2021

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”.

Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan secara maksimal.

Keikut sertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam kegiatan Innovative Government Award (IGA) adalah cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pelayanan kepada masyarakatnya. Sebanyak 17 (tujuh belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh 11 perangkat daerah, diikutsertakan dalam kegiatan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2021. Inovasi tersebut diajukan karena telah sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti lomba inovasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Tabel II.167

**Inovasi yang Mengikuti Lomba *Innovative Government Award (IGA)*
Tahun 2021**

No.	Judul Inovasi	PD	Uraian
1	Natak Dusun (Pelayanan Administrasi Kecamatan Masuk Dusun)	Kecamatan Simpang Katis	Kegiatan yang membantu masyarakat dalam pembuatan akta kematian, Perubahan KK dan Perubahan KTP jika terjadi peristiwa Kematian dengan system jemput bola dikemas dalam 1 (satu) Paket yang melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Petugas kecamatan turun kerumah warga mengambil persyaratan kemudian ke desa, ke kecamatan dan membawa langsung ke Dinas Dukcapil untuk melakukan penerbitan Akta Kematian, Perubahan KK dan Perubahan KTP dalam jangka waktu 2 hari.
2	SI PAKU BESI (Sistem Informasi Tukang Padat Karya Unggul Bersertifikat)	DPUPRP	Sistem Informasi Tukang Padat Karya Unggul Bersertifikasi (Si Paku Besi) adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat saja terhadap tenaga terampil konstruksi Bangka Tengah dan memberikan peluang kesempatan kerja kepada tenaga terampil konstruksi itu sendiri untuk berkarya secara luas sehingga tenaga kerja konstruksi dapat bersaing dimasyarakat luas.
3	GAHARU (Gerakan Hati Nurani Guru)	SD 4 Koba	Inovasi yang diterapkan di SD 4 Koba dalam mendukung Pendidikan inklusif. Gerakan ini menekankan pada pendekatan Cita, Kasih, dan Ketulusan guru-guru dalam mendidik, mendampingi dan mengajar anak-anak yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus secara bersamaan..
4	MANA BU SURYANI (Makan Nasi Buah Sayur dan Protein Hewani)	SD 4 Koba	Berdasarkan dari pola makan sehat, dan kejadian di sekolah yang siswanya banyak yang sakit, kurang gizi, dan saat kegiatan upacara banyak yang pingsan, SDN 4 Koba dalam mengatasi hal tersebut memasukkan pola makanan sehat itu ke dalam program sekolah yaitu Makan Sayur Buah dan Susu. Program ini diharapkan dalam tiap minggunya siswa memiliki dan merasakan makanan sehat tersebut yang belum tentu didapatkannya di rumah karena beberapa faktor seperti kemiskinan. Program ini diawali dengan muatan lokal SDN 4 Koba yaitu satu siswa menanam satu sayuran di sekolah, dilanjutkan dengan hari Senin makan sayur, hari Jumat

No.	Judul Inovasi	PD	Uraian
			makan buah, dan hari Sabtu minum susu.
5	Aplikasi KISANAK (Kita Sayangi Anak)	DPPKBPPP	Inovasi aplikasi KISANAK hadir dengan keunggulan melalui media gadget yang merupakan familiar bagi anak dan masyarakat, dapat diunduh secara bebas di play store serta berbasis google map untuk lokasi. Aplikasi KISANAK mempunyai fitur edukasi, sosialisasi, konseling serta lapor. Terutama di masa pandemik covid19 yang membatasi tatap muka, maka dengan aplikasi KISANAK membantu orang tua, keluarga, anak dan masyarakat untuk mencari informasi, konseling online (gratis) serta dapat melaporkan apabila membutuhkan pertolongan cepat. Fitur yang ada di dalam aplikasi KISANAK ada fitur Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Fitur Sekolah Ramah Anak, Fitur Forum Anak (sebagai tempat berdiskusi Forum Anak) serta PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) serta fitur konsultasi yang dapat digunakan untuk masyarakat, anak dan orang tua berkonsultasi tentang permasalahan yang dihadapi yang akan dibalas oleh tenaga ahli seperti konselor puspaga dan psikolog serta tombol LAPOR yang dapat digunakan apabila korban membutuhkan pertolongan dengan cepat. Aplikasi KISANAK ini berbasis MAP Google sehingga dapat diketahui lokasi dimana korban berada atau masyarakat yang melaporkan kejadian.
6	SIPELAWAN (Sistem Presensi Elektronik Selawang Segantang)	BKPSDMD	Adanya pandemi penyebaran virus COVID-19 seperti di lansir di media-media salah satunya adalah melalui kontak dengan benda yang sering tersentuh, oleh karenanya mesin fingerprint tidak efektif untuk dilaksanakan dimasa pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengembangan sistem presensi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dikelola secara manual menjadi sistem secara online dan digital yaitu bernama "Sipelawan" (Sistem Presensi Elektronik Selawang Segantang). dengan adanya "Sipelawan" dapat memudahkan seluruh pegawai dalam melakukan presensi sehingga terhindar adanya pemotongan TPP (Tambah Penghasilan Pegawai) serta dapat memantau langsung kinerja bawahan.

No.	Judul Inovasi	PD	Uraian
7	SIPPAHIT (Sistem Penyuluhan Penggunaan Agens Hayati untuk Tanaman)	Dinas Pangan	Kegiatan inovasi SIPPAHIT merupakan kegiatan penyuluhan pertanian oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah binaannya. Kegiatan Inovasi SIPPAHIT ini mengharuskan para PPL Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada para petani (pelaku utama dan pelaku usaha) untuk melakukan budidaya tanaman secara organik dari bahan-bahan disekitar sehingga bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produksi secara maksimal serta pendapatan yang meningkat. Inovasi SIPPAHIT ini dituangkan dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) laporan bulanan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setiap bulannya.
8	SIPINDANG (Sistem Pindah Datang)	Dindukcapil	Banyak permasalahan yang timbul dari penduduk pendatang tersebut misalnya terjadi kerusuhan yang melibatkan penduduk tersebut, bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi bagi Pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu suatu inovasi pelayanan yaitu Sistem Pindah Datang Penduduk “SIPINDANG” program ini memfasilitasi perpindahan data dari daerah asal bagi penduduk luar yang tinggal di Kabupaten Bangka Tengah lebih dari 3 (tiga) tahun bermaksud menjadi penduduk warga Bangka Tengah secara gratis.
9	SI RAWIT JEMPOL (Silase Ransum Komplit Pelepas Sawit Berbasis Kebijakan Pemanfaatan Bahan Pakan Lokal)	Dinas Pertanian	Adanya permasalahan yang dihadapi oleh peternak terkait dengan keterbatasan hijauan pada musim kemarau dan dengan potensi hasil samping perkebunan kelapa sawit sebagai pakan inkonvensional mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah untuk membantu memberikan sentuhan teknologi pada pengolahan pakan ternak dengan memanfaatkan bahan limbah lokal yang dibanding dengan “SI RAWIT JEMPOL” atau silase ransum komplit pelepas sawit berbasis kebijakan pemanfaatan bahan pakan lokal. Si Rawit Jempol meringankan peternak karena metode fermentasi yang diterapkan hanya membutuhkan biaya yang murah, meningkatkan palatabilitas (kesukaan) terhadap

No.	Judul Inovasi	PD	Uraian
			pakan sehingga dapat meningkatkan konsumsi ternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas ternak.
10	GETAS RASA ASIN (Gerakan Berantas Rabies Bersama Dengan AKtif Vaksin)	Dinas Pertanian	Inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aware terhadap bahaya penyakit rabies. Dinas Pertanian melibatkan perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi aktif warganya dalam memerangi penyakit rabies bersama-sama.
11	MIAK HEBAT (Minimalisasi Biaya Usaha Tani Cabe Organik, Lebih Hemat, Lebih Banyak dan Lebih Berlimpah)	Dinas Pertanian	MI'AK HEBAT merupakan inovasi yang dapat mengehemat biaya produksi khususnya penggunaan pupuk kimia sebelum dan setelah menerapkan MI'AK HEBAT, Jumlah kelompoktani yang menerapkan MI'AK HEBAT serta kendala dan permasalahan yang dihadapi kelompoktani dalam aplikasi inovasi MI'AK HEBAT di lapangan. Selain itu , produksi dan produktivitas tanaman selalu dievaluasi guna menghitung dampak penerapan MI'AK HEBAT oleh kelompoktani binaan.
12	SIPEJALAN (Sistem Informasi Perlengkapan Jalan)	Diperkimhub	SiPejalan adalah sistem pendataan perlengkapan jalan secara spasial yang terintegrasi dengan database milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Database ini terhubung dengan perangkat Android yang dapat merekam posisi dan kondisi penerangan jalan umum di lokasinya masing-masing. Melalui sistem dan aplikasi ini, data-data perlengkapan jalan umum terutama penerangan jalan umum dapat tersimpan dengan baik. Diharapkan pengelolaan penerangan jalan umum berupa pemeliharaan, perubahan aset, dan analisis kebutuhan selanjutnya dapat dilakukan secara baik melalui adanya inovasi SiPejalan ini. Pemeliharaan akan lebih mudah karena aplikasi ini dapat mengakses posisi penerangan jalan umum, kondisi lampu dan tiang, jenis lampu, foto penerangan jalan umum, serta dapat mengetahui status lainnya.
13	NGUKIR (Ingat Uji KIR), Si Pintar Pengingat Jadwal Pengujian	Diperkimhub	Inovasi untuk mengingatkan pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dalam memperpanjang masa berlaku KIR nya yang akan memasuki waktu tenggang setiap bulannya melalui notifikasi SMS.
14	SIPENTUKIR (Sistem Pembayaran Non Tunai KIR)	Diperkimhub	Sipentukir adalah suatu metode pembayaran non tunai yang dapat menunjang kebutuhan akan penyelesaian masalah, yakni metode

No.	Judul Inovasi	PD	Uraian
			pembayaran dari konsumen langsung menuju rekening Kas Daerah tanpa ada perantara. Dengan adanya Sipentukir, pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor akan lebih mudah, cepat dan terbuka.
15	SAKIR (Sistem Administrasi KIR)	Diperkimhub	Sakir suatu aplikasi sistem informasi managemen pengujian kendaraan bermotor yang dapat menunjang kebutuhan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Dalam penerapan yang berisi pendaftaran, validasi, pengukuran, pemeriksaan, registrasi dan hasil uji kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem digital dan elektronik. Dimana penginputan dimensi kendaraan bermotor dengan menggunakan sistem administrasi uji kir lebih cepat dan aman dalam pengoperasianya karena dengan adanya sistem yang mudah dilakukan maka data kendaraan dengan cepat akan tersimpan.
10	SiKetawai (Sistem Informasi Kinerja Tahunan Pegawai)	BKPSDMD	SiKetawai merupakan aplikasi/system yang berbasis IT berupa website yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pengukuran kinerja pegawai terutama beban kerja. Dengan aplikasi ini pegawai dapat mengumpulkan laporan harian tanpa harus bertatap muka dengan atasan, atasan juga dapat melakukan penilaian laporan via aplikasi, dan data hasil presensi dapat langsung terintegrasi dengan SiKetawai sehingga tidak perlu penginputan ulang, hasil akhirnya yaitu hasil rekapan TPP pegawai.
17	SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan)	Dinas Perikanan	Inovasi Teknologi Informasi yang dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan penangkapan ikan. Sidolpin merupakan penentuan daerah/lokasi potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh dengan menganalisis data parameter yang hasilnya berupa peta dengan koordinat yang dapat dituju oleh nelayan yang ada di perairan laut Kabupaten Bangka Tengah.

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, 2021

2.5.2. Peringkat Kabupaten Bangka Tengah di IGA Tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah berada pada peringkat 51, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu berada pada peringkat 77, dengan skor indeks 54,39 kategori Inovatif dan peringkat ke 1 (satu) tingkat Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah melalui *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2021 dilaksanakan dengan metode penilaian yang berbeda dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 penilaian IGA dilakukan dengan mengakumulasikan total skor indikator inovasi yang diinput tanpa menilai kualitas indikator inovasi tersebut. Sedangkan untuk penilaian IGA tahun 2021 dilakukan dengan menghitung akumulasi total skor indikator terhadap total inovasi yang diinput, sehingga untuk penilaian tahun 2021 perlu memperhatikan kualitas indikator dari setiap inovasi yang dinput. Penilaian tahun 2021 menggunakan metode skoring yang juga berbeda dengan tahun 2020 yaitu dengan sistem skoring 0-100. Ditampilkan dalam bentuk Tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel II.168.

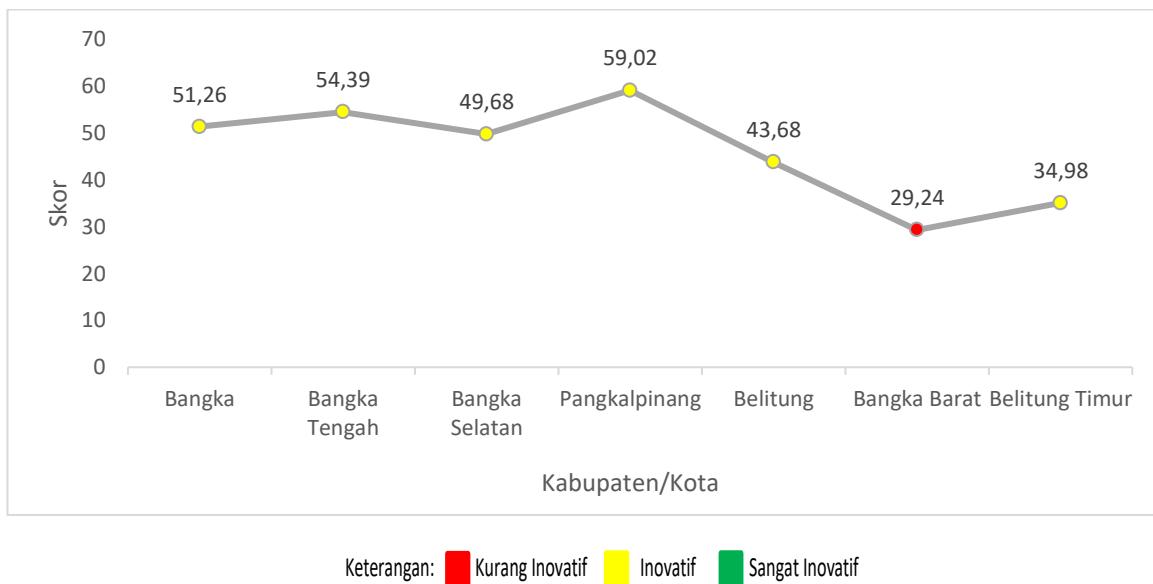
Indeks Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Kota/Kabupaten	Skor Indeks	Peringkat ke- Se- Indonesia	Kategori
1.	Kota Pangkal Pinang	59,02	15 di tingkat Kota	Inovatif
2.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	57,12	11 di tingkat Provinsi	Inovatif
3.	Kab. Bangka Tengah	54,39	51 di tingkat Kabupaten	Inovatif
4.	Kab. Bangka	51,29	82 di tingkat Kabupaten	Inovatif
5.	Kab. Bangka Selatan	49,68	97 di tingkat Kabupaten	Inovatif
6.	Kab. Belitung	43,68	156 di tingkat Kabupaten	Inovatif
7.	Kab. Belitung Timur	34,98	224 di tingkat Kabupaten	Inovatif
8.	Kab. Bangka Barat	29,24	255 di tingkat Kabupaten	Kurang Inovatif

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021

Gambar II.33

Grafik Indeks Inovasi Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021

2.5.3. Inovasi Sektor Unggulan

Seiring dengan melajunya Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, mengedepankan inovasi dengan pemberdayaan sumber daya alam yang ada serta pemanfaatan Iptek sangatlah berperan penting, karena itu inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah, beberapa inovasi yang menjadi potensi peningkatan ekonomi masyarakat dan menjadi sektor unggulan daerah khususnya di Kabupaten Bangka Tengah antara lain sebagai berikut :

1) Kartu GPS (Gerakan Pedet Sehat)

Kartu GPS (Gerakan Pedet Sehat) adalah kartu yang dibuat sebagai pedoman pengendalian penyakit pada anak sapi atau pedet untuk mempermudah peternak dalam mengingat jadwal pemberian vitamin, obat cacing, pakan tambahan

dan kontrol dokter hewan. Sebelum adanya Kartu GPS ini tidak pernah ada perhatian khusus yang diberikan peternak kepada pedet yang dipelihara, akibatnya banyak kasus kematian pedet, yang secara tidak langsung merugikan ekonomi yang sangat nyata bagi peternak sapi khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Banyaknya pedet yang tidak dipelihara dengan baik oleh para peternak, sehingga banyak pedet yang mengalami malnutrisi, banyaknya kasus kematian pedet, pertumbuhan kerdil, efek kedepannya pedet akan menjadi sapi dewasa yang kurang produktif, diantaranya pertambahan berat badannya rendah, kesulitan untuk bunting serta penurunan kualitas hasil anakan selajutnya.

Hal ini membuat keprihatinan karena sektor peternakan adalah salah satu penggerak roda ekonomi yang patut diperhitungkan pengembangannya di Kabupaten Bangka Tengah, sementara Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 70% kebutuhan sapi potongnya masih di suplai dari provinsi lain seperti Lampung dan Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut diatas aparatur sipil negara di Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, berinisiatif untuk merubah pola peternak agar lebih peduli dan paham program pengendalian penyakit dan perkembangan pedetnya.

Memberikan edukasi kepada peternak tentang ilmu kesehatan hewan dan peternakan secara modern dengan memperhatikan kebutuhan ternak dan program pengendalian penyakit, merubah pola pikir dan cara beternak yang masih konvensional dengan penerapan program pengendalian penyakit yang sudah sesuai dengan kondisi alam di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan adanya inovasi kartu GPS (Gerakan Pedet Sehat) sangat membantu bagi peternak sapi yang ada di Bangka Tengah, sosialisasi-sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada peternak tentang penggunaan kartu ini, penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami serta praktik bersama dengan peternak cara penggunaan kartu adalah langkah awal peternak untuk dapat paham pentingnya pemeliharaan yang tepat pada pedet, sehingga dapat menghasilkan bibit ternak yang berkualitas, dapat mendukung pengembangan ternak sapi khususnya di Kabupaten Bangka Tengah, terciptanya swadaya dalam mencukupi kebutuhan sapi potong serta mendukung pengembangan dan peningkatan populasi ternak sapi, meningkatnya nilai ekonomi atau nilai ternak sapi, bibit sapi yang sehat mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding ternak yang kerdil dan berpenyakit, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama peternak di Kabupaten Bangka Tengah.

2) Bersama Dana Bergulir Masyarakat Bangka Tengah dan UMKM Semakin Sejahtera (Bedambus)

Bersama Dana Bergulir Masyarakat Bangka Tengah dan UMKM Semakin Sejahtera (Bedambus) adalah : Suatu program dana bergulir yang diinisiasi oleh Dinas PERINDAGKOM-UKM dalam upaya memberikan solusi permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga dalam pengembangan usahanya tidak dimanfaatkan oleh para rentenir. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, salah satunya adalah kredit macet dikarenakan persepsi para pelaku UMKM bahwa setiap dana bergulir yang diserahkan oleh pemerintah daerah maupun pusat adalah **Hibah**, sehingga dana bergulir tersebut tidak perlu untuk di cicil, masih sulitnya untuk memasarkan produk-produknya karena bentuk kerjasama kemitraan dengan usaha-usaha kelas menengah yang belum maksimal serta belum adanya **Bank Kabel** yaitu pelaku UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, banyak yang tidak mempunyai anggungan berupa surat tanah, sertifikat rumah untuk jaminan meminjam uang ke lembaga keuangan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui perangkat daerah terkait yang dilaksanakan melalui kegiatan dana bergulir program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha mikro kecil, menengah dan koperasi bekerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung bertujuan untuk memberikan kemudahan dan memperkuat UMKM yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, dibentuknya tim pendamping dana bergulir dan penyuluhan dari perangkat daerah terkait, adanya kerjasama dengan pihak desa maupun kelurahan se Kabupaten Bangka Tengah untuk kemudahan dalam menerbitkan surat rekomendasi tempat domisili dan pembuatan keterangan usaha, serta camat se Bangka Tengah sebagai pembina para UMKM yang mengajukan pinjaman

Bentuk Pelayanan publik kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh Dinas PERINDAGKOM-UKM bekerjasama dengan Perbankan merupakan pemberian pelayanan dan penurunan margin pinjaman yang rendah yaitu sebesar 6% pertahun, dengan menggunakan sistem canelling dari pihak Bank sebagai eksekuting seperti Standar Oprasional Proses (SOP), sehingga dari sistem yang diterapkan dapat memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik ini di lihat dari

realisasi pencairan dan dapat dipantau juga tingkat pengembalian pinjaman, macet atau lancar. Berdasarkan data dan jumlah UMKM yang sudah terealisasi sebanyak 728 pelaku usaha dengan modal awal sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) meningkat dengan akumulasi dana yang disalurkan sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah). Dengan adanya inovasi ini diharapkan akan munculnya para pelaku UMKM-UMKM yang kuat, UMKM baru dan UMKM melenial yang bertujuan bisa mengurangi tingkat angka pengangguran khususnya di Kabupaten Bangka Tengah.

3) Ubi Mentega (Upaya Bersama Ibu-ibu Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga)

Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah kepulauan yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah masih didominasi oleh konsumsi karbohidrat dan protein dengan skor pola pangan harapan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 81,4% masih belum ideal, dan belum sesuai dengan kaidah pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), disamping itu tingkat ketergantungan bahan pangan pokok (beras) dari luar daerah sangat tinggi yaitu 96,99%. Sulitnya merubah **mind set** masyarakat (masih adanya paradigma masyarakat bahwa makan yang penting kenyang), untuk hidup sehat harus didukung dengan pola hidup dan konsumsi yang baik, banyak lahan disekitar tempat tinggal yang tidak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan lahan yang tidak subur, tingkat pendidikan yang rendah sehingga minimnya pengetahuan ibu-ibu rumah tangga mengenai budidaya tanaman pangan dan hortikultura disamping rendahnya kesadaran ibu rumah tangga tentang betapa pentingnya menyajikan makanan yang sehat untuk keluarga. Adanya beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Tengah termasuk dalam wilayah rentan rawan pangan karena akses yang kurang baik dan masuk kedalam wilayah stunting.

Dari permasalahan-permasalahan yang dialami, adanya inisiasi Dinas Pangan untuk membuat suatu inovasi dengan istilah **UBI MENTEGA** (Upaya Bersama Ibu-ibu Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga) dengan memberdayakan kaum ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani dilakukan sosialisasi-sosialisasi, edukasi penyuluhan-penyuluhan tentang betapa pentingnya pola hidup sehat, serta memanfaatkan pekarangan dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi keluarga,

pekarangan memiliki potensi yang besar sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dilihat dari segi fungsinya juga bisa sebagai lahan yang berproduksi, dengan ada pemanfaatan lahan pekarangan dalam budidaya tanaman hortikultura hasil yang didapat selain untuk konsumi juga bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga serta meningkatnya diverifikasi pangan lokal sehingga menurunnya konsumsi karbohidrat (beras) terutama di wilayah rentang rawan pangan.

4) CEHATI (Cemilan Enak Sehat Bergizi)

Cemilan enak sehat bergizi disingkat CEHATI adalah inovasi yang diprakarsai oleh SDN 4 Koba, Cehati berawal dari keharusan anak-anak membawa bekal nasi ke sekolah disertai dengan sayuran. Ketika dilakukan cek bekal anak-anak dari bekal makanan yang dibawah tidak adanya sayur. Ketika ditanya kenapa mereka makan tidak pakai sayur ? 100% jawaban siswa mereka tidak suka makan sayur. Dampak lain juga ditemukan pada siswa akibat tidak suka makan sayur semangat belajar siswa rendah, lesu, tidak semangat serta ngantuk dan sering banyaknya siswa tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, dan menjadi permasalahan besar bagi sekolah terutama sekolah-sekolah yang berlokasi di perkotaan.

Dari beberapa kasus diatas dilakukanlah musyawarah sekolah dengan melibatkan orang tua siswa dan ibu-ibu paguyuban untuk memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam bayam brazil dan dimasukan dalam mata pelajaran muatan lokal, yang diolah menjadi camilan keripik sayur dengan melibatkan dan bekerjasama antara guru, orang tua siswa dan paguyuban. Dengan adanya pola cara konsumsi sayur yang dibuat untuk cemilan keripik sayur 100% siswa di sekolah menjadi suka makan sayur, tidak ngantuk di kelas, semangat dan tidak lesu, produksi cemilan keripik bayam brazil (cehati) mulai ditingkatkan, bekerjasama dengan Dinas PERINDAGKOM-UKM, pihak sekolah mendapatkan penyuluhan, pendampingan dan pelatihan-pelatihan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional, terkait dengan mekanisme produksi, penjualan suatu produk bagaimana kemasan yang baik, takaran gizi dari produk, izin produksi dan lain sebagainya.

Produksi cemilan enak sehat bergizi disingkat (cehati) mulai banyak digemari bukan hanya dilingkungan sekolah saja, permintaan pasar juga semakin

tinggi baik perminta pasar lokal, permintaan dari kabupaten dan provinsi luar maupun dari negara tetangga seperti Malaysia mulai berdatangan. Nilai ekonomi yang didapat dari inovasi ini adalah, adanya tambahan pendapatan penghasilan ibu-ibu rumah tangga usia produktif, orang tua siswa, paguyuban sebagai tenaga kerja dalam hal pembuatan Cehati. Kedua adalah dari ketersediaan bahan baku yang ada di sekolah ketika belum masa panen, sementara permintaan tinggi, bagaimana mencari ketersedian bahan baku, disepakatilah bersama dengan orang tua siswa, guru, paguyuban dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah untuk menanam sayur bayam brazil dipekarangan rumah dan kebun masing-masing dengan bibit yang sudah disiapkan pihak sekolah secara gratis., ketika masa panen sayur dijual kembali kepada pihak sekolah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kedua subbab ini saling berkaitan dimana arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten yang akan memengaruhi aspek pendanaan daerah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 periode keempat dan diselaraskan dengan RPJM Nasional tahun 2020-2024 serta RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Sub-bab arah kebijakan ekonomi daerah ini kemudian akan terbagi kedalam kondisi ekonomi daerah tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023 serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023. Kondisi ekonomi daerah tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023 akan memuat data-data statistik perekonomian makro di Kabupaten Bangka Tengah eksisting beserta hasil proyeksi. Sementara subbab berikutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 akan menjabarkan kondisi internal dan eksternal untuk kemudian dianalisis dan dijadikan pertimbangan dalam memproyeksikan keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2023.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap laju perekonomiannya. Arah kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah yang bersumber pada RPJPD Tahun 2005-2025 periode keempat meliputi:

1. Ketenagakerjaan
 - a) Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja

- b) Peningkatan Keterampilan, Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing;
 - c) Penggunaan tenaga kerja lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan;
2. Pangan
- a) Penguatan Ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi;
 - b) Peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi;
 - c) Peningkatan mutu dan keamanan pangan daerah
3. Pertanian
- a) Peningkatan SDM petani, peternak, petugas perkebunan dan kelembagaan petani
 - b) Pengembangan perkebunan rakyat yang berorientasi agribisnis, efisien, dan produktif
 - c) Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian.
 - d) Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi pertanian dan peternakan
 - e) Perbaikan mutu olahan hasil dengan teknologi tepat guna
 - f) Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian
 - g) Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman
 - h) Pengembangan pola pengelolaan sumber daya lahan untuk perkebunan yang berkelanjutan
 - i) Peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas mutu dan kualitas serta perluasan areal pertanian
 - j) Peningkatan populasi hewan ternak
 - k) Peningkatan agribisnis peternakan
4. Kelautan dan Perikanan
- a) Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan peningkatan prasarana sarana pendukung produksi;
 - b) Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan;
 - c) Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian;
5. Perdagangan
- a) Peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
 - b) Peningkatan jumlah sentra perdagangan produk unggulan;
 - c) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Pasar Modern;

- d) Peningkatan pemasukan PAD sektor retribusi dan pajak-pajak daerah lainnya
- 6. Perindustrian
 - a) Pengembangan kawasan industri;
 - b) Peningkatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan sektor industri
 - c) Pengembangan sistem promosi dan informasi hasil industri
 - d) Pemberdayaan institusi pendukung mekanisme pasar barang dan jasa;
 - e) Optimalisasi pembinaan terhadap industri kecil dan kerajinan
- 7. Koperasi dan UMKM
 - a) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM
 - b) Pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian;
 - c) Pengembangan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan badan usaha milik negara serta antarusaha milik negara serta antarusaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi
- 8. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Pengembangan energi baru terbarukan;
 - b) Peningkatan prasarana dan sarana pendukung penyediaan listrik;
- 9. Pariwisata
 - a) Peningkatan dan pengembangan pariwisata daerah;
 - b) Perluasan jaringan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - c) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pariwisata;
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat di daerah tujuan wisata
- 10. Penanaman Modal
 - a) Peningkatan iklim investasi dan promosi investasi;
 - b) Pemberian kemudahan perijinan investasi;
 - c) Perluasan kerjasama dengan swasta;
 - d) Adanya jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum.

Arah kebijakan ekonomi tahun 2023 ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta penurunan angka stunting.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2023

Situasi ekonomi global dan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran covid-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat *unprecedented shock* dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan tahun 2021 masih dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan kendala dan tantangan dalam pencapaian target-target pembangunan. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditunjukkan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian Covid-19 juga ditunjukkan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah. Pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan *refocusing* anggaran, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama pada kegiatan fisik, dan dilakukannya penyesuaian target pembangunan dalam RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021. Pengaruh pandemi COVID-19 ini tampak sangat nyata pada pencapaian sasaran PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang kuat, Indonesia diprakirakan akan masuk kembali ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005– 2025 yang menargetkan perekonomian Indonesia masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income pada tahun 2025. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut didukung oleh pengendalian Covid-19 yang baik melalui perluasan program vaksinasi, serta stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. Pemulihan ekonomi yang kuat juga sejalan dengan membaiknya indikator dan sistem kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Perkiraan vaksinasi yang telah mencapai herd immunity pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Kondisi tersebut merupakan fondasi yang baik bagi pemerintah untuk dapat melanjutkan agenda transformasi ekonomi dalam rangka mengembalikan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 maupun dalam Visi Indonesia 2045. Namun, dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan khususnya bagi pembangunan sosial. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan belajar dan mengajar terhambat. Hambatan ini harus segera diperbaiki untuk menghindari dampak jangka panjang yang

dapat menurunkan produktivitas perekonomian. Lebih lanjut, pasar tenaga kerja Indonesia juga terdampak cukup signifikan oleh pandemi Covid-19 yang membawa beberapa perubahan. Retooling dan reskilling pekerja sesuai dengan tren perkembangan pascapandemi perlu dilakukan agar daya saing tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif. Di sisi lain, urgensi penanganan perubahan iklim terus meningkat untuk menciptakan suatu perubahan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, maka upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan. Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui peningkatan produktivitas tersebut, perekonomian pada tahun 2023 diharapkan akan terakselerasi sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Upaya transformasi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tantangan baru pascapandemi.

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menggambarkan nilai tambah bruto/nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari perkembangan selama 3 tahun terakhir. Berbagai strategi dan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan mendorong sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri jasa akan memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif. Tabel III.1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)							Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**			
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,87	0,66	6,12	6,09	9,67	0,11	6,08	6,59	
B Pertambangan dan Penggalian	-4,10	-2,42	-3,86	5,59	-7,88	5,52	13,08	7,00	
C Industri Pengolahan	2,60	6,59	-2,71	-44,91	0,98	4,59	7,28	7,69	
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,76	5,67	6,80	20,05	7,81	12,50	10,00	0,50	
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,81	8,23	-3,79	4,17	2,63	4,43	5,00	-4,29	
F Konstruksi	7,06	3,85	4,57	9,28	-0,29	4,27	5,00	-4,29	
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,34	7,48	5,28	4,74	-4,10	5,39	5,00	5,00	
H Transportasi dan Pergudangan	4,42	6,78	8,03	1,28	-24,58	7,16	6,93	7,85	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,12	4,98	6,07	9,25	-2,05	9,92	19,78	9,63	
J Informasi dan Komunikasi	6,20	7,52	11,98	14,52	17,88	8,57	8,66	0,60	
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	2,08	1,40	9,16	3,45	5,49	6,76	5,32	
L Real Estat	2,11	3,64	3,95	4,98	4,73	6,16	13,03	7,00	
M,N Jasa Perusahaan	0,22	3,31	5,19	3,98	-9,06	5,24	9,70	5,00	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,01	3,84	8,78	10,95	-3,66	5,29	10,01	5,00	
R,S,T,U Jasa lainnya	5,17	5,93	6,91	8,97	-2,45	2,94	9,18	5,00	
Laju Pertumbuhan PDRB	3,05	3,46	3,42	1,21	-2,86	4,76	4,83	5,18	

Catatan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat sementara

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka 2020, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 ekonomi Kabupaten Bangka Tengah terus bertumbuh terlihat dari angka laju pertumbuhannya menunjukkan angka positif, dan meningkat hingga 2018. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi menurun dari 3,46 % di tahun 2017 turun menjadi 3,42 % di tahun 2018 dan terus turun di tahun 2019 menjadi 1,21 %. Penurunan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan terjadi di tahun 2019 dikarenakan berhenti beroperasinya salah satu industri pengolahan logam (smelter) yang disebabkan adanya regulasi dari Pemerintah Pusat yang memicu berhenti beroperasinya salah satu perusahaan pengolahan logam yang terjadi hampir merata se-pulau Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 yang terjadi ditan 2020 juga, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dipaksa mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi sehingga terjadi penurunan angka PDRB ADHK menjadi lebih kecil

dibandingkan tahun 2019 sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi minus diangka 2,87%. Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak angka laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB ADHK mengalami peningkatan cukup tinggi dengan tumbuh positif sebesar 4,76%, Pertumbuhan tertinggi pada sub sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 13,17%, pengadaan listrik dan gas 12,50%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,92%.

Perkiraan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 4,83 % dari PDRB ADHK sebesar 6.276.959 juta rupiah yang menggambarkan kenaikan produksi suatu daerah. Di tahun 2022 perkiraan mengalami peningkatan tumbuh pada sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 19,78 %, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 18,90 %, pertambangan dan penggalian 13,08 %, serta real estate sebesar 13,03 %.

Pada tahun 2023 proyeksi pertumbuhan ekonomi pada RPJMD tahun 2021-2026 memang akan mengalami peningkatan yang diperkirakan yaitu sebesar 3,33%, seraya kondisi perekonomian yang semakin membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,76% dan telah melampaui dari target RPJMD sehingga dalam proyeksi RKPD di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi akan lebih membaik, yaitu diprediksikan sebesar 5,18%, yang ditunjang dari beberapa aspek dan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Bangka tengah sebagai berikut :

- a) Semakin menurunnya penyebaran covid-19
- b) Panen raya sawit masyarakat pasca reflenting sawit tahun 2019
- c) bertahannya harga komoditi-komoditi ekspor (Timah, CPO, karet, lada)
- d) pertumbuhan kinerja pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan pertanian
- e) peningkatan investasi (vaname, perkebunan, pasar modern)
- f) kebijakan penerbangan
- g) meningkatnya daya beli masyarakat
- h) dan persiapan rencana pemilihan umum serentak pada tahun 2024.

PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah

**Tabel III.2
PDRB Perkapita Tahun 2018-2021 dan Proyeksi 2022-2023**

Indikator	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	192.429	196.196	198.946	201.861	198.458	201.861

Indikator	2018	2019	2020	2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB ADHB	8.213.317	8.566.896	8.443.200	9.332.800	9.279.667	9.760.271
Pendapatan Perkapita / PDRB Perkapita (ADHB)	42.682.300	44.809.900	42.545.500	46.234.062	46.758.848**	48.599.664**
Pendapatan Perkapita / PDRB Perkapita (ADHK)	30.207.000	30.772.100	28.831.500	29.658.523	29.664.821**	29.951.773**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan di suatu wilayah yang dapat terbandingkan dengan wilayah lain. Adanya kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang lebih baik. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tabel III.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHB sebesar 42.682.300 juta rupiah, di tahun 2019 mencapai 44.809.900 juta rupiah. Sementara itu, di tahun 2020 PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan sebesar 42.545.500 juta rupiah yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Namun demikian, di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 46.234.062 juta rupiah atau tumbuh sebesar 4,76 persen.

Pada PDRB per kapita ADHB tahun 2022 di proyeksikan sebesar 46.758.848 juta rupiah atau tumbuh sebesar 1,14 persen, dimana perkembangan tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif dikarenakan dipengaruhi oleh sektor produksi lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar secara turut berturut, di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan, sektor pertambangan dan pengalian, sektor akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan; pertanahan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor Jasa pendidikan, sektor industri pengolahan dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh dengan positif. Pada tahun 2023 akan mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 48.599.664 juta rupiah atau tumbuh sebesar 3,94 persen, perkembangan ini diperkirakan karena peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perkembangan ini diprediksikan tumbuh didorong terutama oleh tingginya kinerja sektor eksternal yang terus berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang kuat sehingga

turut mendorong peningkatan volume perdagangan global termasuk ekspor barang dan jasa komoditas strategis Bangka Tengah. Disamping itu konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif juga menjadi pendorong peningkatan Lapangan Usaha (LU) utama di Bangka Tengah. Aktifitas usaha pariwisata yang tercermin dari LU penyediaan akomodasi dan makanan, serta LU pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang akan datang. LU industri pengolahan, perdagangan dan LU pertambangan yang didorong oleh semakin menurunnya produksi timah dan terakselerasi dengan peningkatan harga yang signifikan.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tabel III.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, nilai PDRB per kapita ADHK Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan fluktuasi, dimana pada tahun 2018 PDRB Per Kapita ADHK sebesar Rp.30.207.000 juta rupiah ditahun 2018, mengalami kenaikan ditahun 2019 sebesar Rp. 30.772.100, namun mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 28.831.500 ditahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19. Namun di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 29.658.523 karena perekonomian yang mulai stabil setelah adanya kelonggaran aktivitas setelah pandemi mulai berakhir. Pada PDRB per kapita ADHK tahun 2022 di proyeksikan sebesar Rp. 29.664.821 juta rupiah atau tumbuh sebesar 0,02 persen, dimana perkembangan tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yang dipengaruhi seiring dengan program strategis tumbuh didorong aktivitas produksi LU pertanian, kehutanan dan perikanan yang terus tumbuh. Pada tahun 2023 akan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp. 29.651.273 juta rupiah, perkembangan ini diperkirakan karena peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perkembangan ini diprediksikan seiring dengan program strategis tumbuh didorong aktivitas produksi LU pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian yang secara bersama-sama mengalami kenaikan, selain itu laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum,pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, secara bersama-sama mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan berjalannya transformasi ekonomi berkelanjutan dan naiknya harga komoditas serta permintaan global.

Pertumbuhan ekonomi di daerah juga dipengaruhi nilai inflasi. Nilai inflasi di Kota Pangkalpinang, sebagai pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada tahun 2018-2021 dan proyeksi inflasi tahun 2022-2023 ditunjukkan oleh Tabel III.3

**Tabel III.3
Nilai inflasi 2018-2021 dan Proyeksi Inflasi 2022-2023**

Uraian	Nilai Inflasi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflasi Kota Pangkalpinang	3,45	2,31	0,52	3,60	3,12	3,25
Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,18	2,62	1,08	3,75	n/a	n/a
Inflasi Nasional	3,13	2,27	1,68	1,87	3	3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021 di olah

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi.

Tabel III.3 menunjukkan nilai inflasi di tingkat nasional, provinsi, di ibukota provinsi dan Pangkalpinang dari tahun 2018-2021. Laju inflasi Kabupaten Bangka Tengah kota Koba sebagai ibukota Kabupaten mengikuti angka inflasi Kota Pangkalpinang sebagai representasi perhitungan inflasi di Pulau Bangka sebagaimana yang telah ditentukan BPS. Perkembangan nilai inflasi tahun 2018 s.d 2021 angkanya fluktuatif. Tabel III.3 menunjukkan nilai inflasi masih terkategori golongan yang sehat berarti positif. Pada tahun 2022 di proyeksikan inflasi sebesar 1.60 dengan Lower Confidence Limit (LCL) 0.80 dan Upper Confidence Limit (UCL) sebesar 2.40. sedangkan pada tahun 2023 di proyeksikan dengan dasar tahun 2018 yaitu sebesar 2.07 dimana Lower Confidence Limit (LCL) adalah 1.27 dan Upper Confidence Limit (UCL) sebesar 2.87, kondisi ini diprediksikan dengan prakiraan cuaca yang kurang kondusif di tahun 2023 yaitu panas yang berkepanjangan (pemanasan global) sehingga mengurangi pasokan bahan pangan utama seperti tanaman bawang dan cabe kurang terjaga.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2023 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi daerah juga tak lepas dari pengaruh globalisasi ekonomi dan kebijakan ekonomi nasional. Sejumlah permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi diantaranya adalah :

- Diperlukan peningkatan pemanfaatan digitalisasi semua sektor.
- Peningkatan pembukaan akses ekonomi potensial.

- Peningkatan hilirisasi produk dan daya saing ekspor produk unggulan.
- Pengendalian covid-19 secara massif.
- Pembangunan sektor potensial pada pemanfaatan Kawasan hutan
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- Kenaikan inflasi global yang terjadi akibat konflik geopolitik yang akan menggerus daya beli masyarakat;

Target Makro Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang akan dicapai sebagaimana ditunjukkan pada Tabel III.3. Diharapkan dengan pencapaian target tersebut maka sasaran utama yaitu : pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.

**Tabel. III.4
Target Indikator Makro Pembangunan Ekonomi dan IPM**

No	Sasaran Pembangunan	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,18%
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	48.599.664
3	PDRB Per Kapita (ADHK)	29.951.773
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%
5	Tingkat Kemiskinan	4,34 %
6	Rata-Rata Lama Sekolah	7,42 tahun
7	Angka Harapan Hidup	71,83 tahun
8	Harapan Lama Sekolah	12,10 tahun
9	Indeks Pembangunan Manusia	71,79

Sumber: Bappelitbangda, data diolah, 2022

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi daerah pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan kebijakan yang akan dilaksanakan dan telah didesain secara tematik holistik dan integratif, agar mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja

Arah kebijakan tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Dalam hal pertimbangan transformasi ekonomi dengan upaya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM yang mampu dan memiliki etos kerja yang produktif trampil, kreatif disiplin professional dan mampu memanfaatkan mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif.

Adanya peningkatan kualitas SDM akan mempengaruhi peningkatan kualitas tenaga kerja dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya yang di dukung dengan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dengan dilaksanakannya diklat pelatihan kerja yang dilakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.

Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi, prospek perekonomian daerah tahun 2023 difokuskan pada :

- peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi,
- penguatan pemulihhan sosial
- transformasi digital dan meningkatnya kreatifitas serta inovasi pembangunan
- peningkatan daya jual komoditi
- serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi daerah untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK COVID-19

Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal baru setelah 2 tahun dari selesainya pandemi Covid-19, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2022

pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Pada tahun 2022 kondisi perekonomian mulai pulih meskipun tidak sama seperti kondisi sebelum adanya Covid-19. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2023 diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2021 yakni pada kisaran 5,18 persen. Perkiraan tersebut tentunya telah mempertimbangkan perkiraan kondisi kedepan, sejalan pendistribusiam program vaksinasi yang makin merata. Keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi menjadi salah satu faktor penentu Pemulihan ekonomi diiringi program kebijakan pemulihan ekonomi yang tepat.

Pemerintah Pusat masih akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung Pemulihan ekonomi yang tetap harus terjaga keberlanjutannya. Hal itu dilaksanakan melalui program prioritas yang meliputi pembangunan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau. Dukungan terhadap Implementasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 dengan mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, serta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada satuan Pendidikan, dengan memperhatikan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Disamping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong Percepatan Pemulihan ekonomi di daerah. Beberapa kebijakan ekonomi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melanjutkan dukungan program dari tahun sebelumnya yang mangalokasikan belanja untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. III.5
**Dukungan Program Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak
Pandemi Covid-19**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	499.695.000	DisperindagkopUKM
2	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	933.270.000	DisperindagkopUKM
3	Program stabilisasi harga barang	620.000.000	DisperindagkopUKM

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
	kebutuhan pokok dan barang penting		
4	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	195.065.000	Dinas Pangan
5	Program pelayanan penanaman modal	399.210.000	DPMPTK
6	Program pemasaran pariwisata	413.400.000	Dinbudparpora
7	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	887.260.000	Dinbudparpora
8	Program peningkatan daya tarik pariwisata	1.769.290.000	Dinbudparpora
9	Program pengelolaan perikanan budidaya	3.509.040.000	Dinas Perikanan
10	Program pengelolaan perikanan tangkap	3.454.363.150	Dinas Perikanan
11	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.892.767.300	Dinas Perikanan
12	Program perizinan usaha pertanian	212.000.000	Dinas Pertanian
13	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.677.800.000	Dinas Pertanian
14	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.429.950.000	Dinas Pertanian
15	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	898.588.000	Dinas Pertanian
	Total	20.791.698.450	

Sumber: data diolah, 2022

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan Proyeksi pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah berkaitan erat dengan beberapa asumsi, diantaranya :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,18 %.
2. Tingkat inflasi daerah (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,62%;

Tabel. III.6
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 s.d tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan asli daerah	88.848.500.112	85.202.659.988	83.318.024.223
1.1.1	Pajak daerah	48.654.079.808	47.760.505.951	45.967.239.713
1.1.2	Retribusi daerah	6.754.715.564	4.403.072.212	4.638.555.141
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.389.344.222	3.883.445.315	4.232.316.806
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	29.050.360.518	29.155.636.510	28.479.912.562,93
1.2	Dana perimbangan	686.141.367.426	625.352.345.486	625.619.719.412
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	98.072.280.463	48.622.860.321	94.405.380.903
1.2.2	Dana alokasi umum	463.219.200.000	424.586.686.000	417.416.112.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	124.849.886.963	152.142.799.165	113.798.226.509
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	160.120.086.980	196.283.695.717	34.421.230.864
1.3.1	Hibah	26.409.740.000	31.401.653.098	29.678.324.662
1.3.2	Dana darurat			
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	59.348.897.380	40.461.734.619	41.089.489.406,37
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	10.284.342.000	66.420.714.000	51.256.068.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	9.190.962.000	3.412.000.000	3.562.200.000
1.3.6	Dana Desa	54.886.145.600	54.587.594.000	56.734.546.600
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	935.109.954.518	906.838.701.191,78	896.001.278.505,55

Sumber :

*2019-2020 Realisasi Keuangan APBD

*

Tabel. III.7
Realisasi Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 s.d tahun 2023

No	Uraian	Realisasi APBD 2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PENDAPATAN DAERAH	896.001.278.505,55	869.054.650.000	990.692.073.509
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.318.024.223	100.840.055.000	110.684.428.304
2	Pendapatan Pajak Daerah	45.967.239.713	62.629.800.000	65.997.944.000
3	Hasil Retribusi Daerah	4.638.555.141	78.949.500.000	8.561.500.000
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.232.316.806	4.658.000.000	4.941.679.838
B	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.479.912.562,93	24.602.755.000	31.183.304.466
1	PENDAPATAN TRANSFER	778.262.023.418,37	760.955.385.000	864.117.125.104
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	733.610.334.012	709.287.119.000	812.448.859.104
C	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.651.689.406,37	51.668.266.000	51.668.266.000
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.421.230.864,00	7.259.210.000	15.890.520.101
2	Pendapatan Hibah	6.300.000	0	0
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	34.414.930.864	7.259.210.000	15.890.520.101
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	896.001.278.505,55	869.054.650.000	990.692.073.509

Sumber :

*2021-2023 APBD 2021, RPJMD 2021-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel III.8
Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

- b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan sumber pendapatan daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Dana Transfer (DAU, DAK, Dana Desa) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat terlebih lagi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Tengah akan lebih difokuskan pada upaya:
 - 1) Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi, seperti Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI), terutama peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pemanfaatan sistem informasi yang lebih relevan.
 - 3) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap pemetaan potensi pajak daerah, sehingga jumlah subjek pajak dan wajib pajak meningkat.
 - 4) Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan.
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

- dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah
- 6) Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - 7) Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan *reward* terhadap wajib pajak yang taat pajak.
 - 8) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
 - 9) Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi.
 - 10) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
 - 11) Peningkatan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- e. Meningkatkan peluang investasi dengan adanya pertumbuhan industri-industri dan kenaikan permintaan yang bersifat eksternal di luar wilayahnya sendiri. Maka pertumbuhan industri menggunakan sumber daya lokal dalam rangka ekspor akan menghasilkan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka panjang beberapa faktor yang mendukung dapat meningkatnya peluang investasi, yaitu sumber daya alam, faktor akumulasi modal, faktor sumber daya manusia, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi, pendidikan dan lembaga sosial, kesadaran dan kebiasaan menabung dan berinvestasi, politik dan administratif.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Kebijakan belanja daerah tahun 2023, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel III.9
Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH	
1.	Belanja Operasi
a.	Belanja Pegawai;
b.	Belanja Barang dan Jasa;
c.	Belanja Bunga;
d.	Belanja Subsidi;
e.	Belanja Hibah; dan
f.	Belanja Bantuan Sosial.
2.	Belanja Modal
a.	Belanja Tanah;
b.	Belanja Peralatan dan Mesin;
c.	Belanja Bangunan dan Gedung;
d.	Belanja Jalan;
e.	Belanja Irigasi dan Jaringan;
f.	Belanja Aset Tetap lainnya.
3.	Belanja Tidak Terduga
4.	Belanja Transfer
a.	Belanja Bagi Hasil;
b.	Belanja Bantuan Keuangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan

pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2023 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2023 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026.

3) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4) Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2023 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan dipertahankan minimal sebesar 10% dari total belanja diluar gaji.

5) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban

belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7) Optimalisasi Dana Transfer

Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka pada tahun 2023 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana transfer atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2023.

8) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2023 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

9) Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan propinsi

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional, beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

a) Sesuai dengan Surat Edaran Bersama LKPP dengan Kemendagri Nomor: 027/1022/SJ dan 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja Barang/ Jasa untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dan wajib menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%.

b) Kebijakan pengalokasian belanja untuk mendukung pencapaian arah kebijakan prioritas nasional seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan kebijakan mendukung pelaksanaan Pemilu serentak.

Tabel. III.10
Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2019 s.d Tahun 2020

Uraian	Tahun (Rp)		
	2019	2020	2021
Belanja Daerah	906.292.386.410,40	908.467.396.988,00	872.526.971.483,19
Belanja Tidak Langsung	454.013.267.491,00	495.721.551.194,00	487.506.688.542,00
1. Belanja Pegawai	303.440.700.913,00	307.588.258.290,00	342.451.013.482,00
2. Belanja Bunga	-	-	-
3. Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
4. Belanja Hibah	31.291.737.841,00	54.041.087.612,00	32.758.043.935,00
5. Belanja Bansos	2.235.509.975,00	4.246.325.000,00	1.840.925.500,00
6. Belanja Bagi Hasil	5.215.262.000,00	7.756.652.000,00	5.249.980.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	111.085.248.387,00	102.578.056.200,00	104.056.095.600,00
8. Belanja Tidak Terduga	244.808.375,00	19.011.172.092,00	650.630.025,00
Belanja Langsung	452.279.118.919,00	412.745.845.794,00	385.020.282.941,19
1. Belanja Pegawai	78.483.979.942,00	91.440.781.170,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	215.587.794.238,48	189.724.986.061,03	269.460.563.286
3. Belanja Modal	158.207.344.738,92	131.580.078.563,00	115.559.719.655,19
Jumlah Belanja	906.292.386.410,40	908.467.396.988,00	872.526.971.483,19

Tabel. III.11
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Belanja Daerah	940.665.400.000	917.636.000.000	1.068.728.927. 119
5.1	Belanja Operasi	686.448.354.781	705.219.483.448	807.426.413.977
5.1.01	Belanja Pegawai	358.357.248.712	396.478.000.807	446.141.826.028
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.558.744.639	279.097.745.141	325.521.523.879
5.1.03	Belanja Bunga		-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	700.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	34.038.601.380	24.510.837.500	33.144.664.070
5.1.06	Belanja Bansos	1.993.760.050	4.632.900.000	1.918.400.000
5.2	Belanja Modal	131.875.831.219	105.068.272.552	128.715.280.898
5.2.01	Belanja Modal Tanah	125.000.000	100.000.000	225.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.900.690	26.978.002.664	33.860.610.398

No	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.148.523.370	26.576.411.294	32.930.785.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.247.677.159	51.358.858.594	61.673.885.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	353.730.000	55.000.000	25.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	19.131.401.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.000.000.000	19.131.401.300
5.4	Belanja Transfer	112.341.214.000	102.348.244.000	113.455.830.944
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.795.680.000	7.157.930.000	7.653.904.400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.545.534.000	95.190.314.000	105.801.926.544
	<i>Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	48.699.149.000	48.213.293.000	58.824.905.544
	<i>Dana Desa (DD)</i>	56.846.385.000	46.977.021.000	46.977.021.000
	Jumlah Belanja	940.665.400.000	917.636.000.000	1.068.728.927.119

Sumber :
*2021-2023 APBD 2021, RPJMD 2021-2026

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan

yang diperoleh. Sumber penerimaan pembiayaan tahun 2023 berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pada tahun anggaran 2023 arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan pengeluaran penyertaan modal (investasi) pada BUMD yaitu Bank Sumsel Babel dalam rangka dukungan pengembangan kepada Bank Pemerintah Daerah.

**Tabel III.12
Struktur Pembiayaan Daerah**

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. III.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembentukan Daerah
Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembentukan Daerah	Jumlah					Proyeksi/Target Tahun Rencana 2023 (7)
		Realisasi Tahun 2019 (2)	Realisasi Tahun 2020 (3)	Realisasi Tahun 2021 (4)	APBD Tahun 2022 (5)	(6)	
3.1	Penerimaan pembentukan	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64	54.040.424.600,39	54.681.350.000	78.036.853.610	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64	54.040.424.600,39	54.681.350.000	78.036.853.610	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.906.467.788,79	55.724.035.896,64	54.040.424.600,39	54.681.350.000	78.036.853.610	
3.2	Pengeluaran pembentukan						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019 (2)	Realisasi Tahun 2020 (3)	Realisasi Tahun 2021 (4)	APBD Tahun 2022 (5)	Proyeksi/Target Tahun Rencana 2023 (7)
(1)	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIA YAAN NETTO	7.084.752.093,83	55.724.035.896,64	54.040.424.600,39	54.681.350.000	78.036.853.610

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023. Program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, dan Isu-isu strategis yang ada.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap Dinamika dan Realita kondisi umum daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional yang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program, kegiatan , sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah

keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan nasional yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, dengan program daerah pendukung diantaranya program perlindungan dan jaminan sosial, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyelenggaraan jalan, program peningkatan kerjasama desa ;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan, arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), dengan program daerah pendukung diantaranya program pendidik dan tenaga kependidikan, program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job, arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, dengan program daerah pendukung diantaranya program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja;
4. Mendorong pemulihian dunia usaha, arah kebijakan mendorong pemulihian dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, dengan program daerah pendukung diantaranya program pengembangan iklim penanaman modal, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, program pengembangan UKM;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, dengan program daerah pendukung diantaranya program perencanaan dan pembangunan industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, dengan program daerah

pendukung diantaranya program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan, program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, dengan program daerah pendukung diantaranya program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program penyelenggaraan jalan, program aplikasi informatika;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rancangan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap IV ini adalah **“Meningkatnya Ekonomi Daerah dan Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).”**

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 bertujuan untuk penataan ruang provinsi yaitu **“Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agri-Bahari untuk Menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk Menjamin Pembangunan yang Berkelaanjutan”.**

3. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah tercakup dalam hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan capaian kinerja tahun-tahun yang direncanakan dalam RPJMD periode sebelumnya. Kesenjangan antara realita, capaian dan target kinerja menjadi permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada Tahun 2023 sebagai pertimbangan dalam penentuan tema RKPD tahun 2023.

Adapun isu strategis Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

- Percepatan pemulihan ekonomi
- Penanggulangan kemiskinan

- Pengurangan angka pengangguran
 - Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi
 - Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah
 - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
 - Optimalisasi peningkatan pelayanan publik
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN).

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Visi dan Misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025 serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJPD 2005-2025 untuk Tahun 2023.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Pencapaian visi dan misi dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian isu-isu strategis daerah.

**Tabel IV.1.
Keselarasan antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan dan Sasaran
Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**

No.	Prioritas Nasional RKP 2023	Prioritas Prov. Kep Bangka Belitung RKPD 2023	Tujuan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya ekonomi daerah
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya indeks demokrasi Indonesia Provinsi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan pendapatan masyarakat	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026

Berdasarkan visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”.**

**Tabel IV.2.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul			
1	Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
			Menurunnya angka pengangguran
			Menurunnya angka kemiskinan
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar
4	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pada Tahun 2023 sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bangka Tengah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan. Target Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditunjukan dalam Tabel IV.3.

Tabel IV.3.
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,89	71,28	71,79
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Indeks Gini	0,280	0,321	0,308
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,76	4,83	5,18
3	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik	Rasio ketersediaan infrastruktur	86,99	86,98	88,08
4	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,13	67,21	67,52
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,86	68,60	69,85

Sumber : Hasil data Olahan Tahun 2022

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan RKPD 2023 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta

pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 ”**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional berkisar 5,3 - 5,9 persen.
2. Inflasi secara Nasional berkisar antara 3 persen.
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 7,0 – 8,0 persen.
4. IPM menjadi 73,31 – 73,49.
5. Gini Rasio pada kisaran 0,375 – 0,378.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3 – 6,0 persen.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut di atas, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yang juga harus diperhatikan yaitu:

1. Pembangunan Demokrasi
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Lingkungan
4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia
6. Pembangunan Wilayah
7. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Pemilihan prioritas daerah dan penyelarasan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dimaksudkan agar di dalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Adapun penyelarasan target sasaran makro pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel IV.4. di bawah ini.

**Tabel IV.4.
Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

Indikator	Target Tahun 2023		
	Nasional	Provinsi Kep.Babel	Kab. Bangka Tengah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,9	4,28	5,18
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0–8,0	5,30	4,34
Tingkat Pengangguran (%)	5,3–6,0	4,30	4,47
Gini Ratio	0,375–0,378	0,239	0,308
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49	71,91	71,79

Sumber : data diolah Bappelitbangda Kab. Bangka Tengah

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap RPJMN mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional, selain berpengaruh kepada pembangunan nasional khususnya dalam RPJMN 2020-2024, wabah virus corona jenis baru ini, juga membuat pemerintah harus mengoreksi sasaran ekonomi yang menurun tajam tahun 2020. Kondisi ekonomi ini, juga memberikan pengaruh pada kinerja tahun 2021. Dampak lainnya, kurangnya pembiayaan pembangunan pada tahun 2020-2021 akibat pengalihan pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dengan memperhatikan pentahapan pembangunan RPJMD 2021-2026 serta realisasi pembangunan tahun 2021 dan perkiraan pencapaian tahun 2022, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah: **PEMULIHAN EKONOMI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”** Dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Prioritas Utama

1. Peningkatan ekonomi kerakyatan

2. Penurunan angka pengangguran
 3. Peningkatan Pendidikan
 4. Peningkatan Kesehatan
 5. Perlindungan sosial
 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- Prioritas Pendukung
1. Pengendalian lingkungan hidup
 2. Peningkatan sarana publik

Sinkronisasi antara penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu-isu strategis yang diuraikan dalam Bab II, bahwa penentuan isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD, yaitu diuraikan dalam Tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5.
Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Percepatan pemulihan ekonomi	Peningkatan ekonomi kerakyatan
2	Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur dasar pendukung ekonomi	Pengendalian lingkungan hidup
3	Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah	
4	Pengurangan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran
5	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Pendidikan Peningkatan Kesehatan
6	Penanggulangan kemiskinan	Perlindungan sosial
7	Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan
8	Optimalisasi peningkatan pelayanan publik	Peningkatan sarana publik

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Keselarasan perencanaan prioritas nasional, propinsi dan daerah merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan agar pendekatan secara substansi dapat dicapai. Tabel IV.6 menunjukkan keselarasan priritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah tahun 2023.

Tabel IV.6.
**Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi,
Prioritas Daerah Tahun 2023**

No.	Prioritas Nasional RKP 2023	Prioritas Prov. Kep Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan ekonomi kerakyatan Perlindungan sosial Penurunan angka pengangguran
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Wilayah	Peningkatan sarana publik
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pendidikan Peningkatan Kesehatan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Pembangunan Demokrasi	Peningkatan Pendidikan Peningkatan tata kelola pemerintahan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pemerataan pendapatan masyarakat	Peningkatan ekonomi kerakyatan Peningkatan sarana publik Perlindungan sosial Penurunan angka pengangguran
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;

- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan kabupaten, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2022;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Guna mencapai program prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Bangka Tengah yang disajikan dalam Tabel IV.7 berikut ini:

**Tabel IV.7
Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Peningkatan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
		Angka Rata-rata Lama Sekolah		Program Pengembangan Kurikulum Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
Meningkatkan kualitas derajat kesehatan			Peningkatan Kesehatan	Program Peningkatan Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Angka Harapan Hidup	Perlindungan Sosial	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Indeks Pembangunan Gender, Indeks perlindungan Anak	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM Program Promosi Penanaman Modal Program Peningkatan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pemasaran Pariwisata
			Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita (ADHB)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Daya Tantik Destinasi Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Penurunan Angka Pengangguran	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Perencanaan Tenaga Kerja
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Perlindungan Sosial	Program Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
Optimalisasi pembangunan sumber dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Program Hubungan Industrial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Presentase rumah layak huni	Program Pemberdayaan Sosial	Program Rehabilitasi sosial
Veningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (JLai)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (JLai)
	Nilai SAKIP		Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
		Opini BPK atas LKPD	Program Perumahan Dan Kawasan Pernikiman Kunuh	Program Perumahan Dan Kawasan Pernikiman Kunuh
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Indeks Inovasi Pemerintah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Program Penunjang Urusan Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Daerah	Program Prioritas
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Tabel IV.8
Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Perluasan cakupan pemberian beasiswa	Peningkatan Pendidikan	313.722.407.620
		Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan Meningkatkan kualitas kelulusan siswa Meningkatkan minat baca masyarakat		
		Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga		
	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan	222.979.379.310
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk	Perlindungan Sosial	273.243.671.757
Meningkatnya pemerataan	Meningkatkan pertumbuhan	Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan,	Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan,	Peningkatan Ekonomi	384.500.559.306

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
ekonomi masyarakat	ekonomi	produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	perikanan dan sektor unggulan lainnya Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi	Kerakyatan	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional		
		Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif		
			Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata		
		Peningkatan nilai investasi	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi		
		Ketahanan dan ketersediaan pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan pengutan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan		
	Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM	Penurunan Angka Pengangguran	72.872.124.560
			Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja		
	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Perlindungan Sosial	273.243.671.757
			Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin		
			Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
Optimalisasi pembangunan sara dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya pemerlukan infrastruktur dasar	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	115.558.726.250
		Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		
		Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum		
		Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah		
Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW	Pengendalian Lingkungan Hidup	118.195.192.918
			Peningkatan tata kelola pertanahan Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mechanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.		
			Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		Peningkatan penanggangan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Peningkatan pengelolaan persampahan		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan reformasi birokrasi	Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	373.620.467.023
		Peningkatan tata kelola	Peningkatan pengelolaan keuangan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran
	pemerintahan desa	desa	Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Mengendalikan keamanan lingkungan Meningkatkan penanganan pelanggaran perda	
	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana secara holistik Penegakan perda dan perlindungan masyarakat	
				Menguatkan pelayanan terpadu	

**Tabel IV.9
Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi RKPD 2023 terkait dengan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD 2021-2026**

Strategi RPJMD 2021-2026	Strategi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Arah Kebijakan RKPD 2023
Peningkatan akses pelayanan Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah	Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah
Peningkatan mutu pelajaran pendidikan yang berdaya saing	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Perluasan cakupan pemberian beasiswa	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Perluasan cakupan pemberian beasiswa
Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatkan kualitas kelulusan siswa
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatkan minat baca masyarakat Meningkatkan peran pemuda dan pembinaan olahraga
Penguatan pengarusutamaan gender	Penguatan pengarusutamaan gender	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
Penguatan ketahanan keluarga	Penguatan ketahanan keluarga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan
Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	Peningkatan daya saing untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan	Meningkatkan pelayanan jaminan Kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan
Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Peningkatan keunggulan daya tarik wisata	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan nilai investasi	Peningkatan nilai investasi	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk
		Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya	Meningkatkan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor unggulan lainnya
		Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan sektor industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah(UKM) melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasrama perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasrama perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi destinasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif
		Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata	Melestarikan dan meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung sektor pariwisata
		Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
		Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi	Perbaikan regulasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi

Strategi RPJMD 2021-2026	Strategi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Arah Kebijakan RKPD 2023
Ketahanan dan ketersediaan pangan	Ketahanan dan ketersediaan pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan pengelaruan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan	Meningkatkan akses, distribusi, keamanan dan pengelaruan cadangan serta peningkatan konsumsi pangan
Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM	Perluasan lapangan kerja berbasis ekonomi/potensi lokal melalui sektor IKM dan UKM
Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Pengembangan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Pengembangan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Penyediaan sarana dan prasarana bidang perhubungan
Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Peningkatan rumah tangga yang terlayani air minum	Pengejalaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum	Pengejalaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum
Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Peningkatan pelayanan akses sanitasi layak	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah
Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Perencanaan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RTRW
Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Peningkatan efektivitas pengendalian dampak lingkungan	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW	Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RTRW
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan tata kelola pertanahan	Peningkatan tata kelola pertanahan
Peningkatan penanggangan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Peningkatan penanggangan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi	Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mekanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.	Pengusulan pelepasan kawasan hutan salah satunya melalui skema tanah objek reforma agraria atau pun mekanisme kehutanan lainnya yang memungkinkan.
Pengurangan resiko bencana dan	Pengurangan resiko bencana dan	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihuan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Mengendalikan keamanan lingkungan Meningkatkan penanganan pelanggaran perda	Pencegahan, penanggulangan serta pemulihuan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Mengendalikan keamanan lingkungan Meningkatkan penanganan pelanggaran perda
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan persampahan
		Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana
		Menyingkatkan mitigasi dan penanggulangan	Menyingkatkan mitigasi dan penanggulangan

Strategi RPJMD 2021-2026	Strategi RKPD 2023	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Arah Kebijakan RKPD 2023
perlindungan masyarakat	perlindungan masyarakat secara holistik	secara holistik	bencana secara holistik
Penguatan reformasi birokrasi	Penguatan reformasi birokrasi	Penegakan perda dan perlindungan masyarakat Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Penegakan perda dan perlindungan masyarakat Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis e-government
Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pengelolaan keuangan desa Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik	Peningkatan pengelolaan keuangan desa Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik Menguatkan pelayanan terpadu

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
Sub Bidang Pendidikan								
1	Pendidikan usia dini	-Meningkatkan partisipasi sekolah pada usia sekolah -Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan -Perluasan cakupan pemberian beasiswa -Meningkatkan kualitas kelulusan siswa	Program pengelolaan pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	98,33	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan dasar			2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	97,61	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan kesetaraan				Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil assesmen nasional	Meningkat		Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	-Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan -Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 / pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	84,77	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan Ibu melahirkan	-Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan Kesehatan		2 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup /pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	89,06	100	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			3 Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup /pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	93,97	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita			4 Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup / pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	84,40	100	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			5 Cakupan penjaminan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) / pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	38,39	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			6 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan / pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	74,92	88	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lansia			7 Cakupan pelayanan kesehatan lansia / usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	64,88	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			8 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia	persen	49,07	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	95,83	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			11	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis / penderita tuberkulosis	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	102,42	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)			12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	54,05	100
Sub Bidang Pekerjaan Umum								72,80	100
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air bersih dan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1	Percentase penduduk berakses air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	85,27	88
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2	Percentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	95,45	96
Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Perkotaan									
1	Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan	Penyediaan rumah layak huni bagi korban	Program pengembangan perumahan	1	Percentase warga negara korban bencana kabupaten yang	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak	persen	100	Diperkimhub

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terikena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota	berkembangnya permukiman kumuh		memperoleh rumah layak huni					Diperkimhub
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	-Meningkatkan mitigasi dan peranggulangan bencana secara holistik -Pengakuan Perda dan perlindungan masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	2 Persentase warga negara yang terikena dampak relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga negara yang terikena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	
2	Informasi rawan bencana		Program penanggulangan bencana	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota / Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	100	Satpolpp
3	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	BPBD
4	Penyelamatan dan evakuasi korban bencan			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	
5	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
				dan evakuasi korban kebakaran					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin -Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin -Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggalian kemiskinan	Program rehabilitasi sosial	Percentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang tertangani	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			Penyandang yang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			Percentase anak terlantar di luar panti yang tertangani	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti			Percentase lanjut usia terlantar di luar panti yang tertangani	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	
				Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Indikator Layanan Dasar	Satuan	Realisasi 2021	Target 2023	Perangkat Daerah
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		Program penanganan bencana	mempertahani rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat.	persen	100	100	
					Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Tabel IV.11
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun		Target Tahun 2023	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					Satuan	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15
1	1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	Tanpa Kemiskinan / Perlindungan Sosial				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos PMD	Pilar Pembangunan Sosial
2	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tanpa Kemiskinan / Perlindungan Sosial	%	5,13	4,34	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos PMD	Pilar Pembangunan Sosial
4	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Tanpa Kemiskinan / Perlindungan Sosial	%		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos PMD	Pilar Pembangunan Sosial	
5	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan resehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Tanpa Kemiskinan / Peningkatan Kesehatan	%	81,16	95,06	97,00	PROGRAM PEMENUJUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	Sub Keg : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15
6	1.3.1.(b)		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tanpa Kemiskinan / Penurunan Angka Pengangguran	%	92,4	94,01	PROGRAM: HUBUNGAN INDUSTRIAL Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kab/Kota Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DPMPTK	Pilar Pembangunan Sosial
9	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tanpa Kemiskinan / Perlindungan Sosial	Juml ah			PROGRAM PENANGGANAN BENCANA Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Dinsos PMD	Pilar Pembangunan Sosial
13	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Tanpa Kemiskinan / Perlindungan Sosial	%	0	0	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Sub Keg : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
17	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Tanpa Kelaparan / Peningkatan Kesehatan	%	3,31%	2,67	2,4	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
18		2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tenggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Tanpa Kelaparan / Peningkatan Kesehatan	%	1,69	1,29	7,3	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
19		2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Tanpa Kelaparan / Peningkatan ekonomi kerakyatan	%				Dinas Pangan	Pilar Pembangunan Sosial
21		2.2.1*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Tanpa Kelaparan / Peningkatan Kesehatan	%	3,54	4,44	3,22	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
						2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16	
24	2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang dietapkan sebagai kawasan pertanian pangand berkelanjutan	Tanpa Kelaparan / Peningkatan ekonomi kerakyatan	%				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Lahan Pertanian Pangang Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangang Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangang Berkelanjutan/LCP2B Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangang Berkelanjutan/LP2B	Dinas Pertanian	Pilar Pembangunan Sosial	
27	2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perlusan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Tanpa Kelaparan / Peningkatan ekonomi kerakyatan	%				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	Pilar Pembangunan Sosial	
31	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hid	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	0,180	0,382	0,087	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengolahan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
32	3.1.2*		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (b) di fasilitas kesehatan.	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	73,91	50,62	93	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
33	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kehilangan Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan					PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
			(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan					PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
			(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan					PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	
			(a) Angka Kematiian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	6,87	6,00	6,28	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
			(b) Angka Kematiian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	6,27	4,91	3,49	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
			3.2.2*	Angka Kematiian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Ang ka	4,5	1,3	4,07	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
34			3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan menerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Juml ah	0	0,025	<0,05	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
35			3.3.1*		Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan					Orang dengan Risiko Terinfeksi	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	10	HIV	15	16
36		3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	% 56,7	67,46	> 160	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
37		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	% 0,005	0,0051	< 1	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
38		3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan Jumlah ah	6	6	6	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
39		3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	% 1,77	1,27	1,26	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
40		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Kehidupan Sehat dan / Peningkatan Kesehatan Keluarga	%	100	100	100	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pilar Pembangunan Sosial
41		3.3.5.(a)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi kusta	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Kecamata n	3	3	3	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pilar Pembangunan Sosial
42		3.3.5.(b)	Jumlah desa/kelurahan endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Desa / Keluarga n	0	0	63	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pilar Pembangunan Sosial
43		3.4.1.(a)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun					PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
					2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16	
44	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	29,96	7,97	40	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
45	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	4,82	12,05	21,8	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
46	3.5	Memperkuat penegahan dan pengobatan penyabugan zat, termasuk penyabugan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Jumlah penyabugan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Juml ah	1	1	3	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial
47	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Juml ah	0	0	0	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.			
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16		
48		3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	n/a	<8	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyedian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP/Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial		
49		3.7.1*	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	67,67	67,67	58,79	PROGRAM.PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, PROGRAM.PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) PROGRAM.PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKB PPPA	Pilar Pembangunan Sosial
50		3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	99,57	31,55	99	PROGRAM.PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, PROGRAM.PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) PROGRAM.PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKB PPPA	Pilar Pembangunan Sosial	
51		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	2,41	2,41	2,39	PROGRAM.PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, PROGRAM.PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) PROGRAM.PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKB PPPA	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
52	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko kerangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Kehidupan Sehat dan Keluarga . Peningkatan Kesehatan	%	81,16	88	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg : Penyelenggaraan Pronosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pilar Pembangunan Sosial
53	3.8.1(a)	Urgent Need Pelayanan Kesehatan	Pastie n	Kehidupan Sehat dan Keluarga	6,58	19,53	18,4	DPPKB PPPA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) PROGRAM.PENGENDALIAN PENDUDUK	Pilar Pembangunan Sosial
54	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	Juml ah	Kehidupan Sehat dan Keluarga	81,16	88	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg : Penyelenggaraan Pronosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
55	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (IKN)	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Juml ah	81,16	84,61	88	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
56	3.a Menperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Percentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	n/a	2,81	8,8	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	
57	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Nilai	2302	1515	2500	PROGRAM PEMENUJUAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan obat dan Vaksin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan anak Usia Sekolah, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir, Pengelolaan Pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14
58	menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.2*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	65,4	44,02	69,4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan obat dan Vaksin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan anak Usia Sekolah, Pengelolaan Layanan Kesehatan Bayi baru lahir, Pengelolaan Pelayanan kesehatan anak balita
59	3.c.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	Rasio	100	100	94	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Obat dan Vaksin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengadaan Obat dan Vaksin
60	3.c Meningkatkan secara signifikan pembayaran kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kehidupan Sehat dan Keluarga / Peningkatan Kesehatan	%	75%	75%	85%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	10	14
62	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	85,61	85,71	87,52	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar & Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Prosesbelajar Dan Ujian Bagi Peserta Didik SD dan Penyelenggaraan Prosesbelajar dan Ujian Bagi Peserta Didik SMP	Dinas Pendidikan
63		4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	102,29	102,29 *	99	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar & Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Dinas Pendidikan
64		4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	0,57	0,57	0,26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
66		4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	78,50	78,50	87	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					Satu an	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
								Pertama		
70	4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK sedera jat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kunitil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	Rasio	83,36	85,36	87	Dinas Pendidikan	Pilar Pembangunan Sosial
71	4.6 Pada tahun 2030, menjamn bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Percentase angka melek alfabeta penduduk umur ≥15 tahun	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	98,94	98,94	99,47	Dinas Pendidikan	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung		Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
									14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16	
72	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti sekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	75	75	77	77	Dinas Pendidikan	Pilar Pembangunan Sosial	
75	4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Percentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Pendidikan Berkualitas / Peningkatan Pendidikan	%	82,33	82,33	88,40	88,40	Dinas Pendidikan	Pilar Pembangunan Sosial	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
77	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdangan orang dan eksloitasi seksual, serta berbagai jenis eksloitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kesetaraan Gender / Perlindungan Sosial	Angka	8,00	5,00	25	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEGIATAN : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPP	Pilar Pembangunan Sosial
78	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kesetaraan Gender / Perlindungan Sosial	Angka	3	1,00		10	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPP	Pilar Pembangunan Sosial
79	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	Kesetaraan Gender / Perlindungan Sosial	%	0,05 persen	23,20	22,9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Kegiatan : -Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota -Pengurangan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPP	Pilar Pembangunan Sosial

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
80	5.5.1*	Proporsi kursi yang dihdiukti perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Kesetaraan Gender/ Perlindungan Sosial	%	2.22		2.22	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBPPP	Pilar Pembangunan Sosial
86	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Kesetaraan Gender / Peningkatan sarana publik	%	65,54	66,06 **	66,57**	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyedian/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfosta	Pilar Pembangunan Sosial
88	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Berkelanjutan untuk Semua / Peningkatan sarana publik	%	84,42	85,27	88,43	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUTRP	Pilar Pembangunan Lingkungan
89	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang mendidai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarang di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum	Presentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan	Berkelanjutan	%	85,61	85,71	87,52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Pilar Pembangunan Lingkungan

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
1	perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	dengan air dan sabun.	untuk Semua sarana publik	untuk Semua / Peningkatan sarana publik					Sub Keg : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
90	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Persentase limbah air industri cair yang diolah secara aman	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkela jutan untuk Semua / Peningkatan sarana publik	%	n.a.	n.a.	n.a.	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUTRP	Pilar Pembangunan Lingkungan
93	6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkela jutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkela jutan untuk Semua / Peningkatan sarana public	%	n.a.	n.a.	n.a.	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUTRP	Pilar Pembangunan Lingkungan

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
94		6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang BerkelaJutuan untuk Semua / Peningkatan sarana public	%	n.a.	n.a.	n.a.	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUTRP	Pilar Pembangunan Lingkungan
105		8.1.1*	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita	%			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Keg : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Pilar Pembangunan Ekonomi	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16		
106				Meningkatka n Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutuan , Kesempatan Kejaya yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk semua / Peningkatan ekonomi kerakyatan	5	6	7	8	*0,288 158	50.068.7 27	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Keg : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Pilar Pembangunan Ekonomi
107				Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 8.2.1*				%	-0,27	2,07	PROGRAM: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTK	Pilar Pembangunan Ekonomi

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16

108 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.

8.3.1*

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan , Kesempatan Kejayaan yang Produktif dan Menyenangkan, Serta Pekerjaan yang Layak untuk semua / Penurunan angka pengangguran

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online

51.44

49.44

Pilar Pembangunan Ekonomi

DPMPTK

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

111 8. 5. 1* Upah rata-rata per jam kerja Rupiah 18.671 18.967

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pilar Pembangunan Ekonomi

DPMPTK

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
11.3				Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk semua / Penurunan angka pengangguran	%	10,94	10,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	DPMPTK	Pilar Pembangunan Ekonomi	
11.4				Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk semua	%	24,65	23,5	PROGRAM: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi PROGRAM: PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	DPMPTK	Pilar Pembangunan Ekonomi	
				8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8. 6. 1*						

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
118	8.9.1. (a)		Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua / Peningkatan ekonomi kerakyatan	Jumlah ah	100	142	465	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudparpora Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pilar Pembangunan Ekonomi	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
				Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua / Peningkatan ekonomi kerakyatan	Jumlah ah	130.274	83.145	134.592	Dinbudparpora Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pilar Pembangunan Ekonomi	
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara										

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
120	8. 9. 1. (c)		Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua / Peningkatan ekonomi kerakyatan	Jumlah	5.778.775 .675	5.108.736 .089	9.361.608.00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudparpora	Pilar Pembangunan Ekonomi
128	9. 1. 2*		Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Membangun Infrastruktur yang tangguh, Meningkatka n Industri Inklusif dan Berkelanjutan , Serta Mendorong Inovasi / Peningkatan sarana publik	org	639.563	2.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan bersita Mautannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Diperkimhub	Pilar Pembangunan Ekonomi	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	10	14
134				Membangun Infrastruktur yang tangguh, Meningkatka Industri Inklusif dan BerkelaJutuan . Serta Mendorong Inovasi / Penurunan angka pengangguran			PROGRAM: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi PROGRAM: PENEMPATAN TENAGA Kerja Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online	DPMPTK Pilar Pembangunan Ekonomi
145				10. 1. 1.*	Rasio Gini.	Nilai Mengurangi keserjangan intra dan antar negara	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonominian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Keg : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmoniasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonominian	Bappelitbangda Pilar Pembangunan Ekonomi

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	16
146		10. 1. 1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Mengurangi keserjangan intra dan antar negara / Perlindungan sosial	n/a %	5,13	4,47	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Keg : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	BPS	Pilar Pembangunan Ekonomi
148		10. 1. 1. (c)	Jumlah desa mandiri	Mengurangi keserjangan intra dan antar negara / Perlindungan sosial	Desa			PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinsos PMD	Pilar Pembangunan Ekonomi
158		10. 4. 1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Mengurangi keserjangan intra dan antar negara / Penurunan angka pengangguran	%	92,4		PROGRAM: HUBUNGAN INDUSTRIAL Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah Kab/Kota Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	DPMPTK	Pilar Pembangunan Ekonomi

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	Pengupahan	15
								14		16

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	10	14	15	
168	11.5.2. (a)			Kota dan Pemukiman yang BerkelaJutuan / Perlindungan sosial	Rupiah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENACANA Kegiatan : -Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana -Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana -Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	BPBD	Pilar Pembangunan Lingkungan	
178	11.c			Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang BerkelaJutuan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	%	100	100	100	DPUTRP	
				Kota dan Pemukiman yang BerkelaJutuan / Perlindungan sosial			PROGRAM: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan : Penyelegaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kegiatan : Penyelegaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Pilar Pembangunan Lingkungan	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16		
180	12.3 Pada tahun 2030, mengurangi tingginya setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1. (a)	Persentase Sisa Makanan	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian Lingkungan hidup	%					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Keg : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	DLH	Pilar Pembangunan Lingkungan	
184	12.4.2*		Limbah B3 yang dihasilkan per kapita;	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian Lingkungan hidup	Jumlah	34.818	7			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Kegiatan : -Penyimpanan sementara Limbah B3 -Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Pilar Pembangunan Lingkungan	
			Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya /pengelolaannya	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian Lingkungan hidup							Pilar Pembangunan Lingkungan		

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
						2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
185	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian lingkungan hidup	Kg	398,96	5	400,965	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan : Pengelolaan Sampah	DLH	Pilar Pembangunan Lingkungan
186	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transisional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1* 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transisional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menpublikasi laporan keberlanjutannya	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian lingkungan hidup	%				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Pilar Pembangunan Lingkungan
187		12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian lingkungan hidup	Perusahaan	3		3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Pilar Pembangunan Lingkungan

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
194	12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1. (a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / Pengendalian lingkungan hidup	%	n/a	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinbuparpora	Pilar Pembangunan Lingkungan	
196	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya tenkit iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Penanganan Perubahan Iklim / Pengendalian lingkungan hidup	Dok	0	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan : -Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana -Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana -Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD	Pilar Pembangunan Lingkungan	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
233	16.2.1. (a)			Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Perindungan sosial				PROGRAM PEMENUJUAN HAK ANAK Kegiatan : -Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : -Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
234	16.2.1. (b)			Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Perindungan sosial				PROGRAM PEMENUJUAN HAK ANAK Kegiatan : -Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : -Pencegahan Kekerasan terhadap	DPPKBPPA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15
								Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		16
								PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Kegiatan : -Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Perlindungan sosial	Juml ah	0	0	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : -Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKB PPPA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
	16.2.2*			Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksloitasi.						
										235

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
236	16.2.3. (a)		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Perlindungan sosial	%	45	45	40	PROGRAM PEMENUJUAN HAK ANAK Kegiatan : -Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Kegiatan : -Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota -Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPP Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
242	16.5.1. (a)		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Indeks	3,09	3,09*	3,4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Sub Keg : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ITDA (Laporan LHE RB MENPAN-RB) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung		Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
									14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16	
243	16.6.1*		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan		90,77 %	35,80 %		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
244	16.6.1. (a)		Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan		WTP	WTP	WTP*	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKAD / BPPRD	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
245	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan		%	BB (71,12)	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	SETDA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
246	16.6.1. (c)		Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan		%	68,86	68,86*	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Keg : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	SETDA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
247	16.6.2. (a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan kelayanan publik kategori baik.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Zona Kepatuhan	Hijau	Hijau	Hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Keg : -Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Monitoring, -Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	SETDA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
248	16.7.1. (a)	Percentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	12	12	12	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran	DPPKBPPA, SETWAN	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
249	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkat.	Percentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	27,27	31,82	31,82	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan : Pengadilan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Keg : Penyusunan Rencana Rebututan, Jenis dan Jumlah	DPPKBPPA, BKPSDM	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun Satuan	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	10	Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	15	16
254				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
255	16.9.1. (a)			Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	
256	16.9.1. (b)			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dindukcapil	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15
258	16.10.1 .(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	2021	2022	2023	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Setda, BPS	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
259	16.10.1 .(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	15	9	25	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : -Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota -Penyedian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota -Pengurusan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPKBPPA	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
261	16.10.2 .(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfosta	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
262	16.10.2 .(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh / Peningkatan tata kelola pemerintahan				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Diskominfosta	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Satu an	Realisasi Tahun	Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	15	16
265				Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan / Peningkatan tata kelola pemerintahan	%	0,89%	-	1,13	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD, BPPRD Pilar Pembangunan Ekonomi
266				17.1.1.*	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,49%	-	0,66	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD, BPPRD Pilar Pembangunan Ekonomi
267				17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%	11,35 %	12,28 %	11,23%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD, BPPRD Pilar Pembangunan Ekonomi

No	Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Tujuan / Prioritas Daerah	Realisasi Tahun		Target Tahun	Prog/Keg/Sub Kegiatan Pendukung	Sumber Data & Instansi Pelaksana	KET.
					2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
273	17.8 Mengoperasional-isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memanfaikan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Persentase pengguna internet.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	%	80	86	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyedian/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfosta	Pilar Pembangunan Ekonomi
289	17.19.2. (b)			Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan /Peningkatan tata kelola pemerintahan	Dokumen	5742	6809	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Keg : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil	

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Tabel IV.12.
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung
dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

No	Prioritas Nasional RKP 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKP 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
			Urusan wajib			
			Terkait pelayanan dasar			
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan	Percentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan
					Percentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan
					Percentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan
					Percentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	Pendidikan
				Program Pengembangan Kurikulum Kependidikan	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Pendidikan
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kesehatan	Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk	Kesehatan
				Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Percentase penggunaan obat rasional	Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Percentase Posyandu Aktif	Kesehatan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan pendapatan Masyarakat	Peningkatan sarana prasarana publik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah			
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Percentase luas sawah yang berirrigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Percentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Percentase penduduk yang terlayani drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Percentase bangunan gedung yang ber-IMB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Percentase kondisi mantap jalan kabupaten	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Percentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Wilayah	Peningkatan sarana prasarana publik	Program Pengembangan Perumahan Permukiman	Jumlah angka backlog perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebencanaan	Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Bencana	Percentase gangguan	Ketenteraman,

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
			Ketertiban Umum	trantibum yang dapat diselesaikan	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perlindungan Sosial	Sosial		
1	Memperkuat Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Ketahanan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi	Program Penanganan Bencana	Percentase korban bencana yang dapat diatasi	Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	Percentase PSKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS	Sosial
				Program Rehabilitasi sosial	Percentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Sosial
				Terkait Pelayanan Non Dasar		
				Ketenagakerjaan		
				Penurunan Angka Pengangguran		
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang berkompotensi	n
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Percentase lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar	n
				Program Hubungan Industrial	Percentase kasus	Ketenagakerjaan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pembelahan Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	n
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	n
			Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah dan jejaringnya yang sudah dilatih PUG (Pengarutamaan Gender)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perilindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan organisasi perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga layanan pemenuhan hak anak yang dibina	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perilindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pangan		
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diukur dari konsumsi energi dan protein per kapita per hari	Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang	Pangan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Pertanahan	menenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Percentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang diimediasi oleh pemerintah kabupaten	Pertanahan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Percentase Tanah Masyarakat yang dire distribusi	Pertanahan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Program Penata gunaan tanah	Percentase kecamatan yang tersedia peta zona nilai tanah dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Pertanahan
				Lingkungan Hidup		
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Percentase perencanaan lingkungan hidup yang disusun	Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemar ringan	Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekagaman Hayati (Kehati)	Percentase RTH publik dikelola dengan baik	Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Percentase ketatahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Percentase masyarakat komunitas dan institusi	Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan Daerah	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani	Lingkungan Hidup
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah sampah yang tertangani sesuai tujuksinya	Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks pelayanan OPD	Lingkungan Hidup
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Administstrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Percentase Desa-Desa dalam melakukan kerjasama antara desa dan dapat membangun desa melalui kawasan perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Percentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Administrasi Desa	Percentase kemasyarakatan Desa yang teratur dalam terti administrasi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKP 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kesehatan Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pengendalian Penduduk (KB)	Percentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang dibina	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan sarana prasarana publik	Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Perhubungan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Percentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten	Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Nilai SAKIP OPD	Perhubungan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah	Peningkatan sarana prasarana publik	Komunikasi dan Informatika	Jumlah konten media yang terpublikasi	Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Percentase layanan administrasi pemerintahan	Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika		

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi UMKM	(G2G) yang diimplementasikan	Informatika
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam	Koperasi-UKM
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas	Koperasi-UKM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat	Koperasi-UKM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perikoperasi	Persentase koperasi modern	Koperasi-UKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro tangguh	Koperasi-UKM
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Koperasi-UKM
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi	Penanaman Modal		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Penanaman Modal
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN	Penanaman Modal
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	Penanaman Modal
				Program Pengendalian Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	Penanaman Modal
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pendidikan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga	Rata-rata hari pernyelesaian pelayanan perizinan	Penanaman Modal
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang aktif	Kepemudaan dan Olahraga
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Statistik		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Sektoral	Penyelenggaraan Statistik	Statistik
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Demokrasi	Peningkatan Pendidikan	Persandian	Percentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	Statistik
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pendidikan	Program Penyelenggaraan Informasi Untuk Pengamanan Informasi	Percentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada Level II	Persandian
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saling			Kebudayaan		
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saling	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pendidikan	Program Pengembangan Kebudayaan yang dikembangkan	Percentase kebudayaan yang dikembangkan	Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Kebudayaan
				Program Pelestarian Cagar Budaya	Percentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Kebudayaan
				Perpustakaan		
				Program Pembinaan Perpustakaan	Percentase perpustakaan yang sesuai standar nasional	Perpustakaan
				Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Percentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Perpustakaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	Perpustakaan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kearsipan		
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip	Kearsipan
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan	Kearsipan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi	Kelautan dan Perikanan		
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tangkap	Pendapatan Nelayan	Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Yang diawasi	Kelautan dan Perikanan
					Nilai konsumsi ikan segar	Kelautan dan Perikanan
					Nilai konsumsi olahan hasil perikanan	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi	Pariwisata		
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata	Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	Pariwisata
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	Pariwisata
1	Memperkuat Ketahanan Pembangunan	Peningkatan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi	Pertanian		

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi				
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (dinas pangan)	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
			Program Penyaluhan Pertanian	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	Pertanian	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan	Pengendalian Lingkungan Hidup	Kehutanan		
1	Memperkuat Ketahanan	Pembangunan	Peningkatan Ekonomi	Perdagangan		

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi				
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan nilai transaksi pasar tradisional	Perdagangan	
			Program Stabilisasi Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks harga konsumen (barang kebutuhan pokok)	Perdagangan	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Percentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan	Perdagangan	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Percentase alat UTTP yang diterapkan tera ulang	Perdagangan	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Percentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal	Perdagangan	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi	Perindustrian		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	Perindustrian	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Percentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SHINAS	Perindustrian	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukbankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	Sekretariat Daerah	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Percentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian, SDA, BUMN, dan BLUD yang disahkan	Sekretariat Daerah	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukbankam dan	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
	Transformasi Pelayanan Publik			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	Sekretariat DPRD
					Indeks pelayanan OPD sesuai upoksinya	Sekretariat DPRD
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Percentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" di wilayah Inspektorat Pembantu	Inspektorat Daerah
					Percentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPPIP level 3 di wilayah Inspektorat Pembantu	Inspektorat Daerah
					Percentase jumlah temuan kerugian negara/daerah di wilayah Inspektorat Pembantu	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Percentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah
					Jumlah unit kerja yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Inspektorat Daerah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan		
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Percentase keserasian/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	Perencanaan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	Perencanaan
				Penelitian dan Pengembangan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokument perencanaan sektoral lainnya	Perencanaan
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase capaian kinerja berkala perangkat daerah	Perencanaan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Keuangan	Persentase pemanfaatan hasil libhang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	Penelitian dan Pengembangan
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	Keuangan
					Persentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai Peraturan yang berlaku	Keuangan
					Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	Keuangan
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Keuangan
7	Memperkuat Stabilitas	Pembangunan	Peningkatan Tata Kepegawaian	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Keuangan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
	Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan	Kelola Pemerintahan			
				Program Kepegawaian Daerah	Percentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP	Kepegawaian
				Pendidikan dan Pelatihan		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Percentase pengembangan kompetensi ASN	Pendidikan dan Pelatihan
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kewilayahan		
				Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	Kecamatan Koba
				Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Kecamatan Koba
				Program Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Koba
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Kecamatan Koba
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Koba
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayaran OPD sesuai tuupoksiinya	Kecamatan Koba
				Program Penyeleenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	Kecamatan Pangkalnabu
				Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Kecamatan Pangkalnabu
				Program Penyeleenggaraan Urusan	Percentase terselenggaranya	Kecamatan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKP 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
			Pemerintahan Umum	kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pangkalbaru	Pangkalbaru
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Kecamatan Pangkalbaru	Kecamatan Pangkalbaru
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Pangkalbaru	Kecamatan Pangkalbaru
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuksinya	Kecamatan Pangkalbaru	Pangkalbaru
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuksinya	Kecamatan Sungaiselatan	Sungaiselatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Percentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	Kecamatan Simpangkatis	Simpangkatis
			Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Kecamatan Simpangkatis	Simpangkatis
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Simpangkatis	Simpangkatis
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Kecamatan Simpangkatis	Simpangkatis

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
				Program Pembinaan Pemerintahan Desa	umum yang terselenggara	Kecamatan Simpangkatis
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Per sentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai tujuannya	Indeks pelayanan OPD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Per sentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	Per sentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP
				Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Per sentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Per sentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Per sentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Per sentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Per sentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Per sentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Per sentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Per sentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuannya	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuannya
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Per sentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	Per sentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP
				Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Per sentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	Per sentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Per sentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	Per sentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Per sentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	Per sentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Per sentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Per sentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan

No	Prioritas Nasional RKPD 2023	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2023	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2023	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Bidang Urusan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Pembangunan Demokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuannya	Kecamatan Lubuk Besar
				Program Penguktian Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan ormas, suku, agama, dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawanan kebangsaan	Bakesbangpol
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik Aktif	Bakesbangpol
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Daerah	Tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani	Bakesbangpol
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks pelayanan OPD sesuai tujuannya	Bakesbangpol

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

**Tabel IV.11
Sinkronisasi Program / Kegiatan Prioritas RPJMN/RKP dan Program RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	17,9 Persen	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
							Percentase kebijakan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang disahkan
							Percentase penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam
							Percentase capaian penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuksiman,
							1 dokumen 45.000.000

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003			
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (DAK)	Jumlah Bangunan Embung Yang dibangun	1 Unit	150.000.000		
						1. Persentase Luas Sawah Yang Beririgasi				
						2. Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari				
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit air baku yang dibangun/direhab	1 unit		
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk air baku yang dibangun	1 titik	180.000.000	
						Pembangunan Tanggul Sungai Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun yang diperlakukan	0,128 km	320.000.000	
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioerasikan dan dipelihara	1 unit	440.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten	36 Operasi	215.000.000			
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diiinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	30 Hektar	14.999.000			
						Pemulihian Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihian Ekosistem	30 Hektar	150.000.000			
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permothonan Pelayanan Penanfaatan di TAHURA yang Ditindaklanjuti	3 Permonthonan	25.000.000			
						Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	18.990.000			
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Konsumsi Ikan Segar	51,8 Kg/ Kap/ Tahun				
						Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Kelautan dan Perikanan	Konsumsi Ikan Olahan Hasil Perikanan	3,7 Kg/ Kap/ Tahun			
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 1	94 Nilai	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Perikanan	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari) 2	2.100 kkal	40 orang	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diukur dari konsumsi energi dan protein per kapitaper hari	2118,30 ; 67,37 kcal/kap/hr			
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	52	Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	23 kelompok			
			Prevalensi Ketidakceukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	4		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	9.395.000		
			Prevalensi Ketidakceukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	52		Pembangunan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	253.795.000		
			Prevalensi Ketidakceukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	52		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang dipelihara Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton			
			Prevalensi Ketidakceukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	52		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang dipelihara Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	123.035.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang dipelihara	45 ton	51.200.000	
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Percentase Desa Rawan Pangan	2,20%		
							Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Rekomendasi dan intervensi hasil analisis kerentanan dan ketahanan pangan	2 rekomendasi		
							Penyusunan, Penitaktiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	33.000.000	
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	82%		
							Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	12 kali		
							Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 sertifikat	23.535.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Tumbuhan yang teregistrasi Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)
					Pertanian		73,84 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah)
						Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)
						Populasi ternak (ekor)	7288 sapi; 1658 kambing; 21.237 bebek/fitik
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai lokasi	1 tahun
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai lokasi	1 tahun
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan	1.432.100.000

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003				
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Spesifik Lokasi				
							Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung transportasi	1 tahun	872.900.000	
							Peningkatan Mutu dan Perekarangan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil 12 laporan		
							Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	43.350.000	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa	87%	
							Pelaksanaan penyuluhan pertanian		Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa	87%	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit 6 BPP 73 orang 73 orang 7 orang 73 orang 69 ProgramaRKT			
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit 6 BPP 73 orang 73 orang 7 orang 73 orang 69 ProgramaRKT			
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	3 jenis	377.370.000		
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	73,84 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah)			
							Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)			
							Populasi ternak (ekor)	7288 sapi; 1658 kambing; 21.237 bebek/itik			

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	27.917,97 (padi, pwiija, cabe, bwngmerah, sayur, buah)			
							Jumlah Produksi Perkebunan	41.776,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)			
							Jumlah populasi ternak	7288 sapi; 1658 kambing; 21.237 bebek/fitik			
							Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha tani yang dibangun	2 km	350.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan Nelayan	6.433.360,55 Juta/ Orang/Bulan		
1.4	Peningkatan pengelolaan kemanitan, perikanan dan kelautan	1	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*)	26	Kelautan dan Perikanan						
						Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<76	Propaganda Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diolah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	28236,57 Ton		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003				
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	424.760.000			
							Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5 dokumen			
							Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 unit	1.098.210.000		
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	57 unit/paket	1.272.692.800		
							Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil Yang Difasilitasi dan Dibina Dalam (1) satu Daerah Kabupaten/ Kota			
							Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	250 orang		
								Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi	20 kelompok		
								Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Nelayan Kecil	138.940.100		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Dikelola	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Dikelola
					Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya Ikan Kelas Madya	Pembudidaya Ikan Kelas Madya
						5 kelompok	5 kelompok

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 kelompok	70.780.000	
							Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	1 kelompok (UJP)	102.600.000	
							Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 kelompok	268.900.000	
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Benih Produksi Benih (Ekor) Produksi Budidaya Ikan Produksi Budidaya Ikan (Ton) Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias (Ekor)	15000000 Ekor 15000000 Ekor 1648 Ton 1648 Ton 75000 Ekor 75000 Ekor		
							Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	95.810.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	164.500.000	
							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71 unit/paket	2.582.210.000	
							Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjui Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	44.600.000	
							Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pemanfaatan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 orang	78.160.000	
							Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0 ha	55.840.000	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003				
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Yang Difasilitasi	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Yang Difasilitasi	20 dokumen				
						Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Yang Dikeharkankan	20 dokumen				
						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	30 laporan	242.910.000		
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi modern				
					Penguanan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Koperasi dan UMKM	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10%			
					1.5 Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	39					
					2 Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)						

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Peningkatan Pemahaman dan Pengertian serta Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	125 orang	499.595.000	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Usaha Mikro tangguh	10%		
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatkan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Penangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro dengan kelembagaan yang kuat	500 unit		
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	500 unit	933.270.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor nirl, dan industrialisasi	1	Pertumbuhan PDB Pertanian	4	Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			2	Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	7,5		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
							Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
							Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
							Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
							5 UMKM
							50.000.000

RJPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	12 UKM	75.000.000	
							Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	8%	
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan penjualan produk IKM	10%	
							Kabupaten/Kota			
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 dokumen	362.533.470
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 dokumen	800.000.000
							Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	30.000.000

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	peningkatan kunjungan wisatawan

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
						Penyediaan Data dan Penyebarluaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebarluaran Data dan Penyebarluaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Percentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi
9	Kontribusi tenaga kerja industri	15,3	Pariwisata	15,3	Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Percentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
10	Jumlah tenaga kerja industri	21,4				Pembangunan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 orang	187.600.000		
						Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa).	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	70 orang	210.000.000		
						Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 orang	119.660.000		
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku ekraf yang mengikuti pelatihan	90 orang			
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 orang	150.000.000		
						Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	40 orang	100.000.000		
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	80%			
	11	Jumlah tenaga kerja pariwisata	14,5	Penanaman Modal							

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				12 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	21,0	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian Perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	3 laporan	396.270.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	150 kegiatan	63.430.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	220 pelaku usaha	181.370.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	200 pelaku usaha	151.470.000		
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMDN	500 miliar			
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi Investasi yang dihasilkan	2 dokumen			
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 dokumen	183.000.000		

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003				
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP) Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)		98,40, 98,45			
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1200 izin			
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelajaran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		800 pelaku usaha		302.290.000	
						Peningkatan eksport bermilai tambah tinggi dan pengaruh Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		5,5 Perdagangan		41%	
						Neraca perdagangan barang		7,5		41%	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
KODE (PN/PP)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	100.000.000		
						Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	50.000.000		
						Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	12 UKM	75.000.000		
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Percentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	40%			
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Percentase daya tarik wisata yang diketahui	40%			
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.000.000		
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan strategis pariwisata yang diketahui	50%			

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				2 Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	20,1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%		
				3 Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	29-34		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	100.000.000	
							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 laporan	410.000.000	
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 dokumen	194.175.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	100		
						Keuangan		Percentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai Peraturan yang berlaku	100		
								Percentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Koordinasi dan Pengelolaan Perpendidikan Daerah	Ketersedian dokumen perpendidikan	100			
						Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	115 dokumen	75.000.000		
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	384 dokumen	100.000.000		
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 laporan	101.683.327.844		
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%			

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendataan, Penilaian, Verifikasi, Pemeriksaan, Penagihan dan Pengawasan	100%		
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 laporan	850.000.000	
							PROGRAM PENYELENGGARAN AAN STATISTIK SEKTORAL	Percentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	84,5		
							Penyeleggeraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dikelola dan desiminasi data	900 data		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 dokumen	296.999.750	
							Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	60 dokumen	30.150.000	
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase capaian kinerja berkala perangkat daerah sesuai target	93%		
							Perencanaan				

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Percentase keselarasan/ kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya)	100%			
							Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang perekonomian dan SDA	2 laporan			
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonominan	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1 laporan	40.000.000	
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 laporan	29.800.250	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Percentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SHINas	2,80%		
							Perindustrian				

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Industri kecil yang terdaftar dalam SIINas		70 unit usaha		
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	70 dokumen	50.000.000			
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Percentase peningkatan transaksi pasar tradisional	1,20%			
					Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik	75%			
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 unit	2.145.000.000		
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Indeks harga konsumen (Barang kebutuhan Pokok)	125 angka indeks			

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	8%			
						Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 laporan	50.000.000		
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat dasar	2,6			
						Peningkaban Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	70 orang	120.000.000		

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS			INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
KODE (PN/PP)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 orang	187.600.000	(12)
							Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa).	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	70 orang	210.000.000	
							Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 orang	119.660.000	
							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku ekraf yang mengikuti pelatihan	90 orang		
							Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 orang	150.000.000	
							Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	40 orang	100.000.000	

RKP 2023						RKPD 2023						
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase ketetapan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	74%			
							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan yang difasilitasi	120 pelaku usaha			
							Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekommendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	120 dokumen	49.999.700		
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diawasi	60 perusahaan	49.999.750		
										136.931.024.214		

RPMN/Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan									
2.1		Pengembangan sektor / komoditas / kegiatan unggulan daerah	Laju pertumbuhan PDRB Sumatera (persen/tahun)	5,58	Pemberdayaan Masyarakat Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Percentase Desa-Desa dalam melakukan kerjasama antara desa dan dapat membangun desa melalui kawasan perdesaan	100%			
2.2		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	Share PDRB Wilayah Sumatera (persen)	21,83		Facilitasi Kerja sama antar Desa	Percentase terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa	100%			
2.3		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKV) ke wilayah belum berkembang	IPM Wilayah Sumatera (min-maks)	71,90-78,19			Percentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100%			
2.4		Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen)	5,76		Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	63.229,350		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.5		Meningkatkan IPM melalui penemuan pelayanan dasar secara merata				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Percentase kemasyarakatan Desa yang teratur dalam terti administrasi	100%			
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Desa/Kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya dibina	100%			
						Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	193.398.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 laporan	98.515.000		
						Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa	87%		
							Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa	87%		
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit 6 BPP 73 orang 73 orang 7 orang 73 orang 69 ProgramaRKT	2.000.000.000	
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit 6 BPP 73 orang 73 orang 7 orang 73 orang 69 ProgramaRKT	746.709.000	
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	3 jenis	377.370.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman pertanian (ton/ha)	73,84 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, huah)			
							Produktivitas tanaman perkebunan (ton/ha)	7,47 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)			
							Populasi ternak (ekor)	7288 sapi; 1658 kambing; 21.237 bebek/fitik			
						Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	27.917,97 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah)			
							Jumlah Produksi Perkebunan	41.776,56 (karet, kelapa sawit, lada, kopi)			
							Jumlah populasi ternak	7288 sapi; 1658 kambing; 21.237 bebek/fitik			
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha tani yang dibangun	2 km	350.000.000		
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Persentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	40%			
						Pariwisata					

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
3		Pengendalian penduduk dan pengurangan tata kelola kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	1	98	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	3.1		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2	2,19	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Bulan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	3	80	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
						Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
						8 dokumen	19.300.000

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	380 laporan	44.450.000	
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 bulan		
							Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	70 dokumen	31.250.000	
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Percentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	93%		
							Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	1000 dokumen		
							Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	250 dokumen		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
						Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 sekolah
							Percentase laporan program pembangunan keluarga dan Keluarga berencana (BANGGA KENCANA) yang dibuat
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
					Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase desa/kelurahan yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan

KODE (PN/ PP)		RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	65000 orang	102.000.000	(11)
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%		(12)
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%		
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4254 keluarga	100.000.000	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengertasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 keluarga	1.836.000.000	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%		

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial Persentase terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	100%		
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	29.360.000	
							Pemberian Layanan Kedauratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedauratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	35.090.000	
							Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pernakalan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 orang	861.900.000	
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	175 orang	226.950.000	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	40 orang	95.060.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003				
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (RPS)			
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20 orang	31.900.000		
							Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	74.718.000	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase PKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS	100%		
							Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PKS yang ditingkatkan potensinya	80%		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Orang	902.110.000	
							Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	79.890.000	
							Peningkatan kemampuan potensi Sumber Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 keluarga (3 KUBE, 3 WRSE, 5 Veteran)	110.030.000	
							Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat wewenang Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(9 lembaga) 5 lks, 3 UEP karang taruna, 2 Puskesos	291.650.000	
							Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsulasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 sertifikat	47.780.000	

RJPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	1	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	100%		
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%		
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependidikan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linnmas	603 dokumen	14.000.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	2	17,6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
				Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	3	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	95.000.000	
				Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	4	62,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	260.000.000	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5	7,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	60.000.000	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	6	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	100%	45.000.000	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	7	16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	75.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1			Prevalensi wastng (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8	7,3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	9	0,19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
3			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	10	211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
4			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	11	385	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
5			Insidensi hepatitis B (persen)	12	1,24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			13	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,8	Pengelolaan Jaminan Keselamatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Keselamatan Masyarakat
			14	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
			15	Persentase tekanan darah tinggi	34,1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Daerah yang terakreditasi 1 RS
			16	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan
			17	Persentase rumah sakit terakreditasi	95	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan rencana kebutuhan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM
							12 bulan

RJPMDN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	105 orang	4.925.000.000	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang ditingkatkan dan dikembangkan mutu		105 orang		
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		105 orang	174.999.800	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional	100%			
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IJT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		25 produk		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKP 2003			
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi 12 fasilitas			
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Faskes Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 laporan	4.500.000	
						Peningkatan Ketersediaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Ketersediaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	410 orang	260.434.000	
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	35 unit	104.480.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003						
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Kesehatan Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Kesehatan Jaringan dan Jejaringnya	6 laporan	6.000.000		
							Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Akseptor Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	500 akseptor	477.130.000		
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Percentase Kampung KB yang dibina	100%			
							Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	13 kampung	299.040.000			
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Percentase Cakupan Kelompok kegiatan yang dibina	100%			

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Harapan Lama Sekolah Pendiduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,97	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
						8 ruang	2 ruang
						1.275.000.000	256.500.000
						98 satuan pendidikan	74.999.850
						1058 orang	11.635.560.000
						98 satuan pendidikan	21.200.000.000
						100%	
						1 unit	1.059.300.000
						1 ruang	265.000.000
						1 ruang	800.000.000

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	780.000.000	
							Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	1.323.000.000	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Proses Belajar yang diselenggarakan	30 satuan pendidikan	25.000.000	
							Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	554 orang	5.312.200.000	
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 satuan pendidikan	9.050.000.000	
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan/Nonformal	100%		
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 unit	140.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	140.798.000	
							Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disediakan	567 orang	4.752.510.000	
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 lembaga	4.727.600.000	
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%		
							Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 unit	806.400.000	
							Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	121 peserta didik	44.999.800	
							Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	121 peserta didik	290.400.000	

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	7 satuan pendidikan	746.700.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	7 mulok		
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Mulok yang ditetapkan	7 mulok		
							Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	34.872.000	
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	35.000.000	
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	60 orang	34.822.000	
							PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penddidik	100%		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
						Perhitungan dan Penetapan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Penetapan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 dokumen	63.350.000		
						Penataan Pendidistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendidistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 laporan	750.460.000		
3.5		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,66	Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase Perangkat Daerah dan Jaringannya yang sudah dilalih PUG	80%			

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023		RKPD 2003								
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (12)
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	menurun		Pelembagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	32 PD		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,33		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	80.000.000	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,97		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diaduduki perempuan di DPRD	12%		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,38		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55 orang	94.218.750	
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	menurun		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Perwira Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	159.570.000			
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terselesaikan	100%				
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	80 orang				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	95.220.000			
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 kasus				

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	151.300.000	
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Percentase lembaga layanan pemenuhan hak anak yang dibina	30%		
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pertemuan yang diselenggarakan	6 kali		
							Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anak yang mendapat layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	171.086.000		
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Percentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100%		
							Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	2 kasus		

RKP 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003						
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	90.150.000		
							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang terlayani	40 orang			
							Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	40 orang	135.950.000		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang menerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 layanan	244.675.000		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	33,08%			

RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepenuaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan			
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelegaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 orang	65.000.000	
								Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	48 orang	124.100.000	
							Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi kependuduan yang diberdayakan	100%		
							Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	150.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bidang tanah yang dilegalisasi		56286087	Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengenatasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase PSKS yang berpartisipasi dalam usaha untuk penanganan PMKS
						Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang ditingkatkan potensinya
						Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapastiasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	79.890.000	
							Peningkatan kemampuan potensi Sumber Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapastiasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 keluarga (3 KUBE, 3 WRSE, 5 Veteran)	110.030.000	
							Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat wewenang Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapastiasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	(9 lembaga) 5 lks, 3 UEP karang taruna, 2 Puskesos	291.650.000	
							Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pengarutan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 sertifikat	47.780.000	
							Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pembinaan organisasi perempuan	100%	

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang ada	3 Organisasi		
							Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	187.254.000	
							PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		100%		
							Pertanahan	Percentase tanah masyarakat yang dire distribusi			
							Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang dire distribusi	200 bidang		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan 40%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda Saingnya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 orang 65.000.000
					Peningkatan Kepimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	48 orang 124.100.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Percentase pengembangan keolahragaan	47,27%

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan	5 kejuaraan		
							Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 dokumen	750.000.000	
							Penyelenggaran Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 dokumen	375.000.000	
							Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaran Kejuaraan	5 orang	50.000.000	
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan olahraga prestasi yang dibina	56%		
							Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	135 orang	50.000.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Percentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	24%			
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat dasar	2,6			
						Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	70 orang	120.000.000		
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 orang	187.600.000		
						Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	70 orang	210.000.000		
						Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 orang	119.660.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku ekraf yang mengikuti pelatihan	90 orang		
							Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	50 orang	150.000.000	
							Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	40 orang	100.000.000	
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	82%		
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan /dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 laporan		
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 laporan	88.000.000	
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelegaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelegaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 laporan	135.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023										RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET			
04	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pencasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju. Modern, dan berkarakter	4.1	Indeks Capaian Revolusi Mental	71,96 nilai	Pendidikan	Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	134.750.197.841	100%			
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar			
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Penyelegraran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	98 satuan pendidikan	74.999.850			

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Proses Belajar yang diselenggarakan
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD
					Sekretariat Daerah	Penataan Organisasi	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%			
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	103 dokumen	1.000.000.000		
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Percentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP	100%			
						Kepegawaian	Percentase kasus pelanggaran disiplin ASN	0,10%			
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	75.095.000		
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	85.000.000	
						PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase Perangkat Daerah dan Jejaringnya yang sudah dilatih PUG	80%			
						Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003						
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	32 PD			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	80.000.000		
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang dihaduki perempuan di DPRD	12%			
							Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55 orang	94.218.750		
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang			

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	159.570.000		
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Percentase pembinaan organisasi perempuan	100%			
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang ada	3 Organisasi			
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	187.254.000		
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan ormas, suku, agama dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	70%			

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah PHBN yang di peringati	6 PHBN		
							Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	1.329.753.000	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Percentase anggota pramuka yang aktif	100%		
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina	100%		
							Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang ditingkatkan	1 organisasi	250.000.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat arah perkembangan peradaban dunia	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,64 nilai	Kesatuan bangsa dan politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,9			
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	275 orang		
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	275 orang	106.380.700	

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71 nilai	Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	45,45%
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya kebudayaan daerah	100%
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 objek
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	75.500.000
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestariya kesenian tradisional daerah	100%
					Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemanfaatan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25.000.000

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamantnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbimanya lembaga adat 100%
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan 27,27%
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang dibina 3 kesenian
						Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi
						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola 93,75%

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase cagar budaya yang dietapkan	6,25		
							Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didafarkan	4 objek	60.000,000	
							Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dietapkan	5 objek	50.000,000	
							Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase cagar budaya yang dikelola	81,25%		
							Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diindungi	5 objek	60.000,000	
							Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Kesatuan bangsa dan politik			
			4.3				Indeks kerukunan Umat Beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Prevelensi Penyalahgunaan Narkotika	1,9	
							Indeks Pembangunan Keluarga	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di	275 orang	

RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	40 orang	99.162.250	
							Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Percentase pembinaan organisasi perempuan	100%	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003						
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	178 perpustakaan	284.200.000		
							Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103 orang	140.765.000		
							Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	300 eksemplar	64.800.000		
							Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.000 eksemplar	113.840.000		
								Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	12.729.200	

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pembentukan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55 nilai		
							Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 lokus	23.955.000	
							Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung layanan perpustakaan yang dibangun	1 paket	438.400.300	
							Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba bercerita	85 peserta	107.050.000	
							Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikenalkan	8 perpustakaan	66.005.000	
							Penelitian dan pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	82%	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 laporan	57.510.850		
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	4 laporan	198.822.750		
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 laporan	49.145.950		
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan /dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 laporan			
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan Diseminasi pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	135.000.000		
									6.630.569.450		

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar									
	5.1	Infrastruktur pelayanan dasar	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94,63	Perumahan dan Permekiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah angka backlog perumahan	500 unit			
			Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	86			Percentase penduduk yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100%			
			Percentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	59,62		Pendaatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	6 kecamatan	35.000.000		
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,6		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	12 bulan	25.000.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Volume tanpungan air per kapita (m3/kapita)	58,1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat
			Jumlah Daerah Irrigasi yang dimodernisasi	2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Percentase rumah tidak layak huni yang tertangani	2 kawasan
			Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	116432,71	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	1 kegiatan
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	24 unit
			Peryediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	11,43	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Percentase peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum	60,79%

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)		60		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septic yang dibangun
							200 unit
							2.750.000.000

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Panjang meter perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola
						Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C yang tersusun
						Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota
						Persejajaran Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan
						Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan kabupaten	1 kegiatan
						PROGRAM PENAGUNAAN TANAH	117.000.000
					Pertahanan	Percentase kecamatan yang tersedia Peta Zona Nilai Tanah dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	50%

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	1 kegiatan		
							Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	1 dokumen	20.000.000	
							Pembangunan, Pemberitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah paket kegiatan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal yang dilaksanakan			
							Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal yang beroperasi dan terpelihara	1 unit	100.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.3	Infrastruktur perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)									

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak	96,40%		
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septic yang dibangun	200 unit	2.750.000.000	
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	88,43%		
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/ dipelihara	900 SR	6.150.000.000	
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Percentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)	43,99%		
							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	12 bulan		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4	energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektifikasi (%)	100	Sekretariat Daerah	2 kawasan	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	20 laporan 25.000.000
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 2 ha
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Percentase kebijakan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum 100%

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023							RKPD 2003					
KODE (PN/ PP)	NO	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,4	Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase disusumnya perencanaan lingkungan hidup 20%
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,4		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH 1 dokumen
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS 1 dokumen
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	64,5		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemer ringan 47
06						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan pencemaran 5 dokumen

RPMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003						
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen hasil informasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Media Lingkungan Air Permukaan, Air Laut, Udara dan Tanah)		4 dokumen	350.000.000	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca		1 dokumen	100.000.000	
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji		1 dokumen	224.999.600	

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	2 dokumen	149.999.800	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Percentase RTH publik dikelola dengan baik	7,63%		
							Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah bulan peneliharaan RT	12 bulan		
							Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47 ha	39.999.800	
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	43,14 ha	2.236.999,95	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	34 ton		

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	10 kali		
							Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1 dokumen	19.999.850	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HLDUP (PPLH)	Percentase ketatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	74%		
							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan yang difasilitasi	120 pelaku usaha		

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen	49.999.700	
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	1 dokumen	49.999.750	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase masyarakat, komunitas, dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	20 persen		
							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 jenis penghargaan		
							Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 entitas	230.999.700	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENANGGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketetaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diberikan	74%			
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	5 kasus			
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 dokumen	30.000.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 dokumen	29.999.800		
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase jumlah sampah yang tertangani	39%			
						Pengelolaan	Jumlah bulan	12 bulan			

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Sampah	pengelolaan sampah		1.733.399.450		
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pembinaan kepada pihak swasta	100%	9.999.950		
					Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terkonservasinya Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	30 ha			
						Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan untuk Mengukur Progres Kinerja				
						Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten	36 Operasi	215.000.000		
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Dinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	30 Hektar	14.999.000		
						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihian Ekosistem	30 Hektar	150.000.000		
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindaklanjuti	3 Permohonan	25.000.000		

RJPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
						Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	18.990.000	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemer ringan	47		
6.2		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Percentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan pencemaran	5 dokumen		
			Percentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bencana iklim (persen)	1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen hasil informasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Media Lingkungan Air Pernakuan, Air Laut, Udara dan Tanah)	4 dokumen	350.000.000	
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3,5		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	100.000.000	

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Trantibumlinmas	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan kejadian bencana	100%		
							Pelayanan informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	100%		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	198.022 jiwa		
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kejadian bencana	40 kejadian		
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	240 orang	45.000.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dokumen	710.340.000		
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamat Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 unit	53.700.000		
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	10 orang	52.000.000		
						Penyusunan Rencana Kontinjenji	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjenji yang Dilengkapi	1 dokumen	100.000.000		
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	900 orang	50.000.000		
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana	40 kejadian			
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Dietakpan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 dokumen	120.000.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 orang	40.000.000	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 orang	37.500.000	
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Dietapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dokumen	38.500.000	
							Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	6 dokumen	15.000.000	

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003			
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9,4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,6		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (DIKPLHD dan IKLH)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	7		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase jumlah sampah yang tertangani
						Pengelolaan Sampah	Jumlah bulan pengelolaan sampah
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	12 bulan
						Jumlah pembinaan kepada pihak swasta	1.733.399,450
						100%	9.999.950

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023							RKP 2003			
KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terkonservasinya Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	30 ha			
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan untuk Mengukur Progres Kinerja	30%			
					Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten	36 Operasi	215.000.000		
					Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	30 Hektar	14.999.000		
					Pemulihian Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihian Ekosistem	30 Hektar	150.000.000		
					Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah Permothonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindaklanjuti	3 Permothonan	25.000.000		
					Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	18.990.000		

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman perkebunan; Produktivitas tanaman pertanian	7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi) ton/ha; 70,87 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah) ton/ha			
							Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Percentase Pengendalian dan Pengukuran Benona Pertanian	85%		
							Pengendalian Organisme Pengangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengangu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan , Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	30 ha	349.910.000	
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	8%			
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase pertumbuhan penjualan produk IKM	10%		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	5 dokumen	362.533.470	

RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1	Konsolidasi demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	75,45	Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	9 partai politik				

RKPJMN Tahun 2020-2024 / RKP 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(Kabupaten/Kota)			KABUPATEN/KOTA A					
						Penataaan Organisasi	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi	100%	500.000.000		
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	100%			
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%			
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linnas	603 dokumen	14.000.000.000		

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	75.095.000	
						Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	85.000.000	
						Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Percentase layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) administrasi pemerintah dan publik yang diimplementasikan	70%		
						Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah jaringan internet, domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	Jumlah jaringan internet, domain dan sub domain yang dikelola dengan baik	1 jaringan internet, 1 domain dan 63 sub domain	2.735.000.000	
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instrumen sarana dan prasarana penunjang e-government	Jumlah instrumen sarana dan prasarana penunjang e-government	7 instrumen	1.110.735.000	

RPMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023				RKPD 2003							
NO	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.4		Menjaga stabilitas keamanan dan nasional	Indeks Keamanan dan Keteribatan Nasional	3,3	Trantibumilmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%			
						Penanganan Ganggonan Ketenteraman dan Keteribatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2.215.395.900		
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL	Percentase penyelesaian konflik sosial di masyarakat	100%			
						Kesatuan bangsa dan politik	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%			
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	40 orang		

RKP 2023						RKPD 2023					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.5	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,71 nilai	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kejadian intelijen, pemanatan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	40 orang	99.162,250			
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	100%				
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%				
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 dokumen	390.000.000			
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 kasus	300.000.000			

RPJMN Tahun 2020-2024 / RKPD 2023						RKPD 2003					
NO	KODE (PN/ PP)		PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET 2023	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.3.1 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Dokumen perencanaan pemerintah memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bangka Tengah. Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan terhadap beberapa sumber produksi, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor perkebunan, pertanian, perdagangan dan jasa.

Prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Kecamatan Koba

Sebagai ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, Kota Koba mendapatkan prioritas dalam penataan kawasannya. Dalam Program pembangunan terpadu yaitu dengan slogan “Kota Koba Terang Benderang”, telah mengintegrasikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas OPD dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Koba seperti penataan RTH di sekitar Kota Koba, Penataan area *Car Free Day*, membangun pusat kuliner, pengadaan lampu PJU, media informasi masyarakat, rambu dan marka jalan, penataan pasar modern, penataan pemukiman kumuh, dan sarana umum lainnya, Pengembangan Kawasan strategis Kurau Terentang, Pengembangan Kawasan wisata hutan mangrove Kurau, pantai Terentang, pantai desa Arung Dalam, Sumur Tujuh, dan Kolong Biru.

Kecamatan Koba memiliki 5 (lima) kelurahan, dengan adanya kebijakan bantuan pendanaan kelurahan melalui DAU, Pemerintah Daerah akan mempunyai komitmen lebih besar dalam pemenuhan besaran anggaran kelurahan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya.

2. Kecamatan Pangkalanbaru

Kecamatan Pangkalanbaru sebagai pintu gerbang perbatasan dengan ibukota Provinsi, Kota Pangkalpinang memiliki lokasi yang sangat strategis. Kecamatan ini masih memiliki unggulan di bidang perdagangan dan jasa. Keberadaan bandar udara, hotel, serta pasar modern memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar. Hal ini juga menjadikan Kecamatan Pangkalanbaru sebagai salah satu pusat kawasan perkotaan yang cukup diminati sebagai kawasan perumahan dan permukiman dan juga Pangkalanbaru merupakan pusat kawasan industri.

3. Kecamatan Sungaiselan

Kecamatan Sungaiselan merupakan salah satu Kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki potensi unggulan di bidang kelautan perikanan, salah satu komoditi unggulannya adalah Udang Galah atau Udang Satang, disamping produksi ikan jenis lainnya, sehingga kawasan Sungaiselan menjadi kawasan budidaya dan perikanan tangkap. Walaupun di Kecamatan Sungaiselan masih banyak juga masyarakat yang berkebun lada, sawit, serta tanaman unggulan seperti cabai, bawang dan serta buah-buahan. Selain perikanan dan pertanian, Kecamatan Sungaiselan telah menjadi pusat Industri Rumahan.

Selain perikanan dan pertanian, Kecamatan Sungaiselan telah menjadi pusat Industri Rumahan (IR) yang sejak tahun 2016 dengan adanya program Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu *pilot project* pengembangan industri rumahan yang lokasinya di Kecamatan Sungaiselan. Ibu-ibu atau perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku industri rumahan yang diberikan bantuan modal, peralatan dan pelatihan serta pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan sejak itu banyak bermunculan industri rumahan yang mulai berkembang dari jumlah 191 IR menjadi 271 IR yang dibina untuk terus dikembangkan. Produk-produk olahan dari Industri Rumahan Sungaiselan diantaranya produk olahan makanan dan kerajinan. Seluruh IR yang berada di Kecamatan Sungaiselan merupakan kategori IR Pemula dan diharapkan dapat berkembang menjadi IR Berkembang dan IR Maju. IR Bangka Tengah telah dilakukan evaluasi dari Kementerian PPPA untuk dijadikan percontohan antar negara.

Sungaiselan juga merupakan wilayah pengembangan kerang darah yang berada di Desa Tanjung Pura, yang telah dikembangkan sejak tahun 2016. Saat ini kelompok pembudidaya kerang berjumlah 4 (empat) kelompok. Hasil produksi perikanan budidaya kerang darah telah memenuhi pasar hingga di Kota Pangkalpinang.

4. Kecamatan Simpangkatis

Simpangkatis memiliki areal perkebunan, pertanian, perikanan. Kawasan Pertanian Cabai, Bawang dan Jeruk serta budidaya ikan air tawar. Selain itu, Kecamatan Simpangkatis tengah menggalakkan kerajinan batik pakis sejenis batik cual yang motifnya seperti tanaman pakis. Pusat kerajinan batik pakis sudah mulai dikenal dan telah menjadi ikon dari kecamatan simpangkatis yang juga kental dengan budaya ritual adat.

Selain itu Kecamatan Simpangkatis tengah menggalakkan kerajinan batik pakis sejenis batik cual yang motifnya seperti tanaman pakis. Pusat kerajinan batik pakis sudah mulai dikenal dan telah menjadi ikon dari Kecamatan Simpangkatis yang juga kental dengan budaya ritual adat.

5. Kecamatan Namang

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka Tengah diarahkan pada kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah, seperti pantai dan/atau daerah hilir daerah aliran sungai, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kemudian setelah kriteria teknis tersebut dipenuhi, aspek berikutnya yang dipertimbangkan adalah ketersediaan lahannya. Lahan-lahan yang diutamakan adalah lahan-lahan yang sudah tidak berhutan atau bukan merupakan kawasan hutan. Khusus untuk lahan-lahan potensial yang berada di kawasan lindung, tidak dijadikan salah satu kawasan pengembangan. Kawasan peruntukan pertanian direncanakan di Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat) dan Kecamatan Namang (Desa Belilik dan Desa Namang). Kawasan Namang juga dikenal sebagai kawasan pertanian padi sawah yang memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 161,73 Ha. Selain kawasan pertanian Namang juga memiliki kawasan wisata hutan pelawan yang menghasilkan madu dan jamur sebagai komoditi yang cukup diminati masyarakat. Wisata Gurun yang saat ini juga menjadi ikon di Desa Namang, Kecamatan Namang yang terdiri dari 8 (delapan) desa ini memiliki produk unggulan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Produk unggulan Desa tersebut meliputi:

Tabel IV.12.
Tipologi dan Produk Unggulan Desa di Kecamatan Namang

No	Nama Desa	Tipologi Desa dan Produk Unggulan Desa	
		Tipologi	Produk Unggulan Desa
1	Desa Cambai	Dataran	Pertanian sayur mayur, Perkebunan (lada, karet, sawit)
2	Desa Cambai Selatan	Perkebunan	Jamur tiram
3	Desa Jelutung	Campuran pesisir, dataran dan perbukitan	Produk UMKM
4	Desa Namang	Dataran / hamparan, tanaman pangan	Beras merah
5	Desa Belilik	Dataran sedang	Perkebunan lada/karet/sawit dan pertanian
6	Desa Kayu Besi	Campuran pesisir dataran, pertanian dan perdagangan	Tidak fokus pada satu bidang
7	Desa Baskara Bakti	Campuran pesisir dataran, pertanian dan perikanan	Produk UMKM
8	Desa Bukit Kijang	Dataran / hamparan	Tanaman pangan, industri bahan pangan

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

Tabel IV.13.
Potensi Desa di Kecamatan Namang

No	Nama Desa	Potensi Desa			
		Komoditas (Peternakan)	Komoditas (Perkebunan)	Hasil Tangkapan	Komoditas (Hasil Hutan)
1	Desa Cambai	-	Kelapa sawit, kelapa, karet	-	Kayu, gula enau
2	Desa Cambai Selatan	-	Kelapa	-	-
3	Desa Jelutung	-	Karet, kelapa, lada, kelapa sawit	Kepiting, nila, cumi, rajungan, belanak	Madu lebah, kayu
4	Desa Namang	Daging, telur, madu	Kelapa sawit, kelapa, lada	Sepat, pari, kodok, cumi, kembung, mujair, lobster, mas, gurame, nila	Kayu, bambu, madu lebah, kayu ulin, kayu besi
5	Desa Belilik	-	Lada	Kakap, belut, belanak, bawal, lele, kepiting, patin, ikan ekor kuning	-
6	Desa Kayu Besi	-	Lada, karet, kelapa sawit	-	-
7	Desa Baskara	-	Karet, kelapa	Tuna, tenggiri, cumi,	-

No	Nama Desa	Komoditas (Peternakan)	Komoditas (Perkebunan)	Potensi Desa	Komoditas (Hasil Hutan)
				Hasil Tangkapan	
	Bakti		sawit, lada, kelapa, coklat	ikan ekor kuning, lobster, kepiting, tongkol/cakalang, pari	
8	Desa Bukit Kijang	Telur, daging	Coklat, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, karet, lada	-	-

Sumber : Bappelitbangda, data diolah, 2022

6. Kecamatan Lubuk Besar

Kecamatan Lubuk Besar pada umumnya memiliki potensi sektor pertanian dan perkebunan, namun secara khusus di Kecamatan ini sangat berpotensi di sektor kehutanan dan pariwisata. Adapun sector kehutanan di Kecamatan Lubuk Besar terdapat Industri Kehutanan yang dikelola oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Bangkanesia. Di Sektor Pariwisata juga terdapat wisata alam berupa Air Terjun Sadap, Air Terjun C2, Pantai Gusung Asam, Pantai Tanjung Berikat dan Danau Bukit Sadap.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah penanaman kayu gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit. Kecamatan Lubuk Besar dikenal sebagai pusat Gaharu, dengan pabrik pengolahan gaharu yang diolah menjadi banyak komoditi diantaranya; chip gaharu, minyak, aksesoris, dan teh gaharu. Satu potensi wisata alam yang ada di Kecamatan Lubuk Besar adalah Wisata Madu Kelulut Trigona yang terletak di Desa Lubuk Lingkuk, tempat ini adalah tempat budidaya madu kelulut yang menjadi kawasan wisata yang sering dikunjungi dengan ciri khas menghisap madu langsung dari sarangnya, tempat ini cukup diminati oleh masyarakat, sehingga kelompok tanahutan pun menjadi optimis untuk pengembangan budi daya madu kelulut trigona dan telah menghasilkan produk seperti madu yang memiliki rasa yang khas manis asam dan juga *bee pollen*.

4.3.2 Prioritas Tematik Holistik Integratif dan Spasial

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pendekatan keberhasilan pembangunan oleh pemerintah selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah tercapai, ternyata permasalahan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak serta merta dapat diselesaikan. Kondisi capaian indikator makro Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari angka kontraksi sebesar -2,87% tahun 2020 menjadi sebesar 4,76 %, namun disisi lain angka kemiskinan ikut meningkat dari 4,85% tahun 2020 menjadi 5,13% pada tahun 2021, ini yang menyebabkan kualitas pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Paradigma pembangunan ekonomi kedepan seharusnya tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan yang bersifat inklusif. Kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif adalah komponen penting dari strategi pemerintah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat.

Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial (social safety nets). Indikator ketercapaian pertumbuhan ekonomi inklusif ditandai dengan pencapaian indikator makro diantaranya: pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, kemiskinan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif antara lain program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga

kerja, program pengelolaan perikanan tangkap, program perikanan budidaya, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program perencanaan pembangunan industri, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan program perekonomian dan pembangunan.

2. Pengentasan Kemiskinan (Silakso)

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan melalui program kegiatan yang mendukung upaya tersebut.

Sebagai upaya percepatan dan penuntasan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan penyelenggaraan sosial satu pintu yang bertujuan melakukan verifikasi awal dokumentasi pelayanan masyarakat dan sinkronisasi data masyarakat miskin yang ada melalui aplikasi SILAKSO yang dilaunching pada tahun 2021 yang lalu. Kegiatan yang dapat disinkronisasikan dalam aplikasi tersebut, yaitu pelayanan bantuan kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi yang juga terintegrasi dengan perangkat daerah teknis dan mitra BAZNAS.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendukung pelayanan SILAKSO antara lain program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, program pengelolaan pendidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program informasi dan komunikasi publik dan program aplikasi informatika:

3. Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi

yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Pada perkembangannya potensi pariwisata yang akan dikembangkan di Kabupaten Bangka Tengah terdapat beberapa usulan DTW pariwisata tahun 2023 yang hanya berlokasi di Desa Lubuk Besar, diusahakan hanya 1 lokasi DTW. Sementara akan difokuskan di tahun 2023 ada 5(lima) lokasi yaitu Sumur Tujuh, Danau Kaolin, Bukit Pading, Air Terjun C2, dan Pulau Ketawai.

Beberapa program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pariwisata antara lain: program pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program penyelenggaraan jalan, program penyelenggaraan penataan ruang, program peningkatan kerjasama desa, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program pengelolaan keanekaragaan hayati, program pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

4. Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi antara lain:

1. Prevalensi stunting pada anak Baduta dan Balita.
2. Presentasi Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).
3. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.
4. Prevalensi wasting (kurus) pada anak balita.
5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.
6. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan Remaja puteri.
7. Prevalensi kecacingan pada anak balita.
8. Prevalensi anak diare pada anak baduta dan balita.

Berdasarkan Data SSGI prevalensi stunting Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sebesar 20,0%. Intervensi Desa Stunting ada 7 (tujuh) Desa dengan prevalensi stunting diatas 10% yaitu Desa Tanjung Gunung, Desa Padang Baru, Desa Belimbing, Kelurahan Sungai Selan, Desa Sarang Mandi, Desa Cambai Selatan dan Desa Bukit Kijang. Sedangkan

prevalensi Kabupaten (E-PPGBM) Tahun 2021 yaitu sebesar 3,31%. Batasan/ prevalensi stunting yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah tidak lebih dari 20%.

Desa- desa di Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan sebagai Lokasi Khusus (lokus) tahun 2021 berdasarkan E-PPGBM yang diunduh tanggal 31 Maret 2021 dan telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/235/BAPPELITBANGDA/2021 tentang Penetapan Desa Lokus Stunting di Kabupaten Bangka Tengah adalah Desa Tanjung Gunung, Desa Batu Belubang, Desa Lubuk Pabrik, Desa Kulur Ilir, Desa Sungaiselan, Desa Sarangmandi, Kelurahan Sungaiselan Atas, Desa Romadhon, Desa Tanjung Pura, Keretak Atas, Desa Melabun, Desa Kerantai, dan Desa Belilik. Tahun 2022 Kabupaten Bangka Tengah akan dijadikan sebagai lokasi khusus yang langsung mendapat pembinaan dari pusat untuk melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi penanganan stunting.

Terdapat 8 (delapan) Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yaitu:

1. Analisis Situasi.
2. Rencana Kegiatan.
3. Rembuk Stunting.
4. Perbup tentang Peran Desa.
5. Pembinaan kader pembangunan manusia.
6. Sistem manajemen data.
7. Pengukuran dan publikasi data stunting.
8. Reviu Kinerja Tahunan.

Fokus intervensi Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yaitu baik intervensi spesifik dan sensitif melibatkan lintas OPD. Intervensi spesifik antara lain:

a. Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi gizi spesifik yaitu intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK serta berkontribusi pada 30% penurunan stunting dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan yang dilakukan oleh sektor kesehatan (kegiatan/ upaya yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan dilakukan oleh sektor kesehatan)

b. Intervensi Gizi Sensitif (Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung dan umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan antara lain: penyediaan air bersih, pemberdayaan perempuan) Intervensi Gizi Sensitif yaitu

kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi mengatasi 70% stunting.

- c. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak.
- d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan.
- e. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Penangguangan Stunting Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting serta Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting.

Pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik, integrasi, tematik dan spasial, difokuskan di 13 lokus desa stunting dan tersebar di program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diantaranya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, dinas pangan, dinas lingkungan hidup, dinas perumahan, permukiman dan perhubungan, dinas komunikasi dan informatika dan dinas perikanan .

5. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, guna meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan dengan Road Map sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya trjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Tengah agar berjalan dengan baik, sebagai perwujudan salah satu program prioritas daerah yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerapkan sembilan

program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi. Dengan adanya 9 program Reformasi Birokrasi tersebut diharapkan, akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Tengah lebih terarah dan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan akhir dari reformasi birokrasi tersebut.

Oleh karena itu seluruh OPD diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan yang tepat dan dapat dengan cepat diterapkan dalam rangka mengatasi masalah-masalah diatas. Tentunya setiap kegiatan searah dengan 9 program yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi, yang dilaksanakan di beberapa Perangkat Daerah yaitu: inspektorat, sekretariat daerah, badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Stastistik. Berikut 9 program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan Kabupaten Bangka Tengah yang termuat dalam sebuah road map reformasi birokrasi;

1. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan penataan organisasi dan program kepegawaian daerah.

2. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan, dengan program pendukung program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan penataan organisasi dan program kepegawaian daerah.

4. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan, dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah; kegiatan penataan organisasi, program kepegawaian daerah, dan program aplikasi informatika, .

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja, dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan penataan organisasi, sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan serta program kepegawaian daerah.

6. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing OPD. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP, dengan program pendukung program penyelenggaraan pengawasan.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU), dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan penataan organisasi sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, program kepegawaian daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan program aplikasi informatika.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan penataan organisasi, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Program pendukung penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan penataan organisasi; sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokras, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dan sub kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.

4.3.3 Prioritas Pendukung Kebijakan Nasional Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Covid-19

Saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah semakin dapat dikendalikan, bahkan Indonesia akan menuju endemi. Namun pemerintah pusat akan terus mendorong pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023 dengan mengawal keberlanjutan proses penguatan fondasi ekonomi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan termasuk munculnya varian baru Covid-19 yang telah terdeteksi di dalam negeri, serta tetap mendorong percepatan vaksinasi lengkap dan boster.

Pemulihan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 didukung oleh beberapa program yang dilaksanakan secara terintegrasi antara lain: Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Perekonomian dan Pembangunan. Upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan ini antara lain melibatkan peran aktif dunia usaha melalui dana CSR, UKM, IKM, organisasi masyarakat, peran serta masyarakat seperti Gapoktan, KWT dan Pokdarwis.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini akan dijabarkan program prioritas Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah disusun dalam rangka memenuhi sasaran, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 serta mengacu pada tema RKPD 2023 yang telah dirancang yaitu “**PEMULIHAN EKONOMI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**”

5.1 PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi PD bersangkutan;
- 3) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2021;
- 4) Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun harus didasarkan atas hasil evaluasi pembangunan tahunan dalam RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam **RPJMD dan RENSTRA PD 2021-2026**;
- 5) Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi;
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh PD, merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Prioritas

program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah didalam RPJMD yang disusun kemudian oleh PD diuraikan di dalam Renstra PD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya didalam RKPD, jika terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD, maka kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra PD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran indikator kinerja utama PD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke PD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan, PD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra PD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD. Berikut disajikan tabel pagu indikatif belanja dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

Pagu Indikatif Belanja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	136.931.024.214
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	5.448.511.350
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.	134.750.197.841
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	6.630.569.450
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	86.145.585.000
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.	12.652.167.625
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	26.742.181.850

Tabel V.1.
Pagu Indikatif Belanja dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1	Pembangunan Demokrasi	57.998.936.844
2	Pembangunan Ekonomi	332.571.540.866
3	Pembangunan Lingkungan	146.914.781.918
4	Pembangunan Pemerintahan	369.448.798.389
5	Pembangunan Sumber Daya Manusia	490.242.790.352
6	Pembangunan Wilayah	159.121.177.690
7	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	112.724.886.076

Tabel V.2.
Pagu Indikatif Belanja per Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2023

NO.	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
	Prioritas Utama:	
1	Peningkatan ekonomi kerakyatan	384.500.559.306
2	Perlindungan social	273.243.671.757
3	Penurunan angka pengangguran	72.872.124.560
4	Peningkatan pendidikan	313.722.407.620
5	Peningkatan kesehatan	222.979.379.310
	Prioritas Pendukung:	
6	Pengendalian lingkungan hidup	118.195.192.918
7	Peningkatan sarana public	115.558.726.250
8	Peningkatan tata kelola pemerintahan	373.620.467.023

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Dinas Pendidikan

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kesehatan

Dinas Kesehatan

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Trantibum Linmas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penanggulangan Kebakaran
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Penanggulangan Bencana
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6. Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Program Penanganan Bencana
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Ketenagakerjaan

Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja

 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

 - Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Program Perlindungan Khusus Anak
 3. Pangan

Dinas Pangan

 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

 - Program Penatagunaan Tanah
 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 5. Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
- Program Pengendalian Penduduk
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9. Perhubungan
Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Program Pengelolaan Pelayaran

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

10. Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

- Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Aplikasi Informatika
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
- Program Pengembangan UMKM
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

12. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandian

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

17. Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

18. Kearsipan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melakui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pertanian

Dinas Pertanian

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Pangan

- Program Penyuluhan Pertanian

4. Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

6. Perindustrian

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Penelitian dan Pengembangan
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Administrasi Pemerintahan
- Sekretariat Daerah
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Administrasi Umum
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sekretariat DPRD
- Program Layanan dan Administrasi Keuangan
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

E. Unsur Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

F. Unsur Kewilayahan

Kecamatan Koba

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Pangkalanbaru

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Sungaiselan

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Simpangkatis

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Namang

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan Lubuk Besar

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

G. Unsur Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 beserta tolok ukur Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Matriks Tabel lampiran Bab V tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 per Perangkat Daerah. Berikut ini disajikan pagu pendanaan indikatif per Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan Musrenbang dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan dan asumsi lainnya yang tercantum dalam Bab III.

**Tabel V.3.
Pagu Indikatif Belanja Tahun 2023**

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1			URUSAN WAJIB	
1	01		Pendidikan	
1	01	01	Dinas Pendidikan	289.474.481.150
1	02		Kesehatan	
1	02	01	Dinas Kesehatan	175.137.501.252
1	03		Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	81.405.041.000
1	04		Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1	04	01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	18.942.260.000
1	05		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1	05	01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.552.240.000
1	05	02	Satuan Polisi Pamong Praja	14.292.732.599
1	06		Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1	06	01	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.045.868.676
1	07		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	
1	07	01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.759.261.230
1	08		Pangan dan Pertanian	
1	08	01	Dinas Pangan	12.800.557.400
1	09		Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1.	09	01	Dinas Lingkungan Hidup	15.176.462.918
1	10		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.679.600.000
1	11		Kominfo, Statistik, Persandian	
1	11	01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.753.475.000
1	12		Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	
1	12	01	Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja	6.269.608.000
1	13		Kearsipan dan Perpustakaan	
1	13	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.544.733.170
2			URUSAN PILIHAN	
2	01		Kelautan dan Perikanan	

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
2	01	01	Dinas Perikanan	14.856.400.000
2	02		Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2	02	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.531.135.000
2	03		Pertanian	
2	03	01	Dinas Pertanian	13.671.449.000
2	04		Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMKM	
2	04	01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	13.883.321.300
3			UNSUR PENUNJANG	
3	01		Sekretariat Daerah	52.066.068.000
3	02		Sekretariat DPRD	36.545.760.700
			PENGAWASAN	
3	03		Inspektorat	7.491.500.000
			URUSAN PEMERINTAHAN	
3	04		Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	
3	04	01	Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah	12.771.224.400
3	05		Keuangan	
3	05	01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	144.146.000.000
3	05	02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.170.000.000
3	06		Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	
3	06	01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.418.609.000
4			UNSUR KEWILAYAHAN	
4	01		Kecamatan Koba	10.328.438.000

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
4	02		Kecamatan Pangkalan Baru	8.526.003.000
4	03		Kecamatan Sungai Selan	7.056.254.800
4	04		Kecamatan Simpang Katis	7.673.587.380
4	05		Kecamatan Namang	6.252.578.000
4	06		Kecamatan Lubuk Besar	5.053.600.000
5	01		PEMERINTAHAN	
5	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.453.176.144
JUMLAH				1.068.728.927.119

Sumber: Data diolah

5.2 USULAN HASIL MUSRENBANG

Usulan musrenbang desa harus diinput dalam Aplikasi SIPD dengan menggunakan akun masing-masing Kepala Desa. Masukan usulan kegiatan hasil Musrenbang desa/kelurahan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi dalam forum perangkat daerah oleh PD dan unsur kecamatan serta *stakeholder* terkait. Secara akumulatif, aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum musrenbang pada 63 Desa/Kelurahan dan sebanyak 337 usulan. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh mitra bappeda, kecamatan PD dan TAPD Perencanaan. Jumlah usulan yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 sebanyak 149 usulan. Persentase tingkat keakomodiran usulan hasil musrenbang desa/kelurahan dalam RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 44,2 %.

Tabel V.3

Rekapitulasi Usulan Hasil Musrenbang Desa yang diakomodir ke dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Usulan
1.	Koba	35 usulan
2.	Lubuk Besar	14 usulan
3.	Namang	18 usulan

No.	Kecamatan	Jumlah Usulan
4.	Simpangkatis	18 usulan
5.	Sungaiselan	26 usulan
6.	Pangkalanbaru	38 usulan
	TOTAL	149 usulan

Sumber: data diolah, Bappelitbangda, 2022

5.3 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Usulan Pokir harus diinput ke dalam Aplikasi SIPD dengan menggunakan akun masing-masing Anggota Dewan. Usulan Pokir yang diinput dalam Aplikasi SIPD merupakan hasil reses yang telah diparipurnakan. Untuk Tahun 2023, usulan Pokir yang diinput ke dalam Aplikasi SIPD didasarkan pada Hasil Reses, hasil kunjungan kerja dalam daerah, rapat dengar pendapat. Adapun untuk hasil reses dicantumkan dalam surat keputusan, sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/2/DPRD/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Masa Sidang I Tahun 2021; dan
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/19/DPRD/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Masa Sidang II dan III Tahun 2021

Jumlah pokok pikiran yang diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri) sebanyak 296 usulan kegiatan, dan setelah melalui proses verifikasi terdapat 121 usulan kegiatan yang diakomodir dalam RPKD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada Tabel di bawah ini.

**Tabel V.5. Rekpitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bmgka Tengah
Tahun 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
1	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	mempermudah pengguna jalan	jalan melintang rt 05, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
2	Pertanian	Bantuan Ayam Merawang	Bantuan Bibit Ayam Kampung dan Pakan, Kelompok Ternak Desa Kebintik Sampur Bawah, 5 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Kelompok Ternak Desa Kebintik Sampur Bawah, 5 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pertanian
3	Pertanian	Bantuan Sapi	Pengajuan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Maju Bersama Desa Padang Baru Sudah Mengajukan Proposal Berupa Sapi Ternak Pada Tahun 2021, Volume 7 ekor SAPI	Kelompok Maju Bersama Desa Padang Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pertanian
4	Pertanian	Bantuan Biji / Kecambah Sawit	Tambahan pembangunan siring dalam Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pertanian
5	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	bantuan jalan usaha tani (puru)	Pal Besi, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
6	Pertanian	Bantuan Biji / Kecambah Sawit	\Program pengadaaan kembali bibit sawit subsidi di Kecamatan Simpangkatis.	Program pengadaaan kembali bibit sawit subsidi di Kecamatan Simpangkatis., Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
7	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Rehabilitasi jalan usaha tani dan nelayan di desa trubus	desa trubus, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pertanian
8	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Pembangunan jalan produksi	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
9	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	banyaknya lobang disepanjang jalan yang mengakibat terjadi adanya genangan air pada saat musim hujan dan membuat masyarakat tidak nyaman saat melakukan aktifitas	Perkebunan Rakyat Desa Kurau Timur Dinas PU, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
10	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	lanjutan pembangunan jalan produksi	desa cambai selatan, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pertanian
11	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	Akses petani belum pernah diperbaiki	Rt. 02 dan Rt. 03, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian
12	Pertanian	Bantuan Sapi	Bantuan Sapras Kelompok Ternak Sapi (Mesin Pengaduk Pakan, Pencacah Kompos dan Timbangan Ternak)	Kelompok Tani Air Risi Rt. 02, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pertanian

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
13	Pertanian	Bantuan Jalan Produksi	jalan ini masih tergenang air apabila hujan turun	Desa Pinangsebatang, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pertanian
14	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	membantu masyarakat dalam penerangan di malam hari	desa puput, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
15	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	mempermudah masyarakat dalam penerangan di malam hari	desa pinang sebatang rt 05, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan penerangan jalan di Rt.06 Kelurahan Dul	Rt. 06, Kelurah Dul, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
17	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengadaan lampu jalan menuju ke Pantai Tapak Antu	Pantai Tapak Antu, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
18	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengadaan lampu jalan di hampir sebagian Wilayah Desa Beluluk	Desa Beluluk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
19	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan di Gang Mawar (samping Perpustakan dan Arsip Daerah), Kab. Bangka Tengah	Gang Mawar (samping Perpustakan dan Arsip Daerah), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
20	Perhubungan	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Pembuatan rambu-rambu lalu lintas di Rt. 05 atau setiap persimpangan di Jalan Koba,	Rt. 05, di Jalan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Sering terjadi laka lantas	Depan SPBU Desa Pasir Garam RT. 01, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
22	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Pemasangan Lampu jalan pada Rt 04 s/d 06 Desa Padang Baru	padang baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
23	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penerangan lampu jalan dusun Air Itam desa Keretak karena masih banyak nya hutan jalan gelap saat malam ahri	Dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
24	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni 2unit di Desa Perleng	Desa Perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
25	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni 2 unit di Desa Lubuk Pabrik Dusun G	Desa Perleng dan Lubuk Pabrik Dusun G, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
26	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan di Jalan Desa Padang baru Proposal Tahun 2019, Volume 27 Titik.	Jalan Desa Padang baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
27	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	penerangan jalan di RT.04 Desa Baskara Bakti	Desa Baskara Bakti, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
28	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan, 3 unit di jalan Kelurahan Padang mulia	Kelurahan Padang mulia, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
29	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Penambahan lampu jalan di Sungai Selan Atas belum merata	Sungai Selan Atas, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
30	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan jalan di RT 01 Desa Jeruk yang belum merata	RT 01 Desa Jeruk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
31	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Pengajuan Penerangan jalan di RT 09 Desa Jeruk yang belum merata	RT 09 Desa Jeruk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
32	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	masjid baitul rahim desa perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
33	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	disetiap gang rt 14, rt 15 dan rt 16, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
34	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	meningkatkan sarana penerangan dan kenyamanan transportasi	persimpangan jalan masuk ke simpang jongkong, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
35	Perhubungan	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Sumber Daya Listrik/ Konvensional)	Belum ada lampu jalan, lingkungan memerlukan penerangan jalan	Jalan Pesantren Rt. 09, Gang Nanas Rt. 09, Gang Manggis Rt. 10, Gang Sawo Rt. 11 dan Rt. 06, Kab. Bangka Tengah	Seluruh Kecamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
36	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	PEMBANGUNAN PAGAR TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	Tempat Pemakaman Desa Nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
37	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pengajuan Ruang kelas Baru SDN 04 Desa Padang Baru, Pengajuan ke Dinas Terkait Proposal Sejak Tahun 2019	SDN 04 Desa Padang Baru,, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pendidikan
38	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	pembangunan pagar SDN 7 Lubuk Besar dikarenakan sering terjadi barang di kelas, sekolah sering dijadikan tongkrongan remaja sore maupun malam hari	SDN 7 lubuk besar, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pendidikan
39	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Pembuatan rumah sekolah dasar	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pendidikan
40	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	Pembangunan Pagar sekolah dasar 10 Pangkalan Baru	SD 10 Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pendidikan
41	Pendidikan	Pembangunan Pagar SD	Bantuan Pembangunan Pagar SD di desa kulur ilir	SD desa Kulur ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pendidikan
42	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Ruang kelas SD 4 Koba, tidak pernah di pugar sejak pembangunan awal ditahun 1983	Jl. KH. Wahid Hasyim RT 8, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pendidikan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
43	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Rehabilitasi Kelas sebanyak 3 lokal dikarekan kawat dari ruang kelas sudah rusak dan bangunan kelas rusak	SDN 04 Kecamatan Namang, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pendidikan
44	Kesehatan	Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Masalah kuota BPJS yang kurang untuk masyarakat Kecamatan Simpangkatis	Kecamatan Simpangkatis, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Kesehatan
45	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Peralatan Penunjang Usaha UMKM	Pengajuan bantuan rak baja ringan untuk bibit pot, ukuran 2meter 3 tingkat Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
46	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Usulan solusi pemasaran produksi olahan rumahan, Kab. Bangka Tengah	Usulan solusi pemasaran produksi olahan rumahan, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	sering terjadinya banjir dan air masuk kerumah warga	Desa Terak RT 10, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Jalannya Masih Tanah Puruh dan apabila hujan Jalannya Licin	Desa Celuak RT 006-RT 008 Dusun air Kuning, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
49	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan menuju Pantai Tapak Antu	Pantai Tapak Antu, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembuatan siring jalan di hampir sebagian Wilayah Desa Beluluk	Desa Beluluk, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Perbaikan drainase yang sudah jebol di Rt.08 Berok	Rt.08 Berok, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran siring RT.05/Rw.02, dekat Masjid Al-Muhajirin (dekat rumah H.Adri) Padang Mulia	RT.05/Rw.02, dekat Masjid Al-Muhajirin (dekat rumah H.Adri) Padang Mulia, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
53	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan drainase jalan di RT.13, Kavling Arung Dalam	RT.13, Kavling Arung Dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Peningkatan jalan di Jalan Barito, Kavling Arung Dalam	Jalan Barito, Kavling Arung Dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Mengajukan Pembangunan Siring Kampung Balar	Lingkungan Kampung Balar, Kab. Bangka Tengah	Seluruh Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
56	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer (lanjutan)	Tambahan pembangunan siring dalam Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
57	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran sekunder di Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
58	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan saluran sekunder Desa Perleng	Desa Perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	Pemeliharaan jalan lingkar desa (aspal)	Desa nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	belum ada drainase	RT. 09 Perumahan PNS Kantor Kecamatan Pangkalan baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
61	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Mengajukan Pembangunan siring Gang Beta dan Gang Setia By Pass RT.20 Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Gang Beta dan Gang Setia By Pass RT.20 Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
62	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pengajuan Siring di Kelurahan Sinar laut	Kelurahan Sinar laut, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan menuju Pondok Pesantren Ibnu Sabil RT 08 Dusun II Desa Cambai akses menuju pesantren	Jalan menuju Pondok Pesantren Ibnu Sabil RT 08 Dusun II Desa Cambai, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan Talud dan siring primer tempat pemandian umum dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	tempat pemandian umum dusun Air Itam desa Keretak	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembuatan drainase (sering)	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
66	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer	Pembangunan saluran drainase primer	RT 12, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
67	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	agar aliran air dari rt 04 sampai rt 05 yang selama ini teratas saat rawan banjir	desa mesu timur rt 04 dan 05, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
68	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Primer	memperlancar saluran air	desa pedindang, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
69	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	desa mangkol rt 06 dan rt 07, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
70	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	jalan lingkar desa perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
71	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	rt 07 desa nibung, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air aliran kiri dan kanan	jalan baru (depan rumah pak rt 15), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
73	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	gang jendral rt 20 by pass (dibagi 2 dikiri dan kanan), Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
74	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	rt 05 kelurahan arung dalam, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
75	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	meperlancar transportasi	jalan madrasah rt 05 rw 01 lubuk pabrik, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	gang setia budi rt 20, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran pembuangan air	gang SDIT rt 01, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
78	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	memperlancar saluran air	jalan lingkar desa perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
79	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Rehab berat saluran sekunder desa sungaiselan atas rt 04 -07	RT 04 - RT 07, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	lanjutan pengaspalan jalan gang swadaya	gang swadaya, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	jalan yang sebagian telah rusak yang disebabkan oleh air yang menyebabkan genangan air	Dusun Air Kuning DEsa Celuak, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan drainase di RT 16	RT 16, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder	Pembangunan Drainase Sekunder Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Drainase Sekunder	Jika hujan air meluap ke jalan sehingga membuat aspal menjadi terkikis dan drainase sudah tertutup pasir	Desa Kayu Besi RT. 10, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi / Peningkatan Jalan	dikarnakan bila turun hujan masih di genangi Air	Jalan Ke pesantren Ibnu sabil Desa Cambai, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai	Namang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Sekunder		Kelurahan Simpang Perlang	Koba	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
87	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola	Pembangunan pagar Lapangan Bola Berok RT.08	Lapangan Bola Berok RT.08, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
88	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sarana Olahraga dan Tempat Berkumpul Khusus untuk Anak-Anak Tingkat SD dan SMP	Pembangunan jogging track lapangan bola	Rt 01, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
89	Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Lapangan Volly	Pengajuan Pembangunan lapangan voli di Desa Baskara Bakti Kec. Namnag berserta tempat duduk dan toilet dangan air bersih	RT. 04 Desa Baskara Bakti, Kab. Bangka Tengah	Namang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
90	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pengajuan conblock untuk TPA Nurul Falah Desa Kulur Ilir	TPA Nurul Falah Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Sekretariat Daerah
91	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Renovasi Masjid Ar-Rohim Desa Lampur, Bembeng, Kab. Bangka Tengah	Masjid Ar- Rohim Desa Lampur, Bembeng, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
92	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Bantuan Dana Renovasi dan Rehab Mushola Suffiyahwan di Desa Air Mesu Rt 08	Mushola Suffiyahwan di Desa Air Mesu Rt 08, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Sekretariat Daerah
93	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Renovasi atap vihara Yi Te Desa Lampur.	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
94	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pembangunan Rumah Tahfizh di Desa Perlang proposal sudah disampaikan ke bappeda	Desa Perlang, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Sekretariat Daerah
95	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Taman Pendidikan	Pembangunan pagar TPA Ar- Rahman ± 45 M X 25 M dan Penambahan ruang guru TPA dusun Air Itam desa Keretak	Dusun Air Itam desa Keretak, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
96	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	karena sudah rusak jadi harus di perbaiki	mushola al muhajirin desa simpang katis, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah
97	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	sound system agar masyarakat terbantu	masjid sholawat zamanul ummah rt 02 dusun pangkal raya, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Sekretariat Daerah
98	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	bantuan alat musik hadroh majlis taklim hidayah ummah	desa puput rt 01, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah
99	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Bantuan conblock ukuran 80x40 meter di Masjid Silaturahim Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Masjid Silaturahim Kelurahan Koba, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
100	Sekretariat Daerah	Bantuan hibah untuk rumah ibadah	Pengajuan Pembangunan Vihara Eka Dharma Metta Karunia di Jalan Suka Damai Hayati Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Vihara Eka Dharma Metta Karunia di Jalan Suka Damai Hayati Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Sekretariat Daerah
101	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan	Untuk Membantu Masyarakat Dan Menambah Kegiatan Para Masyarakat jika Ada Acara Yang diselenggarakan di Masjid Atau Desa	Sekretariat Daerah Desa Kurau Timur, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
102	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	memperlancar proses belajar dan mengajar	majelis taklim di rt 15, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah
103	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	dikarnakan Pembangunannya Kurang Layak dan kurang efektif	Desa Beruas, Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Sekretariat Daerah
104	Sekretariat Daerah	Bantuan Hibah untuk Majelis Taklim	Belum Pernah mendapatkan Bantuan	Majelis Taklim Wanita Baitul Mukmin Simpang Jongkong, Kab. Bangka Tengah	Koba	Sekretariat Daerah

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
105	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Mengajukan bantuan tambak ikan di Desa Air Beguruh, Kelurahan Dul	Desa Air Beguruh, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
106	Kelautan dan Perikanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan	Pengadaan bantuan alat pendingin untuk nelayan agar bisa menyimpan hasil tangkapan	Desa Batu Belubang, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
107	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Pembuatan kolam ikan di Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
108	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan batuan alat tangkap ikan di Kulur Ilir (Pak Bujud, Kelompok Karang Kuala)	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
109	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau	Pengajuan bantuan mesin tempel perahu (Kelompok Karang Kuala) Desa Kulur Ilir	Desa Kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
110	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Sentra Nelayan	Pengajuan bantuan mesin perahu nelayan (Sapar / Nurul)Desa Kulur Ilir	Desa kulur Ilir, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
111	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan Bantuan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Terang Bulan Desa Padang Baru	Kelompok Nelayan Terang Bulan Desa Padang Baru, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
112	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Pengajuan Alat Tangkap Nelayan Cermi Kelurahan Dul, 10 Orang Anggota	Nelayan Cermi Kelurahan Dul,, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
113	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan Alat jaring Nelayan Kelompok Cempaka Laut, 11 Orang Nelayan	Nelayan Kelompok Cempaka Laut, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
114	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Kelompok Bintang Laut, 10 Orang Anggota	Nelayan Kelompok Bintang Laut, 10 Orang Anggota, Kab. Bangka Tengah	Pangkalan Baru	Dinas Perikanan
115	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan alat tangkap ikan air tawar dan mesin untuk Kelompok Nelayan Desa Lampur	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah	Sungai Selan	Dinas Perikanan
116	Kelautan dan Perikanan	Studi Replikasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tambak ikan yang kurang berjalan atau berproduksi di Kecamatan Simpangkatis.	Kecamatan Simpangkatis., Kab. Bangka Tengah	Simpang Katis	Dinas Perikanan

No.	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	OPD Tujuan
117	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Permohonan bantuan untuk nelayan laut dan sungai	Desa Penyak, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
118	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Alat Yang Digenakan Untuk Menangkap udang Dan Untuk Membantu Masyarakat Desa Untuk Menambah Hasil Pangang	Desa Kurau Dinas Kelautan Perikanan, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
119	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	radio amatir penunjang prasarana nelayan tangkap	kurau timur, Kab. Bangka Tengah	Koba	Dinas Perikanan
120	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	meningkatkan kesejahteraan nelayan	dusun berikat desa beriga, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan
121	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Alat Tangkap Ikan	meningkatkan kesejahteraan nelayan	desa perleng, Kab. Bangka Tengah	Lubuk Besar	Dinas Perikanan

5.4 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT DPRD ATAS LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Bangka Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 memuat arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Bangka Tengah merumuskan beberapa evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah. Hasil pembahasan tersebut dijadikan salah satu dasar bagi DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk merangkum rekomendasi terhadap LKPj Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 170/07/DPRD/2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2021. Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 dan tindaklanjutnya sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	DINAS PENDIDIKAN	- Panitia Khusus	XIII	Untuk serapan anggaran Dinas Pendidikan yang merekomendasikan:	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		a. Untuk mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama.	lebih	Utama telah dapat di akomodir, hal ini dapat diilah pada sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baik jenjang PAUD, SD, dan SMP Tahun 2021 yaitu Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Sekolah Dasar, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD, Rehabilitasi dan Utilitas Sekolah Dasar, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dasar, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu SD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD, Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama,	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	
1	2	3	5	5	5
			<p>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Menengah Pertama, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP, Pengadaan Mebel Sekolah SMP, Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pengadaan Mebel PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD. Namun, untuk secara keseluruhan serapan anggaran belum semua terpenuhi terutama untuk indikator ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih sangat minim, dan juga kegiatan untuk Indikator Kualifikasi Guru belum semuanya terakomodir untuk serapan anggaran. Dari Indikator Kinerja Utama Kabupaten yaitu ada 2, yaitu: Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Yang baru terpenuhi dari target</p>		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT				TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	5	5	
1	2	3	adalah Harapan Lama Sekolah Sebesar 12,10 tahun dan yang belum terpenuhi Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,20 tahun.	a. Untuk Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 semua dokumen kegiatan fisik telah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).	b. Untuk kegiatan yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK telah semuanya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.		
2	DINAS KESEHATAN	- Panitia Khusus XV Merekomendasikan :	a. Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan terkait kegiatan harus berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dokumen.	b. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah kegiatan yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK hendaknya ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait.	a. Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan, dan juga akan lebih cermat dalam penggunaan Anggaran dan Pencapaian Indikator Kinerja		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	
- Panitia Khusus XIV	Indikator Utama.	komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Kinerja Utama.	Utama Dinas Kesehatan.	a. Dinas Kesehatan menerima rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya akan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	
- Panitia Khusus XV		merekomendasikan:			
		a. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah agar pelayanan kesehatan yang lebih ramah ke pasien serta keluarga pasien.			

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	kegiatan yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK hendaknya ditindaklanjuti oleh dinas terkait.		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Panitia Khusus XII merekomendasikan : a. Untuk mencermati lebih secara komprehensif dan Linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama. b. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Terhadap Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Simpangkatis Agar Pengerjaannya	a. Realisasi Fisik untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 DPUTRPaAdalah 100%. Dengan realisasi keuangan sebesar 93,84%. Dengan terserapnya anggaran tersebut, maka delapan Indikator Kinerja Utama DPUTRIP dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Renstra/ Renja PD. Salah satu Indikator Kinerja PD tersebut merupakan Indikator Kinerja Kabupaten yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten dengan target kinerja sebesar 69,37%, dan terealisasi sebesar 71,9% atau dengan capaian kinerja 103,64%. b. Pada Kepmendagri 050-5889 Terdapat Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Di	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	
		Seggerakan.	Dengan Kode Rekening X.Xx.01.1.07.09 Yaitu Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya, Yang Dapat Digunakan Oleh Tiap-Tiap Pd Guna Melaksanakan Pengadaan Gedung Di Instansi Masing-Masing. Berkenaan Dengan Hal Tersebut, Maka Pengadaan Bangunan Gedung Pada Pd Dilaksanakan Oleh Pd Masing-Masing Yang Merencanakan/Tidak Melalui DPUTRP.	- Panitia Khusus XV Merekendasikan : a. Rekomendasi Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Terkait Kegiatan Pembangunan Di Desa Yang Menggunakan Apbd Seperti Sumur Bor Dan Lain-Lain Baik Dilakukan	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021			TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	5	
1	2	<p>b.</p> <p>Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Merjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindaklanjuti Oleh Dinas Yang Terkait.</p>	<p>Penyerahan Asset Sebagai Bentuk Informasi Publik Dan Edukasi.</p>	<p>Menindaklanjuti Rekomendasi Dan Bpk Dengan Langsung Mengkoordinasikan Kepada Pihak-Pihak Terkait Baikterlibat Dalam Pelaksaan Kegiatan, Sesuai Dengan Instruksi Dan Waktu Yang Telah Ditetapkan.</p>		
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	- Panitia Khusus XIII	- Tindaklanjut Khusus XIII:	<p>a. Untuk Mencermati Komprehensif Dan Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.</p>	<p>a. Diperkimhub Lebih Secara Komprehensif Dan Linear Untuk Mencapai Target Yang Telah Ditentukan Sesuai Anggaran Dan Indikator Kinerja Utama.</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT				TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	5		
1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XIV Merekomendasikan: a. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Agar Pengadaan Bus Sekolah 2 (Dua) Unit Dan Bus Yang Rusak Agar Diperbaiki. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindaklanjut Atas Rekomendasi Panitia Khusus XIV: a. Usulan Pengadaan Bus Sekolah Telah Diusulkan Pada Tahun Sebelumnya, Namun Usulan Tersebut Tidak Terealisasi Sebagai Akibat Dari Refocusing Anggaran Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid-19. Sementara, Perbaikan Bus Yang Rusak Telah Dianggarkan Pada Apbd Tahun Anggaran 2023 Dengan Nominal Sebesar Rp500.000.000,00 Sesuai Dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Diperkimhub Tahun Anggaran 2023 Pada Saat Laporan Tindak Lanjut Ini Disusun. 				
		<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak 		<ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Panitia Khusus XV: a. Catatan Oleh Inspektorat Dan Bpk Telah Ditindaklanjuti Dan Disampaikan Kembali Oleh Diperkimhub Pada Tanggal 14 April 2022. 			

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	Lanjut Oleh Dinas Yang Terkait.		
5	SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XIII Merekomendasikan : <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komprehensif Dan Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama. 	<p>Atas Rekomendasi Panitia Khusus XIII DPR terhadap LKPJ Bupati Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Tersebut Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Panitia Khusus XIII Dprd Kabupaten Bangka Tengah Akan Menjadi Konsentrasi Satpol Pp Untuk Mengoptimalkan Dan Mencermati Secara Baik Dalam Penyerapan Anggaran Melalui Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Satpol Pp Dan Akan Lebih Komprehensif Terhadap Pencapaian Target Output Serta Dampak Dari Kegiatan Untuk Masyarakat. 	<p>2. Seluruh Kegiatan Atau Permintaan Data Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Telah Ditindaklanjuti Segera Oleh Satpol PP Sesuai Dengan Surat Permintaan Data.</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	
1	2	3	5		
6	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<p>Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindaklanjuti Oleh Dinas Yang Terkait.</p>	Untuk serapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021, telah mengakomodir semua Indikator Kinerja utama. Pada Tahun 2021 Capaian realisasi anggaran terrealisasi sebesar 89 %. Dinsos-PMD memiliki 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Khusus XIII merekomendasikan : <ul style="list-style-type: none"> - Panitia mencermati lebih komprehensif secara linear antara serapan anggaran dan capaian indikator Kinerja Utama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penurunan Angka PPKS dengan capaian kinerja tercapai sebesar 103% dan anggaran sebesar 97,87 %. 2. Persentase PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja tercapai sebesar 109, 04 % dan anggaran sebesar 92, 97 %. 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dengan capaian kinerja tercapai sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 90,55 %. 	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	
1	2	3	5	4	5
			<p>4. Indeks desa Membangun, Desa Mandiri target 30 Desa terealisasi 25 Desa Desa Berkembang target 26 terealisasi 31 Desa Dengan Capaian anggaran sebesar 94,07 %.</p> <p>Selain itu, capaian Standar pelayanan minimal (SPM) tercapai 100 % dari target. Dengan realisasi anggaran tercapai sebesar 97,72 %. Dinsos-PMD telah melaksanakan secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XIV : a. Untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah agar taman yang ada di Desa Lampur yang danaanya dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk 	<p>Bahwa Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan bahwa : Camat melakukan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan APBDesa, meliputi:</p> <p>a. melakukan evaluasi terhadap APBDesa termasuk dengan mesinkronkan Silpa APBDesa terhadap rekening Desa;</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	<p>dilakukan pengawasan karena pengerajaannya kurang maksimal.</p>	<p>b. melakukan Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pajak negara dan pajak Daerah atas pelaksanaan APBDesa;</p> <p>c. melakukan monitoring pelaksanaan APBDesa;</p> <p>d. memonitor kelengkapan surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;</p> <p>e. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara semester dan setiap tahunnya;</p> <p>f. merekomendasikan penyaluran dana Desa; dan</p> <p>g. mendorong Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan pelaksanaan APBDesa.</p> <p>Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan terlebih dahulu harus dilakukan oleh Camat yang selanjutnya hasil evaluasi dan pengawasan camat dilakukan pengawasan berjaringan di tingkat kecamatan oleh Inspektorat dan Dinsos-PMD.</p>	
URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	DPMPTK	a. Untuk lebih mencermati	a. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pada		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	<p>semua komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian indikator kinerja utama.</p> <p>b. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah kegiatan yang menjadi catatan inspektorat dan BPK hendaknya ditindak lanjut oleh dinas terkait.</p>	<p>tahun 2022 DPMPTK telah melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam rangka pencapaian kinerja DPMPTK.</p> <p>b. Tidak terdapat kegiatan yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK.</p>	
2	DPPKB DAN PPPA	- Pansus Merekendasikan :	XII	<p>a. Sampai Saat Ini Kami Telah Melakukan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Terhadap Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.</p> <p>a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komperensif Dan Liner Anatara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.</p>	<p>Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.</p> <p>Tahun 2021 Karena Pandemic Covid-19 Akan Dilaksanakan Tahun 2022 Iri.</p>
		- Pansus Merekendasikan :	XII	<p>a. Kami Telah Melakukan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Dan Membuat Kebijakan Terhadap Catatan Inspektorat Dan Perangkat Daerah Yang Bpk.</p>	<p>Sedang Penyusunan Draf Kebijakan Seperti Pemberian Reward Dan Punishment Dilingkungan</p>

NO		PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2		Menjadi Catatan Inspektator Dan Bpk Hendaknya Ditindaklanjuti Oleh Dinas Yang Terkait.	3	Dppkbpppa
3	PANGAN	- Pansus Merekendasikan :	XII a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komperensif Dan Liner Anatara Serapan Anggaran Dan Liner Anatara Serapan Anggaran Dan Capaian Indiktor Kinerja Utama. b. Untuk Lebih Focus Dan Mencermati Kondisi Ketahanan Pangan, Distribusi Dan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.	a. Dinas Pangan Siap Untuk Mencermati Secara Komperensif Dan Liner Anatara Serapan Anggaran Dan Capaian Indiktor Kinerja Utama Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. b. Dinas Pangan Siap Bersinergi Dan Berkordinasi Dengan Pemangku Kebijakan Terkait Dalam Hal Perbaikan Kondisi Ketahanan Pangan, Distribusi Dan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.	
		- Pansus Merekendasikan :	XV a. Dinas Pangan Akan Berkordinasi Dan Berupaya Memaksimalkan Kinerja Dalam		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021			TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	5	
1	2	a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindaklanjuti Oleh Dinas Yang Terkait.	Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.			
5	LINGKUNGAN HIDUP	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan :	a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komprehensif Dan Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.	a. Realisasi fisik untuk program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup adalah 100% Dengan Realisasi Keuangan Sebesar 90,58%. Dengan Terserapnya Anggaran Tersebut, Maka Dua Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dapat Terealisasi Melebihi Target Yang Diditeapkan Pada Renstra/ Renja PD. b. Dinas Lingkungan Hidup selalu menindaklanjuti jika ada rekomendasi baik dari inspektorat Daerah maupun BPK, sesuai dengan instruksi dan waktu yang telah ditetapkan.	b. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	
6	DINDUKCAPIL	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XIII merekomendasikan: a. Untuk lebih mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian kinerja utama 	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 memiliki 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84.20 realisasi 97.30, dengan demikian sudah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk serapan anggaran tercapai sebesar 97.04.</p>		
7	DIVAS KOMINFO DAN STATISTIK	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjut Oleh Dinas Yang Terkait. 	<p>Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu sigap dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat maupun BPK.</p>		<p>1. Jumlah anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun anggaran</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	<p>a. Untuk mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama</p>	<p>2021 sebesar Rp 8.229.671.460,- dengan serapan anggaran sebesar Rp 7.393.344.460,- atau 89,84%.</p> <p>Adapun evaluasi dan analisis secara rinci masing-masing indikator kinerja utama menurut sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut:</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya informasi pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/balihio, spanduk, tabloid). Total desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah yang tercakup oleh informasi pembangunan desa/kelurahan dari total desa/kelurahan. - Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online adalah diukur dari jumlah cakupan dusun yang ada

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	<p>tersebar informasi melalui media online. Jumlah dusun yang tercakup informasi adalah jumlah dusun yang sudah menggunakan jaringan internet. Jaringan internet merupakan jaringan pita lebar yang dapat mengakses internet baik melalui telpon pintar maupun laptop. Pada Tahun 2021 dari total 134 dusun yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 106 dusun sudah tercakup dalam jaringan internet. Jadi realisasinya adalah sejumlah 79,10% dari target 73%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio) di Kabupaten Bangka Tengah. Total desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah yang tercakup oleh informasi pembangunan daerah ada 13 desa/kelurahan dari total 63 desa/kelurahan. Belum tercapainya target yang diinginkan karena peralatan

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	5	
1	2	3	4	5	<p>pemancar frekuensi radio belum bisa beroperasi secara maksimal.</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari 17 Layanan Publik Online yang terintegrasi sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah menerapkan 14 Layanan Publik Online yang terintegrasi atau terealisasi 82,35 % dari target 55 %. <p>Sasaran 3: Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari 10 Layanan Administrasi Pemerintahan Online yang terintegrasi sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	5	
1	2	3	4	5	<p>menerapkan 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Online yang terintegrasi atau terealisasi 70% dari target 55%.</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target dan realisasi pada Tahun 2021 adalah 0 Persen karena pada Tahun 2021 digunakan sebagai tahun dasar untuk pertumbuhan data sheet (kumpulan data). Data yang digunakan berasal dari Aplikasi SIKOK Data. Aplikasi ini dibangun dari awal mengadopsi dari e-database Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang di-maintenance oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak akhir Tahun 2018. Aplikasi SIKOK Data ini sudah di launching pada 1 November 2021 dengan jumlah data sebanyak 6.001 data yang terdiri dari data urusan wajib pelayanan dasar, data urusan wajib bukan pelayanan dasar, data urusan pilihan dan data

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	
8	DISPERINDAGKOP DAN UMKM	- Panitia Khusus Xiii Merekomendasikan: a. Untuk Lebih Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran Melakukan Pengukuran Secara Komprehensif Terkait Dampak Output-Output Yang Dihasilkan Setiap Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama.	Rekomendasi DPRD Ini Menjadi Perhatian Penuh Dinas Perindagkop Dan Umkm Untuk Program/Kegiatan Sekaligus Melakukan Pengukuran Secara Komprehensif Terkait Dampak Output-Output Yang Dihasilkan Setiap Kegiatan Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Yang Ditetapkan.		
9	DINBUDPARPORA	- Panitia Khusus Xv Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjut Oleh Dinas Yang Terkait.	Seluruh Kegiatan Atau Permintaan Data Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Ri Telah Ditindaklanjuti Opd Secepatnya.		anggaran untuk program/kegiatan/ subkegiatan tahun 2021 dengan realisasi fisik sebesar 91,57% dan
a. Untuk lebih					

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	
1	2	mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama.	Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu jumlah prestasi olahraga di tingkat nasional sebesar 10,53% (dikarenakan kejuaraan tingkat nasional ditunda akibat pandemic) dan 1 indikator yang melebihi target yaitu indikator PAD sektor pariwisata sebesar 120,75%.		
10	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	- Panitia Khusus XV merekomendasikan :	a. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi catatan Inspektorat Daerah dan BPK hendaknya ditindaklanjut oleh dinas yang terkait.	Perangkat Daerah berupaya serius dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah dan BPK dengan langsung mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait baik pelaksana kegiatan (pihak ke-3) maupun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan BPK.	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021					TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	5	6	7	
1	2	3	Dan Komprehensif Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama	Beberapa Kegiatan Yang Belum Maksimal Dilaksanakan Terutama Di Bidang Perpustakaan Untuk Dikarenakan Adanya Pembatasan Covid-19.	Adapun Evaluasi Dan Analisis Secara Rinci Masing-Masing Indikator Kinerja Utama Menurut Sasaran Strategisnya Diuraikan Sebagai Berikut:	Sasaran 1: Meningkatnya Minat Dan Budaya Baca Masyarakat	Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Utama Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tercapai Dari Target Yang Telah Ditetapkan Sedangkan Di Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Menurun.	Untuk Capaian Kinerja Dengan Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Diukur Dengan Cara Survei Dan Menyebarluaskan Kuisioner Kepada Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Dalam Satu Periode. Dari Hasil Survei Tersebut Pada Tahun 2021 Ada Penurunan Nilai Yang Ditargetkan Dengan Nilai 50 Dan

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	
1	2	3	5	5	
			Terealisasi Dengan Nilai 39,65 Dikarenakan Ada Beberapa Hal Untuk Menjadi Evaluasi Antara Lain: a. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Untuk Pelayanan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Daerah. b. Banyak Perpustakaan Yang Belum Memiliki Koleksi Bahan Bacaan Yang Memadai, Khususnya Di Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Daerah. c. Rendahnya Kompetensi Tenaga Pengelola Perpustakaan d. Terjadi Penurunan Kunjungan Perpustakaan Dikarenakan Wabah Covid-19 e. Untuk Mencapai Nilai Tersebut Diperlukannya Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Antara Lain: f. Perlunya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Seperti Ruang Layanan, Komputer Dan Lain Sebagainya.		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5
			<p>g. Perlunya Pengadaan Koleksi Bahan Bacaan Khususnya Di Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Daerah.</p> <p>h. Perlunya Dilaksanakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Perpustakaan Dan Monitoring Dan Evaluasi Secara Berkelaanjutan.</p> <p>i. Membaca Melalui Aplikasi Iberiman Yang Dapat Diunduh Di Playstore, Sehingga Bisa Dilakukan Dimana Saja Tanpa Terkendala Jarak Dan Waktu.</p>	<p>Sasaran 2: Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip Melaksanakan Penyelenggaraan Arsip Secara Baik.</p> <p>- Panitia Khusus XV Merekomendasikan:</p> <p>a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditiadak Lanjut Oleh</p> <p>Pada Tahun 2020 Opd Yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Secara Baku Terealisasi Sebesar 100% Dari Target 100% Yang Telah Ditetapkan Tetapi Di Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Dan Peraturan Bupati</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	Dinas Yang Terkait	Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Kearsipan Terdapat Perbedaan Indikator-Indikator Penilaian Untuk Pengelolaan Arsip Sehingga Hanya 6 Opd Yang Memenuhi Standar Kearsipan Yang Baku Dan Berkategori “Baik”. Untuk Mempertahankan, Dan Meningkatkan Capaian Yang Telah Dicapai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Akan Melaksanakan Beberapa Hal Sebagai Berikut:	<p>REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Kearsipan Terdapat Perbedaan Indikator-Indikator Penilaian Untuk Pengelolaan Arsip Sehingga Hanya 6 Opd Yang Memenuhi Standar Kearsipan Yang Baku Dan Berkategori “Baik”. Untuk Mempertahankan, Dan Meningkatkan Capaian Yang Telah Dicapai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Akan Melaksanakan Beberapa Hal Sebagai Berikut:</p> <p>j. Dalam Pelaksanaan Penerapan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Harus Mengacu Pada Pedoman Klasifikasi-Klasifikasi Arsip Yang Berlaku.</p> <p>k. Perlunya Sarana Dan Prasarana Yang Sesuai Dengan Standar Kearsipan.</p> <p>l. Perlunya Ditempatkan Arsiparis Disetiap Perangkat Daerah.</p> <p>m. Perlu Diadakan Bimbingan Teknis Kearsipan Untuk Meningkatkan Kompetensi Arsiparis</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	Yang Ada Di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.		
URUSAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Panitia khusus XIII merekomendasikan :	1. Untuk lebih mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama	1. Pada tahun 2021 total anggaran Dinas Perikanan Rp. 13.152.083.389,- dengan realisasi sebesar Rp.11.860.023.746,- atau 90,18 %, Untuk capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 meliputi :	1. Pada tahun 2021 total anggaran Dinas Perikanan Rp. 13.152.083.389,- dengan realisasi sebesar Rp.11.860.023.746,- atau 90,18 %, Untuk capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 meliputi :
			1. Untuk lebih mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) target 108,00 realisasi 116,04 atau 107,44% b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) target 104,5 realisasi 105,57 atau 101,02% c. Nilai Konsumsi Ikan (NKI) target 43,00 realisasi 61,40 atau 142,79%.	a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) target 108,00 realisasi 116,04 atau 107,44% b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) target 104,5 realisasi 105,57 atau 101,02% c. Nilai Konsumsi Ikan (NKI) target 43,00 realisasi 61,40 atau 142,79%.
		- Rekomendasi kepada Perangkat Daerah	kegiatan yang menjadi catatan inspektorat dan BPK hendaknya ditindak lanjut oleh dinas yang terkait	2. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah telah menindak lanjuti catatan dari inspektorat dan BPK, Total temuan Rp. 25.094.593,33,- sebanyak 3 (tiga) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :	2. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah telah menindak lanjuti catatan dari inspektorat dan BPK, Total temuan Rp. 25.094.593,33,- sebanyak 3 (tiga) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
				a. Pekerjaan pembangunan UPR (Rp	a. Pekerjaan pembangunan UPR (Rp

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN					
			4	5						
1	2	3	<p>9.234.304,25) oleh CV Agung Rajawali Perkasa (<input checked="" type="checkbox"/> sudah setor kasda)</p> <p>b. Pekerjaan pembangunan gudang pakan (Rp 7.373.836,08) oleh CV Alesha (<input checked="" type="checkbox"/> sudah setor kasda)</p> <p>c. Pekerjaan Rehabilitasi Peningkatan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (Rp. 8.486.453) oleh CV Karya Mandiri Jaya(<input checked="" type="checkbox"/> sudah setor kasda)</p>							
2	PERTANIAN	- Panitia Khusus XIV Merekendasikan :	<p>Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 :</p> <p>a. Untuk Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah agar pembagian benih kelapa sawit merata ke petani.</p>	<p>1. Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah pada tahun Anggaran 2021 dengan keterbatasan anggaran hanya mampu memberikan bantuan kecambah kelapa sawit sebanyak 10.000 Butir dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama gapoktan / poktan</th> <th>Alamat</th> <th>Kecamatan</th> <th>Jumlah penerima (orang)</th> </tr> </thead> </table>	No	Nama gapoktan / poktan	Alamat	Kecamatan	Jumlah penerima (orang)	
No	Nama gapoktan / poktan	Alamat	Kecamatan	Jumlah penerima (orang)						

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021				TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN	
			1	2	3	4		
1	2		1	Gapoktan nibung paku bumi	Desa nibung	Koba	15	1.125
			2	Gapoktan sama - sama maju	Desa penyak	Koba	10	750
			3	Maju bersama	Desa perleng	Lubuk besar	15	1.125
			4	Gapoktan kulur jaya	Desa kulur	Lubuk besar	15	1.125
			5	Bembeng	Desa lampur	Sungaiselan	15	1.125
			6	Gapoktan jaya lestari	Desa keranta i	Sungaiselan	15	1.150
			7	Maju bersama	Desa simpan g katis	Simpang katis	17	1.275
			8	Sejahtera bersama	Desa teru	Simpang katis	8	600
			9	Gapoktan maju bersama	Desa belilik	Namang	10	750
			10	Gapoktan namang sebelukar	Desa namang	Namang	13	975

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
			<p>2. Berdasarkan data eksisting proposal yang masuk untuk mengajukan bantuan kecambah kelapa sawit yang telah terekab mencapai 121 Proposal dimulai sejak tahun 2020. Proposal yang telah dibantu sampai dengan tahun 2021 sebanyak 53 proposal atau sekitar 43,80 % dengan bantuan sebanyak 70.000 Butir kecambah kelapa sawit,</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Tahun 2020 APBD : 10.000 Butir (10 Kelompok) e. Tahun 2020 APBD P : 50.000 Butir (33 Kelompok) f. Tahun 2021 APBD : 10.000 Butir (10 Kelompok) <p>3. Bahwa setiap petani/ pekebun menerima bantuan kecambah sebanyak 75 butir;</p> <p>4. Jumlah petani / pekebun dalam kelompok disesuaikan dengan usulan proposal yang telah diajukan kelompok kepada Bupati Bangka Tengah cq. Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;</p>	133 10.0	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	
1	2		5.	Untuk tahun yang akan datang, apabila terdapat pengadaan / bantuan kecambah kelapa sawit rekomendasi ini dapat kami tindaklanjuti yakni membagikan dengan cara merata per kelompok dengan jumlah yang diberikan per petani / pekebun sesuai dengan SK Keputusa Bupati Bangka Tengah tentang Penerima Manfaat Bantuan Kecambah Kelapa Sawit.	
URUSAN PENUNJANG					
3	BAPPELITBANDA	- Panitia Khusu XIII merekomendasikan :	a. Sudah dilaksanakan mencermati proses penganggaran dan nilai belanja pegawai pada perubahan Anggaran 2022. b. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	<p>komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Bappelitbangda telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah secara berkala melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap triwulan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan konsistensi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian evaluasi juga dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi program/kegiatan/ sub kegiatan perangkat daerah dan menyusun skala prioritas program kegiatan.</p> <p>Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD. Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program</p>	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	<p>dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKP lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Penilaian digunakan untuk mengetahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota; dan - Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya. 	4	5

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kepada Bappelitbangda untuk men-drive Perangkat Daerah lainnya yang memiliki Tupoksi, yang berkaitan dengan bidang ekonomi untuk lebih mencermati peningkatan angka dan garis kemiskinan di Bangka tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penyusunan Perencanaan, Bidang ESDA melakukan Koordinasi, Asistensi, Sinergitas dan Harmonisasi Program kegiatan Sub kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan - Menyusun, meracang kebijakan perekonomian sesuai dengan kebijakan Pemulihhan Ekonomi Nasional - Mencermati penyusunan program perekonomian berdasar dokumen RKPD dalam penentuan lokasi pelaksanaan program dimana kantong-kantong kemiskinan - Mensinergikan peningkatan pendapatan masyarakat dengan program berkelanjutan - Mensinergikan kebijakan bagi penerima manfaat program bantuan kelompok dengan data DTKS. 		
4	BPPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Khusus XIII Merekomendasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komprehensif Dan Linear Antara 	<ul style="list-style-type: none"> Serapan anggaran untuk program/kegiatan/subkegiatan tahun 2021 dengan realisasi fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 79%. Dari 1 (satu) indicator kinerja utama yaitu 		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			4	5	
1	2	3	Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.	62,80% hanya tercapai sebesar 60,74% hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap menurunnya angka penggunaan transportasi udara sehingga berkurangnya pajak parker bandara, hunian hotel, penginapan serta restoran.	persentase pajak dan retibusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari target sebesar 62,80% hanya tercapai sebesar 60,74% hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap menurunnya angka penggunaan transportasi udara sehingga berkurangnya pajak parker bandara, hunian hotel, penginapan serta restoran.
-	Panitia Khusus	XV	Perangkat daerah berupaya serius dalam menindaklanjuti rekomendasi inspektorat daerah Merekomendasikan:	a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjut Oleh Dinas Yang Terkait.	menindaklanjuti rekomendasi inspektorat daerah dan BPK dengan langsung mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan BPK.
5	BKPSDMD	- Panitia Khusus	XIII	Merekomendasikan:	Badan Kepgawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada Tahun Anggaran 2021 memiliki 1 Indeks Profesionalisme ASN lebih mencermati secara Sedangan untuk serapan anggaran tercapai komprehensif dan sebesar 92,41

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT	
1	2	3	4	5	
		linear antara serapan anggaran dan capaian indikator kinerja utama			
		- Panitia Khusus XIV Merekomendasikan: a. Untuk Badan Kepergawainan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar kesejahteraab PKK (Honorer) agar lebih diperhatikan	Untuk Kesejahteraan PKK, BKPSDM Sudah Menyiapkan Usulan/Draf Peraturan Bupati tentang Manajemen PKK yang mana salah satu isi dari Raperpub terkait dengan kesejahteraan, namun setelah melalui proses pembahasan di internal pemerintah usulan tersebut ditolak oleh Biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Menyiapkan Usulan/Draf Peraturan Bupati tentang Manajemen PKK yang mana salah satu isi dari Raperpub terkait dengan kesejahteraan, namun setelah melalui proses pembahasan di internal pemerintah usulan tersebut ditolak oleh Biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	
		- Panitia khusus XV merekomendasikan a. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah kegiatan yang menjadi catatan inspektorat dan BPK hendaknya ditindaklanjut oleh	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selalu sigap dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat maupun BPK	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selalu sigap dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat maupun BPK	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT			TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	5	
1	2	3	dinas yang terkait			
6	BPKAD	- Panitia Khusus XIII merekomendasikan :	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencermati proses penganggaran dan nilai belanja pegawai (Pos Gaji dan Tunjangan) di seluruh Perangkat Daerah b. Untuk mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian Indikator Kinerja Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan assistensi secara intensif kepada masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan kondisi real di Perangkat Daerah (sesuai dengan jumlah Pegawai yang ada) - BPKAD untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengusulkan Program/Kegiatan/Subkegiatan dengan pagu indikatif sesuai dengan prioritas yang mendukung Indikator Kinerja Utama - BPKAD sudah melakukan koordinasi dengan PT. Bank Sumsel Babel untuk pembayaran gaji ASN langsung dari Kas Daerah ke Rekening Penerima, dan akan diimplementasi mulai pembayaran gaji bulan Oktober 2022. - BPKAD sebagai pengelola daftar gaji ASN telah melakukan pemutakhiran data ASN, dan saat ini sedang mengembangkan aplikasi android 		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT			TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	4	5	
1	2	3	catatkan dan BPK hendaknya ditindak lanjut oleh dinas yang terkait	SiPERGI untuk kemudahan ASN memutakhirkan data pegawai.		
7	INSPEKTORAT	Untuk lebih mencermati proses penganggaran dan nilai belanja pegawai (Pos Gaji dan Tunjangan) di seluruh Perangkat Daerah.	Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun Anggaran 2022 telah menganggarkan belanja pegawai (Pos Gaji dan Tunjangan) telah sesuai dengan jumlah, jabatan dan klasifikasi pangkat/golongan. Sebagai dokumen pendukung kami lampirkan data pegawai dan RKA TA 2022.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun Anggaran 2022 dari menganggarkan belanja pegawai (Pos Gaji dan Tunjangan) telah sesuai dengan jumlah, jabatan dan klasifikasi pangkat/golongan. Sebagai dokumen pendukung kami lampirkan data pegawai dan RKA TA 2022.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun Anggaran 2021 dari anggaran dan capaian 6 (enam) IKU yang ditargetkan 5 (lima) diantaranya sudah mencapai target sedangkan 1 (satu) IKU yang masih belum tercapai yaitu Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dikarenakan 6 (enam) Perangkat Daerah yang	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TINDAKLANJUT				TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021				
1	2	3	4	5			
			Rekomendasi kepada Perangkat Daerah kegiatan yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK RI hendaknya ditindaklanjuti oleh dinas terkait.	Menindaklanjuti Inspektorat menindaklanjuti maupun APIP	rekomendasi rekomendasi dari BPK RI	tersebut	diusulkan kepada Kementrian PAN RB belum ada yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
8	SEKDA	- Panitia Khusus XIII merekomendasikan :	a. Untuk lebih mencermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan capaian indikator kinerja utama	Pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama telah sejalan dengan target yang telah ditetapkan namun tidak dapat terpenuhi 100% dikarenakan terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) , ketersediaan anggaran yang terbatas, dan kurangnya sinergitas antar OPD.			
		- Panitia Khusus XV merekomendasikan :	a. Rekomendasi kepada Perangkat Daerah	Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah terdapat temuan terhadap hasil pemeriksaan BPK, namun temuan tersebut telah disesuaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Pemeriksa BPK			

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021		TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2021	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2	3		
1			kegiatan yang menjadi catatan inspektorat dan BPK hendaknya ditindaklanjut oleh dinas yang terkait	berupa pengembalian atau teguran yang diharuskan.	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020		TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2	3		
1					

KECAMATAN					
1	KECAMATAN SIMPANG KATIS	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan:	a. Untuk Lebih Mencermati Secara Komprehensif Dan Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama	Realisasi Fisik Untuk Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Simpangkatis Adalah 100% Dengan Realisasi Keuangan Sebesar 98%. Dengan Terserapnya Anggaran Tersebut, Maka Dua Indikator Kinerja Pd Kecamatan Simpangkatis Dapat Terealisasi Melebihi Target Yang Ditetapkan Pada Renstra/ Renja Pd.	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020					TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	5	6	7	
1	2	- Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Merjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Terkait.	Perangkat Daerah Menindak Lanjuti Rekomendasi Daerah Mengkoordinasikan Kepada Pihak-Pihak Terkait Baik Pelaksana Kegiatan (Pihak Ke-3) Ataupun Stakeholder Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Sesuai Dengan Instruksi Dan Waktu Yang Telah Ditetapkan.	Daerah Berupaya Serius Dalam Langsung				
2	KECAMATAN SUNGAI SELAN	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan: a. Untuk Mencermati Komprehensif Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama	Realisasi Fisik Untuk Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Sungaiselan Adalah 100% Dengan Realisasi Keuangan Sebesar 84,50%. Dengan Terserapnya Anggaran Tersebut, Maka Dua Indikator Kinerja Utama (Iku) Kecamatan Sungaiselan Dapat Terealisasi Melebihi Target Yang Ditetapkan Pada Renstra/ Renja Pd. Indikator Kinerja Utama Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Atas Layanan Publik Dengan Target 85 Realisasi 85,09, Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari					

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020				TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			1	2	3	4	
- Panitia Khusus XV Merekomendasikan:			Bupati Kepada Camat Dengan Target 75% Realisasi 79,86%.			5	
a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah			Perangkat Daerah Berupaya Serius Dalam Menindak Lanjuti Rekomendasi Inspektorat Daerah Dan Bpk Dengan Langsung Mengkoordinasikan Kepada Pihak-Pihak Terkait Kegiatan Yang Merjadi Baik Pelaksana Kegiatan (Pihak Ke-3) Ataupun Stakeholder Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan, Sesuai Dengan Instruksi Dan Waktu Ditindak Lanjuti Oleh Yang Telah Ditetapkan.				
3	KECAMATAN NAMANG	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan:	Lebih 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,55%. Dengan terserapnya anggaran tersebut, maka dua Indikator Kinerja KECAMATAN Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.		Realisasi fisik untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2021 Kecamatan Namang adalah 91,55%. Dengan terserapnya anggaran tersebut, maka dua Indikator Kinerja KECAMATAN Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	
1	2	- Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Merjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Terkait.	Tidak adanya Rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK.	5	
4	KECAMATAN LUBUK BESAR	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan: a. Untuk Mencermati Secara Komprehensif Dan Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama.	Kecamatan Lubuk Besar dicermati secara komprehensif dan linear antara serapan anggaran dan Capaian Indikator Kinerja Utama sudah mencapai target yang diharapkan		
		- Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi Kepada	Kegiatan pada Kecamatan Lubuk Besar tidak ada catatan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan BPK		

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020		TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		1	2	3	4
1		Perangkat Daerah	Kegiatan Yang Merjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Terkait		
5	KECAMATAN PANGKALAN BARU	- Panitia Khusus Merekomendasikan:	XIII a. Untuk Mencermati Komprehensif Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama	Realisasi fisik untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2021 Kecamatan Pangkalnabu adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85,48 %. Dengan terserapnya anggaran tersebut, maka delapan Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan Pangkalnabu dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Renstra/ Renja PD. Indikator Kinerja Utama persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik dengan target 85 realisasi 8%, indikator kinerja utama Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan target 75% realisasi 79%.	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020		TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			3	4	
1	2	- Panitia Khusus XV Merekomendasikan: a. Rekomendasi . Kepada Perangkat Daerah Kegiatan Yang Merjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Terkait.	Perangkat menindak Daerah dengan baik pelaksana kegiatan (Pihak ke-3) ataupun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan instruksi dan waktu yang telah ditetapkan.	Daerah berupaya serius dalam lanjuti rekomendasi Inspektorat mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait baik pelaksana kegiatan (Pihak ke-3) ataupun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan instruksi dan waktu yang telah ditetapkan.	
6	KECAMATAN KOBA	- Panitia Khusus XIII Merekomendasikan: a. Untuk Mencermati Komprehensif Linear Antara Serapan Anggaran Dan Capaian Indikator Kinerja Utama	Realisasi fisik untuk program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2021 Kecamatan Koba adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar 87,33 %. Dengan terserapnya anggaran tersebut, maka dua Indikator Kinerja KECAMATAN KOBA dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Renstra/ Renja PD.	Tidak adanya Rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi catatan Inspektorat dan BPK.	

NO	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020		TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BANGKA TENGAH ANGGARAN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		2	3		
1		Kegiatan Yang Menjadi Catatan Inspektorat Dan Bpk Hendaknya Ditindak Lanjuti Oleh Dimas Terkait.	4		5

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Daya saing Daerah;
3. Aspek Pelayanan Umum;

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam Tabel VI.1 dan Tabel VI.2 menunjukkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya.

Tabel VI.1
Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah terhadap Visi
“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin Unggul”
(Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Nomer 131 Tahun 2021)

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target			Kondisi akhir
						RPJMD 2022	RPJMD 2023	RKPD 2023	
1.	Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,89	71,28	71,79	71,79	73,27	73,27
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,10	11,88	11,91	11,91	
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,34	7,42	7,42	
				Angka Harapan Hidup	71,52	71,67	71,83	71,83	
				Indeks Pembangunan Gender	91,34	91,82	92,09	92,09	
				Indeks Perlindungan anak	69,23	65,50	66,00	66,00	
				Indeks Gini	0,247	0,321	0,308	0,209	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,76	3,00	3,33	5,18	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,76	3,00	3,33	5,18	
				PDRB per kapita (ADHB)	46.234.037	43.489.833	43.740.660	48.599.664	
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelaianan melalui pengatasan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang unggul dan merata	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPt)	%	4,95	4,84	4,47	4,47	3,96
				Angka Kemiskinan	5,13	4,51	4,34	4,34	
				Rasio ketersediaan infrastruktur	86,99	86,98	88,08	88,08	
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata	Optimalisasi pembangunan sarana							90,90

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target		Kondisi akhir
							RPJMD 2022	RPJMD 2023	RKPD 2023
			Meningkatnya pementahan infrastruktur dasar dan prasarana pelayanan publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	71,90	70,47	71,67	71,67
4.	Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Persentase rumah layak huni	%	96,02	96,49	96,89	98,08
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		76,13	67,21	67,52	68,16
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)		59,58	55,20	55,30	55,60
				Indeks Kualitas Udara (IKU)		89,76	84,20	84,30	84,60
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		70,98	58,80	58,90	60,60
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		78,36	49,48	51,16	53,00
5	Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi		68,86	68,60	69,85	69,85
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					72,42
				Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A
				Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,76	2,2	2,6	2,6	3,8
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,53	83,90	84,10	84,75
				Indeks Inovasi Daerah	54,39	68	70	55	76

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

Tabel VI.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021		Target Capaian Setiap Tahun	RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023			
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2	3	4	5	4,35
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	4,76	3	3,33	5,18	4,35
1.2	PDRB per Kapita (ADHB)	46.234.037	43.489.833	43.740.660	48.599.664	44.075.065
1.3	Indeks Gini (Kesejahteraan)	0,28	0,321	0,308	0,308	0,256
1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,89	71,28	71,79	71,79	73,27
	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Percentase penduduk miskin (%)	5,13	4,51	4,34	4,34	3,83
2.2	Harapan lama sekolah	12,10 tahun	11,88	11,91	11,91	12,1
2.3	Angka rata-rata lama sekolah	7,20 tahun	7,34	7,42	7,42	7,7
2.4	Angka usia harapan hidup	71,52 tahun	71,67	71,83	71,83	72,3
2.5	Percentase halita/gizi buruk	0,06	0,022	0,01	0,01	0
2.6	Prevalensi stunting	3,31	5,06	5,01	5,01	4,86
	Prevalensi stunting (berdasarkan data SSGI)	20	16,63	13,76	13,76	9,12
2.7	Cakupan Desa/Kelurahan ODF	71,43	76,19	82,54	82,54	100,00
2.8	Angka partisipasi angkatan kerja	95,386	102,679	103,529	103,529	105,529
2.9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,85	71,88	72,37	72,37	74,3
2.10	Tingkat pengangguran terbuka	4,95	4,84	4,47	4,47	3,96
2.11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,34	91,82	92,09	92,09	92,69
2.12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,81	57,70	57,80	57,80	58,10
2.13	Indeks Perlindungan Anak	69,23	65,5	66	66	67,67
2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,53	83,9	84,1	84,1	84,75
2.15	Percentase PAD terhadap pendapatan	9,30	10,64	10,41	10,41	9,81
2.16	Opini BPK	WTP*	WTP	WTP	WTP	WTP
2.17	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (ketersediaan)	78,50	88,30	88,45	88,45	88,90
2.18	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha (miliar rupiah)	9.332,85	9.049,67	9.283,91	9.283,91	9.927,48
2.19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha (miliar rupiah)	5.986,90	5.963,79	6.162,12	6.162,12	6.938,74
	ASPEK PELAYANAN UMUM					

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
				RPJMD Tahun 2023	RKPD Tahun 2023		
Fokus Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	78,50	86	87	87	90	
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	5.974	37,50	38	38	40	
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	36,57	11,30	11,35	11,35	11,50	
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103,03	100	100	100	100	
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100,73	94	94,50	94,50	95	
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	74,61	85	87	87	90	
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,86	60	60,20	60,20	70	
1.8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	862	850	870	870	900	
1.9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	708	600	620	620	700	
1.10	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,46	0,22	0,22	0,22	0,20	
1.11	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	0,84	0,42	0,42	0,42	0,40	
1.12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,37	99,63	99,65	99,65	99,80	
1.13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,79	99,65	99,70	99,70	99,85	
1.14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,57	96,60	96,65	96,65	96,80	
1.15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	92,79	88,50	88,70	88,70	100	
1.16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	91,45	90	90,20	90,20	100	
1.17	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI	41	43	45	45	50	
1.18	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs	26	28	30	30	35	
1.19	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SD/MI	548	540	550	550	580	
1.20	Rasio Guru Siswa per pendidikan dasar sekolah SMP/MTs	650	600	610	610	640	
1.21	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SD/MI	55	54	55	55	58	
1.22	Rasio Guru Siswa per kelas sekolah SMP/MTs	65	60	61	61	64	
1.23	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	82,33	88	88,40	88,40	88,60	
1.24	Persentase guru yang bersertifikat SD/MI	49,51	56	57	57	60	
1.25	Persentase guru yang bersertifikat SMP/MTs	29,97	34	36	36	40	
1.26	Persentase Sekolah SD Berakreditasi Minimal B	92,22	96,65	96,70	96,70	97	
1.27	Persentase Sekolah SMP Berakreditasi Minimal B	80	77	78	78	80	
Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	14,1	6,25	5,65	5,65	3,89	
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	-4,37	-6,25	-5,65	-5,65	-3,89	
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	5,7	1,42	1,13	1,13	0,28	
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,5	2,84	2,54	2,54	1,67	
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	179,2	113,64	84,75	84,75	0,00	
2.6	Pelayanan kesehatan ibu hamil	84,77	100	100	100	100	
2.7	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	89,06	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023	
2.8	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,97	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan balita	84,40	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	38,39	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	74,92	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	64,88	100	100	100
2.13	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	49,07	100	100	100
2.14	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	95,83	100	100	100
2.15	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	102,42	100	100	100
2.16	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	54,05	100	100	100
2.17	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	72,80	100	100	100
2.18	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	6	25	20	5
2.19	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100
2.20	Persentase Posyandu aktif	50	50	55	70
2.21	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,019	0,020	0,020	0,019
2.22	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk per 100.000 penduduk	62,50	62,50	63,5	66,5
2.23	Rasio jumlah puskesmas, klinik dan pustu per 1000 penduduk	0,11	0,12	0,11	0,12
2.24	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68,3	100	100	100
2.25	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,2	100	100	100
2.26	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	41,27	65,08	77,78	77,78
2.27	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
2.28	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	15,88	100	100	100
2.29	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,0006	0,0012	0,0011	0,008
2.30	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	666	681	679	665
2.31	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	19	9	7	1
2.32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
2.33	Cakupan penderita diare yang ditangani	21,6	100	100	100
2.34	Angka kejadian Malaria	1	0	0	0
2.35	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0
2.36	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	85	85	88	95
2.37	Cakupan puskesmas	150	150	150	150
2.38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	73,7	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023	RKPД Tahun 2023	
2.39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
2.40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
2.41	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
2.42	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan dll)	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Proporsi jalan-jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	71,90	71,67	72,87	72,87	74,07
3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>60 km/jam) (%)	71,90	71,67	72,87	72,87	74,07
3.3	Persentase rumah tinggal bersantasi (%)	95,45	95,50	96,40	96,40	99,08
3.4	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	63,12	76,02	76,83	76,83	77,67
3.5	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	95,35	95,45	95,82	95,82	96,87
3.6	Persentase sarana dan prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	90,07	71,09	71,68	71,68	73,84
3.7	Persentase lau sawah yang beririgasi	34,71	35,73%	37,00%	37,00%	40,83%
3.8	Persentase rumah tangga berakses air minum sehari-hari (%)	85,27	86,49	88,43	88,43	93,59
3.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85,27	86,49	88,43	88,43	93,59
3.10	Persentase bangunan gedung yang ber-MB	4,88	5,93	6,50	6,50	8,20
3.11	Ketatanan terhadap RTRW	80,91	80	80	80	80
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98,01	96,49	96,89	96,89	98,08
4.2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	100	100	100	100	100
4.3	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)	14,66	43,99%	58,65%	58,65%	100,00%
4.4	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani (di luar kawasan 10 Ha)	4,21	25,15%	34,69%	34,69%	53,78%
4.5	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	57,86	59,22%	60,79	60,79	65,50%
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
5.2	Persentase penanganan pra bencana	n/a	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023	RKPД Tahun 2023	
5.3	Percentase penanganan tanggap darurat bencana	n/a	100	100	100	100
5.4	Percentase penanganan pasca bencana	n/a	100	100	100	100
5.5	Percentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	n/a	100	100	100	100
5.6	Percentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	100	100	100	100
5.7	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100
5.8	Percentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100	100	100	100
6	Sosial					
6.1	Percentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	94,96	100	100	100	100
6.2	Partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelelanggaraan kesejahteraan sosial	81,78	72	74	74	80
6.3	Percentase korban bencana yang dievakuasi yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
6.4	Percentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran verifikasi dan validasi DTKS	100	100	100	100	100
6.5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantai	100	100	100	100	100
6.6	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantai	100	100	100	100	100
6.7	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantai	100	100	100	100	100
6.8	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar pantai	100	100	100	100	100
6.9	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
7	Fokus Pelayanan Non Dasar					
7.1	Ketenagakerjaan					
7.2	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	90.663	97.809	98.910	98.910	101.450
7.2	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Percentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,02	36,20	36,30	36,30	36,60
8.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	12%	12%	12%
8.3	Percentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselaskan	100	100	100	100	100
8.4	Percentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselaskan	100	100	100	100	100
8.5	Percentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023		
8.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
9	Ketahanan Pangan					
9.1	Ketersediaan pangan utama	102,65	89,43	89,63	89,63	89,82
9.2	Ketersediaan energi perkapita per hari	2364,15	2350,32	2354,31	2354,31	2356,28
9.3	Ketersediaan protein perkapita per hari	75,96	75,50	75,63	75,63	76,02
9.4	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	34	61,11	72,22	72,22	100,00
9.5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	94	81,00	82,00	82,00	85,00
10	Pertanahan					
10.1	Jumlah Bidang tanah masyarakat yang disertifikat	20000	2000	2000	2000	2000
10.2	Persentase bangunan gedung yang ber-IMB	4,88%	5,93%	6,50%	6,50%	8,20%
11	Lingkungan Hidup					
11.1	Tersusunnya RPLH Kabupaten/Kota	Ada	ada	ada	ada	ada
11.2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	59,58	55,20	55,30	55,30	55,20
11.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,76	84,20	84,30	84,30	84,20
11.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air Laut	70,98	58,8	58,9	58,9	58,8
11.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	78,36	49,48	51,16	51,16	49,48
11.6	Timbulan Sampah yang ditangani	13.067,60	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3	13.297,60 m3
11.7	Persentase Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill (%)	98	82	82	82	82
11.8	Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) m3 / 1.000 Jiwa	11,99	9,73	9,73	9,73	9,73
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
12.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,65	0,64	0,65	0,65	0,68
12.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,92	100	100	100	100
12.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61,45	60	70	70	100,00
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
13.1	Jumlah desa maju	25	25	26	26	29
13.2	Jumlah desa berkembang	31	31	30	30	27
13.3	Jumlah BUMDes dibina	56	56	56	56	56
13.4	Persentase desa/kelurahan yang lembaga pemerintahan masyarakatnya aktif	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023		
13.5	Percentase pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan desa yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
14.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,96	1,96	1,9	1,9	1,80
14.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,41	2,4	2,38	2,38	2,35
14.3	Percentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	75,46	75	75,02	75,02	75,08
14.4	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,58	7,62	7,62	7,62	7,62
15	Perhubungan					
15.1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,24	0,23	0,21	0,21	0,15
15.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	78,40	78	80	80	85
15.3	Rasio Kejadiana Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	0,15	0,11	0,09	0,09	0,05
16	Komunikasi dan Informatika					
16.1	Percentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	81	88	88	100
16.2	Percentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	82,35	64	73	73	100
16.3	Jumlah ASN yang tersertifikasi di bidang TIK		5	1	1	2
16.4	Percentase pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi publik di semua sektor pembangunan daerah	70	38	50	50	100
16.5	Percentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	70	60	70	70	90
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
17.1	Percentase koperasi berkualitas	11,84	14,97	16,33	16,33	20,41
17.2	Percentase Usaha Mikro Tangguh	10,04	4,75	7,03	7,03	13,86
17.3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	6,73	2,00	4,00	4,00	7,00
17.4	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	4,56	2,80	5,68	5,68	14,81
17.5	Proporsi volume usaha koperasi terhadap total nilai tambah sektor UMKM	1,50	1,02%	1,05%	1,05%	1,15%
17.6	Rasio Kewirausahaan	6,04	5,94%	5,96%	5,96%	6,03%
17.7	Kontribusi nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB Daerah	33,78	32,37%	32,44%	32,44%	32,55%
18	Penanaman Modal					
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	32	50	50	50	50
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	745,87	475	500	500	575
18.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	69,59	48,63	48,63	48,63	48,63
19	Kepemudaan dan Olahraga					
19.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun		Kinerja Akhir Periode RPJMD
				RPJMD Tahun 2023	RKPД Tahun 2023	
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	0,88	35	40	40	55
19.3	Persentase wirausaha muda	0,26	8,75	9,25	9,25	10,75
19.4	Persentase pemuda berprestasi	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
19.5	Peningkatan prestasi olahraga	53	15	15	15	15
20	Statistik					
20.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam merusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
21	Persandian					
21.1	Persentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengelaman informasi pada Level II	3,12	18,75%	40,63%	40,63%	100,00%
21.2	Area ruang lingkup penilaian kematangan keamanan informasi	1	1	3	3	6
21.3	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	2	2	2	2	2
22	Kebudayaan					
22.1	Jumlah pelaku seni budaya yang mendapat penghargaan	3	3	5	5	9
22.2	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	55	8	10	10	20
22.3	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	62,35	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%
22.4	Jumlah Cagar Budaya yang diestetikan	8	8	8	8	8
22.5	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi	0	3	4	4	5
22.6	Persentase pembinaan sejarah	n/a	25	25	25	0
22.7	Ritual adat yang diselenggarakan	5	5	5	5	8
23	Perpustakaan					
23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	52.018	70.000	75.000	75.000	90.000
23.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	39,60	52	55	55	62
24	Kearisian					
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%	100%	100%	100%
24.2	Persentase ketersediaan arsip	100%	100%	100%	100%	100%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
	Pariwisata					
1.1	Kunjungan wisata	130.362	135.060	141.480	141.480	188.250
1.2	Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	8,67	8,15	10,62	10,62	15,20
1.3	Subsektor Ekonomi Kreatif Unggulan	n/a	37%	37%	37%	43%
	Pertanian					
2.1	Produktivitas Sektor Pertanian (Ton/Ha/Th)	8,47	9,4	10,18	10,18	12,96
2.1.5	Bawang Merah					

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023		
2.1.6	Cabai	8,89	10,57	11,46	11,46	14,58
2.1.9	Padi	3,86	3,91	3,97	3,97	4,15
2.1.10	Palawija	17,65	20,41	20,72	20,72	21,55
2.1.11	Sayuran dan Buah Semusim	8,04	10	10	10	12
2.1.12	Buah-buahan Tatunan	9,58	13,86	14,09	14,09	14,71
2.2	Produktivitas Sektor Perkebunan (Ton/Ha/Th)					
2.2.1	Kelapa Sawit	3,65	3,633	3,6433	3,6433	3,7335
2.2.2	Karet	1,48	1,4821	1,4829	1,4829	1,4891
2.2.3	Kopi	0,87	0,792	0,809	0,809	0,845
2.2.5	Lada	1,48	1,4831	1,4835	1,4835	1,488
2.3	Populasi Ternak					
2.3.1	Populasi Sapi	6,330	6,365	6,811	6,811	8,344
2.3.2	Populasi Kambing	1,196	1,152	1,382	1,382	2,388
2.3.3	Populasi Itik / Bebek	12,235	14,748	17,698	17,698	30,582
3.1	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Perdagangan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
4.1	Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Tradisional	4,67	1,50	3,02	3,02	7,73
4.2	Stabilitas harga bapok antar waktu	2,24	8,00	7,50	7,50	6,75
4.3	Indeks Keberdayaan Konsumen	0	36,00	37,00	37,00	40,00
4.4	Indeks Terbit Ukur Perindustrian	35	55,00	59,00	59,00	72,00
5.1	Pertumbuhan Volume Usaha Industri Kecil	21,17	3,02	4,57	4,57	7,73
5.2	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan	20,68	18,60	18,8	18,8	20
6	Kelautan dan Perikanan					
6.1	Produksi perikanan tangkap	27.596,99	27,957	28,237	28,237	29,092
6.2	Produksi perikanan budidaya	1.927,15	1.600,50	1.648,00	1.648,00	1.800,81
6.3	Konsumsiikan Lavanian Urusan Pendukung Pemerintahan	61,4	55	55,5	55,5	57
1	Sekretariat Daerah					
1.1	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	68,86	68,60	69,85	69,85	72,42
2	Perencanaan					
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023		
2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Penjabaran Konstensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Penjabaran Konstensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
3	Keuangan					
3.1	Opini BPK Terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	27,15%	20%	20%	20%	20%
3.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	10%	10%	10%	10%	10%
3.4	Penetapan APBD	29 Desember 2020	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Kepengawainan					
4.1	Persentase pelayanan kepegawaian yang efektif dan Efisien	86,22%	94,0%	95	95	100
5	Pendidikan dan Pelatihan					
5.1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	61,25%	64,93%	68,07%	68,07%	75,99%
5.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	39,76%	62,92%	63,08%	63,08%	63,49%
6	Penelitian dan Pengembangan					
6.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	83,3	100	100	100	100
6.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	70	100	100	100	100
6.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	100	100	100	100
6.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	70	100	100	100	100
7	Inspektorat Daerah					
7.1	Persentase tindak lanjut temuan jumlah pelanggaran pegawai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.2	Jumlah temuan BPK	5	15	10	10	0
8	Sekretariat DPRD					
8.1	Persentase Perda Hak Inisiatif Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
8.2	Persentase Perda Hak Inisiatif DPRD	100	100	100	100	100
8.3	Persentase anggaran yang disahkan	100	100	100	100	100
8.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan	100	100	100	100	100
8.5	Persentase aspirasi masyarakat yang tertampung	65	60	60	60	60
9	Kesatuan Bangsa dan Politik					
9.1	Persentase forum kemitraan yang aktif (%)	60	100	100	100	100
9.2	Persentase ormas yang aktif (%)	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kinerja 2021	Target Capaian Setiap Tahun		RKPD Tahun 2023	Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	RPJMD Tahun 2023		
9.3	Percentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani (%)	100	100	100	100	100
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	12.945	13.490	13.933	13.933	14.964
2	Nilai tukar petani	111,87	107,38	108,09	108,09	110,53
3	Nilai tukar nelayan	116,04	108,5	109	109	110,5
4	Nilai tukar pembudidaya ikan	105,57	106,85	106,9	106,9	107,05
5	Percentase desa maju terhadap total desa	44,64	44,6	46,4	46,4	51,8

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2021-2026. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 disusun berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 yaitu “**PEMULIHAN EKONOMI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**”.

Fokus pembangunan nasional pada Tahun 2023 difokuskan 8(delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; 3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; 4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta mendukung kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Tengah juga mendukung prioritas pemerintah pusat tersebut. RKPD 2023 diharapkan mampu memberikan daya ungkit dengan mengoptimalkan potensi-potensi unggulan daerah bagi pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah

melalui masukan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Forum Diskusi THIS dan forum diskusi lainnya. Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Bangka Tengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan swasta.

Terkait dengan fase pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran menjadi point yang penting, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, sedangkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur diarahkan bagi penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan pengalaman di masa pandemi Covid-19, pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi secara lebih optimal juga akan menjadi prioritas. Hal ini diharapkan bisa memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan sehingga metode *online* tersebut menjadi pertimbangan untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang serta bisa menjadi alternatif dilakukan kombinasi antara pelaksanaan secara konvensional dan digital.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah setiap tahun menuntut peran pemerintah daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah daerah sebagai regulator dan operator perlu disikapi dengan merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perpindahan peran yang semula operator menjadi regulator dan fasilitator menjadikan pemerintah daerah harus lebih fokus pada sektor yang strategis dan menekankan pada *quality goverment spending* dalam perencanaan pembangunan daerah dan target-target serta sasaran RKPD Tahun 2023 ini dapat tercapai dengan baik.



Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																				
										Nasional	Daerah																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																														
1 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						289,474,481,150						282,291,117,004														
1 01 01				Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya						215,141,158,500						201,221,117,000														
1 01 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40,000,000						40,000,000														
1 01 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30,000,000						30,000,000 Dinas Pendidikan														
1 01 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000						10,000,000 Dinas Pendidikan														
1 01 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						213,278,899,500						199,316,149,000														
1 01 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2500 Orang Bulan						2500 Orang Bulan 199,300,149,000 Dinas Pendidikan														
1 01 01 2.02 05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan						1 Laporan 10,000,000 Dinas Pendidikan														
1 01 01 2.02 07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD						2 laporan						2 laporan 6,000,000 Dinas Pendidikan														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	130,250,000						100 %	125,000,000			
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan				75 Stel	55,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	75 Stel	50,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	10 Orang	75,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	303,690,000						100 %	237,500,000			
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Paket	2,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	96,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Paket	54,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Paket	15,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	64,250,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Paket	65,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,440,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Dokumen	1,500,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	50 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Kelurahan									
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	243,000,000						100 %	295,350,000			
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	128,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	0	22 Unit	130,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	114,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	0	14 Unit	165,350,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	920,099,000						100 %	938,500,000			
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500,040,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	500,500,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	53,999,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	55,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	366,060,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	383,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	225,220,000						100 %	268,618,000			
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	69,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Unit	76,780,000	Dinas Pendidikan		
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				42 Unit	85,660,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	42 Unit	90,000,000	Dinas Pendidikan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Unit	76,788,000	Dinas Pendidikan			
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			38 Unit	24,650,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan	38 Unit	25,050,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan/Nonformal Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	% % % %	% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	73,380,018,650							100 % 100 % 100 % 100 %	79,920,000,004			
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	40,828,071,850						100 %	48,305,000,000			
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	2,862,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	4 Ruang	4,000,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	218,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	287,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	1 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			12 Unit	1,109,429,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	12 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			8 Ruang	1,275,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	8 Ruang	3,500,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	204,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	153,126,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	3 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	256,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			1 Unit	73,517,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	1 Unit	80,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			400 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	400 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			8100 Unit	660,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	8100 Unit	700,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			4 Paket	526,490,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	4 Paket	600,000,000	Dinas Pendidikan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						Kelurahan											
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			98 Satuan Pendidikan	74,999,850	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	98 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			50 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	50 Peserta Didik	50,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1058 Orang	11,635,560,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	1058 Orang	11,700,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			98 Satuan Pendidikan	27,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	98 Satuan Pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			98 Satuan Pendidikan	21,200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	98 Satuan Pendidikan	24,000,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			98 Orang	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	SD di Kab. Bangka Tengah	98 Orang	25,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SMP) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	%	100 %	20,717,639,000							100 %	24,300,000,000			
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			3 Unit	1,059,300,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	3 Unit	1,700,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas yg ditambah			1 Ruang	265,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						1 Ruang	800,000,000	Semua Kelurahan									
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	800,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Ruang	900,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	280,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	780,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	5 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	366,126,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	3 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	1,323,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	3 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	492,793,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	5 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah mebel yang diadakan				1 Paket 1 Paket	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Paket 1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				5500 Siswa 5500 Paket	560,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	5500 Siswa 5500 Paket	750,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa				1 Paket 1 Paket	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Paket 1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		yang Tersedia						Kelurahan									
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Proses Belajar yang diselenggarakan				3200 Peserta Didik 30 Sekolah	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	3200 Peserta Didik 30 Sekolah	50,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat bakat siswa yang dibina Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Siswa 400 Peserta Didik	79,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	400 Siswa 400 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disediakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				554 Orang 554 Orang	5,312,200,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	554 Orang 554 Orang	5,500,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga sekolah yang dibina Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				30 Sekolah 30 Satuan Pendidikan	94,235,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	30 Sekolah 30 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah yang mendapat operasional				30 Satuan Pendidikan 30 Sekolah	9,050,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	SMP di Kab. Bangka Tengah	30 Satuan Pendidikan 30 Sekolah	10,000,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase Standar pelayanan Minimal (SPM) PAUD	%	%	100 %	9,905,908,000							100 %	5,365,000,004			
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	140,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	4 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	140,798,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	2 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			10 Paket	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	10 Paket	40,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disediakan			567 Orang	4,752,510,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	567 Orang	4,800,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi lah pendidik dan tendik yang dikembangkan karirnya			35 Orang	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	35 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			160 Lembaga	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	160 Lembaga	75,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			160 Lembaga	4,727,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	PAUD di Kab. Bangka Tengah	160 Lembaga	4	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan/Nonformal	%	%	100 %	1,928,399,800						100 %	1,950,000,000				
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			3 Unit	806,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PKBM di Kab. Bangka Tengah	3 Unit	750,000,000	Dinas Pendidikan			
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			121 Peserta Didik	44,999,800	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PKBM di Kab. Bangka Tengah	121 Peserta Didik	50,000,000	Dinas Pendidikan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				7 Lembaga	39,900,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PKBM di Kab. Bangka Tengah	7 Lembaga	50,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				121 Orang	290,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	PKBM di Kab. Bangka Tengah	121 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Lembaga	746,700,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Pendidikan	PKBM di Kab. Bangka Tengah	7 Lembaga	800,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 03	PROGRAM PENGBEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Penyusunan Muatan Lokal	Mulok		Mulok	7 Mulok	139,494,000						7 Mulok	290,000,000			
1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan	Mulok		Mulok	7 Mulok	139,494,000						7 Mulok	290,000,000			
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	34,872,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SD dan SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SD dan SMP di Kab. Bangka Tengah	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 03 2.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				30 Buku	34,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SD dan SMP di Kab. Bangka Tengah	30 Buku	40,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				60 Orang	34,822,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	SD dan SMP di Kab. Bangka Tengah	60 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendddik	%		%	100 %	813,810,000						100 %	860,000,000			
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Percentase S1 dan Sertifikasi jenjang PAUD, SD dan SMP	%		%	70 %	813,810,000						70 %	860,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	63,350,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pendidikan		
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	750,460,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	800,000,000	Dinas Pendidikan		
TOTAL						289,474,481,150									282,291,117,004		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																				
										Nasional	Daerah																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																														
1 02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						89,157,262,302						104,931,002,132														
1 02 01				Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya						45,184,200,000						55,315,537,770														
1 02 01 2.01				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan						60,000,000						10 Dokumen 169,950,000														
1 02 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen yang disusun						5 Dokumen 30,000,000 Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan 5 Dokumen 110,000,000 Dinas Kesehatan														
1 02 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5 Laporan 30,000,000 Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan 5 Laporan 59,950,000 Dinas Kesehatan														
1 02 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Indeks pelayanan administrasi keuangan dan logistik kantor						100 % 100 % 44,057,000,000 Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan 100 % 100 % 50,051,700,000														
1 02 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah bulan pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN						12 Orang/bulan 44,000,000,000 Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit 12 Orang/bulan 50,000,000,000 Dinas Kesehatan														
1 02 01 2.02 05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1 Laporan 30,000,000 Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit 1 Laporan 22,000,000 Dinas Kesehatan														
1 02 01 2.02 07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD						1 Laporan 27,000,000 Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit 1 Laporan 29,700,000 Dinas Kesehatan														
1 02 01 2.05				Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah						Persentase pegawai tertib administrasi						100 % 60,000,000 Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan 100 % 132,000,000														
1 02 01 2.05 02				Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0 Paket 10,000,000 Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan 0 Paket 20 stell 22,000,000 Dinas Kesehatan														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Jumlah pengadaan pakaian dinas															
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan formal			75 Orang	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	75 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	235,000,000						100 %	996,100,000				
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Bulan 0 Paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan 0 Paket	37,895,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Bulan 0 Paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan 0 Paket	66,770,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 bulan 0 Paket	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan 0 Paket	16,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan			12 Bulan	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	50,600,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			32 OK	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan	32 OK	824,835,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	Paket	5 Paket	50,000,000						5 Paket	21,000,000				
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	1 Unit	21,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		yang Disediakan						Semua Kelurahan									
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	292,810,000						12 Bulan	3,143,378,370			
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bulan pelayanan jasa surat menyurat				12 Bulan	26,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	12 Bulan	55,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	180,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	12 Bulan	1,768,378,370	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	86,810,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	12 Bulan	1,320,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	429,390,000						12 Bulan	801,409,400			
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	40,610,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan	1 unit	96,265,400	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit 0 Unit	298,980,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan	11 Unit 0 Unit	430,144,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara				1 unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan	1 unit	110,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana gedung				11 Unit	39,800,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana		4. Peningkatan Kesehatan	Sarana dan prasarana yang ada di	11 Unit	165,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya per lengkap gedung kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum			Dinas Kesehatan					
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	88 %	38,205,769,702							88 %	41,977,660,662			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	Fasyankes	Fasyankes	13 Fasyankes	7,197,753,062							13 Fasyankes	7,317,753,062			
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			1 Unit	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	0	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			10 Unit	400,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	10 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan lainnya			100 %	2,452,753,062	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	100 %	2,452,753,062	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Alat kesehatan yang terkalibrasi			1 paket	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	150,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	tersedianya obat dan vaksin			1 paket	2,700,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	3,000,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	tersedianya fasilitas bahan habis pakai di kabupaten			1 paket	1,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	1 paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			12 Unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka	12 Unit	220,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kesehatan	Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing		Tengah					
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Paket	95,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Fasilitas pelayanan Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	95,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah Terlaksananya pengendalian faktor resiko penyakit pada situasi kejadian luar biasa (KLB), situasi khusus dan bencana	orang orang % % % %	orang orang % % % %	337 orang 44996 orang 100 % 100 % 100 % 100 %	30,812,966,640							337 orang 44996 orang 100 % 100 % 100 % 100 %	34,299,407,600			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang 100 %	95,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	0 Orang 100 %	143,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 %	260,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	286,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Percentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	99,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan				100 %	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dана Алокации Умум	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	114,400,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Percentase Anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan				100 %	65,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	70,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Percentase Masyarakat Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 %	55,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	49,500,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan				100 %	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	65,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44996 Orang	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dана Алокации Умум	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	44996 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				337 Orang	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	337 Orang	28,050,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2437 Orang	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dана Алокации Умум	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	2437 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4950 Orang	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dана Алокации Умум	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	4950 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terkelolaanya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa(KLB)			100 %	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	13,420,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Terkelolaanya pelayanan kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			0 Dokumen 100 %	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	0 Dokumen 100 %	13,750,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Percentase kasus gizi yang ditangani			100 %	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	165,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Upaya Pengembangan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Bulan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	12 Bulan	110,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya kualitas lingkungan			100 %	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	154,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Percentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas dan kelompok asuh mandiri toga Tersedianya pelayanan kesehatan tardisional di puskesmas			100 % 9 puskesmas 9 puskesmas	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 % 9 puskesmas 9 puskesmas	50,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya pengelolaan			12 Bulan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka	12 Bulan	44,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		surveilans kesehatan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tengah					
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Napza di Fasyankes dan Sekolah			22 Lokasi	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	22 Lokasi	38,500,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Mendapatkan pendampingan kesehatan, terlaksananya pengobatan gratis di pulau dan pengobatan pada hari-hari tertentu)			100 %	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	69,300,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			100 %	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	823,615,100	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Masyarakat Bangka Tengah yang memiliki Jaminan Kesehatan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat			57395 jiwa 95 % 95 %	28,642,966,640	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	57395 jiwa 95 % 95 %	30,000,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Percentase pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB			100 %	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	100 %	16,500,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terselenggarannya kab/kota sehat			0 Dokumen 4 Tatapan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	0 Dokumen 4 Tatapan	110,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya Tersedianya biaya operasional pelayanan fasilitas kesehatan			1 tahun 1 tahun	350,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	1 tahun 1 tahun	726,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		lainnya															
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit 9 puskesmas	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	0 Unit 9 puskesmas	543,152,500	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah				0 Dokumen 100 persen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	0 Dokumen 100 persen	11,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelaikan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedianya sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit 1 tahun	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab Bangka Tengah	1 Unit 1 tahun	451,220,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang memiliki sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Puskesmas	Puskesmas	9 Puskesmas	125,050,000							9 Puskesmas	195,500,000			
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			2 Dokumen	75,050,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Puskesmas	2 Dokumen		80,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi			9 Puskesmas	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Puskesmas	9 Puskesmas		115,500,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Daerah yang terakreditasi	RS	RS	1 RS	70,000,000							1 RS	165,000,000			
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinanannya			4 Unit 100 %	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Rumah Sakit	4 Unit 100 %		22,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Terkendalinya Pengendalian dan Pengawasan perizinan dan pelayanan RS tipe C dan D															
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan			100 %	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Rumah Sakit	100 %	143,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	%	%	63,5 %	5,119,999,800						63,5 %	5,884,209,000				
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah praktik tenaga kesehatan yang memiliki izin	Sarana	Sarana	25 Sarana	20,000,000						25 Sarana	43,000,000				
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Praktik tenaga kesehatan yang memiliki izin			1 Dokumen 25 saran	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Sarana Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen 25 saran	22,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan rencana kebutuhan dan pemberdayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	Bulan	Bulan	12 Bulan	4,925,000,000						12 Bulan	5,542,405,000				
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan			9 Puskesmas	4,925,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	9 Puskesmas	5,542,405,000	Dinas Kesehatan			
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang ditingkatkan dan dikembangkan mutu	orang	orang	110 orang	174,999,800						110 orang	298,804,000				
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan			100 %	174,999,800	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Puskesmas	100 %	298,804,000	Dinas Kesehatan			
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terjaminnya makanan, obat, obat tradisional yang beredar sesuai dengan standar	%	%	95 %	130,000,000						95 %	654,036,900				
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Sarana	Sarana	20 Sarana	30,000,000						20 Sarana	315,203,900				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg diberi izin															
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek,toko pobat,toko alat kesehatan dan optikal,usaha mikro obat tradisional (UMOT)				1 Dokumen 1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Sarana	1 Dokumen 1 Kegiatan	315,203,900	Dinas Kesehatan		
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu	IRTP		IRTP	60 IRTP	50,000,000						60 IRTP	195,519,500			
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri rumah tangga	Terlaksananya pengendalian dn pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pn\angan industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi,untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga				100 %	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	IRTP	100 %	195,519,500	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Sampel		Sampel	60 Sampel	50,000,000						60 Sampel	143,313,500			
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan				100 %	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Post Market	100 %	143,313,500	Dinas Kesehatan		
1 02 05	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Percentase posyandu aktif	%		%	55 %	517,292,800						55 %	1,099,557,800			
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase desa/kelurahan siaga aktif	%		%	20.6 %	200,000,000						20.6 %	549,557,800			
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	terlaksananya upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat				12 Bulan	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	12 Bulan	549,557,800	Dinas Kesehatan		
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang melakukan kegiatan promotif preventif	Puskesmas		Puskesmas	9 Puskesmas	100,000,000						9 Puskesmas	280,000,000			
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	1 Dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah posyandu lansia dan posyandu balita yang dibina	Posyandu		Posyandu	29 Posyandu	217,292,800						29 Posyandu	270,000,000			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya				1 Dokumen 12 Bulan	217,292,800	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen 12 Bulan	270,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Masyarakat (UKBM) persentase masyarakat yang berprilaku hidup bersih dan sehat 60 % Terlaksananya bimtek supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)						Kelurahan									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,361,710,000									2,361,000,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	2,361,710,000							88 %	2,361,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,361,710,000							12 Bulan	2,361,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang terkredитasi				1 Dokumen 9 Puskesmas	2,361,710,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas	1 Dokumen 9 Puskesmas	2,361,000,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,093,129,000									1,093,129,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	1,093,129,000							88 %	1,093,129,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,093,129,000							12 Bulan	1,093,129,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah operasional pelayanan puskesmas				12 Bulan	1,093,129,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Perlang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitali JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas perlang	12 Bulan	1,093,129,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,318,000,000									1,318,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	1,318,000,000						88 %	1,318,000,000			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,318,000,000						12 Bulan	1,318,000,000			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas				1 Dokumen 12 Bulan	1,318,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		4. Peningkatan Kesehatan	masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas lubuk besar	1 Dokumen 12 Bulan	1,318,000,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,359,399,950							1,359,400,000			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	1,359,399,950						88 %	1,359,400,000			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,359,399,950						12 Bulan	1,359,400,000			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas				1 Dokumen 12 bulan	1,359,399,950	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Namang	1 Dokumen 12 bulan	1,359,400,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,501,500,000							1,501,500,000			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	1,501,500,000						88 %	1,501,500,000			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,501,500,000						12 Bulan	1,501,500,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas Jumlah Puskesmas yang terkredитasi				1 Dokumen 12 Bulan 9 Puskesmas	1,501,500,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Simpang Katis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana Pengutaman Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Simpangkatis	1 Dokumen 12 Bulan 9 Puskesmas	1,501,500,000	Dinas Kesehatan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,574,000,000							1,574,000,000					
1 02 02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	%	88 %	1,574,000,000						88 %	1,574,000,000				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,574,000,000						12 Bulan	1,574,000,000				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas				1 Dokumen 12 Bulan	1,574,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat yang ada diwilayah kerja puskesmas Sungaiselan	1 Dokumen 12 Bulan	1,574,000,000	Dinas Kesehatan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,254,500,000							1,254,500,000					
1 02 02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%		%	88 %	1,254,500,000						88 %	1,254,500,000				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,254,500,000						12 Bulan	1,254,500,000				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah bulan operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Bulan 1 Dokumen	1,254,500,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Benteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas benteng	12 Bulan 1 Dokumen	1,254,500,000	Dinas Kesehatan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
									Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,407,500,000								1,407,500,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	%	88 %	1,407,500,000							88 %	1,407,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,407,500,000							12 Bulan	1,407,500,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas				1 Dokumen 12 Bulan	1,407,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pangkalbaru	1 Dokumen 12 Bulan	1,407,500,000	Dinas Kesehatan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,110,500,000								1,110,500,000		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kapitasi berbasis komitmen Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Percentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional	% % %	% % %	% 88 % 100 %	100 % 88 % 100 %	1,110,500,000							100 % 88 % 100 %	1,110,500,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pelayanan Puskesmas	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,110,500,000							12 Bulan	1,110,500,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah operasional pelayanan puskesmas Jumlah Puskesmas yang terkredитasi				5 Dokumen 12 Bulan 9 Puskesmas	1,110,500,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas Lampur	5 Dokumen 12 Bulan 9 Puskesmas	1,110,500,000	Dinas Kesehatan		
TOTAL						102,137,501,252									117,910,531,132		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																				
										Nasional	Daerah																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																														
1 02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65,000,000,000						65,451,667,000														
1 02 01				Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya						54,031,490,000						54,486,315,000														
1 02 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun						10 dokumen														
1 02 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60,000,000														
1 02 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah						5 Dokumen														
1 02 01 2.01 07				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,000,000						Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
1 02 01 2.02				Administiasi Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan ASN						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
1 02 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing														
1 02 01 2.05				Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah						Jumlah pegawai yang terpenuhi administrasinya						4. Peningkatan Kesehatan														
1 02 01 2.05 02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Manajemen RS														
1 02 01 2.05 09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						2 Paket														
1 02 01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah bulan pelayanan administrasi umum						229,750,000														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						Kab. Bangka Tengah, Semua														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan						125,000,000														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kab. Bangka Tengah, Semua						4. Peningkatan Kesehatan														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Manajemen RS														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						125,000,000						25 Laporan														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kab. Bangka Tengah, Semua						137,500,000														
1 02 01 2.06 09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Konsultasi SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan									
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang dilaksanakan	paket		paket	1 paket	500,000,000						1 paket		0		
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	1 Unit		0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang tupoksi	bulan		bulan	12 bulan	1,379,000,000						12 bulan	1,516,900,000			
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	12 Laporan	825,000,000		Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	629,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	12 Laporan	691,900,000		Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	bulan		bulan	12 bulan	353,350,000						12 bulan	373,925,000			
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	39,100,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	17 Unit	43,010,000		Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	166,650,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	17 Unit	183,315,000		Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	147,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Manajemen RS	8 Unit	147,600,000		Dinas Kesehatan	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan	bulan		bulan	12 bulan	23,000,000,000						12 bulan	24,000,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	23,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Unit Kerja	24,000,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	88 %	5,808,510,000						88 %	5,789,352,000				
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket		paket	7 paket	4,730,090,000					7 paket	4,623,090,000				
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			2 Unit	1,112,280,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	2 Unit	1,112,280,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	1,300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Unit	1,300,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1 Unit	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Unit	0	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			4 Unit	1,187,810,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	4 Unit	1,187,810,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan			17 Unit	330,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	17 Unit	363,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan			3 Unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	3 Unit	110,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			4 Unit	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	4 Unit	550,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah standar layanan yang terpenuhi	Standar	Standar	8 Standar	1,078,420,000						8 Standar	1,166,262,000				
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 Dokumen	657,360,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Dokumen	723,096,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	221,060,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	1 Unit	243,166,000	Dinas Kesehatan			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ratio tenaga medis per jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	63.5 per 100.000 penduduk	5,160,000,000						63.5 per 100.000 penduduk	5,176,000,000				
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	bulan		bulan	12 bulan	5,000,000,000					12 bulan	5,000,000,000				
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusa Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			134 Orang	5,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	134 Orang	5,000,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	bulan		bulan	12 bulan	160,000,000					12 bulan	176,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			140 Orang	160,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat Bangka Tengah	140 Orang	176,000,000	Dinas Kesehatan		
TOTAL						65,000,000,000									65,451,667,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas														
										Nasional	Daerah													
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	%	100 %	2,893,230,000						10,143,000,000							
1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah umlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	1,207,616,000						4,328,000,000							
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelayanan gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	1,207,616,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bulan	2,000,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	49,500,000						60,000,000							
1	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12 OK	49,500,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	12 OK	60,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	421,602,000						570,000,000							
1	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 Bulan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kesehatan	Seluruh Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kesehatan	Seluruh Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	70,000,000	Dinas Kesehatan					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya makan dan minum rapat, tamu dan pasien			12 Bulan	142,800,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kesehatan	Seluruh Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	180,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12 Bulan	125,002,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kesehatan	Seluruh Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	200,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			151 OK	83,800,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kesehatan	Seluruh Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	151 OK	100,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	333,506,000						12 Bulan	460,000,000				
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	1 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan			24 Unit/Set/Buah	35,706,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	24 Unit/Set/Buah	50,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	47,800,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	6 Unit	60,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	754,646,000					12 Bulan	983,000,000					
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bulan pelayanan jasa surat menyurat			12 Bulan	2,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	3,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	552,006,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	630,000,000	Dinas Kesehatan				
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Bulan	200,640,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama dan Masyarakat	12 Bulan	350,000,000	Dinas Kesehatan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	126,360,000						12 Bulan	255,000,000			
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	36,830,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	1 Unit	40,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 Unit	37,130,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	2 Unit	105,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara			3 Unit	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	3 Unit	80,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			29 Unit	17,400,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	29 Unit	30,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	%	85 %	2,507,425,000							85 %	2,935,000,000			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,322,812,500						12 Bulan	2,685,000,000			
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			2 Unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	2 Unit	125,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			3 Unit	1,813,862,500	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	3 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Alat Kesehatan yang terkalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan			1 Paket 0 Unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	1 Paket 0 Unit	60,000,000	Dinas Kesehatan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Regional/Regional Maintainance Center															
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				30 Paket	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	30 Paket	250,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya fasilitas bahan habis pakai di RS Pratama				94 Paket/Liter /Box/Roll	183,950,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	94 Paket/Liter /Box/Roll	250,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Penyediaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan		Bulan	12 Bulan	184,612,500						12 Bulan	250,000,000			
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Operasional Rumah Sakit				12 Bulan	184,612,500	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Masyarakat	12 Bulan	250,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per jumlah penduduk (per 100.00 penduduk)	/penduduk		/penduduk	62,5 100.00 /penduduk	2,599,345,000						62,5 100.00 /penduduk	2,880,000,000			
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pemdayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan rencana kebutuhan dan pemberdayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,555,445,000						12 Bulan	2,800,000,000			
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				12 Bulan	2,555,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	12 Bulan	2,800,000,000	Dinas Kesehatan		
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang mengikuti Kompetensi Teknis	OK		OK	20 OK	43,900,000						20 OK	80,000,000			
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Bulan 0 Orang	43,900,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Pegawai Rumah Sakit Pratama	12 Bulan 0 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
	dan Kompetensinya														
TOTAL						8,000,000,000								10,143,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																									
										Nasional	Daerah																												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																							
1 03 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)		Nilai		Nilai		80 Nilai		11,575,191,000				103,046,248,232																					
1 03 01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)		Nilai		Nilai		80 Nilai		80,000,000				114,950,000																					
1 03 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7 Dokumen		30,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		7 Dokumen		102,850,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1 03 01 2.01 07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5 Laporan		50,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		5 Laporan		12,100,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1 03 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)		Nilai		Nilai		80 Nilai		7,057,305,000										80 Nilai		8,123,724,112													
1 03 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						54 Orang/bulan		7,042,305,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		54 Orang/bulan		8,105,574,112		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1 03 01 2.02 05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan		10,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		1 Laporan		12,100,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1 03 01 2.02 07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						2 Laporan		5,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		2 Laporan		6,050,000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									
1 03 01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)		Nilai		Nilai		80 Nilai		370,000,000										80 Nilai		355,848,900													
1 03 01 2.05 02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						108 Paket		150,000,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		ASN		108 Paket		113,848,900		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan									

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						20 Orang	220,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	20 Orang	242,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	%	100 %	349,023,000								100 %	370,175,300		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Paket		6,050,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Paket		103,697,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	17,468,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Paket		19,214,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	68,795,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Paket		81,977,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	7,260,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	12 Dokumen		7,986,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	66 Laporan		151,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	%	100 %	1,600,000,000								100 %	273,329,925		
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas			1 Unit	550,000,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Unit		0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum							Pertanian	
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	12 Unit	186,615,275	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	650,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				27 Unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	27 Unit	86,714,650	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	%	100 %	902,644,000							100 %	992,908,455			
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	362,670,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	12 Laporan	398,937,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	118,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	12 Laporan	130,680,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Laporan	60,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	366,174,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Laporan	402,791,455	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian		
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Sesuai Tupoksinya	%	%	100 %	1,216,219,000							100 %	1,235,311,540			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	2 Unit	138,272,750	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 Unit	370,902,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	20 Unit	407,992,640	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			8 Unit	380,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	8 Unit	324,697,450	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			90 Unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	90 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	147,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	2 Unit	162,140,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	92,917,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 Unit	102,208,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Percentase tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	%	95.82 %	2,745,000,000						95.82 %	5,700,000,000				
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit air baku yang dibangun/direhab	Unit	Unit	1 Unit	1,245,000,000						1 Unit	3,000,000,000				
1 03 02 2.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun			1 Titik	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Titik	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			0.128 KM	320,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	0.128 KM	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi			0.5 KM	305,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	0.5 KM	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02 2.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara			1 Unit	440,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/ direhab/ ditingkatkan	Jaringan	Jaringan	1 Jaringan	1,500,000,000							1 Jaringan	2,700,000,000			
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irrigasi dan Rawa yang Tersusun			1 Dokumen	170,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Atas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Ditingkatkan			0.906 KM	1,230,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Belilik	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	0.906 KM	2,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irrigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irrigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			0.1301 KM	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang Kab. Bangka Tengah, Namang, Belilik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	0.1301 KM	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	%	88.43 %	6,150,000,000							88.43 %	8,170,000,000			
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah SPAM yang dibangun/ ditingkatkan/ diperbaiki/ dipelihara	SR	SR	900 SR	6,150,000,000							900 SR	8,170,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kabupaten/Kota																
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				2 Dokumen	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				150 SR	3,100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	150 SR	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				200 SR	1,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	200 SR	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaran SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				5 Kelompok Masyarakat	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaran SPAM yang meningkat kinerjanya				5 Penyelenggara SPAM	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	5 Penyelenggara SPAM	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				3 Unit	1,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	3 Unit	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				2 Unit	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	2 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Percentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak	%		%	96.4 %	2,750,000,000						96.4 %	2,450,000,000			
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit tanki septic yang dibangun	Unit		Unit	200 Unit	2,750,000,000						200 Unit	2,450,000,000			
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				150 Rumah Tangga	1,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	150 Rumah Tangga	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				5 Kelompok	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	5 Kelompok	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperbaikan dan Dipelihara	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperbaikan dan Dipelihara				5 Unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	5 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				50 Rumah Tangga	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	50 Rumah Tangga	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja			200 Rumah Tangga	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	200 Rumah Tangga	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Percentase penduduk yang terlayani drainase	%	%	65.58 %	4,064,000,000						65.58 %	9,050,000,000				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang dibangun/ direhab/ dipelihara	Meter	Meter	4320 Meter	4,064,000,000						4320 Meter	9,050,000,000				
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun			1 Dokumen	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			4070 M	2,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	4070 M	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi			218 M	360,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	218 M	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara			900 M	384,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	900 M	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			1510 M	1,200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Pangkalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1510 M	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
								Baru, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan							
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Percentase bangunan gedung yang ber-IMB	%	%	6.5 %	2,015,000,000						6.5 %	7,325,000,000		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang direncanakan/ dibangun/ direnovasi/ direhab	Unit	Unit	5 Unit	2,015,000,000						5 Unit	7,325,000,000		
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsional (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsional (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			300 Dokumen	140,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	300 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			6 Dokumen	1,725,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	6 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan	
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Disusun						Semua Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten	%	%	71.67 %	48,135,850,000							71.67 %	55,350,000,000			
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dan Desa yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dilebarkan	Km	Km	43 Km	48,135,850,000							43 Km	55,350,000,000			
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			3 Dokumen	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	3 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			2 Dokumen	275,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			10 KM	2,361,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	10 KM	2,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar			5 KM	8,714,850,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	5 KM	7,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			16.83 KM	27,600,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	16.83 KM	30,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			6 KM	4,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	6 KM	10,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			147 KM	2,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	147 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun			10 M	1,835,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	10 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			10 M	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat Pengguna Jalan	10 M	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Percentase tenaga kerja konstruksi bersertifikat	%	%	69.88 %	330,000,000							69.88 %	275,000,000			
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih	Orang	Orang	100 Orang	130,000,000							100 Orang	150,000,000			
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan			100 Orang	130,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	100 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi yang disusun	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	100,000,000							3 Dokumen	50,000,000			
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah bulan penyelenggaraan pengawasan jasa konstruksi	Bulan	Bulan	12 Bulan	100,000,000							12 Bulan	75,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Percentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	%	80.34 %	2,790,000,000							80.34 %	3,260,000,000			
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	1,840,000,000							5 Dokumen	2,360,000,000			
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1,240,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			2 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	Bulan	Bulan	12 Bulan	75,000,000						12 Bulan	75,000,000				
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			2 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Bulan	Bulan	12 Bulan	250,000,000						12 Bulan	250,000,000				
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						Semua Kelurahan									
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Bulan		Bulan	12 Bulan	625,000,000						12 Bulan	575,000,000			
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	275,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						850,000,000							1,000,000,000			
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Percentase jumlah pengaduan sengketa tanah yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten	%	%	%	100 %	50,000,000						100 %	50,000,000			
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang ditangani	Kasus		Kasus	5 Kasus	50,000,000						5 Kasus	50,000,000			
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Berita Acara		50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	2 Berita Acara	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,	Percentase tanah masyarakat yang	%	%	%	100 %	200,000,000						100 %	200,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	diredistribusi															
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang	Bidang	2000 Bidang	200,000,000							2000 Bidang	200,000,000			
2 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Dokumen	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percentase kecamatan yang tersedia Peta Zona Nilai Tanah dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	%	%	50 %	600,000,000							50 %	750,000,000			
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peta zona nilai tanah yang disusun	Peta	Peta	1 Peta	600,000,000							1 Peta	750,000,000			
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			1 Dokumen	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan			
TOTAL						81,405,041,000								104,046,248,232			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 04						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						4,390,000,000							3,170,000,000		
1 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Jumlah angka backlog perumahan Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	Unit %	Unit %	500 Unit 100 %		60,000,000						500 Unit 100 %	50,000,000					
1 04 02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kecamatan	Kecamatan	6 Kecamatan		35,000,000						6 Kecamatan	30,000,000					
1 04 02	2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota			1 Dokumen		10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				
1 04 02	2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan			1 Dokumen		5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				
1 04 02	2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Jumlah dokumen data rumah korban bencana kabupaten/kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani			1 Dokumen		5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				
1 04 02	2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus			1 Dokumen		15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				
1 04 02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Bulan	Bulan	12 Bulan		25,000,000						12 Bulan	20,000,000					
1 04 02	2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian			20 Laporan		25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan	20 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Perumahan	pembangunan dan pengembangan perumahan						Semua Kelurahan				dan Kawasan Permukiman					
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Percentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (di bawah 10 Ha)	%	%	43,99 %	1,485,000,000							43,99 %	1,100,000,000			
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah bulan terlaksananya perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Bulan	Bulan	12 Bulan	25,000,000							12 Bulan	40,000,000			
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh			20 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Laporan	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani	Ha	Ha	2 Ha	25,000,000							2 Ha	30,000,000			
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			20 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	Kawasan	Kawasan	2 Kawasan	1,435,000,000							2 Kawasan	1,030,000,000			
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki			20 Unit Rumah	1,210,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Batu Belubang Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Unit Rumah	730,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			20 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	20 Laporan	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				1 Ha	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Ha	250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Percentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	%	25,15 %	2,410,000,000							25,15 %	1,450,000,000			
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	2,410,000,000							1 Kegiatan	1,450,000,000			
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			40 Unit Rumah	2,410,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	40 Unit Rumah	1,450,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Percentase peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum	%	%	60,79 %	435,000,000							60,79 %	570,000,000			
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan	Kegiatan	Kegiatan	3 Kegiatan	435,000,000							3 Kegiatan	570,000,000			
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			3 Lokasi	380,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Lokasi	500,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			3 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah dokumen kerja sama penyediaan/pengelolaan PSU perumahan				3 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	40,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						14,552,260,000							15,993,260,000			
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya Nilai SAKIP OPD	Persen Nilai	Persen Nilai	100 Persen 81 Nilai	9,748,410,000							100 Persen 81 Nilai	9,545,260,000			
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	40,000,000							12 Bulan	40,000,000			
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur DPERKIMHUB	5 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur DPERKIMHUB	5 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	3,915,000,000							12 Bulan	4,009,260,000			
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				30 Orang/Bulan	3,900,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DPERKIMHUB	30 Orang/Bulan	3,994,260,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DPERKIMHUB	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD dan laporan				1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DPERKIMHUB	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						Kelurahan									
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	150,000,000						12 Bulan	150,000,000			
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				20 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	20 Orang	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	286,150,000						12 Bulan	286,000,000			
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Paket	5,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Paket	45,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				12 Paket	30,150,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	12 Paket	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	2 Paket	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundung-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundung-undangan yang disediakan				240 Dokumen	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	240 Dokumen	6,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			75 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	75 Laporan	150,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket Unit		Paket Unit	1 Paket 20 Unit	20,000,000					1 Paket 20 Unit	100,000,000				
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1 Unit	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	470,000,000					12 Bulan	490,000,000				
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Laporan	160,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1 Laporan	110,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Laporan	110,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Laporan	210,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Laporan	220,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,867,260,000					12 Bulan	4,470,000,000				
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas			1 Unit	87,260,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	1 Unit	90,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						Kecamatan, Semua Kelurahan								Perhubungan	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			40 Unit	4,750,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	40 Unit	4,300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			40 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur DIPERKIMHUB	40 Unit	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas kabupaten	Nilai	Nilai	0,21 Nilai	4,683,850,000							0,21 Nilai	6,218,000,000			
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan Panjang meter perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang disediakan	Unit Meter	Unit Meter	305 Unit 6200 Meter	3,124,000,000							305 Unit 6200 Meter	4,022,000,000			
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia			306 Unit	2,024,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	306 Unit	2,700,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara			1782 Unit	1,100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1782 Unit	1,300,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola	Terminal	Terminal	1 Terminal	100,000,000							1 Terminal	0			
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C yang tersusun			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Dokumen	Dokumen	13 Dokumen	82,000,000							13 Dokumen	84,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
2 15 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				13 Dokumen	82,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	13 Dokumen	84,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	Kali Uji		Kali Uji	3400 Kali Uji	897,850,000						3400 Kali Uji	401,000,000			
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia				1 Unit	640,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Unit	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar				1600 Unit	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1600 Unit	86,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor				1300 Dokumen	32,850,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1300 Dokumen	49,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara				10 Unit	130,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	10 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor				22 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	22 Laporan	34,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	70,000,000						1 Kegiatan	90,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota			1 Laporan	70,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Laporan	90,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk jalan kabupaten	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	117,000,000					2 Kegiatan	127,000,000				
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin			32 Laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	32 Laporan	50,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			1 Laporan	77,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Laporan	77,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	93,000,000					4 Kegiatan	104,000,000				
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor			3 Laporan	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan perhubungan	3 Laporan	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota			12 Laporan	63,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan perhubungan	12 Laporan	54,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan			
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (sat) daerah kabupaten yang diadakan/dibeli	Unit		Unit	1 Unit	200,000,000					1 Unit	1,390,000,000				
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar			1 Unit	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Unit	1,390,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kabupaten/Kota	kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia						Seutra Kelurahan									
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Percentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten	Persen		Persen	30 Persen	120,000,000							30 Persen	230,000,000		
2 15 03 2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Mutannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Mutannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	20,000,000							1 Kegiatan	30,000,000		
2 15 03 2.09 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah paket kegiatan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	100,000,000							1 Paket	200,000,000		
2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara				1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Pemangku kepentingan pada urusan Perhubungan	1 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
TOTAL						18,942,260,000									19,163,260,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3,552,240,000							1,405,000,000							
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan administrasi, operasional dan utilitas OPD	% %	73 %	2,230,200,000					73 %	40,000,000						
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumne	dokumne	10 dokumne	40,000,000				10 dokumne	0						
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan dan evaluasi	0 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan dan evaluasi	2 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	bulan	bulan	12 bulan	1,230,300,000				12 bulan	0					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9 Orang/bulan	1,215,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan keuangan	9 Orang/bulan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan keuangan	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan keuangan	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Tingkat profesionalisme dalam menjalankan tupoksinya	%	%	100 %	138,590,000				100 %	0					
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		75 stel	38,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPBD Kab. Bangka Tengah	75 stel	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		9 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		6. Peningkatan Tata Kelola	ASN BPBD Kab. Bangka	9 Orang	0	Badan Penanggulangan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Alokasi Umum		Pemerintahan	Tengah				Bencana Daerah	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	186,940,000						12 bulan		0		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan 0 Paket		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan 0 Paket		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan makan minum tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan 0 Paket		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	3 Paket		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan 0 Dokumen	3,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan 0 Dokumen		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63 Laporan	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	63 Laporan		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang	unit		unit	10 unit	159,400,000						10 unit		0		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	101,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana OPD	3 Unit			0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			28 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana OPD	28 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Unit	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana OPD	7 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	bulan	12 bulan	202,960,000						12 bulan		0			
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan 0 Laporan	126,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 0 Laporan		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah penyediaan jasa			0 Laporan 12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan 12 bulan		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 bulan 0 Laporan	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 0 Laporan		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 bulan 0 Laporan	34,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 0 Laporan		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang	bulan	bulan	12 bulan	272,010,000						12 bulan	40,000,000				
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	62,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	1 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			4 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	4 Unit		0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinananya															
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Unit	30,000,000				6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	6 Unit	40,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Alokasi Umum			4 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	4 Unit	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Percentase Penanganan kejadian bencana	%	%	100 %	1,322,040,000							100 %	1,365,000,000			
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan informasi rawan bencana	orang	orang	198022 orang	60,000,000							198022 orang	50,000,000			
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			198022 Orang	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh warga negara yang tinggal di Kab. Bangka Tengah	198022 Orang	50,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah kejadian bencana	kejadian	kejadian	40 kejadian	1,011,040,000							40 kejadian	1,020,000,000			
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			240 Orang	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	240 Orang	80,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			12 bulan 12 Dokumen	710,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	12 bulan 12 Dokumen	750,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah alat Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga			5 item 5 Unit	53,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	5 item 5 Unit	60,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Negara, Keluarga, maupun Petugas								Iklim							
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				10 Orang	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	10 Orang	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				900 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kejadian bencana yang tertangani	900 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah kejadian bencana	kejadian	kejadian	40 kejadian	236,000,000							40 kejadian	275,000,000			
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah kejadian			2 Dokumen 40 kejadian	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah kejadian bencana yang di tanggulangi	2 Dokumen 40 kejadian	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana			40 kejadian 20 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah kejadian bencana yang di tanggulangi	40 kejadian 20 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			400 Orang	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah kejadian bencana yang di tanggulangi	400 Orang	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1 05 03 2.03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah kejadian SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan			1 kejadian 1 Dokumen	38,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah kejadian bencana yang di tanggulangi	1 kejadian 1 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Epidemiologi Terpadu															
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama dengan lembaga lainnya	kerjasama		kerjasama	5 kerjasama	15,000,000						5 kerjasama	20,000,000			
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				6 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya	6 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
TOTAL						3,552,240,000									1,405,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		14,292,732,599										14,224,306,171				
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD Sesuai Tupoksinya	% %		%	100 %	6,214,388,299					100 %	5,974,022,331				
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	% %		%	100 %	40,000,000					100 %	62,000,000				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			5 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Dokumen	41,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun			5 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Dokumen	21,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	2.02	Administiasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	% %		%	100 %	3,821,724,570					100 %	3,193,788,000				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN			12 Bulan	3,806,724,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	3,174,788,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun			1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	7,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	05	01	2.05	Administiasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	% %		%	100 %	428,100,000					100 %	479,505,188				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan, jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan			259 Stel	383,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	259 Stel	279,505,188	Satuan Polisi Pamong Praja			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta yang mengikuti diklat formal			5 Orang	45,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	207,550,000							100 %	247,000,000			
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			12 Bulan	3,630,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan	29,040,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	36,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan pelayanan penyediaan makanan dan minuman			12 Bulan	32,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	14,400,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	17,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			12 Bulan	3,600,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan			49 Orang/Kegiatan	124,880,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	49 Orang/Kegiatan	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	%	100 %	1,195,985,000							100 %	1,175,000,000			
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel			1 paket	40,024,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 paket	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket	71,424,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 paket	90,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1,045,600,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Air Mesu		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Paket	38,936,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	229,280,000						100 %	456,836,200			
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat				12 Bulan	76,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	207,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 Bulan	43,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	47,916,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan, jumlah bulan pelayanan jasa kebersihan				12 Bulan	109,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	201,120,200	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	291,748,729						100 %	359,892,943			
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				9 Unit	67,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	9 Unit	92,571,050	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	156,110,729		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Bulan	171,721,893	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				13 Item	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	13 Item	35,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara				105 M2	37,628,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	105 M2	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	100 %	6,724,668,300						100 %	6,915,517,600			
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	100 %	2,215,395,900						100 %	1,797,429,882			
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Gangguan Rawan Konflik				3 Objek 20 kali	355,433,250		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas	6. Peningkatan Tata Kelola	0	3 Objek 20 kali	395,433,522	Satuan Polisi Pamong Praja		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah Jumlah Pencegahan Keamanan dan kenyamanan Jumlah pengamanan Hari Besar Agama				40 kali 3 kali			Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan		40 kali 3 kali				
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Operasional Penertiban dari Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Operasi Penertiban Pajak Daerah Non Yustisi				40 kali 15 kali	339,567,950			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	40 kali 15 kali	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah aktif berkoordinasi, Jumlah anggota linmas yang menerima honor				422 orang 129 orang	898,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	422 orang 129 orang	875,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta sanlinmas yang mengikuti apel siaga Jumlah peserta sanlinmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Satpol PP Pariwisata yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pembinaan dan pelatihan Fisik Personil				422 orang 60 orang 4 orang 154 orang	481,544,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	422 orang 60 orang 4 orang 154 orang	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP (bela diri militer, Senam Tongkat T (Kundun), Penyuluhan Hukum)				3 Lembaga	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Lembaga	111,996,360	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/PERDA	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat/PERDA				1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/perkada			3 orang	40,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 orang	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Percentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	%	100 %	4,484,032,400							100 %	5,075,442,478			
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada tersosialisasikan dan pembinaan			6 Perda	35,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Perda	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah anggota Satpol PP yang menerima honor bulanan dan honor Pikit khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah Jumlah Kepatuhan masyarakat terhadap perda /perkada			160 orang 5 Perda	4,397,182,400		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	160 orang 5 Perda	4,945,442,478	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasional Penertiban Pajak Daerah Jumlah Sanksi Penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada			24 kali 5 Sanksi 10 kali	51,850,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	24 kali 5 Sanksi 10 kali	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Percentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	%	100 %	25,240,000							100 %	42,645,240			
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Rapat Koordinasi PPNS			6 kali	25,240,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 kali	42,645,240	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota	%	%	82 %	1,353,676,000							82 %	1,334,766,240			
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Percentase Pengendalian Kebakaran	%	%	100 %	1,288,676,000							100 %	1,269,766,240			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					63 Titik	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	63 Titik	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik rawan kebakaran				3 Unit 38 Orang 7 Orang 70 Kali	1,141,937,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Unit 38 Orang 7 Orang 70 Kali	1,166,620,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara Jumlah pegawai kontrak pemadam kebakaran jumlah petugas damkar yang mengikuti bimtek Jumlah Terkendalinya Bencana Kebakaran dalam daerah				30 kejadian	73,378,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 kejadian	43,146,240	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi				12 kejadian	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 kejadian	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan operasi				5 Koordinasi	13,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Koordinasi	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kerjasama dan Koordinasi							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0					
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Percentase Pengendalian Kebakaran	%	%	100 %	35,000,000							100 %	35,000,000			
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Terpeliharanya Alat Pemadam Api Ringan Proteksi Kebakaran			20 Pelaku Usaha	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Pelaku Usaha	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja			
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Alat Proteksi Kebakaran			20 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Unit	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja			
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Percentase Pengendalian Kebakaran	%	%	100 %	15,000,000						100 %	15,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah frekuensi investigasi			20 Kali	15,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Kali	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Percentase Pengendalian Kebakaran	%	%	100 %	15,000,000							100 %	15,000,000			
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pembinaan			6 Kali	15,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Kali	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
TOTAL						14,292,732,599								14,224,306,171			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						11,397,311,416							12,200,002,300		
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	%	%	100 %	6,164,843,416						100 %	6,534,002,300			
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah persentase terlaksananya penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen %	Dokumen %	5 Dokumen 100 %	40,000,000						5 Dokumen 100 %	40,000,000			
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	5 Dokumen	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	5 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai SAP Terlaksanakannya administrasi keuangan yang sesuai SAP	% %	% %	100 % 100 %	4,650,923,416						100 % 100 %	4,894,332,300			
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67 Orang/bulan	4,635,923,416	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	67 Orang/bulan	4,879,332,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	06	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	06	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/			2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Bangka	2 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Triwulan/ Semester SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD									6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tengah			Desa		
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	%	100 %	115,000,000							100 %	150,000,000			
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			67 stell	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	Pelayanan Publik di Dinsos Bateng	67 stell	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik di Dinsos Bateng	10 Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	257,900,000							100 %	264,000,000			
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik Di Dinsos-PMD Kab. Bateng	12 Paket	6,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik Di Dinsos-PMD Kab. Bateng	12 Paket	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik Di Dinsos-PMD Kab. Bateng	12 Paket	15,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	44,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik Di Dinsos-PMD Kab. Bateng	12 Paket	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik Di Dinsos-PMD Kab. Bateng	2 Dokumen	3,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan			80 Laporan	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		6. Peningkatan Tata Kelola	Pelayanan Publik Di	80 Laporan	125,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Alokasi Umum		Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinsos-PMD Kab. Bateng				Masyarakat dan Desa		
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	30,000,000							100 %	30,000,000			
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kelengkapan Barang Milik Daerah	2 Unit	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	605,020,000							100 %	605,670,000			
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	247,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinsos-PMD Bateng	12 Laporan	248,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	86,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinsos-PMD Bateng	12 Laporan	87,670,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	271,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinsos-PMD Bateng	12 Laporan	270,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	466,000,000							100 %	550,000,000			
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	37,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Dinsos-PMD Kab.Bangka Tengah	1 Unit	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanannya			17 Unit	366,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Dinsos-PMD Kab.Bangka Tengah	17 Unit	430,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			51 Unit	30,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Dinsos-PMD Kab.Bangka Tengah	51 Unit	20,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	32,060,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Dinsos-PMD Kab.Bangka Tengah	5 Unit	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Percentase Partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	%	85 %	1,476,400,000							85 %	1,610,000,000			
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan PUB sesuai peraturan yang berlaku	%	%	100 %	44,940,000							100 %	60,000,000			
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			10 Dokumen	44,940,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PSKS Kabupaten Bangka Tengah	10 Dokumen	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Percentase PSKS yang ditingkatkan potensinya	%	%	80 %	1,431,460,000							80 %	1,550,000,000			
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			96 Orang	902,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PSKS Di Kabupaten Bangka Tengah	96 Orang	950,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Orang	79,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PSKS Di Kabupaten Bangka Tengah	6 Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			9 Keluarga	110,030,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	PSKS Di Kabupaten Bangka Tengah	9 Keluarga	140,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kebagaikan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Lembaga	291,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PSKS Di Kabupaten Bangka Tengah	6 Lembaga	300,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	JUMLAH KASUS Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 KASUS 3 Sertifikat	47,780,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	PSKS Di Kabupaten Bangka Tengah	10 KASUS 3 Sertifikat	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	%	100 %	1,350,978,000							100 %	1,546,000,000			
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Percentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial Percentase terlaksananya kegiatan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti	%	%	100 % 100 %	1,350,978,000							100 % 100 %	1,546,000,000			
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	29,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			7 Orang	35,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	7 Orang	36,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapat bantuan UEP Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			4 UEP 647 Orang	861,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	4 UEP 647 Orang	870,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			196 Orang	222,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	196 Orang	400,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	95,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	20 Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Orang	31,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	5 Orang	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial yang kerjasama			4 lembaga	74,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial 5. Perlindungan Sosial	PPKS Kabupaten Bangka Tengah	4 lembaga	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	%	100 %	2,038,000,000						100 %	2,120,000,000				
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase desa/kelurahan yang memanfaatan DTKS dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan Percentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	% %	% %	100 % 100 %	2,038,000,000						100 % 100 %	2,120,000,000				
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			65000 Orang	102,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat miskin/Tidak mampu Kabupaten Bangka Tengah	65000 Orang	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			1500 Keluarga	1,836,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat miskin/Tidak mampu Kabupaten Bangka Tengah	1500 Keluarga	1,900,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4254 Keluarga	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat miskin/Tidak mampu Kabupaten Bangka Tengah	4254 Keluarga	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Percentase korban bencana yang dapat diatasi	%		%	100 %	367,090,000							100 %	390,000,000		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Percentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	%		%	100 %	217,090,000							100 %	210,000,000		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				230 Orang	92,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	230 Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	125,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	10 Orang	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Percentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	%		%	100 %	150,000,000							100 %	180,000,000		
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	32 Orang	155,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2,648,557,260								2,853,000,000		
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Percentase Desa-Desa dalam melakukan kerjasama antara desa dan dapat membangun desa melalui kawasan perdesaan	%		%	100 %	63,229,350							100 %	70,000,000		
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Percentase terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa	%		%	100 %	63,229,350							100 %	70,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Percentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa															
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	63,229,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Percentase Pemerintahan Desa/Kel yang bekerja baik	%		%	100 %	1,374,965,710						100 %	1,449,000,000			
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	%		%	100 %	1,374,965,710						100 %	1,449,000,000			
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				56 Dokumen	1,005,380,210	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	1,020,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				56 Dokumen	16,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				56 Dokumen	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				56 Dokumen	25,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				56 Orang	29,376,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Orang	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				56 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	65,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,				34 Laporan	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan	34 Laporan	30,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kepala Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						Kecamatan, Semua Kelurahan				Desa				Desa	
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			56 Dokumen	30,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	35,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			56 Dokumen	25,499,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	50,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			56 Orang	39,999,750		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Orang	42,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			34 Desa	45,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	34 Desa	50,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			56 Dokumen	40,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggar a Administrasi Pemerintahan Desa	56 Dokumen	42,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Percentase kemasyarakatan Desa yang teratur dalam tertiib administrasi	%	%	100 %	1,210,362,200							100 %	1,334,000,000			
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Desa/Kelurahan yang lembaga kemasyarakatannya dibina	%	%	100 %	1,210,362,200							100 %	1,334,000,000			
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			6 Lembaga	193,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Lembaga kemasyarakatan Desa	6 Lembaga	213,000,000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah lembaga Posyantek yang dibina			3 Laporan 6 posyantek	98,515,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Lembaga kemasyarakatan Desa	3 Laporan 6 posyantek	120,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			6 Dokumen	918,449,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Lembaga kemasyarakatan Desa	6 Dokumen	1,001,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
TOTAL						14,045,868,676									15,053,002,300		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,519,548,750							1,700,800,000	
2 08 02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah dan Jejaringnya yang sudah dilatih PUG	%	%	80 %	333,788,750										360,000,000			
2 08 02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	Kali	Kali	3 Kali	80,000,000										100,000,000			
2 08 02	2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Dunia Usaha, Perencana Desa	1 Dokumen			100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.			
2 08 02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	orang	orang	55 orang	94,218,750										100,000,000			
2 08 02	2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Laporan	94,218,750	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Organisasi PP di Bangka Tengah	1 Laporan			100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.			
2 08 02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenaagan kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	Orang	100 Orang	159,570,000										160,000,000			
2 08 02	2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			100 Orang	159,570,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	FPKDRT,Tim TTPO,Satgas PPA	100 Orang			160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terselesaikan	%		%	100 %	246,520,000						100 %	276,125,000			
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Orang		Orang	80 Orang	95,220,000						80 Orang	100,000,000			
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	95,220,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Peningkatan Kesehatan	Lintas Sektor	5 Dokumen	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus		kasus	25 kasus	151,300,000						25 kasus	176,125,000			
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Layanan	151,300,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4. Peningkatan Kesehatan	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	25 Layanan	176,125,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	Kali		Kali	4 Kali	187,254,000						4 Kali	200,000,000			
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/kota	Laporan		Laporan	3 Laporan	187,254,000						3 Laporan	200,000,000			
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	187,254,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	organisasi kemasyarakatan	3 Laporan	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Percentase anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan	%		%	100 %	171,086,000						100 %	200,000,000			
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mendapat Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		Orang	25 Orang	171,086,000						25 Orang	200,000,000			
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	171,086,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	25 Orang	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Percentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	Per센		Per센	100 Per센	580,900,000						100 Per센	664,675,000			
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	2 dokumen	90,150,000						2 dokumen	100,000,000			
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kali	90,150,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4. Peningkatan Kesehatan	PA	2 Kali	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak yang terlayani	Orang		Orang	40 Orang	380,625,000						40 Orang	404,675,000			
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	135,950,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan Kesehatan	PPA	40 Orang	160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan				40 Layanan	244,675,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4. Peningkatan Kesehatan	PPA	40 Layanan	244,675,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	100 orang	110,125,000						100 orang	160,000,000			
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	110,125,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		4. Peningkatan Kesehatan	DPPKBPPA	5 Dokumen	160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						8,239,712,480								8,976,848,000		
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%		%	100 %	5,101,006,480						100 %	5,333,820,000			
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	5 dokumen	32,070,000						5 dokumen	40,000,000			
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	23,190,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPA	5 Dokumen	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	8,880,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPA	5 Laporan	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	37 orang	3,819,217,630						37 orang	3,915,000,000			
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	3,804,007,630	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPA	37 Orang/bulan	3,900,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPA	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5,210,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPA	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	101,335,000						100 Persen	105,000,000			
2 14 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	34,535,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	65 Paket	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal				10 orang	66,800,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	10 orang	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		unit	65 unit	264,713,850						65 unit	281,200,000			
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket/bulan	4,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Paket/bulan	4,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket/bulan	84,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Paket/bulan	84,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket/Bulan	21,367,500	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Paket/Bulan	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket/bulan	28,047,350	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0		12 Paket/bulan	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	2,099,500	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0		12 Dokumen	3,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	124,999,500	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0		25 Laporan	125,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebeleur yang diadakan	unit		unit	3 unit	58,085,000						3 unit	80,000,000			
2 14 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	22,050,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0		10 Unit	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	36,035,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0		4 Unit	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	436,865,000						12 Laporan	448,000,000			
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	87,955,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPP	12 Laporan	88,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	105,400,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPP	12 Laporan	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	243,510,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	DPPKBPPP	12 Laporan	250,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	388,720,000						12 Bulan	464,620,000			
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	69,600,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Unit	82,700,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	271,920,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	7 Unit	271,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	33,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	67 Unit	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Unit	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 02	PROGRAM PENGGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Contraceptive Prevalensi Rate(CPR)	%	%	75,02 %	398,185,000							75,02 %	510,000,000			
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal,Non Formal dan Informal	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	233,450,000						2 Dokumen	290,000,000			
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				2 Dokumen	61,900,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 02 2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	70,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	3 Dokumen	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			4 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	4 Satuan Pendidikan	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			2 Laporan	51,550,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	2 Laporan	70,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Ketersediaan data pilha peserta KB per kecamatan	%	%	100 %	164,735,000							100 %	220,000,000			
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk			2 set	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	2 set	70,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			1 Dokumen	74,735,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			63 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	DALDUK	63 Dokumen	70,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Percentase Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Unmet need)	%	%	6,76 %	2,324,171,000							6,76 %	2,563,028,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Unmet need) Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Unmet need)	Dokumen	Dokumen %	5 Dokumen %	6.76 %	764,264,000						5 Dokumen %	6.76 %	764,264,000		
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi yang dilakukan pada Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			6 kali	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	6 kali	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Item Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			6 item	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	6 item	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Item Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			6 item	70,640,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	6 item	70,640,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			12 Laporan	93,600,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	12 Laporan	93,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapatkan Biaya Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			6 balai	435,024,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	6 balai	435,024,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pertemuan Yang Mendukung Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			8 Kali	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kesehatan	Pasangan Usia Subur(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(Un met need)	8 Kali	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang ada	Orang	Orang	12 Orang	408,323,000							12 Orang	410,000,000			
2 14 03 2.02 04	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			214 Orang	408,323,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	PKB/PLKB	214 Orang	410,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang mendapat distribusi alat dan obat kontrasepsi	Faskes	Faskes	12 Faskes	852,544,000							12 Faskes	1,089,724,000			
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Faskes Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			10 Laporan	4,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	Faskes	10 Laporan	23,290,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertamaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertamaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			410 Orang	260,434,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	Faskes	410 Orang	260,434,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			35 Unit	104,480,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	Faskes	35 Unit	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			6 Laporan	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	Faskes	6 Laporan	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Akseptor Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			500 Akseptor	477,130,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	Faskes	500 Akseptor	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	Kampung KB	Kampung KB	13 Kampung KB	299,040,000						13 Kampung KB	299,040,000				
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			13 Kampung	299,040,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	Kampung KB	13 Kampung	299,040,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Percentase Cakupan Kelompok kegiatan yang dibina	%	%	100 %	416,350,000						100 %	570,000,000				
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan yang dibina Jumlah Kelompok kegiatan yang dibina	kelompok Kelompok	kelompok Kelompok	10 kelompok 10 Kelompok	416,350,000						10 kelompok 10 Kelompok	570,000,000				
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)			10 Unit	58,900,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		4. Peningkatan Kesehatan	0	10 Unit	70,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Keluarga/UPPKS)																
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				50 kelompok 0 Laporan	64,350,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	50 kelompok 0 Laporan	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Bulan Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 bulan 0 Orang	70,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	12 bulan 0 Orang	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	80,250,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi				1 Laporan	64,700,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															
2 14 04 2.01 11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				40 Orang	78,150,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kesehatan	0	40 Orang	100,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
TOTAL						9,759,261,230										10,677,648,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						9,076,478,400							11,226,370,000	
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	%	90 %	8,266,888,400						90 %	10,249,370,000		
2	09	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	%	70 %	55,000,000						70 %	60,500,000		
2	09	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan OPD	5 Dokumen	36,300,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan OPD	5 Laporan	24,200,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	90 Sesuai	6,819,238,400						90 Sesuai	7,518,150,000		
2	09	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			52 Orang/bulan	6,804,238,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN Dinas Pangan	52 Orang/bulan	7,500,000,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN Dinas Pangan	1 Laporan	12,100,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN Dinas Pangan	1 Laporan	6,050,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%	%	90 %	250,000,000						90 %	223,850,000		
2	09	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			100 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Bangka Tengah	100 Paket	102,850,000	Dinas Pangan	
2	09	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang			16 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Bangka Tengah	16 Orang	121,000,000	Dinas Pangan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan															
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%		%	90 %	321,000,000							90 %	1,046,900,000		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	7 Paket	18,150,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	126,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	7 Paket	145,200,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	7 Paket	702,600,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	1 Paket	24,200,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	2 Dokumen	6,050,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	20 Laporan	150,700,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%		%	90 %	483,250,000							90 %	667,920,000		
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	1 Laporan	181,500,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	1 Laporan	135,520,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	263,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai ASN dan PKK Dinas Pangan	1 Laporan	350,900,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya	%		%	90 %	338,400,000							90 %	732,050,000		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				1 Unit	100,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	114,950,000	Dinas Pangan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik							
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	2 Unit	423,500,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luas Gedung Kantor/banunan yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit 800 M2	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit 800 M2	96,800,000	Dinas Pangan		
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	88,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	96,800,000	Dinas Pangan		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diukur dari konsumsi energi per kapita	kkal perkapita per hari	kkal perkapita per hari	2118.80 kkal perkapita per hari	632,490,000							2118.80 kkal perkapita per hari	750,000,000			
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan wilayah dengan Ketersediaan data info pasokan dan harga	kecamatan	kecamatan	6 kecamatan	195,065,000							6 kecamatan	210,000,000			
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			2 Laporan	52,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Bangka Tengah	2 Laporan	60,000,000	Dinas Pangan			
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Laporan	92,345,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Bangka Tengah	1 Laporan	95,000,000	Dinas Pangan			
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Bangka Tengah	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pangan			
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan	Capaian Pengelolaan Cadangan Pangan	%	%	72.22 %	174,235,000							72.22 %	180,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Daerah															
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				35 Ton	123,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Bangka Tengah	35 Ton	135,000,000	Dinas Pangan		
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				45 Ton	51,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Bangka Tengah	45 Ton	45,000,000	Dinas Pangan		
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Capaian Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kelompok		Kelompok	23 Kelompok	263,190,000						23 Kelompok	360,000,000			
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	9,395,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pangan		
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	253,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	350,000,000	Dinas Pangan		
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Percentase Desa Rawan Pangan	%		%	2,20 %	33,000,000							2,20 %	60,000,000		
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Rekomendasi dan intervensi hasil analisis kerentanan dan ketahanan pangan	Rekomendasi		Rekomendasi	2 Rekomendasi	33,000,000						2 Rekomendasi	60,000,000			
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Wilayah Rentan Rawan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pangan		
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%		%	82 % 83 %	144,100,000							82 % 83 %	167,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Keamanan Pangan															
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	Kali kali		Kali kali	12 Kali 12 kali	144,100,000						12 Kali 12 kali	167,000,000			
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	23,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Bangka Tengah	3 Sertifikat	37,000,000	Dinas Pangan		
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pangan		
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	64,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Pangan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3,724,079,000							3,757,370,000			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Percentase Penyediaan Sarana Pertanian	%		%	86 %	600,000,000						86 %	600,000,000			
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Percentase Penyediaan Sarana Pertanian	%		%	86 %	600,000,000						86 %	600,000,000			
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 BPP	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Penyuluhan dan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan (BPP)	6 BPP	600,000,000	Dinas Pangan		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa	%		%	87 %	3,124,079,000						87 %	3,157,370,000			
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		%		%	87 %	3,124,079,000						87 %	3,157,370,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Percentase pelayanan penyuluhan pertanian dihitung dari rasio penyuluhan per desa															
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah penyuluhan dan admin yang mendapatkan pembiayaan operasional Jumlah penyuluhan dan admin yang mengikuti pelatihan Jumlah penyuluhan yang mengikuti magang Jumlah peserta yang mengikuti jambore penyuluhan Jumlah programma dan RKT penyuluhan yang disusun				6 Unit 77 orang 77 orang 7 orang 77 orang 69 Programma-RKT	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani di Kabupaten Bangka Tengah	6 Unit 77 orang 77 orang 7 orang 77 orang 69 Programma-RKT	2,000,000,000	Dinas Pangan		
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Jumlah peserta kursus tani Jumlah peserta PENAS Jumlah petani peserta temu lapang Jumlah petani yang mengikut magang				20 Unit 68 persen 150 orang 20 Orang 150 Orang 7 Orang	746,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani di Kabupaten Bangka Tengah	20 Unit 68 persen 150 orang 20 Orang 150 Orang 7 Orang	780,000,000	Dinas Pangan		
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah rekomendasi hasil kaji terap percontohan teknologi di BPP Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Luas lahan kaji terap teknologi di BPP				6 rekomendasi 3 unit 0 Unit 6 Ha	377,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani di Kabupaten Bangka Tengah	6 rekomendasi 3 unit 0 Unit 6 Ha	377,370,000	Dinas Pangan		
TOTAL						12,800,557,400									14,983,740,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																				
										Nasional	Daerah																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																														
2 11				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,763,029,918						11,562,021,649														
2 11 01				Indeks Pelayanan OPD						Poin						70 Poin														
2 11 01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						poin						62 poin														
2 11 01 2.01 01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen														
2 11 01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
2 11 01 2.02 01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim														
2 11 01 2.02 05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7. Pengendalian Lingkungan Hidup														
2 11 01 2.02 07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD						Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan						Dinas Lingkungan Hidup														
2 11 01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						1 Dokumen														
2 11 01 2.05 02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya						5,000,000														
2 11 01 2.05 02				Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						persen						100 persen														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						7. Pengendalian Lingkungan Hidup														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						Dinas Lingkungan Hidup														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						45 Stell														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						30,900,000														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						Dinas Lingkungan Hidup														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						45 Stell														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						38,940,000														
2 11 01 2.05 02				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						Dinas Lingkungan Hidup														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		yang								Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim							
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Formal			10 Orang	35,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	10 Orang	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	persen	persen	100 persen	214,590,000							100 persen	178,350,000			
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Bulan 0 Paket	22,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan 0 Paket	22,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			12 Bulan	49,950,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum			12 Bulan	4,800,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	12,510,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12,840,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		12,840,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			12 Bulan	125,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	persen	100 persen	3,030,000,000							100 persen	80,000,000			
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel			2 Unit	30,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 Unit	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3 Item	1,500,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 Item	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	358,880,000						100 persen	255,960,000			
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Surat menyurat				12 Bulan	54,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12 Bulan	196,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	97,920,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor				12 Bulan	108,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	104,040,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	262,180,000						100 persen	320,290,600			
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	64,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	68,850,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/Operasional				12 Bulan	136,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	175,975,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan	25,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	31,250,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dan gedung kantor				12 Bulan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	44,215,600	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase disusunnya perencanaan lingkungan hidup Percentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun Percentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	% Poin	% Poin	20 % 23 Poin 43 Poin		949,999,600						20 % 23 Poin 43 Poin	749,999,850			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	349,999,850						1 Dokumen	349,999,850			
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH, RPPMU, RPPMA, RPPEG Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen 0 Dokumen	349,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen 0 Dokumen	349,999,850	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	599,999,750						2 Dokumen	400,000,000			
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun				1 Dokumen	599,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah titik pantau kualitas air, air laut, udara dan tanah dengan status mutu cemar ringan	Poin Poin		Poin Poin	67,52 Poin 47 Poin	824,999,400						67,52 Poin 47 Poin	934,999,600			
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pencegahan pencemaran	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	674,999,600						5 Dokumen	674,999,600			
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Media Lingkungan (Air, Air Laut, Udara, Tanah dan Air Hujan)	5 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Media Lingkungan (Air, Air Laut, Udara, Tanah dan Air Hujan)	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang				1 Dokumen 95 Sampel	224,999,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Media Lingkungan (Air, Air Laut, Udara, Tanah dan Air Hujan)	1 Dokumen 95 Sampel	224,999,600	Dinas Lingkungan Hidup		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Dilaksanakan Jumlah sampel yang diuji															
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (DIKPLHD dan IKLH)	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	149,999,800							2 Dokumen	260,000,000			
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota			2 Dokumen	149,999,800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Media Lingkungan (Air, Air Laut, Tanah dan Air Hujan)	2 Dokumen	260,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Percentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun Percentase RTH publik dikelola dengan baik	Poin persen	Poin persen	8.7% Poin 7,63 persen	2,276,999,755							8.7% Poin 7,63 persen	2,276,999,755			
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan RTH	bulan		bulan	12 bulan	2,276,999,755						12 bulan	2,276,999,755			
2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			47 Ha	39,999,800			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	RTB publik	47 Ha	39,999,800	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			27.29 Ha	2,236,999,955			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	RTB publik	27.29 Ha	2,236,999,955	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	ton	ton	34 ton	19,999,850							34 ton	19,999,850			
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	kali		10 kali	19,999,850							10 kali	19,999,850			
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Kegiatan Verifikasi	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi			1 Laporan	19,999,850			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha dan/atau	1 Laporan	19,999,850	Dinas Lingkungan Hidup		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3										Kegiatan					
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	persen		persen	74 persen	99,999,450						74 persen	99,999,450			
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan yang difasilitasi Percentase ketataan penanggung jawab atau usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	pelaku usaha poin		pelaku usaha poin	120 pelaku usaha 74 poin	99,999,450					120 pelaku usaha 74 poin	99,999,450				
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			50 Dokumen	49,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Usaha dan/atau kegiatan	50 Dokumen	49,999,700	Dinas Lingkungan Hidup			
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30 Laporan	49,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup 7. Pengendalian Lingkungan Hidup 7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Usaha dan/atau kegiatan	30 Laporan	49,999,750	Dinas Lingkungan Hidup			
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup Percentase masyarakat, komunitas, dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Poin persen		Poin persen	20 Poin 20 persen	230,999,700						20 Poin 20 persen	231			
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis penghargaan dalam	jenis penghargaan		jenis penghargaan	2 jenis penghargaan	230,999,700						2 jenis penghargaan	231			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup															
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			1 Entitas	230,999,700		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	masyarakat, komunitas dan institusi	1 Entitas	231	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketetaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	persen		persen	74 persen	59,999,800						74 persen	32,999,800			
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Percentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani	aduan		aduan	3 aduan	59,999,800						3 aduan	32,999,800			
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	29,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	2,999,800	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase jumlah sampah yang tertangani	persen		persen	39 persen	1,733,399,450						39 persen	1,738,399,600			
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah bulan pengelolaan sampah	bulan		bulan	12 bulan	1,723,399,500						12 bulan	1,728,399,650			
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	24,999,850	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Tonase Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 Ton 15 Ton 300 Ton	1,528,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	0 Ton 15 Ton 300 Ton	1,528,400,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				12 Kelompok	19,999,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	12 Kelompok	19,999,950	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	49,999,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	49,999,950	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				28 Unit	99,999,750	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Bangka Tengah	28 Unit	99,999,750	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pembinaan kepada pihak swasta	persen	persen	100 persen		9,999,950						100 persen		9,999,950		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	9,999,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Pihak swasta yang mengelola sampah	1 Laporan	9,999,950	Dinas Lingkungan Hidup		
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						413,433,000							448,439,750		
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terkonservasinya Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	hektar		hektar	30 hektar	413,433,000							30 hektar	448,439,750		
3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Percentase Pengelolaan untuk Mengukur Progres Kinerja	persen		persen	30 persen	413,433,000							30 persen	448,439,750		
3 28 04 2.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				36 Operasi	214,997,750				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Tahura Bukit Mangkol	36 Operasi	215,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
3 28 04 2.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi				30 Ha	14,995,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tahura Bukit Mangkol	30 Ha	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
3 28 04 2.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				30 Ha	149,899,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Tahura Bukit Mangkol	30 Ha	149,899,900	Dinas Lingkungan Hidup		
3 28 04 2.01 06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti				3 Permohonan	14,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Tahura Bukit Mangkol	3 Permohonan	14,550,000	Dinas Lingkungan Hidup		
3 28 04 2.01 07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				3 Desa	18,989,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pengendalian Lingkungan Hidup	Tahura Bukit Mangkol	3 Desa	18,989,850	Dinas Lingkungan Hidup		
TOTAL						15,176,462,918									12,010,461,399		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,679,600,000								11,316,500,000					
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	77.97 Poin	6,062,350,000								
2	12	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	40,000,000								
2	12	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,791,595,000					12 Bulan	3,715,000,000		
2	12	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	3,776,595,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33 Orang/bulan	3,700,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			2 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.05			Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	235,950,000					12 Bulan	295,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			168 Paket	74,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	168 Paket	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			25 Orang	73,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Orang	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100 Orang	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Orang	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15 Orang	43,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Orang	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	658,835,000						12 Bulan	862,000,000		
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	6,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	439,875,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	550,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	36,960,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Paket	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	20,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Paket	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190 Laporan	125,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	190 Laporan	175,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						Semua Kelurahan						Sipil					
2 12 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	414,500,000						12 Bulan	575,000,000				
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 Unit	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	331,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Unit	450,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	43,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	452,970,000						12 Bulan	1,755,000,000				
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	26,100,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	244,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	175,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	182,870,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	1,550,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	468,500,000						12 Bulan	560,000,000			
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	69,850,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	180,250,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Unit	190,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95 Unit	140,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	98,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	140,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Percentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	%	93 %	96,350,000							93 %	744,000,000			
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	Dokumen	10000 Dokumen	76,900,000							10000 Dokumen	220,000,000			
2 12 02 2.01 01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			250 Dokumen	24,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	250 Dokumen	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			200 Orang	17,900,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	200 Orang	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			18000 Laporan	34,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	18000 Laporan	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Kelurahan									
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah bulan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Bulan		Bulan	12 Bulan	19,450,000						12 Bulan	247,000,000			
2 12 02 2.03 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1000 Laporan	19,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	1000 Laporan	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Percentase Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Berdasarkan Pelaporan	%		%	99.90 %	243,500,000						99.90 %	895,500,000			
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	600 Dokumen	217,400,000						600 Dokumen	530,000,000			
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				1000 Dokumen	66,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	1000 Dokumen	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				2000 Layanan	150,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	2000 Layanan	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah bulan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bulan		Bulan	12 Bulan	26,100,000						12 Bulan	315,000,000			
2 12 03 2.03 03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang				100 Laporan	26,100,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kab. Bangka Tengah	100 Laporan	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Dilaksanakan															
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online Persentase Akurasi Data Kependudukan	Instansi %	Instansi %	9 Instansi 97.50 %	1,277,400,000							9 Instansi 97.50 %	1,805,000,000			
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Bulan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Bulan	Bulan	12 Bulan	1,246,150,000							12 Bulan	1,640,000,000			
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			12 Dokumen	1,182,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Instansi-Instansi terkait di Kab. Bangka Tengah	12 Dokumen	1,450,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			8 Dokumen	19,300,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Instansi-Instansi terkait di Kab. Bangka Tengah	8 Dokumen	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			380 Laporan	44,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Instansi-Instansi terkait di Kab. Bangka Tengah	380 Laporan	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah bulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bulan	Bulan	12 Bulan	31,250,000							12 Bulan	65,000,000			
2 12 04 2.03 08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			70 Dokumen	31,250,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan Instansi-Instansi terkait di Kab. Bangka Tengah	70 Dokumen	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
TOTAL										7,679,600,000			11,316,500,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15,211,425,250							11,416,240,000						
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Nilai	BB Nilai Nilai	7,997,690,250					BB Nilai Nilai	5,432,240,000			
2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%	100 %	40,000,000					100 %	40,000,000			
2	16	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			6 dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	6 dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	5 Laporan	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan administrasi keuangan terhadap aparatur	persen	persen	100 persen	3,986,866,250					100 persen	3,565,000,000			
2	16	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima tunjangan gaji dan ASN			34 orang/bulan	3,971,866,250	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	34 orang/bulan	3,550,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	1 laporan	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	1 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan urusan aparatur	%	%	100 %	85,000,000					100 %	115,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas peserta atribut kelengkapan				1 paket	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	1 paket	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	15 Orang	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	362,970,000							100 %	212,000,000		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	OPD	1 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	OPD	1 Paket	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	OPD	1 Paket	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	48,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	OPD	1 Paket	48,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	OPD	1 Paket	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,470,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan				25 Laporan	125,000,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	25 Laporan	4,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik							
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	2,654,000,000							100 %	700,000,000			
2 16 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	325,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN danOPD	3 Unit	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			29 unit	85,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN danOPD	29 unit	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan			49 unit	1,744,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN danOPD	49 unit	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1 unit	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN danOPD	1 unit	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase terlayaninya penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	414,580,000							100 %	454,450,000			
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1400 Laporan	210,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	1400 Laporan	254,450,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	12 laporan	130,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	84,080,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	12 laporan	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	454,274,000						100 %	345,790,000				
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	101,820,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset OPD	2 Unit	95,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	137,454,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset OPD	3 Unit	110,790,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			70 Unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset OPD	70 Unit	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi			1 unit	65,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset OPD	1 unit	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten media yang terpublikasi	konten	konten	1000 konten	3,368,000,000						1000 konten	3,435,000,000				
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis saluran media massa komunikasi dan informasi yang dipakai	Jenis media massa	Jenis media massa	3 Jenis media massa	3,368,000,000						3 Jenis media massa	3,435,000,000				
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik			1 dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	1 dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	aparatur dan publik	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah				12 dokumen	130,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	12 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik				12 dokumen	65,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	aparatur dan publik	12 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	572,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	4 Dokumen	500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik				1 dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	1 dokumen	545,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan Media				3 Layanan	2,200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	3 Layanan	1,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				12 Dokumen	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	12 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				10 org	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	10 org	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah				6 Dokumen	66,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	6 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program				31 Dokumen	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	aparatur dan publik	31 Dokumen	210,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		atau kebijakan															
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Percentase layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (administrasi pemerintah dan publik) yang diimplementasikan	%		%	70 %	3,845,735,000							70 %	2,549,000,000		
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain yang dikelola	domain		domain	1 domain	2,735,000,000							1 domain	1,835,000,000		
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN dan OPD	2 Dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	2,700,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan OPD	1 Unit	1,800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instrumen sarana dan prasarana penunjang e-governement	instrumen		instrumen	7 instrumen	1,110,735,000							7 instrumen	714,000,000		
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota				2 dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	2 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik				2 dokumen	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	2 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data yang dikelola pemerintah daerah				1 unit	320,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	1 unit	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan				5 unit	426,335,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	5 unit	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan master plan smart city				1 dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	1 dokumen	24,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah				2 dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	2 dokumen	60,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pelaksanaan Government Chief Information Officer (GCIO)				4 dokumen	69,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	4 dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE				10 dokumen	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur dan publik	10 dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						367,049,750								860,000,000		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Percentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	%	%	84,50 %	367,049,750							84,50 %	860,000,000			
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dikelola dan desiminasi data	data	data	9000 data	367,049,750							9000 data	860,000,000			
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			9 Dokumen	296,999,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Data daerah	9 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun			60 dokumen	30,150,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Data daerah	60 dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				15 Dokumen	39,900,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Data daerah	15 Dokumen	310,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						175,000,000								260,000,000			
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	%	%	15,63 %	175,000,000							15,63 %	260,000,000			
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aset yang dilakukan perlindungan informasi	aset	aset	8 aset	150,000,000							8 aset	235,000,000			
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota			2 laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset daerah	2 laporan		50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik			2 laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aset daerah	2 laporan		70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi			6 perangkat daerah	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aset daerah	6 perangkat daerah		65,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase keterhubungan antar OPD dan kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala OPD dan jaring komunikasi sandi kabupaten	%	%	41 %	25,000,000							41 %	25,000,000			
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			3 Perangkat Daerah	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Perangkat Daerah		25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
TOTAL						15,753,475,000								12,536,240,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	715,074,000										1,100,000,000			
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pencari kerja yang Berkompетensi	% %	%	25.2 %	370,074,000					25.2 %	700,000,000			
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja yang bersertifikat	Orang		Orang	48 Orang	370,074,000				48 Orang	700,000,000			
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			48 orang	370,074,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penurunan Angka Pengangguran 2. Penurunan Angka Pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	48 orang	650,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar	%	%	78.26 %	90,000,000					78.26 %	105,000,000			
2	07	04	2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Lowongan kerja yang terdaftar	Lowongan		Lowongan	300 Lowongan	60,000,000				300 Lowongan	75,000,000			
2	07	04	2.01	02		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			130 orang	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penurunan Angka Pengangguran 2. Penurunan Angka Pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	130 orang	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2	07	04	2.01	03		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			100 Pencari Kerja	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penurunan Angka Pengangguran 2. Penurunan Angka Pengangguran	Pencari Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	100 Pencari Kerja	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar AK 1	Pencari Kerja		Pencari Kerja	230 Pencari Kerja	30,000,000				230 Pencari Kerja	30,000,000			
2	07	04	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online(Karir Hub)			230 orang	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Penurunan Angka Pengangguran 2. Penurunan Angka Pengangguran	Pencari Kerja Kabupaten Bangka Tengah	230 orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI) yang diselesaikan	%	%	100 %	255,000,000					100 %	220,000,000			
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang memiliki PP dan PKB	%	%	67.89 %	105,000,000				67.89 %	90,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				12 perusahaan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	12 perusahaan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				3 Perusahaan	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	3 Perusahaan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi sarana HI(PP/PKB, Struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	40,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Percentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	%	%	75 %	150,000,000							75 %	130,000,000			
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			8 Perkara	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	8 Perkara	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			8 Perkara	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	8 Perkara	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			1 Lembaga	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Penurunan Angka Pengangguran	Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah	1 Lembaga	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5,554,534,000							6,728,962,000			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD	%	%	100 %	4,224,384,000							100 %	5,173,962,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terhadap pelayanan OPD															
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	81.5 Nilai	41,400,000							81.5 Nilai	75,000,000		
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	26,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan DPMPTK	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 Dokumen	14,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan DPMPTK	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%	%	100 %	3,075,590,000								100 %	3,635,000,000		
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang	3,048,090,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Gaji ASN dan Laporan Keuangan DPMPTK	25 Orang	3,600,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Gaji ASN dan Laporan Keuangan DPMPTK	1 laporan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			1 laporan	7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Gaji ASN dan Laporan Keuangan DPMPTK	1 laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN (dimensi kompetensi dan disiplin)	Indeks	Indeks	85 Indeks	155,410,000								85 Indeks	263,420,000		
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			35 Paket	31,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	disiplin Pegawai DPMPTK	35 Paket	33,420,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			14 orang	71,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	disiplin Pegawai DPMPTK	14 orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	18,640,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	disiplin Pegawai DPMPTK	10 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12 Orang	34,320,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	disiplin Pegawai DPMPTK	12 Orang	80,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	256,000,000							100 %	256,400,000			
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	3,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	12 Paket	3,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			12 Paket	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	12 Paket	40,600,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	42,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	12 Paket	41,800,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	42,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	12 Paket	42,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	3,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	12 Dokumen	3,600,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan			43 Laporan	125,000,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Umum dan Perlengkapan DPMPTK	43 Laporan	125,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum							Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	151,750,000							100 %	200,000,000			
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	50,650,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan DPMPTK	5 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	28,950,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan DPMPTK	5 Unit	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	72,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan DPMPTK	1 Unit	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	275,120,000							100 %	323,850,000			
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	105,840,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan DPMPTK	1 Laporan	125,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	84,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan DPMPTK	1 Laporan	83,850,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	85,280,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan DPMPTK	1 Laporan	115,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	269,114,000							100 %	420,292,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 Unit	68,410,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang dan Kendaraan DPMPTK	1 Unit	68,350,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnanya			3 Unit	108,090,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang dan Kendaraan DPMPTK	3 Unit	108,090,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	36,614,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang dan Kendaraan DPMPTK	35 Unit	130,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 Unit	56,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemeliharaan Barang dan Kendaraan DPMPTK	1 Unit	113,852,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Milyar	Milyar	500 Milyar	256,780,000						500 Milyar	250,000,000				
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	%	%	100 %	73,780,000						100 %	0				
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah			10 Kegiatan Usaha	73,780,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Investor dan calon Investor di Kabupaten Bangka Tengah	10 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi investasi yang dihasilkan	dokumen	dokumen	2 dokumen	183,000,000						2 dokumen	250,000,000				
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			2 Dokumen	183,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Dokumen Potensi dan Peluang Potensi Kabupaten Bangka Tengah	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN	Investor	Investor	50 Investor	222,890,000						50 Investor	480,000,000				
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Investor yang berencana berinvestasi di	Investor	Investor	80 Investor	222,890,000						80 Investor	480,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangka Tengah															
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota				1 Dokumen	222,890,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Investor dan Calon Investor di Bangka Tengah	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	%	%	98.40 %	399,210,000							98.40 %	530,000,000			
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Izin yang diterbitkan	izin	izin	1200 izin	399,210,000							1200 izin	530,000,000			
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			800 Pelaku Usaha	302,290,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha di kabupaten bangka tengah	800 Pelaku Usaha	400,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal			200 Kegiatan Usaha	69,160,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha di kabupaten bangka tengah	200 Kegiatan Usaha	80,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan			100 Orang	27,760,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha di kabupaten bangka tengah	100 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Percentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	%	%	80 %	396,270,000							80 %	195,000,000			
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang patuh menyampaikan laporan	Perusahaan	Perusahaan	80 Perusahaan	396,270,000							80 Perusahaan	195,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal				150 Kegiatan Usaha	63,430,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Investor dan Calon Investor di Bangka Tengah	150 Kegiatan Usaha	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal				220 Pelaku Usaha	181,370,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Investor dan Calon Investor di Bangka Tengah	220 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan				200 Kegiatan Usaha	151,470,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Investor dan Calon Investor di Bangka Tengah	200 Kegiatan Usaha	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	Hari		Hari	5 Hari	55,000,000						5 Hari	100,000,000			
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang tersedia	%		%	100 %	55,000,000						100 %	100,000,000			
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan				1 Dokumen	55,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Usaha dan Investor di Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
TOTAL						6,269,608,000								7,828,962,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5,018,303,170							0		
2	23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Nilai	Nilai	81 Nilai	3,706,092,870						81 Nilai	0			
2	23	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	9 Dokumen	41,280,000					9 Dokumen	0				
2	23	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	31,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	4 Dokumen	0	Dinas Karsipan dan Perpustakaan		
2	23	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,280,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	5 Laporan	0	Dinas Karsipan dan Perpustakaan		
2	23	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja laporan keuangan yang sesuai SAP	%	%	100 %	2,821,330,370					100 %	0				
2	23	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	2,807,050,370	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	25 Orang/bulan	0	Dinas Karsipan dan Perpustakaan		
2	23	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	9,480,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	0	Dinas Karsipan dan Perpustakaan		
2	23	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	4,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	0	Dinas Karsipan dan Perpustakaan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	120,220,000						100 %	0			
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,250,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	99,970,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	5 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	159,102,500						100 %	0			
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	5 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,162,500	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4,020,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	2 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	99,920,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten	12 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Konsultasi SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan				Bangka Tengah					
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah	%	%	100 %	50,000,000							100 %	0			
2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	216,440,000							100 %	0			
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	53,920,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	62,520,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	297,720,000							100 %	0			
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	68,410,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	167,810,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	10 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	38,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	2 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			33 Unit	23,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah	33 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Percentase perpustakaan yang sesuai standar nasional	%	%	7 %	1,312,210,300						7 %	0				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	Pengunjung	Pengunjung	75000 Pengunjung	674,395,000						75000 Pengunjung	0				
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			1 Perpustakaan	111,450,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			178 Perpustakaan	286,115,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	178 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			104 Orang	130,590,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	104 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan			200 Eksemplar	32,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	200 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				5000 Eksemplar	113,840,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	5000 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Nilai	55 Nilai	637,815,300							55 Nilai	0			
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			10 Lokus	23,955,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	10 Lokus	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1 Perpustakaan	388,400,300	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	1 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			85 Orang	124,740,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	85 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			30 Perpustakaan	100,720,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Perangkat Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah	30 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						526,430,000							0			
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Percentase ketersediaan arsip	%		%	30 %	406,565,000						30 %	0			
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase unit kearsipan kabupaten yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip sesuai dengan	%		%	94 %	295,405,000						94 %	0			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		peraturan perundang-undangan															
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				7300 Berkas	225,800,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah	7300 Berkas	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Laporan	69,605,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah	8 Laporan	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						52,200,000								0		
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	52,200,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		100 Arsip	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsiran Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah simpul jaringan informasi kabupaten	simpul jaringan	simpul jaringan	1 simpul jaringan		58,960,000						1 simpul jaringan		0		
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsiran dan Lembaga Kearsiran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsiran dan Lembaga Kearsiran Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	58,960,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah dan Organisasi di Kabupaten Bangka Tengah	2 Laporan	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Percentase arsip vital daerah yang diselamatkan	%	%	16 %		119,865,000						16 %		0		
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilengkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah unit kearsiran perangkat daerah yang melakukan penilaian pemusnahan arsip	OPD	OPD	32 OPD		68,405,000						32 OPD		0		
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				600 Arsip	33,960,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Tengah	600 Arsip	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang				4 Berkas	34,445,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka	4 Berkas	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Dimusnahkan						Kecamatan, Semua Kelurahan		Pelayanan Publik		Tengah					
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip dan Dokumen Perangkat Daerah yang digabung/bubar yang diselamatkan	OPD		OPD	4 OPD	51,460,000						4 OPD	0			
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Daftar	23,655,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Tengah	2 Daftar	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
2 24 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Arsip	27,805,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Tengah	4 Arsip	0	Dinas Kearsiran dan Perpustakaan		
TOTAL															0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas														
										Nasional	Daerah													
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 25						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												16,256,527,470						
3 25 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	86 Nilai	6,000,229,550								5,899,027,470							
3 25 01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	80 Nilai	45,100,000							77,950,000							
3 25 01	2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	30,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	5 Dokumen	27,950,000	Dinas Perikanan							
3 25 01	2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	5 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan							
3 25 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kinerja Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan SAP	%		%	100 %	4,782,394,950							100 %	4,577,550,470							
3 25 01	2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/Bulan	4,768,444,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		-	40 Orang/Bulan	4,567,550,470	Dinas Perikanan							
3 25 01	2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	7,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		-	1 Laporan	0	Dinas Perikanan							
3 25 01	2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			2 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	2 Laporan	10,000,000	Dinas Perikanan							
3 25 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	143,620,000							100 %	250,000,000							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3 Paket	87,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	3 Paket	100,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	15 Orang	150,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	%	100 %	274,240,000						100 %	291,777,000				
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket 0 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	1 Paket 0 Paket	25,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	1 Paket	51,477,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			250 Paket	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	250 Paket	27,300,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket 0 Paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	4 Paket 0 Paket	4,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	3,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Dokumen	4,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Laporan	150,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	60,000,000						100 %	90,000,000				
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	2 Paket	40,000,000	Dinas Perikanan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	-	2 Unit	50,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	414,104,850						100 %	426,450,000				
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	182,279,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Laporan	181,860,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	105,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Laporan	105,580,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	126,245,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Laporan	126,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	280,769,750						100 %	185,300,000				
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	69,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	1 Unit	85,300,000	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	119,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	3 Unit	0	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			61 Unit	42,069,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	61 Unit	0	Dinas Perikanan			
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	1 Unit	100,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan Nelayan	Juta/ Orang/ Bulan	Juta/ Orang/ Bulan	6.433.360,55	3,454,363,150						6.433.360,55	Juta/ 3,039,000,000				
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Ton	28236.57 Ton	2,765,662,800						28236.57 Ton	2,201,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	424,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	0 Dokumen	350,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Unit	1,098,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	3 Unit	1,851,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				57 Unit/Paket	1,242,692,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	57 Unit/Paket	0	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil Yang Difasilitasi dan Dibina Dalam (1) satu Daerah Kabupaten/ Kota	Orang		Orang	500 Orang	308,167,600						500 Orang	203,000,000			
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				250 Orang	20,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	250 Orang	51,500,000	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	138,940,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	20 Kelompok	100,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				15 Unit Usaha	148,577,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Nelayan Kabupaten Bangka Tengah	15 Unit Usaha	51,500,000	Dinas Perikanan		
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Dikelola	Unit		Unit	2 Unit	380,532,750						2 Unit	600,000,000			
3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					3 Dokumen	40,830,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Batu Belubang dan	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Batu Beriga.					
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	339,702,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Batu Belubang dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Batu Beriga.	2 Layanan	500,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Juta/ Orang/ Bulan	Juta/ Orang/ Bulan	6.186.250,- Juta/ Orang/ Bulan	3,509,040,000						6.186.250,- Juta/ Orang/ Bulan	5,462,500,000				
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Usaha Perikanan Budidaya yang Difasilitasi	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	45,640,000						1 Dokumen	75,000,000				
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan			100 Rekomendasi	45,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	100 Rekomendasi	75,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya Ikan Kelas Madya	Kelompok	Kelompok	5 Kelompok	442,280,000						5 Kelompok	550,000,000				
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			5 Kelompok	70,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	5 Kelompok	100,000,000	Dinas Perikanan			
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			1 Kelompok (UPP)	102,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	1 Kelompok (UPP)	125,000,000	Dinas Perikanan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	268,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	10 Kelompok	250,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Benih Produksi Benih (Ekor) Produksi Budidaya Ikan Produksi Budidaya Ikan (Ton) Produksi Ikan Hias Produksi Ikan Hias (Ekor)	Ekor Ekor Ton Ton Ekor Ekor	Ekor Ekor Ton Ton Ekor Ekor	15000000 Ekor 15000000 Ekor 1648 Ton 1648 Ton 75000 Ekor 75000 Ekor	3,021,120,000						15000000 Ekor 15000000 Ekor 1648 Ton 1648 Ton 75000 Ekor 75000 Ekor	4,762,500,000				
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	95,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	164,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit	520,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04 03	Perjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit/Paket	2,582,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	30 Unit/Paket	3,592,500,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	44,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				10 Orang	78,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	10 Orang	200,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan				0 Ha	55,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pembudidaya Ikan Kabupaten Bangka Tengah	0 Ha	100,000,000	Dinas Perikanan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Dilindungi															
3 25 06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Konsumsi Ikan Segar dan Nilai Konsumsi Ikan Olahan Hasil Perikanan	Kg/ Kap/ Tahun		Kg/ Kap/ Tahun	51,86/ 3,7 Kg/ Kap/ Tahun	1,892,767,300						51,86/ 3,7 Kg/ Kap/ Tahun	1,556,000,000			
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usasha Skala Mikro dan Kecil Yang Difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usasha Skala Mikro dan Kecil Yang Dikeluarkan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	20 Dokumen 20 Dokumen	242,910,000						20 Dokumen 20 Dokumen	340,000,000			
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				3 Laporan	242,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pengolah Hasil Perikanan Kabupaten Bangka Tengah	3 Laporan	340,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Orang/ Kali		Orang/ Kali	40 Orang/ Kali	100,000,000						40 Orang/ Kali	300,000,000			
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Bangka Tengah	5 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Perikanan		
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Yang Disediakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,549,857,300						12 Bulan	916,000,000			
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Ton	549,787,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	50 Ton	466,000,000	Dinas Perikanan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			12 Pelaku Usaha	1,000,070,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Pelaku Usaha	450,000,000	Dinas Perikanan		
TOTAL						14,856,400,000								16,256,527,470			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																	
											Nasional	Daerah																
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%		%	33,08 %	339,100,000						33,08 %	305,000,000											
2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan	%		%	40 %	189,100,000						40 %	55,000,000											
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			20 orang	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	pemuda usia 16-30 tahun di Bangka Tengah	20 orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga										
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			48 orang	124,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	pemuda usia 16-30 tahun di Bangka Tengah	48 orang	55,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga										
2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi kepemudaan yang diberdayakan	%		%	100 %	150,000,000						100 %	250,000,000											
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah	1 dokumen	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga										
2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Percentase pengembangan keolahragaan	%		%	45.45 %	8,135,000,000						45.45 %	4,691,000,000											
2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga	cabor		cabor	25 cabor	1,095,000,000						25 cabor	1,125,000,000											
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan	Jumlah Pusat Pembinaan dan			1 unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	1 unit	55,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan										

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan							Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing					Olah Raga		
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			1 dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	1 dokumen	120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			8 unit	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	8 unit	950,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten yang diselenggarakan	kejuaraan	kejuaraan	5 kejuaraan	1,175,000,000							5 kejuaraan	661,000,000			
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			2 dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	2 dokumen	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			2 dokumen	375,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	2 dokumen	375,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			5 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	5 orang	66,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan olahraga prestasi yang dibina	%	%	56 %	130,000,000							56 %	235,000,000			
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			135 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	135 orang	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			10 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	10 orang	55,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Atlet	1 dokumen	70,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan organisasi olahraga yang dibina	%		%	100 %	5,000,000,000						100 %	2,000,000,000			
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 organisasi	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Pendidikan	Organisasi olahraga	1 organisasi	2,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Olahraga Rekreasi yang dibina	%		%	8.89 %	735,000,000						8.89 %	670,000,000			
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 dokumen	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Masyarakat	1 dokumen	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Masyarakat	1 unit	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 dokumen	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Masyarakat	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	Masyarakat	4 dokumen	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Percentase anggota pramuka yang aktif	%		%	100 %	250,000,000						100 %	25,000,000			
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina	%		%	100 %	250,000,000						100 %	25,000,000			
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 organisasi	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Pendidikan	anggota pramuka	1 organisasi	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						667,925,000								610,000,000		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase kebudayaan yang dikembangkan	%		%	45.45 %	243,875,000						45.45 %	330,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya kebudayaan daerah	%		%	100 %	148,875,000						100 %	225,000,000			
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 objek	75,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Desa yang melaksanakan ritual adat, peserta GBN SMA/SMK /MA/Mahasiswa, dan Paduan Suara	5 objek	105,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 orang	73,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat Desa yang melaksanakan ritual adat, peserta GBN SMA/SMK /MA/Mahasiswa, dan Paduan Suara	40 orang	120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestarinya kesenian tradisionadaerah	%		%	100 %	25,000,000						100 %	30,000,000			
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				5 sertifikat	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku Seni/Budaya	5 sertifikat	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbentinya lembaga adat	%		%	100 %	70,000,000						100 %	75,000,000			
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Lembaga Adat Melayu (LAM)	1 unit	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%		%	27.27 %	254,050,000						27.27 %	95,000,000			
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian yang dibina	kesenian		kesenian	3 kesenian	254,050,000						3 kesenian	95,000,000			
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				2 sertifikat	39,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Sanggar Kesenian	2 sertifikat	45,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 lembaga	214,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Sanggar Kesenian	10 lembaga	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagabudaya yang dilestarikan dan dikelola	%		%	93.75 %	170,000,000						93.75 %	185,000,000			
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%		%	12.5 %	110,000,000						12.5 %	120,000,000			
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				4 objek	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Cagar Budaya	4 objek	65,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 objek	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Cagar Budaya	5 objek	55,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%		%	81.25 %	60,000,000						81.25 %	65,000,000			
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 objek	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Cagar Budaya	5 objek	65,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						10,139,110,000							7,278,600,000			
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	100 %	7,069,160,000						100 %	3,968,600,000			
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluas	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	40,000,000						13 Dokumen	40,000,000			
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	5 dokumen	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	%		%	100 %	5,354,075,000						100 %	2,715,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 orang/bulan	5,340,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	24 orang/bulan	2,700,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	5,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	%	%	100 %	159,600,000							100 %	135,000,000			
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40 paket	59,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	40 paket	35,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	10 orang	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase administrasi umum yang terpenuhi	%	%	100 %	210,550,000							100 %	238,600,000			
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 paket	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 paket	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 paket	30,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 paket	15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				24 dokumen	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	24 dokumen	3,600,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	124,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase barang milik daerah yang diadakan	%		%	100 %	778,900,000						100 %	260,000,000			
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				66 Unit	99,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	66 Unit	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 unit	29,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	5 unit	35,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	600,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN	1 Unit	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 unit	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase jasa penunjang yang disediakan	%		%	100 %	262,280,000						100 %	345,000,000			
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	130,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	50,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 paket	15,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				1 laporan	81,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 laporan	180,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Disediakan															
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah yang dipeliharaan	%		%	100 %	263,755,000							100 %	235,000,000		
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	40,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	1 unit	60,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit	100,305,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	5 unit	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit	44,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	4 unit	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 unit	79,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN	10 unit	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Percentase daya tarik wisata yang ditingkatkan	%		%	39.71 %	1,769,290,000							39.71 %	1,575,000,000		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Percentase daya tarik wisata yang dikelola	%		%	39.71 %	20,000,000							39.71 %	275,000,000		
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	DTW	1 dokumen	25,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	%		%	50 %	200,000,000							50 %	200,000,000		
3 26 02 2.02 02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	KSPK	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi pariwisata yang dikelola	%		%	75 %	1,519,290,000							75 %	1,000,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pokdarwis	1 dokumen	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanfaatan, Revitalisasi)				1 lokasi	1,129,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pokdarwis	1 lokasi	500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pokdarwis	1 unit	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pokdarwis	1 laporan	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	TDUP yang ditetapkan	%		%	75 %	30,000,000						75 %	100,000,000			
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				1 laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Usaha Pariwisata	1 laporan	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata	%		%	4.75 %	413,400,000						4.75 %	725,000,000			
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	peningkatan kunjungan wisatawan	Orang		Orang	6420 Orang	413,400,000						6420 Orang	725,000,000			
3 26 03 2.01 01	Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguanan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Wisatawan	1 dokumen	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 laporan	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Wisatawan	1 laporan	300,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 dokumen	133,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Wisatawan	1 dokumen	175,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Percentase sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi kompetensi	%	%	18.91 %	887,260,000								18.91 %	1,010,000,000		
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf tingkat dasar	%	%	2.6 %	637,260,000								2.6 %	770,000,000		
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya			70 orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Ekraf	70 orang	250,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			40 orang	187,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Ekraf	40 orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			70 orang	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Ekraf	70 orang	240,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			40 orang	119,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Ekraf	40 orang	130,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelaku ekraf yang mengikuti pelatihan	Orang	Orang	90 Orang	250,000,000								90 Orang	240,000,000		
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			50 orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Pelaku Ekraf	50 orang	120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		
3 26 05 2.02 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif			40 orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan		Pelaku Ekraf	40 orang	120,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target	Pagu Indikatif			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah						
						TOTAL	19,531,135,000							12,909,600,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						13,671,449,000				17,519,610,000				
3 27 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP			A	7,103,201,000					6,563,260,000				
3 27 01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	131,250,000				100 Persen	37,950,000			
3 27 01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	121,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	5 Dokumen	27,950,000	Dinas Pertanian	
3 27 01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	5 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian	
3 27 01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	5,804,161,000				100 Persen	5,465,000,000			
3 27 01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Serta PPPK			51 Orang	5,789,161,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	51 Orang	5,445,000,000	Dinas Pertanian	
3 27 01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian	
3 27 01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian	
3 27 01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	144,700,000				100 Persen	150,000,000			
3 27 01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan			79 Stel	69,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	79 Stel	50,000,000	Dinas Pertanian	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	9 Orang	100,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	202,400,000						100 Persen	205,410,000			
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	4,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	37,200,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan 0 Paket	25,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan 4 Paket	10,860,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan 4 Paket	10,610,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan 0 Dokumen	4,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan 0 Dokumen	3,600,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan				30 Laporan 30 Kali	124,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	30 Laporan 30 Kali	125,000,000	Dinas Pertanian		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	160,870,000						100 Persen	0			
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan				2 Jenis	47,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	2 Jenis	0	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	113,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	13 Unit	0	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	326,520,000						100 Persen	351,000,000			
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan 1 Laporan	78,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan 1 Laporan	105,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	1 Laporan	125,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	122,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	12 Bulan	121,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	333,300,000						100 Persen	353,900,000			
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	68,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	1 Unit	85,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanannya				3 Unit	117,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	3 Unit	107,500,000	Dinas Pertanian		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	42,100,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	20 Unit	42,100,000	Dinas Pertanian		
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	105,400,000			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pertanian	4 Unit	119,300,000	Dinas Pertanian		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi ternak Produktivitas Tanaman Perkebunan Produktivitas Tanaman Pertanian	ekor Ton/Ha Ton/Ha	ekor Ton/Ha Ton/Ha	6811 sapi; 1382 kambing; 17.698 bebek/itik ekor 7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi) Ton/Ha 70.87 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah) Ton/Ha	3,429,950,000							6811 sapi; 1382 kambing; 17.698 bebek/itik ekor 7,41 (karet, kelapa sawit, lada, kopi) Ton/Ha 70.87 (padi, plwija, cabe, bwngmerah, sayur, buah) Ton/Ha	6,370,450,000			
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Populasi Ternak Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Pertanian	Ekor Ton Ton	Ekor Ton Ton	25891 Ekor 41776.56 Ton 27917.97 Ton	2,305,000,000							25891 Ekor 41776.56 Ton 27917.97 Ton	4,425,450,000			
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Bawang Merah Yang diadakan Jumlah Benih Cabai yang diadakan Jumlah Bibit lada dalam Polibag Jumlah Kecambah Sawit Yang diadakan Jumlah Mesin Penepung Kopi Yang diadakan Jumlah Obat-Obatan yang diadakan Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			6000 Kg 200 `sachet 10000 Polibag 30000 Butir 2 Unit 4 Jenis 1 Laporan	1,432,100,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani dan Peternak Kabupaten Bangka Tengah	6000 Kg 200 `sachet 10000 Polibag 30000 Butir 2 Unit 4 Jenis 1 Laporan	2,681,950,000	Dinas Pertanian		
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bahan bangunan yang dibantu Jumlah Benih Padi yang diadakan Jumlah cultivator Yang diadakan			3 Paket 2000 Kg 8 Unit 5 Laporan 3 Jenis	872,900,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani dan Peternak Kabupaten Bangka Tengah	3 Paket 2000 Kg 8 Unit 5 Laporan 3 Jenis	1,743,500,000	Dinas Pertanian		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Jumlah Pendampingan Penggunaan sarana Pendukung pertanian Jumlah pupuk yang diadakan															
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Populasi Ternak Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Pertanian Produksi Tanaman Pertanian	Ekor Ton Ton Ton Ton	Ekor Ton Ton Ton Ton	25891 Ekor 41776.56 Ton 4177656 Ton 27917.97 Ton 2791797 Ton	150,000,000							25891 Ekor 41776.56 Ton 4177656 Ton 27917.97 Ton 2791797 Ton	150,000,000			
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan				3 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani dan Peternak Kabupaten Bangka Tengah	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Ternak	ekor		ekor	25891 ekor	45,350,000						25891 ekor	95,000,000			
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	45,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	95,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	ekor		ekor	25891 ekor	929,600,000						25891 ekor	1,700,000,000			
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bebek yang diadakan Jumlah kambing kacang (betina+jantan) yang diadakan Jumlah Pakan Bebek Yang diadakan Jumlah sapi bali (jantan + betina) Yang diadakan				450 Ekor 41 Ekor 725 Kg 88 Ekor	929,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	450 Ekor 41 Ekor 725 Kg 88 Ekor	1,700,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Perkebunan Produktivitas Pertanian	Ton/Ha Ton/Ha		Ton/Ha Ton/Ha	6,610 (Karet, Kelapa Sawit, Lada dan kopi) Ton/Ha	1,677,800,000						6,610 (Karet, Kelapa Sawit, Lada dan kopi) Ton/Ha	2,175,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						59,68 (Pangan, Buah Semusim, Palawija dan Buah Tahunan) Ton/Ha								59,68 (Pangan, Buah Semusim, Palawija dan Buah Tahunan) Ton/Ha			
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian	Ton Ton		Ton Ton	41776.56 Ton 27917.97 Ton	1,677,800,000							41776.56 Ton 27917.97 Ton	2,175,000,000		
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung Pertanian yang di Bangun				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	1 Unit		0 Dinas Pertanian		
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha tani yang dibangun,				2 Km	350,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	2 Km		0 Dinas Pertanian		
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pupuk yang diadakan Panjang Jalan Produksi Yang dibangun				5 Jenis 5.5 Km	1,177,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	5 Jenis 5.5 Km	2,175,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Percentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	%		%	100 %	898,588,000							100 %	1,300,900,000		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Populasi Ternak Itik/Bebek Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Sapi	Ekor Ekor Ekor		Ekor Ekor Ekor	17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor	633,588,000							17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor	985,900,000		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	373,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota				12 Laporan	433,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	612,900,000	Dinas Pertanian		
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Populasi Itik/Bebek Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Sapi	Ekor Ekor Ekor		Ekor Ekor Ekor	17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor	125,000,000							17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor	150,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 27 04 2.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	90,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 04 2.02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten / Kota				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Kabupaten Bangka Tengah	12 Laporan	60,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi Ternak Itik/Bebek Populasi Ternak Kambing Populasi Ternak Sapi	Ekor Ekor Ekor	Ekor Ekor Ekor	17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor	140,000,000							17698 Ekor 1382 Ekor 6811 Ekor		165,000,000		
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Peternak Bangka Tengah	12 Laporan	165,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Per센		Per센	85 Per센	349,910,000						85 Per센	750,000,000			
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang di lakukan	Per센		Per센	85 Per센	349,910,000						85 Per센	750,000,000			
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan , Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan				30 Ha	349,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani dan Pekerbu di Kabupaten Bangka Tengah	30 Ha	750,000,000	Dinas Pertanian		
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Percentase Pengendalian dan Penggulungan Bencna Pertanian	Per센		Per센	85 Per센	212,000,000						85 Per센	360,000,000			
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Legalitas yang dihasilkan baik dari perkebunan swasta maupun rakyat	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	212,000,000						10 Dokumen	360,000,000			
3 27 06 2.01 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				11 Dokumen	132,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Perusahaan Perkebunaan dan Pekebun di Bangka Tengah	11 Dokumen	175,000,000	Dinas Pertanian		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 27 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Teknis Izin Usaha Perkebunan				11 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Berkeadilan	11 Dokumen	185,000,000	Dinas Pertanian		
TOTAL						13,671,449,000								17,519,610,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas														
										Nasional	Daerah													
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												7,895,180,000						
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan administrasi, operasional dan utilitas OPD	Angka Indeks		Angka Indeks	73 Angka Indeks	5,624,838,080					73 Angka Indeks	5,370,180,000						
2	17	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah	%		%	95 %	29,985,000					95 %	50,000,000						
2	17	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	24,975,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	0 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
2	17	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5,010,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	5 Laporan	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
2	17	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan OPD	Angka Indeks		Angka Indeks	80 Angka Indeks	4,423,930,580					80 Angka Indeks	4,332,160,000						
2	17	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/bulan	4,409,240,580	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan P3K di lingkungan OPD	39 Orang/bulan	4,317,160,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
2	17	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	9,750,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan P3K di lingkungan OPD	1 Laporan	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
2	17	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	4,940,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan P3K di lingkungan OPD	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
2	17	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat profesionalisme ASN dalam melayani sesuai tupoksinya	Nilai		Nilai	80 Nilai	102,140,000					80 Nilai	102,500,000						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			55 Paket	27,450,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	55 Paket	27,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	74,690,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	8 Orang	75,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Angka Indeks	Angka Indeks	80 Angka Indeks	223,750,000						80 Angka Indeks	239,420,000				
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	3,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	2 Paket	3,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	4 Paket	45,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24 Paket	20,160,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	24 Paket	21,120,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	29,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	6 Paket	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	1,440,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	12 Dokumen	5,300,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	124,950,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	25 Laporan	125,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan peralatan, mesin, alat transportasi dan sarana lainnya dalam menunjang urusan pemerintahan	Angka Indeks	Angka Indeks	80 Angka Indeks	323,962,500						80 Angka Indeks	20,000,000				
2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai dilingkungan OPD	1 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Disediakan															
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			15 Unit	37,462,500	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan			1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai di lingkungan OPD	15 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	36,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai di lingkungan OPD	3 Unit	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Angka Indeks		Angka Indeks	263,570,000						80 Angka Indeks	268,000,000				
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan 12 Laporan	54,920,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai di lingkungan OPD	12 Bulan 12 Laporan	55,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan 12 Laporan	66,450,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai di lingkungan OPD	12 Bulan 12 Laporan	67,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Bulan 12 Laporan	142,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan Pegawai di lingkungan OPD	12 Bulan 12 Laporan	145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	%	70 %	257,500,000						70 %	358,100,000				
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	69,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan pegawai di lingkungan OPD	1 Unit	69,910,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	113,190,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan pegawai dilingkungan OPD	3 Unit	113,190,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit	24,400,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan pegawai dilingkungan OPD	25 Unit	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	ASN dan pegawai dilingkungan OPD	2 Unit	150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Percentase KSP/USP memiliki izin usaha simpan pinjam	Per센	Per센	11 Per센	29,975,000						11 Per센	40,000,000				
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	Per센	Per센	100 Per센	29,975,000						100 Per센	40,000,000				
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP difasilitasi izin usaha simpan pinjam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			20 Unit 0 Unit Usaha	29,975,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi simpan pinjam (KSP)/ koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam (USP)	20 Unit 0 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase koperasi berkualitas	%	%	16 %	80,000,000						16 %	80,000,000				
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase koperasi aktif yang dibina/didampingi menuju berkualitas	%	%	50 %	80,000,000						50 %	80,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				57 Unit Usaha	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif	57 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Melaksanakan RAT)				0 Unit Usaha 45 Unit Usaha	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif	0 Unit Usaha 45 Unit Usaha	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase KSP/USP aktif dengan kategori sehat	%	%	100 %	49,900,000							100 %	75,000,000			
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase KSP/USP aktif yang dilakukan penilaian kesehatannya	%	%	100 %	49,900,000							100 %	75,000,000			
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				57 Unit Usaha	49,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif	57 Unit Usaha	75,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Percentase koperasi modern	%	%	10 %	499,695,000							10 %	500,000,000			
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase koperasi yang sudah digitalisasi usaha	%	%	30 %	499,695,000							30 %	500,000,000			
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/Anggota koperasi yang dilatih digitalisasi usaha dan layanan perkoperasian Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Unit 125 Orang	499,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi	50 Unit 125 Orang	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 07	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Percentase Usaha Mikro tangguh	%	%	4,75 %	933,270,000							4,75 %	1,030,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro dengan kelembagaan yang kuat	Unit		Unit	500 Unit	933,270,000							500 Unit	1,030,000,000		
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				500 Unit Usaha	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha dan instrumen kewirausahaan lainnya	500 Unit Usaha	20,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1296 Unit Usaha	913,270,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha dan instrumen kewirausahaan lainnya	1296 Unit Usaha	920,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Percentase Usaha Mikro Naik Kelas	%		%	0,025 %	538,110,000							0,025 %	800,000,000		
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Unit Usaha		Unit Usaha	60 Unit Usaha	538,110,000							60 Unit Usaha	800,000,000		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				140 Unit Usaha	538,110,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku UMKM (yang memiliki produk potensial)	140 Unit Usaha	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						4,889,984,750							6,974,220,000			
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan	%		%	72 %	35,000,000							72 %	40,000,000		
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Percentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, retail, dan toko modern lainnya memiliki izin sesuai ketentuan	%		%	33 %	10,000,000							33 %	15,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pengawasan, pembinaan dan edukasi perizinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, retail dan toko modern lainnya yang dilaksanakan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6 Kali 6 Dokumen	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern	6 Kali 6 Dokumen	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang memiliki TDG	Unit Gudang	Unit Gudang	77 Unit Gudang	10,000,000							77 Unit Gudang	10,000,000			
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Jumlah pengawasan, pembinaan dan edukasi perizinan pergudangan lainnya yang dilaksanakan				10 Dokumen 12 Kali	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku usaha gudang	10 Dokumen 12 Kali	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 30 02 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah temuan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam aktivitas perdagangan	Kasus	Kasus	15 Kasus	15,000,000							15 Kasus	15,000,000			
3 30 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah pengawasan peredaran bahan berbahaya yang dilaksanakan			12 Laporan 12 Kali	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Distributor Bahan Berbahaya, UMKM, Konsumen	12 Laporan 12 Kali	15,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase peningkatan transaksi pasar tradisional	%	%	1,2 %	3,735,000,000							1,2 %	5,300,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase Sarana distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik	%		%	75 %	3,695,000,000						75 %	5,200,000,000			
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Perawatan gedung pasar (APBD)				1 Unit 6 Unit	2,145,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pedagang, Konsumen, UMKM	1 Unit 6 Unit	3,400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah bulan pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 bulan 6 Unit	1,550,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pedagang, Konsumen, UMKM	12 bulan 6 Unit	1,800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Indeks layanan pasar tradisional dan sarana perdagangan lainnya	Angka Indeks		Angka Indeks	70 Angka Indeks	40,000,000						70 Angka Indeks	100,000,000			
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pedagang yang dilatih melalui Sekolah Pedagang				4 Dokumen 100 pedagang	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pedagang, Pengelola Pasar	4 Dokumen 100 pedagang	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks harga konsumen (Barang kebutuhan Pokok)	Angka Indeks		Angka Indeks	125 Angka Indeks	705,000,000						125 Angka Indeks	869,220,000			
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Percentase rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	%		%	8 %	645,000,000						8 %	819,220,000			
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, UMKM, Konsumen	12 Laporan	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			48 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, UMKM, Konsumen	48 Laporan	80,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Operasi pasar murah yang diselenggarakan Paket daging murah yang dijual kepada masyarakat			24 Laporan 24 Kali 3500 Paket	570,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, UMKM, Konsumen	24 Laporan 24 Kali 3500 Paket	714,220,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase ketepatan sasaran penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	%	%	75 %	60,000,000							75 %	50,000,000			
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi laporan pengawasan distributor pupuk dan pestisida bersubsidi			12 Laporan 12 Laporan	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Konsumen, pedagang, UMKM, Petani	12 Laporan 12 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			24 Laporan	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Konsumen, pedagang, UMKM, Petani	24 Laporan	50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase alat UTTP yang ditera/teru ulang	%	%	59 %	189,984,750							59 %	290,000,000			
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/teru ulang	Unit UTTP		Unit UTTP	1390 Unit UTTP	189,984,750						1390 Unit UTTP	290,000,000			
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Pelayanan sidang tera/tera ulang yang diselenggarakan			1390 Unit 40 Kali	149,999,750	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pedagang, Petani, SPBU, dan pemilik alat UTTP lainnya	1390 Unit 40 Kali	250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Peserta penyuluhan/sosialisasi			80 Orang 80 Orang	39,985,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pedagang, Petani, SPBU, dan pemilik alat UTTTP lainnya	80 Orang 80 Orang	40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Percentase komoditi daerah yang terserap di pasar lokal	%	%	41 %	225,000,000						41 %	475,000,000				
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Percentase komoditi lokal yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel	%	%	41 %	225,000,000						41 %	475,000,000				
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Event promosi produk dalam negeri yang diselenggarakan Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			2 Event 30 UMKM	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, Konsumen	2 Event 30 UMKM	300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			5 UMKM	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, Konsumen	5 UMKM	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Pengelolaan aplikasi/marketplace komoditi daerah			12 Dokumen 12 Bulan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Petani, Pedagang, Konsumen	12 Dokumen 12 Bulan	75,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,237,548,470							1,390,976,000			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan nilai produksi Sentra IKM	%	%	8 %	1,162,548,470						8 %	1,231,386,000				
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase pertumbuhan penjualan produk IKM	%	%	10 %	1,162,548,470						10 %	1,231,386,000				
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			5 Dokumen 5 Paket	332,548,470	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku usaha sentra IKM	5 Dokumen 5 Paket	72,400,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang disediakan															
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM yang difasilitasi sertifikasi Halal IKM yang difasilitasi standar P-IRT Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah IKM Peserta Pelatihan GMP Jumlah IKM peserta pelatihan PKO				50 IKM 50 IKM 4 Dokumen 20 IKM 50 IKM	800,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku usaha sentra IKM	50 IKM 50 IKM 4 Dokumen 20 IKM 50 IKM	924,712,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen RPIK yang di evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 dokumen 1 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Pelaku usaha sentra IKM	1 dokumen 1 Dokumen	90,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Percentase Industri Kecil/Rumah Tangga yang terdata dalam SIINas	%	%	2,80 %	75,000,000							2,80 %	159,590,000			
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri kecil yang terdata dalam SIINas	Unit Usaha	Unit Usaha	70 Unit Usaha	75,000,000							70 Unit Usaha	159,590,000			
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah industri yang memiliki informasi data usaha secara factual dan real time			70 Dokumen 70 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Industri skala rumah tangga, kecil dan menengah	70 Dokumen 70 Unit	79,590,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis			0 Dokumen 1 Dokumen 40 IKM	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Industri skala rumah tangga, kecil dan	0 Dokumen 1 Dokumen 40 IKM	80,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Industri Kabupaten/Kota Melalui SILNas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SILNas Jumlah peserta diseminasi										menengah			Menengah		
TOTAL						13,883,321,300							16,260,376,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																
										Nasional	Daerah															
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4	01			SEKRETARIAT DAERAH						52,266,068,000							50,025,392,438									
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	%	%	100 %	27,411,893,000						100 %	26,814,892,438										
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	%	100 %	45,000,000						100 %	55,000,000										
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	0 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah									
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	5 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah									
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Sesuai SAP		100 Sesuai SAP	13,711,893,000					100 Sesuai SAP	12,629,892,438											
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		97 Orang/bulan	13,033,393,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	97 Orang/bulan	11,908,392,438	Sekretariat Daerah										
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	657,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	700,000,000	Sekretariat Daerah										
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	12,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	12,500,000	Sekretariat Daerah										
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	9,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	9,000,000	Sekretariat Daerah										
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat	Indeks profesionalitas ASN (dimensi)	Nilai		Nilai	90 Nilai	330,000,000				90 Nilai	330,000,000											

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Daerah	kompetensi dan disiplin)															
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	180,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	200 Paket	180,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	40 Orang	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	2,260,000,000							100 %	2,335,000,000			
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Paket	500,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	160,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	160,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				810 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	810 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	500,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	700,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	400 Laporan	750,000,000	Sekretariat Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000			
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit 3 paket	400,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	0 Unit 3 paket	400,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 paket	400,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	3 paket	400,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	2,410,000,000						100 %	2,410,000,000			
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	900,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	900,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	600,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	230,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	230,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	680,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	680,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang	%		%	100 %	2,585,000,000						100 %	2,585,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	1,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	39 Unit	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 paket	750,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Aparatur Sipil Negara	13 paket	750,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 7 paket	185,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	0 Unit 7 paket	185,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	%	100 %	795,000,000							100 %	810,000,000	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	195,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Orang/Bulan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			24 Paket	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	24 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia			6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	4 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	2 Orang/Bulan	410,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	2,100,000,000						100 %	2,100,000,000			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	1,150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	950,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	950,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi	%		%	100 %	500,000,000						100 %	800,000,000			
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	175,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	1,675,000,000						100 %	1,760,000,000			
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1,200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	1,250,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	425,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	450,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Percentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum yang disahkan	%		%	100 %	22,840,000,000						100 %	20,799,500,000			
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	%		%	100 %	990,000,000						100 %	650,000,000			
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				15 Dokumen	90,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Dokumen	115,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50 Dokumen	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	50 Dokumen	210,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	400,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Dokumen	325,000,000	Sekretariat Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						Mulia											
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	21,000,000,000						100 %	18,914,500,000			
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				103 Dokumen	7,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	103 Dokumen	6,000,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				603 Dokumen	14,000,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Perlindungan Sosial	0	603 Dokumen	12,914,500,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%		%	100 %	750,000,000						100 %	1,035,000,000			
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				700 Dokumen	390,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	700 Dokumen	525,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Kasus	350,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasiin Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				40 Dokumen	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	40 Dokumen	160,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%		%	100 %	100,000,000						100 %	200,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Percentase kebijakan daerah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang disahkan	%		%	100 %	2,014,175,000						100 %	2,411,000,000			
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%		%	100 %	704,175,000						100 %	816,000,000			
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0 Dokumen 2 BUMD	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	0 Dokumen 2 BUMD	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	410,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	2 Laporan	310,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	194,175,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	2 Dokumen	302,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%		%	100 %	275,000,000						100 %	465,000,000			
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	275,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	12 Laporan	410,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Percentase cakupan penyelesaian	%		%	100 %	900,000,000						100 %	960,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				250 Orang	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	250 Orang	210,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Percentase cakupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	%	100 %	135,000,000							100 %	170,000,000			
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Laporan			0 Dokumen 1 Laporan	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	0 Dokumen 1 Laporan	55,000,000	Sekretariat Daerah			
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Laporan			0 Dokumen 1 Laporan	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	0 Dokumen 1 Laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah			
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,			0 Dokumen 1 Laporan	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	0	0 Dokumen 1 Laporan	55,000,000	Sekretariat Daerah			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2023**

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif																
Nasional	Daerah																														
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4	02			SEKRETARIAT DPRD																											
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	%	%	80 %	23,025,110,700						80 %	23,478,710,700															
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	50,000,000						5 Dokumen	50,000,000															
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	5 Laporan	10,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Tahun	Tahun	1 Tahun	2,897,471,700						1 Tahun	2,897,471,700															
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang	2,882,471,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	20 Orang	2,882,471,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD		1 Laporan	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ersentase cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Persentase cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	%	85 % 100 %	244,150,000					85 % 100 %	244,150,000																
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD	1 Paket	50,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan															
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	194,150,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD	20 Orang	194,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	%	100 %	827,902,000							100 %	827,902,000			
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Paket	150,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	102,700,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Paket	102,700,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Bulan	92,950,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	92,950,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	205,740,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Paket	205,740,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	126,512,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	126,512,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	150,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD	12 Laporan	150,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	200,000,000							100 %	200,000,000			
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			15 Unit	200,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	15 Unit	200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	1,053,560,000							1 Tahun	1,053,560,000			
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat			12 Laporan	438,200,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat DPRD dan Anggota	12 Laporan	438,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Menyurat				12 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 Laporan	180,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 Laporan	180,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	435,360,000				6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12 Laporan	435,360,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun	1,727,877,000							1 Tahun	2,181,477,000			
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			19 Unit	389,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	19 Unit	389,820,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			114 Unit	91,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	114 Unit	91,750,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8500 M2	1,246,307,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	8500 M2	1,246,307,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Percentase cakupan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Tahun	Tahun	1 Tahun	15,278,380,000							1 Tahun	15,278,380,000			
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			25 Orang	15,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD	25 Orang	15,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			1 Paket	166,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD	1 Paket	166,540,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			25 Orang	111,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD	25 Orang	111,840,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Percentase cakupan Layanan Administrasi DPRD	Tahun	Tahun	1 Tahun	745,770,000							1 Tahun	745,770,000			
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			12 Dokumen	257,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD	12 Dokumen	257,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				27 Laporan	488,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD	27 Laporan	488,170,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan OPD	%		%	100 %	13,520,650,000						100 %	13,520,650,000			
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Percentase Cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		%	100 %	75,650,000						100 %	75,650,000			
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah Akademik yang di Fasilitasi				2 Dokumen	75,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	2 Dokumen	75,650,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Percentase Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	1,808,000,000						100 %	1,808,000,000			
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	6 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				105 Dokumen	145,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	105 Dokumen	145,340,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	108,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	3 Orang	108,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	439,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	6 Orang	439,820,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				54 Dokumen	114,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	54 Dokumen	114,840,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Percentase cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%		%	100 %	1,137,000,000						100 %	1,137,000,000			
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				100 Laporan	251,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	100 Laporan	251,340,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	35,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	3 Dokumen	35,660,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen	850,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat Bangka Tengah	3 Dokumen	850,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Percentase cakupan fasilitasi tugas DPRD	%	%	100 %	10,500,000,000							100 %	10,500,000,000			
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2000 Dokumen	10,500,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD	2000 Dokumen	10,500,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
TOTAL						36,545,760,700								36,999,360,700			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
										Nasional	Daerah								
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6 01						INSPEKTORAT DAERAH	7,491,500,000							7,202,975,000					
6 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	bulan	bulan	12 bulan	6,188,500,000				12 bulan	5,724,975,000			
6 01 01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	dokumen	5 dokumen	40,000,000				5 dokumen	40,000,000			
6 01 01	2.01 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Dokumen	20,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01	2.01 07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	20,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	bulan	12 bulan	4,615,000,000					12 bulan	4,119,000,000		
6 01 01	2.02 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	4,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 Orang/bulan	4,100,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01	2.02 05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	12,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01	2.02 07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	7,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01	2.05					Administrasi Kepergawaihan Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/pengawasan	orang	orang	30 orang	190,000,000				6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 orang	285,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 Paket	35,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Orang	250,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	bulan	bulan	bulan	12 bulan	248,500,000						12 bulan	325,975,000	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	6,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	35,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	15,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Paket	19,975,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundung-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundung-undangan yang Disediakan				30 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 Dokumen	25,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	50 Laporan	225,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah unit Pengadaan peralatan	unit	unit	unit	14 unit	665,000,000						14 unit	460,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Daerah	dan mesin lainnya				20 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Unit	50,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	14 Unit	80,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Unit	250,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Unit	80,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan		bulan	12 bulan	220,000,000						12 bulan	225,000,000			
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	90,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	40,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	95,000,000	Inspektorat Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit		unit	4 unit	210,000,000						4 unit	270,000,000			
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Unit	120,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			45 Unit	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	45 Unit	55,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Unit	65,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			25 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Unit	30,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase jumlah temuan kerugian negara/ daerah pada Perangkat Daerah/desa di bidang Inspektur Pembantu Persentase Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori A di bidang Inspektur Pembantu	%	%	0,05 % 15,63 %	888,000,000						0,05 % 15,63 %	1,143,000,000				
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan kinerja	Objek Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	121 Objek Pemeriksaan	598,000,000							121 Objek Pemeriksaan	768,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				121 Laporan	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	121 Laporan	270,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				74 Laporan	108,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	74 Laporan	108,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				32 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	32 Laporan	60,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				32 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	32 Laporan	60,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	30 Laporan	80,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				40 Dokumen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	40 Dokumen	190,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus kerugian negara/daerah yang ditangani	Objek Pemeriksaan		Objek Pemeriksaan	10 Objek Pemeriksaan	290,000,000						10 Objek Pemeriksaan	375,000,000			
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	10 Laporan	75,000,000	Inspektorat Daerah		
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Laporan	300,000,000	Inspektorat Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang diasistensi pelaksanaan RB di wilayah Inspektorat Pembantu Jumlah unit kerja yang diasistensi pelaksanaan ZI WBK/WBBM di wilayah Inspektorat Pembantu	unit unit		unit unit	8 unit 1 unit	415,000,000						8 unit 1 unit	335,000,000			
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan yang di evaluasi	Objek Pemeriksaan		Objek Pemeriksaan	32 Objek Pemeriksaan	110,000,000						32 Objek Pemeriksaan	110,000,000			
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			4 Rekomendasi	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Rekomendasi	55,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun			4 Rekomendasi	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Rekomendasi	55,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah objek pemeriksaan yang di evaluasi	Objek Pemeriksaan		Objek Pemeriksaan	52 Objek Pemeriksaan	305,000,000						52 Objek Pemeriksaan	225,000,000			
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			32 perangkat daerah	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	32 perangkat daerah	90,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			8 Kegiatan	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	8 Kegiatan	40,000,000	Inspektorat Daerah			
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			4 perangkat daerah	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 perangkat daerah	90,000,000	Inspektorat Daerah			
TOTAL						7,491,500,000								7,202,975,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
N											Nasional	Daerah									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
PERENCANAAN								12,017,344,850							9,760,344,400						
5 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP OPD	nilai		nilai	78,00 nilai	9,999,489,600						7,535,344,400						
5 01 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	9 dokumen	50,000,000						40,000,000						
5 01 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 dokumen	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah Bappelitbangda	4 dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				
5 01 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 laporan	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah Bappelitbangda	5 laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				
5 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		kinerja laporan keuangan	%		%	100 %	5,823,625,600						100 %	5,828,847,700					
5 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				47 orang/bulan	5,808,625,600	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan dan ASN Bappelitbangda	47 orang/bulan	5,813,847,700	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				
5 01 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan dan ASN Bappelitbangda	1 laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				
5 01 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		jumlah laporan keuangan bulanan/triulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan /semesteran SKPD				1 laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan dan ASN Bappelitbangda	1 laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah				
5 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase cakupan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	382,170,000						100 %	400,550,000					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	perangkat daerah					1 paket	45,300,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai/ ASN pada Bappelitbangda	1 paket	40,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				52 orang	99,870,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai/ ASN pada Bappelitbangda	52 orang	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan				100 orang	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai/ ASN pada Bappelitbangda	100 orang	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan				100 orang	137,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai/ ASN pada Bappelitbangda	100 orang	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	251,500,000							100 %	262,687,000			
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	4,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	1 paket	4,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	1 paket	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			1 paket	21,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	1 paket	20,892,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan			1 paket	35,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	1 paket	46,795,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan				4 dokumen	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	4 dokumen	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				197 laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Bappelitbangda	197 laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	paket		paket	3 paket	338,000,000						3 paket	335,000,000			
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				1 paket	127,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana pada Bappelitbangda	1 paket	127,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang disediakan				21 unit	211,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sarana dan Prasarana pada Bappelitbangda	21 unit	208,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	611,280,000						100 %	374,199,700			
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	155,600,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	sarana dan prasarana pada bappelitbangda	12 laporan	127,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	108,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	sarana dan prasarana pada bappelitbangda	12 laporan	108,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	347,680,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	sarana dan prasarana pada bappelitbangda	12 laporan	139,199,700	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	2,542,914,000						100 %	294,060,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 unit	68,410,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda	1 unit	82,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			14 unit	108,990,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda	14 unit	97,936,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			1 unit	2,317,514,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda	1 unit	65,424,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			12 unit	48,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah pada Bappelitbangda	12 unit	48,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target Percentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	%	%	93 % 100 %	590,000,000							93 % 100 %	610,000,000			
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	398,415,000						8 dokumen	398,415,000			
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	63,760,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan	1 Berita Acara	63,760,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah			32 Berita Acara	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan	32 Berita Acara	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	103,410,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan	1 Berita Acara	103,410,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)			2 Dokumen	196,245,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan	2 Dokumen	196,245,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan an Daerah Bidang Perencanaan n Pembangun	laporan		laporan	1 laporan	51,585,000						1 laporan	51,585,000			
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			32 Orang	51,585,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	data update seluruh Perangkat Daerah	32 Orang	51,585,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan n pembangunan daera	laporan		laporan	8 laporan	140,000,000						8 laporan	160,000,000			
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			4 laporan	68,400,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen evaluasi seluruh Perangkat Daerah	4 laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah			4 laporan	71,600,000		Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen evaluasi seluruh Perangkat Daerah	4 laporan	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase capaian kinerja berkala perangkat daerah sesuai target Percentase keselarasan/ kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya)	% %	% %	93 % 100 %	1,427,855,250							93 % 100 %	1,615,000,000			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah laporan hasil koordinasi,	laporan		laporan	8 laporan	445,355,000						8 laporan	525,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Manusia	asistensi,dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia															
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	61,880,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 Dokumen	74,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah				7 Perangkat daerah	28,570,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	7 Perangkat daerah	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan				4 laporan	28,830,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4 laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/rencja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan				1 laporan	56,720,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)				1 dokumen	62,990,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia				6 perangkat daerah	38,430,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6 perangkat daerah	248,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia				6 Perangkat daerah	25,230,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6 Perangkat daerah	22,300,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia				1 laporan	142,705,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi,dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang perekonomian dan SDA	laporan/dokumen	laporan/dokumen	laporan/dokumen	530,000,250								8 laporan/dokumen	565,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	190,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	1 Dokumen	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian				5 Perangkat daerah	43,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	5 Perangkat daerah	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan				5 Perangkat daerah	12,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat	5 Perangkat daerah	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Daerah Bidang Perekonomian	monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang perekonomian						Kecamatan, Semua Kelurahan		Pelayanan Publik		daerah mitra bidang perekonomian dan SDA				Daerah	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian			1 laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	1 laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	165,920,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	1 Dokumen	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang SDA			4 Perangkat daerah	23,130,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	4 Perangkat daerah	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra /renja bidang SDA			4 Perangkat daerah	26,150,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	4 Perangkat daerah	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA			1 laporan	29,800,250	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan SDA	1 laporan	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahann	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi,dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahann	laporan	laporan	8 laporan	452,500,000							8 laporan	525,000,000			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1 Dokumen	85,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat	1 Dokumen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Perangkat daerah	37,500,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Perangkat daerah	40,000,000	Daerah		
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang Infrastruktur				4 perangkat daerah	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 perangkat daerah	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur				1 laporan	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 laporan	65,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD/RKPD)				1 dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan				8 Perangkat daerah	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Perangkat daerah	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang kewilayahan				8 Perangkat daerah	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Perangkat daerah	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah				1 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayah	1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						553,879,550								591,600,000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase pemanfaatan hasil litbang dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan daerah	%	%	82 %	553,879,550							82 %	591,600,000			
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	laporan	laporan	1 laporan	57,510,850							1 laporan	38,200,000			
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik			1 laporan	57,510,850	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	data kelitbangan dan peaturan	1 laporan	38,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	laporan	laporan	4 laporan	198,822,750							4 laporan	325,000,000			
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial			1 dokumen	51,570,050	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan			1 dokumen	47,349,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 dokumen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata			1 Dokumen	50,745,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kesehatan			1 dokumen	49,156,800	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan	1 dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	laporan		1 laporan	49,145,950						1 laporan	80,000,000				
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan			1 Dokumen	49,145,950	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan /dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	laporan		4 laporan	248,400,000						4 laporan	148,400,000				
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 laporan	88,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 laporan	88,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah YangBersifat Inovatif	Jenis,		1 laporan	135,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 laporan	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak dan Kekayaan Intelektual			1 laporan	25,400,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 laporan	25,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah			
TOTAL						12,571,224,400								10,351,944,400			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	02			KEUANGAN		144,146,000,000							130,846,600,000							
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	82 Nilai	7,058,767,756						82 Nilai	6,525,300,000			
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	40,000,000					5 Dokumen	40,000,000				
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	laporan		laporan	2 laporan	5,596,227,756					2 laporan	5,015,000,000				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	5,581,227,756	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan SKPD	35 Orang/bulan	5,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan SKPD	1 Laporan	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan SKPD	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang		Orang	52 Orang	187,000,000					52 Orang	207,800,000				
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			5 Paket	62,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Perangkat Daerah	5 Paket	57,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas			14 Orang	50,000,000	Kab. Bangka Tengah,	Dana Transfer Umum-Dana		6. Peningkatan Tata Kelola	Pegawai Perangkat	14 Orang	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						Koba, Koba	Alokasi Umum		Pemerintahan	Daerah				daerah	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			14 Orang	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Perangkat Daerah	14 Orang	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi umum	Bulan	Bulan	12 Bulan	386,240,000							12 Bulan	392,500,000			
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Paket	6,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Paket	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	51,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	1 Paket	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket	77,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	6 Paket	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	3,240,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	35 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Item	Item	3 Item	230,000,000							3 Item	140,000,000			
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			21 Unit	70,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	21 Unit	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	160,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	3 Unit	70,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase realisasi penyaluran pembiayaan untuk pelayanan publik	%		%	100 %	400,000,000						100 %	516,000,000			
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	270,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil	1 Laporan	340,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil	1 Laporan	84,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil	1 Laporan	92,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	219,300,000						12 Bulan	214,000,000			
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	69,910,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	1 Unit	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	109,290,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	15 Unit	93,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,900,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	1 Unit	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	28,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	35 Unit	32,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	%		%	100 %	135,747,232,244						100 %	122,237,500,000			
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana	Persentase Ketersediaan	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,540,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Anggaran Daerah	dokumen penganggaran															
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	2 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	2 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	32 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	32 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun				2 Dokumen	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	2 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang disusun Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun				1 Dokumen 7 Dokumen	350,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	1 Dokumen 7 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	3 Dokumen	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				35 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	35 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen perencanaan anggaran daerah	50 Orang	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan	Persentase Ketersediaan	%	%	100 %	430,000,000							100 %	547,500,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Perbendaharaan Daerah	dokumen perbendaharaan															
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	12 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				128 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	128 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				115 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	115 Dokumen	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	12 Laporan	52,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				384 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	384 Dokumen	135,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	5 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Sub Kegiatan				50 Orang	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perbendaharaan	50 Orang	125,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase Ketersediaan dokumen pelaporan keuangan daerah	%	%	100 %	870,000,000							100 %	1,455,000,000			
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 Laporan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			744 Dokumen	170,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	744 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			2 Laporan	70,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	140,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			1 Laporan	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	140,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 Dokumen	160,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian			1 Dokumen	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Orang	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Lembaga	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Percentase realisasi penyaluran pembiayaan untuk pelayanan publik	%	%	100 %	133,287,232,244							100 %	118,525,000,000			
5 02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	700,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil	2 Laporan	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	105,801,926,544	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil	4 Laporan	104,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	19,131,401,300	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil	4 Laporan	6,750,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	7,653,904,400	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Subsidi, Bantuan Keuangan, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil	4 Laporan	7,275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah bulan pengelolaan data dan implementasi SIPD	Bulan	Bulan	12 Bulan	160,000,000							12 Bulan	170,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Daerah Lingkup Keuangan Daerah																
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	160,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Percentase penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan	%	%	100 %	1,340,000,000							100 %	2,083,800,000			
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1,340,000,000						2 Dokumen	2,083,800,000			
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	72,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			32 Laporan	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	32 Laporan	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			4 Laporan	600,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	4 Laporan	720,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			4 Laporan	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	4 Laporan	172,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Laporan	108,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			32 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	32 Dokumen	144,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				768 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	768 Laporan	216,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Laporan	108,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	100 Orang	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		
TOTAL						144,146,000,000									130,846,600,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	02			KEUANGAN		10,170,000,000										8,830,000,000				
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sapik OPD	Persen		Persen	80 Persen	8,360,000,000						8,385,000,000				
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	36,970,000						12 Dokumen	36,970,000			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	27,980,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	27,980,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	8,990,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8,990,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Persen		Persen	100 Persen	7,188,990,000					100 Persen	7,213,990,000			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 Orang/bulan	7,175,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRD	33 Orang/bulan	7,200,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	8,990,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRD	1 Laporan	8,990,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun BPPRD	1 Laporan	5,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	176,150,000					100 Persen	176,150,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	41,150,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	1 Paket	41,150,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	20 Orang	75,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BPPRD	9 Orang	60,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	316,020,000							100 Persen	316,020,000		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	1 Paket	4,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	81,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	1 Paket	81,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	12 Paket	20,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	84,820,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	1 Paket	84,820,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,200,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	12 Dokumen	1,200,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan				70 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	70 Laporan	125,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan						
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	165,000,000						100 Persen	165,000,000			
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	15 Unit	25,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	140,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	20 Unit	140,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	210,570,000						100 Persen	210,570,000			
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	26,100,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	12 Laporan	26,100,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	91,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	12 Laporan	91,500,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	92,970,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	12 Laporan	92,970,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	266,300,000						100 Persen	266,300,000			
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	207,700,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	14 Unit	207,700,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	18,600,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	91 Unit	18,600,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Padang Mulia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor BPPRD	3 Unit	40,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	persen		persen	3 persen	1,810,000,000						3 persen	445,000,000			
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan, Penilaian, Verifikasi, Pemeriksaan, Penagihan dan Pengawasan	Objek Pajak Daerah	Objek Pajak Daerah	11 Objek Pajak Daerah	1,810,000,000						11 Objek Pajak Daerah		445,000,000			
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			1 Dokumen	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1 Laporan	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Laporan	300,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
5 02 04 2.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			11 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	11 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			3 Laporan	850,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	3 Laporan	0	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				11 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	11 Dokumen		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	11 Layanan		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Dokumen		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Dokumen		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Dokumen		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	wajib pajak dan objek pajak daerah	1 Laporan		0 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		
TOTAL						10,170,000,000								8,830,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	03			KEPEGAWAIAN		20,598,489,000										41,854,350,540				
5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Nilai		Nilai	80 Nilai	15,872,050,000						80 Nilai	35,874,350,540			
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	40,000,000						10 dokumen	40,000,000			
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	5 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	Bulan		Bulan	12 Bulan	14,072,000,000					12 Bulan	34,388,550,540			
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			141 Orang/bulan	14,057,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDMD Bangka Tengah	141 Orang/bulan	34,373,550,540	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDMD Bangka Tengah	1 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDMD Bangka Tengah	1 Laporan	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	163,600,000					100 %	131,300,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			72 Paket	63,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDMD Bangka Tengah	72 Paket	31,300,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			26 Orang	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai BKPSDMD Bangka Tengah	26 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	%	100 %	268,000,000							100 %	268,000,000			
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	14,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Paket	14,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	1 Paket	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Paket	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	52,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Paket	52,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	2,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	1 Dokumen	2,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Laporan	125,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	210,000,000							100 %	1,500,000			
5 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			25 Unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai Bangka Tengah	25 Unit	1,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	674,280,000						100 %	695,000,000				
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	191,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	1 Laporan	195,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	255,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	1 Laporan	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	228,280,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Laporan	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	444,170,000						100 %	350,000,000				
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	69,910,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	1 Unit	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	74,260,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Unit	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			133 Unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	133 Unit	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor dan Gedung Diklat dan Pegawai BKPSDMD	2 Unit	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Percentase pelayanan kepegawaian yang terproses sesuai SOP	%	%	100 %	4,726,439,000						100 %	5,980,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaiian ASN	Percentase ASN yang diterima sesuai dengan kualifikasi pendidikan kebutuhan kepegawaian	%		%	85 %	1,113,210,000						85 %	1,550,000,000			
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	3 Dokumen	400,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				3 Lembaga	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	3 Lembaga	500,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaiian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaiian				1 Dokumen	159,750,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaiian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaiian				1 Dokumen	153,460,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	200,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Percentase aparatur yang memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan	%		%	90 %	520,000,000						90 %	770,000,000			
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaiian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	2 Dokumen	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3 Dokumen	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	3 Dokumen	550,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Percentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	%	%	75.34 %	1,983,134,000							75.34 %	2,310,000,000			
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			20 Orang	1,673,134,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	20 Orang	2,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			6 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	6 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.03 09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional			6 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	6 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Percentase kasus pelanggaran disiplin ASN	%	%	0.1 %	1,110,095,000							0.1 %	1,350,000,000			
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	75,095,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Laporan	85,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	1 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
						Kelurahan											
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			6 Orang	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	6 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			200 Orang	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	200 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			2800 Orang 6 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	2800 Orang 6 Laporan	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,820,120,000							2,200,000,000			
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Bangka Tengah	%	%	100 %	1,820,120,000							100 %	2,200,000,000			
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase Peserta Pelatihan dan pendidikan pengembangan kompetensi teknis yang memiliki sertifikat kelulusan	%	%	100 %	500,000,000							100 %	500,000,000			
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			120 Orang	500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	120 Orang	500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Peserta Pelatihan dan pendidikan pengembangan kompetensi majerial dan Fungsional yang memiliki sertifikat kelulusan	%	%	100 %	1,320,120,000							100 %	1,700,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2 Laporan	1,320,120,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kabupaten Bangka Tengah	2 Laporan	1,700,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
TOTAL						22,418,609,000									44,054,350,540		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																
										Nasional	Daerah															
7	UNSUR KEWILAYAHAN																									
7 01	KECAMATAN						7,828,398,000						7,303,698,000													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Pelayanan OPD sesuai tupoksinya Nilai SAKIP OPD	Persen nilai		Persen nilai	81 Persen 80 nilai	6,471,286,000						81 Persen 80 nilai	5,830,608,000												
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	40,000,000						8 dokumen	30,000,000												
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				5 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	5 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen 0 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	5 Dokumen 0 Laporan	15,000,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,620,000,000						12 Bulan	3,001,996,000												
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	3,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	2,986,996,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	85 Persen	80,000,000						85 Persen	75,000,000												
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	50 Paket	50,000,000	Kecamatan Koba											
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah peserta yang mengikuti diklat formal				11 OK	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	11 OK	25,000,000	Kecamatan Koba											

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	Persen Persen		Persen Persen	85 Persen 85 Persen	237,200,000						daerah	85 Persen 85 Persen	137,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	5,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman				12 Bulan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	35,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	7,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 Bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	80 Persen	425,000,000						80 Persen	465,000,000			
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Unit	250,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Koba		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,350,000,000						100 Persen	1,426,612,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat				12 Bulan	920,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	980,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	186,612,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	12 Bulan	260,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	85 Persen	719,086,000						85 Persen	695,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	69,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 unit	125,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				9 unit	312,066,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	9 unit	260,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	308,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Unit	300,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				5 Item	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	5 Item	10,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persen	Persen	Persen	85 Persen	934,172,000						85 Persen	750,000,000			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan	Persen		Persen	85 Persen	75,000,000						85 Persen	90,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan															
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah keikutsertaan rapat koordinasi pada Pemerintah Daerah atau Instansi vertikal			200 OK	65,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	200 OK	70,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang terlaksana			1 Kegiatan	10,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	Bulan	Bulan	12 Bulan	30,000,000							12 Bulan	30,000,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan			12 Bulan	30,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	12 Bulan	30,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	Kegiatan	Kegiatan	10 Kegiatan	829,172,000							10 Kegiatan	630,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			10 Kegiatan	829,172,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	10 Kegiatan	630,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Desa/Kelurahan Persen	Desa/Kelurahan Persen	11 Desa/Kelurahan 85 Persen	120,000,000							11 Desa/Kelurahan 85 Persen	192,090,000			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	120,000,000							11 Desa/Kelurahan	192,090,000			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan			11 Desa / Kelurahan	20,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	11 Desa / Kelurahan	35,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif			11 Desa / Kelurahan	100,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	11 Desa / Kelurahan	157,090,000	Kecamatan Koba		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	%	%	85 %	100,000,000							85 %	130,000,000			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	Bulan		Bulan	12 Bulan	100,000,000						12 Bulan	130,000,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat				12 Bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	12 Bulan	130,000,000	Kecamatan Koba			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	%	%	85 %	145,000,000							85 %	75,000,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	145,000,000						3 Kegiatan	75,000,000			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan nasional yang terlaksana di Kecamatan				1 Kegiatan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	1 Kegiatan	30,000,000	Kecamatan Koba			
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional				1 Kegiatan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	1 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Koba			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan				6 Orang / Kali	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Orang / Kali	30,000,000	Kecamatan Koba			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	85 %	57,940,000							85 %	326,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	57,940,000						12 Bulan	326,000,000			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				6 Desa	31,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Desa	35,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat				1 Kegiatan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	1 Kegiatan	26,000,000	Kecamatan Koba		
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah fasilitasi penegasan batas desa				5 Batas Desa	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	5 Batas Desa	25,000,000	Kecamatan Koba		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN						500,000,000							500,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Persen %		Persen %	85 Persen 85 %	500,000,000						85 Persen 85 %	500,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	Persen		Persen	85 Persen	500,000,000						85 Persen	500,000,000			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif				6 Kegiatan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Koba			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN						500,040,000							500,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Persen		Persen	85 Persen	500,040,000						85 Persen	500,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	Persen		Persen	85 Persen	500,040,000						85 Persen	500,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif				6 Kegiatan	500,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Koba		
7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						500,000,000								500,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif			6 Kegiatan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Koba			
7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						500,000,000								500,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif			6 Kegiatan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Koba			
7 UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						500,000,000								500,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa dan kelurahan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	Per센		Per센	85 Per센	500,000,000							85 Per센	500,000,000		
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah organisasi/lembaga masyarakat yang aktif			6 Kegiatan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa/kelurahan	6 Kegiatan	500,000,000	Kecamatan Koba			
TOTAL															9,803,698,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01						KECAMATAN						7,906,003,000							7,077,250,000				
7 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%		%	81 %	6,368,334,000						5,662,250,000					
7 01 01 2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	32,500,000						40,000,000					
7 01 01 2.01 01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 dokumen		25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	4 dokumen	30,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.01 07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 laporan		7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	4 laporan	10,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%		%	100 %	3,534,688,000						3,182,598,000					
7 01 01 2.02 01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34 orang		3,519,688,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	34 orang	3,167,598,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.02 05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan		10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	1 laporan	10,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.02 07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD			1 Laporan		5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.05						Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	%		%	100 %	109,600,000						160,900,000					
7 01 01 2.05 02						Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			150 paket		59,600,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan pangkalbar u	150 paket	60,900,000	Kecamatan Pangkalbaru			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 OK	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan pangkalbar u	10 OK	100,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	267,600,000						100 %	268,600,000				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	7,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	12 paket	7,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	12 paket	55,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket	42,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	12 paket	42,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	12 paket	36,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 dokumen	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	12 dokumen	3,600,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			23 laporan	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan PANGKALANBAR U	23 laporan	125,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	787,146,000						100 %	400,000,000				
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 unit	250,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	1 unit	50,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 paket	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 paket	50,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 unit	237,146,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	5 unit	50,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	771,000,000							100 %	793,808,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	607,520,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 laporan	627,400,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 laporan	75,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	88,480,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 laporan	91,408,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	865,800,000							100 %	816,344,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	63,990,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	1 unit	84,700,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 unit	631,810,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	12 unit	559,144,000	Kecamatan Pangkalanbaru		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	125,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbaru	3 unit	125,000,000	Kecamatan Pangkalbaru		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 unit	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbaru	40 unit	47,500,000	Kecamatan Pangkalbaru		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	%	%	85 %	916,669,000								85 %	140,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	85 %	80,000,000								85 %	80,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah keikutsertaan rapat koordinasi pada pemerintah daerah atau instansi vertikal			500 Orang/Kali	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pangkalbaru	500 Orang/Kali	80,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	60,000,000								100 %	60,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbaru	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	Urusan	Urusan	3 Urus	776,669,000								3 Urus	0		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			12 Laporan	776,669,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbaru	12 Laporan	0	Kecamatan Pangkalbaru			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	%	%	85 %	222,000,000								85 %	150,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	orang	orang	200 orang	222,000,000								200 orang	150,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	8 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Kecamatan Pangkalbar u		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	12 Laporan	110,000,000	Kecamatan Pangkalbar u		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	%	%	85 %	80,000,000								85 %	635,000,000		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	laporan	laporan	500 laporan	80,000,000								500 laporan	135,000,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau			500 laporan	80,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	500 laporan	135,000,000	Kecamatan Pangkalbar u			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	%	%	81 %	140,000,000								81 %	125,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	140,000,000								2 kegiatan	125,000,000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			200 Orang	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	200 Orang	100,000,000	Kecamatan Pangkalbar u			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			5 Dokumen	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalbar u	5 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Pangkalbar u			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	85 %	179,000,000								85 %	365,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	bulan		bulan	12 bulan	179,000,000						12 bulan	365,000,000			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	29,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	12 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	16 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				42 Orang	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	42 Orang	50,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penegasan Batas Desa				3 BA	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	3 BA	35,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang di laksanakan				1 kegiatan	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	1 kegiatan	15,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah bulan pendampingan				12 bulan	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pangkalanbaru	12 bulan	20,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN						620,000,000							615,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	%	%	85 %	620,000,000						85 %	615,000,000				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	orang/kali	orang/kali	100 orang/kali	620,000,000						100 orang/kali	615,000,000				
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kel Dul Kecamatan Pangkalanbaru	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			5 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kel Dul Kecamatan Pangkalanbaru	5 Unit	70,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 Pokmas / Ormas	540,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kel Dul Kecamatan Pangkalanbaru	6 Pokmas / Ormas	520,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru			
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Dul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kel Dul Kecamatan Pangkalanbaru	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pangkalanbaru			
TOTAL						8,526,003,000							7,692,250,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
										Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01						KECAMATAN				6,108,404,800						6,681,600,000				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%		%	81 %	4,604,074,800						81 %	4,681,600,000				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen		dokumen	8 dokumen	40,000,000								8 dokumen	40,000,000				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	4 dokumen	30,000,000	Kecamatan Sungaiselan						
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	4 Laporan	10,000,000	Kecamatan Sungaiselan						
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%		%	100 %	2,657,344,800							100 %	2,715,000,000					
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 orang/bulan	2,642,344,800	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	25 orang/bulan	2,700,000,000	Kecamatan Sungaiselan						
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 laporan	10,000,000	Kecamatan Sungaiselan						
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungaiselan						
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	135,000,000							100 %	145,000,000					
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 Paket	45,000,000	Kecamatan Sungaiselan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Semua Kelurahan									
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Pegawai	90,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	14 Pegawai	100,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	262,500,000						100 %	291,600,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	4 Paket	8,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Paket	65,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	39,900,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Paket	40,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	32,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Paket	35,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,600,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	35 Laporan	140,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	540,000,000						100 %	440,000,000			
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 unit	0	Kecamatan Sungaiselan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	2 unit	50,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 Paket	60,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 unit	250,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 unit	90,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	15 unit	80,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	503,815,000							100 %	525,000,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	360,645,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Laporan	370,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	74,820,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Laporan	75,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	68,350,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	12 Laporan	80,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	465,415,000							100 %	525,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	67,005,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaiselan	1 unit	85,000,000	Kecamatan Sungaiselan			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 unit	208,410,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaisel	15 unit	210,000,000	Kecamatan Sungaisel			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 unit	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaisel	5 unit	190,000,000	Kecamatan Sungaisel			
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 item	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaisel	6 item	40,000,000	Kecamatan Sungaisel			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	%	%	85 %	846,730,000							85 %	895,000,000			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	130,000,000							100 %	145,000,000			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			812 Laporan	130,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sungaisel	812 Laporan	130,000,000	Kecamatan Sungaisel			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	berkas	berkas	850 berkas	60,000,000							850 berkas	50,000,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sungaisel	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sungaisel			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perup	urusan	urusan	3 urusan	656,730,000							3 urusan	700,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10 Laporan	656,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan dan Desa se Kecamatan Sungaisel	10 Laporan	700,000,000	Kecamatan Sungaisel			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	%		%	85 %	170,000,000						85 %	170,000,000			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	orang		orang	200 orang	170,000,000						200 orang	170,000,000			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				52 Kelembagaan	20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	52 Kelembagaan	20,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	12 Laporan	150,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggarra	%		%	85 %	88,400,000						85 %	590,000,000			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	laporan		laporan	120 laporan	88,400,000						120 laporan	90,000,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				600 laporan	88,400,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan dan Desa se Kecamatan Sungaiselan	600 laporan	90,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	%		%	85 %	109,200,000						85 %	107,000,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggarra	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	109,200,000						2 kegiatan	107,000,000			
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				500 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sungaiselan	500 Orang	87,000,000	Kecamatan Sungaiselan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	19,200,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Sungaiselan	3 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Sungaiselan		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	85 %	290,000,000							85 %	238,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	bulan	bulan	12 bulan	290,000,000							12 bulan	238,000,000			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			12 Dokumen	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	12 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			20 dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	20 dokumen	50,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			144 dokumen	90,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	144 dokumen	70,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			20 dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	20 dokumen	25,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			12 dokumen	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	12 dokumen	23,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			12 laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Sungaiselan	12 laporan	20,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7	UNSUR KEWILAYAHAN						947,850,000							865,000,000			
7 01	KECAMATAN						947,850,000							865,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	%		%	85 %	947,850,000						85 %	865,000,000			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	orang		orang	200 orang	947,850,000						200 orang	865,000,000			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4 Lembaga	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sungaiselan	4 Lembaga	15,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 item	130,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sungaiselan	8 item	80,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5 Ormas	797,850,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sungaiselan	5 Ormas	750,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			12 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sungaiselan	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Sungaiselan			
TOTAL						7,056,254,800								7,546,600,000			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2023**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
7							UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01						KECAMATAN									5,918,200,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%		%	81 %	6,573,337,380					81 %	4,243,200,000			
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	40,000,000					100 %	40,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 dokumen	30,000,000	Kecamatan Simpangkatis
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	4 dokumen	10,000,000	Kecamatan Simpangkatis
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	%		%	100 %	1,708,787,380					100 %	2,115,000,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang/bulan	1,693,787,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Simpangkatis	15 orang/bulan	2,100,000,000	Kecamatan Simpangkatis
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 laporan	10,000,000	Kecamatan Simpangkatis
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				12 laporan 0 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Simpangkatis	12 laporan 0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Simpangkatis

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	124,750,000						100 %	35,000,000			
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 paket	49,750,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Simpangkatis	1 paket	35,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 orang 0 Orang	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Simpangkatis	15 orang 0 Orang	0	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase cakupan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	204,790,000						100 %	243,600,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	2 paket	5,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	12 paket	45,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				12 paket	31,710,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	12 paket	60,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 paket	21,100,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	12 paket	30,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 dokumen	1,980,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	12 dokumen	3,600,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	kantor Kecamatan Simpangkatis	12 laporan	100,000,000	Kecamatan Simpangkatis		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	%	100 %	3,293,625,000						100 %	100 %	470,000,000		
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan				1 unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 unit	250,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan				1 unit	350,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 unit	125,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				1 paket	48,125,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 paket	45,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,500,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 Unit	0	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang DipeliharaJumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 unit 0 Unit	145,500,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	5 unit 0 Unit	50,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	%	%	%	100 %	531,660,000						100 %	734,600,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	380,460,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Simpangkatis	12 laporan	411,600,000	Kecamatan Simpangkatis		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Katis, Semua Kelurahan									
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Simpangkatis	12 laporan	163,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Umum Kantor Yang Disediakan				0 Laporan 12 laporan	76,200,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Simpangkatis	0 Laporan 12 laporan	160,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	669,725,000							100 %	605,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit 0 Unit	71,500,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	1 unit 0 Unit	75,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			6 unit	116,680,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	6 unit	200,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luas Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara/Direhab			0 Unit 3 unit	446,545,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	0 Unit 3 unit	300,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung			0 Unit 40 item	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan			6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Simpangkatis	0 Unit 40 item	30,000,000	Kecamatan Simpangkatis			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Kantor Yang Dipelihara/ di rehabilitasi															
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	%		%	100 %	620,250,000							100 %	890,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100,000,000							100 %	100,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				650 laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	650 laporan	100,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	40,000,000							100 %	40,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 laporan 0 Laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 laporan 0 Laporan	40,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	480,250,000							100 %	750,000,000		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 laporan	480,250,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	12 laporan	750,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	%		%	70 %	225,000,000							70 %	280,000,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	orang		orang	200 orang	225,000,000							200 orang	280,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30 lembaga	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa-desa di Kecamatan Simpangkatis	30 lembaga	30,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 laporan	200,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa-desa di Kecamatan Simpangkatis	12 laporan	250,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	%	%	85 %	50,000,000							85 %	85,000,000			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Yang Ditindaklanjuti	laporan		laporan	60 laporan	50,000,000						60 laporan	85,000,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			500 laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	500 laporan	85,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	ersentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	%	%	100 %	105,000,000							100 %	155,000,000			
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	105,000,000						2 kegiatan	155,000,000			
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			200 orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	200 orang	125,000,000	Kecamatan Simpangkatis			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan			0 Dokumen 4 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	0 Dokumen 4 dokumen	30,000,000	Kecamatan Simpangkatis			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	70 %	100,000,000							70 %	265,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	bulan		bulan	12 bulan	100,000,000						12 bulan	265,000,000			
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Simpangkatis	10 dokumen	25,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Simpangkatis	12 dokumen	65,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa diwilayahnya				12 dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa se Kecamatan Simpangkatis	12 dokumen	25,000,000	Kecamatan Simpangkatis		
TOTAL						7,673,587,380								5,918,200,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01						KECAMATAN						6,252,578,000							5,192,540,000		
7 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%		%	81 %	4,569,273,000						3,252,540,000			
7 01 01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	40,000,000						40,000,000			
7 01 01	2.01 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen		30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	4 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Namang	
7 01 01	2.01 07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen		10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	4 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Namang	
7 01 01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP	%		%	100 %	2,117,306,000						1,819,772,000			
7 01 01	2.02 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang		2,102,306,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	15 Orang	1,804,772,000	Kecamatan Namang	
7 01 01	2.02 05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Namang	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Namang	
7 01 01	2.02 07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD			1 Laporan		5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Namang	
7 01 01	2.05					Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	%		%	100 %	127,280,000						120,000,000			
7 01 01	2.05 01					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit		5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Namang	1 Unit	0	Kecamatan Namang	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya				3 Paket	47,280,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Namang	3 Paket	45,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 OK	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Namang	12 OK	75,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	229,690,000							100 %	211,570,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Paket	45,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				12 Paket	41,090,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Paket	36,090,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Paket	21,880,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,600,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	30 Laporan	100,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	562,187,000							100 %	235,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	4 Unit	2,500,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Item	200,577,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	7 Item	2,500,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit	56,610,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	6 Unit	10,000,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	564,540,000							100 %	557,900,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	392,700,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Laporan	391,300,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	61,200,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Laporan	61,200,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	110,640,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	12 Laporan	105,400,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	928,270,000							100 %	268,298,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang			1 Unit	96,640,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	1 Unit	77,658,000	Kecamatan Namang			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya						Kelurahan									
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			13 Unit	170,230,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	13 Unit	125,344,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	630,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Namang	3 Unit	42,496,000	Kecamatan Namang			
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	31,400,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Namang	40 Unit	22,800,000	Kecamatan Namang			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	%	%	86 %	668,305,000							86 %	700,000,000			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100,000,000							100 %	100,000,000			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			650 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Sekecamatan Namang	650 Laporan	100,000,000	Kecamatan Namang			
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	Berkas		Berkas	850 Berkas	50,000,000						850 Berkas	50,000,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Sekecamatan Namang	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Namang			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perup	Urusan		Urusan	3 Urusan	518,305,000						3 Urusan	550,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13 Laporan	518,305,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Sekecamatan Namang	13 Laporan	550,000,000	Kecamatan Namang			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	%		%	86 %	330,000,000						86 %	285,000,000			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Orang		Orang	200 Orang	330,000,000						200 Orang	285,000,000			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				40 Lembaga	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi dan Lembaga SeKecamatan Namang	40 Lembaga	35,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	300,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi dan Lembaga SeKecamatan Namang	12 Laporan	250,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggarakan	%		%	85 %	100,000,000						85 %	475,000,000			
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	Laporan		Laporan	60 Laporan	100,000,000						60 Laporan	75,000,000			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundung-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundung-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				500 Laporan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	500 Laporan	75,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	%		%	86 %	210,000,000						86 %	140,000,000			
7 01 05 2.01	Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggarakan	Urusan		Urusan	2 Urusans	210,000,000						2 Urusans	140,000,000			
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	150,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	200 Orang	100,000,000	Kecamatan Namang			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	85 %	375,000,000							85 %	340,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	375,000,000						12 Bulan	340,000,000			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	12 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	16 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	3 Dokumen	0	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				42 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	42 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	8 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	3 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Namang		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Penegasan Batas Desa															
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				8 Dokumen	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	8 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Namang		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat SeKecamatan Namang	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Namang		
TOTAL						6,252,578,000								5,192,540,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01						KECAMATAN						5,053,600,000							4,780,840,000		
7 01 01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Atas Layanan Publik	%	%	87 %	3,414,375,000							3,030,840,000			
7 01 01 2.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di susun	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	37,500,000							40,000,000			
7 01 01 2.01 01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lubuk Besar	4 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.01 07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lubuk Besar	4 Laporan	10,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SKP	%	%	100 %	1,507,345,000							1,665,000,000			
7 01 01 2.02 01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang/Bulan	1,492,345,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di kantor Kecamatan Lubuk Besar	13 Orang/Bulan	1,650,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.02 05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.02 07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD			1 Laporan	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN di kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	100 %	75,350,000							110,000,000			
7 01 01 2.05 01						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin			1 Unit	4,500,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan PKK di Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Unit	0	Kecamatan Lubukbesar		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
	Pegawai							Semua Kelurahan									
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	20,850,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	ASN dan PKK di Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Paket	35,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan PKK di Kantor Kecamatan Lubuk Besar	8 Orang	75,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	218,580,000							100 %	258,600,000			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Paket	60,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Paket	60,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	2 Paket	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,600,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	74,980,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	20 Laporan	100,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	683,760,000							100 %	80,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Unit		0	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	383,760,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Lubuk Besar	3 Unit	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	555,920,000							100 %	522,240,000			
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	361,640,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN, PKK dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	12 Laporan	362,240,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	106,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN, PKK dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	12 Laporan	90,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	88,280,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN, PKK dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	12 Laporan	70,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	335,920,000							100 %	355,000,000			
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	64,990,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan Dinas dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Unit	75,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	181,480,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kendaraan Dinas dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	8 Unit	200,000,000	Kecamatan Lubukbesar			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Lubuk Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Kendaraan Dinas dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			25 Unit	39,450,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	Kendaraan Dinas dan Kantor Kecamatan Lubuk Besar	25 Unit	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	%	%	85 %	759,900,000							85 %	890,000,000			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	85 %	119,900,000							85 %	100,000,000			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			548 Laporan	119,900,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Percentase Koordinasi Penyelegaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	548 Laporan	100,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 02 2.02	Penyelegaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Jumlah Pelayanan dalam Satu Tahun	%	%	85 %	40,000,000							85 %	40,000,000			
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	1 Laporan	40,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perup	Urusan	Urusan	3 Urus	600,000,000							3 Urus	750,000,000			
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			6 Laporan	600,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perup	6 Laporan	750,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa	%	%	85 %	275,000,000							85 %	275,000,000			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam	Desa	Desa	9 Desa	275,000,000							9 Desa	275,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		pembangunan Desa															
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	6 Lembaga	25,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	250,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	3 Laporan	250,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	%	%	85 %	161,400,000								85 %	200,000,000		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	Laporan	Laporan	60 Laporan	161,400,000								60 Laporan	200,000,000		
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			100 Laporan	161,400,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	100 Laporan	200,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	%	%	85 %	126,500,000								85 %	155,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	Urusan	Urusan	2 Urusan	126,500,000								2 Urusan	155,000,000		
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			750 Orang	98,200,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	750 Orang	125,000,000	Kecamatan Lubukbesar			
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			1 Dokumen	28,300,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	%	85 %	316,425,000							85 %	230,000,000			
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	316,425,000						12 Bulan	230,000,000			
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5 dokumen	35,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	5 dokumen	0	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	9 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	115,750,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	9 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	9 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				5 Dokumen	31,225,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	5 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				9 Dokumen	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan Lubuk Besar	9 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Lubukbesar		
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa				9 Laporan	24,450,000	Kab. Bangka Tengah, Lubuk Besar,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Desa dan Masyarakat Se Kecamatan	9 Laporan	25,000,000	Kecamatan Lubukbesar		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Nasional	Daerah						
		di Wilayahnya						Semua Kelurahan				Lubuk Besar					
						TOTAL	5,053,600,000						4,780,840,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas																				
										Nasional	Daerah																			
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																														
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																														
8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan OPD	%	%	100 %	3,150,279,544						100 %	3,144,053,244															
8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan OPD	Persen	Persen	100 Persen	40,000,000						100 Persen	40,800,000															
8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Dokumen	30,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	10,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	bulan Persen	bulan Persen	12 bulan 100 Persen	2,321,336,194						12 bulan 100 Persen	2,251,091,550															
8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19 Orang/bulan	2,306,336,194					0	19 Orang/bulan	2,235,791,550	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			1 laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 laporan	10,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun			1 laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 laporan	5,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Cakupan jasa pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	bulan	12 bulan	77,440,000						12 bulan	98,940,000															
8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan			25 stel	22,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 stel	22,440,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			10 orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 orang	76,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				Cakupan jasa administrasi perangkat daerah	bulan	bulan	12 bulan	193,350,000						12 bulan	193,850,000															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	5,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	5,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	20,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	20,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 bulan 12 Paket	20,400,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan 12 Paket	20,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 bulan 12 Paket	15,300,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan 12 Paket	15,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			24 Dokumen	7,650,000			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	24 Dokumen	7,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	125,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Laporan	125,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan Persen	bulan Persen	12 bulan 100 Persen	110,539,800							12 bulan 100 Persen	110,540,000			
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia			12 bulan	14,280,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	14,280,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia			12 bulan	76,259,800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	76,260,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia			12 bulan	20,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	226,243,550						12 bulan	226,238,440			
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulanan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	102,334,650		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	98,824,740	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jmlh bln pelayann jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 bulan	40,800,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	40,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	83,108,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	86,613,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	181,370,000						12 bulan	222,593,254			
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				12 bulan	33,460,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	26,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Percentase Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD				12 bulan	104,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	182,863,254	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia				12 bulan	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	13,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara				12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	30,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan ormas, suku, agama dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	persen		persen	70 persen	1,329,753,000						70 persen	100,856,376			
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta HUT RI, Jumlah PHBN yang di peringati. Jumlah sekolah-sekolah yang mengikuti sosialisasi dan jumlah siswa yang mengikuti empat pilar berbangsa dan bernegara	kali		kali	6 kali	1,329,753,000					6 kali	100,856,376				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	1,329,753,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	100,856,376	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Parpol	Laporan		Laporan	9 Laporan	1,643,698,700						9 Laporan		0		
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Bantuan Keuangan Parpol	Laporan		Laporan	9 Laporan	1,643,698,700						9 Laporan		0		
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Laporan	1,643,698,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Laporan		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 04	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah kebijakan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang di susun	Dokumen ormas		Dokumen ormas	44 Dokumen 44 ormas	123,902,150						44 Dokumen 44 ormas		0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
		Persentase ormas yang aktif															
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan di bidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen	44 Dokumen	123,902,150							44 Dokumen	0			
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			44 Dokumen	123,902,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	44 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	Persen	Persen	1,90 Persen	106,380,700							1,90 Persen	106,380,900			
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	orang	orang	275 orang	106,380,700							275 orang	106,380,900			
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			275 Orang	106,380,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	275 Orang	106,380,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial di masyarakat	persen	persen	100 persen	99,162,050							100 persen	73,440,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Orang		Orang	40 Orang	99,162,050						40 Orang	73,440,000			
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	99,162,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Orang	73,440,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TOTAL						6,453,176,144									3,424,730,520		



**Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Raya By Pass Koba 33681**